GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR 38 TAHUN 2021

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka melaksanakan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional serta mewujudkan konsistensi dan sinergisitas antara perencanaan dan pelaksanaan pembangunan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota, perlu menetapkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2022 sebagai dokumen tahunan daerah;

b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 104 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Gubernur menetapkan RKPD Provinsi dengan Peraturan Gubernur setelah Rencana Kerja Pemerintah pusat ditetapkan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2022;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2022.

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
3. Gubernur adalah Gubernur Nusa Tenggara Timur.
4. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah perangkat daerah lingkup pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
5. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah yang selanjutnya disingkat Bappelitbangda adalah Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
6. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan kepala daerah.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur yang selanjutnya disebut APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
8. Menteri adalah Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia.
9. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah pada Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia.
10. Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2022 yang selanjutnya disebut RKPD Tahun 2022 adalah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun yaitu tahun 2022 yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2022 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2022.

Pasal 2

(1) Dengan Peraturan Gubernur ini ditetapkan RKPD Tahun 2022.

(2) Dokumen RKPD Tahun 2022 sebagaimana dimaksud pada ayat(1) terdiri dari 8 (delapan) bab sebagai berikut:

a. BAB I Pendahuluan;
b. BAB II Gambaran Umum Kondisi Daerah;
c. BAB III Kerangka Ekonomi Daerah dan Keuangan Daerah;
d. BAB IV Sasaran Dan Prioritas Pembangunan Daerah;
e. BAB V Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten/Kota;
f. BAB VI Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah;
g. BAB VII Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; dan
h. BAB VIII Penutup.

(3) Rincian lebih lanjut dari dokumen RKPD Tahun 2022 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 3

RKPD Tahun 2022 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam menyusun Kebijakan Umum Anggaran Prioritas Plafon Anggaran Sementara Tahun 2022 dan rancangan APBD tahun anggaran 2022.

Pasal 4

Pemerintah Daerah menyusun RKPD Tahun 2022 dengan berpedoman pada RPJMD perubahan tahun 2018-2023.

Pasal 5

(1) Pimpinan PD harus menyesuaikan rencana kerja PD masing-masing dengan RKPD Tahun 2022.
(2) Pimpinan PD harus melakukan pengendalian, pengawasan dan evaluasi untuk menjaga konsistensi RKPD Tahun 2022 dengan rencana kerja PD.
(3) Hasil pengendalian, pengawasan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disampaikan kepada Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah untuk dijadikan bahan masukan bagi perencanaan selanjutnya.

Pasal 6

(1) Gubernur menyampaikan Peraturan Gubernur ini kepada Menteri melalui Direktur Jenderal paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah ditetapkan.
(2) Peraturan Gubernur yang disampaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digunakan sebagai bahan evaluasi dan sinkronisasi rancangan APBD Tahun Anggaran 2022 oleh Menteri.

Pasal 7

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 30 JUNI 2021

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

VIKTOR BUNGTILU LAISKODAT

Diundangkan di Kupang
pada tanggal 30 JUNI 2021

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR,

BENEDIKTUS POLO MAING

BERITA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2021 NOMOR 039

LAMPIRAN : **PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**
NOMOR : 38 TAHUN 2021
TANGGAL : 30 Juni 2021

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN 2022

DAFTAR ISI

Daftar Isi i
Daftar Tabel iv
Daftar Gambar vii

BAB I PENDAHULUAN I-1
1.1. Latar Belakang I-1
1.2. Dasar Hukum I-4
1.3 Hubungan Antar Dokumen I-6
1.4 Maksud Dan Tujuan I-7
1.4.1 Maksud I-7
1.4.2 Tujuan I-7
1.5. Sistematika Penulisan I-8

BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH II-1
2.1. Geografi dan Demografi II-1
2.1.1. Geografis dan Wilayah Administratif II-1
2.1.1.1 Wilayah Rawan Bencana II-2
2.1.1.2 Demografi Wilayah II-4
2.1.2. Potensi Pengembangan Wilayah II-5
2.1.2.1 Kawasan Lindung II-5
2.1.2.2 Kawasan Budidaya II-7
2.2 Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat II-8
2.2.1 Pertumbuhan PDRB II-8
2.2.2 Laju Inflasi II-12
2.2.3 PDRB Per Kapita II-14
2.2.4 Indeks Gini (Gini Ratio) II-15
2.2.5 Indeks Pembangunan Manusia II-16
2.2.6 Pengeluaran per Kapita II-17
2.2.7 Usia Harapan Hidup II-18
2.2.8 Angka Kemiskinan II-19
2.2.9 Persentase Balita Gizi Buruk dan Gizi Kurang II-21
2.2.10 Tingkat Pengangguran terbuka II-22
2.2.11 Opini BPK Atas Laporan Keuangan Daerah II-23
2.2.12 Skor Pola Pangan Harapan II-23
2.3 Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD Sampai Tahun Berjalan dan Realisasi RPJMD II-24
2.3.1 Capaian Kinerja Makro Daerah tahun 2020 ..... II-24

2.3.2 Capaian Pelaksanaan Program dan Kegiatan masing-masing Perangkat Daerah II-25
2.4 Permasalahan Pembangunan Daerah II-55
2.4.1 Permasalahan daerah yang berhubungan dengan prioritas dan sasaran pembangunan daerah II-55
2.4.2 Identifikasi Permasalahan Penyelengaraan Pemerintah Daerah .. II-57
2.4.2.1 Aspek Kesejahteraan Masyarakat II-57
2.4.2.2 Aspek Pelayanan Umum II-57
2.4.2.3 Aspek Daya Saing Daerah II-61
2.4.3 Dampak Covid–19..... II-62

BAB III KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH III-1
3.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah III-1
3.1.1 Pertumbuhan Ekonomi Tahun 2020. ..... III-1
3.1.2.Laju Inflasi III-5
3.1.3 Penduduk Miskin..... III-6
3.1.4 Tingkat Pengangguran Terbuka III-7
3.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah..... III-8
3.2.1. Proyeksi Keuangan Daerah dan Kerangka Pendanaan III-8
3.2.1.1. Kinerja Pendapatan Daerah sampai dengan Tahun 2020 . III-8
3.2.1.2. Rata-rata Pertumbuhan Pendapatan..... III-9
3.2.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah III-12
3.2.2.1. Arah Kebijakan Pendapatan Daerah III-12
3.2.2.2. Arah Kebijakan Belanja Daerah III-16
3.2.2.3. Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah III-19

BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH..... IV-1
4.1. Arahan RPJMN 2020-2024 dan RPJMD 2018-2023 ..... IV-1
4.1.1 Arah Kebijakan RPJMN 2020-2024 ..... IV-1
4.1.2 Arah Kebijakan RPJMN 2020-2024 untuk wilayah Nusa Tenggara IV-4
4.1.3 Arahan RPJMD Perubahan Tahun 2018-2023 ..... IV-8
4.2. Tujuan dan Sasaran Pembangunan..... IV-10
4.3. Prioritas Pembangunan Daerah..... IV-14
4.3.1. Tema Pembangunan 2022..... IV-14
4.3.1.1. Tema dan Prioritas Nasional RKP Tahun 2022..... IV-14
4.3.1.2. Tema RKPD Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2022 IV-22
4.3.2. Prioritas Daerah RKPD 2022 ..... IV-23
4.3.3. Prioritas Lokasi Pembangunan RKPD 2022..... IV-45

4.4. Inovasi Daerah IV-48
4.4.1 Desa/Kelurahan Model Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga IV-51
4.4.2 Pariwisata Estate IV-55
4.4.3 Aplikasi SI MANDATARIS (Sistem Informasi Data Strategis) IV-59
4.4.4 Pengembangan Sapi Wagyu IV-62
4.5 Strategi Menghadapi Covid-19 ..... IV-64
4.6 Penguatan Sistem Kesehatan Daerah IV-65

BAB V ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KABUPATEN/KOTA V-1
5.1. Laju Pertumbuhan Ekonomi V-3
5.2 Penduduk Miskin V-6
5.3. Tingkat Pengangguran Terbuka V-9
5.4 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) V-11
5.5 Gini Rasio V-15
5.6 Fokus Pembangunan V-16
5.6.1 Penguatan Sistem Kesehatan Daerah V-16
5.6.2 Eradikasi Stunting V-17

BAB VI RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH VI-1

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH VII-1

BAB VIII PENUTUP VIII-1

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Kepadatan Penduduk per Kabupaten/Kota di Provinsi NTT tahun 2018-2020 ..... II-4
Tabel 2.2 Kawasan Lindung di Provinsi NTT II-5
Tabel 2.3 PDRB ADHB-ADHK Menurut Lapangan Usaha di Provinsi NTT Tahun 2018-2020 ..... II-9
Tabel 2.4 Persentase PDRB ADHK Menurut Lapangan Usaha di Provinsi NTT Tahun 2018–2020 ..... II-10
Tabel 2.5 Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) ADHK 2010 Menurut Lapangan Usaha di Provinsi NTT (Persen) Tahun 2018 – 2020 ..... II-11
Tabel 2.6 Indeks Harga Konsumen dan Laju Inflasi Nusa Tenggara Timur Menurut Kelompok Pengeluaran (2012=100) , (2018=100) Tahun 2017–2020 ..... II-13
Tabel 2.7 PDRB dan PDRB Per Kapita Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2017 – 2019 ..... II-15
Tabel 2.8 Indeks Gini di Provinsi NTT Tahun 2013-2020 ..... II-15
Tabel 2.9 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Provinsi NTT Menurut Komponen, Tahun 2015-2020 ..... II-16
Tabel 2.10 Jumlah Pengeluaran per Kapita di Provinsi NTT Tahun 2015-2019 .. II-17
Tabel 2.11 Umur Harapan Hidup di Provinsi NTT Tahun 2015-2020 ..... II-18
Tabel 2.12 Indikator Kemiskinan di Provinsi NTT Tahun 2016-2020 ..... II-21
Tabel 2.13 Persentase Gizi Buruk dan Gizi Kurang di NTT Tahun 2013-2020 .... II-21
Tabel 2.14 Persentase Baduta dan Balita Stunting, Wasting dan Underweight di NTT Tahun 2016-2020 ..... II-22
Tabel 2.15 Opini BPK Atas Laporan Keuangan Daerah di Provinsi NTT Tahun 2013-2018 ..... II-23
Tabel 2.16 Skor Pola Pangan Harapan di Provinsi NTT Tahun 2013-2016 ..... II-24
Tabel 2.17 Pencapaian Kinerja Makro Daerah Tahun 2018-2020 ..... II-25
Tabel 2.18 Capaian Realisasi Anggaran menurut Sasaran dan 5 (lima) Misi Pembangunan Provinsi NTT Tahun 2020 ..... II-32
Tabel 2.19 Capaian Target Kinerja Program dan Kegiatan RKPD Tahun 2020 sesuai dengan Tujuan dan Sasaran RPJMD Provinsi NTT Tahun 2018-2023 ..... II-37
Tabel 3.1 Pertumbuhan dan Pangsa PDRB NTT berdasarkan Pengeluaran..... III-3
Tabel 3.2 Inflasi di NTT berdasarkan kelompok komoditas III-5
Tabel 3.3 Persentase Realisasi Pendapatan Daerah Tahun 2017-2020..... III-8

Tabel 3.4	Rata-rata Pertumbuhan Realisasi Pendapatan Daerah 2017-2020	III-9
Tabel 3.5	Proporsi Realisasi Pendapatan Asli Daerah Terhadap Pendapatan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2017-2020	III-10
Tabel 3.6	Pertumbuhan Realisasi Pendapatan Asli Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2017- 2020	III-10
Tabel 3.7	Kinerja Belanja Daerah 2017 – 2020	III-11
Tabel 3.8	Rata–Rata Proporsi Belanja Daerah 2017-2020	III-12
Tabel 3.9	Rata–Rata Pertumbuhan Belanja Daerah 2018–2020	III-12
Tabel 3.10	Realisasi Pendapatan Daerah TA.2017-2020	III-15
Tabel 3.11	Target, Proyeksi dan Prakiraan Maju Pendapatan Daerah TA.2021 – 2023	III-15
Tabel 3.12	Realisasi Belanja Daerah Provinsi NTT Tahun 2017-2020	III-20
Tabel 3.13	Target, Proyeksi dan Prakiraan Maju 2021 Provinsi NTT Tahun 2021 – 2023 (2021 pakai angka APBD 2021)	III-20
Tabel 3.14	Realisasi Belanja Daerah Provinsi NTT Tahun 2017-2020	III-21
Tabel 3.15	Target, Proyeksi dan Prakiraan Maju Belanja Daerah Provinsi NTT Tahun 2021-2023	III-21
Tabel 4.1	Indikator Makro Pembangunan Nasional	IV-3
Tabel 4.2	Koridor Pembangunan di Provinsi Nusa Tenggara Timur 2020-2024	IV-7
Tabel 4.3	Pengelompokan Kabupaten yang Belum Masuk dalam Koridor Pembangunan RPJMN 2020-2024	IV-7
Tabel 4.4	Indikator Kinerja Utama Provinsi NTT 2021-2023	IV-9
Tabel 4.5	Target Indikator Makro Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2022	IV-11
Tabel 4.6	Keselarasan Misi, Tujuan dan Sasaran RPJMD Perubahan Provinsi NTT untuk Tahun 2022	IV-11
Tabel 4.7	Realisasi dan Target Indikator RKP 2020, 2021 dan 2022 untuk NTT	IV-21
Tabel 4.8	Lokasi Prioritas sesuai Strategi Pertumbuhan dan Pemerataan	IV-47
Tabel 5.1	Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi, ICOR dan Kebutuhan Investasi Kabupaten/Kota Berdasarkan Wilayah Pengembangan dan Provinsi NTT	V-5
Tabel 5.2.	Target Penurunan Persentase Penduduk Miskin per Kabupaten/Kota se-NTT Tahun 2021-2022	V-8
Tabel 5.3	Arahan Penurunan TPT bagi Kab/Kota se-NTT Tahun rencana 2022	V-10
Tabel 5.4	Target Capaian Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten/Kota se Nusa Tenggara Timur, tahun 2021 dan 2022	V-13

Tabel 5.5 Target Penurunan Stunting Per Kabupaten/Kota Tahun 2022 & Tahun 2023 ..... V-18
Tabel 6.1 Pagu Indikatif Perangkat Daerah Tahun 2022..... VI-10
Tabel 6.2 Persandingan RPJMD dan Rancangan RKPD Tahun 2022 Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur VI-37
Tabel 7.1 Indikator Kinerja Utama (IKU) Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2022 ..... VII-1
Tabel 7.2 Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Tahun 2022 ..... VII-2
Tabel 7.3 Indikator Kinerja Urusan Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2022 ..... VII-6

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Substansi Muatan RKPD Tahun 2022 ..... I-2
Gambar 1.2 Bagan Alir Keterkaitan RKPD dengan dokumen Perencanaan Lainnya I-7
Gambar 2.1 Peta Provinsi NTT II-1
Gambar 2.2 Jumlah Kejadian Bencana dan Korban Jiwa di NTT 1950-2017 ..... II-2
Gambar 2.3 Peta Kepadatan Penduduk NTT II-5
Gambar 3.1 Presentase Realisasi Belanja Langsung dan Tidak Langsung Tahun 2017 - 2020 ..... III-11
Gambar 4.1 Arahan Presiden, Nawacita dan 7 Agenda/Prioritas Nasional IV-3
Gambar 4.2 Peta Pengembangan Wilayah Nusa Tenggara IV-6
Gambar 4.3 Makna NTT Bangkit dan NTT Sejahtera IV-18
Gambar 4.4 Arah Kebijakan sebagai Pedoman Penentuan Tema RKPD IV-22
Gambar 4.5 Peta Sebaran Stunting per kabupaten/kota se-NTT IV-48
Gambar 4.6 Peta Kemiskinan per Kabupaten/Kota se-NTT IV-48
Gambar 4.7. Skor Indikator Satuan Inovasi Daerah NTT Tahun 2020 ..... IV-49
Gambar 4.8. Inovasi Pemda NTT berdasarkan Bentuk Inovasi IV-50
Gambar 4.9. Inovasi Penda NTT Berdasarkan jenis Inovasi IV-50
Gambar 4.10. Inovasi Pemda NTT Berdasarkan Inisiator Inovasi IV-51
Gambar 4.11. Model Desa/Kelurahan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga IV-52
Gambar 4.12. Pengembangan Pariwisata Estate NTT IV-56
Gambar 5.1 Perkembangan Kemiskinan di NTT Maret 2011- September 2020 ..... V-7
Gambar 5.2 Skema Intervensi Penurunan Kemiskinan dan Stunting V-17
Gambar 5.3 Inovasi Konvergensi Stunting di NTT V-18



BAB I
PENDAHULUAN

BAB I PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2022 merupakan dokumen perencanaan tahunan yang diawali dengan penyusunan Rancangan awal RKPD. Penyusunan Rancangan Awal RKPD berpedoman pada RPJMD Perubahan Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018-2023, rancangan awal RKP (Rencana Kerja Pemerintah), program strategis nasional, dan pedoman penyusunan RKPD.

RKPD Tahun 2022 ini merupakan tahun keempat pelaksanaan RPJMD 2018-2023. RPJMD 2018-2023 dan RPJMD-P 2018-2023 merupakan dokumen rencana jangka menengah periode IV dari RPJPD 2005 – 2025. Sebagai periode akhir RPJPD, RPJMD perubahan 2018-2023 yang dijabarkan dalam RKPD 2022 sudah lebih menitikberatkan pada kualitas pembangunan yang dilaksanakan. RKPD Tahun 2022 juga harus dapat memastikan tercapainya indikator dan target RPJPD 2005-2025 dengan memastikan pelaksanaan strategi dan skema pembangunan yang tepat. Untuk itu, perlu dipetakan potensi dan hambatan yang mungkin dihadapi.

Penyusunan RKPD 2022 disusun dalam kondisi masa pandemik Covid 19 yang sedang melanda dunia dan Indonesia. Kondisi ini telah berdampak pada capaian kinerja tahun 2020 dan 2021 yang tentunya akan mempengaruhi penetapan target kinerja tahun 2022. Begitu juga perubahan aturan penyusunan yang baru ditetapkan, menjadi tantangan tersendiri dalam penyusunan RKPD 2022. Karena itu, perlu dilakukan penyesuaian terhadap dokumen ini.

RKPD 2022 selain berpedoman pada RPJMD perubahan tahun 2018-2023 juga berpedoman pada RKP 2022, sekaligus menjadi pedoman bagi penyusunan RKPD Kabupaten/Kota tahun 2022, khususnya dalam memberikan arahan pembangunan bagi kabupaten/kota se-Provinsi Nusa Tenggara Timur. Hal ini dimaksudkan agar sinkronisasi perencanaan antara pusat, provinsi dan kabupaten/kota dapat diwujudkan. Muatan RKPD Tahun 2022 sebagaimana terlihat pada Gambar 1.1 berikut.



Gambar 1.1
Substansi Muatan RKPD Tahun 2022

RPJPD 2005-2025 mengusung visi pembangunan daerah Nusa Tenggara Timur 2005-2025 Yaitu :**"NUSA TENGGARA TIMUR YANG MAJU, MANDIRI, ADIL DAN MAKMUR DALAM BINGKAI NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA".** Visi ini kemudian dijabarkan ke dalam 4 (empat) periode pembangunan jangka menengah, dimana periode 2018-2023 merupakan periode pembangunan tahap ke-4, atau tahap akhir RPJPD 2005-2025. Arah kebijakan periode keempat adalah : **Percepatan pembangunan daerah di berbagai bidang dengan menekankan pada terbangunnya perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan produk daerah yang kompetitif berdaya saing tinggi didukung oleh SDM berkualitas**.

Dalam konteks pencapaian visi dan misi RPJPD 2005-2025 sekaligus mengacu pada tema RKP Tahun 2022 yaitu : **Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Struktural** dan diarahkan untuk mewujudkan **NTT Bangkit**, yang diukur dari 1) kualitas SDM, tingkat kemakmuran, kemampuan berusaha serta menurunnya tingkat kemiskanan masyarakat NTT, serta 2) Mampu mewujudkan kehidupan sejajar dan sederajat dengan daerah lain dengan mengandalkan pada kemampuan dan kekuatan sendiri, dan mewujudkan **NTT Sejahtera,** yang diukur dari 1) Terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat baik sandang, pangan dan papan, serta 2) Tidak ada pembatasan/ diskriminasi dalam bentuk apapun, baik antar individu,

gender, maupun wilayah dengan pendekatan pembangunan berbasis keadilan sosial

Upaya mewujudkan Nusa Tenggara Timur Bangkit menuju Sejahtera ini disinergikan dengan prioritas pembangunan nasional dalam RKP 2022 sebagaimana yang diarahkan RPJMN 2020-2024.

Pendekatan Penyusunan RKPD yang berorientasi pada proses dilakukan dengan pendekatan politik, teknokratik, *top down, bottom up,* dan partisipatif sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Pendekatan politik digunakan dalam menyusun RKPD dengan memperhatikan berbagai masukan dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagai hasil penjaringan aspirasi masyarakat, yang berasal dari hasil kunjungan kerja, dan reses. Pendekatan teknokratis dalam penyusuan RKPD menggunakan metode dan logika berpikir ilmiah dalam menganalis masalah secara sistematik dengan data-data yang akurat. Pendekatan top down dilakukan dengan mengacu pada RKP 2022 dan RPJMN 2020-2024, sedangkan pendekatan *bottom up* dilakukan dengan mengacu pada proses Musrenbang yang telah berlangsung mulai dari tingkat Desa/Kelurahan, kecamatan dan Kabupaten/Kota, dan Provinsi. Pendekatan partisipatif adalah pendekatan yang berbasis rakyat, artinya seluruh prioritas pembangunan yang akan dilaksanakan telah melalui tahapan konsultasi dengan masyarakat, para tokoh masyarakat serta organisasi masyarakat dengan telah dilakukannya konsultasi publik dan rangkaian tahapan penyusunan RKPD.

Pendekatan Penyusunan RKPD yang berorientasi pada substansi menggunakan pendekatan Tematik, Holistik, Integratif dan Spasial sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 9 Permendagri Nomor 86 Tahun 2017.

Penyusunan RKPD Tahun 2022 masih dihadapkan pada situasi yang perlu mendapat perhatian, antara lain ; *pertama,* ditetapkannya Peraturan Daerah Provinsi NTT Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi NTT Nomor 4 Tahun 2019 tentang RPJMD Provinsi NTT Tahun 2018-2023 yang berakibat harus dilakukannya penyesuaian terhadap kodefikasi dan nomenklatur program dan kegiatan sesuai dengan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 dan Keputusan Menteri Dalam Negeri RI

Nomor 050-378 Tahun 2020 dan penyesuaian Struktur Organisasi Perangkat Daerah sesuai Peraturan Daerah Provinsi NTT Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi NTT Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi NTT. Hal ini tentu saja akan dilakukan, sesuai dengan ketentuan dan tahapan yang telah ditetapkan. *Kedua*, Pandemi Covid 19 yang masih terus melanda seluruh dunia, termasuk di Nusa Tenggara Timur telah membawa keresahan dan dampak nyata, tidak hanya terkait masalah kesehatan, namun juga pada berbagai aspek baik sosial maupun ekonomi. Dengan demikian, dukungan anggaran untuk pemulihan ekonomi dan penanganan sektor-sektor lainnya akibat pembatasan kegiatan, PHK, dan dampak ikutan lainnya akibat penyebaran Virus Corona 19 pada berbagai aspek kehidupan masyarakat pada Tahun 2022 sangat diperlukan.

1.2. DASAR HUKUM

Dasar hukum penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun 2022 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005–2025;
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;

11. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Daerah dan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022;
19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi Dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
20. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2005-2025;
21. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2010-2030;
22. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018-2023 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1

Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018-2023;

23. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

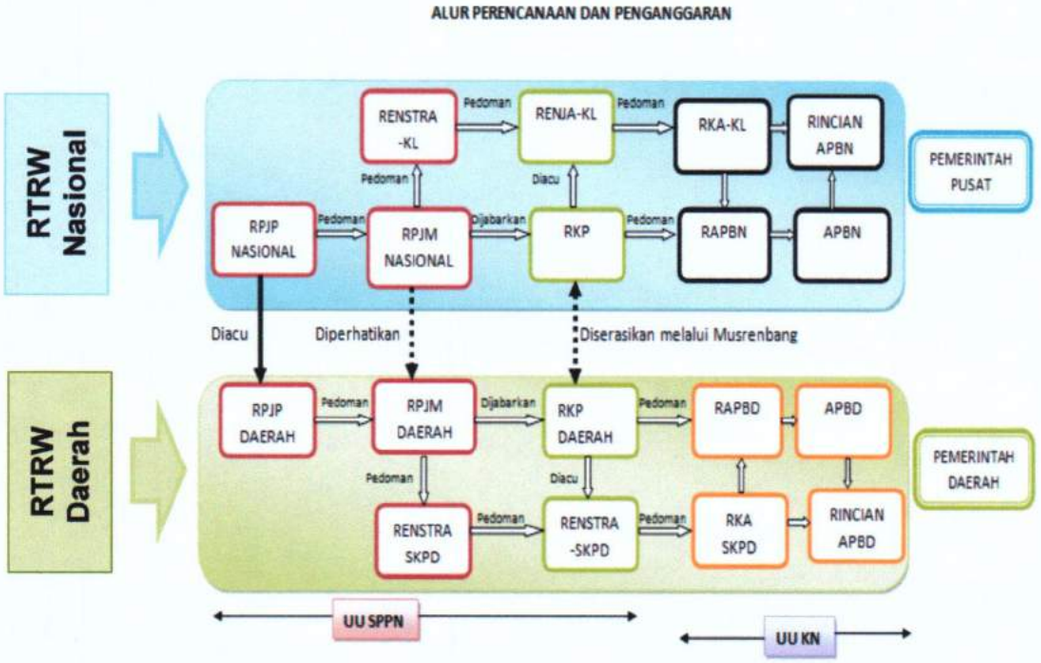
1.3. HUBUNGAN ANTAR DOKUMEN

Dalam konteks pembangunan berdimensi kewilayahan, dokumen perencanaan yang bersifat spasial dipadukan dengan dokumen yang bersifat a-spasial. Secara regulasi, penyusunan RKPD Tahun 2022 berpedoman pada Dokumen RPJMD Perubahan Provinsi NTT Tahun 2018-2023, RKP Tahun 2022, Program Strategis Nasional dan Pedoman Penyusunan RKPD Tahun 2022. Kemudian, dalam kaitannya dengan keruangan, RKPD Tahun 2022 disinergikan dengan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2010-2030, dengan tetap menjaga keselarasan dengan terhadap RTRW Nasional dan produk rencana tata ruang lainnya baik di tingkat nasional maupun daerah (Provinsi maupun Kabupaten/Kota).

RKPD Tahun 2022 selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan dokumen KUA dan PPAS Provinsi NTT Tahun 2022. Dokumen KUA dan PPAS merupakan dasar untuk penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Perangkat Daerah TA.2022 dan penyusunan RAPBD Provinsi Nusa Tenggara Timur TA. 2022. Dengan demikian, dokumen RKPD ini menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam tahapan penyusunan APBD Provinsi NTT TA 2022.

Keterkaitan antar dokumen perencanaan dalam sistem perencanaan pembangunan dan sistem keuangan terlihat pada Gambar 1.2 berikut.

Bagan Alir Keterkaitan RKPD dengan dokumen Perencanaan Lainnya



Gambar 1.2
Bagan Alir Keterkaitan RKPD dengan dokumen Perencanaan Lainnya

1.4. MAKSUD DAN TUJUAN

1.4.1. Maksud

Maksud penyusunan RKPD Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2022 adalah sebagai pedoman bagi seluruh pemangku kepentingan dalam menyelenggarakan pembangunan daerah lingkup Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2022, khususnya bagi Pemerintah Kabupaten/Kota dan Provinsi. RKPD ini menjadi dasar sinkronisasi perencanaan dan penganggaran yang selanjutnya digunakan sebagai bahan evaluasi dan dasar penyusunan rancangan KUA dan PPAS dan bahan sinkronisasi penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2022.

1.4.2. Tujuan

Tujuan RKPD Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2022 adalah:

1) Menjadi acuan bagi DPRD dan Pemerintah Daerah dalam penyusunan dan pembahasan Kebijakan Umum APBD (KUA) Tahun 2021, Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun 2022 dan RAPBD TA. 2022;
2) Acuan menyelaraskan perencanaan program dan penganggaran;

3) Memperkuat koordinasi, integrasi, sinergi dan sinkronisasi pembangunan baik antar perangkat daerah, serta antara Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Pemerintah Pusat;
4) Meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dalam pemanfaatan sumber daya dan keuangan publik.

1.5. SISTEMATIKA PENULISAN

RKPD Tahun 2022 ini disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

Bab I. Pendahuluan.

Bab ini menguraikan tentang gambaran umum penyusunan RKPD yang terdiri dari latar belakang, dasar hukum, hubungan antar dokumen, maksud dan tujuan penyusunan dokumen RKPD serta sistematika dokumen RKPD.

Bab II. Gambaran Umum Kondisi Daerah.

Bab ini menguraikan tentang gambaran umum kondisi daerah, evaluasi pencapaian kinerja pembangunan daerah (seperti indikator makro pembangunan daerah), evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan RKPD Tahun Anggaran 2020 yang mengacu pada Dokumen RPJMD Perubahan Provinsi NTT Tahun 2018-2023.

Bab III. Kerangka Ekonomi Dan Keuangan Daerah

Bab ini menguraikan tentang kondisi ekonomi daerah tahun lalu dan perkiraan tahun berjalan, yang antara lain mencakup: indikator pertumbuhan ekonomi daerah, sumber-sumber pendapatan dengan perincian sumber pendapatan tahun lalu dan satu tahun sebelumnya, tahun berjalan, tahun rencana dan satu tahun setelah tahun rencana sebagai perkiraan maju pendapatan daerah dan arah kebijakan ekonomi dan keuangan daerah (pendapatan, belanja dan pembiayaan).

Bab IV. Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah

Bab ini menguraikan tentang Arah kebijakan dan prioritas Pembangunan Nasional (RPJMN) dan Arah Kebijakan, prioritas dan sasaran Pembangunan Provinsi NTT (RPJMD) sebagai pedoman dalam menyusun perencanaan pembangunan kabupaten/kota Tahun 2022.

Bab V. Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten/Kota

Bab ini menguraikan tentang arahan kebijakan pembangunan kabupaten/kota yang ditetapkan oleh provinsi, yang menjadi pedoman bagi kabupaten/kota dalam menyusun perencanaan pembangunan kabupaten/kota tahun 2022.

Bab VI. Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah

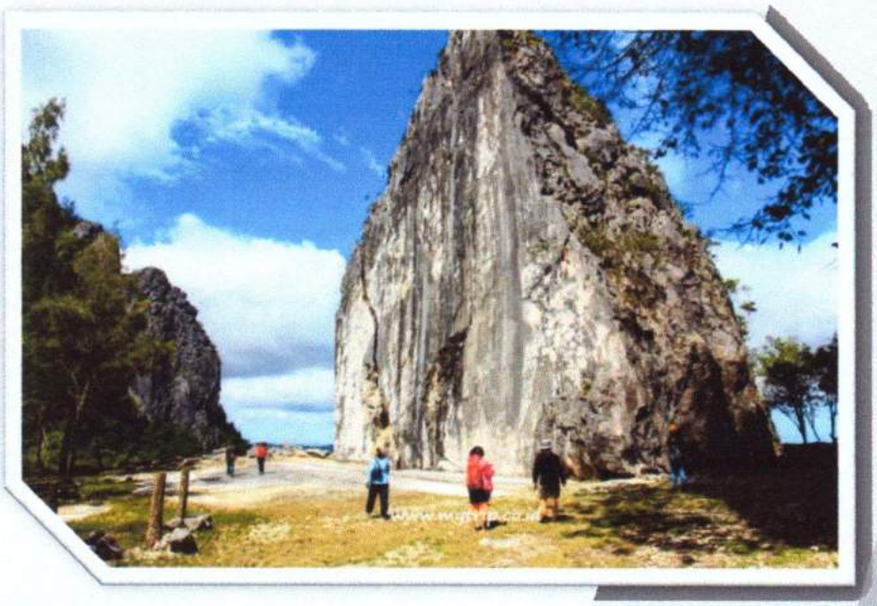
Bab ini menguraikan tentang rencana program dan kegiatan prioritas daerah yang disusun berdasarkan evaluasi pembangunan tahunan, kedudukan tahun rencana (RKPD) dan capaian kinerja yang direncanakan pada RPJMD Perubahan Tahun 2018-2023.

Bab VII. Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Bab ini menguraikan tentang indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagai panduan dalam pencapaian kinerja tahunan.

Bab VIII. Penutup

Bab ini menguraikan tentang arahan Gubernur, penegasan dalam menerapkan RKPD, serta arahan bagi Perangkat Daerah dalam mempedomani RKPD Tahun 2022 sebagai acuan untuk penyusunan dokumen Renja Perangkat Daerah.



BAB II
GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

2.1 GEOGRAFI DAN DEMOGRAFI

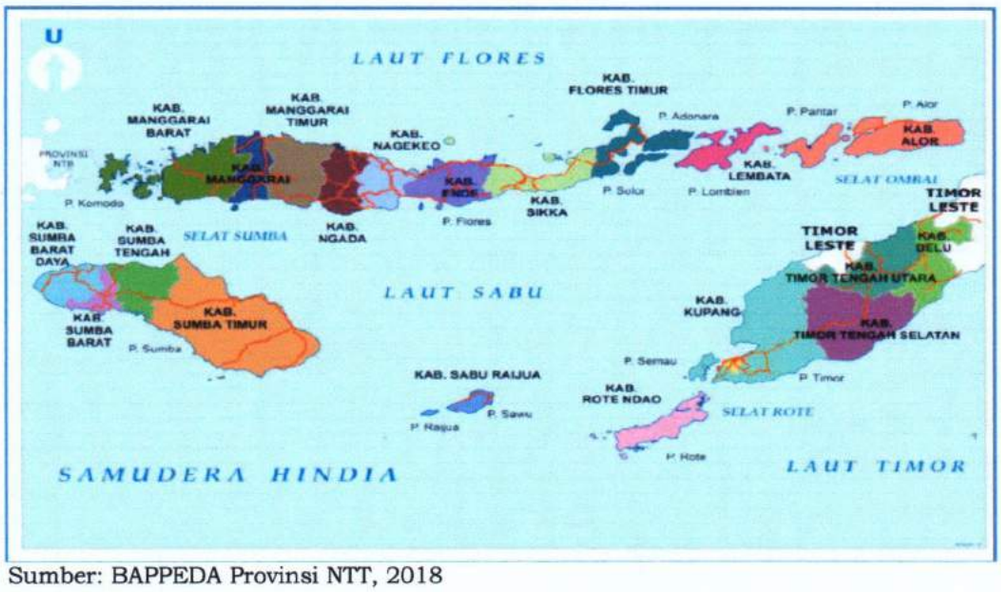
2.1.1 Geografis dan Wilayah Administratif

Nusa Tenggara Timur (NTT) merupakan Provinsi kepulauan yang mempunyai 1.192 pulau, di mana 432 pulau mempunyai nama dan 44 pulau berpenghuni. Luas wilayah 2.47.931,54 km^2 yang terdiri dari wilayah daratanseluas 47.931,54 km2 dan wilayah lautan seluas 200.000 km^2. Secara geografis terletak di sebelah Selatan Khatulistiwa pada posisi 8^0 –12^0 Lintang Selatan dan 118^0 – 125^0 Bujur Timur.

NTT merupakan wilayah kepulauan yang disatukan Laut Sawu. Sebagai wilayah terdepan di Selatan Indonesia, posisinya sangat strategis karena berbatasan darat dengan Timor Leste (sebelah Timur) dan berbatasan laut dengan Australia (sebelah Selatan, Samudera Hindia/Lautan Indonesia). Sementara di sebelah Barat berbatasan dengan Provinsi Nusa Tenggara Barat dan sebelah Utara dengan Laut Flores.

Secara administratif wilayah NTT terbagi atas 21 Kabupaten dan 1 Kota dengan sebaran wilayah administratif seperti disampaikan pada gambar berikut.

Gambar 2.1
Peta Provinsi NTT



Sumber: BAPPEDA Provinsi NTT, 2018

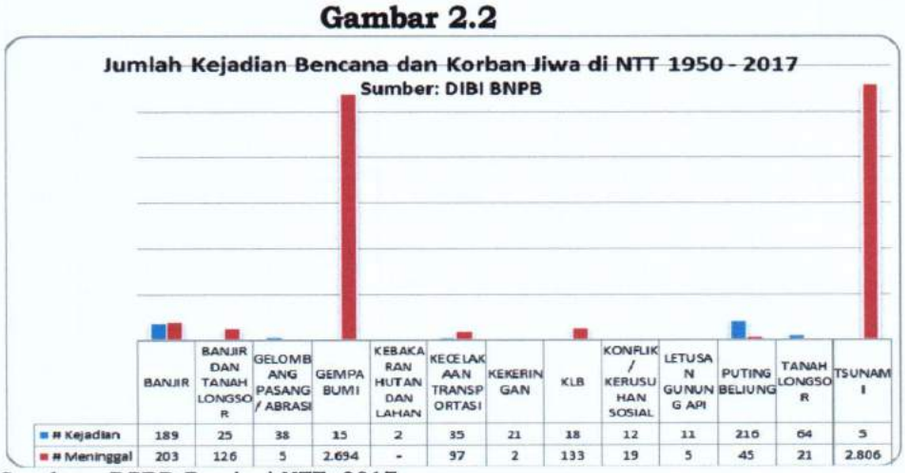
Wilayah administratif terluas adalah Kabupaten Sumba Timur 7.005 km² (14,61 persen) dan Kabupaten Kupang dengan luas 5.525,83 km² (11,53 persen), sedangkan wilayah terkecil adalah Kota Kupang dengan luas 180,27 km² (0,38 persen) dan Kabupaten Sabu Raijua dengan luas 460,47 km² (0,96 persen).

2.1.1.1 Wilayah Rawan Bencana

NTT memiliki risiko bencana yang tinggi untuk jenis-jenis bencana geologis (gempa, tsunami, letusan gunung api dan longsor) serta hidrometeorologis (kekeringan, banjir, kebakaran lahan dan hutan). Risiko bencana geologis yang tinggi terutama terdapat di daerah dengan patahan aktif, seperti Flores, Lembata, Kepulauan Alor, dan bagian barat Pulau Sumba. Di pulau Flores dan Lembata saja, terdapat 13 gunung berapi aktif, dan satu di Pulau Pantar, Kabupaten Alor. Tsunami di Sikka tahun 1992 masih tercatat sebagai bencana geologis yang paling banyak korban jiwa, yakni lebih dari 2.000 orang meninggal.

Sementara risiko bencana *hidrometereologis* secara merata dialami oleh seluruh wilayah di NTT, terutama di daerah-daerah lereng curam, sekitar sungai dan juga daerah dengan curah hujan rendah seperti di Sabu Raijua, bagian selatan TTS, dan sebagainya. Dalam 50 tahun terakhir, 75% dari bencana di NTT adalah bencana *hidrometereologis*, dengan kejadian yang paling banyak menimbulkan korban jiwa adalah banjir di Sungai Benanain (Kabupaten Malaka, dulu Belu) pada tahun 2000 yang menyebabkan lebih dari 150 orang meninggal dunia.

Gambar 2.2



	BANJIR	BANJIR DAN TANAH LONGSOR	GELOMBANG PASANG / ABRASI	GEMPA BUMI	KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN	KECELAKAAN TRANSPORTASI	KEKERINGAN	KLB	KONFLIK / KERUSUHAN SOSIAL	LETUSAN GUNUNG API	PUTING BELIUNG	TANAH LONGSOR	TSUNAMI
# Kejadian	189	25	38	15	2	35	21	18	12	11	216	64	5
# Meninggal	203	126	5	2.694	-	97	2	133	19	5	45	21	2.806

Sumber : DPBD Provinsi NTT, 2017

Bencana hidrometereologis merupakan jenis bencana yang dipengaruhi oleh kondisi iklim. Oleh karena itu, perubahan iklim, selain membawa akibat-akibat langsung seperti kenaikan muka dan suhu air laut, juga menyebabkan perubahan pola bencana hidrometereologis. Ini bisa berdampak pada makin panjangnya kekeringan ataupun makin seringnya terjadi banjir maupun kebakaran hutan dan lahan.

Salah satu penyebab terjadinya perubahan iklim adalah naiknya suhu udara, dimana panas matahari yang diserap bumi tidak dapat dilepaskan kembali ke atmosfer sehingga terpantul kembali ke bumi. Peningkatan emisi gas rumah kaca (GRK) disebabkan oleh kegiatan manusia (antropologenic) yang menghasilkan emisi terlalu banyak seperti CO2, N2O dan CH2. Adapun sektor – sektor yang berkontribusi di dalam peningkatan emisi GRK berasal dari 4 sektor, yaitu :

1) Sektor Berbasis Lahan, seperti : Illegal logging, kebakaran hutan, pupuk organik, kotoran hewan (manure) dan pestisida.
2) Sektor Energi, seperti : Penggunaan bahan bakar fosil, transportasi dan industri.
3) Sektor Limbah, seperti : Pembakaran sampah padat dan limbah B3.
4) Sektor Kelautan dan Perikanan, seperti : Penebangan mangrove dan kerusakan padang lamun.

Selain berdampak pada kekerapan dan intensitas bencana-bencana hidrometereologis, menghangatnya suhu juga mengubah habitat serangga, seperti nyamuk, sehingga terjadi perubahan pola insiden dan penyebaran penyakit malaria dan dengue. Selain itu, perubahan iklim juga menyebabkan pulau-pulau kecil terancam hilang karena naiknya muka air laut, serta terjadi pemutihan terumbu karang karena kenaikan suhu air laut. Ini mengganggu keanekaragaman hayati laut dan pesisir, serta produktivitas hasil-hasil laut.

Pembangunan di NTT perlu memperhatikan dampak perubahan iklim, terutama pada sektor pertanian, dan perikanan, yang merupakan sektor yang rentan pada perubahan iklim. Mengingat mata pencaharian utama di NTT adalah bertani terutama pertanian lahan kering yang tergantung pada variabel iklim seperti hujan, angin dan suhu udara untuk memproduksi pangan. Untuk ituperlu dikembangkan inovasi-inovasi pertanian dan perikanan yang memiliki daya adaptasi terhadap perubahan iklim termasuk di dalamnya adalah upaya rehabilitasi dan konservasi lahan.

2.1.1.2 Demografi Wilayah

Berdasarkan Data kependudukan dari BPS tahun 2020, Kependudukan Penduduk Provinsi NTT berdasarkan proyeksi penduduk tahun 2020 adalah sebanyak 5.541.394 jiwa yang terdiri atas 2.744.159 lakilaki dan 2.797.235 perempuan. Rasio jenis kelamin tahun 2020 adalah 98 yang berarti dari 100 perempuan hanya terdapat 98 laki-laki. Laju pertumbuhan penduduk tahun 2020 adalah 1,68 persen. Kepadatan penduduk tahun 2019 sebesar 114 Jiwa/Km^2 meningkat dibandingkan dengan kepadatan penduduk tahun 2017 dan 2018.

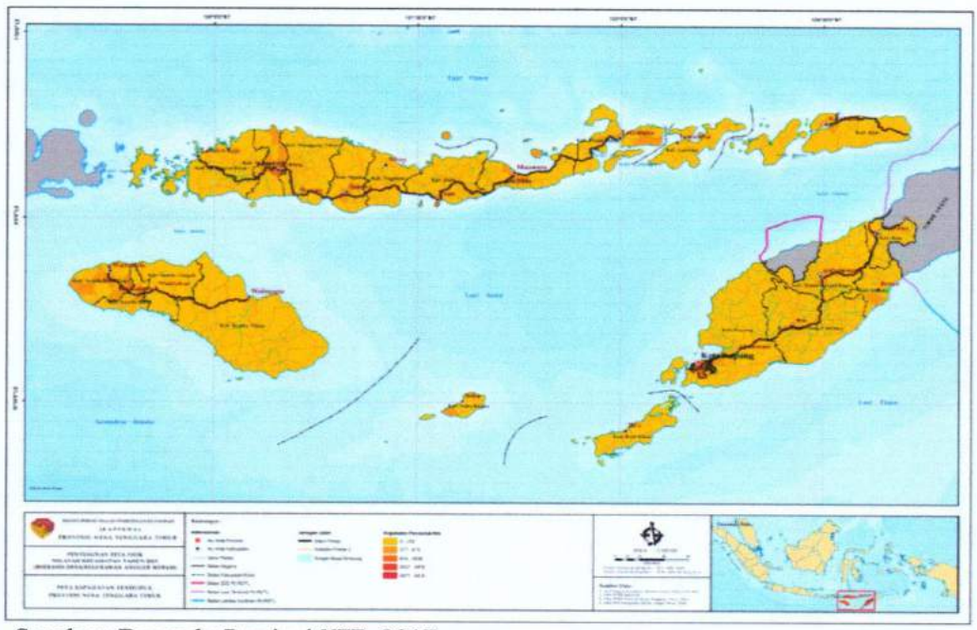
Penduduk terpadat terdapat di Kota Kupang dengan 2.413 jiwa per km^2. Kepadatan penduduk yang paling rendah adalah Sumba Timur dengan 37 jiwa per km^2 dan Sumba Tengah dengan 40 jiwa per km^2.

Tabel 2.1
Kepadatan Penduduk per Kabupaten/Kota di Provinsi NTT tahun 2018-2020

Wilayah	Kepadatan Penduduk (Jiwa/km2)		
	2018	2019	2020
Sumba Barat	173	176	197
Sumba Timur	36	37	35
Kupang	70	73	66
Timor Tengah Selatan	118	119	115
Timor Tengah Utara	94	95	97
Belu	174	176	175
Alor	70	70	72
Lembata	111	113	107
Flores Timur	145	146	158
Sikka	184	185	186
Ende	132	132	131
Ngada	94	95	96
Manggarai	174	177	163
Rote Ndao	129	134	112
Manggarai Barat	86	87	82
Sumba Tengah	39	40	47
Sumba Barat Daya	234	239	210
Nagekeo	102	103	113
Manggarai Timur	113	115	110
Sabu Raijua	205	211	194
Malaka	163	165	158
Kota Kupang	2 351	2 413	2 456
Nusa Tenggara Timur	112	114	111

Sumber : BPS NTT, 2021 (https://ntt.bps.go.id/indicator/12/536/1/kepadatan-penduduk.html)

Gambar 2.3
Peta Kepadatan Penduduk NTT



Sumber: Bappeda Provinsi NTT, 2017

2.1.2 Potensi Pengembangan Wilayah

Potensi pengembangan wilayah terlihat dari arahan pola penggunaan lahan. Rencana pola ruang wilayah Provinsi NTT merupakan rencana distribusi peruntukan ruang dalam wilayah Provinsi yang meliputi rencana peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan rencana peruntukan ruang untuk fungsi budidaya.

2.1.2.1 Kawasan Lindung

Rencana Kawasan Lindung Provinsi NTT adalah 29,03% dari total luas wilayah Provinsi NTT atau sekitar 1,348,760.25 ha, dimana luas lahan total adalah 3,297,598.85 ha. Luas perairan Provinsi NTT adalah sekitar 19.148.400ha. Luasan ini mencakup pemanfaatan Lindung di wilayah Laut Provinsi NTT. Kawasan lindung di Provinsi NTT baik yang terdapat di wilayah darat maupun laut secara rinci dapat dilihat pada tabel 2.2. berikut :

Tabel 2.2
Kawasan Lindung di Provinsi NTT

No.	Kawasan Lindung	Luasan (Ha)
1.	Hutan lindung	652.915,78
2.	Kawasan yang memberikan Perlindungan Setempat	
	a. Sempadan pantai	56.274
	b. Sempadan sungai	181.837
	c. Kawasan sekitar danau/waduk	28.944

No.	Kawasan Lindung	Luasan (Ha)
3.	Kawasan cagar alam, Suaka margasatwa, taman nasional, taman wisata alam dan pantai hutan bakau	276.666,85
4.	Kawasan lindung lainnya	695.844,47

Sumber : RTRW Provinsi NTT tahun 2010-2030

Kawasan peruntukan hutan secara keseluruhan seluas 37,69 persen dari luas daratan sebagaimana dimanfaatkan untuk perlindungan dan untuk hutan produksi dapat dimanfaatkan sebagai perhutanan sosial untuk pengembangan kawasan wisata, pengembangan marungga, pakan ternak, rempah-rempah dan peternakan terpadu sesuai daya dukungnya. Sebaran potensi ekonomi melalui perhutanan sosial pada kawasan hutan produksi terbatas 189.561,06 ha, hutan produksi tetap 280.993,19 ha, hutan produksi tujuan khusus 3.569,18 Ha dan hutan produksi yang dapat dikonversi 111.568,56 Ha.

Berdasarkan daya dukung dan daya tampung terdapat 20 jasa sebagai fungsi pengatur, penyedia, pendukung dan budaya yang dapat dioptimalkan pemanfaatannya. Terdapat 20 Klasifikasi Jasa Layanan Ekosistem berdasarkan daya dukung dan daya tampung yaitu: (a) 3 Fungsi penyediaan *(provisioning)*: pangan, air bersih, serat *(fiber)*, bahan bakar *(fluel)*; (b) 8 Fungsi pengaturan (*regulating)*: pengaturan iklim, pengaturan tata aliran air dan banjir, pencegahan dan perlindungan dari bencana, pemurnian air, pengolahan dan penguraian limbah, pemeliharaan kualitas udara, pengaturan penyerbukan alami, pengendalian hama dan penyakit; (c) 6 Fungsi budaya *(cultural)*: spiritual dan warisan leluhur, tempat tinggal dan ruang hidup (*sense of space),* rekreasi dan ec*otourism*, ikatan budaya-adat-pola hidup, estetika, pendidikan dan pengetahuan; dan, (d) 3 Fungsi pendukung (*supporting*): pembentukan lapisan tanah & pemeliharaan kesuburan, siklus hara *(nutrient)*, produksi primer. Daya dukung dan daya tampung wilayah sesuai potensi jasa ekosistem yaitu prioritas satu 1.144.576,58 ha (24,79 persen), prioritas dua 1.738.367,24 ha (37,65 persen) dan prioritas tiga 1.733.874,47 ha (37,56 persen).

2.1.2.2 Kawasan Budidaya

Potensi sumberdaya alam untuk mendukung pembangunan ekonomi, infrastruktur, prasarana sosial dan pelayanan dasar berada pada kawasan budi daya dan kawasan hutan. Kawasan Areal penggunaan lain (APL) seluas 2.950.239 ha atau 62,31 persen luas daratan dapat dimanfaatkan untuk kawasan peruntukan pertanian tanaman pangan, kawasan peruntukan pertanian hortikultura, kawasan peruntukan perkebunan, kawasan peruntukan peternakan, lahan pertanian pangan berkelanjutan, pariwisata, industri infrastruktur dan permukiman.

Potensi pengembangan pariwisata dengan pendekatan area yang mendukung *the ring of beauty* :

1) Kawasan pariwisata alam: TN-Komodo, TN-Kelimutu, TL-Tujuh Belas Pulau Riung, TL Teluk Maumere, TL Pulau Kepa, TL-Teluk Kupang, Kawasan Pantai Nembrala, Kawasan Pantai Kolbano dan Kawasan Wisata Gunung Mutis;
2) Kawasan Taman Wisata Alam Laut dan pulau-pulau kecil eksotik Teluk Kupang didukung Pulau Semau dan Pulau Kera, Kawasan Taman Wisata Alam Laut Gugus Pulau Teluk Maumere dan pulau kecil sekitarnya Kawasan Taman Wisata Alam Laut Tujuh Belas Pulau Riung;
3) Kawasan pariwisata budaya: Kawasan atraksi Pasola; Kawasan prosesi Jumat Agung Larantuka; Kawasan perburuan ikan paus Lamalera; Kawasan Kampung Adat Bena, Koanara, Tarung, Laitarung, Boti, Namata, Tamkesi; Kawasan *Homo Florencis Liangbua*, Situs arkeologi Olabula dan Kawasan atraksi seni budaya;
4) Kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan: Kawasan Kapela Tuan Ma Larantuka; Kawasan Meriam Jepang dan Tugu Jepang Kota Kupang; Kawasan Gereja Tua Kota Kupang; Kawasan Gua Alam Baumata; dan Kawasan cagar budaya, Kawasan pariwisata buatan pemancingan dan kawasan agrowisata.

Sesuai posisi geografis wilayah potensi strategis dalam pengembangan wilayah yaitu : (a) Kawasan strategis nasional, meliputi: Kawasan perbatasan dengan Timor Leste; Kawasan

perbatasan laut termasuk lima pulau kecil terluar dengan Negara Timor Leste dan Australia yaitu Pulau Alor, Batek, Dana, Ndana, dan Mengkudu; (b) Kawasan Pos Lintas batas Negara (PLBN) dan (c) Kawasan pengembangan Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) III. Potensi pengembagan wilayah juga didukung kawasan baru bertumbuh yaitu: Kawasan bendungan, Kawasan agrowisata kelor, Kawasan peristirahatan (*rest area)* eksotik pada jalan Nasional dan Provinsi, Kawasan hutan bakau, Kawasan sakura Sumba.

Potensi pengembangan wilayah yang didasarkan pada rencana struktur ruang melalui pengembangan sistem perkotaan Kabupaten/Kota didukung pusat pengembangan wilayah dengan skala yang berbeda sesuai dengan posisi geografis dan perannya dalam wilayah. Berdasarkan fungsinya dalam pengembangan wilayah, maka potensi pengembangannya yaitu : Pusat Kegiatan Nasional (PKN), PKNp; Pusat Kegiatan Wilayah (PKW); dan Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN).

2.2 PEREKONOMIAN DAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT

2.2.1 Pertumbuhan PDRB

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) adalah jumlah nilai tambah bruto (*gross value added*) yang timbul dari seluruh sektor perekonomian di suatu wilayah. Nilai tambah adalah nilai yang ditambahkan dari kombinasi faktor produksi dan bahan baku dalam proses produksi. Pertumbuhan ekonomi dapat dilihat dari peningkatan nilai PDRB yang dihitung berdasarkan dua harga yaitu harga konstan dan harga berlaku. Pertumbuhan ekonomi NTT terus meningkat dari tahun ke tahun.

Berdasarkan harga konstan tahun 2020, pertumbuhan PDRB NTT terus mengalami peningkatan dan terjadi di seluruh lapangan usaha. Pada tahun 2020 nilai PDRB NTT mencapai Rp.68,806 miliar dibanding tahun 2018 sebesar 65,929 miliar rupiah. Demikian halnya dengan pertumbuhan nilai PDRB berdasarkan harga berlaku juga mengalami kenaikan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2020, nilai PDRB NTT berdasarkan harga berlaku menurut lapangan usaha sebesar Rp 106.506 miliar meningkat dibanding tahun 2018 sebesar Rp 98.930 miliar.

Tabel 2.3
PDRB ADHB-ADHK Menurut Lapangan Usaha di Provinsi NTT
Tahun 2018-2020

Lapangan Usaha	Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga (ADHB) Berlaku Menurut Lapangan Usaha Provinsi NTT (Miliar Rp)			Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) Menurut Lapangan Usaha Provinsi NTT (Miliar Rupiah)		
	2018	2019*	2020**	2018	2019*	2020**
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	28.035	29.804	30.370	17.838	18.496	18.673
Pertambangan dan Penggalian	1.202	1.250	1.155	908	939	814
Industri Pengolahan	1.253	1.405	1.367	841	918	867
Pengadaan Listrik dan Gas	75	76	85	52	52	58
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	54	57	60	43	45	48
Konstruksi	10.745	11.606	10.454	7.255	7.576	6.832
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	11.025	12.266	11.888	7.785	8.380	7.880
Transportasi dan Pergudangan	5.459	5.834	4.917	3.528	3.646	3.203
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	757	806	594	493	522	382
Informasi dan Komunikasi	6.570	7.078	7.923	5.794	6.118	6.850
Jasa Keuangan dan Asuransi	4.072	4.307	4.639	2.589	2.672	2.901
Real Estate	2.475	2.480	2.426	1.658	1.658	1.632
Jasa Perusahaan	292	306	191	175	182	110
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	13.232	14.573	15.191	8.483	9.175	9.603
Jasa Pendidikan	9.436	10.246	10.737	5.572	5.913	6.025
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	2.151	2.328	2.560	1.480	1.564	1.633
Jasa lainnya	2.098	2.267	1.946	1.434	1.528	1.294
PDRB	**98.930**	**106.728**	**106.506**	**65.929**	**69.386**	**68.806**

Sumber : BPS NTT, 2021; * Angka Sementara, ** Angka Sangat Sementara.

Tabel 2.4
Persentase PDRB ADHK Menurut Lapangan Usaha di Provinsi NTT
Tahun 2018 - 2020

Lapangan Usaha [Seri 2013]	PDRB ADHK menurut Lapangan Usaha (juta rupiah)		
	2018	2019*	2020**
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	28,34	27,93	28,51
Pertambangan dan Penggalian	1,21	1,17	1,08
Industri Pengolahan	1,27	1,32	1,28
Pengadaan Listrik dan Gas	0,08	0,07	0,08
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,05	0,05	0,06
Konstruksi	10,86	10,87	9,82
Perdagangan Besar dan Eceran: Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	11,14	11,49	11,16
Transportasi dan Pergudangan	5,52	5,47	4,62
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	0,76	0,75	0,56
Informasi dan Komunikasi	6,64	6,63	7,44
Jasa Keuangan dan Asuransi	4,12	4,04	4,36
Real Estate	2,50	2,32	2,28
Jasa Perusahaan	0,30	0,29	0,18
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	13,38	13,65	14,26
Jasa Pendidikan	9,54	9,64	10,08
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	2,17	2,18	2,40
Jasa lainnya	2,12	2,12	1,83
PDRB	**100**	**100**	**100**

Sumber : BPS NTT, 2021 ; * Angka Sementara , ** Angka Sangat Sementara.

Pada tahun 2020, sektor pertanian merupakan sektor terbesar dalam ekonomi Nusa Tenggara Timur. Sektor ini mengkomposisi 28,51%, terhadap total PDRB NTT yang pada tahun 2020 berjumlah sebesar Rp. 68,8 Triliun (ADHK). Sektor terbesar kedua dalam ekonomi Nusa Tenggara Timur adalah Administrasi Pemerintahan, Pertanahan dan Jaminan Sosial wajib sebesar 14,26%. Sedangkan sektor ekonomi dengan share terkecil dalam ekonomi Nusa Tenggara Timur adalah lapangan usaha Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang yaitu 0,06% disusul Pengadaan Listrik dan Gas sebesar 0,08%.

Tabel 2.5
Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) ADHK 2010 Menurut Lapangan Usaha di Provinsi NTT (Persen) Tahun 2018 – 2020

Lapangan Usaha [Seri 2010]	Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Menurut Lapangan Usaha di Provinsi NTT (Persen), 2017-2019		
	2018	2019*	2020**
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	2,94	3,69	0,96
Pertambangan dan Penggalian	1,94	3,32	-13,33
Industri Pengolahan	5,16	9,14	-5,54
Pengadaan Listrik dan Gas	9,57	0,82	12,29
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	5,47	5,44	6,04
Konstruksi	6,39	4,43	-9,82
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	7,33	7,64	-5,96
Transportasi dan Pergudangan	7,93	3,34	-12,16
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	12,16	5,99	-26,92
Informasi dan Komunikasi	4,89	5,59	11,96
Jasa Keuangan dan Asuransi	3,50	3,22	8,57
Real Estate	4,85	0,00	-1,54
Jasa Perusahaan	1,67	3,86	-39,27
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	7,56	8,17	4,67
Jasa Pendidikan	2,41	6,12	1,89
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	7,11	5,67	4,38
Jasa lainnya	6,47	6,55	-15,30
PDRB	**5,11**	**5,24**	**-0,83**

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi NTT, 2021 ; * Angka Sementara ;
** Angka Sangat Sementara

Apabila dilihat dari laju pertumbuhan PDRB, terus mengalami peningkatan secara nominal yaitu pada tahun 2018 sebesar Rp. 65.929 miliar naik menjadi Rp. 68.806 miliar pada tahun 2020, yang berdasarkan laju pertumbuhan tahun dasar 2010 PDRB Provinsi NTT mengalami kenaikan pada tahun 2019 sebesar 5,24 persen dibandingkan pada tahun 2018 yaitu sebesar 5,11 persen. Sebagian

lapangan usaha pada tahun 2019 mengalami pertumbuhan yang positif. Akan tetapi, mengalami perlambatan pada tahun 2020 akibat dari Pndemic Covid 19 sebesar -0,83%. Kontraksi perlambatan ini disumbangkan oleh sektor – sektor seperti Jasa Perusahaan sebesar -39,27%, Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum sebesar -26,92, Jasa lainnya sebesar -15,30% dan Pertambangan dan Penggalian sebesar -13,33%.

2.2.2 Laju Inflasi

Inflasi Provinsi NTT pada triwulan IV 2020 tercatat sebesar 0,61% (yoy), lebih rendah dibandingkan dengan inflasi secara Nasional sebesar 1,68% (yoy). Realisasi inflasi tersebut lebih rendah dibandingkan rata-rata inflasi Provinsi NTT pada lima tahun terakhir sebesar 2,63% (average yoy). Secara spasial, Kota Kupang mencatat inflasi sebesar 0,29% (yoy), Kota Maumere inflasi sebesar 2,24% (yoy), dan Kota Waingapu inflasi sebesar 1,52% (yoy).

Realisasi inflasi Provinsi NTT pada triwulan IV 2020 tercatat sebesar 0,61% (yoy), melandai dibandingkan triwulan sebelumnya yang tercatat sebesar 1,10% (yoy). Tekanan inflasi yang menurun terutama bersumber dari deflasi kelompok transportasi yang lebih dalam dibandingkan dengan triwulan sebelumnya. Mobilitas masyarakat yang masih tertahan di tengah pandemi COVID-19 berdampak pada lemahnya permintaan tiket angkutan udara di tengah momen Hari Raya Natal dan Tahun Baru. Sementara itu, inflasi kelompok makanan, minuman dan tembakau serta kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya juga melandai dibandingkan dengan triwulan sebelumnya. Harga berbagai jenis ikan segar masih menjadi faktor pendorong inflasi pada triwulan IV 2020, meskipun tekanan inflasi melandai dibandingkan triwulan sebelumnya. Hal serupa juga terjadi pada emas perhiasan, di mana harga emas di pasar global mulai melandai dibandingkan dengan triwulan sebelumnya.

Berdasarkan kelompok komoditas, inflasi pada triwulan IV 2020 terutama didorong oleh kelompok makanan, minuman dan tembakau, serta kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya. Kelompok makanan, minuman dan tembakau mencatat inflasi sebesar 2,87% (yoy) dan memberi andil sebesar 0,94% dari inflasi total. Sementara itu, kelompok

perawatan pribadi dan jasa lainnya mencatat inflasi sebesar 4,06% (yoy) dan memberi andil sebesar 0,27% dari inflasi total. Di sisi lain, kelompok transportasi mencatat deflasi sebesar 4,66% (yoy) dan merupakan faktor utama penahan laju inflasi secara keseluruhan

Tabel 2.6
Indeks Harga Konsumen dan Laju Inflasi Nusa Tenggara Timur Menurut Kelompok Pengeluaran (2012=100) , (2018=100) Tahun 2017-2020

Kelompok Pengeluaran	IHK Desember 2018	IHK Desember 2019	IHK Desember 2020	Inflasi (%)		
				Tingkat Inflasi Tahun Kalender 2019	Tingkat Inflasi Tahun Kalender 2020	Tingkat Inflasi April 2021
Bahan Makanan	147,21	-	-	3,47	-	-
Makanan Jadi, Minuman, Rokok dan Tembakau	144,17	104,21	107,99	3,68	2,10	0,20
Pakaian dan Alas Kaki	-	104,32	105,37	-	0,98	0,19
Perumahan, Air, Listrik, Gas dan Bahan Bakar	131,04	102,48	102,84	1,66	0,32	0,07
Sandang	122,18	104,73	105,81	4,87	0,95	0,26
Kesehatan	129,04	104,86	107,79	3,16	2,60	0,18
Transportasi	-	103,89	103,01	-	-1,30	0,00
Informasi, Komunikasi dan Jasa Keuangan	-	100,42	100,07	-	-0,34	0,00
Rekreasi, Olahraga dan Bidaya	-	103,15	103,90	-	0,74	0,20
Pendidikan	-	106,21	107,70	-	1,40	0,01
Pendidikan, Rekreasi dan Olah raga	125,65	-	107,60	3,30	-	0,21
Transpor, Komunikasi dan Jasa Keuangan	133,78	-	112,08	-0,40	-	0,29
Penyediaan Makanan dan Minuman/Restoran	-	105,22	-	-	1,99	-
Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya	-	105,94	-	-	6,11	-
Nusa Tenggara Timur	**134,7**	**135,59**	**-**	**0,80**	**0,78**	**-**
Nasional	**135,39**	**131.28**	**105,68**	**2,72**	**1,68**	**0,13**

Sumber : BPS NTT-Berita Resmi Statistik 2019,2020, 2021

Dari tabel 2.6. di atas, terlihat bahwa selama tahun 2019, kecenderungan inflasi yang terjadi di Nusa Tenggara Timur masih mengikuti pola inflasi nasional, artinya bahwa inflasi yang terjadi di Nusa Tenggara Timur tidak semata-mata diakibatkan oleh tekanan ekonomi internal di Nusa Tenggara Timur sendiri tetapi banyak juga dipengaruhi oleh kondisi ekonomi yang terjadi secara Nasional. Kemudian perubahan terjadi pada Kelompok Pengeluaran dimana terdapat penambahan, penghilangan ataupun pemisahan nomenklatur, sehingga angka IHK pada Tahun 2019 dan Inflasi pada November Tahun 2020 semakin terinci. Dimana, Inflasi terjadi karena adanya kenaikan harga yang ditunjukkan oleh naiknya sebagian besar indeks kelompok pengeluaran, yaitu: kelompok makanan, minuman dan tembakau sebesar 0,20 persen; kelompok pakaian dan alas kaki sebesar 0,19 persen; kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga sebesar 0,07 persen; kelompok perlengkapan, peralatan dan pemeliharaan rutin rumah tangga sebesar 0,26 persen; kelompok kesehatan sebesar 0,18 persen; kelompok rekreasi, olahraga, dan budaya sebesar 0,20 persen; kelompok pendidikan sebesar 0,01 persen; kelompok penyediaan makanan dan minuman/restoran sebesar 0,21 persen; dan kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya sebesar 0,29 persen. Sementara kelompok transportasi dan kelompok informasi, komunikasi, dan jasa keuangan tidak mengalami perubahan.

Sedangkan inflasi NTT pada Tahun 2019 sebesar 2,72% jika dibandingkan pada Tahun 2020 hanya sebesar 1,68%.

2.2.3 PDRB Per Kapita

PDRB Per kapita atas dasar berlaku menunjukkan nilai PDRB per kepala atau per satu orang penduduk dengan nilai PDRB atas dasar harga berlaku. PDRB Perkapita ADHB Provinsi NTT pada tahun 2018 tercatat sebesar Rp. 18,45 juta meningkat menjadi Rp. 19,59 juta pada tahun 2019. Peningkatan ini dipengaruhi oleh produk-produk yang dihasilkan oleh kegiatan ekonomi dan disertai dengan perubahan harga-harga di pasar yang dari tahun ketahun juga cenderung mengalami peningkatan (inflasi). Sedangkan berdasarkan PDRB per kapita ADHK pada tahun 2018 sebesar Rp. 12.27 juta meningkat menjadi Rp. 12,714 juta pada tahun 2019. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.7
PDRB dan PDRB Per Kapita Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2017 – 2019

Uraian	2017	2018	2019	2020
Nilai PDRB (Miliar Rp)				
- ADHB	90.758,93	98.930,19	106.728,07	106.506,13
- ADHK 2010	62.725,41	65.929,19	69.385,99	68.806,67
PDRB perkapita (Ribu Rp)				
- ADHB	17.165,45	18.448,13	19.591,07	19.220.097
- ADHK 2010	11.863,41	12.276,77	12.714,42	12.416.851
Pertumbuhan				
PDRB perkapita ADHK 2010	-1,6	3,48	3,56	-2,34
Jumlah penduduk (000 org)	5.287,30	5.371,52	5.456,20	5.541.394

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi NTT, olahan, 2021

2.2.4 Indeks Gini (*Gini Ratio*)

Koefisien Gini atau Indeks Gini merupakan indikator yang menunjukkan tingkat ketimpangan pendapatan secara menyeluruh. Nilai Koefisien Gini berkisar antara 0 hingga 1. Koefisien Gini bernilai 0 menunjukkan adanya pemerataan pendapatan yang sempurna, atau setiap orang memiliki pendapatan yang sama.

Indeks Gini Provinsi Nusa Tenggara Timur pada 2019 dan 2020 pada bulan september sebesar 0,36, yang menunjukkan bahwa "kecenderungan ketimpangan" tidak mengalami perubahan atau dapat dikatakan ketimpangan di NTT pada tahun 2019 dan 2020 tidak mengalami perubahan yang signifikan. Jika dibandingkan dengan gini rasio nasional sebesar 0,39, maka indeks Gini NTT lebih rendah yang mengindikasikan ketimpangan di NTT tidak sedalam ketimpangan yang terjadi di daerah-daerah lain di Indonesia

Tabel 2.8
Indeks Gini di Provinsi NTT Tahun 2013-2020

Indikator	Tahun							
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020 September
Rasio Gini	0,35	0,36	0,34	0,36	0,36	0,36	0,355	0,356

Sumber : BPS NTT-Laporan Bulanan Data Sosial Ekonomi Provinsi NTT, Gini Rasio 2019-2020,

2.2.5 Indeks Pembangunan Manusia

Indeks Pembangunan Manusia (IPM)/*Human Development Index (HDI)* digunakan untuk mengklasifikasikan apakah sebuah negara adalah negara maju, negara berkembang atau negara terbelakang dan juga untuk mengukur pengaruh dari kebijaksanaan ekonomi terhadap kualitas manusia.

Indikator komponen IPM diperolah dari pengukuran perbandingan dari Angka Usia Harapan Hidup, Angka melek huruf, rata – rata lama sekolah dan Konsumsi per kapita. Untuk mengukur dimensi kesehatan, digunakan angka usia harapan hidup yaitu angka perkiraan lama hidup rata-rata penduduk dengan asumsi tidak ada perubahan pola mortalitas menurut umur. Untuk mengukur dimensi pengetahuan digunakan gabungan indikator angka harapan lama sekolah (Kombinasi antara partisipasi sekolah, jenjang pendidikan yang sedang dijalani, kelas yang diduduki dan pendidikan yang ditamatkan) dan angka melek huruf (untuk penduduk usia 15 tahun ke atas). Adapun untuk mengukur dimensi hidup layak digunakan indikator kemampuan daya beli masyarakat terhadap sejumlah kebutuhan pokok yang dilihat dari rata-rata besarnya pengeluaran per kapita sebagai pendekatan pendapatan yang mewakili capaian pembangunan untuk hidup layak.

IPM NTT terus meningkat yaitu dari tahun 2016 sebesar 63,13 menjadi 65,19 pada tahun 2020. Berdasarkan rata-rata nasional sejak tahun 2015 hingga tahun 2020, NTT berada pada posisi 31 dari 34 Provinsi. Walau IPM NTT terus meningkat, namun secara nasional masih tertinggal. Pada tahun 2015 IPM NTT 62,67 tertinggal jauh dibanding IPM rata-rata nasional yang mencapai 69,55 pada tahun 2020 IPM NTT 65,19, dan IPM rata-rata nasional sudah mencapai 71,94.

Tabel 2.9
Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
di Provinsi NTT Menurut Komponen, Tahun 2015-2020

Indikator	Tahun					
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Umur Harapan Hidup (thn)	65,96	66,04	66,07	66,38	66,85	67,01
Harapan Lama Sekolah (thn)	12,84	12,97	13,07	13,10	13,15	13,18
Rata-rata Lama Sekolah (thn)	6,93	7,02	7,15	7,30	7,55	7,63

Indikator	Tahun					
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Pengeluaran per Kapita (Rp.000)	7,003	7,122	7,350	7,566	7,769	7,598
IPM NTT	**62,67**	**63,13**	**63,73**	**64,39**	**65,23**	**65,19**
IPM Rata-rata Nasional	**69,55**	**70,18**	**70,81**	**71,39**	**71,92**	**71,94**

Sumber: BPS NTT, 2021

2.2.6 Pengeluaran per Kapita

Pengeluaran per kapita adalah biaya yang dikeluarkan untuk konsumsi semua anggota rumah tangga selama sebulan dibagi dengan banyaknya anggota rumah tangga. Jumlah pengeluaran per kapita di NTT terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2015 pengeluaran per kapita masyarakat NTT sebesar Rp 7,003 juta meningkat pada tahun 2019 menjadi Rp 7,769 juta. Walau terjadi peningkatan pengeluaran per kapita masyarakat NTT, namun jumlah tersebut masih jauh dari rata-rata nasional yang mencapai Rp12,44 juta.

Tabel 2.10
Jumlah Pengeluaran per Kapita di Provinsi NTT Tahun 2015-2019

Wilayah	Pengeluaran Riil per Kapita Disesuaikan Menurut Kabupaten/Kota (Ribu Rupiah)				
	2015	2016	2017	2018	2019
Sumba Barat	6.776	6.914	6.997	7.275	7.586
Sumba Timur	8.883	9.004	9.093	9.351	9.640
Kupang	7.085	7.217	7.301	7.472	7.698
Timor Tengah Selatan	6.118	6.360	6.676	6.855	6.955
Timor Tengah Utara	5.799	5.930	6.164	6.357	6.479
Belu	7.083	7.199	7.251	7.403	7.677
Alor	6.346	6.468	6.553	6.750	6.958
Lembata	6.888	7.010	7.084	7.253	7.474
Flores Timur	7.150	7.237	7.442	7.573	7.770
Sikka	7.618	7.740	7.855	7.958	8.313
Ende	8.679	8.801	8.841	8.995	9.315
Ngada	8.085	8.195	8.649	8.857	8.961
Manggarai	6.875	7.008	7.056	7.175	7.276
Rote Ndao	5.946	6.110	6.320	6.484	6.720
Manggarai Barat	7.012	7.149	7.269	7.426	7.602
Sumba Tengah	5.822	5.907	5.946	6.093	6.198
Sumba Barat Daya	5.933	6.079	6.134	6.298	6.594

Wilayah	Pengeluaran Riil per Kapita Disesuaikan Menurut Kabupaten/Kota (Ribu Rupiah)				
	2015	2016	2017	2018	2019
Nagekeo	7.906	8.054	8.119	8.219	8.469
Manggarai Timur	5.246	5.396	5.643	5.809	5.919
Sabu Raijua	4.781	4.923	5.120	5.245	5.354
Malaka	5.563	5.658	5.726	5.894	5.998
Kota Kupang	12.856	12.986	13.028	13.199	13.592
Nusa Tenggara Timur	**7.003**	**7.122**	**7.350**	**7.566**	**7.769**

Sumber : BPS NTT, 2020

2.2.7 Usia Harapan Hidup

Usia Harapan Hidup (UHH) dapat digunakan untuk menilai status derajat kesehatan. Selain itu menjadi salah satu indikator yang diperhitungkan dalam menilai Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Gambaran UHH penduduk NTT pada tahun 2015 angka usia harapan hidup sebesar 65,96 yang berarti bahwa anak-anak yang lahir pada tahun 2015 diperkirakan akan hidup rata-rata sampai umur 66 tahun. Tahun 2016 angka umur harapan hidup sebesar 66,04 yang berarti bahwa anak-anak yang lahir pada tahun 2016 diperkirakan akan hidup rata-rata sampai umur 67 tahun, dan pada tahun 2019 angka umur harapan hidup sebesar 66,85. Umur harapan hidup penduduk setiap tahun semakin meningkat namun tidak terlalu signifikan, hanya berkisar 1-5 bulan.

Seiring dengan terjadinya pandemi COVID-19, UHH Indonesia tahun 2020 mengalami penurunan.

Tabel 2.11
Umur Harapan Hidup di Provinsi NTT Tahun 2015-2020

Wilayah	Umur Harapan Hidup Menurut Kabupaten/Kota (Tahun)					
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Sumba Barat	66,11	66,15	66,20	66,58	66,98	67,08
Sumba Timur	63,88	64,00	64,12	64,45	64,94	65,13
Kupang	63,17	63,33	63,49	63,86	64,39	64,63
Timor Tengah Selatan	65,55	65,60	65,65	65,91	66,32	66,42
Timor Tengah Utara	66,09	66,14	66,19	66,45	66,86	66,96
Belu	63,01	63,21	63,42	63,81	64,35	64,61
Alor	60,23	60,35	60,47	60,8	61,29	61,48

Wilayah	Umur Harapan Hidup Menurut Kabupaten/Kota (Tahun)					
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Lembata	65,85	66,02	66,19	66,57	66,97	67,07
Flores Timur	63,28	64,36	64,45	64,7	65,10	65,20
Sikka	66,10	66,20	66,30	66,61	67,07	67,24
Ende	64,37	64,42	64,48	64,75	65,17	65,29
Ngada	67,32	67,34	67,36	67,59	67,96	68,04
Manggarai	64,48	65,66	65,84	66,23	66,77	67,03
Rote Ndao	62,86	63,13	63,41	63,8	64,34	64,60
Manggarai Barat	65,98	66,19	66,19	66,58	67,12	67,38
Sumba Tengah	67,65	67,73	67,74	67,96	68,32	68,38
Sumba Barat Daya	67,08	67,71	67,76	68,02	68,43	68,53
Nagekeo	66,25	66,31	66,36	66,62	67,03	67,13
Manggarai Timur	67,27	67,39	67,40	67,62	67,98	68,04
Sabu Raijua	58,38	58,69	59,00	59,53	60,23	60,64
Malaka	64,15	64,27	64,29	64,52	64,89	64,97
Kota Kupang	68,34	68,46	68,58	68,9	69,37	69,55
Nusa Tenggara Timur	**65,96**	**66,04**	**66,07**	**66,38**	**66,85**	**67,01**

Sumber : BPS NTT, 2021

2.2.8 Angka Kemiskinan

Penduduk Miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah Garis Kemiskinan. Penduduk miskin NTT menunjukkan perkembangan yang fluktuatif dari tahun ke tahun. Jumlah penduduk miskin NTT tahun 2016 menjadi 1.160,53 jiwa, menurun tahun 2017 menjadi 1.150,08 dan pada tahun 2018 jumlah penduduk miskin menurun lagi menjadi 1.134,74 jiwa . Sedangkan, Jumlah penduduk miskin di Provinsi NTT pada September 2020 mencapai 1.173,53 ribu orang. Dibandingkan September 2019, jumlah penduduk miskin meningkat 24,3 ribu orang. Sementara jika dibandingkan dengan Maret 2019, jumlah penduduk miskin juga meningkat sebanyak 7,44 ribu orang. Persentase penduduk miskin pada September 2020 tercatat meningkat sebesar 21,21 persen.

Dalam pengukuran kemiskinan, pendekatan konsep yang digunakan adalah pemenuhan kebutuhan dasar *(basic need approach)*. Dengan pendekatan ini, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan yang kemudian diukur dalam dua komponen yaitu Garis Kemiskinan

Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Bukan Makanan (GKBM) dan dilakukan secara terpisah untuk daerah perkotaan dan perdesaan.

Garis kemiskinan berguna sebagai perangkat ekonomi yang dapat digunakan untuk mengukur rakyat miskin dan mempertimbangkan pembaharuan sosio-ekonomi. Garis kemiskinan NTT pada tahun 2017 sebesar Rp 346.737 meningkat dibandingkan tahun 2016 sebesar Rp 322.947.

Kemudian, persoalan kemiskinan bukan hanya sekadar jumlah dan persentase penduduk miskin. Dimensi lain yang perlu diperhatikan adalah tingkat kedalaman dan keparahan kemiskinan. Selain harus mampu memperkecil jumlah penduduk miskin, kebijakan yang terkait dengan kemiskinan juga sekaligus harus bisa mengurangi tingkat kedalaman dan keparahan kemiskinan. Namun pada kenyataannya, meski jumlah penduduk miskin menurun, indeks kedalaman dan keparahan kemiskinan justru meningkat.

Indeks Kedalaman Kemiskinan (Poverty Gap Index-P1), merupakan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Semakin tinggi nilai indeks, semakin jauh rata-rata pengeluaran penduduk dari garis kemiskinan. Indeks kedalaman kemiskinan NTT menunjukkan angka yang fluktuatif dari tahun ke tahun. Pada tahun 2015 indeks kedalaman kemiskinan NTT 4,06 meningkat pada tahun 2016 menjadi 4,69 namun menurun pada tahun 2017 menjadi 4,34 dan pada bulan Maret 2018 sebesar 3,90 dan pada 2019 menjadi 4,15 terjadi peningkatan pada tahun 2018.

Sedangkan, Indeks keparahan kemiskinan (*Poverty Severity Index-P2)* memberikan gambaran mengenai penyebaran pengeluaran diantara penduduk miskin. Indeks keparahan kemiskinan di NTT mengalami fluktuasi dalam perkembangannya. Pada tahun 2015 indeks keparahan kemiskinan 1,07 meningkat menjadi 1,29 di tahun 2016 dan menurun tahun 2017 menjadi 1,17, sedangkan pada Maret 2018 sebesar 1,02 dan pada 2019 menjadi 1,13 meningkat dari tahun 2018.

Tabel 2.12
Indikator Kemiskinan di Provinsi NTT Tahun 2016-2020

Indikator	Angka Kemiskinan (%)				
	2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah penduduk miskin (ribu jiwa)	1.160,53	1.150,08	1.134,74	1.129,46	1.173,53
Garis Kemiskinan (rupiah/kapita/bulan)	322.947	343,396	354,898	373,922	403,055
Indeks kedalaman kemiskinan (P1)	4,69	3,83	4,16	4,13	4,15
Indeks keparahan kemiskinan (P2)	1,30	0,96	1,17	1,12	1,24
Persentase Penduduk Miskin NTT	22.58	22,01	21.38	20,62	21,21
Persentase Penduduk Miskin Indonesia	10.70	10.12	9,66	9,22	10,19

Sumber : BPS NTT, 2021

2.2.9 Persentase Balita Gizi Buruk dan Gizi Kurang

Gizi buruk adalah suatu kondisi di mana seseorang dinyatakan kekurangan nutrisi, atau dengan ungkapan lain status nutrisinya berada di bawah standar rata-rata. Nutrisi yang dimaksud bisa berupa protein, karbohidrat dan kalori. Di Indonesia, kasus KEP (Kurang Energi Protein) adalah salah satu masalah gizi utama yang banyak dijumpai pada balita.

Tabel 2.13
Persentase Gizi Buruk dan Gizi Kurang di NTT
Tahun 2013-2020

Indikator	Persentase Gizi Buruk dan Gizi Kurang							
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Persentase gizi buruk (%)	1,10	1,00	0,96	0,87	0,87	1,9	2,5	5,1
Persentase gizi kurang (%)	6,90	7,15	4,16	2,50	2,84	6,3	6,9	23,1

Sumber : SIPD Provinsi NTT, 2017, Laporan e-PPGBM 22 kabupaten /kota pd Dinkes prov NTT Februari 2021)

Persentase balita dan baduta stunting di Provinsi NTT menurun dari tahun 2015 ke tahun 2017, namun masih menjadi yang tertinggi di Indonesia. Namun, pada tahun 2018 ke tahun 2020, baik kasus Gizi Buruk maupun Kasus Gizi Kurang mengalami kenaikan yang cukup signifikan dipicu oleh kondisi penyebaran Covid 19.

Tabel 2.14
Persentase Baduta dan Balita Stunting, Wasting dan Underweight di NTT Tahun 2016-2020

Kelompok Umur	Indikator	NTT Tahun					Indonesia
		2016	2017	2018	2019	2020	2017
Baduta	Stunting	32,1	29,8				20,1
	Wasting	17,5	17,9				12,8
	Underweight	23,0	22,8				14,8
Balita	Stunting	38,7	40,3	35,4	30,0	24,2	29,6
	Wasting	17,4	15,8				9,5
	Underweight	28,2	28,3				17,8

Sumber : Pemantauan Status Gizi Tahun 2015-2017, Laporan e-PPGBM 22 Kabupaten/Kota Provinsi NTT, 2020

2.2.10 Tingkat Pengangguran terbuka

Penduduk usia kerja merupakan semua orang yang berumur 15 tahun ke atas. Rasio penduduk yang bekerja pada tahun 2015 sebesar 96,17% dengan tingkat partisipasi angkatan kerja tahun 2015 sebanyak 2.219.291 jiwa dan rasio penduduk yang bekerja pada tahun 2018 naik menjadi 96,99% atau sebanyak 2.411.533 jiwa dan Tingkat partisipasi angkatan kerja 70,17%.

Terdapat pula pengelompokan penduduk usia kerja yang terdampak Covid-19, dimana dapat dikelompokkan menjadi empat komponen yaitu: a) Pengangguran Karena Covid-19; b) Bukan Angkatan Kerja (BAK) Karena Covid-19; Sementara Tidak Bekerja Karena Covid-19; dan d) Penduduk Bekerja yang Mengalami Pengurangan Jam Kerja Karena Covid-19.

Sementara itu, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur tenaga kerja yang tidak terserap oleh pasar kerja dan menggambarkan kurang termanfaatkannya pasokan tenaga kerja.

Sejalan dengan perlambatan ekonomi di tahun 2020, TPT Provinsi NTT pada Agustus 2020 tercatat 4,28% (0,12 juta orang), mengalami kenaikan dari Agustus 2019 yang sebesar 3,14% (0,08 juta orang). Secara spasial, TPT Provinsi NTT Agustus 2020 menempati peringkat ke-empat sebagai provinsi dengan TPT terendah setelah Provinsi Sulawesi Barat (3,32%), Sulawesi Tengah (3,77%), Bengkulu (4,07%) dan Nusa Tenggara Barat (4,22%). Sehingga secara Nasional, kondisi TPT Provinsi

NTT pada Agustus 2020 lebih baik dibandingkan Nasional yang sebesar 7,07%.

Tingkat Partisipasi Angkatan kerja (TPAK) Provinsi NTT pada Agustus 2020 menunjukkan peningkatan dibandingkan periode yang sama tahun 2019. TPAK pada Agustus 2020 tercatat sebesar 73,11% atau lebih tinggi dibandingkan Agustus 2020 yang sebesar 70,34%. Peningkatan ini bersumber dari peningkatan angkatan kerja baik yang bekerja maupun pengangguran. Jumlah angkatan kerja pada Agustus 2020 tercatat sebanyak 2,85 juta orang atau meningkat dari Agustus 2019 yang sebanyak 2,70 juta orang. Berdasarkan jenis kelamin, peningkatan TPAK terutama didorong oleh angkatan kerja perempuan yang sebesar 63,91% pada bulan Agustus 2020 atau mengalami persentase kenaikan sebesar 4,17%. Sementara itu, TPAK laki-laki tercatat sebesar 82,64% atau mengalami persentase kenaikan sebesar 1,33%.

2.2.11 Opini BPK Atas Laporan Keuangan Daerah

Opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah NTT menunjukkan perbaikan. Tahun 2016-2018 secara berturut-turut pengelolaan keuangan daerah mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), sedangkan tahun 2013-2015 mendapat opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP).

Tabel 2.15
Opini BPK Atas Laporan Keuangan Daerah di Provinsi NTT
Tahun 2013-2018

Indikator	Tahun					
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Opini BPK Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	WDP	WDP	WDP	WTP	WTP	WTP

Sumber : Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT, 2020

2.2.12 Skor Pola Pangan Harapan

Pola Pangan Harapan (PPH) atau *Desirable Dietary Pattern* (DDP) adalah susunan keragaman pangan yang didasarkan pada sumbangan energi dari kelompok pangan utama pada tingkat ketersediaan maupun konsumsi pangan. PPH merupakan instrumen untuk menilai situasi

konsumsi pangan wilayah yang dapat digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan konsumsi pangan ke depan, dengan mempertimbangkan aspek sosial, ekonomi, budaya dan preferensi konsumsi pangan masyarakat. Selain itu, PPH juga dapat dijadikan acuan untuk menentukan sasaran dalam perencanaan dan evaluasi penyediaan khususnya produksi pangan. Tujuan utama penyusunan PPH adalah untuk membuat suatu rasionalisasi pola konsumsi pangan yang dianjurkan, yang terdiri dari kombinasi aneka ragam pangan untuk memenuhi kebutuhan gizi dan sesuai cita rasa.Skor PPH di NTT terus membaik dari tahun ke tahun. Pada tahun 2013 PPH NTT 66,20 meningkat tahun 2016 menjadi 73,00. Hal ini menunjukkan bahwa pola ketersediaan dan konsumsi pangan masyarakat bergerak ke arah yang lebih baik.

Tabel 2.16
Skor Pola Pangan Harapan di Provinsi NTT Tahun 2013-2016

Indikator	Tahun (%)			
	2013	2014	2015	2016
Skor PPH	66,2	65,0	71,3	73,0

Sumber : BPS Provinsi NTT, 2018

2.3 EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN RKPD SAMPAI TAHUN BERJALAN DAN REALISASI RPJMD

2.3.1 Capaian Kinerja Makro Daerah tahun 2020

Pembangunan Daerah Tahun 2020 merupakan tahun kedua dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018-2023 untuk mencapai Visi **"NTT BANGKIT MEWUJUDKAN MASYARAKAT SEJAHTERA DALAM BINGKAI NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA".** Visi Gubernur dan Wakil Gubernur tersebut kemudian dijabarkan ke dalam misi , yaitu : 1. Mewujudkan masyarakat sejahtera, mandiri dan adil 2. Membangun NTT sebagai salah satu gerbang dan pusat pengembangan pariwisata nasional (ring of beauty) 3. Meningkatkan ketersediaan dan kualitas infrastruktur untuk mempercepat pembangunan 4. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia 5. Mewujudkan reformasi birokrasi pemerintahan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Berpedoman pada visi dan misi RPJMD 2018-2023 dan tema RKP 2020, RKPD 2020 menetapkan tema **"Peningkatan Kualitas SDM melalui**

Akses dan Mutu Pelayanan Dasar serta Pengembangan Pariwisata sebagai Penggerak Utama Ekonomi Berbasis Masyarakat". Tema RKPD 2020 ini selanjutnya dijabarkan dalam 7 (tujuh) prioritas daerah untuk tahun 2020, yaitu : 1. Pengentasan Kemiskinan dan stunting 2. Peningkatan Pendapatan Masyarakat 3. Kelestarian Lingkungan Hidup 4. Pembangunan Pariwisata dan Industri Pariwisata 5. Pemantapan Infrastruktur dasar, jalan,air, energi dan transportasi 6. Aksesibilitas dan Kualitas pendidikan dan kesehatan 7. Reformasi Birokrasi.

Tujuh prioritas daerah dimaksud selanjutnya secara operasional akan dilaksanakan melalui program dan kegiatan oleh perangkat daerah sehingga indikator makro pembangunan untuk tahun 2020 dapat dicapai. Pencapaian indikator makro daerah secara umum menunjukkan hasil yang baik, sebagaimana ditunjukkan oleh tabel 2.17 berikut.

Tabel 2.17
Pencapaian Kinerja Makro Daerah Tahun 2018-2020

NO	INDIKATOR	SATUAN	CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN		
			2018	2019	2020
1	Pertumbuhan Ekonomi	%	5,11	5,24	-0,83 (*c to c*) – (pertumbuhan kumulatif)
2	Angka kemiskinan	%	21,03	20,62	21,21
3	Inflasi	%	3,07	0,67	0,61 (*y on y*)
4	IPM	poin	64,39	65,23	65,19
5	Usia Harapan Hidup	tahun	66,38	66,85	67,01
6	Rata-Rata Lama Sekolah	tahun	7,30	7,55	7,63
7	TPT	%	3,01	3,35	4,28
8	Indeks Gini	poin	0,351	0,356	0,356

Sumber : BPS Provinsi NTT, 2021

Pertumbuhan ekonomi Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun 2020 mengalami konstraksi ke level -0,83 %, sangat menurun jika dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi tahun 2018 sebesar 5,11 % dan di tahun 2019 5,24 %. Pertumbuhan ekonomi NTT tahun 2020 yang mengalami konstraksi tersebut masih lebih tinggi jika dibandingkan dengan tingkat pertumbuhan ekonomi nasional yang juga mengalami konstraksi hingga -2,07 %. Tingginya tingkat konstraksi

pertumbuhan ekonomi tersebut sangat dipengaruhi oleh kondisi pandemi covid 19.

Angka kemiskinan menurun dari 21,03 persen keadaan September 2018 menjadi 20,62 persen keadaan September 2019 dan mengalami kenaikan menjadi 21,21 persen pada September tahun 2020.

Indeks Pembangunan Manusia mengalami peningkatan, dari 64,39 poin pada tahun 2018 menjadi 65,23 poin pada tahun 2019, dan pada tahun 2020 mengalami penurunan menjadi 65,19 persen. Capaian komponen pembentuk IPM juga mengalami peningkatan, yaitu usia harapan hidup dari 66,38 tahun pada 2018 menjadi 66,85 pada tahun 2019 dan 67,01 pada tahun 2020. Rata-rata lama sekolah meningkat dari 7,30 tahun pada 2018 menjadi 7,55 tahun pada 2019 dan apada tahun 2020 menjadi 7,63.

Tingkat pengangguran terbuka adalah indikator yang menunjukkan kinerja kurang menggembirakan, dimana mengalami peningkatan dari 3,01 pada tahun 2018 menjadi 3,35 pada tahun 2019 dan 4,28 persen pada tahun 2020.

Indeks Gini mengalami sedikit peningkatan tahun 2018 sebesar 0,351 menjadi 0,356 pada tahun 2019 dan 2020 yang menunjukkan bahwa ketimpangan pendapatan masyarakat kota dan desa relatif tidak berbeda signifikan.

2.3.2 Capaian Pelaksanaan Program dan Kegiatan masing-masing Perangkat Daerah

Memperhatikan hasil capaian kinerja pelaksanaan kegiatan APBD Tahun Anggaran 2020 sampai dengan kondisi bulan Desember 2020 maka dapat disimpulkan bahwa kondisinya tidak seperti tahun-tahun sebelumnya. Hampir sejak awal triwulan I negara-negara di dunia termasuk Indonesia merasakan dampak pandemi Covid 19. Pandemi Covid-19 telah menimbulkan disrupsi pada kehidupan manusia, menyebabkan terhentinya aktivitas ekonomi di seluruh negara dan berakibat terjadinya resesi di dunia. Dampak yang dirasakan Indonesia termasuk Provinsi Nusa Tenggara Timur juga cukup besar dengan terganggunya mata-rantai pasokan barang dan jasa, terganggunya mobilitas masyarakat, dan terhentinya kegiatan ekonomi khususnya pada sektor industri dan pariwisata yang berdampak pada

meningkatnya angka-angka pengangguran dan kemiskinan serta pada akhirnya menimbulkan kontraksi pada pertumbuhan ekonomi masing-masing daerah dan akumulasi secara nasional.

Dampak yang langsung dirasakan juga adalah harus dilakukannya refocusing dan penyesuaian kembali berbagai target indikator kinerja program dan kegiatan serta anggaran yang telah ditetapkan pada RKPD Induk tahun 2020. Hal ini akan yang akan ditampung dalam RKPD Perubahan Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2020. RKPD Perubahan Tahun 2020 yang telah disusun ini disinkronkan dengan kebijakan nasional dan juga kabupaten/kota se Provinsi Nusa Tenggara Timur. Dengan demikian, penyusunan rancangan Perubahan RKPD bertujuan untuk melakukan harmonisasi dan penyesuaian program dan kegiatan prioritas yang tercantum dalam RKPD Induk Tahun 2020 yang diakomodir didalam APBD Tahun Anggaran 2020, serta melakukan penyesuaian dengan adanya refocusing akibat pandemic Covid 19 sekaligus menyinergikannya.

Pencapaian pelaksanaan RKPD Provinsi NTT Tahun 2020 diketahui dari hasil evaluasi terhadap pelaksanaan tersebut. Evaluasi tersebut dilakukan untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan rencana pembangunan, apakah target yang telah ditetapkan dapat dilaksanakan dan dicapai sesuai dengan dengan target yang telah ditetapkan, kemudian bila ada permasalahan dapat diantisipasi dan diambil tindakan sedini mungkin.

Sehubungan dengan pelaksanaan Evaluasi Hasil RKPD Pemerintah Provinsi NTT Tahun 2020, maka Bappelitbangda Provinsi NTT telah melakukan penyampaian Instrumen Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pembangunan dan cara pengisian Matriks Evaluasi RKPD. Sedangkan penyampaian laporan dilakukan secara offline maupun melalui Aplikasi E-monev performance dengan Link URL : http://apps.bappelitbangda.nttprov.go.id/e-kinerja. Penyampaian laporan baik secara online maupun offline telah melalui pelatihan yang dilaksanakan pada tahun sebelumnya maupun dengan penjelasan cara pengisian Format Evaluasi menurut Permendagri No. 86 Tahun 2017, pada lampiran surat yang dikirimkan oleh Bappelitbangda kepada seluruh PD.

Capaian target kinerja dan penyerapan dana program/kegiatan dari seluruh PD lingkup pemerintah Provinsi NTT dilakukan terhadap 39 PD yang menyampaikan laporan Hasil Evaluasi Rencana Kerja (Renja) PD melalui Aplikasi E-monev performance (Kondisi Laporan yang disampaikan ke Bappelitbangda Provinsi NTT s/d tanggal 31 Desember 2020).

Pada pelaksanaan RKPD Provinsi NTT Tahun Anggaran 2020 yang merupakan tahun kedua pelaksanaan RPJMD Provinsi NTT Tahun 2018-2023, terdapat berbagai Program/Kegiatan yang dilaksanakan oleh PD Lingkup Pemerintah Provinsi NTT sesuai dengan 5 Misi Pembangunan Daerah Lingkup Pemerintah Provinsi NTT terdiri dari :

a. 3 Program Non Urusan yang dilaksanakan oleh seluruh PD, yaitu:
    1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran;
    2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur;
    3. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan.
b. Tiga puluh sembilan Program Urusan Wajib Pelayanan Dasar, dan Non Pelayanan Dasar, Urusan Pilihan dan Urusan Penunjang, yaitu :
    1. Program Peningkatan Aksesbilitas dan Kualitas layanan Pendidikan dan Kelestarian Budaya;
    2. Program Pembinaan Perpustakaan dan Kearsipan;
    3. Program Peningkatan Kualitas Pemuda dan Olahraga;
    4. Program Peningkatan terhadap Kualitas dan Aksesibilitas Layanan Kesehatan;
    5. Program Upaya Kesehatan Perorangan;
    6. Program Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
    7. Program Pelayanan Sosial;
    8. Program Pengelolaan Perbatasan Daerah;
    9. Program Penyelenggaraan Ketrentaman dan Ketertiban Umum;
    10. Program Peningkatan Infrastruktur, Tata Ruang dan Kawasan;
    11. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Perhubungan;
    12. Program Peningkatan Energi dan Sumber Daya Mineral;
    13. Program Pengelolaan Perbatasan, Tata Kelola Pemerintahan, Kependudukan dan Otonomi Daerah;
    14. Program Pelestarian Lingkungan Hidup;
    15. Program Peningkatan dan Pengembangan Penanggulangan Bencana;

16. Program Peningkatan Produksi, Nilai Tambah, Daya Saing Pertanian dan Ketahanan Pangan;
17. Program Peningkatan Produksi Peternakan;
18. Program Peningkatan Produksi, Daya saing dan nilai tambah kelautan dan perikanan;
19. Program Pengembangan Perdagangan dan Perindustrian;
20. Program Koordinasi Perekonomian dan Kerja Sama Daerah;
21. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa;
22. Program Pembinaan Tenaga kerja, Koperasi dan UKM;
23. Program Peningkatan Investasi dan Perizinan Daerah;
24. Program Pengembangan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
25. Program Pengembangan Komunikasi dan Informatika;
26. Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal;
27. Program Perencanaan dan Penelitian Pembangunan Daerah;
28. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah;
29. Program Pengelolaan Perbatasan, Pembinaan Politik Dan Perlindungan Masyarakat;
30. Program Pembinaan, Pengembangan, Peningkatan Kompetensi Pegawai;
31. Program Layanan Pemerintahan Daerah;
32. Program Penataan Peraturan Perundang-undangan;
33. Program Peningkatan Administrasi Pembangunan dan Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintahan;
34. Program Peningkatan Pengelolaan Aset;
35. Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah;
36. Program Pembinaan dan Tata Laksana Organisasi;
37. Program Pelayanan Hubungan Masyarakat Dan Protokol;
38. Program Pringkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah;
39. Program Kesatuan Bangsa dan Politik.

c. Dua Program Kolaboratif Pembangunan Provinsi NTT, yaitu ;
   1. Program NTT Bangkit
   2. Program NTT Sejahtera

Keseluruhan Program Pembangunan Daerah di atas, dijabarkan dalam RKPD 2020 secara lebih konkret menurut 5 (lima) misi Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi NTT 2018-2023 sebagai berikut:

1. **Misi 1: Mewujudkan masyarakat sejahtera, mandiri dan adil**

   Misi pertama ini sekaligus merupakan kerangka acuan bagi empat misi lainnya, yaitu melakukan berbagai kegiatan pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat NTT dengan prinsip keterbukaan dan melibatkan semua pihak (*inclusive)* yakni melibatkan semua pihak (*shareholders)* dan dengan pendekatan berkelanjutan yang merujuk kepada empat pilar pembangunan berkelanjutan yaitu keberlanjutan dalam aspek ekonomi, aspek sosial, aspek lingkungan, dan aspek kelembagaan.

2. **Misi 2: Membangun NTT sebagai salah satu gerbang dan pusat pengembangan pariwisata nasional (*ring of beauty*)**

   NTT memiliki berbagai sumberdaya yang melimpah untuk mendukung dan membangun sektor pariwisata. Karena itu, misi ini diarahkan pada upaya optimalisasi pemanfaatannya dalam rangka pengembangan sektor pariwisata dengan pendekatan kewilayahan melalui *tourism estate* sebagai penggerak utama (*prime mover*) ekonomi NTT. Letak geografisnya yang strategis memungkinkan NTT menjadi salah satu gerbang dan pusat pengembangan pariwisata nasional.

3. **Misi 3 : Meningkatkan ketersediaan dan kualitas infrastruktur untuk mempercepat pembangunan**

   Misi ini dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas serta nilai manfaat infrastruktur secara adil dan merata untuk mendukung berbagai aktivitas pelayanan publik dan kelancaran berbagai aktivitas sosial ekonomi serta meningkatkan aksesibilitas ke daerah-daerah perbatasan, daerah terluar, kepulauan dan terisolir.

4. **Misi 4: Meningkatkan kualitas sumber daya manusia**

   Misi ini dimaksudkan untuk menyiapkan sumber daya manusia yang cerdas, terampil dan berdaya saing tinggi agar mampu berpartisipasi dalam proses dan percepatan pembangunan di berbagai bidang.

5. **Misi 5: Mewujudkan reformasi birokrasi pemerintahan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik**

Misi ini dimaksudkan untuk memperkuat reformasi birokrasi dalam penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik, yaitu efektif, bersih, jujur, transparan, inovatif dan akuntabel yang didukung oleh sumber daya aparatur yang profesional dan sistem kelembagaan yang efisien dengan memanfaatkan teknologi informasi. Birokrasi dan aparat diharapkan (dituntut) bekerja dengan profesional dan berorientasi pada hasil serta memberikan manfaatpembangunan sebesar-besarnya bagi masyarakat NTT.

Pencapaian Program Pembangunan diatas, diukur dengan pencapaian pelaksanaaan kegiatan pada RKPD Provinsi Tahun 2020 menurut 5 Misi Pembangunan Provinsi NTT yang dilaksanakan oleh 39 PD, yaitu :

- MISI I: Mewujudkan masyarakat sejahtera, mandiri dan adil terdiri dari 63 kegiatan dan dilaksakan oleh 15 Perangkat Daerah;
- MISI II: Membangun NTT sebagai salah satu gerbang dan pusat pengembangan pariwisata nasional (Ring of Beauty) terdiri dari 7 kegiatan oleh 15 Perangkat Daerah
- MISI III: Meningkatkan ketersediaan dan kualitas Infrastruktur untuk mempercepat pembangunan terdiri dari 10 kegiatan oleh 4 Perangkat Daerah
- MISI IV: Meningkatkan kualitas sumber daya manusia terdiri dari 23 kegiatan oleh 5 Perangkat Daerah
- MISI V: Mewujudkan reformasi birokrasi pemerintahan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik terdiri dari 31 kegiatan oleh 15 Perangkat Daerah

Ada 15 PD yang melaksanakan program/kegiatan untuk pelaksanaan lebih dari satu Misi yaitu Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, Dinas Peternakan, Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas ESDM, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Dinas Kesehatan, Dinas PUPR, Dinas Perhubungan, Dinas Penanggulangan Bencana Daerah, Dinas Komunikasi dan Informatika, Dinas Koperasi, Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa serta Dinas Kearsipan dan Perpustakaan.

Berikut ini disampaikan Tingkat Capaian Realisasi Anggaran perprogram yang dilaksanakan oleh 39 PD Lingkup Pemerintah Provinsi NTT menurut Sasaran dan 5 (lima) Misi Pembangunan Provinsi NTT Tahun 2020 Keadaan Triwulan IV:

Tabel 2.18
Capaian Realisasi Anggaran
menurut Sasaran dan 5 (lima) Misi Pembangunan Provinsi NTT Tahun 2020

SASARAN	PROGRAM	ANGGARAN	REALISASI	%
MISI I: Mewujudkan masyarakat sejahtera, mandiri dan adil				
1. Meningkatnya ketersediaan, aksesibilitas, kualitas, dankeamanan pangan	Program Peningkatan Produksi, Nilai Tambah, Daya Saing Pertanian dan Ketahanan pangan	33.575.800.100	21.183.027.209	63,09
	Program Peningkatan Produksi Peternakan	16.714.371.191	1.741.469.000	10,42
	PROGRAM PENINGKATAN PRODUKSI, DAYA SAING DAN NILAI TAMBAH KELAUTAN DAN PERIKANAN	35.246.278.900	33.052.531.807	93,78
2. Meningkatnya kinerja industri dan perdagangan dalam perekonomiandaerah	Program Pengembangan Perdagangan dan Perindustrian	18.370.746.000	4.710.879.405	25,64
	Program Koordinasi Perekonomian Dan Kerja Sama Daerah	1.943.161.363	1.805.923.534	92,94
3. Terciptanya iklim investasi dan usaha yang kondusif serta kesempatan kerja yang merata bagi semua penduduk	Program Peningkatan Investasi dan Perizinan Daerah	2.036.515.120	1.436.686.170	70,55
	Program Pembinaan	5.216.638.826	4.993.746.327	95,73

SASARAN	PROGRAM	ANGGARAN	REALISASI	%
	Koperasi, UKM, Tenaga Kerja dan Transmigrasi			
	Program Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	11.044.174.346	10.420.592.290	94,35
1. Meningkatnya peran semua penduduk dalam pembangunan daerah	Program Pelayanan Sosial	17.604.281.540	16.856.285.329	95,75
	Program Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	886.765.100	877.673.600	98,97
	Program Penyelenggaraan Ketrentaman dan Ketertiban Umum	3.072.226.000	2.876.754.720	93,64
2. Meningkatnya ketersediaan dan akses terhadap rumah layak huni, bagi penduduk miskin	Program Peningkatan Infrastruktur, Tata Ruang dan Kawasan	717.273.276.310	544.135.203.421	75,86
1. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Program Pelestarian Lingkungan Hidup	13.862.531.847	12.011.174.537	86,64
2. Meningkatnya ketangguhan bencana daerah	Program Peningkatan dan Pengembangan Penanggulangan Bencana	2.320.639.100	1.962.356.600	84,56
MISI II: Membangun NTT sebagai salah satu gerbang dan pusat pengembangan pariwisata nasional (*Ring of Beauty*)				
1. Terwujudnya pengembangan pariwisata NTT melalui pemenuhan	Program Pengembangan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	7.879.390.000	7.403.366.840	93,96

SASARAN	PROGRAM	ANGGARAN	REALISASI	%
unsur 5A pariwisata dengan pola pendekatan kawasan				
MISI III: Meningkatkan ketersediaan dan kualitas Infrastruktur untuk mempercepat pembangunan				
1. Meningkatnya aksesibilitas dan kualitas infrastruktur	Program Peningkatan Infrastruktur, Tata Ruang dan Kawasan	717.273.276.310	544.135.203.421	75,86
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana perhubungan	8.659.148.173	8.659.148.173	100,00
	Program Peningkatan Energi dan Sumber Daya mineral	16.250.796.632	15.092.683.533	92,87
MISI IV: Meningkatkan kualitas sumber daya manusia				
1. Meningkatnya akses dan kualitas layanan pendidikan	Progam Peningkatan Aksesbilitas dan Kualitas layanan Pendidikan serta Kelestarian	857.454.349.144	699.335.450.752	81,56
	Program Penyelenggaraan Kearsipan dan Perpustakaan	1.570.064.900	1.495.017.860	95,22
	Program Peningkatan Kualitas Pemuda dan Olahraga	4.103.633.000	3.968.494.492	96,71
2. Meningkatnya akses dan kualitas layanan kesehatan	Program Peningkatan Aksesibilitas dan Kualitas Layanan Kesehatan	167.562.022.718	136.344.331.913	81,37
	Program Upaya Kesehatan	138.217.658.010	127.091.965.301	91,95

SASARAN	PROGRAM	ANGGARAN	REALISASI	%
	Perseorangan			
3. Terwujudnya Penanggulangan Masalah Gizi Balita	Program Upaya Kesehatan Perseorangan	138.217.658.010	127.091.965.301	91,95
MISI V: Mewujudkan reformasi birokrasi pemerintahan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik				
1. Meningkatnya kualitas tatakelola panyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang efektif, akuntabel, transparan serta partisipatif	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal	13.312.790.200	12.957.001.800	97,33
	Program Perencanaan dan Penelitian Pembangunan Daerah	8.824.923.625	7,787,460,680	88,24
	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	25.823.846.412	24.590.637.471	95,22
	Program Peningkatan Pendapatan dan Pengelolaan Aset daerah	27.411.854.150	26.463.695.033	96,54
	Program Pengembangan Kepegawaian Dan Kopri	7.633.113.050	6.757.311.881	88,53
	Program Peingkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah	66.299.254.600	65.624.291.391	98,98
	Program Peningkatan Administrasi Pembangunan dan Pelayanan PBJ Pemerintah	1.027.720.448.873	899.396.065.264	87,51
	Program Tata Kelola Pemerintahan,	2.906.142.000	2.424.766.712	83,44

SASARAN	PROGRAM	ANGGARAN	REALISASI	%
	Perbatasan, Kependudukan dan Otonomi Daerah			
	Program Pembinaan dan Tata Laksana Organisasi	1.307.786.400	1.116.651.700	85,38
	Program Penataan Peraturan Perundang-undangan	2.683.915.621	3.022.519.000	112,62
	Program Peningkatan Kompetensi Pegawai	21.742.118.800	19.143.703.295	88,05
	Program Pengembangan Komunikasi dan Informatika	169.286.000	167.486.000	98,94
	Program Layanan Pemerintahan Daerah	2.026.141.000	1.622.675.536	80,09
	Program Pelayanan Hubungan Masyarakat Dan Protokol	3.510.781.400	3.464.400.410	98,68
	Program Pembinaan Politik, Kesatuan Bangsa, dan Kewaspadaan nasional	2.108.025.090	1.770.582.050	83,99
	Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daera	20.570.440.000	18.693.673.923	90,88

Berikut disajikan hasil capaian target kinerja Program dan Kegiatan RKPD Tahun 2020 sesuai dengan Tujuan dan Sasaran RPJM Provinsi NTT Tahun 2018-2023 sesuai dengan Tabel 2.19 berikut ini :

Tabel 2.19

Capaian Target Kinerja Program dan Kegiatan RKPD Tahun 2020 sesuai dengan Tujuan dan Sasaran RPJMD Provinsi NTT Tahun 2018-2023

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Capaian Kinerja RPJMD Pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja SKPD s/d Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang di evaluasi (n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang di evaluasi (Tahun n-1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%)		Perangkat Daerah Penaggung Jawab	Ket
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		Non Urusan																	
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran yang berkualitas	100,00	5.998.774.962.472	0	0	100,00	1.849.747.114.251	0	0	0	0	0	0	0	0	39 PD	
			Meningkatnya sarana dan prasarana	100,00	0	0	0	100,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	39 PD	
			Tercapainya penyusunan capaian kinerja ikhtisar realisasi kinerja dan keuangan	100,00	0	0	0	100,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	39 PD	
		Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar																	
		1. Pendidikan																	
		Program Pengelolaan Pendidikan	Meningkatnya Persentase Partisipasi Sekolah	0	5.831.347.615.366	0	0	0	1.864.382.228.124		87.968.073.592		4,72	-	87.968.073.592		1,508537638	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
			APS kelompok 16 - 18 Tahun (SMA dan SMK) (Data Terpilah Gender)	100,00	0	0	0	100,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			- APS SLB	100,00	0	0	0	100,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			Meningkatnya SMK yang direvitalisasi menjadi SMK Percontohan dengan kualitas lulusan yang bersaing (Jurusan Pariwisata, Kuliner, Fashion, dan Maritim) (8 Unit)	100 (8 Unit)	0	0	0	50,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		Program Pengembangan Kurikulum	Cakupan SLB, SMA dan SMK berakreditasi B	0	2.001.160.000	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
			1. Cakupan SLB berakreditasi B (32 unit)	0,19	0	0	0	0,06	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			2. Cakupan SMA berakreditasi B (554 Unit)	45,10	0	0	0	29,96	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			3. Cakupan SMK berakreditasi B (295 unit)	25,10	0	0	0	14,92	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			Cakupan Pemenuhan SPM Pendidikan	100,00	0	0	0	100,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Cakupan Ketersediaan Guru SLB, SMA dan SMK berkompeten (bersertifikat) setiap tahun	0	1.551.106.200	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
			1. Cakupan Ketersediaan Guru SLB berkompeten (bersertifikat) setiap tahun (847 orang)	100,00	0	0	0	49,94	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			2. Cakupan Ketersediaan Guru SMA berkompeten (bersertifikat) setiap tahun (16.164 orang)	100,00	0	0	0	49,49	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			3. Cakupan Ketersediaan Guru SMK berkompeten (bersertifikat) setiap tahun (8.024 orang)	100,00	0	0	0	49,85	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		Program Pengembangan Bahasa dan Sastra	Meningkatnya Pembinaan, Pengembangan dan Perlindungan Bahasa dan Sastra yang Penuturannya Lintas Daerah Kab/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi (12 paket bahasa dan sastra)	100,00	2.340.727.872	0	0	33,33	748.371.000	0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Capaian Kinerja RPJMD Pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja SKPD s/d Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang di evaluasi (n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang di evaluasi (Tahun n-1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%)		Perangkat Daerah Penaggung Jawab	Ket
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		2. Kesehatan																	
		Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat		0	692.589.937.748	0	0	0	221.432.927.084		8.675.875.637,00	0	3,92	0	8.675.875.637	0	1,252671338		
			Pelayanan Kesehatan bagi penduduk terdampak Krisis Kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana (SPM Kesehatan Provinsi)	0	0	0	0	100,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS KESEHATAN	
			Pelayanan kesehatan bagi orang yang terdampak dan berisiko pada situasi KLB Provinsi (SPM Kesehatan Provinsi)	0	0	0	0	100,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS KESEHATAN	
			Peningkatan kualitas layanan UKM dan UKP (Akreditasi Puskesmas : 418 Unit, Akreditasi RS: 53 Unit, 471 Unit)	0	0	0	0	75,60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS KESEHATAN	
			Peningkatan cakupan pelayanan kesehatan masyarakat melalui layanan kesehatan bergerak di DTPK (Daerah Tertinggal, Perbatasan dan Kepulauan) (Total 7 Unit)	0	0	0	0	28,57	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS KESEHATAN	
			Kasus Kematian Ibu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS KESEHATAN	
			Kasus Kematian Bayi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS KESEHATAN	
			Kasus Kematian Balita	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS KESEHATAN	
			Wasting (Gizi Buruk dan Gizi Kurang)	0	0	0	0	8,3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS KESEHATAN	
			Underweight	0	0	0	0	16,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS KESEHATAN	
			Prevalensi Stunting	0	0	0	0	20,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS KESEHATAN	
			Angka Kelahiran Total (TFR)	0	0	0	0	3,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS KESEHATAN	
			Angka Pemakaian Kontrasepsi (CPR)	0	0	0	0	51,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS KESEHATAN	
			Peningkatan Fasilitas Pelayanan, Sarana Prasarana dan Alkes untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Provinsi (Target : 6 unit)	0	0	0	0	50,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS KESEHATAN	
			Persentase Kasus HIV yang diobati	0	0	0	0	52,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS KESEHATAN	
			Persentase Kabupaten / Kota mencapai Eliminasi Malaria	0	0	0	0	50,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS KESEHATAN	
			Kab/kota dengan angka keberhasilan pengobatan (success Rate) TBC>85%	0	0	0	0	50,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS KESEHATAN	
			Kabupaten / kota dengan prevalensi Rate Kusta <1/10.000	0	0	0	0	91	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS KESEHATAN	
			Meningkatnya pencapaian SPM Rumah Sakit	0	0	0	0	100,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	RSUD PROF. DR. W.Z. JOHANNES KUPANG	
			Meningkatnya Kemandirian BLUD RSU	0	0	0	0	48,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	RSUD PROF. DR. W.Z. JOHANNES KUPANG	
		Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Persentasi Puskesmas dengan Tenaga Kesehatan Sesuai Standar (Puskesmas : 9 Jenis tenaga kesehatan) Target : dari 92 menjadi 418 unit	100,00	77.051.676.317	0	0	47,85	24.634.747.480	0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS KESEHATAN	
			Persentasi Rumah Sakit dengan Tenaga Kesehatan Sesuai Standar (53 RS : 12 Jenis	0	0	0	0	47,17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS KESEHATAN	
			Persentasi SDM Kesehatan yang ditingkatkan Kompetensi dan Kualifikasinya	0	0	0	0	62,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS KESEHATAN	
			Persentasi SDM RSU Daerah yang ditingkatkan Kompetensi dan Kualifikasinya	100,00	0	0	0	100,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	RSUD PROF. W. Z JOHANNES KUPANG	
		Program Sediaan Farmasi Alat Kesehatan dan Makanan dan Minuman	Ketaatan dan Kepatuhan Pedagang Besar Farmasi (PBF) Cabang dan Cabang Penyalur Alat Kesehatan (PAK)	0	1.701.434.500	0	0	100,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS KESEHATAN	
		Program Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kesehatan	Peningkatan Cakupan Pemberdayaan Masyarakat melalui pos Upaya Kesehatan Kerja (UKK)	0	711.235.000	0	0	72,73	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS KESEHATAN	
			Peningkatan Cakupan upaya kesehatan berbasis masyarakat (22 Kab x 20 Desa = 440 Desa)	0	0	0	0	45,45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS KESEHATAN	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Capaian Kinerja RPJMD Pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja SKPD s/d Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang di evaluasi (n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang di evaluasi (Tahun n-1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%)		Perangkat Daerah Penaggung Jawab	Ket
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman																	
		Program Pengelolaan Sumber Daya Air	Cakupan Pembangunan Embung dan Bangunan Penampung Air setiap tahun (Target pembangunan 142 embung)	0	555.487.814.130	0	0	10,56	105.361.673.330	-	-	-	-	-	-	-	-	Dinas PUPR	
			Cakupan Pemeliharaan embung Kecil (142 Buah) dan bangunan penampung air setiap tahun	0		0	0	33,80		-	-	-	-	-	-	-	-	Dinas PUPR	
			Cakupan Pemeliharaan Saluran irigasi menurut Klasifikasinya setiap tahun	0		0	0	75,02		-	-	-	-	-	-	-	-	Dinas PUPR	
			Cakupan Pemeliharaan Daerah Irigasi Kewenangan Provinsi setiap tahunnya (42 DI = 60.328 ha)	0		0	0	28,84		-	-	-	-	-	-	-	-	Dinas PUPR	
			Cakupan Koordinasi dan Sinkronisasi Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Provinsi	0		0	0	70,00		-	-	-	-	-	-	-	-	Dinas PUPR	
			Cakupan Pemeliharaan Bangunan Perkuatan Tebing pada 22 Sungai	0		0	0	86,36		-	-	-	-	-	-	-	-	Dinas PUPR	
		Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Cakupan KK yang mampu mengakses air minum layak tingkat Provinsi	0	20.488.968.694	0	0	83,00	6.550.676.040	-	-	-	-	-	-	-	-	Dinas PUPR	
			Cakupan KK yang mampu mengakses air minum layak di di Kawasan Destinasi Pariwisata	0		0	0	77,00		-	-	-	-	-	-	-	-	Dinas PUPR	
		Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional	Cakupan Pembangunan TPA / TPST / SPA terbangun lingkup Provinsi	0	20.488.968.694	0	0	32,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Dinas PUPR	
		Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Cakupan Pengelolaan Limbah Domestik	0	1.162.770.000	0	0	66,00	0	-	-	-	-	-	-	-	-	Dinas PUPR	
		Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	Cakupan Penanganan Kawasan banjir sekitar wilayah sungai yang merupakan kewenangan Provinsi	0	3.000.000.000	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Dinas PUPR	
		Program Pengembangan Permukiman	Cakupan Kawasan Permukiman Kumuh yang ditangani setiap tahun	0	343.629.453.572	0	0	70,00	109.864.252.409	-	-	-	-	-	-	-	-	Dinas PUPR	
			Cakupan Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Provinsi yang ditangani setiap tahun	0		0	0	40,91		-	-	-	-	-	-	-	-	Dinas PUPR	
			Cakupan Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum Layak Lingkup Provinsi setiap tahun di Kawasan Destinasi Wisata	0		0	0	31,82		-	-	-	-	-	-	-	-	Dinas PUPR	
		Program Penataan Bangunan Gedung	Cakupan Penataan bangunan sesuai ketentuan tata bangunan setiap tahun	0	2.777.192.325	0	0	2,00	887.916.200	-	-	-	-	-	-	-	-	Dinas PUPR	
			Cakupan Pembinaan penyelenggaraan bangunan gedung setiap tahun	0		0	0	20,00		-	-	-	-	-	-	-	-	Dinas PUPR	
		Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya	Terlaksananya penyelenggaraan penataan bangunan dan lingkungan untuk kepentingan strategis daerah provinsi dan lintas Kab/Kota	0		0	0	-		-	-	-	-	-	-	-	-	Dinas PUPR	
		Program Penyelenggaraan Jalan	Peningkatan Cakupan Kemantapan Jalan Provinsi	0	2.215.069.637.157	0	0	100,00	1.218.444.330.758	-	-	-	-	-	-	-	-	Dinas PUPR	
			Persentase ketersediaan jalan dan jembatan ke 22 Pariwisata Estate	0		0	0	100,00		-	-	-	-	-	-	-	-	Dinas PUPR	
		Program Pengembangan Jasa Konstruksi	Terselenggaranya industri konstruksi yang memenuhi 5 aspek jasa konstruksi yaitu Tepat waku, Tepat Mutu, Tepat Kuantitas, Tepat sasaran dan Tepat Manfaat	0	9.773.041.915	0	0	68,00	3.124.609.758	-	-	-	-	-	-	-	-	Dinas PUPR	
		Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Cakupan wilayah provinsi dan Kabupaten/Kota yang telah memiliki Perda RUTR dan RDTR	0	20.883.730.538	0	0	25,32	6.676.888.198	-	-	-	-	-	-	-	-	Dinas PUPR	
			Penurunan Cakupan Penyimpangan terhadap RUTR dan RDTR pada Tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota	0		0	0	27,27		-	-	-	-	-	-	-	-	Dinas PUPR	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Capaian Kinerja RPJMD Pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja SKPD s/d Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang di evaluasi (n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang di evaluasi (Tahun n-1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%)		Perangkat Daerah Penaggung Jawab	Ket
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		4. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman												-	-				
		Program Pengembangan Perumahan	Ketersediaan rumah bagi warga yang terkena relokasi rumah program pemerintah provinsi	0	8.896.860.610	0	0	-	2.246.860.610	-	-	-	-	-	-	-	-	Dinas PUPR	
		Program Kawasan Permukiman	Peningkatan Cakupan Rumah Layak Huni (Target penanganan RTLH sampai dengan 2023 = 47.948 Unit)	0	128.869.047.970	0	0	45,00	41.201.653.312	-	-	-	-	-	-	-	-	Dinas PUPR	
			Persentase rumah tangga menurut sanitasi layak	0		0	0	77,00	0	-	-	-	-	-	-	-	-	Dinas PUPR	
		Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	Peningkatan Cakupan Prasarana dan Utilitas Umum pada Permukiman	0	41.045.879.528	0	0	33,00	13.123.074.352	-	-	-	-	-	-	-	-	Dinas PUPR	
		5. Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyakarat												-	-				
		Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Meningkatnya pencapaian SPM Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	100,00	10.329.480.207	0	0	100,00	3.302.512.660	14,76	895.882.270	14,76	27,13	14,76	895.882.270		8,673062458	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	
			Meningkatnya Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat (Jumlah Perda yang ditegakkan)	100,00		0	0	100,00		-		-		-	-			SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	
		Program Penanggulangan Bencana	Cakupan Daerah (Provinsi dan Kabupaten/Kota) yang memiliki rencana Kontinjensi Kebencanaan	0	4.942.726.379	0	0	60,00	1.580.274.720			-	-	-	-		0	BPBD	
			Cakupan Pemasangan Rambu Peringatan dini pada daerah rawan bencana	0		0	0	-						-	-			BPBD	
			Cakupan Pemasangan Rambu Peringatan dini pada Kawasan Pariwisata Estate	0		0	0	33,33						-	-			BPBD	
			Cakupan Desa/Kelurahan tangguh bencana pada Kawasan Pariwisata Estate	0		0	0	75,00						-	-			BPBD	
		Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Cakupan Pencegahan Daerah Berpotensi Rawan Kebakaran setiap Tahun	100,00	562.993.861	0	0	100,00	179.998.830	9,88	8.330.000	9,88	4,63	9,88	8.330.000		1,479589847	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	
			Cakupan Penanggulangan Daerah Berpotensi Rawan Kebakaran setiap Tahun	0	0	0	0	25,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Cakupan Penyelamatan Daerah Berpotensi Rawan kebakaran:	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			a. Kebakaran	0	0	0	0	25,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			b. Non Kebakaran	0	0	0	0	25,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6. Sosial												-	-				
		Program Pemberdayaan Sosial	Peningkatan Cakupan PMKS (Target Total PSKS=110 Unit)	100,00	12.628.575.621	0	0	80,00	4.037.573.046	0	524.037.750	0	12,98	0	524.037.750	0	4,149618815	DINAS SOSIAL	
		Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan	Meningkatnya penanganan warga negara pekerja migran korban tindak kekerasan (Jumlah Warga Negara Migran Yang Ditangani)	100,00	767.013.121	0	0	80,00	245.227.300	0	37.490.186	0	15,29	0	37.490.186	0	4,887815473	DINAS SOSIAL	
		Program Rehabilitasi Sosial	Meningkatnya pencapaian SPM bidang sosial	100,00	33.460.289.795	0	0	80,00	10.697.830.717	0	2.728.645.322	0	25,51	0	2.728.645.322	0	8,154876538	DINAS SOSIAL	
		Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Peningkatan Cakupan Jaminan Sosial bagi PMKS	100,00	10.249.899.976	0	0	80,00	3.277.069.490	0	456.900.000	0	13,94	0	456.900.000	0	4,457604475	DINAS SOSIAL	
		Program Penanganan Bencana	Peningkatan Cakupan Penanganan Korban Bencana Skala Provinsi	100,00	1.808.766.904	0	0	80,00	578.293.920	0	48.460.400	0	8,38	0	48.460.400	0	2,679195417	DINAS SOSIAL	
		Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	Meningkatnya pengelolaan Taman Makam Pahlawan kewenangan provinsi	100,00	228.051.842	0	0	100,00	72.912.100	0	24.213.700	0	33,21	0	24.213.700	0	10,61762967	DINAS SOSIAL	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Capaian Kinerja RPJMD Pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja SKPD s/d Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang di evaluasi (n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang di evaluasi (Tahun n-1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%)		Perangkat Daerah Penaggung Jawab	Ket
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		Urusan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar																	
		1. Tenaga Kerja						70,00	314.738.430										
		Program pelatihan kerja dan produktivitas tenaga kerja	Peningkatan cakupan peserta pelatihan bersertifikat kompetensi dibanding jumlah peserta pelatihan	90,00	984.427.531	0	0	50,00		0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS KOPERASI, UKM, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	
			Persentasi penyerapan eks peserta pelatihan di pasar kerja	60,00		0	0	45,00	193.237.230	0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS KOPERASI, UKM, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	
		Program Penempatan Tenaga Kerja	Persentasi besaran pencari kerja terdaftar yang ditempatkan	55,00	604.400.451	0	0	70,00		0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS KOPERASI, UKM, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	
			Persentasi meningkatnya PMI prosedural	85,00		0	0	45,00	102.191.520	0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS KOPERASI, UKM, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	
		Program Hubungan Industrial	Persentase jumlah perusahaan yang melaksanakan Upah Minimum Provinsi	90,00		0	0	75,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS KOPERASI, UKM, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	
			Persentase kasus ketenagakerjaan yang diselesaikan	85,00		0	0	40,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS KOPERASI, UKM, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	
		Program Pengawasan Ketenagakerjaan	Persentase Jumlah Perusahaan yang melaksanakan Norma Kerja di Provinsi NTT	70,00	245.751.433	0	0	45,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS KOPERASI, UKM, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	
			Persentase Pemeriksaan Perusahaan oleh Pengawas	65,00		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS KOPERASI, UKM, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	
		2. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak																	
		Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Cakupan Kabupaten dan Kota yang melaksanakan Pengarusutamaan Gender (PUG) (22 Kabupaten/Kota)	100,00	5.534.382.381	0	0	32,00	1.769.437.330	0	122.867.630,00	0	6,94	0	122.867.630	0	2,220078439	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
			Cakupan Perangkat Daerah yang melaksanakan Pengarusutamaan Gender (PUG) (53 Unit)	100,00		0	0	71,79		0		0		0	0	0	0	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
		Program Perlindungan Perempuan	Peningkatan Cakupan penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan (Total 290 Kasus)	100,00	3.089.418.083	0	0	75,00	987.740.150	0	25.432.550,00	0	2,57	0	25.432.550	0	0,823214901	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
			Peningkatan Cakupan penanganan kasus kekerasan terhadap anak (295 Kasus)	100,00		0	0	75,00		0		0		0	0	0	0	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
		Program Peningkatan Kualitas Keluarga	Peningkatan Cakupan Keluarga yang melaksanakan pola asuh setara gender (0 KK menjadi 750 KK)	100,00	1.457.665.127	0	0	25,00	466.040.637	0	39.772.020	0	8,53	0	39.772.020	0	2,728474412	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
			Peningkatan lembaga yang memfasilitasi terwujudnya ketahanan keluarga (Target total = 10 Lembaga)	100,00	0	0	0	60,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
			Peningkatan Cakupan pendampingan Champion Gender dalam pola asuh pemenuhan hak anak untuk pencegahan stunting (Target: 500 Keluarga)	100,00	0	0	0	25,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
		Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak	Cakupan ketersediaan dan pemanfaatan data gender dan anak	50,00	563.962.998	0	0	20,00	180.308.680	0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
		Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	Peningkatan Cakupan Desa Layak Anak (Jumlah Desa yang telah mencapai tahapan Desa layak anak : Target 250 Desa)	100,00	2.509.157.589	0	0	32,2	802.220.880	0	28.784.020	0	3,59	0	28.784.020	0	1,147158717	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
		Program Perlindungan Khusus Anak	Peningkatan cakupan perlindungan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum yang mendapatkan layanan komprehensif / sesuai standar (Target : 125 ABH)	60,00	282.474.497	0	0	5,60	90.311.960	0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Capaian Kinerja RPJMD Pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja SKPD s/d Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang di evaluasi (n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang di evaluasi (Tahun n-1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%)		Perangkat Daerah Penaggung Jawab	Ket
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		3. Pangan																	
		Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Prosentase Peningkatan konsumsi pangan perkapita sesuai angka kecukupan gizi di kantong kemiskinan dan Stunting	2,72	9.843.537.844	0	0	2,87	3.147.148.520	0	586.427.500	0	18,63	0	586.427.500	0	5,957487128	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	
			Prosentase Peningkatan Konsumsi Pangan Pokok Non Beras di kantong kemiskinan dan Stunting	8,50	0	0	0	10,20		0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	
		Penanganan kerawanan pangan	Persentase Penurunan Jumlah Desa Rawan Pangan (Tahun 2019 = 742 Desa, 2023 = 0 Desa)	0	390.838.227	0	0	50,00	124.957.710	0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	
		Program Pengawasan keamanan pangan	Persentase Peningkatan produsen pangan segar terjamin keamanan pangan (Target 2023=86 Kelompok)	100,00	997.753.651	0	0	48,84	318.999.020	0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	
		4. Pertanahan																	
		Program Pengelolaan Izin Lokasi	Pelayanan Rekomendasi Izin Lokasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota Dalam Daerah Provinsi	100,00	0	0	0	27,27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas PUPR	
		Program Penyelesaian Ganti Kerugian Dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan	Penyelesaian masalah ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan oleh pemerintah Provinsi	100,00	0	0	0	27,27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas PUPR	
		Program Redistribusi Tanah Dan Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum Dan Tanah Absentee	Penetapan subyek dan obyek redistribusi tanah serta ganti kerugian tanah kelebihan maksimum dan tanah absentee lintas daerah Kabupaten/Kota dalam daerah Provinsi	100,00	0	0	0	27,27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas PUPR	
		Program Penetapan Tanah Ulayat	Penetapan tanah ulayat yang lokasinya lintas daerah Kabupaten/Kota dalam daerah Provinsi	100,00	0	0	0	27,27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas PUPR	
		Program Pengelolaan Tanah Kosong	Fasilitasi penyelesaian masalah tanah kosong lintas daerah kabupaten/kota dalam provinsi serta Inventarisir dan memanfaatkan tanah kosong lintas daerah Kabupaten/Kota dalam daerah Provinsi	100,00	0	0	0	27,27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas PUPR	
		Program Penatagunaan Tanah	Perencanaan penggunaan tanah yang hamparannya lintas daerah Kabupaten/Kota dalam daerah Provinsi	100,00	1.062.586.052	0	0	27,27	339.727.055	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas PUPR	
		5. Lingkungan Hidup																	
		Program Perencanaan lingkungan hidup	Persentase Pemanfaatan dokumen Perencanaan LH	100,00	3.120.174.793	0	0	56,52	997.573.600	0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS KEHUTANAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	
		Program Pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	75,66	6.170.070.012	0	0	75,13	1.972.677.610	0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS KEHUTANAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	
		Program Pengendalian bahan berbahaya dan beracun (B3) dan limbah bahan berbahaya dan beracun (Limbah B3)	Persentase limbah B3 yang diangkut atau diolah	51,33	22.940.453.032	0	0	10,00	7.334.457.789	0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS KEHUTANAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	
		Program Pembinaan dan pengawasan terhadap izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (PPLH)	Persentase pemenuhan ketentuan ijin lingkungan dan ijin PPLH	100,00	926.598.928	0	0	58,26	296.249.630	0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS KEHUTANAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	
		Program Penghargaan lingkungan hidup untuk masyarakat	Persentase peningkatan kualitas LH di suatu daerah	25,00	1.626.714.494	0	0	8,33	520.088.630	0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS KEHUTANAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	
		Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	Persentase pengaduan lingkungan hidup yang tertangani	50,00	832.822.996	0	0	33,33	266.267.850	0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS KEHUTANAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	
		Program Pengelolaan persampahan	Persentase Pengurangan dan Penanganan Sampah	27,00	1.666.790.315	0	0	24,00	532.901.560	0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS KEHUTANAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Capaian Kinerja RPJMD Pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja SKPD s/d Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang di evaluasi (n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang di evaluasi (Tahun n-1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		6. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil																	
		Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Cakupan kepemilikan KTP elektronik untuk penduduk wajib KTP	100,00	1.915.356.560	0	0	95,00	612.372.468	0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS KESEHATAN	
			Cakupan penduduk <17 tahun memiliki kartu identitas anak	100,00	0	0	0	60,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS KESEHATAN	
			Cakupan anak 0-18 tahun memiliki akta kelahiran	100,00	0	0	0	85,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS KESEHATAN	
			Cakupan Pemanfaatan Data Kependudukan (Perjanjian Kerjasama dengan Perangkat Daerah = 10 PD)	100,00	0	0	0	51,28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS KESEHATAN	
		7. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa																	
		Program Penataan Desa	Meningkatnya penataan pemerintahan dan pelayanan kemasyarakatan di desa (Jumlah Desa persiapan yang telah memiliki kode registrasi)	100,00	0	0	0	90,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA	
		Program Peningkatanan Kerjasama Desa	Meningkatnya kerja sama desa dengan pihak non pemerintah (Jumlah perjanjian kerjasama desa dengan Pihak Ketiga (Bumdes Bersama; BKAD; BPMD, Posyandu)	100,00	0	0	0	31,82	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA	
		Program Administrasi Pemerintahan Desa	Meningkatnya status desa minimal Desa Berkembang sebanyak 132 desa sampai dengan tahun 2023	100,00	6.133.095.341	0	0	33,33	1.960.856.171	93,30	35.766.560,00	279,90	1,82	93,30	35.766.560	93,30	0,583173064	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA	
		Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	Peningkatan Cakupan Pemberdayaan Kelompok Masyarakat	0	111.258.029.698	0	0	0	35.571.107.570		4.859.810.932,00	0	13,66	0	4.859.810.932	0	4,368054104	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA	
			Bidang Ekonomi (Target Tahun 2023 = 1.500 Unit)	100,00	0	0	0	76,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA	
			Bidang Sosial (Target Tahun 2023 = 6.652 Unit Aktif)	100,00	0	0	0	87,09	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA	
			Adat (Target 2023= 132 Unit)	100,00	0	0	0	33,33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA	
			Peningkatan Cakupan Pemberdayaan		0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			PKK Aktif	100,00	0	0	0	60,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA	
			Persentase Peningkatan BUMDES Aktif (Tahun 2010=780 Bumdes, 2023 = 1500 Bumdes)	100,00	0	0	0	76,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA	
		8. Perhubungan																	
		Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Peningkatan Cakupan fasilitas keselamatan jalan terpasang pada Ruas Jalan Provinsi	100,00	10.565.902.702	0	0	20,00	3.378.101.002	0	365.680.043	0	10,83	0	365.680.043	0	3,460944638	DINAS PERHUBUNGAN	
		Program Pengelolaan Pelayaran	Peningkatan Kecepatan Layanan Pemberian Ijin dan Rekomendasi di Bidang Pelayaran	30,00	71.167.742.357	0	0	25,00	22.753.552.492	0	3.653.375.436	0	16,06	0	3.653.375.436	0	5,133471029	DINAS PERHUBUNGAN	
			Persentase Peningkatan Arus Masuk dan Keluar Barang di Pelabuhan yang dikelola Pemerintah Provinsi	75,00		0	0	50,00		0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS PERHUBUNGAN	
		Program Pengelolaan Perkeretaapian	Meningkatnya perencanaan kapasitas mobilisasi orang dan distribusi barang serta terpenuhinya kebutuhan pertahanan keamanan di kawasan perbatasan	100,00	4.065.994.363	0	0	-	1.299.968.400	0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS PERHUBUNGAN	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Capaian Kinerja RPJMD Pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja SKPD s/d Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang di evaluasi (n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang di evaluasi (Tahun n-1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%)		Perangkat Daerah Penaggung Jawab	Ket
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		9. Komunikasi dan Informatika																	
		Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	Persentase Peningkatan Skor keterbukaan informasi publik	93 (Informatif)	3.392.446.875	0	0	80 (Menuju Informatif)	1.084.623.672	0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
			Persentase Kelengkapan Informasi Publik pada Kawasan Pariwisata Estate	100,00	0	0	0	31,80	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
		Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Meningkatnya Indeks Penyelenggaraan SPBE	2,70	9.771.142.136	0	0	2,30	3.124.002.366	0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
		10. Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah																	
		Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam	Persentase Koperasi aktif	100,00	0	0	0	93,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS KOPERASI, UKM, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	
			Persentase Pemberian Ijin Usaha Simpan Pinjam	7,00	0	0	0	3,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS KOPERASI, UKM, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	
			Persentase Pembentukan Koperasi Kelompok Perempuan	20,00	0	0	0	10,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS KOPERASI, UKM, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	
		Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)	Persentase Peningkatan Nilai Transaksi UMKM	100,00	1.552.236.709	0	0	66,00	496.276.800	0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS KOPERASI, UKM, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	
			Persentase Peningkatan Nilai Transaksi UMKM di Kawasan Pariwisata Estate	100,00	3.518.485.659	0	0	54,00	965.290.990	0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS KOPERASI, UKM, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	
			Persentase Kelompok Perempuan yang mendapatkan bantuan Modal Usaha	78,00	4.297.500.000	0	0	70,00	1.800.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS KOPERASI, UKM, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	
			Persentase Kelompok Perempuan yang mendapatkan pelatihan Kewirausahaan	85,00	0	0	0	76,00	965.290.990	0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS KOPERASI, UKM, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	
		11. Penanaman Modal																	
		Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Persentase PMA dan PMDN yang direalisasi setiap tahun	75,00	1.376.196.674	0	0	25,00	439.993.770	0	0	0	0	0	0	0	0	DPMPTSP	
		Program Promosi Penanaman Modal	Persentase Peningkatan MOU dengan calon investor setiap tahun	100,00	1.798.168.351	0	0	33,33	574.905.380	0	0	0	0	0	0	0	0	DPMPTSP	
		Program Pelayanan Penanaman Modal	Persentase izin dan non izin yang diterbitkan tepat waktu sesuai SOP	100,00	2.392.733.861	0	0	100,00	764.998.210	0	104.735.880	0	13,69	0	104.735.880	0	4,377247369	DPMPTSP	
		Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Persentase PMA dan PMDN yang taat pada ketentuan yang berlaku	100,00	1.032.152.299	0	0	100,00	329.996.860	0	62.847.800	0	19,04	0	62.847.800	0	6,089004508	DPMPTSP	
		Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Persentase Calon Investor yang terlayani kebutuhan datanya	100,00	462.906.945	0	0	100,00	147.999.320	0	0	0	0	0	0	0	0	DPMPTSP	
			Persentase Calon Investor yang terlayani kebutuhan informasi perijinan investasi	100,00	0	0	0	100,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DPMPTSP	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Capaian Kinerja RPJMD Pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja SKPD s/d Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang di evaluasi (n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang di evaluasi (Tahun n-1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%)		Perangkat Daerah Penaggung Jawab	Ket
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		12. Kepemudaan dan Olahraga																	
		Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Proporsi Pertambahan Wirausaha Muda termasuk Kelompok Disabilitas dengan data terpilah gender setiap tahun (2.000 calon wirausaha muda)	100,00	9.141.496.970	0	0	75,00	2.922.693.966	0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	
		Program Pengembangan Daya Saing Keolahragaan	Presentasi Peningkatan Perolehan Medali Cabang Olahraga Prestasi dan Paralimpik	0	142.366.813.586	0	0		45.517.121.364	0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	
			Medali (200 buah)	100,00	0	0	0	50,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	
			Cabor (13 cabor)	100,00	0	0	0	76,92	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	
			Cakupan pembinaan olahraga tradisional dan rekreasi untuk mendukung Pariwisata Estate, Total 7 Cabor tradisional dan 6 Cabor rekreasi	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	
			Cabor tradisional	100,00	0	0	0	85,71	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	
			Cabor rekreasi	100,00	0	0	0	66,67	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	
			Presentasi Peningkatan Perolehan Medali dari Atlit Paralimpik (Atletik, Catur, Renang) setiap dua tahun	(Atletik 8 medali emas, 2 perak, 5 perunggu; Catur; 1 medali perak; Renang; 1 medali Perak	0	0	0	(Atletik 8 medali emas, 1 perak, 4 perunggu; Catur; 1 madali perak; Renang; 1 perunggu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	
		Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	Cakupan Pembinaan terhadap organisasi kepramukaan binaan Kwartir Daerah dan Kwartir Cabang setiap tahun (23 Kwartir Daerah dan Kwartir Cabang)	100,00	3.127.764.000	0	0	31,82	1.000.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	
		13. Statistik												-	-				
		Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Data Statistik Sektoral untuk Perencanaan Pembangunan Sektoral	100,00	312.505.536	0	0	100,00	99.913.400	0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
			Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Data Statistik Sektoral untuk Evaluasi Hasil Pembangunan Sektoral	100,00	0	0	0	100,00		0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
		14. Persandian												-	-				
		Program Penyelenggaraan Persandian untuk pengamanan informasi	Indeks Kematangan Keamanan Informasi	5 (Sangat Baik)	871.590.911	0	0	3-3,9 (Cukup)	278.662.620	0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
		15. Kebudayaan																	
		Program Pengembangan Kebudayaan	Meningkatnya Persentase Warisan Nilai Budaya yang dilestarikan (Rumah Budaya Nusantara 5 unit; Warisan Budaya Tak Benda 20 unit, Bahasa Daerah 68 unit)	100,00	23.497.863.774	0	0	21,51	7.512.671.600	0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
		Program Pengembangan Kesenian Tradisional	Cakupan Kesenian Tradisional Ikonik/Langka pada setiap daerah yang dilestarikan	10,00	7.997.293.758	0	0	6,00	2.556.872.500	0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
			Cakupan Kesenian Tradisional Populer pada setiap daerah yang dikembangkan	10,00		0	0	6,00		0	0	0	0	0	0	0	0		
		Program Pembinaan Sejarah	Cakupan Sejarah Lokal dari setiap daerah yang dipublikasi (Sanggar Budaya 25 Unit)	40,00	781.941.000	0	0	36,00	250.000.000	0	169.500.000	0	67,80	0	169.500.000	0	21,67682728	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
		Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya	Cakupan Cagar Budaya setiap daerah yang dilestarikan (Cagar Budaya 2 buah, Desa Adat 25 buah)	28,00	7.137.196.348	0	0	24,00	2.281.884.550	0	355.200.000	0	15,57	0	355.200.000	0	4,976744126	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
		Program Pengelolaan Permuseuman	Meningkatnya Akses masyarakat terhadap Museum (4 unit) (Total per tahun 20.000 orang)	100,00	3.460.883.377	0	0	65,00	1.106.504.000	0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Capaian Kinerja RPJMD Pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja SKPD s/d Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang di evaluasi (n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang di evaluasi (Tahun n-1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		16. Perpustakaan																	
		Program Pembinaan Perpustakaan	Cakupan Perpustakaan aras Provinsi dan Kabupaten/ Kota yang menerapkan *e-library*	100,00	16.073.914.968	0	0	100,00	5.139.107.352	0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	
			Persentase Peningkatan Jumlah Kunjungan Perpustakaan berbasis Jejaring dan Fisik	100,00	0	0	0	50,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	
		Program Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno	Persentase Koleksi Daerah yang diserahkan ke Nasional setiap tahun (22 Kab/Kota)	100,00	0	0	0	22,73	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	
			Cakupan Koleksi Naskah Kuno yang dilestarikan setiap tahun	100,00	0	0	0	22,73	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	
		17. Kearsipan																	
		Program Pengelolaan Arsip	Meningkatnya pengelolaan arsip daerah	100,00	4.254.738.499	0	0	100,00	1.360.313.150		0	0	0	0	0	0	0	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	
		Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip	Meningkatnya perlindungan dan penyelamatan arsip	100,00	938.328.668	0	0	100,00	299.999.830		0	0	0	0	0	0	0	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	
		Urusan Pemerintahan Pilihan																	
		1. Kelautan dan Perikanan																	
		Program Pengelolaan Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Cakupan Luas Kawasan Konservasi Perairan Daerah yang dikelola	100,00	7.888.539.295	0	0	72,00	2.326.779.322	0	0	0	0	0	0	0	0	DKP	
		Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Presentase peningkatan Produksi Perikanan Tangkap	23,70	105.147.538.014	0	0	4,00	52.290.163.014	0	0	0	0	0	0	0	0	DKP	
			Presentase peningkatan Produksi Perikanan Tangkap di Pariwisata Estate	23,70	0	0	0	4,00		0	0	0	0	0	0	0	0	DKP	
		Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Presentase peningkatan Produksi Perikanan Budidaya	42,80	200.853.998.243	0	0	5,00	167.006.833.430	0	0	0	0	0	0	0	0	DKP	
			Presentase peningkatan Produksi Perikanan Budidaya di Pariwisata Estate	43,00	0	0	0	5,00		0	0	0	0	0	0	0	0	DKP	
		Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	Penurunan Kasus UU Fishing (Illegal, Unregulation, Unreported Fishing)	0	12.628.221.166	0	0	30,00	3.830.741.856	0	0	0	0	0	0	0	0	DKP	
		Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Persentase Peningkatan Angka Konsumsi Ikan	38,46	2.895.939.644	0	0	9,52	932.439.644	0	0	0	0	0	0	0	0	DKP	
		2. Pariwisata																	
		Program peningkatan daya tarik destinasi pariwisata	Persentase peningkatan jumlah kunjungan wisatawan pada Destinasi Pariwisata yang mendapatkan program peningkatan	56,67	40.312.254.863	0	0	32,38	10.812.254.863	0	0	0	0	0	0	0	0	DISPAREKRAF	
			Peningkatan Cakupan Desa Wisata pada Kawasan Pariwisata Estate	100,00	0	0	0	29,17	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		Program Pemasaran Pariwisata	Pertumbuhan kunjungan wisatawan	56,67	17.243.689.685	0	0	32,38	5.247.798.920	0	0	0	0	0	0	0	0	DISPAREKRAF	
		Program Pengembangan Ekonomi Kreatif melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	Cakupan Produk Sub Sektor Ekonomi Kreatif yang mendapatkan Hak Paten (HKI)	10,00	16.638.705.473	0	0	1,50	3.100.976.940	0	0	0	0	0	0	0	0	DISPAREKRAF	
			Cakupan Produk Sub Sektor Ekonomi Kreatif yang mendapatkan perlindungan dari penggunaan yang tidak sah	100,00	0	0	0	93,75	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Peningkatan Cakupan Ketersediaan SDM Pariwisata bersertifikasi menurut jenis keahliannya:	0	13.048.081.831	0	0		4.294.951.540	0	0	0	0	0	0	0	0	DISPAREKRAF	
			a. Tour operator	100,00	0	0	0	29,17	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			b. Guide/Pemandu Wisata	100,00	0	0	0	29,17	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			c. Pelaku Ekonomi Kreatif	100,00	0	0	0	29,17	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			d. Restourant	100,00	0	0	0	29,17	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			e. Perhotelan	100,00	0	0	0	29,17	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			f. Pramuwisata	100,00	0	0	0	29,17	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			g. Transportasi	100,00	0	0	0	29,17	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			h. Informasi	100,00	0	0	0	29,17	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Capaian Kinerja RPJMD Pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja SKPD s/d Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang di evaluasi (n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang di evaluasi (Tahun n-1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%)		Perangkat Daerah Penaggung Jawab	Ket
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
			Peningkatan Cakupan POKDARWIS pada Kawasan Pariwisata Estate (Target 24 Pokdarwis di Tahun 2023)	100,00	0	0	0	29,17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DISPAREKRAF	
		3. Pertanian																	
		Program Penyediaan dan pengembangan sarana pertanian	Pertumbuhan Populasi Ternak:	0	136.265.465.309	0	0		43.566.415.276	0	521.786.300		1,20	-	521.786.300		0,382918958	DINAS PETERNAKAN	
			a. Ternak Besar	7,0	0	0	0	6,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS PETERNAKAN	
			- Sapi	1.398.972,00	0	0	0	1.223.483,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS PETERNAKAN	
			- Kerbau	221.682,00	0	0	0	193.583,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS PETERNAKAN	
			- Kuda	141.672,00	0	0	0	129.196,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS PETERNAKAN	
			b. Ternak Kecil	11,06	0	0	0	11,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS PETERNAKAN	
			- Kambing	1.184.829,00	0	0	0	991.505,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS PETERNAKAN	
			- Domba	95.507,00	0	0	0	83.563,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS PETERNAKAN	
			- Babi	3.650.524,00	0	0	0	2.899.766,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS PETERNAKAN	
			c. Unggas	6,00	0	0	0	5,60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS PETERNAKAN	
			- Unggas	22.584.988,00	0	0	0	20.318.557,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS PETERNAKAN	
			Pertumbuhan Populasi Ternak di kanteng kemiskinan dan Stunting		0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			a. Unggas	6,00	0	0	0	5,60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS PETERNAKAN	
			Produksi unggas untuk penanggulangan gizi buruk	22.584.988,00	0	0	0	20.318.557,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS PETERNAKAN	
			Persentase pertumbuhan populasi peternakan di Pariwisata estate	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			a. Ternak Besar	0	0	0	0	6,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS PETERNAKAN	
			- Sapi	1.398.972,00	0	0	0	1.223.483,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS PETERNAKAN	
			- Kerbau	221.682,00	0	0	0	193.583,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS PETERNAKAN	
			- Kuda	141.672,00	0	0	0	129.196,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS PETERNAKAN	
			b. Ternak Kecil	11,06	0	0	0	11,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS PETERNAKAN	
			- Kambing	1.184.829,00	0	0	0	991.505,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS PETERNAKAN	
			- Domba	95.507,00	0	0	0	83.563,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS PETERNAKAN	
			- Babi	3.650.524,00	0	0	0	2.899.766,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS PETERNAKAN	
			c. Unggas		0	0	0	5,60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS PETERNAKAN	
			- Unggas	22.584.988,00	0	0	0	20.318.557,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS PETERNAKAN	
		Program Penyediaan dan pengembangan sarana pertanian	Persentase penggunaan benih bersertifikat	100,00	0	0	0	100,00	0	0	1.528.906.690	0	0	0	1.528.906.690	0	0	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	
		Program Penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian	Pertumbuhan Produksi tanaman pangan dan perkebunan yang difasilitasi	0	162.401.391.650	0	0	0	151.590.142.770	0	2.933.476.462	0	1,94	0	2.933.476.462	0	1,806312392	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	
			Produksi Padi (Tahun 2019 = 1.269.406 Ton, 2023 = 1.471.176 Ton)	100,00	0	0	0	92,46	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	
			Produksi Jagung (Tahun 2019 = 848.998 Ton, 2013 = 1.853.552 Ton)	100,00	0	0	0	71,15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	
			Produksi Cabe (Tahun 2019 = 7.100 Ton, 2023 = 8.910 Ton)	100,00	0	0	0	92,47	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	
			Produksi kacang tanah (Tahun 2019 = 10.040 Ton, 2023 = 12.105 Ton)	100,00	0	0	0	92,47	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	
			Produksi kacang hijau (Tahun 2019 = 7.966 Ton, 2023 = 8.382 Ton)	100,00	0	0	0	92,46	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	
			Produksi Bawang Merah (Tahun 2019 = 4542 ton, 2023 = 5.264 ton)	100,00	0	0	0	92,46	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	
			Pertumbuhan Produksi tanaman perkebunan yang difasilitasi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			Produksi daun basah = Luas Panen x Produktivitas Marungga (Tahun 2019 = 0 , 2023 = 1300 ton)	100,00	0	0	0	100,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Capaian Kinerja RPJMD Pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja SKPD s/d Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang di evaluasi (n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang di evaluasi (Tahun n-1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%)		Perangkat Daerah Penaggung Jawab	Ket
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
			Produksi daun Kering = 10 % x produksi daun basah (Tahun 2019 = 0, 2023 = 130 Ton)	100,00	0	0	0	100,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	
			Produksi tepung = 10% x daun kering (Tahun 2019 = 0, 2023 = 13 Ton)	100,00	0	0	0	100,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	
			Produksi Kelapa (Tahun 2019 = 69.408 Ton, 2023 = 87.327 Ton)	100,00	0	0	0	89,66	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	
			Produksi Kopi (Tahun 2019 = 23.730 Ton, 2023 = 30.846 Ton)	100,00	0	0	0	87,35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	
			Produksi Kakao (Tahun 2019 = 19.295 Ton, 2023 = 27.260 Ton)	100,00	0	0	0	83,61	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	
			Produksi Jambu Mete (Tahun 2019 = 49.858 Ton, 2023 = 78.823 Ton)	100,00	0	0	0	82,96	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	
			Produksi Cengkeh (Tahun 2019 = 3.514 Ton, 2023 = 5158 Ton)	100,00	0	0	0	78,25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	
			Produksi Pinang (Tahun 2019 = 5.448 Ton, 2023 = 7.664 Ton)	100,00	0	0	0	84,86	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	
			Pertumbuhan Produksi tanaman pangan di kawasan Pariwisata Estate yang difasilitasi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			Produksi Bawang Merah (Tahun 2019 = 189,20 ton, 2023 = 200,72 ton)	100,00	0	0	0	97,07	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	
			Produksi Kentang (Tahun 2019= 110,40 ton, 2023 = 117,17 ton)	100,00	0	0	0	97,07	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	
			Produksi Wortel (Tahun 2019= 1.100 ton, 2023 = 1.167,50 ton)	100,00	0	0	0	97,07	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	
			Produksi Semangka (Tahun 2019= 103 ton, 2023 = 109,32 ton)	100,00	0	0	0	97,06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	
			Produksi Mangga (Tahun 2019= 824 ton, 2023 = 874,56 ton)	100,00	0	0	0	97,07	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	
			Pertumbuhan Produksi tanaman Perkebunan di kawasan Pariwisata Estate yang difasilitasi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			Produksi Kelapa (Tahun 2019= 381,43 ton, 2023 = 429,30 ton)	100,00	0	0	0	94,26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	
			Produksi Kopi (Tahun 2019= 431,70 ton, 2023 = 485,88 ton)	100,00	0	0	0	94,26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	
			Cakupan populasi ternak besar, kecil dan unggas di kawasan pariwisata estate	100,00	0	0	0	90,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS PETERNAKAN	
			a. Ternak Besar	7,0	0	0	0	6,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS PETERNAKAN	
			- Sapi (Tahun 2019 = 1.027.256 ekor, 2023 = 1.398.971 ekor)	100,00	0	0	0	87,46	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS PETERNAKAN	
			- Kerbau (Tahun 2019 = 165.551 ekor, 2023 = 221.682 ekor)	100,00	0	0	0	87,32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS PETERNAKAN	
			- Kuda (Tahun 2019= 114.514 ekor, 2023 = 141.672)	100,00	0	0	0	91,19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS PETERNAKAN	
			b. Ternak Kecil	11,06	0	0	0	11,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS PETERNAKAN	
			- Kambing (Tahun 2019= 693.577 ekor, 2023= 1.184.828 ekor)	100,00	0	0	0	83,68	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS PETERNAKAN	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Capaian Kinerja RPJMD Pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja SKPD s/d Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang di evaluasi (n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang di evaluasi (Tahun n-1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%)		Perangkat Daerah Penaggung Jawab	Ket
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
			- Domba (Tahun 2019= 68.388 ekor, 2023 = 95.507 ekor)	100,00	0	0	0	87,49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS PETERNAKAN	
			- Babi (Tahun 2019=2.141.246 ekor, 2023=3.650.523 ekor)	100,00	0	0	0	79,43	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS PETERNAKAN	
			c. Unggas	6,00	0	0	0	5,60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS PETERNAKAN	
			- Unggas (Tahun 2019=17.248.318 ekor, 2023= 22.584.988 ekor)	100,00	0	0	0	89,96	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS PETERNAKAN	
		Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Ternak yang sehat	80,00	14.034.534.117	0	0	80,00	4.487.082.183	0	1.557.328.917	0	34,71	-	1.557.328.917	0	0	DINAS PETERNAKAN	
			Unit usaha pangan asal ternak yang memenuhi standar	25,00	0	0	0	15,00		0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS PETERNAKAN	
		Program Pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian	Prosentase areal serangan OPT yang dikendalikan	75,00	2.971.045.008	0	0	70,00	949.894.240	0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	
		Program Penyuluhan pertanian	Cakupan Peningkatan Kompentensi Kelompok Tani menurut kelas		9.920.019.336	0	0		3.171.600.970	0	560.434.618		17,67	-	560.434.618			DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	
			Kelas Pemula Baru (Tahun 2019 = 0 kelompok , 2023 = 1000 kelompok)	100,00	0	0	0	30,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	
			Kelas Lanjut Baru (Tahun 2019 = 0 kelompok , 2023 = 400 kelompok)	100,00	0	0	0	25,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	
			Kelas Madya Baru (Tahun 2019 = 0 kelompok , 2023 = 40 kelompok)	100,00	0	0	0	25,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	
			Kelas Utama Baru (Tahun 2019 = 0 kelompok , 2023 = 3 kelompok)	100,00	0	0	0	33,33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	
			Cakupan Peningkatan Kompetensi Pelaku Utama (Tahun 2019 = 245 orang , 2023 =520 orang)	100,00	0	0	0	61,54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	
		4. Kehutanan																	
		Program Pengelolaan Hutan	Peningkatan Cakupan lahan kritis yang tertangani setiap tahun	1,30	276.163.277.442	0	0	1,14	176.430.599.445	0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN	
		Program Konservasi Sumber daya Alam hayati dan ekosistemnya	Persentase perlindungan terhadap objek kawasan konservasi SDA	8,47	26.239.058.382	0	0	2,54	8.389.078.710	0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	
			Persentase peningkatan perlindungan terhadap ekosistem essensial di destinasi wisata	100,00		0	0	50,00		0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	
		Program Pendidikan dan Pelatihan, Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	Persentase pemenuhan SDM berkeahlian khusus	33,91	3.973.757.947	0	0	31,59	1.270.478.830	0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	
			Persentase luasan hutan yang dimanfaatkan untuk Perhutanan Sosial	11,25		0	0	9,38		0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN	
		Program Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS)	Persentase meningkatnya kualitas DAS	0,30	363.951.154	0	0	0,13	116.361.450	0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	
		5. Energi dan Sumber Daya Mineral																	
		Program Pengelolaan aspek kegeologian	Cakupan Pengelolaan Zona konservasi air tanah pada CAT setiap tahun	21,05	4.719.643.241	0	0	10,53	1.508.951.200	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas ESDM	
			Cakupan Pengelolaan Air Tanah setiap tahun (Tahun 2019 = 41 Rekomendasi Teknis, Tahun 2023 = 59 Rekomendasi Teknis)	100,00		0	0	84,75		0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas ESDM	
		Program Pengelolaan Mineral dan Batubara	Persentase Potensi sumber daya mineral yang terkelola (Tahun 2019 = 12 Jenis, Tahun 2023 = 6 Jenis)	100,00	1.952.013.416	0	0	100,00	624.092.296	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas ESDM	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Capaian Kinerja RPJMD Pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja SKPD s/d Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang di evaluasi (n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang di evaluasi (Tahun n-1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%)		Perangkat Daerah Penaggung Jawab	Ket
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		Program Pengelolaan Energi Terbarukan	Cakupan Pemanfaatan Energi Listrik Berbasis EBT *setiap* tahun (Target Tahun 2018 = 8.76 kW, Target Tahun 2019= 11.25kW, Target Tahun 2020: 36,15 kW, Target Tahun 2023 = 103.32 kW)	100/ (103.32)	4.420.654.838	0	0	8.04 /(8.31)	1.413.359.460	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas ESDM	
			Cakupan Pemanfaatan Energi Listrik Berbasis EBT pada Kawasan Pariwisata Estate (Target Tahun 2019= 5.625 kW, 2023 = 42.19 kW)	100/ (47,28)		0	0	8.79/(4,16)		0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas ESDM	
		Program Pengelolaan Ketenagalistrikan	Rasio elektrifikasi dari non EBT (bagi masyarakat tidak mampu, terpencil dan pedesaan)	59,58	3.688.791.779	0	0	58,42	1.179.370.240	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas ESDM	
			Rasio elektrifikasi dari non EBT di destinasi wisata (Target Tahun 2020:34%)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas ESDM	
		6. Perdagangan																	
		Program Perizinan dan pendaftaran perusahaan	Cakupan Penerapan Sistem Perijinan Usaha dan Investasi berbasis Online	100,00	609.081.838	0	0	50,00	194.733.950	0	2.490.000	0	1,28	0	2.490.000	-	0,408812058	DISPERINDAG	
		Program Peningkatan sarana distribusi perdagangan	Persentase Peningkatan Cakupan distribusi barang di dalam wilayah NTT	100,00	826.999.568	0	0	25,00	264.406.000	0	0	0	0	0	0	0	0	DISPERINDAG	
		Program Stabilisasi harga kebutuhan pokok dan barang penting	Persentase Kenaikan Harga setiap tahun	10,00	3.717.029.483	0	0	10,00	1.188.398.320	0	4.552.000	0	0,38	0	4.552.000	0	0,122463382	DISPERINDAG	
			a. Barang Kebutuhan Pokok	10,00		0	0	10,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DISPERINDAG	
			b. Barang Penting	10,00		0	0	10,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DISPERINDAG	
		Program Pengembangan ekspor	Persentase Peningkatan Jumlah Komoditas Ekspor	11,11	2.443.421.122	0	0	16,67	781.203.800	0	0	0	0	0	0	0	0	DISPERINDAG	
		Program Standarisasi dan perlindungan konsumen	Persentase Penurunan Pengaduan Konsumen yang menggunakan barang tidak sesuai standar	56,70	9.275.464.338	0	0	54,70	2.965.525.640	0	0	0	0	0	0	0	0	DISPERINDAG	
			Persentase pelaku usaha yang melakukan pengujian dan sertifikasi mutu produk (Target 2023 = 34 Pelaku Usaha)	100,00		0	0	NA		0	0	0	0	0	0	0	0	DISPERINDAG	
		Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	Persentase Peningkatan Transaksi Produk Lokal di dalam wilayah NTT	90,00	11.404.676.144	0	0	40,00	3.646.271.312	0	0	0	0	0	0	0	0	DISPERINDAG	
			Persentase Peningkatan Transaksi Produk Lokal di Kawasan Pariwisata Estate	90,00		0	0	40,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DISPERINDAG	
		7. Perindustrian																	
		Program Perencanaan dan pembangunan industri	Pertumbuhan industri pengolahan dengan memanfaatkan teknologi industri	3,36	31.738.463.106			1,12	10.147.333.08	-	166.712.000	-	1,64	-	166.712.000	-		DISPERINDAG	
		Program Pengendalian ijin usaha industri	Persentase Penurunan Pelanggaran Ijin Usaha Industri	90,00	941.271.300	0	0	50,00	300.940.64	0	0	0	0	0	0	0	0	DISPERINDAG	
		Program Pengelolaan sistem informasi industri nasional	Kesesuaian data informasi industri provinsi dalam mendukung SIINas	11,85	631.795.629	0	0	10,00	201.995.94	-	2.844.000	-	1,41	-	2.844.000	-	0,450145564	DISPERINDAG	
		8. Transmigrasi												-	-				
		Program Perencanaan Kawasan Transmigrasi	Persentase Kawasan dan Lokasi Transmigrasi yang difasilitasi pencadangannya	100,00	179.182.437	0	0	75,00	57.287.710	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Koperasi, Nakertrans	
		Program Pembangunan Kawasan transmigrasi	Persentase Lokasi Transmigrasi yang difasilitasi pembangunan dan penempatannya	100,00	835.070.294	0	0	75,00	266.986.350	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Koperasi, Nakertrans	
		Program Pengembangan Kawasan Transmigrasi	Persentase Unit Permukiman Transmigrasi yang difasilitasi pembinaannya	100,00	549.626.104	0	0	75,00	175.724.928	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Koperasi, Nakertrans	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Capaian Kinerja RPJMD Pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja SKPD s/d Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang di evaluasi (n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang di evaluasi (Tahun n-1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%)		Perangkat Daerah Penaggung Jawab	Ket
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		Pendukung Urusan Pemerintahan																	
		1.Sekretariat Daerah																	
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Meningkatnya pelayanan terhadap kepala daerah/wakil kepala daerah dan Sekertaris daerah	100,00	412.814.867.836	0	0	100,00	131.984.020.481	0	0	0	0	0	0	0	0	BIRO UMUM	
		Program Administrasi Umum	Cakupan pelayanan administrasi pimpinan	100,00	0	0	0	100,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Biro Administrasi Pimpinan	
			Cakupan Pemenuhan Pelayanan Keprotokolan	100,00	0	0	0	100,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Biro Administrasi Pimpinan	
			Cakupan Pemenuhan Layanan Administrasi Perencanaan, Pelaporan, Kepegawaian dan Tata Usaha	100,00	0	0	0	100,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Biro Administrasi Pimpinan	
		Program Penataan Organisasi	Persentase Perangkat Daerah yang efektif dan efisien	100,00	12.682.915.153	0	0	84.78	4.054.946.330	0	0	0	0	0	0	0	0	BIRO ORGANISASI	
		Program Pemerintahan dan Otonomi Daerah	Cakupan Kegiatan Tugas Pemerintahan yang dilaksanakan setiap tahun	100,00	0	0	0	100,00	2.126.240.072	0	0	0	0	0	0	0	0	Biro Pemerintahan, Kesra dan Kerjasama	
			Cakupan Kegiatan Tugas Otonomi Daerah yang dilaksanakan setiap tahun	100,00	0	0	0	100,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Biro Pemerintahan, Kesra dan Kerjasama	
			Cakupan Kegiatan Penataan Urusan yang dilaksanakan setiap tahun	100,00	0	0	0	100,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Biro Pemerintahan, Kesra dan Kerjasama	
			Cakupan Kerjasama Daerah yang difasilitasi setiap tahun	100,00	0	0	0	100,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Biro Pemerintahan, Kesra dan Kerjasama	
		Program Kesejahteraan Rakyat	Persentase peningkatan pelayanan kesejahteraan rakyat (kegiatan di bidang kesejahteraan rakyat yang dilaksanakan)	100,00	18.740.714.373	0	0	100,00	5.991.729.035	0	0	0	0	0	0	0	0	Biro Pemerintahan, Kesra dan Kerjasama	
			Persentase peningkatan kerjasama antar pemerintah dan non pemerintah (Jumlah kerjasama yang dilaksanakan)	100,00	0	0	0	100,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Biro Pemerintahan, Kesra dan Kerjasama	
		Program Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Peningkatan persentase rancangan Peraturan Daerah yang diselesaikan setiap tahun	100,00	10.206.905.451	0	0	100,00	3.263.323.400	0	0	0	0	0	0	0	0	BIRO HUKUM	
			Cakupan penyelesaian kasus hukum setiap tahun	100,00	0	0	0	100,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	BIRO HUKUM	
		Program Perekonomian dan Pembangunan	Cakupan kebijakan bidang perekonomian yang terkonsolidasi dengan baik (Target tahun 2023= 12 rekomendasi)	100,00	5.344.058.817	0	0	33,33	1.708.587.610	0	0	0	0	0	0	0	0	Biro Ekonomi dan Administrasi Pembangunan	
			Cakupan kebijakan Pengelolaan SDA yang terkonsolidasi dengan baik (Target tahun 2023= 12 rekomendasi)	100,00	0	0	0	33,33	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			Persentasi BUMD yang memiliki kinerja baik (Target tahun 2023= 9 rekomendasi)	100,00		0	0	40,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		Program Kebijakan dan Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa	Persentase ketercapaian pelaksanaan layanan barang dan jasa pemerintah daerah	100,00	19.507.878.656	0	0	100,00	6.237.004.664	0	0	0	0	0	0	0	0	Biro PBJ	
		Program Kebijakan Administrasi Pembangunan	Efektivitas peningkatan kinerja administrasi pembangunan	100,00	93.831.669	0	0	33,33	29.999.600	0	0	0	0	0	0	0	0	Biro Ekonomi dan Administrasi Pembangunan	
		2. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat																	
		Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Cakupan fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD (Jumlah peraturan daerah yang dihasilkan)	100,00	226.118.355.660	0	0	100,00	72.293.931.275		15.196.515.169	0	21,02	0	15.196.515.169	0	6,720602193	SEKRETARIAT DPRD PROVINSI NTT	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Capaian Kinerja RPJMD Pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja SKPD s/d Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang di evaluasi (n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang di evaluasi (Tahun n-1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%)		Perangkat Daerah Penaggung Jawab	Ket
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		Penunjang Urusan Pemerintahan																	
		1. Perencanaan																	
		Program Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Konsistensi penjabaran Program-Program RPJMD ke dalam RKPD Provinsi	100,00	10.504.967.457	0	0	100,00	3.358.618.955	0	0	0	0	0	0	0	0	BAPPELITBANGDA	
			Persentase Cakupan Pemanfaatan hasil Pengendalian dan Evaluasi.	100,00	0	0	0	100,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	BAPPELITBANGDA	
		Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Kesesuaian Dokumen perencanaan (RPJMD, RKPD, PPAS, Renstra, Renja, RKA, DPA) Perangkat Daerah Provinsi, lingkup bidang: - Pemerintahan dan Pembangunan manusia	100,00	21.881.850.925	0	0	100,00	6.996.004.470	0	0	0	0	0	0	0	0	BAPPELITBANGDA	
			Kesesuaian Dokumen perencanaan (RPJMD, RKPD, PPAS, Renstra, Renja, RKA, DPA) Perangkat Daerah Provinsi, lingkup bidang: - SDA	100,00	0	0	0	100,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	BAPPELITBANGDA	
			Kesesuaian Dokumen perencanaan (RPJMD, RKPD, PPAS, Renstra, Renja, RKA, DPA) Perangkat Daerah Provinsi, lingkup bidang: - Infrastrukur dan Kewilayahan	100,00	0	0	0	100,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	BAPPELITBANGDA	
		2. Keuangan																	
		Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase Penyampaian dan Penetapan Dokumen Keuangan secara tepat waktu dan sesuai ketentuan perundang - undangan	100,00	2.437.446.094.008	0	0	100,00	779.293.480.585	0	0	0	0	0	0	0	0	Badan Keuda	
		Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Penatausahaan Barang Milik Daerah	100,00	17.886.976.004	0	0	100,00	5.718.774.180	0	0	0	0	0	0	0	0	BAPENDA	
			Pemanfaatan, Pemindahtanganan dan Pengamanan Barang Milik Daerah	100,00	0	0	0	100,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	BAPENDA	
		Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase Peningkatan Kontribusi PAD terhadap pendapatan daerah	37,56	131.893.767.372	0	0	32,26	42.168.708.180	0	0	0	0	0	0	0	0	BAPENDA	
		3. Kepegawaian																	
		Program Kepegawaian Daerah	Persentase formasi jabatan sesuai kualifikasi dan kompetensi	100,00	30.482.515.797	0	0	100,00	9.745.785.103	0	0	0	0	0	0	0	0	BKD	
			Persentase pelaksanaan lelang jabatan terbuka dan akuntabel untuk Eselon 1 dan 2 Lingkup Pemprov NTT	100,00	0	0	0	100,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	BKD	
		4. Pendidikan dan Pelatihan																	
		Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	Akreditasi latihan dasar minimal "B" dan diklat kepemimpinan "A"	B dan A	149.695.761.481	0	0	Latsar "B"	47.860.312.185	0	0	0	0	0	0	0	0	BPSDM	
			Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal (Jumlah ASN yang mengikuti diklat Formal)	100,00	0	0	0	100,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	BPSDM	
			Persentase Pejabat ASN yang mengikuti Diklat struktural (Pejabat ASN yang telah mengikuti Diklat)	100,00	0	0	0	100,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	BPSDM	
			Peningkatan pengendalian dan mutu pendidikan dan pelatihan	85,00	0	0	0	75,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	BPSDM	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Capaian Kinerja RPJMD Pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja SKPD s/d Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang di evaluasi (n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang di evaluasi (Tahun n-1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%)		Perangkat Daerah Penaggung Jawab	Ket
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		5. Penelitian dan Pengembangan																	
		Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	Persentase Kebijakan Pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota atau pengguna lainnya yang memanfaatkan Rekomendasi hasil Kelitbangan dan Inovasi yang dihasilkan setiap tahun (Target 2019 = 40 rekomendasi, 2023= 75 rekomendasi)	100,00	9.795.273.133	0	0	62,86	3.131.717.461	0	0	0	0	0	0	0	0	BAPPELITBANGDA	
			Persentase Penyediaan Inovasi Daerah yang dihasilkan dari Inkubator Inovasi Daerah kepada Pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota atau pengguna lainnya setiap tahun (Target 2023 = 145 Inovasi)	100,00	0	0	0	93,10		0	0	0	0	0	0	0	0	BAPPELITBANGDA	
			Persentase Produk Inovasi Daerah yang difasilitasi untuk mendapatkan perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) setiap tahun (Target 2023 = 10 Dokumen Fasilitasi)	100,00	0	0	0	30,00		0	0	0	0	0	0	0	0	BAPPELITBANGDA	
		6. Pengelolaan Perbatasan																	
		Program Pengelolaan Perbatasan	Meningkatnya Cakupan Layanan Pemerintah Daerah dan KL (Jumlah Layanan Pemerintah Daerah dan KL)	100,00	12.467.045.483	0	0	33,00	3.985.929.080	0	0	0	0	0	0	0	0	BADAN PERBATASAN DAERAH	
			Meningkatnya Cakupan Koordinasi, Integrasi dan Sinkronisasi Pembangunan dan Pemanfaatan Kawasan Perbatasan	100,00	0	0	0	33,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	BADAN PERBATASAN DAERAH	
		7. Pengelolaan Penghubung												-	-				
		Program Pelayanan Penghubung	Meningkatnya cakupan layanan pemerintah daerah dan KL	100,00	15.939.019.886	0	0	50,00	5.095.979.072	0	0	0	0	0	0	0	0	Badan Penghubung	
			Meningkatnya cakupan pembinaan kemasyarakatan	100,00	0	0	0	100,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Badan Penghubung	
			Meningkatnya cakupan promosi daerah	100,00	0	0	0	100,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Badan Penghubung	
		Pengawasan Urusan Pemerintahan																	
		1. Inspektorat Daerah																	
		Program Penyelenggaraan Pengawasan	Persentase obyek pemeriksaan yang dilakukan pembinaan dan pengawasan	100,00	41.171.086.151	0	0	100,00	13.163.105.065	0	0	0	0	0	0	0	0	INSPEKTORAT DAERAH	
			OPINI BPK	WTP				WTP										INSPEKTORAT DAERAH	
		Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	Persentase Pendampingan dan Asistensi pada PD Provinsi (Meningkatnya perumusan kebijakan, pendampingan dan asistensi terhadap Perangkat Daerah Provinsi)	100,00	11.687.632.217	0	0	100,00	3.736.737.240	0	0	0	0	0	0	0	0	INSPEKTORAT DAERAH	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Capaian Kinerja RPJMD Pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja SKPD s/d Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang di evaluasi (n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang di evaluasi (Tahun n-1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%)		Perangkat Daerah Penaggung Jawab	Ket
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		Pemerintahan Umum																	
		1. Kesatuan Bangsa dan Politik																	
		Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Cakupan Parpol, Ormas dan Forum Pembauan Kebangsaan yang terlibat dalam Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan (141 Lembaga)	0	857.096.884	0	0	70,21	274.028.630	0	0	0	0	0	0	0	0	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DAERAH	
		Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik	Cakupan Parpol, Ormas dan Lembaga Pendidikan yang terlibat dalam Program Peningkatan Peran Parpol dalam Pendidikan Politik serta Pengembangan Etika dan Budaya Politik (309 Lembaga)	0	10.353.780.807	0	0	80,26	3.310.281.980	0	0	0	0	0	0	0	0	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DAERAH	
		Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Cakupan peningkatan Pemberdayaan dan Pengawasan organisasi kemasyarakatan (49 Lembaga)	0	547.014.146	0	0	34,69	174.889.840	0	0	0	0	0	0	0	0	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DAERAH	
		Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Meningkatnya ketahanan Organisasi Kemasyarakatan terhadap Ekonomi, Sosial dan Budaya	0	429.154.994	0	0	100,00	137.208.240	0	0	0	0	0	0	0	0	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DAERAH	
		Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	Cakupan Konflik Sosial yang ditangani setiap tahun	0	0	0	0	100,00	544.701.300	0	0	0	0	0	0	0	0	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DAERAH	

2.4 PERMASALAHAN PEMBANGUNAN DAERAH

2.4.1 Permasalahan daerah yang berhubungan dengan prioritas dan sasaran pembangunan daerah

Memperhatikan berbagai hasil pembangunan yang telah dicapai, maka pada bagian ini dikemukakan permasalahan-permasalahan pembangunan dan isu-isu memalukan Provinsi Nusa Tenggara Timur untuk tahun 2021. Permasalahan pembangunan daerah yang menjadi isu-isu memalukan tersebut dimaksud antara lain :

1. Masih tingginya angka kemiskinan

   Tingkat kemiskinan penduduk Provinsi Nusa Tenggara Timur masih tinggi, masih sebesar 21,21% atau berjumlah 1,17 juta orang pada September tahun 2020 dibandingkan dengan prosentase kemiskinan nasional yang mencapai 10,19 %. Angka kemiskinan ini harus dapat ditekan agar pada tahun 2023 bisa mencapai target RPJMD 2018-2023, dimana penduduk dibawah garis kemiskinan berkisar 15 – 12 %.

2. Masih tingginya stunting di Provinsi Nusa Tenggara Timur

   Prevalensi stunting masih sangat tinggi, sebesar 24,2 % persen di Tahun 2020. Ini berarti rata-rata 2-3 dari sepuluh balita kita mengalami stunting dan permaslahan dalam proses pertumbuhan dan perkembangan otak. Kondisi ini akan sangat mempengaruhi kondisi SDM yang berkualitas dan unggul. Angka stunting perlu ditekan sebagi bentuk investasi untuk masa depan generasi muda.

3. Masih rendahnya pendapatan masyarakat

   Rendahnya pendapatan masyarakat disebabkan belum optimalnya pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam serta masih rendahnya kualitas sumber daya manusia dan belum optimalnya upaya pemberdayaan masyarakat.

   Selain itu rendahnya pendapatan masyarakat akan berimbas pada rendahnya kinerja perekonomian, yang disebabkan rendahnya daya saing daerah. Daya saing daerah menunjukkan kemampuan suatu daerah menciptakan nilai tambah untuk mencapai kesejahteraan yang tinggi dan berkelanjutan bagi masyarakat dan daerah. Pertumbuhan ekonomi Nusa Tenggara Timur dapat dilihat dari peningkatan nilai PDRB. Tahun 2019 pertumbuhan ekonomi Nusa Tenggara Timur sebesar 5,24 %, dengan PDRB (ADHB) per kapita mencapai Rp 19,59 juta, sedangkan pertumbuhan ekonomi

Indonesia walaupun dibawah Nusa Tenggara Timur, yaitu 5,02%, namun PDRB (ADHB) perkapita sudah mencapai Rp 59,32 juta. Pembentukan struktur ekonomi NTT masih didominasi oleh lapangan usaha pertanian, kehutanan dan perikanan. Pada tahun 2020, Pertumbuhan ekonomi ini terus merosot hingga minum 0,83 % diakibatkan karena masa pandemic Covid-19. Tingkat Pengangguran terbuka di Nusa Tenggara Timur tahun 2020 sebesar 4,28 %, sebagian besar penduduk di NTT bekerja pada sektor pertanian dan jika dilihat dari status pekerjaan utama, maka sebagian besar penduduk NTT bekerja pada sektor informal. Pada tahun 2021 ini, berbagai tantangan dan kendala seperti cuaca yang tidak menentu, penyakit ASF yang menyerang ternak babi, Covid-19 yang menyebabkan arus barang, jasa dan orang dihentikan sementara, termasuk dihentikannya berbagai proyek termasuk proyek pemerintah tentu akan semakin mempengaruhi rendahnya pendapatan masyarakat, yang pada akhirnya juga mempengaruhi daya beli masyarakat. Rendahnya tingkat belanja pemerintah yang dikarenakan oleh *refocussing* dan pemotongan dana transfer dari pusat.

4. Rata-rata Lama Sekolah yang baru mencapai 7,86 tahun 2020. Ini hanya mencapai kelas 1 atau 2 SMP. Bandingkan dengan rata-rata nasional yang saat ini mencapai 8,34 tahun.
5. Infrastruktur yang masih belum memadai, karena itu kita akan selesaikan semua jalan provinsi hingga tahun 2023. Pembangunan infrasturktur jalan ini juga dilakukan dengan koordinasi dan kolabarasi pembangunan dimana pemerintah kabupaten menyelesaikan jalan kabupaten yang terhubung dengan jalan provinsi menuju ke lokasi-lokasi potensial agar pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru dapat tumbuh dan berkembang.
6. Nusa Tenggara timur merupakan daerah kepulauan yang sekaligus menjadi daerah terluar dan terdepan, sebagian besar (13 dari 22) kabupaten/kota masih merupakan daerah tertinggal. Selain itu Provinsi Nusa Tenggara Timur merupakan daerah rawan bencana.

2.4.2 Identifikasi Permasalahan Penyelengaraan Pemerintah Daerah

Adapun permasalahan pembangunan menurut urusan pemerintahan daerah dapat dijabarkan sebagai berikut:

2.4.2.1 Aspek Kesejahteraan Masyarakat

1. Masih tingginya angka kemiskinan

   Tingkat kemiskinan penduduk Provinsi Nusa Tenggara Timur masih tinggi, masih sebesar 21,21% atau berjumlah 1,17 juta orang pada September tahun 2020 dibandingkan dengan prosentase kemiskinan nasional yang mencapai 10,19 %. Angka kemiskinan ini harus dapat ditekan agar pada tahun 2023 bisa mencapai target RPJMD 2018-2023, dimana penduduk dibawah garis kemiskinan berkisar 15 – 12 %.

2. Masih tingginya stunting di Provinsi Nusa Tenggara Timur

   Prevalensi stunting masih sangat tinggi, sebesar 24,2% persen di tahun 2020. Ini berarti rata-rata 2-3 dari sepuluh balita kita mengalami stunting dan permasalahan dalam proses pertumbuhan dan perkembangan otak. Kondisi ini akan sangat mempengaruhi kondisi SDM yang berkualitas dan unggul. Angka stunting perlu ditekan sebagi bentuk investasi untuk masa depan generasi muda.

2.4.2.2 Aspek Pelayanan Umum

1. Pendidikan

1) Rata-rata Lama Sekolah yang baru mencapai 7,86 Tahun 2020. Ini hanya mencapai kelas 1 atau 2 SMP. Bandingkan dengan rata-rata nasional yang saat ini mencapai 8,34 tahun.
2) Rendahnya Koordinasi Penyelenggaraan Pendidikan pada SMA/SMK dan SLB di masa pandemik Covid-19 dan tatanan kehidupan baru.
3) Rendahnya Koordinasi persiapan dan penerapan arahan Gubernur tentang mata pelajaran di sekolah dalam rangka peningkatan minat dan bakat anak didik.

4) Lemahnya kapasitas guru Mata Pelajaran pada SMK dan SMA.
5) Rendahnya SMA dan SMK yang terakreditasi.
6) Masih rendahnya wawasan kebangsaan pada jenjang pendidikan dasar.

2. Kesehatan

1) Masih tingginya masalah malnutrisi pada anak (gizi kurang, gizi buruk maupun stunting, serta wasting dan underweight).
2) Masih tingginya masalah Kesehatan ibu dan anak (keluarga) terutama pada kantong kemiskinan dan destinasi wisata.
3) Rendahnya SDM kesehatan.
4) Masih tingginya angka stunting.
5) Masih terjadinya perbedaan standar biaya insentif dokter spesialis antar kabupaten se-Nusa Tenggara Timur.
6) Masih terbatasnya pencapaian pada Desa Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM).
7) Masih tingginya masalah malnutrisi pada anak (gizi kurang, gizi buruk maupun stunting, serta wasting dan underweight).
8) Masih tingginya masalah Kesehatan ibu dan anak (keluarga) terutama pada kantong kemiskinan dan destinasi wisata.
9) Belum tercapainya posyandu dan pustu sebagai *"one stop service"*.

3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

1) Belum optimalnya pembangunan untuk 7 (tujuh) destinasi wisata yang dibangun tahun 2019 (Liman, Wolwal, Fatumnasi, Mulut Seribu, Praimadita, Lamalera, dan Koanara) dan pembangunan di destinasi baru (Kelaba Maja, Fatunausus).
2) Belum tercapainya kondisi jalan mantap kewenangan provinsi yang tersisa dari tahun 2021.
3) Belum optimalnya jalan dan jembatan pada Destinasi Wisata.

4) Terbatasnya aksesibilitas jalan pada saluran irigasi dan fasilitas DAM pada titik terendah saluran irigasi.
5) Rendahnya kualitas DAS.

4. Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman

1) Belum optimalnya Penanganan masalah air yang dapat menjangkau rumah keluarga miskin.
2) Masih tingginya rumah tidak layak huni.
3) Masih terbatasnya akses air bersih dan sanitasi layak dan aman pada wilayah kantong-kantong kemiskinan, stunting, destinasi wisata (80% (KK)) dan 3T.

5. Perhubungan

1) Belum optimalnya pembangunan Bandar Udara Sabu Raijua.
2) Terbatasnya sarana-prasarana Pelabuhan Tenau-Bolok sebagai pelabuhan hub multi-purpose.
3) Minimnya petunjuk arah menuju dan di destinasi wisata (RPPJ).

6. Energi dan Sumber Daya Mineral

1) Masih terbatasnya jaringan PLN dan pada destinasi wisata;
2) Masih rendahnya aksesibilitas terhadap jaringan PLN di kantong-kantong kemiskinan.

7. Pertanian dan Peternakan

1) Masih rendahnya produksi komoditas padi, jagung, kelor dan hortikultura
2) Rendahnya populasi ternak sapi, babi, ayam kampung
3) Belum optimalnya penyediaan pakan ternak yang disupply dari pabrik pakan ternak luar NTT
4) Belum tersedianya statistik ternak (pemanfaatan teknologi Pendataan Jumlah ternak besar).

8. Perikanan dan Kelautan

1) Rendahnya produksi Perikanan budidaya yang mencakup pengembangan rumput laut dan kebun bibit, ikan kerapu dan ikan kakap, dikembangkan di Semau dan Mulut Seribu Rote Ndao untuk mendukung rantai pasok protein ikan di destinasi wisata.
2) Rendahnya produksi dan standar mutu Perikanan tangkap hasil perikanan.

9. Sosial

1) Belum terupdatenya data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) untuk 22 Kabupaten / kota.

10. Tenaga Kerja

1) Rendahnya jumlah tenaga kerja terampil di destinasi wisata yang didatangkan dari Nusa Tenggara.
2) Belum optimalnya Keikutsertaan pada program "working holiday".

11. Kebencanaan

1) Belum optimalnya Mitigasi dan adaptasi perubahan iklim dan bencana dalam upaya antisipasi kekeringan, kelaparan, kebakaran, pandemi, dll

12. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

1) Belum optimalnya BUMDES.
2) Masih rendahnya kepemilikan Perijinan dan legalisasi (HaKI) serta pengujian dan sertifikasi mutu produk pada pelaku usaha.
3) Belum optimalnya Pengembangan kapasitas Desa.
4) Belum optimalnya tenaga pendamping desa.

13. Lingkungan Hidup dan Kehutanan

1) Belum optimalnya pengelolaan kawasan konservasi di wilayah pesisir dan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan.
2) Masih rendahnya indeks kualitas lingkungan dan pengembangan laboratorium lingkungan.
3) Kurangnya penangan sampah dan limbah B3.
4) Belum optimalnya pengawasan lingkungan dan penegakan hukum.
5) Masih rendahnya Pemenuhan ketentuan ijin lingkungan dan ijin PPLH dan Penanganan pengaduan lingkungan hidup.
6) Belum optimalnya Pemanfaatan dan pengembangan hasil hutan bukan kayu (Jahe merah, Porang, Bambu) berbasis perhutanan sosial.
7) Rendahnya Perlindungan ekosistem esensial di destinasi wisata.
8) Belum optimalnya Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (Perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pengawasan dan penegakan hukum).

14. Perindustrian dan Perdagangan

1) Belum optimalnya Pertumbuhan industri pengolahan berbasis potensi lokal yang memanfaatkan teknologi industri.
2) Belum terstandarisasinya produk dalam rangka Menumbuhkan sektor hilir terkait pengembangan pariwisata (pelatihan, pembinaan IKRT, dll).
3) Belum optimalnya Pengembangan Teknologi Tepat Guna (TTG).

15. Perbatasan

1) Rendahnya keterlibatan masyarakat perbatasan dalam mempersiapkan rencana pembangunan perbatasan sebagai pusat perdagangan.
2) Rendahnya Koordinasi, sinkronisasi, kolaborasi pembangunan perbatasan terkait dengan pengejawantahan Inpres Nomor 1 tahun 2021 tentang percepatan pembangunan ekonomi dan kawasan perbatasan Negara di Aruk, Motaain dan Skouw.

16. Penunjang

1) Reformasi Birokrasi

   Belum optimalnya penyiapan penerapan E-Government dalam pelaksanaan pemerintahan.
2) Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

   Rendahnya upaya keterlibatan masyarakat untuk peningkatan kualitas pelayanan KIA, dan penguatan jejaring rujukan masyarakat, serta upaya pengurangan kekerasan berbasis gender

2.4.2.3 Aspek Daya Saing Daerah

1. Masih rendahnya pendapatan masyarakat

   Rendahnya pendapatan masyarakat disebabkan belum optimalnya pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam serta masih rendahnya kualitas sumber daya manusia dan belum optimalnya upaya pemberdayaan masyarakat. Dimana Pertumbuhan PDRB di tahun 2019 sebesar 5,20% namun akibat pandemi Covid19 sangat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi NTT yang hanya sebesar -0,83% pada tahun 2020.

2. Sumbangan Pariwisata terhadap Perekonomian Daerah masih rendah sehingga perlu meningkatkan dan mendorong pengembangan Pariwisata NTT melalui Pemenuhan unsur 5A Pariwisata (*Attraction, Accessibility, Accommodation, Amenities,* dan *Awareness*) dengan Pola Pendekatan Kawasan. Dimana pada tahun 2019, Share Lapangan Usaha Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum terhadap PDRB 0,75%, Share Lapangan Usaha jasa lainnya terhadap PDRB sebesar 2,20% dan Share Lapangan usaha Perdagangan Besar dan Eceran terhadap PDRB hanya sebesar 12,08%.
3. Masih belum optimalnya peranan NTT dalam Perdagangan Regional baik ekspor dan import yang dapat mendongkrak kontribusi PAD terhadap pendapatan daerah dimana %PAD terhadap pendapatan daerah di tahun 2019 masih rendah yaitu 23,90%.
4. Masih tingginya ketergantungan ekonomi masyarakat dimana rasio ketergantungan pada Tahun 2019 mencapai 64,10%.

2.4.2 Dampak Covid–19

Pandemi COVID-19 tidak hanya menyebabkan tekanan terhadap sektor kesehatan, tetapi juga pada ekonomi dan sosial. Pascapandemi Covid-19, ekonomi global diperkirakan menuju keseimbangan baru (new normal), dimana proses tranformasi akan terjadi di empat area: struktural dan digital, perilaku dan kehidupan masyarakat, pola rantai pasok, serta tatanan internasional.

Pandemi Covid-19 menyebabkan tekanan yang cukup berat bagi sistem kesehatan terutama bagi upaya pencegahan penularan dan menekan kematian. Berdasarkan pola penyebaran Covid-19 saat ini, identifikasi kerentanan dan terdampak relatif parah adalah daerah padat, daerah dengan struktur lapangan kerja informal nonpertanian relatif besar, dan daerah dengan struktur ekonomi menonjol di sektor pariwisata, industri pengolahan, perdagangan, dan transportasi. Tekanan besar pada sistem kesehatan terutama pada pencegahan, pelayanan kesehatan dasar dan rujukan, jaminan kesehatan (*health*

security), dan sumber daya manusia (SDM) kesehatan, terutama untuk deteksi dan surveilans, uji laboratorium, penyediaan alat pelindung, dan alat kesehatan. Penanganan pandemi dan upaya pencegahan dan kuratif Covid-19 menyebabkan pencapaian target-target pembangunan kesehatan utama seperti kesehatan ibu dan anak, gizi masyarakat dan pengendalian penyakit terhambat.

Dari sisi ekonomi, Covid-19 memberikan tekanan yang besar terhadap hampir semua aspek kehidupan. Dampak Covid-19 menurut para ahli diperkirakan akan lebih besar dan lama, membentuk huruf U bahkan huruf L atau M jika kasusnya meningkat kembali. Ekonomi dunia diperkirakan mengalami resesi pada tahun 2020, lebih buruk dari saat krisis keuangan dan pangan global tahun 2008. Dampak negatif dirasakan oleh hampir semua pelaku ekonomi. Pendapatan dan konsumsi masyarakat turun tajam sebagai akibat pembatasan pergerakan masyarakat (*physical distancing*). Investasi diperkirakan terdampak sebagai akibat terganggunya neraca keuangan perusahaan karena turunnya penerimaan dan terhentinya beberapa aktivitas produksi. Perdagangan internasional terdampak akibat rendahnya aktivitas perdagangan di tingkat global yang juga menyebabkan turunnya harga komoditas. Tidak hanya itu, kesehatan sektor keuangan juga diperkirakan menurun, seiring dengan kemungkinan meningkatnya *non performing loan* (NPL) dan volatilitas di pasar keuangan.

Pembatasan pergerakan masyarakat juga mengakibatkan penurunan produktivitas tenaga kerja di industri maupun perkantoran, serta penurunan indikator makro ekonomi Provinsi NTT, di antaranya konsumsi dan produksi rumah tangga, investasi riil, dan penyerapan tenaga kerja. Pandemi Covid-19 memaksa dunia usaha dan pemerintah menerapkan teknologi informasi dengan lebih intensif. Proses transisi ke ekonomi digital berlangsung lebih cepat. Beberapa perusahaan yang sukses bertransisi ke sistem *online* memiliki peluang untuk bertahan karena permintaan rumah tangga khususnya untuk konsumsi pangan dan kebutuhan pokok lainnya masih dapat berjalan. Dengan kata lain, terdapat risiko penurunan elastisitas penciptaan lapangan kerja baru terhadap pertumbuhan

ekonomi, sehingga pengangguran relatif lebih tinggi dari *baseline*, khususnya di wilayah-wilayah dengan konektivitas digital relatif baik.

Dari sisi perekonomian dunia, ketidakstabilan ekonomi dunia akan berdampak pada penurunan nilai tukar rupiah dan tekanan pada perekonomian domestik. Pembatasan impor dari Tiongkok dan beberapa negara lainnya telah menyebabkan kelangkaan bahan pangan tertentu. Penurunan permintaan akibat turunnya daya beli masyarakat juga mempengaruhi produksi dalam negeri. Untuk mengatasi ini, pemerintah telah membuka kembali keran impor beberapa komoditi untuk memenuhi kebutuhan pangan domestik dan menjaga keseimbangan harga.

Berbagai gangguan tersebut berdampak pada sasaran makro dan pembangunan, sehingga Pemerintah perlu melakukan kajian ulang terhadap kebijakan dan fokus pembangunan serta berbagai target makro pembangunan untuk tahun 2022.



BAB III
KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH

BAB III KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH

Kerangka ekonomi makro Provinsi Nusa Tenggara Timur, memberikan gambaran kondisi ekonomi daerah yang ditunjukkan oleh indikator Perubahan pada laju pertumbuhan ekonomi, inflasi dan kondisi ketenagakerjaan, dan derajat kesejahteraan masyarakat yang diindikasikan oleh angka kemiskinan. Indikator-indikator yang membentuk kerangka ekonomi ini, digunakan sebagai dasar bagi penyusunan proyeksi ekonomi di tahun 2022. Selanjutnya hasil proyeksi ekonomi tersebut akan digunakan sebagai dasar asumsi dalam melakukan prediksi kondisi keuangan daerah, yaitu pendapatan daerah yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), yang pada akhirnya berdampak pada belanja dan pembiayaan daerah.

3.1. ARAH KEBIJAKAN EKONOMI DAERAH

Untuk menjamin keberlanjutan arah pembangunan, arah kebijakan ekonomi Provinsi NTT Tahun 2022 diselaraskan dengan kebijakan ekonomi nasional dan mengacu pada perencanaan tahunan RPJMD Tahun 2018-2023 yang disusun dengan tujuan untuk mengimplementasikan program serta dalam rangka mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan berdasarkan kondisi ekonomi makro yang ada. Kebijakan perekonomian Provinsi NTT dipengaruhi oleh dinamika perkembangan ekonomi nasional yang mempertimbangkan hasil analisis terhadap kinerja perekonomian nasional dan daerah tahun 2020.

Analisis ekonomi daerah dimaksudkan untuk menilai sejauh mana realisasi pembangunan daerah dapat mempengaruhi kinerja ekonomi daerah pada tahun 2022.

3.1.1 Pertumbuhan Ekonomi Tahun 2020

Secara Kumulatif, Pertumbuhan ekonomi Provinsi Nusa Tenggara Timur pada tahun 2020 mengalami kontraksi sebesar -0,83% (c to c) sebagai dampak langsung terhambatnya aktivitas ekonomi sebagai akibat meluasnya pandemi covid-19. Angka ini lebih rendah dibandingkan tahun 2019 yang tumbuh sebesar 5,24% (c to c), namun lebih tinggi dibanding nasional yang terkontraksi 2,07% (c to c). nominal PDRB NTT ADHB pada tahun 2020 mencapai Rp 106,51 triliun, sedangkan PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010 (ADHK 2010) mencapai Rp 68,81 triliun.

Struktur ekonomi Provinsi NTT pada tahun 2020 didominasi oleh empat lapangan usaha utama, yakni Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan; Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib; Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor; serta Jasa Pendidikan. Terdapat perubahan struktur ekonomi pada tahun 2020 dibandingkan dengan triwulan sebelumnya, di mana lapangan usaha Jasa Pendidikan menggantikan lapangan usaha Konstruksi yang turun menjadi peringkat kelima penyumbang PDRB Provinsi NTT. Perubahan struktur ekonomi pada Tahun 2020 merupakan dampak dari pandemi COVID-19 yang menahan kinerja lapangan usaha Konstruksi. Selama tahun 2020, hanya terdapat 8 lapangan usaha di Provinsi NTT yang memiliki pertumbuhan positif secara year on year dibandingkan dengan tahun 2019, yaitu: lapangan usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan; Pengadaan Listrik dan Gas; Pengadaan Air, Pengelolaan Limbah dan Daur Ulang; Informasi dan Komunikasi; Jasa Keuangan dan Asuransi; Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib; Jasa Pendidikan; serta Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial.

Pertumbuhan PDRB tertinggi menurut lapangan usaha pada triwulan IV 2020 *y o y* berturut-turut adalah sektor jasa keuangan dan asuransi, yang bertumbuh sebesar 13,15%, diikuti sektor informasi dan komunikasi bertumbuh sebesar 12,68%, sektor pengadaan air bertumbuh sebesar 11,46%. Sedangkan sektor dengan pertumbuhan terendah berturut-turut adalah jasa perusahaan bertumbuh -49,90%, sektorjasa lainnya bertumbuh -22,13%, dan penyediaan akomodasi & makan minum bertumbuh -19,40%.

Dari sisi pengeluaran, kontraksi ekonomi NTT terutama bersumber dari penurunan investasi dan konsumsi pemerintah. Penanaman modal dalam negeri (PMDN) maupun penanaman modal asing (PMA) pada tahun 2020 mengalami perlambatan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Disamping itu, penurunan kinerja konsumsi pemerintah terjadi seiring dengan adanya refocusing dan realokasi anggaran pemerintah yang berdampak pada penurunan realisasi belanja operasional pada tahun 2020. Perekonomian Provinsi NTT pada triwulan IV 2020 ditopang oleh konsumsi rumah tangga dengan pangsa 66,65%. Kinerja konsumsi rumah tangga yang terkontraksi pada triwulan IV 2020 memengaruhi pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan pada triwulan IV 2020. Kondisi ini dipengaruhi oleh dampak COVID-19 terhadap kinerja sektor utama yang menurunkan pendapatan

masyarakat yang pada akhirnya mengurangi konsumsi. Kinerja konsumsi pemerintah pada triwulan IV 2020 masih terkontraksi, meskipun sedikit membaik dibandingkan dengan triwulan III 2020 disebabkan oleh percepatan realisasi anggaran pada akhir tahun. Kontraksi tersebut dipengaruhi oleh menurunnya pendapatan asli daerah dan pendapatan transfer sehingga berdampak pada realisasi belanja pemerintah pada tahun 2020. Sementara itu, kinerja investasi terkontraksi lebih dalam dibandingkan dengan triwulan sebelumnya seiring menurunnya realisasi belanja modal Pemerintah akibat refocusing dan reallocating anggaran untuk penanganan pandemi COVID-19. Di sisi lain, kinerja sektor eksternal Provinsi NTT pada triwulan IV 2020 mengalami perbaikan, ditunjukkan oleh perlambatan kinerja impor dibandingkan dengan triwulan sebelumnya dan juga pertumbuhan ekspor ke negara Vietnam mencapai 26,41% (yoy). Tabel 3.1. berikut menampilkan informasi perkembangan pertumbuhan komponen pengeluaran dalam PDRB NTT 2018-2020.

Tabel 3.1. Pertumbuhan dan Pangsa PDRB NTT berdasarkan Pengeluaran

Uraian	2018				2018	2019				2019	2020				2020	Pangsa (Tahun 2020)
	I	II	III	IV		I	II	III	IV		I	II	III	IV		
1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	6,20	4,37	4,63	2,79	4,45	5,02	6,40	5,63	4,58	5,40	4,41	(4,40)	(2,38)	(3,88)	(1,64)	70,07
2. Pengeluaran Konsumsi LNPRT	19,77	10,91	7,10	2,78	9,76	4,74	9,25	2,60	4,26	5,21	(2,72)	(13,10)	1,22	(1,36)	(4,04)	3,25
3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	8,43	0,20	1,01	14,47	6,02	0,00	3,68	0,17	4,34	2,29	3,54	(6,47)	(15,12)	(7,99)	(8,04)	25,86
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto	7,36	5,97	7,11	0,30	4,94	6,66	5,01	3,15	7,59	5,58	0,66	(7,74)	(8,07)	(16,07)	(8,25)	44,66
5. Perubahan Inventori	47,16	50,86	46,20	50,53	48,76	37,28	9,29	3,42	7,36	12,16	17,96	7,01	8,35	5,21	9,31	1,04
6. Ekspor Luar Negeri	(2,52)	(22,87)	(23,61)	(28,23)	(20,32)	(23,97)	(31,91)	(16,84)	(4,05)	(19,40)	(11,81)	(49,84)	(35,03)	(32,73)	(32,07)	1,01
7. Impor Luar Negeri	(23,35)	(30,57)	566,23	(3,33)	31,98	46,12	(21,21)	(48,12)	(32,42)	(27,65)	41,76	(32,43)	(90,84)	(62,61)	(30,87)	0,57
8. Net Impor Antardaerah	12,98	3,72	(1,13)	2,27	3,54	2,74	3,86	5,63	6,18	4,83	1,48	(13,87)	(12,50)	(17,15)	(11,56)	45,32
PDRB	**5,00**	**5,01**	**5,15**	**5,26**	**5,11**	**5,22**	**6,30**	**3,90**	**5,61**	**5,24**	**2,99**	**(1,98)**	**(1,75)**	**(2,27)**	**(0,83)**	**100,00**

Sumber : BPS NTT

Meskipun pertumbuhan ekonomi NTT mengalami pelambatan, bahkan kontraksi pada tahun 2020, namun optimisme yang beralasan muncul karena pada awal tahun 2021, pertumbuhan ekonomi NTT triwulan I-2021 tumbuh sebesar 0,12 persen dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun 2020 (y-on-y). Dari sisi lapangan usaha, pertumbuhan ekonomi tertinggi dicapai oleh lapangan usaha Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang sebesar 21,02 persen. Sedangkan dari sisi pengeluaran, Komponen Ekspor Barang dan Jasa mengalami kontraksi pertumbuhan terdalam sebesar 50,21 persen. Apabila secara *year on year*

ekonomi Daerah mulai tumbuh positif, pada triwulan I-2021 ekonomi NTT Kembali mengalami kontraksi sebesar -5,49 persen dibandingkan dengan triwulan IV-2020 (*q-to-q*). Kontraksi ini didorong khususnya oleh penurunan kinerja pada hampir semua lapangan usaha kecuali beberapa lapangan usaha seperti lapangan usaha Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang yang tumbuh sebesar 2,58 persen, lapangan usaha Pengadaan Listrik dan Gas yang tumbuh sebesar 1,65 persen serta lapangan usaha Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial yang tumbuh sebesar 1,57 persen. Sedangkan dari sisi pengeluaran, pertumbuhan negatif (kontraksi) terjadi pada semua komponen pengeluaran. Kontraksi terdalam terjadi pada Komponen Ekspor Barang dan Jasa sebesar 50,21 persen, diikuti oleh Komponen Pengeluaran Konsumsi Pemerintah sebesar 15,74 persen dan Komponen Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) sebesar 4,96 persen. Sementara Komponen Impor Barang dan Jasa (yang merupakan faktor pengurang dalam PDRB menurut pengeluaran) mengalami kontraksi pertumbuhan sebesar 21,34 persen.

Pemulihan ekonomi Provinsi NTT tetap berlanjut di triwulan II 2021 seiring dengan perayaan Hari Raya Idul Fitri dan masuknya masa puncak panen raya. Program vaksinasi diharapkan mampu menekan laju penyebaran kasus COVID-19 sehingga mendorong pemulihan aktivitas masyarakat dan permintaan domestik, terutama konsumsi rumah tangga dan investasi. Dari sisi lapangan usaha, pertumbuhan ekonomi Provinsi NTT pada triwulan II 2021 didorong oleh lapangan usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan; Konstruksi; dan Perdagangan Besar dan Eceran. Perbaikan perekonomian Provinsi NTT diperkirakan tetap berlanjut sampai akhir tahun 2021 dan meningkat dibandingkan realisasi pertumbuhan ekonomi tahun 2020. Akselerasi ekonomi Provinsi NTT dipengaruhi oleh perbaikan konsumsi masyarakat sejalan dengan meningkatnya mobilitas dan aktivitas ekonomi, peningkatan kapasitas fiskal, serta keberlanjutan pembangunan proyek investasi terutama Proyek Strategis Nasional dan Destinasi Pariwisata Super Prioritas (DPSP) Labuan Bajo. Di sisi Lapangan Usaha, peningkatan Ekonomi Provinsi NTT pada tahun 2021 juga diperkirakan ditopang oleh Lapangan Usaha Utama Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan; Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib; Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor serta Konstruksi.

3.1.2 Laju Inflasi

Inflasi Provinsi NTT pada triwulan IV 2020 tercatat sebesar 0,61% (yoy), melandai dibandingkan dengan triwulan sebelumnya sebesar 1,10% (yoy). Inflasi tersebut lebih rendah dibandingkan inflasi Nasional sebesar 1,68% (yoy). Penurunan tekanan inflasi terutama bersumber dari penurunan tarif angkutan udara serta penurunan harga sawi hijau, biaya pulsa ponsel, dan semen. Di sisi lain, kenaikan harga ikan segar, rokok, dan emas perhiasan menjadi faktor pendorong inflasi. Secara keseluruhan tahun 2020, inflasi Provinsi NTT tercatat melandai dibandingkan dengan inflasi tahun 2019. Melandainya tekanan inflasi terutama disebabkan dari permintaan yang menurun akibat daya beli masyarakat yang melemah di tengah pandemi COVID-19.

Berdasarkan kelompok komoditas, inflasi pada triwulan IV 2020 terutama didorong oleh kelompok makanan, minuman dan tembakau, serta kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya. Kelompok makanan, minuman dan tembakau mencatat inflasi sebesar 2,87% (yoy) dan memberi andil sebesar 0,94% dari inflasi total. Sementara itu, kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya mencatat inflasi sebesar 4,06% (yoy) dan memberi andil sebesar 0,27% dari inflasi total. Di sisi lain, kelompok transportasi mencatat deflasi sebesar 4,66% (yoy) dan merupakan faktor utama penahan laju inflasi secara keseluruhan

Tabel 3.2
Inflasi di NTT berdasarkan kelompok komoditas

Kelompok Komoditas	(% mtm)			(% yoy)		
	Okt '20	Nov '20	Des '20	Tw IV '19	Tw III '20	Tw IV '20
Inflasi Umum (Total)	**0,26**	**0,29**	**0,78**	**0,67**	**1,10**	**0,61**
Makanan, Minuman & Tembakau	0,93	0,82	2,13	1,00	3,74	2,87
Pakaian & Alas Kaki	-0,28	-0,18	-0,33	1,80	0,87	-0,47
Perumahan, Air, Listrik, & Bahan Bakar RT	-0,12	0,19	-0,01	-0,18	-0,12	-0,27
Perlengkapan, Peralatan, & Pemeliharaan Rutin RT	-0,00	0,11	0,02	0,80	0,67	0,60
Kesehatan	1,01	0,02	0,29	1,67	5,47	6,39
Transportasi	0,08	0,19	0,72	-0,88	-4,40	-4,66
Informasi, Komunikasi & Jasa Keuangan	-0,55	0,02	-0,02	0,25	-1,67	-2,04
Rekreasi, Olahraga & Budaya	0,08	0,18	0,28	2,04	-0,26	-0,12
Pendidikan	0,26	0,00	0,00	2,83	0,31	0,62
Penyediaan Makanan & Minuman/Restoran	0,00	0,02	0,07	-0,51	0,86	1,60
Perawatan Pribadi & Jasa Lainnya	-0,23	-0,56	-0,16	3,61	6,38	4,06

Sumber : Laporan Perekonomian Provinsi NTT, Bank Indonesia, 2021

Dalam rangka pengendalian inflasi di Provinsi NTT, TPID Provinsi NTT dan TPID Kabupaten/Kota terus meningkatkan koordinasi secara intensif. Di tengah melambatnya tekanan inflasi di tahun 2020 akibat daya beli yang turun selama pandemi COVID 19, Pemerintah daerah di Provinsi NTT bersama anggota-anggota TPID lainnya tetap melaksanakan berbagai program pengendalian inflasi.

3.1.3 Penduduk Miskin

Jumlah penduduk miskin di Provinsi NTT pada September 2020 mengalami kenaikan dibandingkan September 2019. Persentase penduduk miskin pada September 2020 tercatat sebesar 21,21% atau sejumlah 1,17 juta orang meningkat dibandingkan September 2019 yang sebesar 20,62% (1,13 juta orang). Kemiskinan di Provinsi NTT sejalan dengan kondisi Nasional yang juga mengalami kenaikan menjadi 10,19% (27,55 juta orang) dari sebelumnya 9,22% (24,79 juta orang) pada September 2019. Secara spasial, Provinsi NTT menempati peringkat ketiga provinsi dengan persentase kemiskinan tertinggi, setelah Papua (26,80%) dan Papua Barat (21,70%). Secara umum, tingkat kemiskinan di Provinsi NTT dalam 5 tahun terakhir menunjukkan tren penurunan. Namun outbreak COVID-19 mengakibatkan perlambatan ekonomi yang pada ujungnya berdampak pada kesejahteraan masyarakat.

Apabila didalami, kenaikan persentase penduduk miskin di NTT terjadi baik di wilayah perkotaan maupun diwilayah perdesaan. Persentase penduduk miskin NTT di daerah perkotaan pada Maret 2020 sebesar 8,64 persen, naik menjadi 8,76 persen pada September 2020. Sementara persentase penduduk miskin di daerah perdesaan pada Maret 2020 sebesar 24,73 persen, naik menjadi 25,26 persen pada September 2020. Dibanding Maret 2020, jumlah penduduk miskin September 2020 di daerah perkotaan naik sekitar 5,5 ribu orang (dari 113,39 ribu orang pada Maret 2020 menjadi 118,88 ribu orang pada September 2020). Sementara itu daerah perdesaan naik sekitar 14,3 ribu orang (dari 1.040,37 ribu orang pada Maret 2020 menjadi 1.054,65 ribu orang pada September 2020).

Garis kemiskinan pada September 2020 tercatat sebesar Rp. 404.712,-/kapita/bulan dengan komposisi garis kemiskinan makanan sebesar Rp.316.659,-/kapita/bulan (78,24 persen) dan garis kemiskinan bukan makanan sebesar Rp. 88.053,-/kapita/bulan (21,76 persen). Secara rata-rata, rumah tangga miskin di Provinsi NTT pada September 2020 memiliki 5,62 orang anggota rumah tangga. Dengan demikian, besarnya garis

kemiskinan per rumah tangga miskin secara rata-rata adalah sebesar Rp.2.274.481,-/rumah tangga miskin/bulan.

Upaya pemulihan ekonomi Nasional dan daerah berfokus pada kelompok miskin dan kelompok rawan miskin yang ada di daerah melalui berbagai skema kebijakan seperti pemberian bantuan langsung tunai dan program-program pengaman sosial lainnya, agar peningkatan jumlah dan persentase orang miskin dapat ditekan.

3.1.4 Tingkat Pengangguran Terbuka

Tingkat pengangguran terbuka di NTT tahun 2020 mencapai 4,28% meningkat cukup tinggi dibandingkan tahun-tahun sebelumnya yaitu: 3,25%, (tahun 2016) 3,27% (tahun 2017), 3,01 (tahun 2018), dan 3,35% (2019). Konsentrasi pengangguran terbuka terdapat pada wilayah dengan karakter dominan perkotaan (*urban*), dan sebaliknya wilayah dengan karakter dominan perdesaan (*rural*) cenderung mencatat TPT yang rendah. TPT tertinggi terdapat di Kota Kupang sepanjang 2004-2020.

Pelambatan laju pertumbuhan ekonomi pada tahun 2020 memberi dampak pada angka pengangguran di Nusa Tenggara Timur. menurut data BPS, pada Agustus 2020 Tingkat Pengangguran terbuka di Nusa Tenggara Timur meningkat menjadi 4,28%. Terjadi kenaikan sebesar 1,14 poin persen jika dibandingkan dengan angka Agustus 2019 (*y on y*) yang sebesar 3,14%. Lebih dari 373 ribu jiwa dari angkatan kerja NTT tahun 2020, atau hampir mencapai 10% dari penduduk usia kerja, terdampak efek ekonomi dari pandemi covid-19. Dari 373 ribu lebih angkatan kerja yang terdampak pelambatan ekonomi daerah tersebut, 13 ribu lebih pekerja kehilangan pekerjaannya (menjadi pengangguran), 16 ribu lebih penduduk sementara tidak bekerja, dan 337 ribu pekerja bekerja dengan jam kerja yang dikurangi (*shorter hour*). Pada periode yang sama, terjadi kenaikan angka pekerja setengah penganggur. Persentase pekerja setengah penganggur naik menjadi 15,10% atau naik 3,31 poin persen dari 11,79% dibandingkan periode yang sama pada tahun sebelumnya.

Upaya penciptaan lapangan kerja merupakan salah satu pilar dari upaya pemulihan ekonomi daerah pasca resesi. Diharapkan dengan menggeliatnya kembali ekonomi daerah, aktivitas ekonomi akan kembali bergerak dan pasar kerja akan kembali bergairah.

3.2. ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH

3.2.1. Proyeksi Keuangan Daerah dan Kerangka Pendanaan

Penentuan kapasitas keuangan daerah dilakukan untuk mengetahui proyeksi jumlah penerimaan daerah (pendapatan dan penerimaan pembiayaan) sehingga pendanaan pembangunan (belanja dan pengeluaran pembiayaan) dapat dilakukan dengan lebih cermat, tepat, dan terukur. Proyeksi penentuan kapasitas keuangan daerah dilakukan dengan tahapan :

1) evaluasi kinerja pendapatan daerah untuk tahun rencana,
2) perkiraan rata-rata pertumbuhan APBD (pendapatan, belanja dan pembiayaan), dan
3) penelaahan prospek perekonomian daerah dan kebijakan keuangan negara khususnya dana transfer daerah.

3.2.1.1. Kinerja Pendapatan Daerah sampai dengan Tahun 2020

Tabel 3.3 memperlihatkan kinerja pendapatan daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Tabel 3.3
Persentase Realisasi Pendapatan Daerah Tahun 2017-2020

URAIAN	PERSENTASE			
	2017	2018	2019	2020
PENDAPATAN	**97,98**	**97,37**	**96,29**	**92,84**
1 Pendapatan Asli Daerah	**103,10**	**100,44**	**95,12**	**79,59**
a. Pendapatan Pajak Daerah	104,11	104,62	95,08	89,60
b. Pendapatan Retribusi Daerah	96,26	100,27	86,92	33,56
c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan	99,43	98,57	85,93	46,02
d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah	100,45	79,90	100,84	75,44
2 Pendapatan Dana Perimbangan	**96,86**	**96,87**	**97,46**	**97,60**
a. Pendapatan Bagi Hasil pajak dan Bukan Pajak	100,88	74,63	60,72	89,49
b. Dana Alokasi Umum (DAU)	100,00	100,00	100,00	99,65
c. Dana Alokasi Khusus (DAK)	93,70	94,86	96,36	96,40
3 Lain-lain Pendapatan yang Sah	**46,87**	**26,58**	**15,79**	**85,94**
a. Dana Kontigensi/ Penyeimbang	-	-	-	
b. Dana Hibah	13,00	26,58	15,79	83,22
c. Dana Darurat	-	-	-	
d. Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemda Lainnya	-	-	-	
e Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	100,00	-	-	99,79
f. Bantuan dari Pihak Ketiga	-	-	-	

Sumber : Badan Keuangan dan Aset Daerah, diolah.

Realisasi Pendapatan Daerah Provinsi NTT sepanjang tahun 2017-2020 menunjukkan kinerja yang positif walaupun prosentase realisasi pendapatannya mengalami penurunan yang ditunjukkan oleh tabel di atas.

3.2.1.2. Rata-rata Pertumbuhan Pendapatan

Pertumbuhan pendapatan daerah akan memberikan informasi bagaimana kinerja pendapatan daerah, yang dapat menjadi salah satu cara untuk bisa memproyeksikan kinerja pendapatan daerah pada masa yang akan datang. Proyeksi yang akan dilakukan tentu saja akan dipengaruhi oleh asumsi-asumsi yang digunakan, termasuk diantaranya bagaimana kondisi makro ekonomi daerah dan nasional. Rata-rata pertumbuhan pendapatan daerah tahun 2017-2020 secara rinci dapat dilihat pada tabel 3.4 sebagai berikut:

Tabel 3.4
Rata-rata Pertumbuhan Realisasi Pendapatan Daerah 2017-2020

Tahun Anggaran	Pendapatan Daerah (Rupiah)	Persentase Pertumbuhan
2017	4.700.213.492.589,51	
2018	4.507.833.810.597,22	-4,09
2019	5.354.092.405.679,30	18,77
2020	5.419.935.156.637,49	1,23
Rata-Rata Pertumbuhan		**5,30**

Sumber : Badan Keuangan dan Aset Daerah, diolah.

Realisasi Pendapatan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur mengalami fluktuatif setiap tahunnya, pada tahun 2017 realisasi pendapatan daerah sebesar Rp.4.700.213.492.589 atau 97,98%, tahun 2018 realisasi menurun menjadi sebesar Rp. 4.507.833.810.597,22 dengan tingkat presentase sebesar 97,37%. Tahun 2019 realisasi menjadi Rp.5.354.092.405.679,30 atau 96,29%, dan tahun 2020 realisasi sebesar Rp 5.419.935.156.637,49 tetapi lagi-lagi secara presentase realisasinya menurun, hanya sebesar 92,84%.

Sumber pendapatan paling dominan Provinsi NTT berasal dari Dana Perimbangan (dana Transfer) yang diikuti oleh lain-lain pendapatan asli daerah. Sedangkan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah berkontribusi paling sedikit. Ini menunjukkan Pemerintah Provinsi NTT masih sangat tergantung pada Pemerintah Pusat melalui Dana Perimbangan.

Ketergantungan pendapatan pemerintah Provinsi NTT kepada Pemerintah Pusat masih sangat besar, sehingga dalam prakteknya pendapatan daerah akan sangat tergantung pada kebijakan Pemerintah Pusat. Tingkat kemandirian APBD dapat dilihat dari proporsi realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap realisasi total pendapatan daerah setidaknya dalam 4 (empat) tahun terakhir dapat dilihat pada Tabel 3.5 berikut:

Tabel 3.5
Proporsi Realisasi Pendapatan Asli Daerah Terhadap Pendapatan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2017-2020

Tahun Anggaran	Pendapatan Daerah (Rupiah)	Pendapatan Asli Daerah (Rupiah)	Proporsi (%)
2017	4.700.213.492.589,51	1.047.491.567.026,51	22,29
2018	4.507.833.810.597,22	1.092.895.995.481,22	24,24
2019	5.354.092.405.679,30	1.258.958.953.288,30	23,51
2020	5.419.935.156.637,49	1.166.570.596.936,49	21,52

Sumber : Badan Keuangan Daerah Prov. NTT, 2021: diolah.

Dilihat dari tabel diatas bahwa proporsi PAD terhadap pendapatan daerah masih relatif kecil dengan proposrsi yang menurun dari tahun 2018 hingga tahun 2020. Selanjutnya dari sisi pertumbuhan realisasi Pendapatan Asli Daerah dalam kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir dapat dilihat pada Tabel 3.6 berikut:

Tabel 3.6
Pertumbuhan Realisasi Pendapatan Asli Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2017- 2020

Tahun Anggaran	Pendapatan Asli Daerah (Rupiah)	Pertumbuhan (%)
2017	1.047.491.567.026,51	
2018	1.092.895.995.481,22	4,33
2019	1.258.958.953.288,30	15,19
2020	1.166.570.596.936,49	-7,34
Rata-Rata Pertumbuhan		4,06

Sumber : Badan Keuangan Daerah Prov. NTT, 2020: diolah.

Realisasi belanja tidak langsung menunjukkan trend menurun. Hal ini bisa jadi karena ketidakmampuan penyerapan anggaran yang telah dialokasikan, atau karena pengalokasian anggaran yang terlampau besar, dibandingkan dengan kebutuhan yang ada. Di sisi lain, penyerapan belanja langsung terlihat fluktuatif.

Kondisi ini menunjukkan bahwa kinerja pengelolaan keuangan oleh perangkat daerah sebagai pengguna anggaran belanja langsung relatif masih labil. Fluktuatifnya realisasi belanja bisa jadi karena perencanaan yang belum berkualitas sehingga kurang sejalan antara dokumen perencanaan dan dokumen penganggaran dengan realitas pembangunan. Juga ada peluang lemahnya pengelolaan kegiatan yang berdampak pada tidak terpenuhinya kegiatan dengan penjadwalan yang ditetapkan. Prosentase realisasi belanja tidak langsung dan belanja langsung sebagaimana Gambar 3.1.



Sumber : Badan Pengelolaan Keuangan Daerah, diolah

Gambar 3.1.
Prosentase Realisasi Belanja Langsung dan Tidak Langsung
Tahun 2017 - 2020

Kinerja Belanja Daerah Provinsi NTT selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 3.7, Proporsi Belanja pada Tabel 3.8 dan Rata-Rata Pertumbuhan Belanja Tidak Langsung pada Tabel 3.9.

Tabel 3.7
Kinerja Belanja Daerah 2017 - 2020

URAIAN	PERSENTASE			
	2017	2018	2019	2020
BELANJA	**92,55**	**93,38**	**91,47**	**90,69**
1 Belanja Tidak Langsung	**95,53**	**94,30**	**92,90**	**91,17**
Belanja Pegawai/Personalia	95,95	97,83	94,38	91,96
Belanja Bunga				43,29
Belanja Hibah	96,92	93,44	91,15	92,92
Belanja Bantuan Sosial	92,54	99,82	99,33	87,32
Belanja Bagi Hasil Kabupaten/Kota	91,58	88,01	94,73	88,55
Belanja Bantuan Keuangan	95,37	100,00	99,69	100,00
Belanja Tidak Terduga	1,15	3,43	15,54	85,26
2 Belanja Langsung	**87,11**	**91,60**	**89,23**	**89,96**
Belanja Pegawai/Personalia	94,65	95,87	92,90	104,89
Belanja Barang dan Jasa	90,36	90,38	90,50	93,95
Belanja Modal	79,77	92,77	86,81	83,44

Sumber : Badan Keuangan Daerah

Tabel 3.8
Rata-Rata Proporsi Belanja Daerah 2017-2020

URAIAN	PROPORSI			
	2017	2018	2019	2020
BELANJA	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
1 Belanja Tidak Langsung	**66,68**	**66,41**	**62,02**	**62,02**
Belanja Pegawai/Personalia	27,23	26,53	27,13	27,13
Belanja Hibah	29,08	30,57	24,47	24,47
Belanja Bantuan Sosial	0,46	0,40	0,56	0,56
Belanja Bagi Hasil Kabupaten/Kota	9,83	8,82	9,78	9,78
Belanja Bantuan Keuangan	0,07	0,08	0,05	0,05
Belanja Tidak Terduga	0,00	0,00	0,04	0,04
2 Belanja Langsung	**33,32**	**33,59**	**37,98**	**37,98**
Belanja Pegawai/Personalia	3,07	2,88	3,91	3,91
Belanja Barang dan Jasa	19,84	19,79	18,94	18,94
Belanja Modal	10,42	10,93	15,12	15,12

Sumber : Badan Keuangan Daerah

Tabel 3.9
Rata-Rata Pertumbuhan Belanja Daerah 2018-2020

URAIAN	PERSENTASE			RATA-RATA
	2018	2019	2020	PERTUMBUHAN
BELANJA	**4,57**	**8,89**	**9,05**	**7,50**
1 Belanja Tidak Langsung	**4,15**	**1,70**	**91,17**	**32,34**
Belanja Pegawai/Personalia	1,91	11,34	91,96	35,07
Belanja Bunga			43,29	14,43
Belanja Hibah	9,93	(12,84)	92,92	30,00
Belanja Bantuan Sosial	(9,32)	51,10	87,32	43,03
Belanja Bagi Hasil Kabupaten/Kota	(6,20)	20,69	88,55	34,35
Belanja Bantuan Keuangan	13,67	(27,18)	100,00	28,83
Belanja Tidak Terduga	122,49	1.476,04	85,26	561,27
2 Belanja Langsung	**5,42**	**23,09**	**89,96**	**39,49**
Belanja Pegawai/Personalia	(1,97)	48,23	104,89	50,38
Belanja Barang dan Jasa	4,32	4,20	93,95	34,16
Belanja Modal	9,70	50,68	83,44	47,94

Sumber : Badan Keuangan Daerah

3.2.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah

3.2.2.1. Arah Kebijakan Pendapatan Daerah

Proyeksi pendapatan daerah tahun 2022 tidak terlepas dari kebijakan nasional, prospek ekonomi secara nasional, dan prospek ekonomi daerah. Beberapa hal yang menjadi perhatian dalam menentukan arah kebijakan pendapatan daerah untuk tahun 2022 adalah sebagai berikut :

1) Kinerja pertumbuhan ekonomi Provinsi NTT mengalami perlambatan akibat pandemic Covid 19. Namun dengan perbaikan kinerja perekonomian daerah dan optimisme dengan dilaksanakannya vaksinasi Covid 19, maka proyeksi pertumbuhan ekonomi Provinsi NTT tahun 2022 ditargetkan bertumbuh sebesar 6,00 – 6,33%. Target ini sudah dikonsultasikan dengan Pemerintah Pusat dan disetujui saat forum Rakortekrenbang Tahun 2021 untuk perencanaan 2022.
2) Pada Agustus 2020, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) sebesar 4,28 persen. Terjadi kenaikan sebesar 1,14 persen poin dibandingkan Agustus 2019 yang sebesar 3,14 persen. Sebanyak 373,22 ribu penduduk usia kerja (9,57%) terdampak covid-19. Pada Agustus 2020, persentase pekerja setengah penganggur sebesar 15,10 persen. Terjadi kenaikan sebesar 3,31 persen poin dibandingkan Agustus 2019 yang sebesar 11,79 persen. Hal ini ikut berdampak pada peningkatan kemiskinan, dimana jumlah penduduk miskin pada September 2020 sebesar 1.173,53 ribu orang, naik 19,77 ribu orang terhadap Maret 2020 dan naik 44,07 ribu orang terhadap September 2019. Persentase penduduk miskin pada September 2020 sebesar 21,21 persen, naik 0,31 persen poin terhadap Maret 2020 dan naik 0,59 persen poin terhadap September 2019.
3) Dari sisi distribusi pendapatan antar golongan masyarakat Provinsi Nusa Tenggara Timur mengalami kesenjangan antar golongan, yang terlihat dari Gini Rasio NTT Tahun 2021 sebesar 0,356. Namun demikian, Gini Ratio Provinsi Nusa Tenggara Timur masih berada di bawah Gini Ratio Nasional.
4) Masih tingginya ketergantungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur terhadap Pemerintah Pusat, dimana proporsi PAD hanya sebesar 23,51 % pada tahun 2019 dan 21,52 % pada TA. 2020. Untuk itu sesuai amanat RPJMD Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018-2023, perlu dikembangkan kegiatan yang akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang pada akhirnya akan meningkatkan PAD.

Memperhatikan analisis pendapatan dan prospek ekonomi, serta kebijakan nasional terkait dana transfer ke daerah, maka Pendapatan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur pada RKPD Tahun 2022 diproyeksikan sebesar Rp. 5,707 Trilyun lebih, bertambah Rp.

287,434 Milyar lebih atau naik 5,30 % dari anggaran induk tahun 2020 sebesar Rp. 5,419 Trilyun lebih, dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Asli Daerah

   PAD diprediksi menjadi sebesar Rp. 1,213 Triliun lebih, naik Rp. 47,405 Milyar lebih atau 4,06 %. Kenaikan terjadi dari komponen retribusi daerah, dimana pada tahun 2022 ditargetkan sebesar Rp 45,648 Milyar lebih atau bertambah sebesar Rp. 10,688 Milyar lebih atau 30,58 % dari anggaran tahun 2020, sedangkan Pajak Daerah turun sebesar Rp 81,998 Milyar lebih atau 7,54% dari anggaran tahun 2020 sebesar Rp. 908,207 Milyar lebih menjadi 1,006 Triliun lebih. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan juga turun sebesar Rp 54,427 Milyar lebih atau 38,45% dari anggaran tahun 2020 sebesar Rp. 141,550 Milyar menjadi Rp 87,122 Milyar lebih. Begitu pula Lain-lain PAD yang Sah turun sebesar Rp 35,161 Milyar lebih atau 18,59% dari anggaran tahun 2020 sebesar Rp. 189,150 Milyar lebih menjadi Rp 153,989 Milyar lebih.

2. Dana Perimbangan

   Dana perimbangan diprediksikan berkurang sebesar Rp 396,613 Milyar lebih dari anggaran tahun 2020 sebesar Rp 4,514 Triliun lebih menjadi sebesar Rp 4,117 Triliun lebih. Penurunan ini terjadi karena : Dana Alokasi Khusus yang diprediksi turun sebesar Rp. 435,928 Milyar lebih atau 17,20% dari anggaran tahun 2020 sebesar Rp 2,534 Triliun lebih menjadi sebesar Rp 2,098 Triliun lebih. Sedangkan Dana Bagi Hasil dipredikasi naik sebesar Rp 33,092 Milyar lebih dari anggaran tahun 2020 sebesar Rp 56,823 Milyar lebih menjadi sebesar Rp 89,915 Milyar lebih. Dana Alokasi Umum juga diprediksi naik sebesar Rp 6,223 Milyar lebih atau 0,32% dari anggaran pada tahun 2020 sebesar Rp 1,922 Triliun lebih menjadi Rp 1,929 Triliun lebih.

3. Lain-lain Pendapatan yang Sah

   Lain-lain Pendapatan yang Sah sesuai RPJMD 2018-2023 diprediksi berkurang sebesar Rp 65,095 Milyar lebih, atau turun 60,32% dari anggaran tahun 2020 sebesar Rp 107,917 Milyar lebih menjadi Rp 42,822 milyar lebih.

Tabel 3.10
Realisasi Pendapatan Daerah TA.2017-2020

URAIAN	REALISASI			
	2017	2018	2019	2020
PENDAPATAN	**4.700.213.492.589**	**4.781.089.962.593**	**5.354.574.772.919**	**5.419.935.156.637,49**
1 Pendapatan Asli Daerah	**1.047.491.567.026**	**1.095.269.978.577**	**1.280.122.363.490**	**1.166.570.596.936,49**
a. Pendapatan Pajak Daerah	814.122.727.711	866.157.779.773	908.207.117.663,00	924.189.837.048,00
b. Pendapatan Retribusi Daerah	24.266.495.631	27.570.244.733	60.831.986.435,00	34.959.171.078,00
c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan	67.209.561.753	72.415.455.930	70.662.452.308,00	65.135.467.629,92
d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah	141.892.781.931	129.126.498.141	240.420.807.084,30	142.286.121.180,57
2 Pendapatan Dana Perimbangan	**3.643.692.862.110**	**3.680.327.636.180**	**4.067.952.844.498**	**4.152.039.227.723**
a. Pendapatan Bagi Hasil pajak dan Bukan Pajak	87.876.729.182	64.495.737.073	38.360.205.100,00	67.539.025.428,00
b. Dana Alokasi Umum (DAU)	1.784.462.326.000	1.827.412.640.000	1.875.182.301.000,00	1.716.206.146.000,00
c. Dana Alokasi Khusus (DAK)	1.771.353.806.928	1.788.419.259.107	2.154.410.338.398,00	2.368.294.056.295,00
3 Lain-lain Pendapatan yang Sah	**9.029.063.453**	**5.492.347.836**	**6.499.564.931,00**	**101.325.331.978,00**
a. Dana Kontigensi/ Penyeimbang	-	-	-	-
b. Dana Hibah	1.529.063.453	5.492.347.836	6.499.564.931,00	82.001.965.978,00
c. Dana Darurat				
d. Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemda Lainnya	-	-	-	-
e Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	7.500.000.000	-	-	19.323.366.000
f. Bantuan dari Pihak Ketiga	-	-	-	-

Sumber : Badan Keuangan Daerah

Tabel 3.11
Target, Proyeksi dan Prakiraan Maju Pendapatan Daerah TA.2021 - 2023

Nomor Urut	Uraian	Anggaran		
		Target 2021	Proyeksi 2022	Prakiraan Maju tahun 2023
1	2	3	4	5
PENDAPATAN DAERAH		**6.283.641.817.542**	**6.274.376.542.830**	**7.901.387.827.831**
PENDAPATAN ASLI DAERAH		**2.033.518.433.142**	**1.863.135.953.007**	**3.229.352.276.426**
1	Pajak Daerah	1.533.442.229.906	1.375.708.488.765	1.870.874.846.155
2	Retribusi Daerah	205.774.614.333	125.130.055.760	224.543.061.336
3	Hasil Perusahaan Milik Daerah dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	94.348.316.130	162.072.349.391	259.315.759.025
4	Lain-lain PAD yang Sah	199.953.272.773	200.225.059.091	874.618.609.910
PENDAPATAN TRANSFER		**4.182.128.447.000**	**4.341.885.753.675**	**4.601.293.618.535**
1	Belanja Tanah	4.182.128.447.000	4.341.885.753.675	4.601.293.618.535
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH		**67.994.937.400**	**69.354.836.148**	**70.741.932.870**
1	Hibah	67.994.937.400	69.354.836.148	70.741.932.870
2	Dana Darurat			
3	Lain-lain Pendapatan sesuai PUU			
	JUMLAH PENDAPATAN	**6.283.641.817.542**	**6.274.376.542.830**	**7.901.387.827.831**

Yang perlu mendapat perhatian adalah, masih besarnya ketergantungan Pemerintah Provinsi NTT terhadap Pemerintah Pusat. Sejalan dengan itu, realisasi pendapatan dari komponen retribusi daerah sangat jauh dari target yang ditetapkan. Ke depan perlu dilakukan terobosan-terobosan untuk meningkatkan pedapatan dari pos retribusi daerah, sekaligus memperkecil ketergantungan terhadap Pemerintah Pusat. Sehubungan dengan upaya-upaya yang harus dilakukan untuk meningkatkan PAD, maka fokus Pemerintah Provinsi NTT dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dilakukan melalui langkah-langkah sebagai berikut:

a) Pemantapan kelembagaan dan sistem pemungutan pendapatan daerah serta pemanfaatan sumber daya secara efektif dan efisien.
b) Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah.
c) Peningkatan koordinasi dan pengawasan terhadap pemungutan pendapatan daerah.
d) Peningkatan pelayanan publik sebagai upaya untuk menumbuh-kembangkan kesadaran masyarakat sebagai wajib pajak/retribusi daerah dan sosialisasi pertaturan tentang pendapatan daerah.
e) Optimalisasi pemanfaatan aset daerah.
f) Peningkatan kualitas data dasar seluruh pendapatan daerah.
g) Menerapkan sistem pengelolaan pendapatan daerah berbasis elektronik.
h) Perhitungan potensi PAD secara akurat dan akuntabel.
i) Peningkatan peran dan fungsi UPT sebagai ujung tombak pelayanan publik.
j) Peningkatan sinergitas dan koordinasi pendapatan asli daerah dengan Pemerintah Pusat, Kabupaten/Kota serta instansi terkait.
k) Melaksanakan kegiatan/pembangunan yang selanjutnya akan mendatangkan pendapatan atau menjadi sumber pendapatan bagi daerah.
l) Mendorong kegiatan pembangunan ekonomi masyarakat yang dapat meningkatkan pendapatan daerah

3.2.2.2. Arah Kebijakan Belanja Daerah

Belanja daerah harus digunakan untuk pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah Provinsi dan pemerintah Kabupaten/Kota yang terdiri dari urusan wajib dan urusan

pilihan yang ditetapkan dengan ketentuan perundang-undangan. Belanja penyelenggaraan urusan wajib diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan sistem jaminan sosial. Pelaksanaan urusan wajib dimaksud berdasarkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang telah ditetapkan. Pemerintah daerah menetapkan target capaian kinerja setiap belanja, baik dalam konteks daerah, satuan kerja perangkat daerah, maupun program dan kegiatan, yang bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran dan memperjelas efektifitas dan efisiensi penggunaan anggaran. Program dan kegiatan harus memberikan informasi yang jelas dan terukur serta memiliki korelasi langsung dengan keluaran yang diharapkan dari program dan kegiatan dimaksud ditinjau dari aspek indikator, tolok ukur dan target kinerjanya.

Kebijakan belanja daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2022:

1) Kebijakan belanja disesuaikan dengan kewenangan Provinsi sesuai arahan undang-undang Nomor 23 Tahun 2014.
2) Belanja untuk pendidikan sebesar 20% dari total APBD, kesehatan 10% dari total APBD, dan penganggaran belanja modal sebesar 18-22% dari total APBD.
3) Belanja daerah merupakan pagu tertinggi, dilakukan dengan pendekatan anggaran kinerja, berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan.
4) Belanja daerah membiayai program prioritas pembangunan daerah yang mengacu pada indikator RPJMD Perubahan tahun 2018-2023.
5) Peningkatan efisiensi dan efektivitas belanja daerah dengan menciptakan keterpaduan kegiatan melalui kerjasama antar perangkat daerah.
6) Kebutuhan anggaran disesuaikan dengan Analisa Standar Belanja (ASB), Standar Biaya (SB), dan fungsi pelayanan.

Belanja Daerah pada tahun 2022 diarahkan untuk membiayai:

1. Program/Kegiatan Prioritas dengan kriteria sebagai berikut:

   Menunjang pencapaian prioritas dan sasaran RPRMD – P Tahun 2018-2023;

   a) Menjamin keberlanjutan program dan kegiatan tahun sebelumnya atau bersifat multi – years;
   b) Menunjang tugas pokok dan fungsi perangkat daerah;
   c) Membiayai visi misi dan program prioritas Gubernur dan Wakil Gubernur;
   d) Manfaat program/kegiatan dirasakan langsung oleh masyarakat;
   e) Memperhatikan Catatan Evaluasi Menteri Dalam Negeri terhadap RAPBD Provinsi NTT Tahun 2020, saran dan pendapat fraksi dan komisi DPRD, serta LHP BPK;
   f) Kerjasama antar pemerintah daerah;
   g) Membayar bunga pinjaman yang digunakan untuk penanganan jalan provinsi, termasuk untuk ruas yang baru akan ditangani pada tahun 2022;
   h) Belanja perangkat daerah untuk belanja operasional perkantoran dan rapat-rapat dianggarkan secara efisien dan efektif.

2. Dalam rangka percepatan target pembangunan khusus untuk pembangunan yang membutuhkan skala pendanaan besar, diupayakan pendanaan dari sumber lain seperti APBN, lembaga internasional, dan sumber dana lainnya yang tidak mengikat.
3. Pola-pola sharing dana dan sharing program/kegiatan, ataupun hibah dari Kabupaten/Kota kepada Provinsi untuk bersama–sama menyelesaikan permasalahan yang menjadi kewenangan Provinsi tetapi terkait langsung dengan masyarakat di Kabupaten/Kota dapat dilakukan. Di sisi lain, harus melakukan penyesuaian-penyesuaian dimana kegiatan rapat-rapat, perlombaan-perlombaan dilakukan secara selektif, perjalanan dinas dan ATK serta bantuan yang sifatnya karitatif mulai dikurangi.

3.2.2.3. Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah

Pembiayaan disediakan untuk menganggarkan setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

1) Penerimaan Pembiayaan

a) Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Lalu (SiLPA)

SiLPA merupakan selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran selama satu periode, mencakup sisa dana untuk mendanai kegiatan lanjutan, utang pihak ketiga yang belum terselesaikan, pelampauan target pendapatan daerah, penerimaan dan pengeluaran lainnya yang belum terselesaikan sampai akhir tahun anggaran. SiLPA APBD sebelum perubahan merupakan angka estimasi.

b) Penerimaan Pokok Pinjaman Daerah

Diarahkan pada penerimaan kembali pinjaman daerah yang diberikan untuk kredit kendaraan roda 2 dan roda 4.

2) Pengeluaran Pembiayaan

a) Penyertaan Modal.

Penyertaan modal dilakukan kepada perusahaan daerah/BUMD/ lembaga lainnya sehingga dapat meningkatkan kemampuan Pemerintah daerah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

b) Pembayaran kembali pinjaman daerah

Dianggarkan untuk membayar pokok pinjaman daerah yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur untuk penanganan jalan provinsi, termasuk untuk ruas jalan yang baru akan ditangani pada tahun 2022 dengan menggunakan skema pinjaman daerah.

Tabel 3.12
Realisasi Belanja Daerah Provinsi NTT Tahun 2017-2020

URAIAN	REALISASI			
	2017	2018	2019	2020
BELANJA	**4.634.876.188.618**	**4.846.839.267.378**	**5.277.547.018.287**	**5.755.258.016.193,64**
1 Belanja Tidak Langsung	**3.090.398.949.142**	**3.218.631.037.313**	**3.273.344.848.123**	**3.489.052.056.653,39**
Belanja Pegawai/Personalia	1.261.870.373.634	1.285.969.369.989	1.431.820.149.816,54	1.426.800.300.478,00
Belanja Bunga				5.875.483.689,89
Belanja Hibah	1.347.982.296.400	1.481.857.799.120	1.291.513.467.414,00	1.329.334.450.800,00
Belanja Bantuan Sosial	21.423.300.000	19.426.000.000	29.353.167.000,00	20.966.374.000,00
Belanja Bagi Hasil Kabupaten/Kota	455.802.033.793	427.541.748.500	515.982.681.892,00	460.136.531.811,50
Belanja Bantuan Keuangan	3.264.679.000	3.710.934.400	2.702.406.000,00	5.000.000.000,00
Belanja Tidak Terduga	56.266.315	125.185.304	1.972.976.000,00	240.938.915.874,00
2 Belanja Langsung	**1.544.477.239.476**	**1.628.208.230.065**	**2.004.202.170.165**	**2.266.205.959.540,25**
Belanja Pegawai/Personalia	142.185.667.732	139.382.893.672	206.611.451.363,00	276.515.448.411,00
Belanja Barang dan Jasa	919.366.667.404	959.064.301.790	999.366.462.956,76	962.905.232.714,45
Belanja Modal	482.924.904.340	529.761.034.603	798.224.255.845,00	1.026.785.278.414,80

Sumber : Badan Keuangan Daerah

Tabel 3.13
Target, Proyeksi dan Prakiraan Maju 2021 Provinsi NTT Tahun 2021 – 2023
(2021 pakai angka APBD 2021)

Nomor Urut	Uraian	Anggaran		
		Target 2021	Proyeksi 2022	Prakiraan Maju tahun 2023
1	2	3	4	5
BELANJA DAERAH		**7.584.929.735.729**	**8.274.512.151.020**	**7.908.796.396.968**
BELANJA OPERASIONAL		**5.013.582.925.198**	**5.481.343.759.484**	**5.743.913.691.572**
1	Belanja Pegawai	1.561.997.607.953	1.712.704.996.922	1.787.972.901.377
2	Belanja Barang dan Jasa	1.551.161.659.889	1.695.969.451.118	1.781.749.337.510
3	Belanja Bunga	39.307.557.170	41.409.266.747	43.510.976.324
4	Belanja Subsidi			
5	Belanja Hibah	1.808.722.980.430	1.974.077.125.928	2.076.129.545.364
6	Belanja Bantuan Sosial	52.393.119.756	57.182.918.769	54.550.930.997
BELANJA MODAL		**1.858.994.304.311**	**1.851.117.283.862**	**1.075.620.868.706**
1	Belanja Tanah			
2	Belanja Peralatan dan Mesin			
3	Belanja Bangunan dan Gedung			
4	Belanja Jalan			
5	Belanja Irigasi dan Jaringannya			
6	Belanja Aset tetap lainnya			
BELANJA TIDAK TERDUGA		**68.123.915.460**	**5.000.000.000**	**5.000.000.000**
BELANJA TRANFER		**644.228.590.760**	**937.051.107.674**	**1.084.261.836.690**
	JUMLAH BELANJA	**7.584.929.735.729**	**8.274.512.151.020**	**7.908.796.396.968**
	SURPLUS/(DEFISIT)	**(1.301.287.918.187)**	**(2.000.135.608.190)**	**(7.408.569.137)**

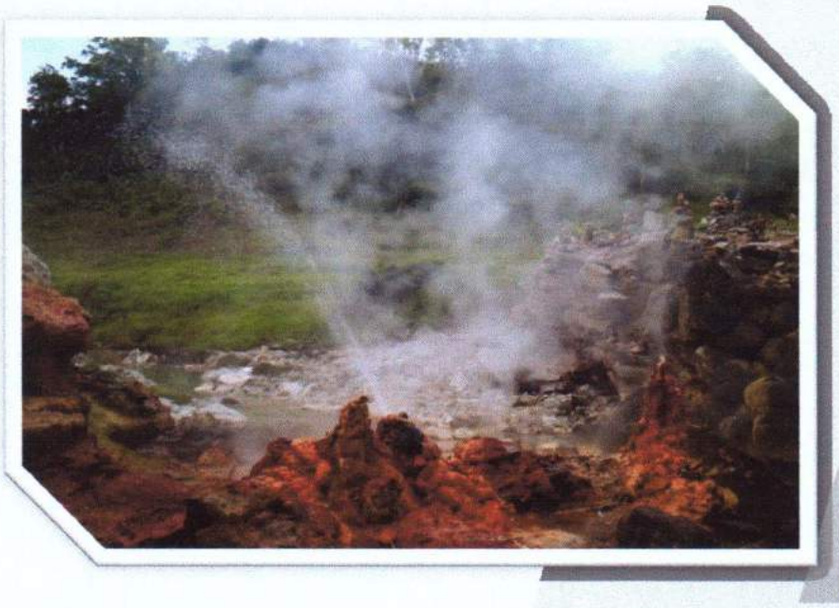
Tabel 3.14
Realisasi Belanja Daerah Provinsi NTT Tahun 2017-2020

URAIAN	REALISASI			
	2017	2018	2019	2020
PEMBIAYAAN	**208.239.521.193**	**278.544.277.613**	**205.602.009.249,55**	**403.706.217.940,55**
1 Penerimaan Pembiayaan	287.775.321.193	278.544.277.613	216.350.973.249,55	430.706.217.940,55
2 Penegeluaran Pembiayaan	79.535.800.000	-	10.748.964.000,00	27.000.000.000,00
Pembiayaan Netto	**208.239.521.193**	**278.544.277.613**	**205.602.009.249,55**	**403.706.217.940,55**
Sisa Lebih Perhitungan Tahun Berkenaan (SILPA) (3+5)	**273.576.825.164**	**212.794.972.829**	**282.629.763.881,55**	**68.383.358.384,40**

Tabel 3.15
Target, Proyeksi dan Prakiraan Maju Belanja Daerah Provinsi NTT Tahun 2021-2023

Nomor Urut	Uraian	Anggaran		
		Target 2021	Proyeksi 2022	Prakiraan Maju tahun 2023
1	2	3	4	5
PEMBIAYAAN DAERAH				
PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH		**1.711.064.158.187**	**32.582.090.250**	**42.582.090.250**
1	Sisa Lebih Penghitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	108.593.947.937	25.000.000.000	35.000.000.000
2	Pencairan Dana Cadangan	0	0	0
3	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	0	0	0
4	Penerimaan Pinjaman Daerah	1.594.888.120.000	0	0
5	Penerimaan Kembali Pinjaman Daerah/Investasi Non Permanen	7.582.090.250	7.582.090.250	7.582.090.250
6	Peneriamaan pembiayaan lainnya sesuai PUU	0	0	0
PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH		**409.776.240.000**	**414.776.240.000**	**409.776.240.000**
1	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	264.776.240.000	264.776.240.000	264.776.240.000
2		145.000.000.000	145.000.000.000	145.000.000.000
3	Investasi Non Permanen (Dinas Peternakan)	0	5.000.000.000	0
4	Pembentukan Dana Cadangan	0	0	0
	JUMLAH PENGELUARAN	**409.776.240.000**	**414.776.240.000**	**409.776.240.000**
	PEMBIAYAAN NETO	**1.301.287.918.187**	**(382.194.149.750)**	**(367.194.149.750)**
	SISA KURANG PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAN	**0**	**(2.382.329.757.940)**	**(374.602.718.887)**

Sumber : Badan Keuangan Daerah Prov. NTT



BAB IV
SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

Prioritas pembangunan daerah merupakan implementasi dari tujuan strategis pembangunan daerah pembangunan. Perumusan prioritas pembangunan daerah dilakukan dengan mengevaluasi permasalahan pembangunan baik yang berkaitan dengan pelaksanaan kebijakan nasional dan daerah, tujuan dan sasaran pembangunan dari hasil pelaksanaan RKPD tahun lalu dan capaian kinerja yang direncanakan dalam RPJMD Perubahan Tahun 2018-2023, serta rancangan kerangka ekonomi daerah serta kerangka pendanaan.

Kebijakan pembangunan tahunan daerah yang dituangkan dalam dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2022 ditetapkan dengan memperhatikan konsistensi dan sinkronisasi terhadap prioritas dan sasaran pembangunan Nasional tahun 2022 yang tentunya tidak terlepas dari sasaran RPJMN 2020-2024 dan RPJMD Perubahan 2018-2023 untuk tahun 2022.

4.1 ARAHAN RPJMN 2020-2024 DAN RPJMD 2018-2023

4.1.1 Arah Kebijakan RPJMN 2020-2024

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 berdasarkan Peraturan Presiden No. 18 tahun 2020 tentang RPJMN 2020-2024 merupakan bagian tahapan dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025 karena merupakan RPJMN periode akhir dan penentu pencapaian target pembangunan dalam RPJPN. Sasaran pembangunan nasional jangka menengah 2020-2024 adalah mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024 mempunyai visi **"Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong".** Visi tersebut akan diwujudkan melalui sembilan Misi yang dikenal sebagai Nawacita Kedua, meliputi :

1) Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia;
2) Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri, dan Berdaya Saing;
3) Pembangunan yang Merata dan Berkeadilan;
4) Mencapai Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan;
5) Kemajuan Budaya yang Mencerminkan Kepribadian Bangsa;
6) Penegakan Sistem Hukum yang Bebas Korupsi, Bermartabat, dan Terpercaya;
7) Perlindungan bagi Segenap Bangsa dan Memberikan Rasa Aman pada Seluruh Warga;
8) Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih,Efektif, dan Terpercaya;
9) Sinergi Pemerintah Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan.

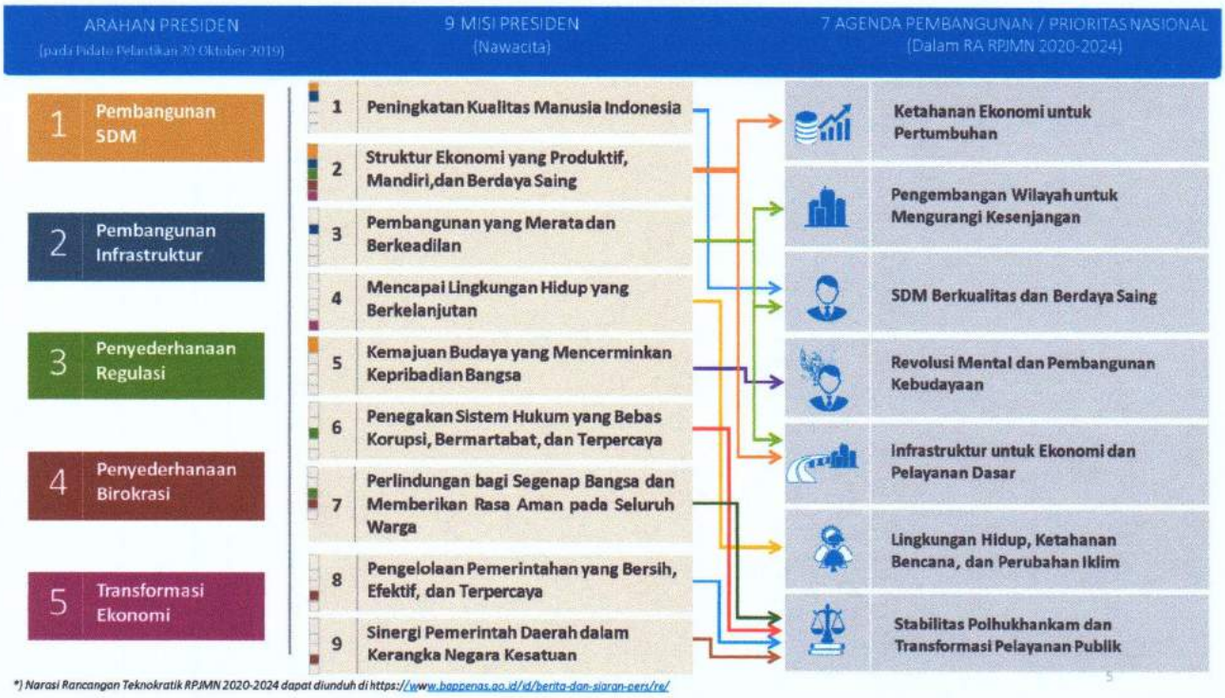
Sebagai strategi dalam melaksanakan misi tersebut dan pencapaian sasaran visi Indonesia 2045, Presiden menetapkan lima arahan utama. Kelima arahan tersebut mencakup Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Pembangunan Infrastruktur, Penyederhanaan Regulasi, Penyederhanaan Birokrasi, dan Transformasi Ekonomi.

RPJMN 2020-2024 ini selanjutnya diterjemahkan ke dalam tujuh agenda pembangunan, meliputi:

1) Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan;
2) Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan;
3) Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing;
4) Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan;
5) Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar;
6) Membangun Lingkungan Hidup,Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim; serta
7) Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik.

Arahan Presiden, Nawacita dan 7 Agenda/prioritas Nasional terlihat pada Gambar 4.1 berikut.

Gambar 4.1
Arahan Presiden, Nawacita dan 7 Agenda/Prioritas Nasional



*) Narasi Rancangan Teknokratik RPJMN 2020-2024 dapat diunduh di https://www.bappenas.go.id/id/berita-dan-siaran-pers/re/

Target Makro Pembangunan pada akhir periode RPJMN 2020-2024 direncanakan sebagaimana terlihat pada Tabel 4.1 berikut.

Tabel 4.1
Indikator Makro Pembangunan Nasional

Indikator	Satuan	Rencana Jangka Menengah		Rencana Tahunan		Target Tahun 2024
		RPJMN 2020-2024 untuk Tahun 2022	RPJMD-P 2018-2023 untuk Tahun 2022	RKP 2022	RKPD 2022	
Pertumbuhan Ekonomi	Persen	6,9	6,33 - 6,90	5,67 - 6,34	6,00 - 6,34	5,7 – 6,0
Tingkat Kemiskinan (%)	Persen	16,15	19,35 - 16,15	20,16	19,35 - 16,15	6,0 – 7,0
Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	Persen	2,6	2,5 - 1,9	3,41 - 4,14	2,5 - 1,9	3,6 – 4,3
Kebutuhan Investasi	(Rp. Triliun)	71,47	71,47	-	71,47	-
Gini Rasio	Indeks	0,376 – 0,378	0,34 – 0,33	-	0,34 – 0,33	0,360 – 0,374
IPM	Nilai	73,44 – 73,48	67,35 – 69,00	-	67,35 – 69,00	75,54
Penurunan Emisi GRK ($tCO2^{eq}$)	Persen	26,8 – 27,1	17.248.829	-	17.248.829	27,3

4.1.2 Arah Kebijakan RPJMN 2020-2024 untuk wilayah Nusa Tenggara

Kebijakan pembangunan Wilayah Nusa Tenggara dalam tahun 2020-2024 diarahkan pada optimalisasi keunggulan wilayah dalam perikanan, perkebunan, peternakan, pertambangan dan pariwisata yang mengutamakan pendekatan gugus pulau. Kebijakan pembangunan Wilayah Nusa Tenggara diarahkan untuk mendorong transformasi perekonomian dengan memperkuat peran sebagai pintu gerbang pariwisata ekologis melalui pengembangan industri *Meeting, Incentive, Convention, Exhibition* (MICE); industri kreatif berbasis budaya, percepatan pembangunan perekonomian berbasis maritim (kelautan) melalui pengembangan industri perikanan, garam, dan rumputlaut; pengembangan industri berbasis peternakan sapi dan perkebunan jagung; serta pengembangan industri mangan dan tembaga.

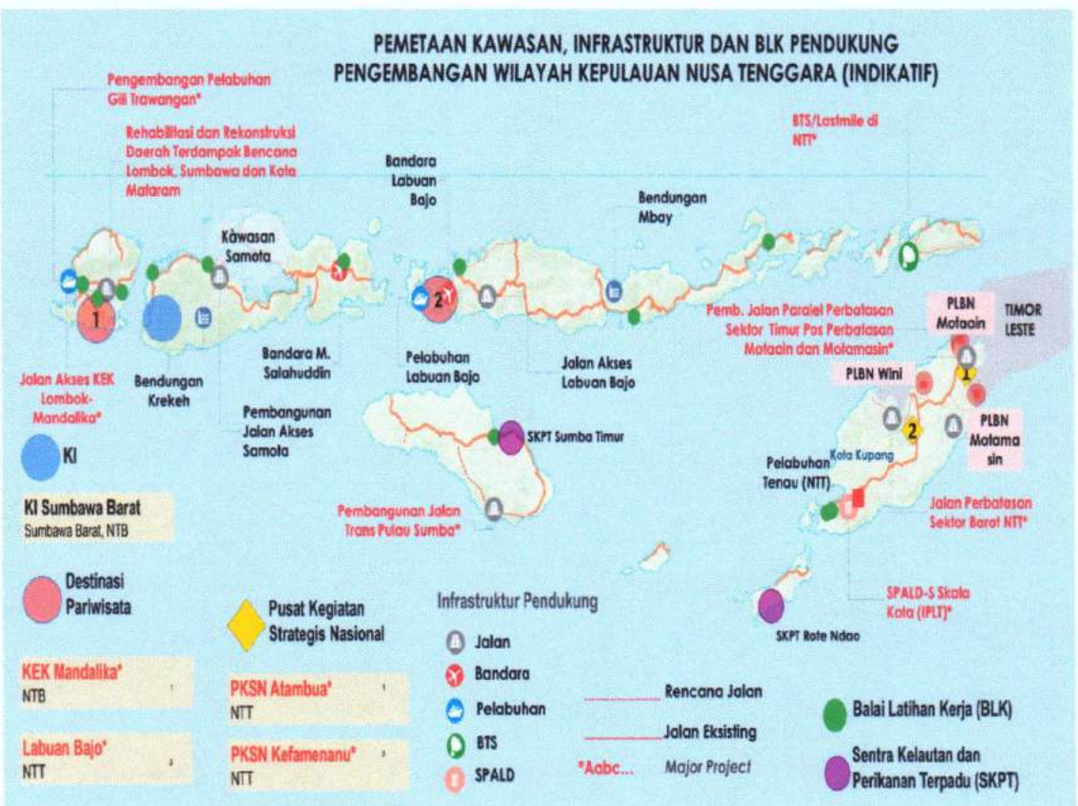
Strategi pembangunan Wilayah Nusa Tenggara akan mengutamakan pemerataan, pertumbuhan, pelaksanaan otonomi daerah, penguatan konektivitas, serta mitigasi dan pengurangan risiko bencana sebagai berikut:

1) Peningkatan pelayanan dasar antara lain:
   a. meningkatkan kualitas SDM khususnya peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan, pendidikan vokasional pertanian, perikanan pertambangan dan pariwisata; dan revitalisasi Balai Latihan Kerja;
   b. percepatan pembangunan daerah tertinggal dilakukan dengan fokus pada pemenuhan pelayanan dasar, pengembangan ekonomi lokal berbasis komoditas unggulan dengan memanfaatkan teknologi digital, dan pengembangan infrastruktur;
   c. pembinaan dan keberpihakan dari K/L serta pelaku pembangunan lainnya dilaksanakan terhadap daerah tertinggal yang telah terentaskan tahun 2019, selama maksimal 3 tahun (2020-2022);
   d. pemenuhan pelayanan dasar dan peningkatan tata kelola di kecamatan perbatasan;
   e. percepatan pembangunan desa secara terpadu untuk mendorong transformasi sosial, budaya dan ekonomi desa; dan
   f. pelaksanaan pembangunan afirmatif.

2) Penguatan pusat-pusat pertumbuhan wilayah dilakukan melalui antara lain:
   a. pengembangan komoditas unggulan Wilayah Nusa Tenggara yaitu lada, pala,cengkeh, kopi, kelapa, tebu, garam, tembaga, emas, perikanan budidaya, dan perikanan tangkap;
   b. pengembangan sentra perikanan dan industri pengolahan hasil perikanan di SKPT/WPP;
   c. pengembangan sentra produksi peternakan dan perkebunan yang tersebar di beberapa KPPN;
   d. revitalisasi kawasan transmigrasi;
   e. pengembangan ekonomi kawasan perbatasan berbasis komoditas unggulan;
   f. pengembangan kawasan strategis, dan pengolahan sumber daya alam berupa perkebunan dan pertambangan;
   g. destinasi pariwisata alam, budaya dan sejarah sebagai salah satu motor penggerak pengembangan ekonomi lokal melalui sector jasa pada Destinasi Pariwisata Prioritas (DPP)/Kawasan Ekonomi Khusus (KEK);
   h. pengembangan kawasan perkotaan;
   i. pengembangan kawasan pusat pertumbuhan baru dengan bertumpu pada skema investasi swasta;
   j. peningkatan peran dan efisiensi pelayanan kota besar, menengah, dan kecil untuk meningkatkan sinergi pembangunan perkotaan dan perdesaan; dan
   k. penguatan keterkaitan desa-kota yang mendukung pusat pertumbuhan wilayah.
3) Pelaksanaan otonomi daerah dilakukan melalui antara lain:
   a. peningkatan kapasitas pemerintahan daerah (kelembagaan, aparatur dan keuangan daerah);
   b. pengembangan dan penguatan peran kecamatan sebagai pusat data, informasi dan pengetahuan, pusat pelayanan dasar, pusat pemberdayaan masyarakat, pusat pengembangan inovasi dan kewirausahaan, pusat pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan, serta pusat pertumbuhan ekonomi kabupaten; dan
   c. percepatan penerapan SPM, peningkatan pelayanan perizinan investasi, dan perluasan kerjasama antar daerah.

4) Penguatan konektivitas dilakukan melalui antara lain:
   a. pengembangan dan penguatan konektivitas antar moda laut, sungai, darat dan udara yang terintegrasi;
   b. penyediaan pusat perdagangan komoditas mentah dan barang hasil olahan di Nusa Tenggara; dan
   c. pengembangan jaringan telekomunikasi dan informasi.
5) Pengarusutamaan penanggulangan bencana dan adaptasi perubahan iklim dilakukan melalui antara lain:
   a. peningkatan kapasitas masyarakat dan aparat;
   b. peningkatan ketahanan kawasan utara dan selatan Kepulauan Nusa Tenggara dan pemantapan pemulihan pasca bencana di Pulau Lombok dan sekitarnya;
   c. adaptasi masyarakat terhadap perubahan iklim di daerah rawan bencana berbasis kearifan lokal masyarakat;
   d. peningkatan investasi mitigasi perubahan iklim dan pengurangan risiko bencana;dan
   e. peningkatan penanganan abrasi pantai di pesisir dan daerah kepulauan, serta konservasi hutan.

Gambar 4.2
Peta Pengembangan Wilayah Nusa Tenggara



Pembangunan di Nusa Tenggara Timur diprioritaskan untuk mendorong percepatan pembangunan daerah berbasis hilirisasi pertanian, perikanan, pertambangan, dan pariwisata dengan memperhatikan lokasi prioritas berdasarkan koridor pertumbuhan dan pemerataan.

Tabel 4.2
Koridor Pembangunan di Provinsi Nusa Tenggara Timur 2020-2024

KORIDOR PERTUMBUHAN		KORIDOR PEMERATAAN	
1.	Kab. Manggarai Barat	1.	Kab. Sumba Timur
2.	Kab. Manggarai	2.	Kab. Sumba Tengah
3.	Kab. Manggarai Timur	3.	Kab. Sumba Barat
4.	Kab. Ngada	4.	Kab. Sumba Barat Daya
5.	Kab. Nagekeo	5.	Kab. Timor Tengah Selatan
6.	Kab. Ende	6.	Kab. Timor Tengah Utara
7.	Kab. Sikka	7.	Kab. Malaka
8.	Kota Kupang	8.	Kab. Belu
9.	Kab. Kupang		

Terlihat dari Tabel 4.2 bahwa terdapat 5 (lima) kabupaten di Nusa Tenggara Timur yang tidak masuk dalam 2 koridor pembangunan di RPJMN 2020-2024, yaitu Kabupaten Flores Timur, Lembata, Alor, Rote Ndao dan Sabu Raijua. Untuk itu, Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur mengelompokkan kelima kabupaten dimaksud dalam koridor pembangunan sebagaimana terlihat pada Tabel 4.3 berikut.

Tabel 4.3
Pengelompokan Kabupaten yang Belum Masuk dalam Koridor Pembangunan RPJMN 2020-2024

KORIDOR PERTUMBUHAN		KORIDOR PEMERATAAN	
Yang belum masuk dalam RPJMN didorong sebagai berikut :			
1.	Kab. Flores Timur	1.	Kab. Rote Ndao
2.	Kab. Lembata	2.	Kab. Sabu Raijua
3.	Kab. Alor		

4.1.3 Arahan RPJMD Perubahan Tahun 2018-2023

Visi Pembangunan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagaimana termuat dalam Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah adalah **"Nusa Tenggara Timur Yang Maju, Mandiri, Adil dan Makmur Dalam Bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia".** Visi dimaksud dalam arahan periode keempat pelaksanaan pembangunan jangka menengah 2018-2023 dirumuskan sebagai penuntasan SDGs dan pencapaian daya saing perekonomian daerah berlandaskan pemanfaatan sumberdaya alam dan sumber daya manusia berkualitas dan bermoral serta mengembangkan kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi terus menerus sesuai kebutuhan daerah. Arahan RPJPD untuk periode keempat 2018-2023 dimaksud dijabarkan ke dalam RPJMD Perubahan Provinsi NTT Tahun 2018-2023 dalam visi **"NTT BANGKIT MEWUJUDKAN MASYARAKAT SEJAHTERA DALAM BINGKAI NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA".**

Visi Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih tersebut kemudian dijabarkan ke dalam misi, yaitu :

1. Mewujudkan masyarakat sejahtera, mandiri dan adil
2. Membangun NTT sebagai salah satu gerbang dan pusat pengembangan pariwisata nasional (*ring of beauty*)
3. Meningkatkan ketersediaan dan kualitas infrastruktur untuk mempercepat pembangunan
4. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia
5. Mewujudkan reformasi birokrasi pemerintahan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik

Gambar 4.3
Makna NTT Bangkit dan NTT Sejahtera



Untuk mencapai visi dan misi, maka ditetapkan indikator dan target pada RPJMD Perubahan 2018-2023 yang harus dicapai adalah sebagai berikut :

Tabel 4.4
Indikator Kinerja Utama Provinsi NTT 2021-2023

INDIKATOR	BASELINE TAHUN 2019	TAHUN			KONDISI PADA AKHIR TAHUN PERENCANAAN
		2021	2022	2023	
Misi I Mewujudkan Masyarakat Sejahtera, Mandiri dan Berkeadilan					
Pertumbuhan PDRB (%)	5,20	5,87	6,33	6,7 – 7,3	6,7 – 7,3
Inflasi (%)	0,67	3-3,4	3-3,2	3 – 3,2	3 – 3,2
Persentase Penduduk di bawah Garis Kemiskinan (%)	20,62	21 - 19,63	19,35 – 16,15	15 - 12	15 – 12
PDRB per Kapita (Rp. Juta)	19,5	20 - 23	23 - 25	25 - 27	25 – 27
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) (%)	3,35	3,2 -2,6	2,5 – 1,9	1,9 – 1,5	1,9 – 1,5
% PAD terhadap Pendapatan Daerah (%)	23,90	25,31	30,12	39,74	39,74
Indeks Gini (Poin)	0,355	0,35 - 0,34	0,34-0,33	0,34-0,32	0,34-0,32
Indeks Pembangunan Gender (Poin)	92,72	94	95	95	95
Misi II : Membangun NTT sebagai Salah Satu Gerbang dan Pusat Pengembangan Pariwisata Nasional *(Ring of Beauty)*					
Persentasi Pertumbuhan UMKM baru di Pariwisata Estate (%)	2	4	6	8	8
Lama Tinggal Wisatawan (hari)	2,71	4	4	4	4
Jumlah Kunjungan Wisatawan (orang)	1.057.384	1.065.378	1.278.453	1.534.144	1.534.144
Misi III : Meningkatkan Ketersediaan dan Kualitas Infrastruktur untuk Mempercepat Pembangunan					
Persentase Panjang Jalan Provinsi dalam dalam Kondisi Mantap (%)	85	90	100	100	100
Cakupan Pelayanan Angkutan Darat (%)	0,390	9,08	45,60	74,81	74,81
Terbangunannya Jaringan Irigasi bagi Petani (%)	70	75.02	76.74	78.46	78.46
Penambahan Rumah Layak Huni (unit)	13.974,00	15.498	9.238	9.238	47.948
Rasio Elektrifikasi (%)	73,29	75	80	85	85
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (Poin)	62,5	67	69	75	75
Jumlah Emisi Gas Rumah Kaca (Ton CO2)	17.248.829	17.248.829	17.248.829	17.248.829	17.248.829
Kesesuaian Fungsi, Struktur dan Pola ruang	41,7	72,73	85,70	100	100
Indeks Resiko Bencana (Poin)	147	140	138	135	135

INDIKATOR	BASELINE TAHUN 2019	TAHUN			KONDISI PADA AKHIR TAHUN PERENCANAAN
		2021	2022	2023	
Misi IV : Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia					
Angka Melek Huruf (%)	95,76	96,56	98,47	100	100
Rata-rata Lama Sekolah (tahun)	7,55	8,25	8,65	9,5	9,5
Harapan Lama Sekolah (tahun)	13,15	14,2	14,6	15	15
Usia Harapan Hidup (Tahun)	66,85	68,1	68,8	69	69
Prevelensi Stunting (%)	27,9	21,8	16,7	10 - 12	10 - 12
Cakupan Pembinaan Pemuda dan Keolahragaan (%)	40	60	70	80	80
Misi V : Mewujudkan Reformasi Birokrasi Pemerintahan untuk Meningkatkan kualitas Pelayanan Publik					
Indeks Reformasi Birokrasi Pemerintah (Poin)	60,37	65	69	71	71
Opini BPK (Opini)	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
Nilai Akuntabilitas Kinerja (SAKIP) (Predikat)	B	A	A	A	A
Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) (Skor)	2,1	2,3	2,5	2,7	2,7
Tingkat Keterbukaan Informasi Publik (%)	44,41	50	60	75	75
Indeks Kepuasan Pelayanan Publik (Poin)	75	85	90	90	90
Indeks Demokrasi Indonesia (Poin)	82,32	82,40	82,50	83	83

4.2 TUJUAN DAN SASARAN PEMBANGUNAN

Untuk mencapai visi, misi, sasaran, indikator dan target yang telah ditetapkan dalam RPJMD Perubahan 2018-2023, maka setiap tahunnya dijabarkan dalam tujuan dan sasaran tahunan. Tujuan dan sasaran tahunan ini disinkronkan dan mendukung pencapaian indikator dan target nasional. Secara makro, indikator dan target Nasional dan Nusa Tenggara Timur untuk tahun 2022 sebagaimana terlihat pada Tabel 4.5

Tabel 4.5
Target Indikator Makro Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2022

Indikator	Capaian NTT		Target RPJMD -P NTT		
	2019 (Baseline)	2020	2021	2022	2023
Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,2	-0,83	5,87 - 6,50	6,33 - 6,90	6,7 - 7,3
PDRB per Kapita (Rp.juta)	19,5	12,41 (ADHK) 19,22 (ADHB)	20 - 23	23 - 25	25 - 27
Indeks Pembangunan Manusia (poin)	65,23	65,19	65,54 - 67,00	67,35 - 69,00	70 - 71
Penduduk dibawah Garis Kemiskinan (%)	20,62	21,21	21 - 19,63	19,35 -16,15	15 - 12
Inflasi (%)	0,67	0,61	3 - 3,4	3 - 3,2	3 - 3,2
Tingkat Stunting (%)	27,9	24,1 (agust, 2020)	21,8	16,7	12-10
Indeks Gini (poin)	0,355	0,356	0,35 - 0,34	0,34 - 0,33	0,34 - 0,32
Indeks Pembangunan Gender (poin)	92,72	92,72	94	95	95
Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	3,35	4,28	3,2 - 2,6	2,5 - 1,9	1,9 - 1,5
Rasio PAD (%)	23,9	21,52	25,31	30,12	39,74
Emisi Gas Rumah Kaca (tCO2eq)	17.248.829	10.048.289	17.248.829	17.248.829	17.248.829
Kebutuhan Investasi (Rp Triliun)	44,93	44,93	63,91	71,47	80,94
Indeks Reformasi Birokrasi Pemerintah Poin)	60,37	60,37	65	69	71

Pembangunan tahun 2022 diarahkan untuk mencapai indikator makro dan target yang telah ditetapkan, yang pada akhirnya akan mendukung pencapaian indikator dan target nasional. Tabel 4.6 menunjukkan keselarasan misi, tujuan dan sasaran per misi sesuai amanat RPJMD Perubahan untuk tahun 2022.

Tabel 4.6
Keselarasan Misi, Tujuan dan Sasaran RPJMD Perubahan
Provinsi NTT untuk Tahun 2022

Tujuan	Sasaran	Indikator	Satuan	2022
Misi I, Mewujudkan Masyarakat Sejahtera, Mandiri dan Adil				
Mewujudkan masyarakat NTT yg makmur dan sejahtera	Tumbuhnya ekonomi daerah secara stabil dan berkelanjutan	Pertumbuhan PDRB	%	6,33 - 6,90
		Inflasi	%	3 - 3,2
		PDRB per Kapita	Rp.juta	23 - 25
	Berkurangnya kemiskinan	Persentase Penduduk di bawah garis	%	19,35 -16,15

Tujuan	Sasaran	Indikator	Satuan	2022
		Kemiskinan		
	Terciptanya lapangan kerja dan meningkatnya produktivitas angkatan kerja	Indeks kedalaman kemiskinan	Poin	3,91
		Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	%	2,5 - 1,9
		Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	%	69,67
		Produktivitas Total Daerah	Rp. juta	48,509
		Cakupan pekerja tanpa upah dibandingkan penduduk yg bekerja	%	22,69
Mewujudkan NTT yang Maju dan Mandiri	Meningkatnya kontribusi PAD terhadap pendapatan daerah	% PAD terhadap pendapatan daerah	%	30,12
	Menguatnya peranan NTT dalam perdagangan regional	Rasio ekspor-impor terhadap PDRB (indikator keterbukaan ekonomi)	%	62,23
	Menurunnya ketergantungan ekonomi masyarakat	Rasio ketegantungan	%	62,79
Mewujudkan NTT yang Berkeadilan Sosial	Meningkatnya ketahanan dan kedaulatan pangan	Skor Pola Pangan Harapan	skor	69
	Berkurangnya ketimpangan antar kelompok pendapatan dan antar wilayah	Indeks Gini	Poin	0,34 - 0,33
	Hadirnya keadilan bagi perempuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan	Indeks Pembangunan Gender	poin	95
		Indeks Pemberdayaan Gender	Poin	72,76
	Meningkatnya perlindungan terhadap perempuan dan anak	Persentase kekerasan terhadap anak yang tertangani	%	80
		Persentase kekerasan terhadap perempuan yang tertangani	%	80
Misi 2 : Membangun NTT Sebagai Salah Satu Pintu Gerbang dan Pusat Pengembangan Pariwisata Nasional (Ring of Beauty)				
Mewujudkan Pariwisata sebagai Penggerak Utama Ekonomi Daerah (Prime Mover)	Pengembangan pariwisata NTT melalui pemenuhan unsur 5A dengan pendekatan kawasan	Share lapangan usaha penyediaan akomodasi dan makan minum terhadap PDRB	%	0,77
		Share lapangan usaha jasa lainnya terhadap PDRB	%	2,32
		Share lapangan usaha perdagangan besar dan eceran terhadap PDRB	%	12,18

Tujuan	Sasaran	Indikator	Satuan	2022
		Pertumbuhan UKM dan IKM di daerah Wisata	%	6
		Lama tinggal wisatawan	hari	4
		Jumlah kunjungan wasatawan	orang	1.378.453
Misi 3 : Meningkatkan Ketersediaan dan Kualitas Infrastruktur untuk Mempercepat Pembangunan				
Mempercepat Pembangunan Infrastruktur yang berkualitas dalam pengembangan ekonomi masyarakat	Meningkatnya kualitas dan aksesibilitas infrastruktur dalam mendukung konektivitas daerah	Persentase panjang jalan provinsi dalam kondisi mantap	%	100
		Dwelling Time Pelabuhan	hari	4
		Cakupan pelayanan angkutan darat	%	45,6
	Meningkatnya kualitas infrastruktur irigasi dan pengairan dalam mendukung perekonomian daerah	Terbangunnya jaringan irigasi bagi petani	%	76,74
Meningkatnya ketersediaan infrastruktur pelayanan dasar	Meningkatnya akses masyarakat terhadap perumahan layak, air minum dan sanitasi	Penambahan rumah layak huni	Unit	9.238
Menjamin terpenuhinya dimensi keberlanjutan lingkungan hidup dalam pembangunan	Terlaksananya percepatan pembangunan elektrifikasi	Persentase rumah tangga menurut air layak	%	85
		Persentase rumah tangga menurut sanitasi layak	%	80
		Rasio elektrifikasi	%	80
	Meningkatkan kualitas lingkungan hidup daerah	Indek Kualitas Lingkungan Hidup	Poin	69
	Menurunnya emisi gas rumah kaca	Jumlah emisi gas rumah kaca	Ton CO2	17.248.829
	Menjaga konsistensi perumusan dan pelaksanaan kebijakan bidang penataan ruang	Kesesuaian fungsi, struktur dan pola ruang	%	85,7
	Meningkatnya ketangguhan bencana daerah	Indeks resiko bencana	Poin	138
Misi 4 : Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia				
Mewujudkan kualitas SDM NTT yang tinggi dan berdaya saing	Meningkatnya kualitas SDM NTT yang tinggi dan Berdaya Saing	Angka melek huruf	%	98,47
		Rata-rata lama sekolah	Tahun	8,65
		Harapan lama sekolah	Tahun	14,6
	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat NTT	Usia harapan hidup	Tahun	68,8
		Prevalensi stunting	%	16,7
	Meningkatnya kualitas pemuda dan prestasi keolahragaan	Cakupan pembinaan pemuda dan keolahragaan	%	70

Tujuan	Sasaran	Indikator	Satuan	2022
Misi 5 : Mewujudkan Reformasi Birokrasi Pemerintahan untuk Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik				
Mewujudkan birokrasi yang profesionalisme dengan karakteristik adaptif, berintegritas, berkinerja tinggi, bebas dan bersih KKN	Meningkatnya kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan public yang efektif, akuntabel, transparan serta partisipatif	Indeks reformasi birokrasi pemerintah	Poin	69
		Opini BPK	Opini	WTP
		Nilai akuntabilitas kinerja	Predikat	A
		Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Skor	2,5
		Tingkat keterbukaan informasi publik	%	60
		Indeks Kepuasan pelayanan Publik	Poin	90
		Indeks demokrasi Indonesia	Poin	82,5

4.3 PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

4.3.1. Tema Pembangunan 2022

4.3.1.1 Tema dan Prioritas Nasional RKP Tahun 2022

RKP 2022 merupakan tahun ketiga pelaksanaan RPJMN 2020-2024, disusun dengan mempertimbangkan sasaran pembangunan jangka menengah RPJMN 2020-2024, hasil evaluasi kinerja pembangunan dan anggaran tahun 2020 serta kebijakan pembangunan tahun 2021. Akan tetapi pandemi virus covid-19 yang masih terus berlangsung maka disamping tetap menitikberatkan pada pembangunan sumberdaya manusia juga menitikberatkan pada pemulihan ekonomi dan sistem kesehatan.

Pandemi Covid 19 yang masih terus terjadi membawa dampak yang signifikan, tidak saja pada aspek kesehatan, namun pada semua aspek baik sosial maupun ekonomi masyarakat. Hal ini mempengaruhi kebijakan dan fokus pembangunan nasional, termasuk indikator dan target pembangunan nasional yang nantinya a kan dijabarkan sampai ke daerah.

Tema pembangunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2022 adalah **"Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Struktural".** Pemulihan ekonomi dan reformasi struktural dilakukan melalui

pemulihan daya beli dan usaha, diversifikasi ekonomi yang didukung dengan reformasi iklim investasi, reformasi kelembagaan, serta reformasi peningkatan kualitas SDM dan perlindungan sosial.



Untuk mencapai tema dimaksud, telah ditetapkan arah kebijakan pengembangan wilayah tahun 2022, sebagai berikut :

a. Pengembangan Wilayah Tahun 2022
   1. Mempercepat pemulihan dampak pandemi Covid-19.
   2. Melanjutkan transformasi sosial ekonomi untuk meningkatkan rantai produksi dan rantai nilai daerah.
   3. Mengoptimalkan keunggulan kompetitif wilayah; dan
   4. Meningkatkan pemerataan kualitas hidup antarwilayah.

b. Strategi Pengembangan Wilayah Tahun 2022
   1. Strategi pertumbuhan dengan mendorong pengembangan kawasan strategis seperti KEK, KI, KSPN, destinasi pariwisata, kawasan perkotaan, kawasan perdesaan prioritas nasional, dan kawasan transmigrasi.
   2. Strategi pemerataan dengan mempercepat penyediaan pelayanan dasar di daerah tertinggal, kawasan perbatasan, pulau-pulau kecil terluar dan terdepan, dan Kawasan rawan bencana.

c. Sasaran Pengembangan Wilayah Tahun 2022
   1. Mempercepat pemulihan kondisi sosial ekonomi masyarakat dan daerah.

2. Mendorong percepatan pertumbuhan dan peningkatan peran wilayah di luar Jawa-Bali dengan tetap menjaga prospek pertumbuhan di Wilayah Jawa-Bali; dan
3. Meningkatkan pemerataan pembangunan antar wilayah.

Dari tema RKP tahun 2022 dan arah pengembangan wilayah sebagaimana terlihat di atas, maka fokus RKP 2022 adalah :

1. Fokus pada Pemulihan Ekonomi, terdiri dari :

1.1. Meningkatkan peran UMKM terhadap ekonomi nasional, yaitu :
   a. Pertumbuhan wirausaha 3%
   b. Kontribusi UMKM terhadap PDB 63%
   c. UMKM yang mengakses kredit lembaga keuangan formal 20,9%

1.2. Mempercepat pemulihan dan pertumbuhan sektor pariwisata, yaitu:
   a. Jumlah wisatawan mancaNegara 8,5 – 10,5 juta kunjungan.
   b. Peringkat travel and tourism competitiveness index 36-39.

1.3. Meningkatkan ketahanan pangan masyarakat, yaitu :
   a. Skor pola pangan harapan 92,8
   b. Nilai tukar petani 102-104
   c. Nilai tukar nelayan 102-105
   d. Kesediaan beras 44 juta ton
   e. Ketersediaan daging 2,7 juta ton

1.4. Mempercepat reformasi perlindungan sosial, yaitu :
   a. Tingkat kemiskinan 8,5% - 9%
   b. Penduduk yang tercakup dalam program jaminan sosial 87%
   c. Rumah tangga miskin dan rentan miskin yang memperoleh bantuan sosial 60%

2. Fokus pada Sistem Kesehatan, terdiri dari :

2.1 Prevalensi stunting pada Balita menjadi 18,4%

2.2 Angka kematian bayi menjadi 18,6 per 1.000 kelahiran hidup

2.3 Puskesmas dengan jenis tenaga kesehatan sesuai standar 59%

2.4 Persalinan di fasilitas kesehatan 91%

2.5 Imunisasi dasar lengkap pada usia 12-23 bulan 71%

2.6 Insidensi TBC 231/100.000 penduduk

3. Fokus pada Transformasi Ekonomi, terdiri dari :

3.1. Meningkatkan nilai tambah sektor industri, yaitu :

a. Pertumbuhan industri pengolahan non migas 5,8% – 6,5%

b. Kontribusi PDB industri pengolahan non migas 17,97% - 17,99%

c. Nilai realisasi PMA dan PMDN industri pengolahan Rp. 352,5T

3.2. Meningkatkan pemerataan dan kualitas layanan digital, terdiri dari:

a. Masyarakat pengguna internet 79,20%

b. Kecamatan yang terjangkau infrastruktur jaringan serat optic-kumulatif 42,85%

c. 27 organisasi Tim Cepat Tanggap (CSIRT) yang di registrasi

d. 100 lulusan pengembangan SDM di bidang keamanan siber.

3.3. Meningkatkan capaian penurunan emisi dan integrasi emisi gas rumah kaca (GRK), terdiri dari :

a. Penurunan emisi GRK nasional terhadap baseline 26,87%

b. Penurunan intensitas emisi GRK nasional terhadap baseline 21,54%

c. Porsi bauran EBT dalam energi nasional 15,7%

d. Kapasitas terpasang pembangkit EBT-kumulatif 13,9 GW.

3.4. Meningkatkan kualitas SDM dan Inovasi, terdiri dari :

a. Pekerja pada bidang keahlian menengah dan tinggi 41,55%

b. Tingkat penyelesaian pendidikan SMA dan sederajat 70,6%

c. Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Tinggi 35,62%

d. 400 produk inovasi dari tenant perusahaan pemula berbasis teknologi (PPBT)
e. 900 patent domestic

3.5. Meningkatkan pemerataan infrastruktur, terdiri dari :
a. Pembangunan 4.600 unit rumah susun
b. Pembangunan pelabuhan di 9 lokasi
c. Penambahan debit air baku 5m3/s
d. Pembangunan akses air minum perpipaan 2.000.000 SR
e. Rehabilitasi jaringan irigasi 250 ribu Ha.

Lebih lanjut, untuk mendukung arah pengembangan wilayah dan fokus pembangunan dimaksud, maka ditetapkan 7 (tujuh) Prioritas Nasional (PN) sebagai penjabarannya ,yaitu :

1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan.
2. Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan.
3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing
4. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan.
5. Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar.
6. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim.
7. Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik.

Prioritas nasional ini selanjutnya dijabarkan dalam 45 Major Project pada tahun 2022 sebagai berikut :

1. PN 1 :Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas, dijabarkan dalam 9 major project, yaitu :
   a) Sepuluh Destinasi Pariwisata Prioritas : Danau Toba, Borobudur Dskt, Lombok-Mandalika, **Labuan Bajo,** Manado-Likupang, Wakatobi, Raja Ampat, Bromo-Tengger-Semeru, Bangka Belitung, dan Morotai.
   b) Sembilan Kawasan industri di luar Jawa dan 31 Smelter.

c) Penguatan Jaminan Usaha Serta 350 Korporasi Petani dan Nelayan.
d) Industri 4.0 di 5 Sub Sektor Prioritas : Makanan dan Minuman, Tekstil dan Pakaian Jadi, Otomotif, Elektronik, Kimia Farmasi dan alat kesehatan.
e) Pembangunan Energi Terbarukan Green Fuel Berbasis Kelapa Sawit
f) Revitalisasi Tambak di Kawasan Sentra Produksi Udang dan Bandeng
g) Integrasi Pelabuhan Perikanan dan Fish Market Bertaraf Internasional
h) Food Estate.
i) Pengelolaan Terpadu UMKM.

2. PN 2 :Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan, dijabarkan dalam 8 major project, yaitu:
   a) Pembangunan Wilayah Batam–Bintan.
   b) PengembanganWilayah Metropolitan: Palembang, Banjarmasin, Makassar, Denpasar.
   c) Pengembangan Kota Baru: Maja, Tanjung Selor, Sofifi, dan Sorong.
   d) Ibu Kota Negara (IKN).
   e) Pemulihan Pasca Bencana: (Kota Palu dan sekitarnya, Pulau Lombok dan Sekitarnya, serta Kawasan Pesisir Selat Sunda).
   f) Pusat Kegiatan Strategis Nasional : PKSN Paloh- Aruk, PKSN Nunukan, **PKSN Atambua, PKSN Kefamenanu**, PKSN Jayapura, dan PKSN Merauke
   g) Wilayah Adat Papua : Wilayah Adat Laa Pago dan Wilayah Adat Domberay.
   h) Reformasi agraria.

3. PN 3 : Meningkatkan SDM berkualitas dan berdaya saing, dijabarkan dalam 5 major project, yaitu :
   a) Pendidikan dan Pelatihan Vokasi untuk Industri 4.0.
   b) Pembangunan *Science Techno Park* (Optimalisasi *Triple Helix* di 4 *Major* Universitas).
   c) Percepatan **Penurunan Kematian Ibu dan *Stunting***.

d) Integrasi Bantuan Sosial Menuju Skema Perlindungan Sosial Menyeluruh.
e) Reformasi sistem kesehatan.

4. PN 4 : Revolusi mental dan Pengembangan Kebudayaan, tidak dijabarkan dalam major project tertentu

5. PN 5 : Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar, dijabarkan dalam 19 major project, yaitu :
   a) Infrastruktur TIK untuk Mendukung Transformasi Digital.
   b) Jalan Tol Trans Sumatera Aceh-Lampung.
   c) KA Kecepatan Tinggi Pulau Jawa (Jakarta-Semarang dan Jakarta- Bandung).
   d) Kereta Api Makassar-Pare Pare.
   e) Jaringan Pelabuhan Utama Terpadu.
   f) Waduk Multiguna.
   g) Infrastruktur ketenagalistrikan.
   h) Pembangunan dan Pengembangan Kilang Minyak.
   i) Pipa Gas Bumi Trans Kalimantan (2.219 KM)
   j) Sistem Angkutan Umum Massal Perkotaan di 6 Wilayah Metropolitan: Jakarta, Surabaya, Bandung, Medan, Semarang, dan Makasar.
   k) Pengamanan Pesisir 5 Perkotaan Pantura Jawa.
   l) Infrastruktur Jaringan Gas Kota untuk 4 Juta sambungan Rumah.
   m) Pemulihan Empat Daerah Aliran Sungai Kritis.
   n) Jembatan Udara 37 Rute di Papua
   o) Jalan Trans pada 18 Pulau Tertinggal, Terluar, dan Terdepan.
   p) Jalan Trans Papua Merauke – Sorong.
   q) Akses Air Minum Perpipaan (10 Juta Sambungan Rumah)
   r) Akses Sanitasi Layak dan Aman.
   s) Rumah Susun Perkotaan.

6. PN 6 : Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim, dijabarkan dalam 3 major project, yaitu :
   a) Penguatan Sistem Peringatan Dini Bencana.
   b) Pembangunan Fasilitas Pengolahan Limbah B3.

c) Reformasi sistem ketahanan bencana.

7. PN 7 : Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik, dijabarkan dalam 2 major project, yaitu :
   a) Penguatan NSOC - SOC dan Pembentukan 121 CSIRT

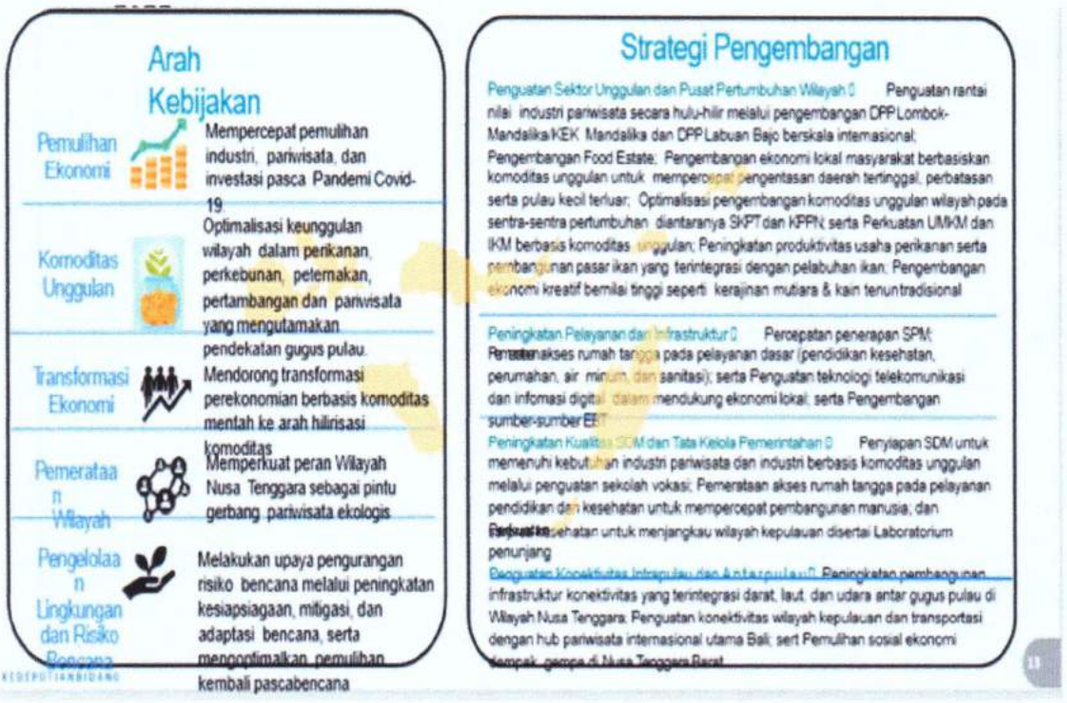
Tujuh Prioritas Nasional yang dijabarkan dalam 45 major project ini, dilaksanakan untuk memastikan tercapainya indikator makro pembangunan nasional tahun 2022 sebagaimana terlihat pada Tabel 4.7 :

Tabel 4.7

Realisasi dan Target Indikator RKP 2020, 2021 dan 2022 untuk NTT

INDIKATOR	REALISASI 2020	TARGET 2021	TARGET 2022
Pertumbuhan Ekonomi (%)	-0,83	5,01 - 6,13	5,67 - 6,34
Angka Kemiskinan (%)	21,21% (sept 2020)	21	20,16
Tingkat Pengangguran (%)	4,28%	5	3,41 - 4,14

ARAH KEBIJAKAN & STRATEGI PENGEMBANGAN WILAYAH NUSA TENGGARA TAHUN 2022



4.3.1.2 Tema RKPD Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2022

Tema dan prioritas pembangunan Daerah RKPD 2022 disusun dengan mempedomani RPJMD Perubahan 2018-2023 dan hasil evaluasi pembangunann tahun 2020 serta memperhatikan RKP 2022.

Gambar 4.4
Arah Kebijakan sebagai Pedoman Penentuan Tema RKPD



Mempedomani arah kebijakan RPJMD Perubahan 2018-2023, maka RKPD 2022 menetapkan tema **"Pengembangan Infrastruktur Ekonomi, Sosial, Budaya dan Pemantapan Sistem Rantai Pasok Pariwisata Menuju Pemulihan Ekonomi Daerah".**

Pembangunan yang dilakukan pada tahun 2022 diarahkan untuk pencapaian tujuan dan manfaat yang telah diamanatkan dalam RPJMD Perubahan 2018-2023, dan nantinya akan disesuaikan dengan kemampuan anggaran yang tersedia pada tahapan selanjutnya. Perencanaan dan penganggaran tetap dilakukan dengan prinsip *money follows programs,* dimana penganggaran diutamakan untuk pemenuhan pelayanan dasar dan pencapaian target RPJMD.

Pendekatan penyusunan RKPD 2022, secara proses dilakukan melalui pendekatan *top down, bottom up,* politik dan partisipatif,

sedangkan secara substansi penyusunan RKPD 2022 berorientasi pada perencanaan dan penganggaran yang bersifat Tematik, Holistik, Integratif, dan Spasial. Tematik, berarti ditentukan tema yang menjadi prioritas dalam suatu jangka waktu tertentu. Holistic mengandung arti bahwa tematik yang ada dijabarkan ke dalam perencanaan dan penganggaran yang komprehensif mulai dari hulu sampai ke hilir dalam satu rangkaian kegiatan.Integratif berarti upaya mencapai keterpaduan pelaksanaan perencanaan program baik dari pusat, provinsi sendiri, kabupaten/kota maupun seluruh pelaku pembangunan lainnya. Spasial berarti kagiatan pembangunan direncanakan secara fungsional, lokasinya berkaitan satu dengan lain dalam satu kesatuan wilayah dan berkaitan antar wilayah.

4.3.2 Prioritas Daerah RKPD 2022

Dalam upaya mencapai indikator dan target makro pada tahun 2022 implementasi sasaran dan arah kebijakan pembangunan dituangkan dalam enam Prioritas Daerah (PD). Prioritas Daerah kemudian disinergikan dalam 45 Proyek Prioritas Strategis (*Major Project*/MP).

Enam prioritas daerah untuk tahun 2022, yaitu :

1. Memperkuat infrastruktur Sumber Daya Alam untuk memperbesar skala usaha pertanian dan pengurangan kemiskinan serta stunting.
2. Pembangunan bidang pendidikan, kesehatan dan pemerintahan untuk meningkatkan kualitas SDM dan Pelayanan Publik.
3. Pengembangan rantai pasok pariwisata berbasis masyarakat melalui peningkatan sektor pertanian dan industri kreatif/kerajinan.
4. Pengembangan hilirisasi produk pertanian unggulan untuk meningkatkan penyerapan tenaga kerja dan memperkuat pemulihan ekonomi daerah.
5. Revolusi mental dan penerapan teknologi serta informasi untuk mewujudkan reformasi birokrasi.
6. Ketahanan bencana dan adaptasi perubahan iklim serta pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan untuk pembangunan rendah karbon.

Penjabaran masing-masing major project sebagaimana terlihat berikut:

PRIORITAS DAERAH 1 : Memperkuat infrastruktur Sumber Daya Alam untuk memperbesar skala usaha pertanian dan pengurangan kemiskinan serta stunting

Latar Belakang	a. Persentase jalan Provinsi dalam kondisi baik sampai dengan tahun 2020 1.857,94 km, dengan capaian tahun 2020 sebesar +144,54 Km (HRS: 67,71 Km, GO: 74,33 Km, GO+: 2,5 Km)sehingga jalan provinsi dalam kondisi mantap menjadi 100% b. Daerah Irigasi dalam kondisi baik sampai dengan tahun 2019, 34.528 Ha (57,23%), capaian tahun 2020 adalah 36.345 Ha (60,25%) c. Penanganan masalah air, melalui pembangunan embung, saluran irigasi, penampung air, sumur bor, sambungan yang dapat menjangkau 30 ribu keluarga miskin dan stunting, dengan capaian pembangunan embung kecil tahun 2020: 160 unit dari kondisi existing tahun 2019: 156 unit. d. Untuk Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) capaian tahun 2020 adalah 82%. e. Jumlah rumah tidak layak huni yang ditangani pada tahun 2019 sebanyak 403 unit dari kondisi existing 650 unit sehingga menjadi 1.053 unit. Sedangkan pada tahun 2020 tidak ada penambahan unit (0). f. Angka Kemiskinan NTT masih tinggi yaitu 21,21% (Sept 2020) 24,2% balita di NTT stunting (Agustus 2019)	
Indikator dan Target pada Akhir Periode RPJMD	a. Persentase jalan Provinsi dalam kondisi baik, 2.650 km b. Daerah Irigasi dalam konsisi baik , 3.600 ha c. Jumlah rumah tidak layak huni 76.990 unit d. Angka Kemiskinan menjadi 15% - 12%. e. Balita Stunting 10-12%.	
Tahun Rencana	2022	
Indikator dan target pada Tahun Rencana	a. Persentase jalan Provinsi dalam kondisi baik, 339 km b. Daerah Irigasi dalam kondisi baik, 3.600 ha c. Jumlah rumah tidak layak huni, 228.990 unit d. Meningkatnya kesejahteraan masyarakat, yang ditandai dengan : e. Menurunnya angka kemiskinan dari 20,62% menjadi 19,35% - 16,15%. f. Menurunnya persentase balita stunting di NTT menjadi 16%	
Major Project 1	Pemenuhan Kebutuhan Energi baru terbarukan	
Aktivitas Utama &	Aktivitas Utama	Output

Output	• Pembangunan Energi Listrik (EBT) dengan kapasitas 17.85 KW untuk wilayah/daerah yang tidak ada jaringan PLN dan pada destinasi wisata.	• Tersedianya energi listrik (EBT) di 4 destinasi wisata baru dan 7 destinasi yang telah dibangun Tahun 2019 • Tersedianya pemasangan meteran listrik gratis di kantong-kantong kemiskinan (bagi daerah yang telah ada jaringan PLN).
Pelaksana	Dinas ESDM	
Major Project 2	Peningkatan Akses dan Kualitas jalan jembatan , prasarana dan sarana transportasi	
Aktivitas Utama & Output	Aktivitas Utama	Output
	• Kesiapan pembangunan Bandar Udara Sabu Raijua • Menyediakan petunjuk arah menuju dan di destinasi wisata (RPPJ), 80% • Penanganan pelabuhan, termasuk mengkoordinasikan perluasan ASDP Sumba Timur, 55%. • Mempersiapkan FS, AMDAL, dan DED di P. Rinca (Pelabuhan Laut untuk Kapal Penumpang Wisata/Kapal Cruise), Pra FS 100%, FS 100%. • Pengembangan Pelabuhan Tenau-Bolok sebagai pelabuhan hub multi purpose, 80%.	• Tersedianya perencanaan untuk pembangunan Bandar Udara Sabu Raijua • Tersedianya penunjuk arah, pengaman jalan dan rambu keselamatan di destinasi wisata • Tersedianya kepahaman tentang perluasan ASDP Sumba Timur • Tersedianya FS dan DED di Pulau Rinca • Tersedianyan rencana teknis pengembangan Pelabuhan Tenau-Bolok sebagai pelabuhan hub multi purpose, 80%.
Pelaksana	Dinas PUPR dan Dinas Perhubungan	
Major Project 3	Peningkatan Kuantitas, Kualitas dan Aksesibilitas Sumber Daya Air	
Aktivitas Utama dan Output	Aktivitas Utama	Output
	• Pembangunan sumber daya air dan Irigasi • Pengelolaan Operasi Sumber Daya Air dan Irigasi	• Terbangunnya embung kecil • Tersedianya data AKNOP Embung Kecil
Pelaksana	Dinas PUPR	
Major Project 4	Peningkatan Daya Dukung SDA dan Daya Tampung Lingkungan	
Aktivitas Utama dan Output	Aktivitas Utama	Output
	• Pemanfaatandan pengembangan hasil hutan bukan kayu (Jahe merah, Porang, Bambu) berbasis perhutanan sosial dengan luasan hutan yang dimanfaatkan sebesar 10.32 %. • Penataan dan pemanfaatan Lingkungan dan Kehutanan	• Indeks kualitas air , Indeks kualitas udara • Luas hutan dan lahan yang direhabilitasi • Jumlah hutan arboretum (khusus spesies flora dan fauna endemik)

	• Pembinaan Lingkungan Hidup dan Kehutanan • Penataan dan Pemanfaatan Lingkungan Dan Kehutanan • Pengendalian dan Perlindungan Lingkungan Hidup dan Kehutanan • Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Lingkungan dan Perhutanan Sosial	• Luas hutan dan lahan yang direhabilitasi • Luas hutan dengan tanaman endemik lokal. • Pengurangan dan penangan sampah (26%) dan limbah B3 (27,33 %).
Pelaksana	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	
Major Project 5	Perlindungan sosial bagi masyarakat miskin	
Aktivitas Utama & indicator output	Aktivitas Utama	Output
	• Pemberian bantuan sembako bagi keluarga fakir miskin sejumlah 10.320 KK di 344 Desa Prioritas; 22 Kabupaten/kota • Pemetaan kondisi fakir miskin di Perdesaan, Perkotaan, Kepulauan dan Perbatasan antar Negara pada seluruh desa dan kelurahan 2 kali dalam setahun • Peningkatan kapasitas perlindungan dan jaminan Sosial melalui Taruna Siaga Bencana sejumlah 103 orang	• 10.320 KK pada 344 Desa Prioritas di 22 Kabupaten/kota menerima bantuan sembako • Tersedianya data kondisi fakir miskin di Perdesaan, Perkotaan, Kepulauan dan Perbatasan antar Negara pada seluruh desa dan kelurahan 2 kali dalam setahun • Tersedianya insentif bagi 103 Taruna Siaga Bencana Provinsi NTT
Pelaksana	Dinas Sosial, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kabupaten/kota	
Major Project 6	Peningkatan Akses Layanan Kesehatan dan Gizi Masyarakat	
Aktivitas Utama & indicator output	Aktivitas Utama	Output
	• Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat di 12.040 KK pada 344 Desa • Pemberian PMT berbasis sumber daya lokal bagi 6.880 rumah tangga dengan 1000 HPK kerja sama dengan Dukungan PKK Provinsi NTT (Pokja-Pokja) dan Bantuan Sarana Prasarana Binaan TP-PKK di 344 Desa • Pelatihan Pengembangan Kapasitas dan Pemberdayaan Usaha Ekonomi Perempuan dalam penyediaan pangan	• Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat di 12.040 KK pada 344 Desa (nabati, hewani, dan protein) • Terlaksananya Pemberian PMT bagi balita pada 6.880 rumah tangga dengan 1000 HPK berbasis sumberdaya lokal di 344 desa • Tersedianya Unit Usaha Penyediaan Pangan pada 344 Desa Prioritas (nabati, hewani, dan protein)

	bekerja sama dengan Bumdes di 344 Desa; 22 Kab/kota • Pemberian insentif bagi kader posyandu • Pengadaan Sarana Tumbuh Kembang Anak di Posyandu • Memastikan Covid 19 bisa ditangani, baik melalui vaksinasi, pemeriksaan laboratorium yang terjangkau, maupun pelayanan kesehatan yang memadai.	• Selama 12 bulan 688 orang kader posyandu pada 344 desa menerima insentif • Tersedianya sarana tumbuh kembang anak pada 344 posyandu di 22 kab/kota. • Tertanganinya Covid 19 baik melalui vaksinasi, pemeriksaan laboratorium yang terjangkau, maupun pelayanan kesehatan yang memadai.
Pelaksana	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, Dinas PMD dan PKK, Dinas Peternakan, Dinas Perikanan, Dinas Kesehatan dan Dukcapil	
Major Project 7	Pemerataan Akses Layanan Pendidikan Berkualitas	
Aktivitas Utama & Output	Aktivitas Utama	Output
	• Pemberiam beasiswa bagi anak-anak kurang mampu yang berprestasi • Koordinasi Penyiapan dan *updating* Data DAPODIK. • Dukungan Akreditasi untuk SMA dan SMK	• Tersedianya beasiswa bagi anak kurang mampu yang berprestasi • Terupdatenya data DAPODIK • Terakreditasinya SMA dan SMK
Pelaksana	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
Major Project 8	Peningkatan Akses Masyarakat Terhadap Perumahan dan Permukiman layak	
Aktivitas Utama & Output	Aktivitas Utama	Output
	• Penyediaan Sumur Bor sebagai sumber air bersih bagi 172 Desa Prioritas di 22 Kab/Kota • Pemberian bantuan instalasi listrik gratis bagi KK miskin di 344 desa di NTT. • Penyediaan energi listrik (EBT) bagi masyarakat miskin di 344 desa di NTT. • Pembangunan Penampung air kumunal 1000 unit Penyediaan dan Pengelolaan Air Bersih Berbasis Masyarakat. • Pembangunan Rumah Layak Huni bagi KK Miskin di344	• Tersedianya 172 Sumur Bor sebagai sumber air bersih bagi 172 Desa Prioritas di 22 Kab/Kota. • Terpasangnya instalasi listrik gratis bagi KK Miskin di 344 desa di NTT. • Tersedianya energi listrik (EBT) bagi masyarakat miskin di 344 desa di NTT. • Tersedianya 1.000 unit penampung air komunal bagi masyarakat miskin di 344 desa di NTT. • Terbangunnya 4.000 unit rumah layak huni di 344 desa di NTT.

	desa di NTT. • Peningkatan kualitas hidup melalui revitalisasi (peremajaan) kawasan kumuh 90%.	• Terlaksananya revitalisasi Kawasan Kumuh 90%.
Pelaksana	Dinas PUPR, Dinas ESDM, Dinas Koperasi dan Nakertrans	
Major Project 9	Pengembangan kelor dan pengembangan hortikultura melalui P2L (Pekarangan Pangan Lestari)	
Aktivitas Utama & Output	Aktivitas Utama	Output
	• Pengembangan kelor dan pengembangan hortikultura melalui P2L (Pekarangan Pangan Lestari) untuk ketahanan pangan di lokus kemiskinan dan stunting. • Peningkatan nilai tambah dan ekspor produk marungga lewat pengolahanmarungga : • Bimtek pengolahan aneka produk dari kelor bagi 40 IKM di 4 kabupaten • Fasilitasi legalitas usaha dan legalitas produk kelor • Penyediaan Ayam kampung diutamakan untuk kantong-kantong kemiskinan dan stunting.	• Bertambahnya luas areal penanaman marungga P2L (Pekarangan Pangan Lestari) untuk ketahanan pangan di lokus kemiskinan dan stunting 1000 Ha • Terlatihnya 40 IKM dalam hal pengolahan kelor • Produk – produk kelor terfasilitasi untuk mendapatkan legalitas produk • Tersedianya Ayam kampung diutamakan untuk kantong-kantong kemiskinan dan stunting. Satu KK mendapat 1 (satu) ekor ayam kampung jantan dan 4 (empat) ekor betina untuk mengatasi kebutuhan protein hewani dari daging ayam dan telur serta membantu peningkatan ekonomi keluarga, termasuk untuk mendukung kantong-kantong kemiskinan dan stunting sebanyak 10 ribu keluarga 1000 HPK.
Pelaksana	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Peternakan	
Major Project 10	Pengembangan TJPS untuk mendukung *Food Estate*	
Aktivitas Utama & Output	Aktivitas Utama	Output
	• Peningkatan produksi dan produktivitas tanaman jagung yang diintegrasikan dengan ternak untuk meningkatkan ketahanan pangan dan ketahanan ekonomi petani terutama di lokasi *Food Estate* Kabupaten Sumba Tengah dan Kabupaten Belu.	• Tersedianya dukungan prasarana dan sarana produksi pertanian di lokasi *Food Estate* Kabupaten Sumba Tengah dan Kabupaten Belu.
Pelaksana	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, Dinas Peternakan, Dinas Perikanan dan Kelautan	

PRIORITAS DAERAH 2 : Pembangunan bidang pendidikan, kesehatan dan pemerintahan untuk meningkatkan kualitas SDM dan Pelayanan Publik

Latar Belakang	a. Rata-rata lama sekolah di tahun 2020 adalah 7,63 tahun b. Angka Melek Huruf di tahun 2020 adalah 93,36% c. Angka kematian Ibu pada tahun 2020 sebanyak 149 kasus d. Angka kematian Bayi ngka kematian bayi baru lahir pada tahun 2020 mencapai 744 kasus	
Indikator dan Target pada Akhir Periode RPJMD	a. Rata-rata lama sekolah 9,5 tahun b. Angka Melek Huruf 100% c. Angka kematian Ibu ditargetkan 0 d. Angka kematian Bayi ditargetkan 0 e. Angka kematian Balita ditargetkan 0	
Tahun Rencana	2022	
Indikator dan target pada Tahun Rencana	a. Rata-rata lama sekolah 8,65 Tahun b. Angka Melek Huruf 98,47 poin c. Angka kematian Ibu 0 Kasus d. Angka kematian Bayi 0 Kasus e. Angka kematian Balita 0 Kasus	
Major Project 1	Peningkatan Aksesibilitas dan Kualitas Layanan Pendidikan	
Aktivitas Utama & Output	Aktivitas Utama	Output
	• Pembinaan Pendidikan Menengah • Melalui rehab ruang kelas, pembangunan sekolah dan ruang kelas. • Pelaksanaan pendidikan khusus dan layanan khusus (Luar Biasa). • Pembinaan Ketenagaan. • Manajemen Pengelolaan BOS. • Membangun SMK yang mendukung sektor Pariwisata dan Pertanian.	• Jumlah ruang kelas yang direhab, jumlah kelas/sekolah yang dibangun pada 22 Kabupaten/Kota se-NTT • Terlaksananya pelayanan pendidikan khusus dan layanan khusus (luar biasa) bagi anak berkebutuhan khusus pada 22 Kabupaten/Kota se-NTT • Terlayaninya tenaga pendidikan dan kependidikan pada 22 Kabupaten/Kota se-NTT • Pengelolaan Dana BOS yang akuntabel selama satu tahun anggaran

Pelaksana	Dinas Pendikan dan Kebudayaan	
Major Project 2	Pemuda NTT yang berkapasitas dan berkapabilitas	
Aktivitas Utama & Output	Aktivitas Utama	Output
	• Pengembangan Kepemudaan • Pemberdayaan pemuda	• Terlaksananya pelatihan kewirausahaan dan bantuan permodalan bagi Kelompok pemuda dalam berwirausaha • Pelatihan Peningkatan Krestifitas pemuda dibidang seni kriya (kerajinan, anyaman, dan ukiran)
Pelaksana	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	
Major Project 3	Penguatan Literasi untuk Kesejahteraan	
Aktivitas Utama & Output	Aktivitas Utama	Output
	• Peningkatan layanan dan pembinaan perpustakaan	• Jumlah bahan bacaan, • penyediaan akses layanan perpustakaan sekolah, desa dan digital
Pelaksana	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	
Major Project 4	Peningkatan Kualitas dan kuantitas Pelayanan Kesehatan	
Aktivitas Utama & Output	Aktivitas Utama	Output
	• Pencegahan dan Pengendalian Penyakit • Peningkatan Kesehatan Masyarakat • Pengembangan Sumber Daya Manusia Kesehatan • Peningkatan Kualitas Manajemen Kesehatan	• Persentase Penduduk Mengalami Gangguan Kesehatan • Persentase Balita Stunting • Rasio Dokter Umum per 100.000 penduduk • Standar Operasional (SOP) Prosedur yang Disusun dan Dijalankan
Pelaksana	Dinas Kesehatan	

PRIORITAS DAERAH 3 : Pengembangan rantai pasok pariwisata berbasis masyarakat melalui peningkatan sektor pertanian dan industri kreatif/kerajinan

Latar Belakang	a. Tingkat kunjungan wisatawan pada tahun 2020 adalah 300.000 orang, menurun dari lebih dari 1,4 juta kunjungan pada tahun 2019 b. Rata-rata lama tinggal wisatawan baru mencapai 2,62 hari	
Indikator dan Target pada Akhir Periode RPJMD	a. Tingkat kunjungan wisatawan harus mencapai 1.534.144 orang b. Rata – rata lama tinggal wisatawan mencapai 4 hari	
Tahun Rencana	2022	
Indikator dan target pada Tahun Rencana	a. Tingkat kunjungan wisatawan harus 1.278.453 orang b. Rata – rata lama tinggal wisatawan 4 hari	
Major Project 1	Peningkatan kelembagaan dan SDM pariwisata berbasis masyarakat (*Comunity Based Tourism*)	
Aktivitas Utamai & Output	Aktivitas Utama	Output
	• Peningkatan UKM baru di pariwisata estate 2019-2020 (Fatumnasi, Mulut Seribu, Liman, Koanara, Wolwal, Lamalera, dan Praimadita) • Penguatan kapasitas pengelola wisata di pariwisata estate 2019-2020 (Fatumnasi, Mulut Seribu, Liman, Koanara, Wolwal, Lamalera, dan Praimadita) • Peningkatan perananan Bumdes sebagai penggerak ekonomi desa di pariwisata estate 2019-2020 (Fatumnasi, Mulut Seribu, Liman, Koanara, Wolwal, Lamalera, dan Praimadita) • Meningkatkan wisata bahari ramah lingkungan pada kawasan konservasi perairana di pariwisata estate 2019-2020 (Fatumnasi, Mulut Seribu, Liman, Koanara, Wolwal, Lamalera, dan Praimadita) • Penataan dan pembinaan kelembagaan semua jenis perpustakaan (temasuk perpustakaan umum di daerah pariwisata estate).	• Jumlah UKM baru di 7 lokasi tahun 2019 bertambah. • Pengelola Usaha Pariwisata dan Pokdarwis di 7 lokasi tahun 2019 mendapat pelatihan/bimtek • Terbangunnya usaha wisata bahari ramah lingkungan pada kawasan konservasi perairan di pariwisata estate 2019-2020 (Fatumnasi, Mulut Seribu, Liman, Koanara, Wolwal, Lamalera)
Pelaksana	Dinas Pariwisata dan ekonomi kreatif, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Dinas Koperasi dan Nakertrans, Dinas Perikanan dan Kelautan, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan,	

Major Project 2	Percepatan pembangunan infrastruktur pariwisata	
Aktivitas Utama & Output	Aktivitas Utama	Output
	• Lanjutan Penataan 5A di 7 (Tujuh) destinasi Wisata Tahun 2019-2020 (Fatumnasi, Mulut Seribu, Liman, Koanara, Wolwal, Lamalera, dan Praimadita) • Peningkatan pelayanan kesehatan di pariwisata estate 2019-2020 (Fatumnasi, Mulut Seribu, Liman, Koanara, Wolwar, Lamalera, dan Praimadita)	• Tersedianya 5A di pariwisata estate 2019-2020 (Fatumnasi, Mulut Seribu, Liman, Koanara, Wolwal, Lamalera, dan Praimadita), seperti jalan, listrik, air, penginapan, restoran, atraksi, dll. • Tersedianya fasilitas kesehatan (puskesmas / pustu di pariwisata estate 2019-2020 (Fatumnasi, Mulut Seribu, Liman, Koanara, Wolwal, Lamalera, dan Praimadita)
Pelaksana	Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Dinas PUPR, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas ESDM, Dinas Kesehatan, Para Pelaku Usaha Wisata	
Major Project 3	Peningkatan Nilai Tambah Ekonomi dan Kinerja Industri Kreatif	
Strategi & indicator output	Aktivitas Utama	Output
	• Penguatan industri kreatif di pariwisata estate 2019-2020 (Fatumnasi, Mulut Seribu, Liman, Koanara, Wolwal, Lamalera, dan Prai Madita) • Pengembangan ekowisata dan arboratoriuma di pariwisata estate 2019-2020 (Fatumnasi, Mulut Seribu, Liman, Koanara, Wolwal, Lamalera, dan Prai Madita) • Peningkatan Produksi Tanama pangan di pariwisata estate 2019-2020 (Fatumnasi, Mulut Seribu, Liman, Koanara, Wolwal, Lamalera, dan Praimadita) • Pengembangan ketrampilan tenaga kerja lokal di bidang pariwisata dalam mengelola industri-industri kreatif sesuai potensi lokal di pariwisata estate 2019-2020 (Fatumnasi, Mulut Seribu, Liman, Koanara, Wolwal, Lamalera, dan Praimadita) • Peningkatan populasi peternakan di Pariwisata Estatee 2019-2020 (Fatumnasi, Mulut Seribu, Liman, Koanara,	• Usaha industri kreatif pariwisata estate 2019-2020 (Fatumnasi, Mulut Seribu, Liman, Koanara, Wolwal, Lamalera, dan Praimadita) di latih • Terbangunnya ekowisata dan arboratoriuma di pariwisata estate 2019-2020 (Fatumnasi, Mulut Seribu, Liman, Koanara, Wolwal, Lamalera, dan Praimadita) • Meningkatnya Produksi Tanama Pangan di pariwisata estate 2019-2020 (Fatumnasi, Mulut Seribu, Liman, Koanara, Wolwar, Lamalera, dan Praimadita) • Tenaga kerja lokal di bidang pariwisata dalam mengelola industri-industri kreatif sesuai potensi lokal di pariwisata estate 2019-2020 (Fatumnasi, Mulut Seribu, Liman, Koanara, Wolwar, Lamalera, dan Praimadita) • Meningkatnya populasi peternakan di Pariwisata Estate 2019-2020 (Fatumnasi, Mulut Seribu, Liman, Koanara, Wolwal, Lamalera, dan Praimadita)

	Wolwal, Lamalera, dan Praimadita)	
Pelaksana	Dinas Pariwisata dan Ekonomi kreatif, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, Dinas Peternakan, Dinas Perindag	
Major Project 4	Pengembangan Jaringan Informasi Pariwisata (TIC) yang terintegrasi dengan digital literasi dan promosi wisata	
Aktivitas Utama & Output	Aktivitas Utama	Output
	• Digital literasi obyek wisata (Sumba Timur, TTS, Kab. Kupang, Rote Ndao, Alor, Lembata dan Ende) • Tourism Information Centre (Sumba Timur, TTS, Kab. Kupang, Rote Ndao, Alor, Lembata dan Ende)	• Tersedianya informasi kepariwisataan dalam bentuk digital yang mudah diakses oleh wisatawan tentang 7 destinasi pariwisata estate (Sumba Timur, TTS, Kab. Kupang, Rote Ndao, Alor, Lembata dan Ende) • Tersedianya pusat informasi pariwisata di 7 destinasi pariwisata estate (Sumba Timur, TTS, Kab. Kupang, Rote Ndao, Alor, Lembata dan Ende)
Pelaksana	Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	
Major Project 5	Pengembangan Jaringan Kerjasama Pariwisata	
Aktivitas Utama & Output	Aktivitas Utama	Output
	• Pengembangan pasar pariwisata (Sumba Timur, TTS, Kab. Kupang, Rote Ndao, Alor, Lembata dan Ende) • Publikasi promosi pariwisata (Sumba Timur, TTS, Kab. Kupang, Rote Ndao, Alor, Lembata dan Ende) • Survey kecenderungan wisatawan (Sumba Timur, TTS, Kab. Kupang, Rote Ndao, Alor, Lembata dan Ende) • Pameran potensi pariwisata dan ekonomi kreatif	• Terjalin kerjasama dengan semua pihak yang terlibat dalam kegiatan kepariwisataan • Meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan ke 7 destinasi pariwisata estate • Tersedianya data tentang minat dan kecenderungan wisatawan terhadap 7 destinasi pariwisata estate. • Tersedianya jaringan kerajasama kepariwisataan dan ekonomi kreatif di NTT
Pelaksana	Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	

PRIORITAS DAERAH 4 : Pengembangan hilirisasi produk pertanian unggulan untuk meningkatkan penyerapan tenaga kerja dan memperkuat pemulihan ekonomi daerah.

Latar Belakang	a. Ekonomi NTT masih sangat bergantung pada sektor Primer (Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan), pangsa sektor Primer dalam ekonomi Daerah mencapai lebih dari 27% b. Lapangan usaha industri pengolahan hanya memiliki pangsa 1,26% dalam ekonomi daerah pada tahun 2020 c. PDRB perkapita NTT pada tahun 2020 adalah sebesar Rp. 19,2 Juta rupiah, jauh dibawah PDRB perkapita Nasional sebesar Rp 56,9 juta rupiah	
Indikator dan Target pada Akhir Periode RPJMD	a. Pertumbuhan ekonomi 6,7%-7,3% b. PDRB per kapita Rp 25 – Rp.27 juta	
Tahun Rencana	2022	
Indikator dan target pada Tahun Rencana	a. Meningkatnya angka pertumbuhan ekonomi sebesar 6,00% - 6,33% b. PDRB per kapita menjadi Rp 23 – Rp 25 juta	
Major Project 1	Peningkatan Produksi bibit dan benih Pertanian, Peternakan dan Perikanan	
Aktivitas Utama & Output	Aktivitas Utama	Output
	• peningkatan produktifitas tanaman pangan khususnya padi , jagung, Kelor dan Hortikultura. • Pengembangan Tanaman Sorgum seluas 50.000 ha. • peningkatan populasi ternak sapi (1.305.137 ekor), babi (3.246.707 ekor), ayam kampung (21.306.593 ekor) dalam mendukung program TJPS dan ketersediaan 80 % ternak sehat serta daging konsumsi yang sehat dan aman melalui fasilitasi 20 % Unit usaha pangan asal ternak yang memenuhi standar. • Pengembangan Sapi Wagiyu di Instalasi Kabaru (Pola Kerja Sama) • Pengadaan ternak babi untuk kelompok tani ternak di 22 kabupaten/kota	• Fokus pada produksi komoditas: padi (1.401.120 ton), jagung (1.410.400 ton), kelor dan hortikultura (cabe : 8.486 ton, kacangtanah: 11.529 ton, kacang hijau: 7.982 ton dan bawang merah : 5.013 ton) yang didukung dengan ketersediaan sarana dan prasarana pertanian. Khusus untuk jagung melalui program TJPS luas tanam pada tahun 2022 direncanakan mencapai 50.000 ha. • Tersedianya Pengembangan Tanaman Sorgum seluas 50.000 ha. • Tersedianya populasi ternak sapi (1.305.137 ekor), babi (3.246.707 ekor), ayam kampung (21.306.593 ekor) dalam mendukung program TJPS dan ketersediaan 80 % ternak sehat serta daging konsumsi yang sehat dan aman melalui

	• Peningkatan produksi Perikanan budidaya sebesar 10 % yang mencakup pengembangan rumput laut dan kebun bibit, ikan kerapu dan ikan kakap, dikembangkan di Kabupaten Sumba Barat, Sumba Barat Daya, Sikka, Alor, (Rumput Laut) Mulut Seribu Rote Ndao, Labuan Kelambu Ngada (Ikan Kakap dan Kerapu untuk mendukung rantai pasok protein ikan di pariwisata estate.	fasilitasi 20 % Unit usaha pangan asal ternak yang memenuhi standar. • Tersedianya ternak babi untuk kelompok tani ternak di 22 kabupaten/kota sebanyak 1900 Ekor. • Tersedianya produksi 1 juta benih ikan kerapu dan kakap putih di Mulut seribu. • *Sea Ranching/ Restocking* (pengkayaan sumber daya ikan di Teluk Labuan Kelambu)
Pelaksana	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, Dinas Peternakan, Dinas Perikanan dan Kelautan	
Major Project 2	Percepatan Peningkatan Keahlian Tenaga Kerja	
Aktivitas Utama & Output	Aktivitas Utama	Output
	• Pelatihan pemagangan tenaga kerja dalam negeri dan wira usaha baru • Fasilitasi sarana pelaku UMKM di destinasi wisata prioritas dan desa model PKK • Pelatihan teknis UMKM, KOPERASI dan BUMDES di destinasi wisata prioritas • Pengembangan system informasi tenaga kerja • Optimalisasi pelatihan pada UPT balai pelatihan ketenaga kerjaan. • Revitalisasi Lokabinkra.	• Tersedia tenaga terlatih pada tiga sector usaha • Tersedia pelaku UMKM baru pada sector ekonomi dan jasa dalam mendukung pengembangan destinasi wisata dan 5 desa pilot project PKK • Terbentuk pengelolaan BUMDES dan KOPERASI sebagai kelambagaan ekonomi yang menjalankan pengembangan lokasi Destinasi Pariwisata prioritas • Terbentuk aplikasi ketenaga kerjaan yang bisa diakses oleh seluruh masyarakat di 22 kab/kota • Penyediaan sarana pelatihan dan kompetensi instruktur • Terevitalisasinya Lokabinkra.
Pelaksana	Dinas Koperasi dan Nakertrans, Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	
Major Project 3	Pengembangan Iptek dan Inovasi Daerah	
Aktivitas Utama & Output	Aktivitas Utama	Output
	• Inovasi daerah melalui penelitian dan pengembangan • Penilaian inovasi daerah	• Tersedianya Inovasi daerah yang dapat digunakan dalam pelaksanaan pembangunan daerah • Keikutsertaan pada lomba Indeks inovasi daerah/ IGA (Innovative Government Award)
Pelaksana	Bappelitbangda, Biro Organisasi, perangkat daerah lainnya yang melaksanakan inovasi daerah	

PRIORITAS DAERAH 5 : Revolusi mental dan penerapan teknologi serta informasi untuk mewujudkan reformasi birokrasi.

Latar Belakang	a. Peringkat LPPD b. Indeks Reformasi Birokrasi saat ini 60,37 c. Nilai Akuntabilitas Kinerja saat ini 63,43 d. Indeks SPBE e. Opini BPK tahun 2020 : WTP f. Indeks kepuasan pelayanan publik (8 PD = 82,81)	
Indikator dan Target pada Akhir Periode RPJMD	a. Peringkat LPPD 18 – 20 b. Indeks Reformasi Birokrasi c. Nilai Akuntabilitas Kinerja CC d. Indeks SPBE 2,3 e. Opini BPK WTP f. Indeks kepuasan pelayanan publik	
Tahun Rencana	2022	
Indikator dan target pada Tahun Rencana	a. Peringkat LPPD 18 – 20 b. Indeks Reformasi birokrasi, 69 c. Nilai Akuntabilitas Kinerja, A d. Indeks SPBE, 2,5 e. Opini BPK, WTP f. Indeks kepuasan pelayanan publik,90	
Major Project 1	Perangkat Daerah yang *right sizing*	
Aktivitas Utama & Output	Aktivitas Utama	Output
	• Menyusun instrumen penilaian kinerja individu yang terukur dan mencerminkan pencapaian kinerja • Menyusun dan mengevaluasi pelaksanaan *Bussiness Proccess* dan Standar Operating Prosedur • Rekrutmen pejabat melalui mekanisme *assessment*	• Tersedianya instrumen penilaian kinerja individu yang terukur dan mencerminkan pencapaian kinerja • Tersedia *Bussiness Proccess* dan SOP serta hasil evaluasi terhadap *Bussiness Proccess* dan SOP • Terlaksananya rekrutmen pejabat melalui mekanisme

	centre, seleksi terbuka dan manajemen *talent pool*	*assessment centre*, seleksi terbuka dan manajemen *talent pool*
Pelaksana	Badan Kepegawaian Daerah dan Biro Organisasi	
Major Project 2	Penerapan *e- Government* & Data Terpadu	
Aktivitas Utama & Output	Aktivitas Utama	Output
	• Pengelolaan E-Gov Terintegrasi	• Penerapan *e-Government* • Terwujudnya *Smart City*
Pelaksana	Dinas Kominfo	
Major Project 3	Penerapan Sistem manajemen Kinerja	
Aktivitas Utama & Output	Aktivitas Utama	Output
	• mengidentifikasi indikator mutu dalam pelayanan, memonitor indikator tersebut dan mengukur hasil dari 37egetativ mutu tersebut yang tentunya mengarah pada *outcome*, serta selalu berfokus dalam rangka peningkatan proses, sehinga tingkat mutu dari hasil yang dicapai • Membuat rencana penerapan sistem Pengendalian Intern Pemerintah	• Tersedianya data / laporan indikator mutu • Ditrerapkannya Sistem Pengendalian Intern Pemerintah
Pelaksana	Inspektorat, Biro Organisasi	
Major Project 4	Penataan dan pemutahiran Produk Hukum Daerah	
Aktivitas Utama & Output	Aktivitas Utama	Output
	• Verifikasi dan evaluasi Pelaksanaan Produk Hukum Daerah dan Penyusunan Produk Hukum Daerah sesuai dengan kebutuhan Daerah dan Permasalahan Daerah	• Produk hokum daerah diverifikasi dan dievaluasi
Pelaksana	Biro Hukum, Setwan DPRD	
Major Project 5	Peningkatan Pelayanan publik yang berkualitas	
Aktivitas Utama & Output	Aktivitas Utama	Output
	• Sosialisi pemanfaatan Aplikasi Pengaduan Masyarakat • Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi perencanaan	• Aplikasi pengaduan masyarakat dikenal dan dapat digunakan oleh masyarakat

	Pembangunan Daerah	• Meningkatnya kesesuaian program-program pembangunan dengan kebutuhan masyarakat dan potensi daerah lewat restrukturisasi program dan kegiatan daerah
Major Project 6	SI MANDATARIS (Sistem Informasi Data Strategis)	
Aktivitas Utama &Indikator Output	Aktivitas Utama	Output
	• Data potensi desa (PODES) dan sensus • Kompilasi database penerima program bantuan dari berbagai Lembaga	• Menghasilkan berbagai data strategis dari dan hingga level desa/kelurahan → Prioritas utama Database Penduduk Miskin "By Name By Address" dengan data klasifikasi/tipologi sampai level desa/kelurahan' yang menggunakan sistem Sumber pemuktahiran data strategis yang "real time" di 12 Kabupaten/Kota pada Tahap II. • Terbangunnya Aplikasi SI-MANDATARIS -*Single Database* – Kemiskinan (Data Terpusat dan Terpadu) yang dapat diintegrasikan dengan berbagai sistem yang lain sehingga data kemiskinan dan juga data-data strategis lainnya menjadi sinkron dan konsisten.
Pelaksana	Bappelitbangda, Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Tenaga Pendamping Professional Desa), BPS dan Tenaga Pendamping Profesional (TPP) Kementerian Desa RI.	

PRIORITAS DAERAH 6 : Ketahanan bencana dan adaptasi perubahan iklim serta pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan untuk pembangunan rendah karbon.

Latar Belakang	a. Indeks kualitas lingkungan hidup, NTT 2018 yang terdiri dari IKA 58,09 (kurang baik), IKU dan IKTL NTT dalam kategori sedang b. NTT merupakan daerah rawan bencana c. Perubahan iklim mulai sangat terasa	
Indikator dan Target pada Akhir Periode RPJMD	Indeks kualitas lingkungan hidup mencapai 75	
Tahun Rencana	2022	
Indikator dan target pada Tahun Rencana	Indeks kualitas lingkungan hidup, 69	
Major Project 1	Penanggulangan Bencana dan Adaptasi Perubahan Iklim	
Aktivitas Utama & Output	Aktivitas Utama	Output
	Adaptasi dan mitigasi perubahan iklim	24 kampung iklim diusulkan
Pelaksana	Dinas Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	
Major Project 2	Pemanfaatn dan optimalisasi Hutan Produksi	
Aktivitas Utama & Output	Aktivitas Utama	Output
	• Pemanfaatan hasil hutan dan jasa lingkungan kawasan hutan di 22 kabupaten/kota	• Luas tanaman hasil hutan bukan kayu 200 hektar (Jahe Merah, Prang dan Bambu) • Spesies pendukung HHBK sebanyak 5 Unit • Luas hutan tanaman endemik 5.000 hektar
Pelaksana	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	
Major Project 3	Pengelolaan daerah aliran sungai terpadu	
Aktivitas Utama & Output	Aktivitas Utama	Output
	• Penyusunan kebijakan, koordinasi, dan evaluasi dalam pengelolaan daerah aliran sungai (DAS) dan ekosistemnya melalui kegiatan vegetative dan civil teknis	• pembuatan hutan dan penanaman tanaman cendana sebanyak 2.500.000 batang • berkurangnya luasan lahan kritis 5,5 juta hektar

Pelaksana	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	
Major Project 4	Pelestarian hutan dan Lingkungan Pesisir	
Aktivitas Utama & Output	Aktivitas Utama	Output
	• Peningkatan kesadaran masyarakat dalam pemanfaatan pelestarian LH • Pelibatan masyarakat dalam perlindungan lingkungan pesisir • Pemantauan indeks lingkungan hidup daerah • Pengembangan dan pemanfaatan kawasan konservasi perairan daerah sebagai area pemijahan ikan dan pelestarian terumbu karang di Alor, Lembata, Sikka dan Flotim	• Hutan dan lahan yang direhabilitasi secara Vegetative seluas 600 ha • jumlah pengurangan timbulan sampah di daerah sebanyak 16,4 juta ton • Tersedianya data dan informasi kerusakan mangrove di 22 kab/kota dan penyusunan dokumen IKLH. • Penetapan dan Pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan Daerah (kawasan) Alor, Lembata, Sikka, Flotim • Peningkatan produksi ikan di kawasan konservasi perairan sebesar 15 % • Prosentase Peningkatan kegiatan wisata bahari ramah lingkungan di kawasan konservasi perairan sebesar 20 %
Pelaksana	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Dinas Perikanan dan Kelautan	
Major Project 5	Pengurangan Emisi Gas Rumah Kaca	
Strategi & indikator output	Aktivitas Utama	Output
	• Inventarisasi, pengendalian dan pengawasan kegiatan mitigasi dan adaptasi terhadap penurunan Emisi Gas Rumah Kaca di 22 kabupaten/kota	• Tersedianya 1 dokumen : data Baseline Emisi Gas rumah kaca • Tersedianya 1 dokumen Inventarisasi Emisi Gas Rumah Kaca • Tersedianya 1 dokumen kaji ulang rencana aksi daerah (RAD) Gas Rumah Kaca
Pelaksana	Bappelitbangda, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, ESDM, Perhubungan, Pertanian dan Ketahanan Pangan, Peternakan, Disperindag, dan PUPR	

Enam Prioritas Daerah dimaksud selanjutnya dijabarkan dan disinergikan dengan tujuh Prioritas Nasional, sebagai berikut :

1. PD 1 : Memperkuat infrastruktur SDA untuk memperbesar skala usaha pertanian dan pengurangan kemiskinan serta stunting, mendukung Prioritas Nasional (PN) :
   a. PN 1 : Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan (indikator yang didukung : pembangunan irigasi, pemeliharaan jaringan irigasi, area pertanian yang terlayani jaringan irigasi dan penurunan desa rawan pangan).
   b. PN 3 : Meningkatkan SDM berkualitas dan berdaya saing (indikator yang didukung : penurunan prevalensi stunting).
   c. PN 5 : Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar (indikator yang didukung : pembangunan embung, bangunan penampung air, pemeliharaan jaringan irigasi, pembangunan irigasi, area pertanian yang terlayani jaringan irigasi, dan penurunan desa rawan pangan).
2. PD 2 : Pembangunan bidang pendidikan, kesehatan dan pemerintahan untuk meningkatkan kualitas SDM dan pelayanan publik, mendukung Prioritas Nasional (PN) :
   a. PN 2 : Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan (indikator yang didukung : peningkatan kualitas layanan sarpras dan alkes untuk UKM dan UKP serta masyarakat miskin yang tercover oleh jaminan sosial).
   b. PN 3 : Meningkatkan SDM berkualitas dan berdaya saing (indikator yang didukung : peningkatan kualitas layanan sarpras dan alkes untuk UKM dan UKP, menurunkan gizi kurang, gizi buruk, menurunnya pervalensi stunting, rasio tenaga kesehatan, rasio tenaga pendidikan dan distribusi serta meningkatkan rata-rata lama sekolah, APM, APS).
3. PD 3 : Pengembangan rantai pasok pariwisata berbasis masyarakat melalui peningkatan sektor pertanian dan industri kreatif/kerajinan, mendukung Prioritas Nasional (PN) :
   a. PN 1 : Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan (Indikator yang di dukung : peningkatan cakupan desa wisata pada kawasan pariwisata

estate, pengembangan BUMDes aktif, peningkatan pemberdayaan kelompok masyarakat desa, peningkatan kerjasama antar daerah dan peningkatan transaksi produk lokal di kawasan pariwisata).

b. PN 2 : Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan (indikator yang didukung : peningkatan cakupan desa wisata pada kawasan pariwisata estate, pengembangan BUMDes aktif, peningkatan pemberdayaan kelompok masyarakat desa, peningkatan kerjasama antar daerah, peningkatan transaksi produk lokal di kawasan pariwisata dan peningkatan cakupan distribusi barang dalam wilayah NTT).

c. PN 5 : Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar (indikator yang didukung : peningkatan cakupan distribusi barang dalam wilayah NTT).

4. PD 4 : Pengembangan hilirisasi produk pertanian unggulan untuk meningkatkan penyerapan tenaga kerja dan memperkuat pemulihan ekonomi daerah, mendukung Prioritas Nasional (PN) :

   a. PN 1 : Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan (indikator yang di dukung : Peningkatan cakupan pemberdayaan kelompok masyarakat desa, pemanfaatan informasi pasar, peningkatan nilai transaksi UMKM, cakupan UMKM yang mendapat akses permodalan, penurunan angka kemiskinan dan peningkatan pendapatan masyarakat).

   b. PN 2 : Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan (indikator yang didukung : peningkatan cakupan pemberdayaan kelompok masyarakat desa dan peningkatan pendapatan masyarakat).

5. PD 5 : Revolusi mental dan penerapan teknologi serta informasi untuk mewujudkan reformasi birokrasi, mendukung Prioritas Nasional (PN) :

   a. PN 4 : Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan (indikator yang didukung : indeks reformasi birokrasi dan indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik/SPBE).

   b. PN 7 : memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik ((indikator yang didukung : indeks reformasi

birokrasi dan indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik/SPBE).

6. PD 6 : Ketahanan bencana dan adaptasi perubahan iklim serta pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan untuk pembangunan rendah karbon, mendukung Prioritas Nasional (PN):
   PN 6 : Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim (indikator yang didukung (cakupan desa/kelurahan tangguh bencana, rasio taruna siaga bencana, cakupan pemanfaatan energi listrik berbasis EBT setiap tahun, cakupan pemanfaatan energi listrik berbasis EBT di kawasan pariwisata estate, indeks kualitas lingkungan hidup, persentase limbah B3 yang diangkut atau diolah, cakupan pembangunan TPA/TPSP/SPA terbangun lingkup provinsi, cakupan limbah domestik yang tertangani, persentase pengurangan dan penanganan sampah, cakupan lahan kritis yang tertangani, cakupan luasan hutan yang dimanfaatkan untuk perhutanan sosial).

Penjabaran 6 (enam) Prioritas Daerah yang disinergikan dengan 7 (tujuh) Prioritas Nasional seperti terlihat sebagai berikut:

PRIORITAS DAERAH 1 : Memperkuat Infrastuktur SDA Untuk Memperbesar Skala Usaha Pertanian dan Pengurangan Kemiskinan serta Stunting

NO	MASALAH/ ISU STRATEGIS	USULAN KEGIATAN PRIORITAS	INDIKATOR YANG DIDUKUNG	MENDUKUNG PN
1	Keterbatasan sumber air untuk memenuhi kegiatan ekonomi	1 Pembangunan dan Pemeliharaan Embung.	1. cakupan pembangunan embung dan bangunan penampung air	PN 5
			2. cakupan Pemeliharaan embung dan bangunan penampung air	PN 5
2	Ketersediaan air untuk mendukung produksi pertanian, peternakan, perkebunan, dan perikanan	2 Pembangunan saluran irigasi, pembangunan dan pemeliharaan jaringan air, dan sumur bor pada instalasi ternak dan UPT perikanan, PPI	1. cakupan pemeliharaan jaringan irigasi	PN1, PN 5
			2. cakupan pembangunan Irigasi	PN1, PN 5
3	Tingginya tingkat kerawanan pangan di Wilayah Nusa Tenggara		3 cakupan area pertanian yang terlayani jaringan irigasi	PN1, PN 5
			4 persentase penurunan desa rawan pangan	PN1, PN 5
4	Masih tingginya prevalensi stunting di NTT	3 Pembangunan dan Rehabilitas jaringan air bersih rumah tangga (SPAM) Penyediaan Sumber Air Minum (Sumur Air Dalam/ Sumur Bor) dan jaringan	1 menurunnya prevalensi stunting	PN3
		4 pengelolaan air minum di lokasi Kecamatan/desa pada Kabupaten prioritas nasional penanganan stunting	2 Cakupan KK yang dapat mengakses air minum layak	

PRIORITAS DAERAH 2 : Pembangunan Bidang Pendidikan, Kesehatan dan Pemerintahan Untuk Meningkatkan Kualitas SDM dan Pelayanan Publik

NO	MASALAH/ ISU STRATEGIS	USULAN KEGIATAN PRIORITAS	INDIKATOR YANG DIDUKUNG	MENDUKUNG PN
1.	Masih terbatasnya ketersediaan Sarpras kesehatan dalam rangka mendukung pelayanan kesehatan	1. Pengadaan Sarana Ambulans Gawat Darurat bagi puskesmas dilokasi tertinggi stunting Kabupaten prioritas Nasional (2 unit per kabupaten)	Peningkatan kualitas layanan sarpras, dan alkes untuk UKM & UKP	Terkait PN 2 dan PN 3
		2. Pembangunan Fasilitas Layanan Kesehatan rumah sakit umum pusat tipe Bberbasis kepulauan di Flores dan Sumba	Peningkatan kualitas layanan sarpras, dan alkes untuk UKM & UKP	Terkait PN 2 dan PN 3
		3. Penambahan Quota Jaminan Sosial bagi Keluarga miskin termasuk sasaran 1000 HPK-Ibu Hamil, Ibu Menyusui dengan Baduta	Cakupan masyarakat miskin yang tercover oleh jaminan sosial	Terkait PN 2
		4. Pengembangan SLRT – PUSKESOS pada 21 Kab Prioritas Penanganan stunting		Terkait PN 2 dan PN 3
		5. Penyediaan dan Pemberian Makanan tambahan dan RUTF bagi Balita dan Ibu Hamil untuk penanganan permasalahan gizi ibu dan anak serta menekan kasus stunting di 22 Kabupaten / Kota melalui DAK Khusus PMT ke Puskesmas	Menurunkan gizi kurang, gizi buruk, menurunnya prevelensi stunting	Terkait PN 3
2.	Rendahnya kuantitas dan kualitas SDM Pendidikan serta Penyebaran Tenaga pendidik yang belum merata	1. Rekrutmen Tenaga Kesehatan terutama Dokter dan tenaga Gizi untuk ditempatkan pada Layanan Kesehatan Tingkat Pertama	Rasio tenaga kesehatan	Terkait PN 3
		Rekrutmen Tenaga Pendidik dan Pengawas	Rasio Tenaga Pendidik & Distribusi	Terkait PN 3
		Pembangunan Unit Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) yang mendukung Pariwisata	Meningkatkan Rata-rata lama sekolah, APM, APS	Terkait PN 3

PRIORITAS DAERAH 3 : PENINGKATAN KERJASAMA MULTI PIHAK UNTUK PENGEMBANGAN RANTAI PASOK PARIWISATA BERBASIS MASYARAKAT

NO	MASALAH/ ISU STRATEGIS	USULAN KEGIATAN PRIORITAS		INDIKATOR YANG DIDUKUNG	MENDUKUNG PN
1	Belum optimalnya pengembangan potensi kawasan pariwisata berbasis pengembangan ekonomi lokal	1 Pengembangan Desa Wisata Terpadu di Mabar, Ngada, Alor, Rote Ndao, TTS, Belu, dan Sumba Timur melalui Kelembagaan BUMDes	1.1	Peningkatan cakupan desa wisata pada kawasan Pariwisata Estate	Terkait PN 1 dan PN 2
2	Belum optimalnya peningkatan nilai tambah komoditas unggulan wilayah yang mencakup sektor perikanan, perkebunan, peternakan, pertambangan dan pariwisata	2 Pengembangan BUMDes Komoditi Eksotik NTT (Kopi, Jeruk Keprok, Advokat, Kelapa, Cengkeh) di Kecamatan / Desa Miskin pada 21 Kabupaten Prioritas Stunting	2.1	Persentasi BUMDes Aktif	Terkait PN 1 dan PN 2
			2.2	Peningkatan Cakupan pemberdayaan kelompak masyarakat Desa	Terkait PN 1 dan PN 2
		3 Kerjasama antar daerah dalam koridor ME NTT untuk pemenuhan kebutuhan Pariwisata Estate	3.1	Peningkatan Kerjasama Antar Daerah	Terkait PN 1 dan PN 2
			3.2	Presnsetasi Peningkatan transaksi produk lokal di kawasan Pariwisata	Terkait PN 1 dan PN 2
3	Belum optimalnya integrasi konektivitas darat, laut, dan udara antar pulau di Wilayah Nusa Tenggara	4 Distrubusi pemenuhan kebutuhan ke kawasan Pariwisata Estate	4.1	Presentasi Peningkatan Cakupan Distribusi Barang dalam Wilayah NTT	Terkait PN 2 dan PN 5

PRIORITAS DAERAH 4 : Pengembangan Hilirisasi Produk Pertanian Unggulan Untuk Meningkatkan Penyerapan Tenaga Kerja dan Memperkuat Pemulihan Ekonomi Daerah

NO	MASALAH/ ISU STRATEGIS	USULAN KEGIATAN PRIORITAS	INDIKATOR YANG DIDUKUNG	MENDUKUNG PN
1.	Belum optimalnya peningkatan nilai tambah komoditas unggulan wilayah yang mencakup sektor perikanan, perkebunan, peternakan, pertambangan dan pariwisata	1. Peningkatan kapasitas masyarakat dalam pengolahan produk unggulan daerah, dari bahan mentah menjadi bahan setengah jadi atau produk akhir	1 Peningkatan Cakupan pemberdayaan kelompak masyarakat Desa	Terkait PN 2
		2. Perbaikan pengemasan produk - produk unggulan daerah	2 Peningkatan Pendapatan Masyarakat	Terkait PN 2
		3 Kerja sama dengan pihak ketiga dalam hal pengelolaan bahan mentah menjadi produk jadi yang siap dipasarkan		
2.	Rendahnya kapasitas masyarakat/SDM lokal dalam memanfaatkan berbagai peluang ekonomi	1 Peningkatan kapasitas masyarakat/SDM lokal dalam memanfaatkan berbagai peluang ekonomi	1 Peningkatan Cakupan pemberdayaan kelompak masyarakat Desa	Terkait PN 1
		2 Penyediaan informasi pasar ataupun peluang pemasaran produk	2 Cakupan pemanfaatan informasi pasar	Terkait PN 1
			3 Peningkatan nilai transaksi UMKM	Terkait PN 1
		3 Membuka akses permodalan untuk UKM dan UMKM	44 Cakupan UMKM yang mendapat akses permodalan	Terkait PN 1
3.	Masih tingginya tenaga kerja tidak berbayar	1 Peningkatan areal tanam dan produksi sektor-sektor produktif pertanian, peternakan, perikanan dan kehutanan yang melibatkan pola padat karya	1 Penurunan Angka kemiskinan	Terkait PN 1
		2 Pembangunan infrastruktur dengan melibatkan masyarakat melalui pola padat karya	2 Peningkatan pendapatan masyarakat	Terkait PN 1

PRIORITAS DAERAH 5 :REVOLUSI MENTAL DAN PENERAPAN TEKNOLOGI SERTA INFORMASI UNTUK MEWUJUDKAN REFORMASI BIROKRASI

NO	MASALAH/ ISU STRATEGIS	USULAN KEGIATAN PRIORITAS	INDIKATOR YANG DIDUKUNG	MENDUKUNG PN
1.	Masih kurangnya pemanfaatan teknologi dan informasi dalam pelaksanaan kerja birokrasi untuk mendukung pencapaian reformasi birokrasi	1. Penggunakan TI dalam pelaksanaan kerja birokrasi	1 Indeks Reformasi Birokrasi	Terkait PN 4 dan PN 7
		2. Pengembangandan pemanfaatan aplikasi pemerintahan (e-government/smart prov)	2 Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Terkait PN 4 dan PN 7

PRIORITAS DAERAH 6 : Ketahanan Bencana dan Adaptasi Perubahan Iklim serta Pengelolaan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan untuk Pembangunan Rendah Karbon

NO	MASALAH/ ISU STRATEGIS	USULAN KEGIATAN PRIORITAS	INDIKATOR YANG DIDUKUNG	MENDUKUNG PN
1	Tingginya tingkat kerentanan bahaya bencana kekeringan, kebakaran, tsunami, dan gempa bumi	1 Penyediaan informasi dan kesiapan untuk peringatan dini bencana	1 Cakupan desa/kelurahan tangguh bencana	Terkait PN 6
		2 Mitigasi dan peringatan dini bencana	1 Rasio Taruna siaga bencana	
2	Belum optimalnya pemanfaatan sumber EBT sebagai penopang pemenuhan kebutuhan energi untuk Wilayah Kepulauan Nusa Tenggara	1 Pembangunan dan pengelolaan PLTS/ PLTA/PLMH (Pembangkit listrik micro hydro	1 Cakupan pemanfaatan energi listrik berbasis EBT setiap tahun	
			2 Cakupan pemanfaatan energi listrik berbasis EBTdi kawasan pariwisata estate	
3	Belum tertanganinya limbah B3 dan Masih rendahnya sarpras dan kesadaran masyarakat dalam pengelolaan sampah	1 Pengelolaan dan pemanfaatan insenerator	1 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	
			2 Persentase limbah B3 yang diangkut atau diolah	
		1 Pembangunan TPA/TPST/SPA terbangun lingkup provinsi	1 Cakupan pembangunan TPA/ TPST/SPA terbangun lingkup provinsi	
		2 Peningkatan kapasitas masyarakat dalam pengelolaan sampah	1 Cakupan limbah domestik yang tertangani	
			2 Persentase pengurangan dan penanganan sampah	
4	Adaptasi perubahan iklim dan pengurangan emisi gas rumah kaca	4. Rehabilitasi lahan kritis dan hutan manrove, pemanfaatan kawasan hutan untuk perhutanan sosial	1 Cakupan lahan kritis yang tertangani, cakupan luasan hutan yang dimanfaatan untuk	

4.3.3 Prioritas Lokasi Pembangunan RKPD 2022

Dengan pendekatan perencanaan dan penganggaran secara THIS aspek spasial lokasi pembangunan merupakan komponen penting dalam mewujudkan pembangunan yang efisien, efektif serta berdaya guna dan berhasil guna. Penetapan lokasi pembangunan harus mengacu pada Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur 2010-2030, dengan memperhatikan data dan capaian pembangunan masing-masing kabupaten/kota sesuai dengan prioritas pembangunan daerah tahun 2022.

Terdapat dua strategi pengembangan kewilayahan pada RKPD 2022, yaitu strategi pertumbuhan dan strategi pemerataan. Dari 2 (dua) strategi ini, telah ditetapkan prioritas lokasi pembangunan, yaitu berdasarkan pertumbuhan, adalah lokasi yang disepakati antara provinsi dan kabupaten/kota untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, terkait dengan pengembangan pariwisata ataupun pusat produksi untuk pertumbuhan wilayah, Selain itu juga telah ditetapkan lokasi yang disepakati antara provinsi dan kabupaten/kota untuk pemerataan, hal ini lebih dikaitkan dengan layanan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat di bidang pendidikan, kesehatan dan infrastruktur dasar untuk pengurangan angka kemiskinan dan stunting.

Adapun strategi pertumbuhan RKPD NTT tahun 2022 meliputi :

1. Penguatan rantai nilai industri pariwisata melalui pengembangan DPP Labuan Bajo sesuai rencana induk (masterplan) kawasan pariwisata yang telah disusun.
2. Peningkatan pembangunan infrastruktur konektivitas yang terintegrasi darat, laut, udara dan antar pulau di wilayah Nusa Tenggara Timur.
3. Penguatan layanan perkotaan dalam menopang pembangunan pariwisata di wilayah Nusa Tenggara Timur yang berskala internasional.
4. Penguatan teknologi telekomunikasi dan informasi digital dalam menopang pembangunan wilayah Nusa Tenggara Timur.
5. Optimalisasi pengembangan komoditas unggulan wilayah yang tersebar pada sentra pertumbuhan wilayah diantaranya SKPT dan KPPN.
6. Pengembangan sumber-sumber EBT untuk menopang pemenuhan energi di wilayah Nusa Tenggara Timur.
7. Penyiapan SDM untuk memenuhi kebutuhan industri pariwisata dan industri berbasis komoditas unggulan melalui penguatan sekolah vokasi serta pengembangan program link and match dengan industri.

Sedangkan strategi pemerataan RKPD NTT tahun 2022 meliputi :

1. Pemerataan akses rumah tangga pada pelayanan pendidikan dan kesehatan untuk mempercepat pembangunan manusia khususnya pendidikan dasar dan menengah yang berkualitas.

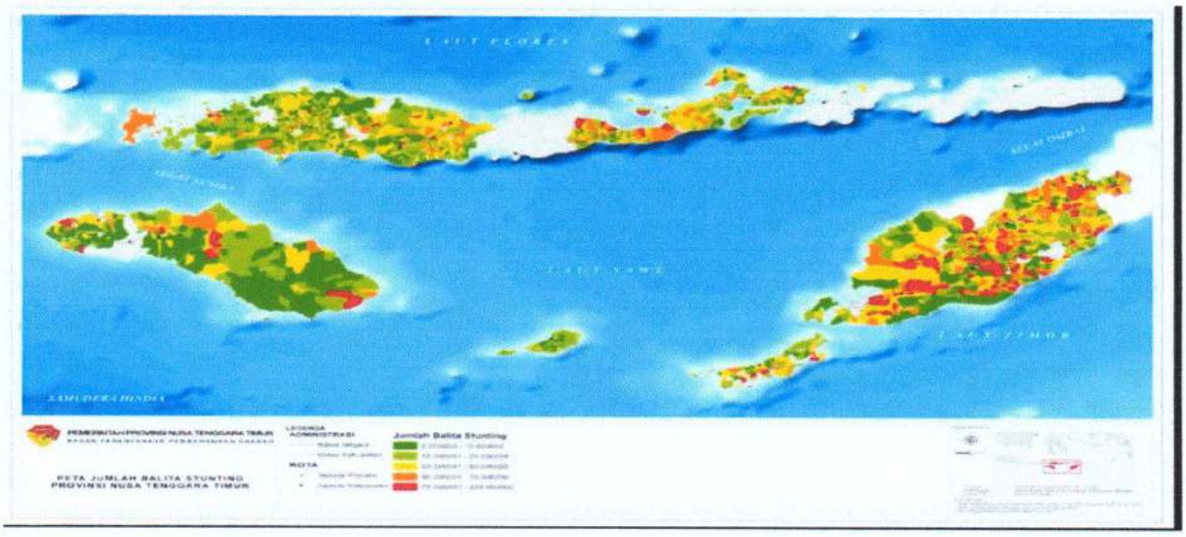
2. Pemanfaatan teknologi telekomunikasi dan informasi digital dalam menopang pengembangan ekonomi masyarakat.
3. Percepatan penerapan SPM.
4. Perkuatan UMKM dan IKM berbasis komoditas unggulan.
5. Pengembangan ekonomi lokal masyarakat berbasis komoditas unggulan untuk mempercepat pengentasan daerah tertinggal, perbatasan serta pulau kecil terluar.
6. Peningkatan investasi mitigasi struktural dan non struktural serta adaptasi masyarakat terhadap perubahan iklim di daerah rawan bencana berbasis kearifan lokal masyarakat.

Dari 2 (dua) strategi ini, telah ditetapkan prioritas lokasi pembangunan, yaitu berdasarkan pertumbuhan, adalah lokasi yang kabupaten/kota yang ditentukan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, terkait dengan pengembangan pariwisata ataupun pusat produksi untuk pertumbuhan wilayah. Selain itu juga telah ditetapkan lokasi yang di kabupaten/kota untuk pemerataan, hal ini lebih dikaitkan dengan layanan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat di bidang pendidikan, kesehatan dan infrastruktur dasar khususnya dalam pengentasan kemiskinan dan stunting.

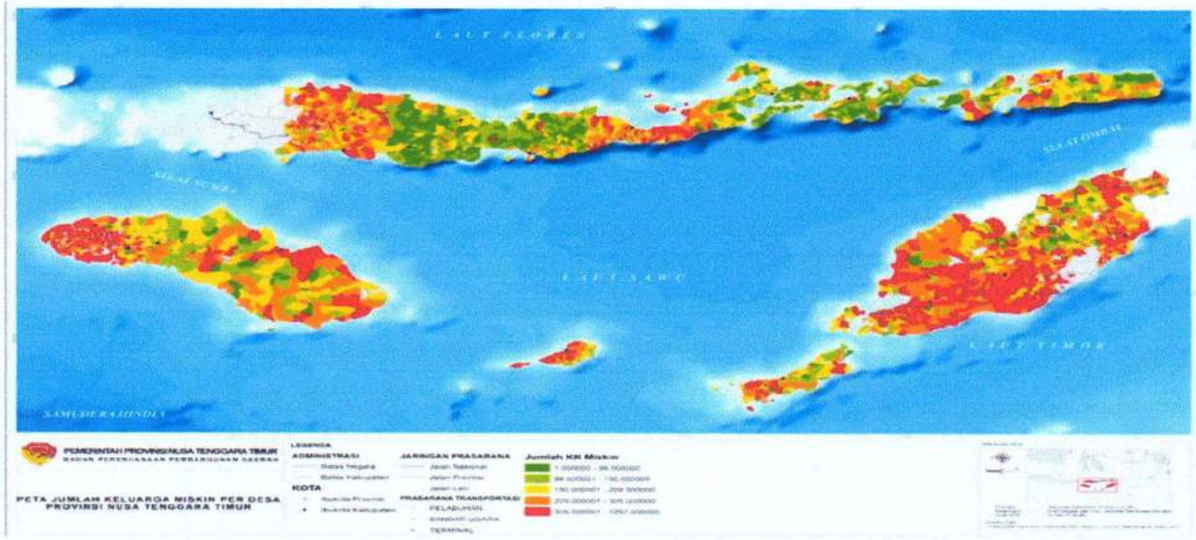
Tabel 4.8
Lokasi Prioritas sesuai Strategi Pertumbuhan dan Pemerataan

No	Wilayah Fokus Pertumbuhan DESTINASI WISATA 2022	Pengembangan Wilayah Fokus Pemerataan, untuk PENURUNAN KEMISKINAN DAN ERADIKASI STUNTING
	Lanjutan pembangunan pada 7 Destinasi yang dibangun 2019 & 2020 dan penambahan lokasi destinasi pariwisata estate pada tahun 2022	Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor: 179/KEP/HK/2021 tentang Lokasi Prioritas Penanganan Kemiskinan dan *Stunting* di Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2022 di 22 Kabupaten/Kota. Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor: 36/KEP/HK/2020 tentang Perubahan atas Lampiran Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 338/KEP/HK/202 tentang Desa/ Kelurahan Model Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2021.
1.	Liman, Semau	
2.	Wolwar, Alor	
3.	Fatumnasi, TTS	
4.	Mulut Seribu, Rote Ndao	
5.	Praimadita, Sumba Timur	
6.	Lamalera, Lembata	
7.	Koanara, Sikka	
	Lanjutan Pembangunan destinasi wisata pada tahun 2021	
8.	Oeseli	
9.	Waerebo	
10.	Kelabba Maja, Sabu Raijua	

Gambar 4.5
Peta Sebaran Stunting per kabupaten/kota se-NTT



Gambar 4.6
Peta Kemiskinan per Kabupaten/Kota se-NTT



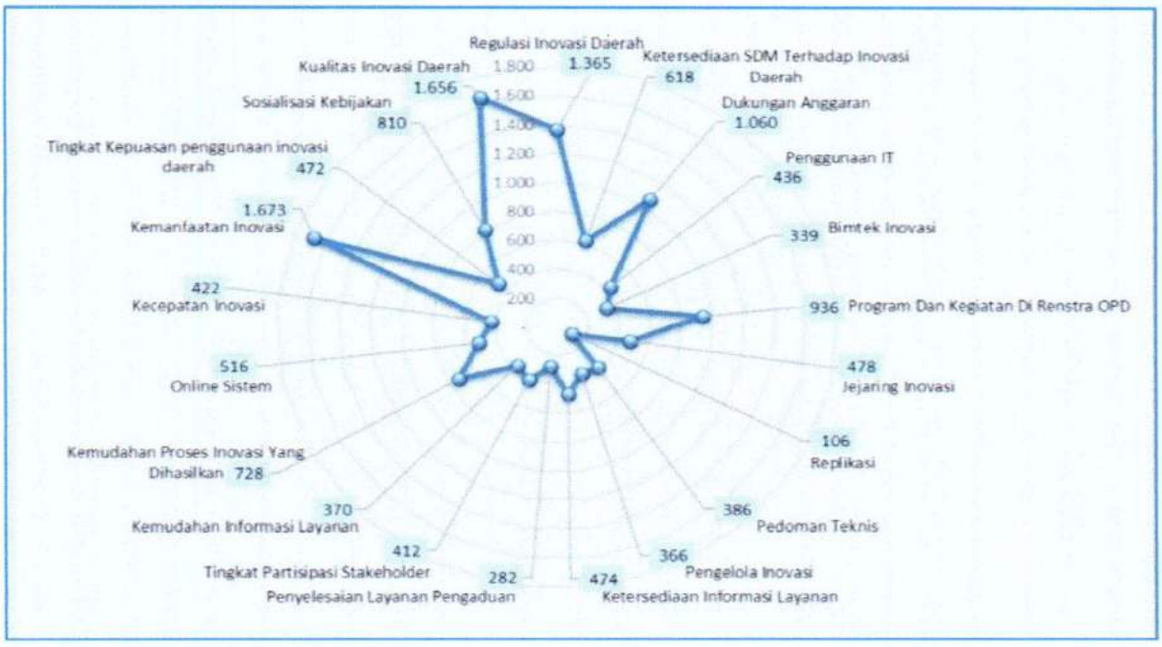
4.4 INOVASI DAERAH

Keberhasilan pembangunan daerah Nusa Tenggara Timur perlu dilaksanakan berdasarkan strategi dan arah kebijakan pembangunan provinsi Nusa Tenggara Timur, baik yang sifatnya jangka menengah sebagaimana tercantum dalam dokumen Perencanaan Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD), maupun yang sifatnya tahunan sebagaimana yang tercantum dalam dokumen perencanaan tahunan (RKPD). Guna meningkatkan kualitas hasil pembangunan, perlu didukung pula oleh inovasi pada perencanaan pembangunan, baik inovasi dalam tataran proses perencanaan maupun dalam program pembangunan daerah.

Sampai dengan Tahun 2020 sesuai dengan konsep pembangunan berkelanjutan maka Kementerian Dalam Negeri RI mengembangkan model Innovation Government Award (IGA) untuk mengukur potensi dan kinerja pemerintah daerah dalam menciptakan iklim berinovasi dalam penyelenggaraan pemerintahan serta menentukan positioning inovasi di lingkungan di Indonesia. Hasil akhir dari IGA adalah indeks inovasi daerah dapat dijadikan referensi pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan pembangunan yang lebih inovatif, tepat sasaran, mendorong inovasi usaha-usaha untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

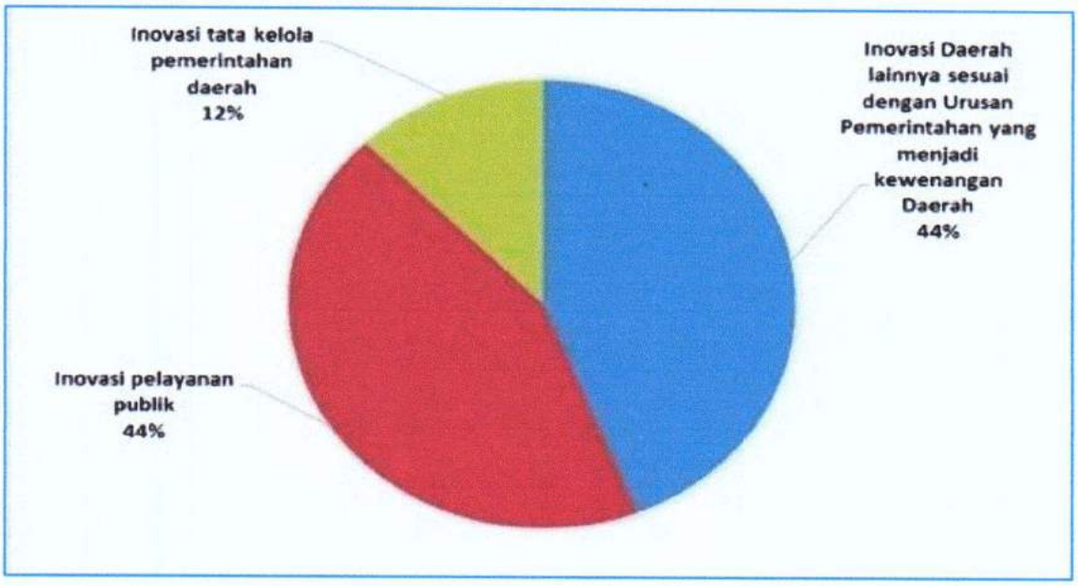
Dari 21 indikator aspek satuan inovasi daerah, skor indikator tertinggi Pemda Provinsi NTT (diatas 600 poin) berada pada 8 indikator, yaitu: Kemanfaatan Inovasi (1673), Kualitas Inovasi Daerah (1656), Regulasi Inovasi Daerah (1365), Dukungan Anggaran (1060), Program dan Kegiatan di Renstra OPD (936), Sosialisasi Kebijakan (810), Kemudahan Proses Inovasi Yang Dihasilkan (728), dan Ketersediaan SDM Terhadap Inovasi Daerah (618). Sedangkan 13 indikator lainnya yang perlu mendapat perhatian untuk ditingkatkan lagi kedepan, yaitu: Online Sistem, Jejaring Inovasi, Ketersediaan Informasi Layanan, Tingkat Kepuasan penggunaan inovasi daerah, Penggunaan IT, Kecepatan Inovasi, Tingkat Partisipasi Stakeholder, Pedoman Teknis, Bimtek Inovasi, Penyelesaian Layanan Pengaduan, dan Replikasi. Berikut ini grafik indikator satuan inovasi daerah Provinsi NTT Tahun 2020.

Gambar 4.7. Skor Indikator Satuan Inovasi Daerah NTT Tahun 2020



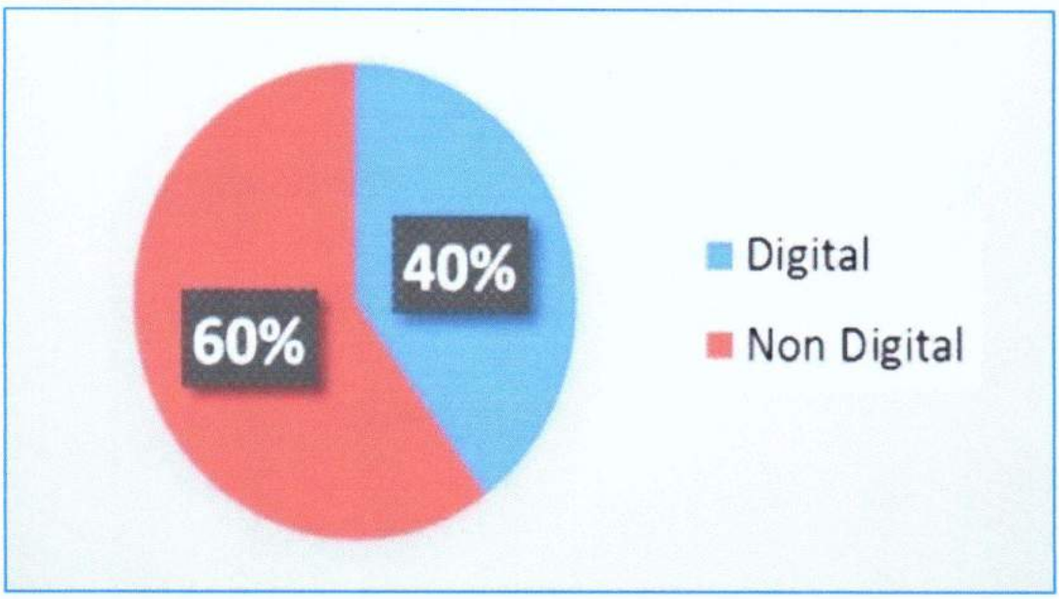
Berdasarkan bentuk inovasi dalam IGA tahun 2020, dari 130 inovasi Pemda Provinsi NTT (lihat grafik 4.8.), ada 16 buah (12%) inovasi tata kelola pemerintahan daerah, 57 buah (44%) inovasi pelayanan publik, dan 57 buah (44%) Inovasi Daerah lainnya sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

Gambar 4.8. Inovasi Pemda NTT berdasarkan Bentuk Inovasi



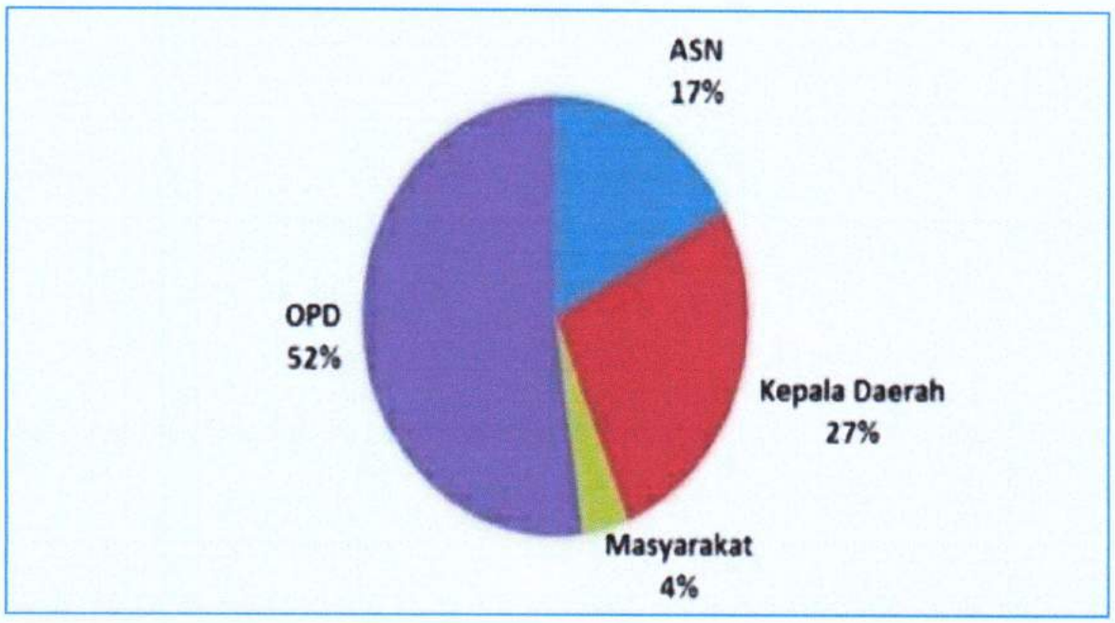
Inovasi Pemerintah Daerah Provinsi NTT, dilihat dari jenis inovasi digital dan non digital menunjukan bahwa 40% (52 buah) inovasi berjenis digital dan 60% (78 buah) inovasi berjenis non digital. Untuk jelasnya dapat dilihat pada grafik berikut ini.

Gambar 4.9. Inovasi Penda NTT Berdasarkan jenis Inovasi



Apabila ditinjau dari inisiator inovasinya menunjukan bahwa 130 inovasi Pemda NTT, 27% (35 buah) inisiatornya adalah Kepala Daerah, 17% (22 buah) inisiator nya adalah ASN, 52% (68 buah) inisiatornya berasal dari Perangkat Daerah, dan 4% (5 buah) inisiatornya berasal dari masyarakat. Untuk jelasnya dapat dilihat pada grafik berikut ini.

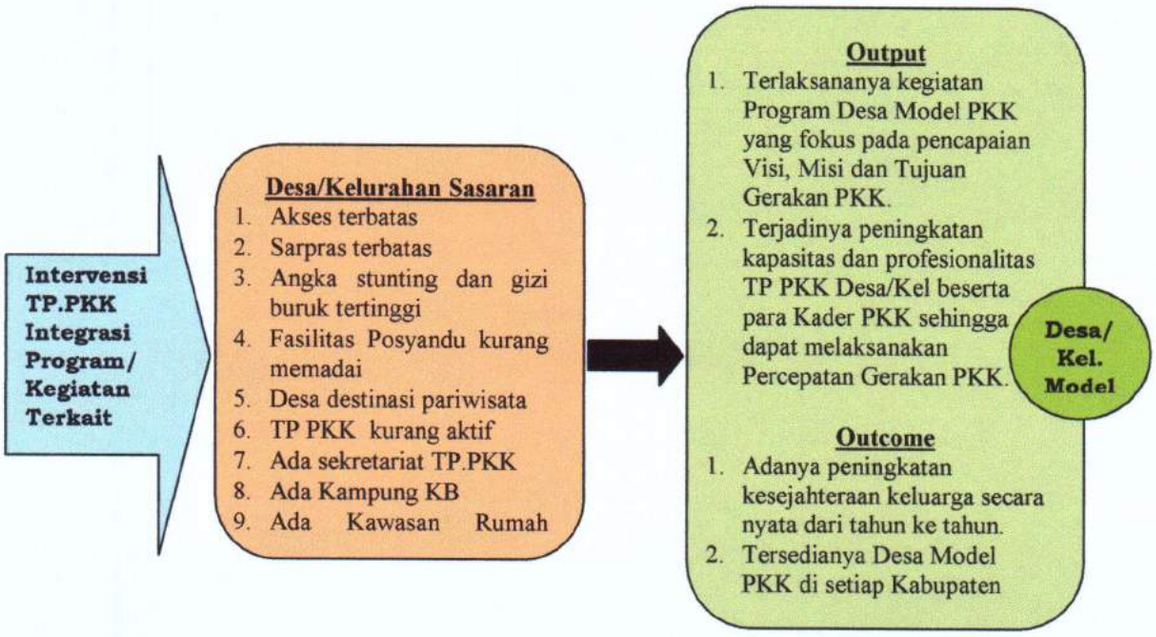
Gambar 4.10. Inovasi Pemda NTT Berdasarkan Inisiator Inovasi



4.4.1 Desa/Kelurahan Model Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga

Desa/Kelurahan Model Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga merupakan desa/kelurahan yang diintervensi oleh TP PKK Provinsi NTT bersama-sama dengan TP PKK Kabupaten, TP PKK Kecamatan, dan bersinergi dengan OPD dan Organisasi Kemasyarakatan terkait serta didukung oleh Pemerintah Desa untuk terjadinya Percepatan Gerakan PKK dalam upaya peningkatan Kesejahteraan Keluarga. Komponen modelnya :

Gambar 4.11.
Model Desa/Kelurahan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga



1. Input
   a. Regulasi
      - ❖ Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018-2023 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018-2023.
      - ❖ Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 34 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembentukan Desa/Kelurahan Model Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Provinsi Nusa Tenggara Timur.
      - ❖ Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor: 36/KEP/HK/2020 tentang Perubahan atas Lampiran Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 338/KEP/HK/2020 tentang Desa/Kelurahan Model Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2021

   b. Anggaran

      Dukungan APBD Provinsi NTT yang dialokasikan melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi NTT.

c. Sumberdaya Manusia

Aparat/ASN pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi NTT, Tim Penggerak PKK Provinsi NTT, Tim Penggerak PKK 22 Kabupaten/Kota, Tim Penggerak PKK 22 Kecamatan, Tim Penggerak PKK 22 Desa/Kelurahan dan pendamping lapangan 2 orang setiap Desa/Kelurahan.

d. Institusi

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi NTT sebagai penggerak utama, didukung integrasi program/kegiatan dari Perangkat daerah terkait dan Tim Penggerak PKK Provinsi NTT, Tim Penggerak PKK 22 Kabupaten/Kota, Tim Penggerak PKK 22 Kecamatan, Tim Penggerak PKK 22 Desa/Kelurahan.

e. Komponen Pendukung

Desa/Kelurahan Model Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga didukung dengan komponen antara lain 22 Desa/Kelurahan Model, integrasi dukungan program/kegiatan dari Instansi Pemerintah dan Lembaga terkait serta Pemerintah Desa/Kelurahan.

2. Proses

a. Desa/Kelurahan Model Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga dilaksanakan melalui kolaborasi TP PKK Provinsi bersama TP PKK kabupaten/kota dan kecamatan melakukan intervensi dan bersinergi dengan perangkat daerah dan Organisasi Kemasyarakatan terkait dan didukung oleh Pemerintah Desa/Kelurahan.

b. Proses yang dilakukan meliputi :

- ❖ Penyiapan dan proses dukungan regulasi.
- ❖ Penyiapan dan proses dukungan anggaran serta Petunjuk Pelaksanaan/Petunjuk Teknis.
- ❖ Penilaian dan penetapan desa/kelurahan model.
- ❖ Koordinasi Integrasi program/kegiatan terkait antara lain :
  - Fasilitas peningkatan Posyandu kurang memadai.
  - Fasilitasi peningkatan Desa/Kelurahan destinasi pariwisata.
  - Fasilitasi peningkatan pengelolaan kampung Keluarga Berencana.
  - Fasilitasi pengembangan Kawasan Rumah Pangan Lestari.

- Peningkatan Layanan digitalisasi (desa berbasis digital) melalui sistem informasi manajemen PKK dan aplikasi pasar beta.com

❖ Pembinaan dan Bimbingan teknis (Bimtek) oleh TP PKK provinsi, TP PKK kabupaten/kota dan TP PKK kecamatan dengan didukung oleh kepala desa dan perangkatnya, organisasi pemerintah daerah, dan organisasi kemasyarakatan, meliputi :

- Pemberian Makanan Tambahan (PMT) bagi ibu hamil, ibu menyusui, bayi, balita, anak PAUD dan anak SD untuk pencegahan stunting dan gizi buruk.
- Peningkatan ekonomi keluarga melalui Halaman Asri, Teratur, Indah, Nyaman (HATINYA) PKK dalam bentuk Kebun pertanian 2 kelompoktani setiap Desa/Kelurahan.
- Sosialisasi/pemasyarakatan pola makan dengan menu B2SA serta resep masakan berbahan dasar kelor dan pangan lokal untuk pencegahan stunting.
- Pengembangan potensi anak dan remaja melalui Warung Bakat dan Minat (Warung Bakmi).
- Kreatifitas kelompok lanjut usia .
- Peningkatan sarana prasarana bagi Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
- Pemberdayaan sanggar budaya dan pelestarian budaya.
- Pemberdayaan kelompok remaja putri untuk usaha ekonomi.
- Bantuan pengadaan desa/kelurahan di masa pandemi covid.

❖ Pendampingan oleh 2 pendamping/kader TP PKK setiap desa/kelurahan.

❖ Supervisi, monitoring, evaluasi dan pelaporan.

c. Masalah yang dihadapi dalam pelaksanaan Desa/Kelurahan Model Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga, antara lai :

❖ Dukungan integrasi program/kegiatan dari Perangkat daerah terkait masih terbatas.

❖ Keterlibatan stakeholder terkait terutama non pemerintahan masih terbatas.

❖ Dukungan alokasi dana/anggaran desa/kelurahan masih belum terpadu dengan dukungan anggaran dari Provinsi.

- ❖ Kapasitas dan kapabilitas pendamping, kelembagaan dan masyarakat di desa/kelurahan masih perlu ditingkatkan.

3. Output
   a. Terlaksananya kegiatan Program Desa Model PKK yang fokus pada pencapaian Visi, Misi dan Tujuan Gerakan PKK.
   b. Peningkatan kapasitas dan profesionalitas TP PKK Desa/Kel beserta para Kader PKK sehingga dapat melaksanakan Percepatan Gerakan PKK.

4. Outcome
   a. Adanya peningkatan kesejahteraan keluarga secara nyata dari tahun ke tahun.
   b. Tersedianya Desa Model PKK di setiap Kabupaten yang dapat dijadikan tempat pembelajaran/replikasi bagi TP PKK Desa di sekitarnya.

4.4.2 Pariwisata Estate

Pariwisata estate NTT merupakan pembangunan kawasan industri pariwisata perdesaan berkelanjutan dimana semua jasa dan kelengkapannya ada di sana meliputi Atraksi, Aksesibilitas, Akomodasi, Amenitas, Aktivitas (5A) dan berbasis komunitas serta didukung dengan kebijakan penataan kawasan potensi wisata. Pada aspek aktivitas dilakukan melalui penataan yang memberikan ruang partisipatif bagi semua stakeholder terkait, pada aspek amenitas dikembangkan model bisnis dan kemitraan yang dapat mendukung peningkatan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat, aspek atraksi dilakukan melalui penataan pengelolaannya dan memberikan ruang bagi pengembangan kegiatan wirausaha yang dapat menciptakan dampak sosial bagi masyarakat (sociopreneur), aspek akomodasi dilakukan melalui penyediaan tempat bermalam/beristirahat yang layak, aman dan memenuhi persyaratan kesehatan/sanitasi yang didukung dengan sistem pembiayaan terpadu, aspek aksesibilitas dilakukan melalui pembangunan prasarana desa dan infrastruktur yang mendukung lokasi wisata yang layak, aman dan dapat dijangkau baik secara individu maupun rombongan.

Gambar 4.12.
Pengembangan Pariwisata Estate NTT



Kondisi ini didukung dengan sinergi antara kepariwisataan dengan ekonomi kreatif dengan 3 fokus pengembangan kepariwisataan NTT yaitu pengembangan destinasi, pengembangan wisata minat khusus dan pengembangan pasar wisatawan berkelanjutan.

1. Input
   a. Regulasi
      - ❖ Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Provinsi NTT.
      - ❖ Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018-2023 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018-2023.
      - ❖ Peraturan Gubernur Nomor 85 Tahun 2019 tentang Pedoman Percepatan Pelaksanaan Pengembangan Pariwisata Estate di provinsi NTT tahun 2019- 2023.

   b. Anggaran

      Dukungan APBD Provinsi NTT yang dialokasikan melalui Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi NTT yang didukung dengan Anggaran pada Perangkat Daerah terkait.

   c. Sumber Daya Manusia

Aparat/ASN pada Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi NTT, Perangkat Daerah terkait dan Tim Penggerak PKK Provinsi sampai Desa/Kelurahan, yang didukung dengan petugas lapangannya.

d. Institusi

Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi NTT sebagai Penggerak utama/manajemen pariwisata estate, didukung oleh kolaborasi Perangkat Daerah yang terkait dengan pengembangan destinasi (PUPR, Perhubungan, kehutanan, perikanan, Kominfo) pemasaran pariwisata (BKPMD), pengembangan industri (Perindag, Pertanian, Peternakan,Koperasi, Kebudayaan) dan pengembangan kelembagaan (Pendidikan, PMD dan Tenaga Kerja) serta BUMDes.

e. Potensi kawasan Perdesaan

Pengembangan potensi kawasan pariwisata perdesaan pada setiap kabupaten satu kawasan pariwisata perdesaan (22 kawasan), dengan prioritas pertama pada 7 kawasan pariwisata pedesaan yaitu Kawasan Mutis (Kabupaten TTS), Kawasan Pantai Liman (Kabupaten Kupang), Kawasan Kampung Adat Primadita (Kabupaten Sumba Timur), Kawasan Mulut Seribu (Kabupaten Rote Ndao), Kawasan Moru (Kabupaten Alor), Kawasan Lamalera (Kabupaten Lembata) dan Kawasan Kelimutu (Kabupaten Ende).

f. Sarana prasarana

Pembangunan dan pengembangan sarana prasarana yang sesuai dengan kebutuhan masing-masing kawasan pariwisata perdesaan dan memenuhi 5A yaitu Atraksi, Aksesibilitas, Akomodasi, Amenitas dan Aktivitas.

2. Proses

a. Pariwisata estate merupakan pembangunan kawasan industri pariwisata secara terpadu dan dinamis yang mampu menyediakan pertumbuhan ekonomi yang cepat dalam hal kesempatan kerja, pendapatan, taraf hidup dalam mengaktifkan sektor produksi. Sekaligus dapat menjadikan sektor pariwisata sebagai penggerak utama (prime mover) ekonomi di daerah dan memenuhi unsur 5A pariwisata.

b. Proses yang dilakukan meliputi :

- Penelaahan regulasi yang mendukung dan pembuatan regulasi baru untuk memperkuat pelaksanaan pariwisata estate.

- ❖ Identifikasi dan pemetaan potensi pengembangan destinasi pariwisata, pemasaran pariwisata, pengembangan industri pariwisata dan pengembangan kelembagaan pariwisata sebagai kawasan wisata.
- ❖ Penetapan 1 kawasan pariwisata perdesaan pada setiap Kabupaten di NTT (22 kawasan) dan 7 kawasan pariwisata perdesaan prioritas pertama.
- ❖ Melakukan pemetaan dukungan dan tanggung jawab dari Perangkat Daerah dan mendorong keterlibatan stakeholder terkait untuk pemenuhan 5A di pariwisata estate.
- ❖ Melakukan koordinasi dukungan kebijakan dan dukungan teknis dengan pemerintah kabupaten/kota, pemerintah kecamatan dan pemerintah desa/kelurahan.
- ❖ Melakukan pembangunan, pengembangan untuk pemenuhan unsur 5A pada pariwisata estate sesuai tahapannya setiap tahun.
- ❖ Melakukan upaya-upaya percepatan pelaksanaan pengembangan pariwisata estate secara terkoordinasi dan terpadu.
- ❖ Melakukan pembinaan dan pengawasan percepatan pelaksanaan pariwisata estate secara berjenjang sampai tingkat lapangan/kawasan.
- ❖ Meningkatkan kesiapan dan partisipasi masyarakat terutama di sekitar lokasi pariwisata estate.
- ❖ Melakukan supervisi monitoring, evaluasi dan pelaporan secara berjenjang dan terpadu.

c. Masalah yang dihadapi dalam pelaksanaan pariwisata estate antara lain :

- ❖ Dukungan anggaran APBD provinsi yang terbatas belum dapat memenuhi keseluruhan tahapan pengembangan 21 pariwisata estate.
- ❖ Belum semua stakeholder terkait ikut serta berperan dan memberikan kontribusi dalam mendukung pembangunan pariwisata estate.

3. Output

a. Terbangunnya 22 kawasan industri pariwisata (pariwisata estate) di 22 Kabupaten/Kota.

b. Terbangunnya 22 desa/kelurahan destinasi wisata.

4. Outcome
   a. Meningkatnya jumlah dan kualitas infrastruktur fisik dan non fisik penunjang sektor pariwisata.
   b. Meningkatnya kunjungan wisatawan di daerah.
   c. Bertumbuhnya Usaha Kecil Menengah (UKM) dan Industri Kecil Menengah (IKM).

4.4.3 Aplikasi SI MANDATARIS (Sistem Informasi Data Strategis)

1. Input
   a. Regulasi

      Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018-2023 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018-2023, khususnya Prioritas Pembangunan Daerah Reformasi Birokrasi.

   b. Anggaran

      Dukungan APBD Provinsi NTT yang dianggarkan melalui Bappelitbangda Provinsi NTT Tahun 2021 (Tahap I) dan dilanjutkan pada Tahun Anggaran 2022 (Tahap II).

   c. Sumber Daya Manusia

      Secara umum sumber daya yang dibutuhkan adalah kolaborasi unsur ASN, Statistik dan Tenaga Pendamping Profesional Desa serta tenaga IT dan administrator baik di lapangan maupun yang membackup data server.

   d. Institusi

      Bappelitbangda Provinsi NTT sebagai motor penggerak utama yang berkolaborasi dengan Badan Pusat Statistik Provinsi NTT sebagai penyedia Master Data Survey dan Analisis Statistika. Selanjutnya Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang di dukung oleh Tenaga Pendamping Profesional Desa sebagai penggerak utama survey yang akan dilakukan kepada masyakat.

   e. Teknologi

      Jika pada Tahap I Aplikasi SI MANDATARIS masih berbasis web/ web-base yang dikelola menggunakan server khusus SI

MANDATARIS maka pengembangan pada Tahap II adalah berbasis Mobile Aplication Surveyor (Android).

f. Sarana Prasarana

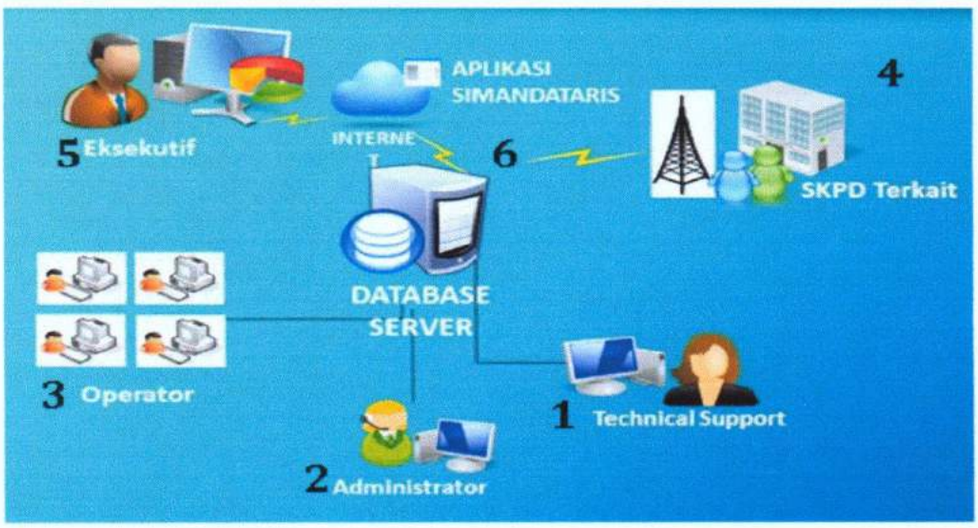
Untuk kebutuhan penyediaan data dibutuhkan Penyediaan Infrastruktur, topologi sisytem dan Kelembagaan yang melibatkan Sumber Daya Manusia untuk mengelolanya.

2. Proses

a. Langkah awal SI MANDATARIS diawali oleh data potensi desa (PODES) dan Sensus yang dilakukan oleh BPS melalui Tenaga Pendamping Profesional Desa serta kompilasi database penerima program bantuan dari berbagai Lembaga (untuk kepentingan pembangunan prioritas berupa database penduduk miskin *"by name by address"*.

b. Pilot Project SI MANDATARIS pada Tahap I adalah 10 (Sepuluh) Kabupaten/Kota se Provinsi NTT. Pada Tahap II di Tahun 2022 diaplikasikan ke 12 Kabupaten/Kota antara lain : Manggarai, Ngada, Nagekeo, Ende, Sikka, Flores Timur, Lembata, Alor, Belu, TTU, Kota Kupang, dan Rote Ndao. Sehingga penyelesaian untuk Tahap I dan II meliputi 22 Kabupaten/Kota se Provinsi NTT.

c. Cara kerja Infrastruktur, Topologi System dan Kelembagaan sebagai berikut :



❖ Technical Support dilakukan untuk proses implementasi SIMANDATARIS. Kelengkapan yang dibutuhkan antara lain mempersiapkan Buku I (Pedoman Kepala Bps, Bappelitbangda, Diskominfo, Dinas Terkait (Provinsi), Buku 2 (Pedoman Pemeriksaan, Pelengkapan Dan Pemantauan (Correction, Completion & Monitoring) SI MANDATARIS dan Mekanisme

Penyelenggaraan Forum Konsultasi Publik SI MANDATARIS Bagi Petugas Pemeriksa), Buku 3 (Pedoman Pengumpulan dan Entri Data dan Mekanisme Penyelenggaraan Forum Konsultasi Publik SI MANDATARIS bagi Petugas Pencacahan), Buku 4 (Pedoman Penjaminan Kualitas (Pemeriksaan) dan Uji Petik/Post Enumeration Survey (Pes) Data SI MANDATARIS di Level Desa/ Kelurahan).

- ❖ Administrator melakukan verifikasi data dan instrumen komponen data SI MANDATARIS yang dibutuhkan pada pengambilan data di lapangan.
- ❖ Operator melakukan Implementasi / pencacahan data by name by adrees di lapangan berdasarkan instrumen komponen data yang diberikan;
- ❖ SKPD terkait sebagai pendukung database tambahan yang diperlukan SI MANDATARIS seperti Dinas Sosial dan Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Catatan Sipil.
- ❖ Eksekutif sebagai pucuk pimpinan tertinggi didalam pengambilan kebijakan dan keputusan terkait seluruh pelaksanaan SI MANDATARIS.
- ❖ Tim IT Pengelola Database Server dan Aplikasi SI MANDATARIS dengan sistem Single Database dan Aplikasi serta interkoneksi dengan Aplikasi Pendukung SIMANDATARIS lainnya yang bersifat real time dengan Fitur Aplikasi antara lain:
  - Pendataan Kemiskinan;
  - Indikator Kemiskinan; indikator kemiskinan keluarga yang mengacu pada data/formulir yang dipakai untuk menghitung indeks kemiskinan;
  - Single Database & Aplikasi;
  - Peta Interaktif; dan
  - Laporan (Data Grafis dan Tabel).

d. Potensi Pengembangan SI MANDATARIS adalah menuju system yang menyediakan data *'by name by address '* dengan keunggulan sebagai berikut:

- ❖ Sistem Informasi Managemen Pengelolan Database Kemiskinan.
- ❖ SIM Pengelolaan Intervensi Kemiskinan dan Raport Kemiskinan yaitu :

- Integrasi SIM Kemiskinan dengan berbagai Sistem di Pemerintah Daerah (Program Intervensi dll)
- Raport Kemiskinan RT, Individu
- Pemetaan Kemiskinan dan Dashboard Kemiskinan

e. Masalah yang dihadapi dalam pelaksanaan SI MANDATARIS:
   - ❖ Secara umum untuk pelaksanaan Tahap I dan II untuk tidak mengalami kendala baik dalam hal anggaran dan koordinasi dengan Kabupaten/Kota peserta SI MANDATARIS.

3. Output
   a. Menghasilkan berbagai data strategis dari dan hingga level desa/kelurahan dengan Prioritas utama Database Penduduk Miskin *"By Name By Address"* dengan data klasifikasi/tipologi sampai level desa/kelurahan' yang menggunakan sistem Sumber pemuktahiran data strategis yang "real time".
   b. Terbangunnya Aplikasi SI-MANDATARIS -Single Database - Kemiskinan (Data Terpusat dan Terpadu) yang dapat diintegrasikan dengan berbagai sistem yang lain sehingga data kemiskinan dan juga data-data strategis lainnya menjadi sinkron dan konsisten.
4. Outcome

   Pelaksanaan SI MANDATARIS secara signifikan memberikan dampak yang sangat besar pada prioritas pembangunan daerah yang ke 5 yaitu Revolusi mental dan penerapan teknologi serta informasi untuk mewujudkan reformasi birokrasi dimana berdampak juga pada Prioritas daerah lainnya yang berhubungan dengan penyediaan data *'by name by address"* . Dampak besar yang akan dirasakan berkontribusi untuk peningkatan target pencapaian Misi 5 Reformasi Birokrasi pada RPJMD P Provinsi NTT Tahun 2028-2023 antara lain:

   a. Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE);
   b. Tingkat Keterbukaan Informasi Publik; dan
   c. Indeks Kepuasan Pelayanan Publik.

4.4.4 Pengembangan Sapi Wagyu

Pendekatan pembangunan ekonomi yang dilaksanakan saat ini di dasarkan pada 3 (tiga) prinsip, yaitu : **pertama**, *inclusive*, dimana pembangunan ekonomi yang dilakukan harus dapat melibatkan dan berbasis pada masyarakat, sehingga masyarakat harus bisa merasakan manfaat dari pembangunan yang dilakukan. Pendapatan masyarakat

harus meningkat yang akhirnya akan berdampak pada kesejahteraan masyarakat dan menurunkan angka kemiskinan. **Kedua,** *local resourced-based,* dimana pemenuhan kebutuhan harus berbasis pada sumber daya lokal, atau harus dapat dipenuhi dari dalam NTT sendiri, khususnya untuk sektor produksi yang berada di hulu, pertanian tanaman pangan, peternakan dan perikanan, juga industri pengolahan, budaya, kekayaan dan keindahan alam, energi baru terbarukan (EBT). Perlu juga menguatkan komoditi unggulan tiap daerah, dan secara kelembagaan diperkuat dengan Masyarakat Ekonomi (ME) NTT yang telah dibentuk. **Ketiga,** *sustainable,* pembangunan yang dilakukan harus berkelanjutan dan tetap ramah lingkungan.

Di sisi lain, Pariwisata dalam RPJMD 2018-2023 ditetapkan sebagai *primemover* ekonomi, sebab NTT memiliki sumber daya alam yang melimpah, termasuk sumber daya pariwisata baik wisata budaya, wisata alam, maupun wisata buatan. Dengan memanfaatkan hal ini secara optimal, termasuk pengelolaan yang baik dan benar diharapkan akan membawa manfaat besar bagi kesejahteraan masyarakat NTT. Kebijakan ini sejalan dengan kebijakan Pemerintah Pusat yang menetapkan Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat sebagai salah satu Destinasi Pariwisata Super Prioritas, dan Pemerintah Provinsi NTT juga menetapkannya sebagai daerah pariwisata premium.

Fokus utama pada Pariwisata karena sektor ini mempunyai jaringan rantai pasok atau keterkaitan langsung dan tidak langsung dengan berbagai sektor ekonomi lainnya seperti sektor primer, industri pengolahan maupun sektor jasa-jasa lainnya.

Agar pariwisata dapat sungguh-sungguh dirasakan manfaatnya oleh seluruh masyarakat, maka pembangunan pariwisata akan melibatkan semua pemangkukepentingan terutama masyarakat dan pelaku ekonomi lokal *(inclusive)* dan sedapat-dapatnya berdasarkan kekuatan sumber daya lokal yang dimiliki oleh NTT *(local resource-based)* dengan demikian pembangunan pariwisata akan dan harus berkelanjutan *(sustainable).*

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka hibah Sapi Wagyu dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Provinsi NTT akan dikembangkan untuk menjadi salah satu rantai pasok pariwisata, khususnya dalam hal pemenuhan kenutuhan pangan untuk memenuhi permintaan pasar,

termasuk dalam memenuhi kebutuhan akan daging sapi premium karena pengembangan pariwisata premium. Dengan demikian, tidak perlu dilakukan impor daging sapi premium, tetapi dapat dipenuhi sendiri, bahkan bisa dilakukan ekspor. Di Indonesia sendiri, selain NTT, Sapi Wagiyu baru dikembangkan di Lampung. Pengembangan Sapi Wagiyu ini akan dikerjasamakan dengan pihak ketiga yang memiliki keahlian dan pengalaman soal ini, dan akan dilakukan di Instalasi Kabaru Sumba Timur.

4.5 STRATEGI MENGHADAPI COVID-19

Pandemi Covid 19 berdampak pada berbagai sektor pembangunan sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, yang pada akhirnya membawa keseimbangan baru dan proses transformasi akan terjadi di empat area, yaitu struktural dan digital, perilaku dan kehidupan masyarakat, pola rantai pasok serta tatanan internasional.

Pertama, melalui transformasi struktural ekonomi dan digital, dimana struktur perekonomian negara-negara akan mengalami perubahan yang cukup signifikan. Berbagai negara mulai melakukan transformasi perekonomiannya sekaligus melakukan pembenahan sistem kesehatannya. *Telemedicine* dan *e-commerce* merupakan salah satu sektor yang bertahan dan berkembang di saat pandemi Covid-19, dan akan terus berlanjut secara pesat pasca pandemi Covid-19.

Kedua, transformasi perilaku dan pola hidup masyarakat untuk lebih menerapkan perilaku hidup sehat yang akan berdampak pada perubahan permintaan berbagai produksi yang harus menyesuaikan dengan kebutuhan tersebut. Kebiasaan baru saat pandemi terjadi, seperti menjaga jarak dengan orang lain, menggunakan masker dan pelindung diri lainnya, mencuci tangan dengan sabun, serta lebih memanfaatkan layanan antar, akan terus menjadi tren gaya hidup masyarakat ke depan. Pemanfaatan teknologi akan semakin masif dan menjadi bagian dari kehidupan masyarakat sehari-hari, seperti pembayaran digital, *mall-online*, konsultasi dokter *online*, dan pertemuan/pembelajaran *online*.

Ketiga, transformasi pola rantai pasok berupa kondisi sistem rantai pasok tradisional yang bersifat linear akan dianggap tidak relevan lagi dan bergeser menjadi jaringan pasok digital (*digital supply network*), sehingga konsumen, pabrik dan jaringan pasokan produksi akan terhubung melalui *platform*

digital. Jaringan pasok digital ini akan padat teknologi dengan memanfaatkan kemajuan Teknologi 4.0.

Keempat, transformasi tatanan internasional berupa kondisi krisis Covid-19 berpotensi menjadi salah satu landasan bagi negara-negara untuk lebih mementingkan kebijakan dalam negerinya (*inward-looking policies*) yang berorientasi pada nasionalisme dan globalisasi, seperti lebih menutup diri terhadap imigran dan memberikan proteksi lebih banyak kepada industri dalam negerinya.

Memperhatikan empat hal di atas, maka terdapat empat strategi / tahapan penanganan Covid 19, yaitu : 1) menguatkan sektor kesehatan, 2) kedua melindungi masyarakat dan dunia usaha, 3) mengurangi tekanan terhadap sektor keuangan, dan 4) program pemulihan ketahanan ekonomi dan kehidupan masyarakat pasca pandemi Covid-19. Keempat hal inilah yang akan menjadi fokus pada tahun 2022, baik melalui jaminan bantuan sosial, pemberdayaan ekonomi masyarakat, persiapan untuk hilirisasi/industrialisasi dan meningkatkan rantai nilai terkait industri pariwisata.

4.6 PENGUATAN SISTEM KESEHATAN DAERAH

Pemerintah berkewajiban untuk memperhatikan kesehatan setiap warga negaranya, seperti diamanatkan dalam Pembukaan UUD 1945 yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, dan keadilan sosial. Negara mempunyai peran yang sangat penting untuk membangun sistem yang dapat mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan bagi masyarakat. Oleh karena itu, kebijakan sosial harus memberikan prioritas yang memadai terutama untuk peningkatan pelayanan kesehatan.

Berbagai kebijakan bidang kesehatan dari waktu ke waktu mengalami berbagai perubahan yang cukup mendasar. Perhatian pemerintah di bidang kesehatan nampak bila dilihat dari dukungan anggaran keuangan yang disediakan oleh pemerintah. Amandemen UU No 23/1999 tentang Kesehatan menyebutkan bahwa tiap daerah harus menganggarkan minimal 15% dari APBD untuk kesehatan. Dalam UU RI No. 36 Tahun 2009 tentang kesehatan, besaran anggaran untuk pemerintah pusat diatur dalam pasal 171 ayat 1 yaitu pemenuhan alokasi anggaran kesehatan untuk pusat (APBN) sebesar 5%. Besaran anggaran untuk daerah (APBD Provinsi/Kabupaten/Kota) diatur dalam pasal 171 ayat 2 yaitu 10% dari total anggaran setiap tahunnya diluar

gaji pegawai. Kemudian pasal 171 ayat 3 menyebutkan bahwa besaran anggaran kesehatan tersebut diprioritaskan untuk kepentingan pelayanan publik terutama bagi penduduk miskin, kelompok lanjut usia, dan anak terlantar yang besarannya sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) dari anggaran kesehatan dalam APBN dan APBD.

Kebijakan daerah dalam upaya meningkatkan pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur yaitu kebijakan peningkatan akses dan kualitas layanan dasar kesehatan, melalui :

1. Peningkatan ketersediaan fasilitas layanan kesehatan dan pelayanan kesehatan yang berkualitas seperti : koordinasi peningkatan fasyankes primer dengan jumlah penduduk di tingkat kecamatan; Rasio tempat tidur pada fasyankes dengan jumlah penduduk di tingkat kabupaten/kota; Persentase FKTP terakreditasi dan Persentase RS terakreditasi; Persentase pasien yang dirujuk dari FKTP; serta penyediaan fasilitas kesehatan bergerak dan peralatan kesehatan terstandar sesuai peta permasalahan kesehatan di daerah.
2. Perluasan cakupan Penerima Bantuan Iuran (PBI) untuk mendapatkan akses layanan kesehatan yang berkualitas melalui peningkatan cakupan PBI pada penduduk miskin.
3. Penurunan angka kematian ibu dan anak, melalui : penurunan persentase bumil KEK; Peningkatan Persentase bumil mendapatkan layanan kesehatan; Peningkatan persentase persalinan di fasyankes; Ketersediaan minimal 4 puskesmas PONED per kabupaten/kota yaitu puskesmas rawat inap yang memiliki kemampuan untuk memberikan pelayanan terhadap ibu hamil, bersalin dan nifas serta kegawatdaruratan bayi baru lahir dengan komplikasi; dan Ketersediaan Rumah Sakit PONEK di kabupaten/kota.
4. Peningkatan status gizi anak, melalui : penurunan prevalensi stunting, gizi buruk dan gizi kurang; peningkatan persentase balita yang mendapatkan ASI eksklusif; Peningkatan kualitas dan kuantitas STBM.
5. Peningkatan promosi kesehatan dan advokasi kesehatan, melalui : optimalisasi peran Posyandu sebagai pusat kegiatan pelayanan bagi masyarakat termasuk kesehatan serta optimalisasi kegiatan GERMAS.
6. Peningkatan pencegahan dan pengendalian penyakit, melalui : Penurunan kasus TB, menurunkan kasus HIV, peningkatan eliminasi malaria, Diare dan penyakit menular dan tidak menular lainnya.

7. Peningkatan pengelolaan kedaruratan kesehatan masyarakat melalui penyiapan dan penerapan deteksi dini (*Early Warning System*).
8. Peningkatan kuantitas dan kualitas SDM Kesehatan, melalui : penyediaan SDM kesehatan di Puskesmas serta pendidikan dan pelatihan terakreditasi.

Dalam kondisi Tatanan New Normal ini, maka perluasan pelayanan kesehatan didaerah diarahkan pada peningkatan kualitas hidup masyarakat melalui : (1) Upaya pencapaian SPM Kesehatan (2) Peningkatan kualitas dan kuantitas SDM kesehatan (3) Pemberdayaan Masyarakat, dan (4) Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat.

Sesuai dengan UU Nomor 23 Tahun 2014 khususnya pada Pasal 12, Pasal 18 dan Pasal 298 terdapat 6 urusan wajib pelayanan dasar yang harus dilaksanakan oleh pemerintah daerah dan menjadi prioritas dalam perencanaan dan penganggaran pembangunan di daerah. Kesehatan menjadi salah satu dari 6 urusan tersebut. Dalam Permenkes Nomor 4 tahun 2019 tentang standar teknis pemenuhan mutu pelayanan dasar pada SPM bidang kesehatan memuat 2 jenis layanan dan mutu SPM kesehatan provinsi dan 12 jenis layanan dan mutu SPM kesehatan kabupaten/kota.

Dua jenis layanan dan mutu SPM Bidang Kesehatan Provinsi mencakup pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana atau berpotensi bencana provinsi, dan pelayanan kesehatan bagi penduduk pada kondisi kejadian luar biasa provinsi. Untuk tingkat Kabupaten/Kota, ada 12 jenis SPM yang mencakup pelayanan kesehatan ibu hamil, pelayanan kesehatan ibu bersalin, pelayanan kesehatan bayi baru lahir, pelayanan kesehatan balita, pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar, pelayanan kesehatan pada usia produktif, pelayanan kesehatan pada usia lanjut, pelayanan kesehatan penderita hipertensi, pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus, pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat, pelayanan kesehatan orang terduga tuberculosis, dan pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi HIV. Sesuai dengan Kewenangan Provinsi, fungsi Promotif dan Preventif kesehatan dilakukan melalui koordinasi ke Kabupaten/Kota sehingga dapat mencapai standar pelayanan kesehatan masyarakat minimal.

Untuk SDM kesehatan, disimulasikan dalam perencanaan dan pengembangan SDM kesehatan untuk UKM dan UKP Daerah provinsi. Pengelolaan Upaya Kesehatan Perorangan (UKP) rujukan tingkat provinsi/lintas Daerah

kabupaten/kota Dan Pengelolaan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM) Daerah provinsi dan rujukan tingkat Daerah provinsi/lintas Daerah kabupaten/kota. Sedangkan pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan melalui pemangku kepentingan di tingkat provinsi, kelompok masyarakat, organisasi swadaya masyarakat dan dunia usaha tingkat provinsi.



BAB V
ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KABUPATEN/KOTA

BAB V ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KABUPATEN/KOTA

Tema pembangunan daerah Provinsi Nusa Temggara Timur pada tahun rencana 2022 adalah **"PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR EKONOMI, SOSIAL, BUDAYA DAN PEMANTAPAN SISTEM RANTAI PASOK PARIWISATA MENUJU PEMULIHAN EKONOMI DAERAH"**. Untuk mencapai tujuan tersebut, ditetapkan enam prioritas pembangunan daerah tahun 2022 sebagai berikut:

1. Prioritas Daerah 1 : Memperkuat Infrastuktur SDA Untuk Memperbesar Skala Usaha Pertanian dan Pengurangan Kemiskinan Serta Stunting;
2. Prioritas Daerah 2 : Pembangunan bidang Pendidikan, Kesehatan dan Pemerintahan Untuk Meningkatkan Kualitas SDM dan Pelayanan Publik;
3. Prioritas Daerah 3 : Peningkatan Kerjasama Multi Pihak Untuk Pengembangan Rantai Pasok Pariwisata Berbasis Masyarakat;
4. Prioritas Daerah 4 : Pengembangan Hilirisasi Produk Pertanian Unggulan Untuk Meningkatkan Penyerapan Tenaga Kerja dan Memperkuat Pemulihan Ekonomi Daerah;
5. Prioritas daerah 5 : Revolusi mental dan penerapan Teknologi serta Informasi untuk Mewujudkan Reformasi Birokrasi; dan,
6. Prioritas Daerah 6 : Ketahanan Bencana dan Adaptasi Perubahan Iklim serta Pengelolaan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan untuk Pembangunan Rendah Karbon.

Dalam Rancangan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2022, Pemerintah menetapkan tema **"Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Struktural".** Untuk mencapainya ditetapkan tujuh (7) Prioritas Nasional sebagai berikut :

- Prioritas Nasional 1 : Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan;
- Prioritas Nasional 2 : Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan
- Prioritas Nasional 3 : Meningkatkan Sumberdaya manusia berkualitas dan berdaya saing;
- Prioritas Nasional 4 : Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan

- Prioritas Nasional 5 : Memperkuat Infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar
- Prioritas Nasional 6 : Membangun Lingkungan Hidup, meningkatkan ketahanan bencana, dan perubahan iklim
- Prioritas Nasional 7 : Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan transformasi Pelayanan Publik

Dalam kaitan dengan pembangunan di Nusa Tenggara Timur, dalam RKP tahun 2022, Pemerintah menetapkan target sasaran pembangunan daerah untuk Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagai berikut :

1. Pertumbuhan ekonomi : Pemerintah Menargetkan pertumbuhan ekonomi di Nusa Tenggara Timur pada tahun rencana berkisar antara 5,30 – 5,47%;
2. Penurunan Kemiskinan : Pemerintah Menargetkan penurunan tingkat kemiskinan menjadi 20,16 % pada tahun 2022;
3. Tingkat Pengangguran : Pemerintah menargetkan penurunan Tingkat Pengangguran di Nusa Tenggara Timur menjadi 3,41 – 4,14 %;

Sesuai dengan amanat dalam RPJMD Perubahan Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun 2018-2023, dan selaras dengan Rencana Kerja Pemerintah 2022, maka pada tahun rencana 2022, Pemerintah Provinsi NTT menargetkan capaian indikator Makro sebagai berikut :

1.	Pertumbuhan ekonomi	: 6,33 – 6,90 %
2.	PDRB perkapita	: Rp. 23 – 25 Juta pertahun
3.	IPM	: 67,35 – 69,00
4.	Penduduk Miskin	: 19,35 – 16,15
5.	Stunting	: 16,7
6.	Indeks Gini	: 0,34 – 0,33
7.	Indeks Pembangunan Gender	: 95 Poin
8.	Tingkat Pengangguran terbuka	: 2,5 – 1,9%
9.	Rasio PAD	: 30,12%
10.	Emisi Gas Rumah Kaca	: 17.248.829 tCO2eq
11.	Kebutuhan Investasi	: Rp. 71,47 T
12.	Indeks Reformasi Birokrasi	: 69 Poin

Dengan target capaian sasaran pembangunan yang digariskan dalam RKP 2022, arahan pembangunan untuk Kabupaten/Kota di Provinsi Nusa Tenggara Timur disusun dengan memperhatikan besaran kontribusi Kabupaten/Kota

terhadap capaian Provinsi NTT secara umum dan dengan memperhatikan trend performa Kab/Kota di Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam beberapa tahun terakhir.

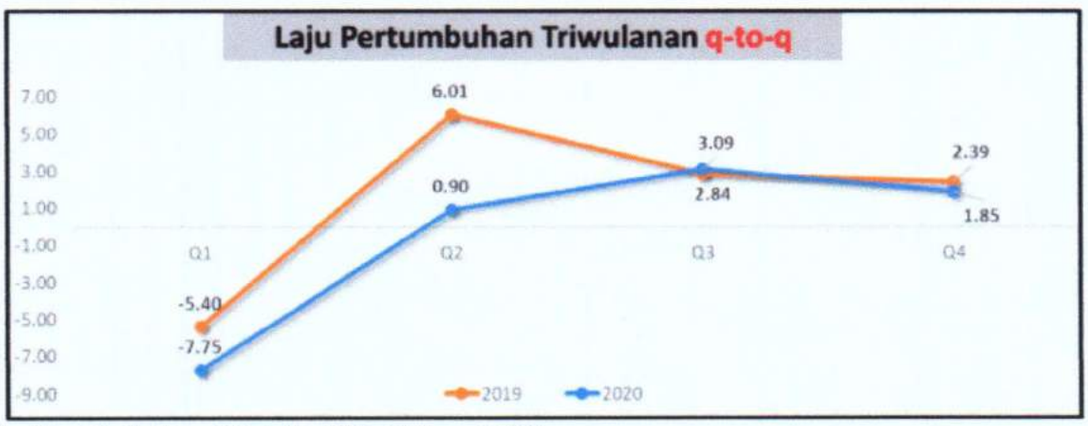
5.1. LAJU PERTUMBUHAN EKONOMI

Ekonomi Nusa Tenggara Timur pada Tahun 2020 mengalami kontraksi sebagai dampak langsung terhambatnya aktivitas ekonomi sebagai akibat meluasnya pandemi covid-19. sepanjang triwulan IV 2018 sampai triwulan IV 2019, ekonomi Nusa Tenggara Timur tumbuh stabil dengan catatan pertumbuhan tertinggi pada triwulan IV 2019 sebesar 5,61%).



Sumber : Berita Resmi Statistik, BPS, 5 Februari 2021

Pelambatan ekonomi daerah mulai terjadi pada awal tahun 2020. Output ekonomi NTT terlihat menurun, meskipun masih tumbuh positif pada awal kuartal I 2020, yang tumbuh "hanya" 2,99% dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun sebelumnya (*y on y*). pada kuartal II 2020, Ekonomi NTT mulai mengalami kontraksi dan tumbuh -1,98% dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun sebelumnya.



Sumber : Berita Resmi Statistik, BPS, 5 Februari 2021

Pada kuartal III 2020, ekonomi NTT juga masih mengalami kontraksi sebesar -1,75% meskipun jika dibandingkan dengan kuartal sebelumnya (*q to q*) ekonomi NTT menunjukan ketahanannya dengan tumbuh 3,09% ditengah situasi pandemi.

Sektor pertanian, perkebunan, kehutanan dan kelautan yang menjadi sektor terbesar dalam ekonomi NTT tampaknya menjadi salah satu alasan tidak begitu dalamnya efek ekonomi dari Pandemi covid-19 menghantam ekonomi NTT. Sektor jasa dan perdagangan yang merupakan sektor yang paling terpukul dengan pembatasan aktivitas ekonomi, hanya mengkomposisi kurang dari 15% dari ekonomi NTT dan karenanya tidak begitu besar mengcounter kecenderungan *rebound* yang terjadi pada kuartal III 2020.

Ekonomi NTT terpukul paling keras pada triwulan IV 2020. Dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun sebelumnya (*Y on Y*) Ekonomi NTT tumbuh -2,27% dan jika dibandingkan dengan kuartal sebelumnya (*q to q*), hanya tumbuh 1,85%. Meskipun jika dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun sebelumnya output ekonomi NTT mengalami penurunan sebesar -2,27%, pertumbuhan kuartal III yang positif terhadap kuartal II 2020 memunculkan harapan berlanjutnya *recovery* ekonomi di NTT ditengah pandemi Covid 19. Secara kumulatif, pertumbuhan ekonomi Nusa Tenggara Timur pada tahun 2020 adalah sebesar -0,83%.

Situasi ekonomi Nasional yang masih berjuang untuk keluar dari resesi, mempengaruhi upaya pemulihan ekonomi daerah pada Kabupaten/Kota di Nusa Tenggara Timur. meskipun *recovery* ekonomi tampaknya sedang berlangsung dengan lambat, namun optimisme yang beralasan muncul karena pada awal tahun 2021, Vaksinasi covid-19 massal mulai dilaksanakan diseluruh Indonesia termasuk Nusa Tenggara Timur memberi harapan akan kembali normalnya geliat ekonomi di daerah ini di waktu-waktu sesudahnya. upaya akhir perang terhadap pandemi covid-19 juga diharapkan menjadi awal pemulihan ekonomi Nasional dan Daerah.

Dengan memperhatikan trend pertumbuhan ekonomi kabupaten/Kota se-NTT sepanjang 2013-2020, dan dalam rangka mencapai target pertumbuhan di tahun rencana 2022, maka arahan target pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kota adalah antara 4,28% (terendah) sampai 9,53% (tertinggi). Tabel 5.1. menampilkan target pertumbuhan Kabupaten/Kota di Nusa Tenggara Timur pada tahun rencana 2022. Disjikan dengan proyeksi kebutuhan Investasi

berdasarkan perhitungan Incremental Capital Output Ratio (ICOR) per Kabupaten/Kota.

Tabel 5.1.
Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi, ICOR dan Kebutuhan Investasi Kabupaten/Kota Berdasarkan Wilayah Pengembangan dan Provinsi NTT Tahun 2021 dan 2022

Uraian Kab/Kota/Wilayah dan Provinsi	Tahun 2021 (%)	Tahun 2022 (%)	ICOR	Investasi 21 (Rp. Juta)	Investasi 22 (Rp. Juta)
Sumba Barat	5.38	5.63	7.98	42.93	44.93
Sumba Timur	5.13	5.15	9.11	46.73	46.92
Sumba Tengah	4.81	4.95	9.68	46.56	47.92
Sumba Barat Daya	7.43	7.99	6.10	45.32	48.74
Rata-rata Sumba	**5.69**	**5.93**	**8.22**	**46.74**	**48.73**
Kupang	5.07	5.17	5.10	25.86	26.37
TTS	5.55	5.85	4.84	26.86	28.31
TTU	5.60	6.06	9.44	52.86	57.21
Belu	5.77	5.88	8.03	46.33	47.22
Sabu Raijua	6.23	6.89	8.00	49.84	55.12
Malaka	5.30	5.46	11.78	62.43	64.32
Kota Kupang	7.86	7.96	11.35	62.57	90.35
Rote Ndao	4.58	4.84	6.85	31.37	33.15
Alor	4.37	4.37	9.63	42.08	42.08
Rata-rata Timor	**5.59**	**5.83**	**8.34**	**46.61**	**48.61**
Lembata	4,75	4,81	6,00	28,50	28,86
Flotim	4,59	4,59	5,96	27,36	27,36
Sikka	5,96	6,50	9,31	55,49	60,52
Ende	5,50	6,27	10,59	58,25	66,40
Ngada	6,52	7,42	5,30	34,56	39,33
Manggarai	5,60	5,91	9,73	54,49	57,50
Manggarai Barat	7,86	9,53	7,59	59,66	72,33
Nagekeo	4,28	4,30	9,22	39,46	39,65
Manggarai Timur	6,15	6,74	8,13	50	54,80
Rata-rata Flores	**5,69**	**6,23**	**7,98**	**45,41**	**49,72**
NTT	**5,66**	**6,00**	**8,18**	**46,26**	**49,04**

Meskipun momentum pemulihan ekonomi akan pada tahun rencana 2022 diprediksi terjadi secara merata pada kabupaten/kota, namun variasi akan ditentukan oleh karakteristik wilayah tertentu. *Rebound* ekonomi di Nusa Tenggara Timur diperkirakan akan lebih cepat terjadi pada wilayah yang merupakan pusat aktivitas perdagangan dan jasa, dan pada daerah-daerah yang memiliki luas wilayah relatif kecil. Daerah-daerah yang sektor jasanya tumbuh juga diproyeksikan akan tumbuh lebih cepat dibandingkan dengan wilayah-wiayah yang ekonominya masih sangat tergantung kepada sektor primer.

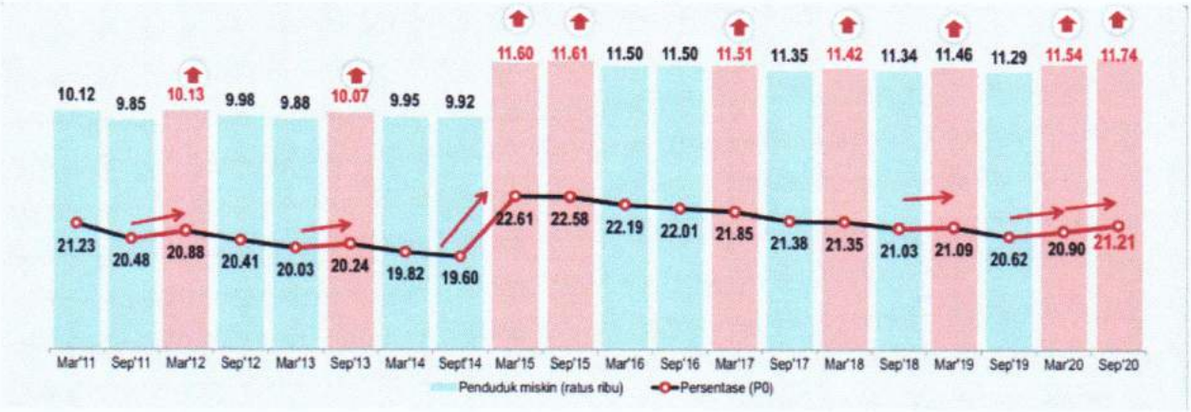
Momentum pemulihan pasca resesi perlu dimanfaatkan dengan mendorong sektor-sektor yang cepat tumbuh, memiliki rantai keterkaitan industrial yang panjang dan banyak menyerap tenaga kerja. Sektor-sektor ekonomi terutama sektor perdagangan (sekunder) dan jasa (tersier) perlu didorong untuk tumbuh kembali. Namun diatas itu semua, mendorong peningkatan produktivitas sektor primer mutlak dilakukan karena dua hal. *Pertama:* sektor primer masih menjadi sektor terbesar dalam ekonomi daerah sehingga peningkatan produktivitas sektor ini akan memberi dampak paling besar dalam upaya pemulihan dan pertumbuhan; dan *kedua:* meningkatkan ketahanan pangan daerah menjadi salah satu pelajaran penting yang dapat diambil dari pandemi covid-19, karena ketahanan pangan menjadi salah satu prioritas penting pada masa krisis. Mendorong meningkatnya produktivitas sektor primer, karenanya, selain dalam rangka mengusahakan peningkatan kesejahteraan masyarakat, juga menjamin ketahanan Nusa Tenggara Timur menghadapi potensi bencana yang mungkin masih akan terjadi di masa yang akan datang.

5.2 PENDUDUK MISKIN

Sepanjang 2011 sampai 2020, jumlah maupun persentase penduduk miskin cenderung memiliki trend yang konstan, tidak meningkat namun juga tidak mengalami pengurangan. Pada Maret 2011, terdapat 1,01 juta jiwa lebih penduduk Miskin yang ada di NTT. Ini setara dengan 21,23% dari total Penduduk NTT pada tahun tersebut. Sepanjang periode Maret 2011 sampai dengan September 2014 terlihat trend penurunan jumlah dan persentase penduduk miskin. Pada September 2014, jumlah Penduduk miskin di NTT berkurang menjadi 992 ribu orang, atau setara dengan 19,60% dari total populasi NTT. Namun pada Maret 2015, terjadi peningkatan. Jumlah orang miskin bertambah menjadi 1,160 juta jiwa, atau setara dengan 22,61% dari

total populasi NTT. Periode Maret 2015 adalah periode dimana persentase penduduk Miskin di NTT tercatat paling tinggi sepanjang 2011-2020. Periode September 2015 merupakan periode dimana jumlah Miskin di NTT tertinggi sepanjang 2011-2020. Pada Periode tersebut jumlah orang miskin meningkat menjadi 1,161 juta jiwa, meskipun secara persentase, berkurang 0,03 poin persen dibandingkan semester sebelumnya menjadi 22,58%.

Gambar 5.1
PERKEMBANGAN KEMISKINAN DI NTT Maret 2011- September 2020



Sumber : Berita Resmi Statistik, BPS, 15 Februari 2021

Sepanjang periode Maret 2016 sampai dengan september 2019, terlihat trend penurunan persentase penduduk miskin di NTT, walaupun dari sisi jumlah masih terdapat fluktuasi pada periode maret 2017, 2018 dan 2019. Kenaikan persentase dan jumlah penduduk miskin di NTT kembali terjadi pada periode Maret 2020 sebesar 20,90% dan September 2020 menjadi 21,21%.

Kenaikan persentase pada periode Maret dan September 2020 dipengaruhi terutama oleh Kontraksi pada pertumbuhan ekonomi sehingga tumbuh -2,27% (*y on y*). berkurangnya output ekonomi daerah ini mencerminkan menurunnya permintaan (tergambar dari terkontraksinya pengeluaran konsumsi rumah tangga pada triwulan III 2020 sebesar 2,38% *y on y*) dan penawaran yang berarti banyak masyarakat yang kehilangan pekerjaan dan mata pencahariannya. Kelompok masyarakat paling rentan yang berada dekat dengan ambang batas garis kemiskinan kemudian masuk kedalam kategori penduduk miskin.

Dengan memperhatikan performa pengentasan kemiskinan pada Kabupaten/kota se Nusa Tenggara Timur, dan dalam rangka mendukung pencapaian target pengentasan kemiskinan Nusa Tenggara Timur di tahun rencana 2022, maka target penurunan kemiskinan untuk Kabupaten/Kota

se-Nusa Tenggara Timur pada tahun rencana 2022 adalah sebagaimana tercantum pada tabel 5.2. dibawah ini

Tabel 5.2. Target Penurunan Persentase Penduduk Miskin per Kabupaten/Kota se-NTT Tahun 2021-2022

Wilayah	2021		2022	
	MODERAT	HIGH	MODERAT	HIGH
Sumba Barat	29.35	26.79	26.27	20.28
Sumba Timur	30.40	28.47	28.08	23.57
Kupang	21.14	18.93	18.47	13.30
Timor Tengah Selatan	28.03	26.13	25.75	21.32
Timor Tengah Utara	22.36	20.81	20.50	16.89
Belu	15.40	14.54	14.36	12.35
Alor	20.84	19.35	19.04	15.54
Lembata	25.29	23.65	23.31	19.48
Flores Timur	9.51	8.34	8.10	5.36
Sikka	13.32	12.17	11.93	9.23
Ende	22.20	22.19	22.12	21.80
Ngada	12.01	11.24	11.08	9.29
Manggarai	21.51	19.52	19.11	14.45
Rote Ndao	29.81	29.89	29.90	30.08
Manggarai Barat	18.78	16.86	16.46	11.97
Sumba Tengah	33.44	31.78	31.44	27.55
Sumba Barat Daya	28.47	25.46	24.84	17.81
Nagekeo	12.64	11.96	11.83	10.25
Manggarai Timur	25.56	24.29	24.04	21.07
Sabu Raijua	33.21	32.38	32.21	30.28
Malaka	16.03	15.10	14.91	12.73
Kota Kupang	9.90	9.81	9.79	9.59
Nusa Tenggara Timur	21.00	19.63	19.35	16.15

Tantangan untuk dapat tetap menjaga kelompok masyarakat miskin tidak menjadi semakin miskin dan masyarakat rentan miskin tidak masuk kedalam kategori miskin pada saat dan pasca pandemi serta bagaimana memanfaatkan momentum pemulihan ekonomi untuk mengentaskan lebih banyak penduduk dari kemiskinan adalah sesuatu yang besar. Pemerintah daerah memiliki berbagai instrumen baik itu fiskal maupun kewenangan meregulasi untuk mencegah bertambahnya orang miskin.

Permasalahan kemiskinan juga terkait dengan bagaimana meminimalisasi efek resesi ekonomi daerah bagi kelompok rentan. Dalam kaitan ini pemerintah daerah perlu melaksanakan program-program perlindungan sosial untuk melindungi kelompok-kelompok rentan miskin menjadi korban yang paling terdampak resesi ekonomi. Pilihan kebijakan jaring pengaman sosial dapat menjadi salah satu cara untuk memberi perlindungan kepada kelompok masyarakat miskin di masa-masa resesi, disamping kebijakan-kebijakan ekonomi daerah untuk menstimulasi kebangkitan ekonomi daerah pasca resesi.

5.3. TINGKAT PENGANGGURAN TERBUKA

Nusa Tenggara Timur termasuk dalam kelompok Provinsi dengan tingkat pengangguran terbuka yang rendah. Apabila dipilah per Kabupaten, terlihat variasi yang meskipun menunjukkan trend penurunan, masih menggambarkan naik dan turunnya angka TPT pertahun pada Kabupaten/Kota tertentu. Terdapat Kabupaten dengan TPT yang tinggi pada tahun tertentu dan mengalami penurunan tajam pada tahun berikutnya, sementara terdapat Kabupaten dengan pola sebaliknya.

Juga terlihat bahwa konsentrasi pengangguran terbuka terdapat pada wilayah dengan karakter dominan perkotaan (*urban*), dan sebaliknya wilayah dengan karakter dominan perdesaan (*rural*) cenderung mencatat TPT yang rendah. Sepanjang 2004-2018, kota Kupang tercatat memiliki TPT tertinggi relatif dibandingkan dengan Kabupaten yang lain di Nusa Tenggara Timur.

Pelambatan laju pertumbuhan ekonomi pada tahun 2020 memberi dampak pada angka pengangguran di Nusa Tenggara Timur. menurut data BPS, pada Agustus 2020 Tingkat Pengangguran terbuka di Nusa Tenggara Timur meningkat menjadi 4,28%. Terjadi kenaikan sebesar 1,14 poin persen jika dibandingkan dengan angka Agustus 2019 (*y on y*) yang sebesar 3,14%. Lebih dari 373 ribu jiwa dari angkatan kerja NTT tahun 2020, atau hampir mencapai 10% dari penduduk usia kerja, terdampak efek ekonomi dari pandemi covid-19.

Pada tahun rencana 2022, pemerintah dalam RKP 2022 mentargetkan tingkat pengangguran terbuka di Nusa Tenggara Timur menurun menjadi sebesar 3,2 - 4,0%. Penetapan target tersebut tidak lepas dari kalkulasi mengenai pemulihan ekonomi daerah pasca pandemi covid-19 terhadap angka

pengangguran. Upaya *recovery* ekonomi daerah difokuskan untuk kembali menstimulasi dunia usaha yang pada gilirannya akan meningkatkan kesempatan kerja. Dalam RPJMD Perubahan Provinsi NTT tahun 2018-2023, Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur menetapkan target penurunan angka pengangguran yang lebih tinggi dibandingkan dengan target pemerintah yaitu sebesar 2,50 – 1,95 pada tahun rencana 2022.

Bagi Kabupaten/Kota yang ada di provinsi NTT, dengan memperhatikan perkembangan kinerja angka pengangguran dalam beberapa tahun dan dengan menggunakan proyeksi RKP 2022 maka target TPT Pada Kabupaten/Kota yang ada di provinsi NTT pada tahun rencana 2022 adalah sebagaimana yang tertera pada tabel 5.3. berikut ini.

Tabel 5.3
Arahan Penurunan TPT bagi Kab/Kota se-NTT
Tahun rencana 2022

Wilayah	TARGET 2022 (%)	
	Moderate	High
Sumba Barat	2,71	2,06
Sumba Timur	2,39	1,81
Kupang	3,35	2,55
Timor Tengah Selatan	1,80	1,37
Timor Tengah Utara	2,91	2,21
Belu	5,07	3,86
Alor	2,13	1,62
Lembata	3,34	2,54
Flores Timur	2,16	1,64
Sikka	2,73	2,08
Ende	2,02	1,53
Ngada	3,21	2,44
Manggarai	2,80	2,13
Rote Ndao	3,35	2,55
Manggarai Barat	2,54	1,93
Sumba Tengah	2,75	2,09
Sumba Barat Daya	1,61	1,23
Nagekeo	2,11	1,61
Manggarai Timur	1,44	1,09
Sabu Raijua	2,11	1,60
Malaka	2,48	1,89
Kota Kupang	7,45	5,66
Nusa Tenggara Timur	2,50	1,90

Trend pengangguran yang tinggi pada wilayah urban masih akan terjadi pada tahun rencana 2022. Pada wilayah-wilayah dengan karakteristik rural yang

dominan, angka pengangguran diperkirakan tidak akan terlalu tinggi mengingat lapangan usaha pertanian yang digeluti tidak terdampak sebesar sektor perdagangan dan jasa oleh resesi akibat pandemi covid-19. Hal berbeda terjadi pada wilayah dengan karakteristik urban seperti kota Kupang. Usaha-usaha jasa dan perdagangan yang banyak tutup mengakibatkan lonjakan pengangguran.

Namun demikian, upaya pemulihan ekonomi pada tahun rencana 2022 akan bertumpu dan berfokus pada, upaya untuk menormalisasi aktivitas ekonomi, membuka kembali lapangan pekerjaan dan dengan demikian akan menekan angka pengangguran di daerah ini menjadi kembali rendah.

Pemerintah kabupaten/Kota perlu mempertimbangkan kebijakan strategis untuk dapat kembali menekan angka pengangguran lewat momentum *recovery* ekonomi pasca pelambatan ekonomi daerah dengan, misalnya, memberikan stimulus berupa permodalan, penangguhan pajak atau kemudahan berinvestasi. Langkah antisipasi perlu diambil bukan saja untuk menjamin kelompok-kelompok masyarakat yang menganggur menjadi rentan masuk dalam kelompok masyarakat miskin, namun juga menjamin bahwa momentum pemulihan pasca pandemi covid-19 dapat memberikan manfaat bagi upaya pemerintah menyediakan lapangan kerja dan mengurangi pengangguran.

5.4 INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA (IPM)

Indeks Pembangunan Manusia merupakan indikator perbandingan usia harapan hidup, melek huruf, derajat pendidikan dan standard hidup yang digunakan di seluruh dunia. IPM digunakan untuk mengklasifikasikan apakah sebuah wilayah adalah dapat dikatakan maju, berkembang atau terbelakang. IPM dapat juga digunakan untuk mengukur pengaruh kebijakan ekonomi terhadap kualitas hidup.

Sepanjang tahun 2010-2020, IPM Nusa Tenggara Timur memiliki trend peningkatan. Pada tahun 2010, IPM Nusa Tenggara Timur adalah 59,21 dan pada tahun 2019 meningkat menjadi 65,23. Hanya pada tahun 2020 IPM NTT mengalami sedikit penurunan menjadi 65,19 atau mengalami penurunan sebesar 0,4 poin. Penurunan yang terjadi kemungkinan besar disebabkan oleh meluasnya pandemi yang berefek panjang pada aspek-aspek lain selain kesehatan seperti ekonomi dan sosial. Meski demikian, IPM Nusa Tenggara

Timur yang meningkat lebih dari 6 poin dalam satu dekade terakhir mengindikasikan peningkatan kualitas hidup masyarakat di Nusa Tenggara Timur, dan juga memberi indikasi bahwa kerja-kerja pembangunan manusia NTT telah berada pada jalur yang benar.

Jika dibandingkan dengan wilayah lain yang ada di Indonesia, IPM NTT termasuk dalam kelompok yang paling rendah. Pada tahun 2020, rerata IPM Indonesia telah mencapai 71,94, hal yang mengindikasikan bahwa pada aspek-aspek kesehatan, pendidikan dan standard hidup, masyarakat NTT masih tertinggal dibandingkan saudara-saudara lainnya di Indonesia, dan hal ini memberikan peringatan kepada seluruh pemangku kepentingan pembangunan di Nusa Tenggara Timur untuk bekerja lebih keras dalam memperbaiki kualitas pendidikan, kesehatan dan standard hidup.

Jika dipilah per Kabupaten, terlihat bahwa rata-rata Kabupaten di NTT berbagi skor IPM yang cenderung sama. Hanya Kota Kupang yang tercatat memiliki IPM yang jauh lebih tinggi dibandingkan dengan Kabupaten lainnya di Nusa Tenggara Timur. Skor IPM kota Kupang bahkan lebih tinggi belasan poin dibandingkan skor IPM Kabupaten tertinggi lainnya di NTT. Pada tahun 2020, IPM Kota Kupang jauh lebih tinggi jika dibandingkan dengan rerata IPM Indonesia.



Dalam RPJMD Perubahan Provinsi Nusa Tenggara Timur 2018-2023, Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur menetapkan target capaian IPM 67,35 – 69,00. Ini merupakan target besar mengingat dengan mempertimbangkan capaian tahun 2020, maka ada proyeksi peningkatan 1,5 sampai 2 poin IPM pada tahun rencana 2022. Namun dengan melihat kinerja pembangunan Manusia pada Kabupaten/Kota di NTT sepanjang satu dekade terakhir, target tersebut bukanlah target yang mustahil untuk diraih. Arahan provinsi bagi Kabupaten/Kota beserta target capaian IPM adalah sebagaimana tercantum pada tabel berikut

Tabel 5.4

Target Capaian Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten/Kota se Nusa Tenggara Timur, tahun 2021 dan 2022

Wilayah	2021		2022	
	MODERATE	HIGH	MODERATE	HIGH
Sumba Barat	63.82	65.05	65.35	66.73
Sumba Timur	65.56	66.97	67.31	68.90
Kupang	64.67	66.04	66.37	67.92
Timor Tengah Selatan	62.91	64.52	64.91	66.73
Timor Tengah Utara	63.94	65.54	65.92	67.73
Belu	63.48	65.23	65.65	67.64
Alor	61.27	62.68	63.02	64.61
Lembata	65.42	67.21	67.64	69.66
Flores Timur	64.82	66.63	67.07	69.11
Sikka	64.83	66.26	66.60	68.22
Ende	67.77	69.05	69.35	70.80
Ngada	68.11	69.56	69.91	71.54
Manggarai	64.43	66.17	66.59	68.56
Rote Ndao	62.53	64.41	64.86	66.98
Manggarai Barat	63.55	65.16	65.55	67.37
Sumba Tengah	60.97	62.33	62.65	64.18
Sumba Barat Daya	63.35	64.92	65.30	67.08
Nagekeo	66.28	67.73	68.08	69.72
Manggarai Timur	60.34	61.87	62.24	63.98
Sabu Raijua	55.69	56.67	56.90	58.01
Malaka	60.95	62.70	63.12	65.10
Kota Kupang	79.87	80.98	81.24	82.49
Nusa Tenggara Timur	**65.54**	**67**	**67.35**	**69**

Terdapat dua skenario capaian pada tahun berjalan 2021 dan tahun rencana 2022. Target moderate dan target high menggambarkan capaian minimum yang diharapkan dan capaian optimis yang diharapkan dapat dicapai apabila skenario pembangunan dapat berjalan secara optimal.

Kota Kupang diprediksi masih akan menjadi "pendorong" utama terhadap peningkatan IPM NTT. Pada tahun 2022, IPM Kupang diperkirakan akan meningkat menjadi 79,87 - 80,98 poin pada tahun berjalan 2021 dan 81,24-82,49 pada tahun rencana 2022. Posisi kota kupang sebagai ibukota Provinsi dan pusat aktivitas pemerintahan dan bisnis memberikan keuntungan tersendiri. Dari sisi *demand,* sebagian besar masyarakat yang

bekerja pada sektor perdagangan dan jasa memiliki kemampuan lebih untuk mengakses layanan pendidikan dan kesehatan yang relatif lebih berkualitas, yang pada gilirannya berdampak pada peningkatan kualitas hidupnya. Dari sisi *supply,* penyediaan layanan kesehatan dan pendidikan di kota Kupang tidak lagi menjadi "monopoli" pemerintah namun juga telah menjadi urusan dari masyarakat dan dunia usaha. Tersedianya pilihan atas layanan pendidikan dan kesehatan menjadikan masyarakat memiliki akses dan pilihan yang lebih luas terhadap pelayanan kesehatan dan pendidikan. Selain itu luas wilayah yang tidak begitu besar turut andil dalam hal ini. Wilayah yang relatif kecil memudahkan pemerintah untuk menyediakan layanan pendidikan dan kesehatan yang dapat dengan mudah dan murah dijangkau oleh masyarakat. Kombinasi faktor-faktor ini menyebabkan kualitas pembangunan manusia yang diindikasikan dengan IPM pada kota Kupang menjadi sangat tinggi dibandingkan dengan kabupaten lain di Nusa Tenggara Timur.

Bagi Kabupaten lain yang ada di Nusa Tenggara Timur, situasi sebaliknyalah yang menyebabkan skor IPM yang relatif rendah. Sebagian besar Kabupaten di NTT berciri rural dengan sebagian besar masyarakat bekerja pada sektor pertanian dengan upah yang relatif rendah dan pada akhirnya memiliki keterbatasan untuk mengakses layanan pendidikan dan kesehatan. Dari sisi *supply,* terdapat kecenderungan penyediaan layanan pendidikan dan kesehatan yang "*undersupply*", akibat keterbatasan finansial daerah, luas wilayah dan topografi yang menantang.

Bagi pemerintah Kabupaten/Kota yang ada di Nusa Tenggara Timur, target peningkatan IPM pada tahun rencana 2022 bukan pekerjaan yang mustahil, sebagaimana seperti yang telah diperlihatkan pada tahun-tahun belakangan ini. Target tersebut akan dapat dicapai dengan memperkuat fokus pembangunan pada aspek-aspek kunci pembangunan manusia yaitu Kesehatan dan Pendidikan. Untuk tujuan ini, pengerahan sumberdaya yang terukur pada fokus-fokus tersebut akan dapat mendorong peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pada gilirannya meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia di Nusa Tenggara Timur.

5.5 GINI RASIO

Gini Ratio atau Koefisien Gini adalah ukuran yang digunakan untuk mengukur kesenjangan pendapatan dan kekayaan. Dengan gini ratio dapat digambarkan tingkat ketimpangan. Semakin tinggi gini ratio semakin besar

terjadi ketimpangan. Nilai gini ratio mendekati nol menandakan ketimpangan yang rendah sementara nilai gini ratio mendekati 1 menggambarkan ketimpangan yang tinggi.

Berdasarkan catatan BPS, angka gini ratio yang ada di Provinsi Nusa Tenggara Timur sepanjang 2015 sampai semester II 2019 berkisar antara 0,336 (terendah) pada semester II 2015 sampai 0,368 (tertinggi) yang tercatat terjadi pada semester II tahun 2016. Setelah tahun tersebut, koefisien Gini di NTT terlihat memiliki trend menurun yang mengindikasikan semakin membaiknya ketimpangan yang ada di wilayah ini. Pada semester I, 2020 Koefisien Gini Nusa Tenggara Timur tercatat sebesar 0,354 yang merupakan koefisien terkecil dalam dua tahun terakhir. Sebagai perbandingan, Koefisien Gini Nusa Tenggara Timur berada dibawah rerata Nasional yang pada tahun 2020 tercatat sebesar 0,381.



Salah satu fokus dalam rancangan RKP 2022 adalah pemulihan ekonomi dan pembangunan yang inklusif dalam rangka mengurangi ketimpangan. Sejalan dengan hal tersebut, RPJMD Perubahan Provinsi Nusa Tenggara Timur 2018-2023 mengamanatkan upaya pengurangan ketimpangan di Nusa Tenggara Timur. Sejalan dengan fokus RKP 2022, dan merujuk kepada amanat RPJMD-P NTT 2018-2023, maka arahan kepada Kabupaten/Kota se-NTT dalam mengupayakan pengurangan ketimpangan diukur pencapaian Gini ratio Provinsi NTT sebesar 0,34-0,33

Apabila menilik data ketimpangan nasional yang didorong oleh tingginya ketimpangan pendapatan di kawasan perkotaan, maka diperlukan *treatment* yang berbeda antara apa yang perlu dilakukan terhadap aktivitas ekonomi di perkotaan yang aktivitas ekonominya didominasi oleh perdagangan dan jasa, dengan apa yang perlu dilakukan terhadap aktivitas ekonomi di perdesaan yang didominasi oleh aktivitas ekonomi yang berhubungan dengan pertanian. Menjadi tugas dari pemerintah daerah untuk mengupayakan pemerataan pendapatan distribusi pendapatan yang lebih adil lewat instrumen fiskal seperti pajak dan subsidi maupun kewenangannya untuk membuat regulasi, agar aktivitas ekonomi tidak menjadi sumber ketimpangan yang ada di daerah ini.

5.6 FOKUS PEMBANGUNAN

5.6.1 PENGUATAN SISTEM KESEHATAN DAERAH

Sebagaimana telah diuraikan pada Bab sebelumnya, penguatan sisten kesehatan daerah diarahkan pada peningkatan akses dan kualitas layanan dasar kesehatan dan peningkatan pemberdayaan masyakarat melalui : (1) Peningkatan ketersediaan fasilitas layanan kesehatan dan pelayanan kesehatan yang berkualitas (2) Perluasan cakupan Penerima Bantuan Iuran (PBI) (3) Penurunan angka kematian ibu dan anak, (4) Peningkatan status gizi anak (5) Peningkatan promosi kesehatan dan advokasi Kesehatan, (6) Peningkatan pencegahan dan pengendalian penyakit, (7) Peningkatan pengelolaan kedaruratan kesehatan masyarakat dan (8) Peningkatan kuantitas dan kualitas SDM Kesehatan. Semuanya dicapai melalui pemenuhan mutu pelayanan dasar pada SPM bidang kesehatan baik mutu SPM kesehatan provinsi dan mutu SPM kesehatan kabupaten/kota.

Dalam kondisi Tatanan New Normal ini, maka perluasan pelayanan kesehatan didaerah diarahkan pada peningkatan kualitas hidup masyarakat melalui : (1) Upaya pencapaian SPM Kesehatan (2) Peningkatan kualitas dan kuantitas SDM kesehatan (3) Pemberdayaan Masyarakat, dan (4) Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat.

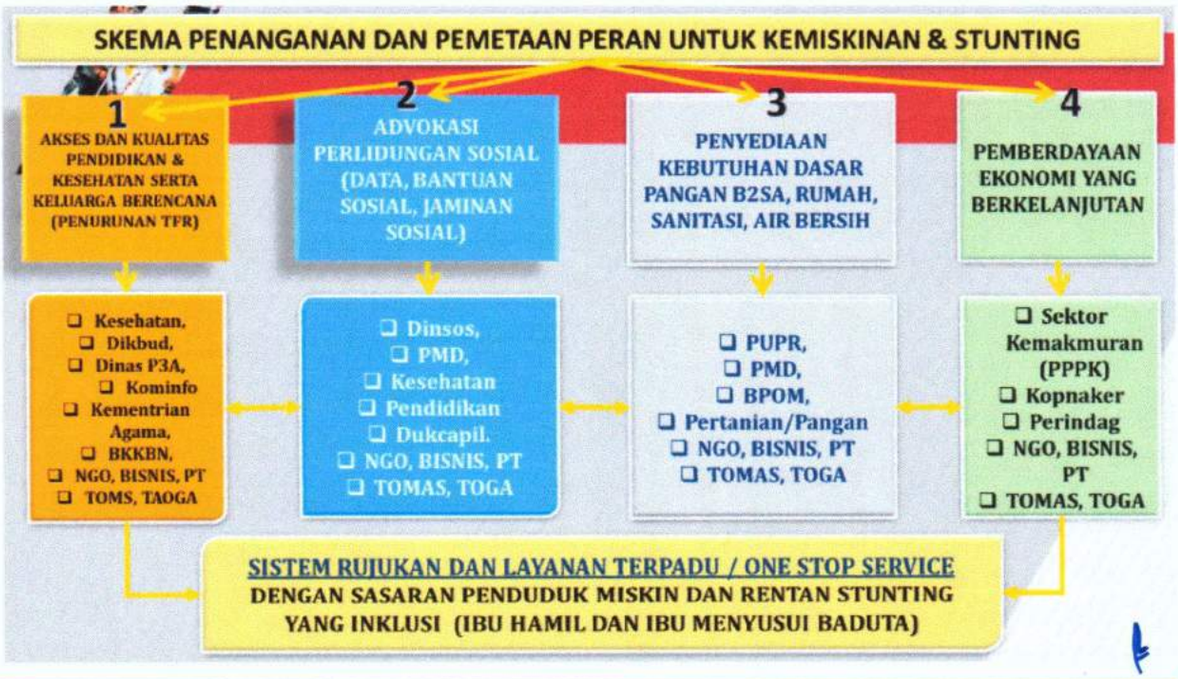
Rumusan program kegiatan yang dapat dilakukan di tingkat provinsi dan kabupaten / kota adalah :

1. Paradigma hidup sehat : Promosi dan preventif tatanan kehidupan baru yang sehat sesuai protocol Covid-19 melalui penyediaan sarana dan prasarana pada fasilitas umum dan fasilitas milik pemerintah serta Peningkatan peran serta masyarakat melalui Gerakan Masyarakat (Germas).
2. Penguatan Fasilitas Pelayanan Kesehatan terutama pada FKTP dan Penyediaan Faskes Bergerak (Ambulans, RS Bergerak)
3. Perluasan JKN dari APBD Provinsi dan Kabupaten/Kota

5.6.2 ERADIKASI STUNTING

Nusa Tenggara Timur merupakan salah satu provinsi dengan tingkat prevelensi stunting tertinggi di Indonesia. Itulah sebabnya eradikasi stunting dan penanganan kemiskinan menjadi prioritas daerah yang pertama untuk ditangani pada tahun 2022 disamping tetap mengarahkan adanya pertumbuhan ekonomi pada pusat-pusat pertumbuhan wilayah di destinasi-destinasi pariwisata estate. Tentu saja hal ini tidak bisa hanya dilakukan oleh provinsi, tetapi harus dilaksanakan bersama oleh semua pelaku pembangunan di Nusa Tenggara Timur sebagaimana terlihat pada Gambar 5.2 berikut.

Gambar 5.2
Skema Intervensi Penurunan Kemiskinan dan Stunting



Penanganan Stunting yang dilakukan tidak saja memperhatikan 25 indikator penyebab terjadinya stunting melalui intervensi spesifik maupun intervensi sensitive tetapi dari segi implementasinya, dengan adanya upaya inovasi konvergensi stunting sebagaimana pada Gambar 5.3.

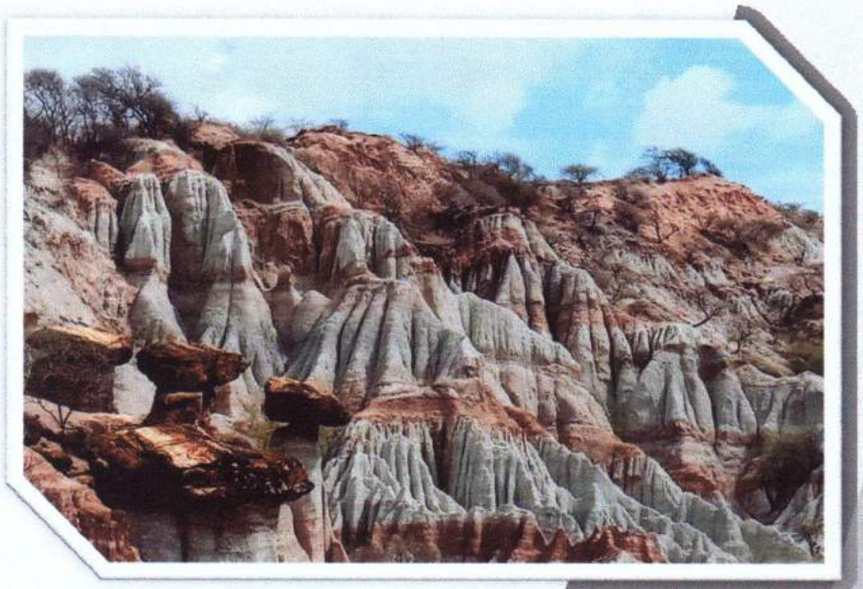
Gambar 5.3
Inovasi Konvergensi Stunting di NTT



Target penurunan stunting yang harus dicapai oleh provinsi dan kabupaten/kota sebagai berikut:

Tabel 5.5
Target Penurunan Stunting Per Kabupaten/Kota
Tahun 2022 & 2023

No	KABUPATEN/KOTA	AGUSTUS 2020		%	TARGET PENURUNAN STUNTING			
		Diukur Panjang / Tinggi Badan	Stunting		2022	%	2023	%
1	KAB SUMBA BARAT	8,592	2,763	32.2	1.768	20,58	1.238	14,41
2	KAB SUMBA TIMUR	18,905	4,061	21.5	2.761	14,61	2.209	11,69
3	KAB SUMBA TENGAH	6,560	1,109	16.9	778	11,84	623	9,47
4	KAB SUMBA BARAT DAYA	17,799	5,917	33.2	3.513	19,74	2.083	11,70
5	KAB SABU RAIJUA	7,192	2,258	31.4	1.445	20,09	1.084	15,07
6	KAB ALOR	15,204	3,420	22.5	2.276	15,37	1.821	12,29
7	KAB LEMBATA	8,241	2,115	25.7	1.438	17,45	1.151	13,96
	REGION SUMBA SABU ALOR LEMBATA	**82,493**	**21,643**	**23.9**				
8	KAB KUPANG	29,258	7,544	25.8	4.444	16,19	3.555	12,95
9	KAB TIMOR TENGAH SELATAN	41,592	16,904	40.6	9.33	26,45	6.531	18,51
10	KAB TIMOR TENGAH UTARA	20,173	5,836	28.9	3.735	18,52	2.428	12,03
11	KAB BELU	16,164	3,428	21.2	2.331	14,42	1.865	11,54
12	KAB MALAKA	14,184	3,719	26.2	2.678	18,88	1.874	13,21
13	KOTA KUPANG	11,601	2,578	22.2	1.856	16,00	1.485	12,80
14	KAB ROTE NDAO	12,883	3,328	25.8	2.13	16,53	1.597	12,40
	REGION TIMOR DAN ROTE	**145,855**	**43,337**	**47.8**				
15	KAB FLORES TIMUR	17,542	3,974	22.7	2.702	15,40	2.027	11,55
16	KAB SIKKA	20,414	4,010	19.6	2.727	13,36	2.081	10,20
17	KAB ENDE	19,709	3,430	17.4	2.332	11,83	1.866	9,47
18	KAB NGADA	10,375	1,653	15.9	1.194	11,51	1.015	9,78
19	KAB MANGGARAI	23,614	5,322	22.5	3.845	16,28	3.268	13,84
20	KAB MANGGARAI BARAT	21,900	3,788	17.3	2.727	12,45	2.182	9,96
21	KAB NAGEKEO	10,390	1,433	13.8	1.101	10,59	770	7,41
22	KAB MANGGARAI TIMUR	22,136	2,012	9.1	1.436	6,49	1.149	5,19
	REGION FLORES (8 KAB, MINUS LEMBATA)	**146,080**	**25,622**	**28.3**				
	NTT	**374,428**	**90,602**	**24.2**	**58.548**	**16,00**	**43.902**	**12,00**



BAB VI
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

BAB VI RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

Program dan kegiatan prioritas Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun 2022 merupakan program dan kegiatan yang didanai oleh APBD Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2022. Namun demikian, dalam mewujudkan tujuan dan sasaran pembangunan sebagaimana yang telah ditetapkan dalam RPJMD Perubahan Provinsi Nusa Tenggara Timur 2018 – 2023 dan RKPD Tahun 2022 khususnya, dibutuhkan kerja sama dan sinergi baik dalam hal perencanaan, kebijakan, penganggaran, pelaksanaan serta evaluasi antara pemerintah pusat dan daerah,swasta,maupun Lembaga donor/mitra.

Program dan kegiatan yang dilaksanakan ini sejalan dan mendukung pencapaian sasaran dan prioritas nasional sekaligus mendukung pencapaian prioritas daerah. Perencanaan program dan kegiatan yang diprioritaskan dalam Rancangan Awal RKPD Tahun 2022mengacu pada RPJMD PerubahanTahun 2018-2023 dan Renstra Perangkat Daerah Perubahan Tahun 2018-2023 serta disesuaikan dengan kondisi dan potensi serta serta tugas dan fungsi masing-masing perangkat daerah. Perencanaan dimaksud akan disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah pada tahun 2022.

Pada tahun 2022 akan diarahkan pada 12 Perangkat Daerah, yakni: 1) Dinas Pariwisata, 2) Dinas Pertanian, 3) Dinas Peternakan, 4) Dinas Perikanan dan Kelautan, 5) Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, 6) Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, 7) Dinas Perindustrian dan Perdagangan, 8) Dinas Sosial, 9) Dinas Pendidikan, 10) Dinas Kesehatan, 11) Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral, dan 12) Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa. Perangkat daerah lainnya merupakan pendukung bagi ke-12 perangkat daerah di atas.

Fokus masing perangkat daerah sebagai berikut :

1. **Dinas Pariwisata**
   a. Melanjutkan pembangunan di 1 destinasi baru, yaitu : Kelaba Maja, Fatunausus.
   b. Lanjutan pembangunan di 2 destinasi yang dibangun di tahun 2021, yaitu Wae Rebo dan Oeseli.

c. Lanjutan pembangunan untuk penyelesaian 7 (tujuh) destinasi wisata yang dibangun tahun 2019, yaitu Liman, Wolwar, Fatumnasi, Mulut Seribu, Praimadita, Lamalera, dan Koanara.

d. Pada 9 destinasi yang sudah dibangun tersebut masih dibutuhkan pembangunan dari sisi Amenitas (Fasilitas tambahan seperti Gudang, Kolam Renang, Rumah Penjaga Penginapan, mess karyawan, Pos Security, Penataan landscape, peralatan cottage, peralatan resto, Rumah Ekraf, pagar dll.

e. Pada setiap destinasi agar dipastikan tidak hanya terjadi pembangunan fisik destinasi, tetapi agar benar-benar terbentuk kawasan pariwisata estate yang komprehensif dan terintegrasi sehingga nilai tambah pariwisata dapat dinikmati oleh masyarakat sekitar destinasi.

2. Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Difokuskan pada:

a. Penanganan masalah air, melalui pembangunan embung dan penangkap air 33,10% , saluran irigasi, sumur bor, penampung air, sumur bor, sambungan ke rumah, dll.

b. Penanganan masalah air, melalui pembangunan embung, saluran irigasi, penampung air, sumur bor, sambungan yang dapat menjangkau 30 ribu keluarga miskin 1000 HPK

c. Penanganan jalan provinsi yang tersisa dari tahun 2021, sehingga jalan provinsi dalam kondisi mantap menjadi 100%.

d. Penanganan jalan dan jembatan pada Destinasi Wisata, 100%.

e. Penyediaan air bersih dan sanitasi layak dan aman pada wilayah kantong-kantong kemiskinan, stunting, destinasi wisata (80%(KK)) dan 3T.

f. Pembangunan Rumah Layak Huni dengan skema hibah.

g. Pembangunan aksesibilitas jalan pada saluran irigasi dan fasilitas DAM pada titik terendah saluran irigasi.

h. Rekonsiliasi dan sinkronisasi pemanfaatan RTRW Provinsi dan RTRW Kabupaten, Pendampingan persetujuan substansi revisi RTRW Kabupaten 5 Kabupaten, Penyelesaian materi teknis dari bimbingan teknis RDTR 5 Kabupaten.

i. Fasilitasi legalisasi Perubahan Perda Nomor 1 Tahun 2011 akan diselesaikan.

j. Internalisasi kebijakan, pembangunan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi melalui fungsi kelembagaan yang berorientasi partisipatf dan terpadu (RP21 (1 Laporan), RTTD (42 Laporan), RTTG (42 Laporan), Legalisasi P3A/GP3A (15 SK P3A/5 SK GP3A, Penguatan Komisi Irigasi Provinsi/Kabupaten, 1 SK.

k. Peningkatan kualitas hidup melalui revitalisasi (peremajaan) kawasan kumuh 90%.

3. Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral

Difokuskan pada:

a. Penyediaan listrik dengan pemanfaatan energi baru terbarukan (EBT) dengan kapasitas 17.85 KW untuk wilayah/daerah yang tidak ada jaringan PLN dan pada destinasi wisata.

b. Bantuan pemasangan meteran listrik gratis di kantong-kantong kemiskinan (bagi daerah yang telah ada jaringan PLN).

4. Dinas Pertanian

a. Fokus pada produksi komoditas : padi (1.401.120 ton), jagung (1.410.400 ton), kelor dan hortikultura (cabe : 8.486 ton, kacang tanah: 11.529 ton, kacang hijau : 7.982 ton dan bawang merah : 5.013 ton) yang didukung dengan ketersediaan sarana dan prasarana pertanian.

b. Pengembangan Hortikultura untuk mendukung rantai pasok pangan di destinasi wisata.

c. Pengembangan kelor dan pengembangan hortikultura melalui P2L (Pekarangan Pangan Lestari) untuk ketahanan pangan di locus kemiskinan dan stunting.

d. Mendukung pembangunan dan pengembangan *Food Estate.*

e. Pelaksanaan kegiatan diupayakan melalui pola padat karya untuk menjamin peningkatan pendapatan masyarakat, khususnya bagi pekerja tak berbayar.

f. Ketahanan pangan dalam mendukung program stunting (Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL) sebanyak 30 ribu rumah tangga.

5. Dinas Peternakan

a. Difokuskan pada peningkatan populasi ternak sapi (1.305.137 ekor), babi (3.246.707 ekor), ayam kampung (21.306.593 ekor) dalam mendukung program TJPS dan ketersediaan 80 % ternak sehat serta daging konsumsi yang sehat dan aman melalui fasilitasi 20 % Unit usaha pangan asal ternak yang memenuhi standar.

b. Pengembangan babi di instalasi ternak di Sumba, dalam memenuhi kebutuhan akan permintaan babi yang tinggi dan penyediaan ternak dalam mendukung program TJPS di Pulau Sumba.

c. Penyediaan pakan ternak yang disupply oleh pabrik pakan ternak di Kabupaten Kupang, Sumba Tengah dan Manggarai Timur.

d. Penguatan fungsi dan peran instalasi ternak untuk pembibitan dan penggemukan di 8 (delapan) instalasi ternak.

e. Penyediaan Ayam kampung diutamakan untuk kantong-kantong kemiskinan dan stunting. Satu KK mendapat 1 (satu) ekor ayam kampung jantan dan 4 (empat) ekor betina untuk mengatasi kebutuhan protein hewani dari daging ayam dan telur serta membantu peningkatan ekonomi keluarga.

f. Penyusunan statistik ternak (pemanfaatan teknologi Pendataan Jumlah ternak besar).

g. Pengembangan Ternak Ayam kampung untuk kantong-kantong kemiskinan dan stunting sebanyak 10 ribu keluarga 1000 HPK.

6. Dinas Kelautan dan Perikanan

Difokuskan pada :

a. Peningkatan produksi Perikanan budidaya sebesar 10 % yang mencakup pengembangan rumput laut dan kebun bibit, ikan kerapu dan ikan kakap, dikembangkan di Semau dan Mulut Seribu Rote Ndao untuk mendukung rantai pasok protein ikan di destinasi wisata.

b. Peningkatan produksi Perikanan tangkap sebesar 6 % dan memenuhi standar mutu hasil perikanan.

c. Pengelolaan kawasan konservasi di wilayah pesisir dan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan dengan cakupan 94 %.

d. Prosentase peningkatan angka konsumsi ikan sebesar 8,70 % untuk Eradikasi Stunting melalui budidaya lele pekarangan dan rantai dingin sebanyak 10 ribu KK 1000 HPK.

7. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Difokuskan pada :

a. Pemanfaatandan pengembangan hasil hutan bukan kayu (Jahe merah, Porang, Bambu) berbasis perhutanan sosial dengan luasan hutan yang dimanfaatkan sebesar 10.32 %.

b. Peningkatan Perlindungan ekosistem esensial di destinasi wisata sebesar 75 % dan obyek kawasan konservasi SDA 4,2 %.

c. Peningkatan kualitas DAS sebesar 0,25 %.

d. Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (Perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pengawasan dan penegakan hukum) yang diantaranya melalui :

   1) rehabilitasi lahan kritis sebesar 1.22 % dan pengendalian perambahan hutan melalui Pemenuhan SDM berkeahlian khusus (termasuk Polisi hutan) sebanyak 32,75%.
   2) peningkatan indeks kualitas lingkungan 75,42 poin dan pengembangan laboratorium lingkungan.
   3) pengurangan dan penangan sampah (26%) dan limbah B3 (27,33 %).
   4) pengawasan lingkungan dan penegakan hukum.
   5) Pemenuhan ketentuan ijin lingkungan dan ijin PPLH (79,09 %) dan Penanganan pengaduan lingkungan hidup (41,67%).

8. Dinas Perindustrian dan Perdagangan

Difokuskan pada :

a. Pertumbuhan industri pengolahan berbasis potensi lokal dengan memanfaatkan teknologi industry sebanyak 5.957 unit usaha.

b. Standarisasi produk dalam rangka Menumbuhkan sektor hilir terkait pengembangan pariwisata (pelatihan, pembinaan IKRT, dll).

c. Perijinan dan legalisasi (HaKI) serta pengujian dan sertifikasi mutu produk untuk 15 pelaku usaha.

d. Pengembangan sarana distribusi perdagangan.

e. Mengusahakan kerjasana dengan pihak ketiga untuk memastikan ketersediaan bahan pokok dan bahan penting, meningkatkan nilai transaksi khususnya di destinasi wisata.

f. Peningkatan Cakupan distribusi barang di dalam wilayah NTT (termasuk destinasi wisata) sebanyak 50 %.

9. Dinas Sosial

Difokuskan pada :

a. Koordinasi pembenahan (updating, validasi dan penggunaan) menyeluruh terhadap Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) untuk 22 kabupaten / kota dalam penetapan sasaran penerima program pemberdayaan masyarakat, Perlindungan Sosial dan bantuan sosial (PKH, Sembako, KUBE, Jaminan Kesehatan, Bantuan Pendidikan).

b. Mempersiapkan skema pemberian bantuan sosial NTT Sejahtera bagi masyarakat miskin yang tidak tercover secara nasional.

c. Mengkoordinasikan penyelenggaraan administrasi kependudukan yang inklusi (Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS), Perempuan Kepala Keluarga, Disabilitas) untuk mengakses bantuan/jaminan sosial yang tersedia.

10. Dinas Pendidikan

Difokuskan pada :

a. Koordinasi Penyelenggaraan Pendidikan pada SMA/SMK dan SLB dimasa pandemik covid-19 dan tatanan kehidupan baru.

b. Koordinasi persiapan dan penerapan arahan Gubernur tentang mata pelajaran di sekolah dalam rangka peningkatan minat dan bakat anak didik.

c. Kerja sama dengan BLK agar setiap siswa SMK bisa magang di BLK sehingga saat kelulusan juga menerima sertifikat keahlian dari BLK;

d. Penyelenggaraan SMK Plus 1 tahun untuk meningkatkan Skill serta mengatasi kekurangan guru produktif pada SMK.

e. Penguatan kapasitas guru Mata Pelajaran pada SMK dan SMA.

f. Membangun SMK yang mendukung sektor Pariwisata dan Pertanian

g. Dukungan Akreditasi untuk SMA dan SMK.

h. Koordinasi Penyiapan dan updating Data DAPODIK.

i. Koordinasi penyelenggaraan Pendidikan dalam upaya peningkatan kualitas dan kuantitas kelulusan siswa.

j. Koordinasi peningkatan wawasan nasional bagi peserta didik melalui kerja sama dengan Kesbangpol.

11. Dinas Kesehatan dan Dukcapil

Fokus pada :

a. Penanganan masalah malnutrisi pada anak (gizi kurang, gizi buruk maupun stunting, serta wasting dan underweight).

b. Penanganan masalah Kesehatan ibu dan anak (keluarga) terutama pada kantong kemiskinan dan destinasi wisata.

c. Penanganan masalah kesehatan secara promotif dan preventif, termasuk kader kesehatan.

d. Penguatan SDM kesehatan.

e. Upaya peningkatan kualitas layanan KIA di fasilitas kesehatan, penguatan rujukan KIA serta upaya integrasi data dan peningkatan kualitas data.

f. Mengupayakan agar standar biaya insentif dokter spesialis tidak boleh ada perbedaan antar kabupaten se-Nusa Tenggara Timur.

g. Memastikan Covid 19 bisa ditangani, baik melalui vaksinasi, pemeriksaan laboratorium yang terjangkau, maupun pelayanan kesehatan yang memadai.

h. Pencapaian desa Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM).

i. Upaya Kesehatan kerja dan olahraga:

   1) Penguatan SDM Kesehatan.
   2) Penanganan KLB dan Bencana sesuai SPM Provinsi.
   3) Penanganan kesehatan penyakit menular dan tidak menular.
   4) Koordinasi Penyelenggaraan Dukcapil untuk memastikan setiap masyarakat memiliki dokumen dukcapil melalui SIAK.
   5) Pemenuhan sarana Kesehatan bergerak di DTPK dan Destinasi Pariwisata Provinsi.
   6) Penguatan dan fasilitasi Akreditasi FKTP dan FKTL.
   7) Ketersediaan obat yang optimal.
   8) Pengendalian dan pengawasan PBF, PAK dan IUKOT.
   9) Peningkatan Kesehatan melalui pengelolaan dan pemanfaatan herbal.
   10) Sistem Kesehatan Daerah yang terintegrasi.
   11) Pembiayaan Kesehatan yang optimal.
   12) Pencapaian status WTP pada pengelolaan anggaran Kesehatan.

12. Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa

Fokus pada :

a. Mewujudkan posyandu dan pustu sebagai *"one stop service"*. Semua pelayanan pemberian bantuan dilakukan terpusat, seperti pembagian PKH, Sembilan bahan pokok, termasuk memberikan layanan kependudukan bagi masyarakat miskin yang tidak punya administrasi pendudukan, langsung dilayani di sini.

b. Koordinasi Pengembangan kapasitas Desa melalui Desa Model.

c. Penguatan tenaga pendamping desa (Tenaga Pendamping Profesional), termasuk melibatkan Babinsa dan Polisi di desa.

d. Pengembangan BUMDES dan potensi kelembagaan (PKK, Karang Taruna, dll) di desa sebagai kekuatan ekonomi desa dan mendukung Pariwisata.

e. Pengembangan Teknologi Tepat Guna (TTG) yang terkoordinasi bersama Diskopnakertrans dan Perindustrian.

Selain perangkat daerah yang menjadi prioritas utama dalam mendukung pencapaian indikator makro pembangunan daerah di tahun 2022 sebagaimana tersebut di atas, fokus kegiatan penunjang dari beberapa perangkat daerah lainnya sebagai berikut :

1) Dinas Perhubungan

Fokus pada :

a. Kesiapan pembangunan Bandar Udara Sabu Raijua
b. Menyediakan petunjuk arah menuju dan di destinasi wisata (RPPJ), 80%.
c. Penanganan pelabuhan, termasuk mengkoordinasikan perluasan ASDP Sumba Timur, 55%.
d. Mempersiapkan FS, AMDAL, dan DED di P. Rinca (Pelabuhan Laut untuk Kapal Penumpang Wisata/Kapal Cruise), Pra FS 100%, FS 100%.
e. Pengembangan Pelabuhan Tenau-Bolok sebagai pelabuhan hub multi purpose, 80%.

2) Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia

a. Mempersiapkan Grand Design SDM Nusa Tenggara Timur, ASN dan masyarakat umum bukan ASN dan Penyiapan dan Pelaksanaan BLUD.

3) Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Koperasi

Fokus pada :

a. Mempersiapkan tenaga kerja terampil di destinasi wisata (80%), antisipasi pembangunan galangan kapal, agar pekerja terampil tidak didatangkan dari luar Nusa Tenggara.
b. Keikutsertaan pada program "working holiday".
c. Memperliapkan pelatihan kuliner untuk : destinasi wisata, mengisi pasar Australia, PJTKI, dll.
d. Pelatihan untuk penguatan BUMDES, 80%.

4) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Fokus pada :

a. Berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan dan pihak terkait untuk pemberian mata kuliah wawasan kebangsaan.
b. Koordinasi masalah keamanan dan politik dalam menghadapi berbagai agenda yang akan datang.

5) **Badan Perbatasan**

Fokus pada :

a. Konsolidasi masyarakat perbatasan dalam mempersiapkan rencana pembangunan perbatasan sebagai pusat perdagangan.
b. Pemberdayaan masyarakat perbatasan, 90%.
c. Koordinasi, sinkronisasi, kolaborasi pembangunan perbatasan sebagai pengejawantahan Inpres Nomor 1 tahun 2021 tentang percepatan pembangunan ekonomi dan kawasan perbatasan Negara di Aruk, **Motaain** dan Skouw, 85%.

6) **Badan Penanggulangan Bencana Daerah**

Fokus pada :

a. Mitigasi dan adaptasi perubahan iklim dan bencana dalam upaya antisipasi kekeringan, kelaparan, kebakaran, pandemi, dll, 80%.

7) **Badan Penghubung**

Fokus pada :

a. Menjadi wakil Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur di Pusat.
b. Rapat-rapat/pertemuan yang sifatnya koordinatif dan bukan hal teknis Badan Penghubung yang hadiri.

8) **Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**

Fokus pada :

a. Mendukung upaya keterlibatan masyarakat untuk peningkatan kualitas layanan KIA, dan penguatan jejaring rujukan masyarakat, serta upaya pengurangan kekerasan berbasis gender.
b. Pelaksanaan PUG dan PPRG.

9) **Dinas Kominfo :**

Fokus pada penyiapan penerapan E-Government dalam pelaksanaan pemerintahan.

Untuk melaksanakan program dan kegiatan sesuai fokus yang telah ditetapkan tersebut, maka diberikan pagu indikatif anggaran pada masing-masing perangkat daerah. Pagu Indikatif per Perangkat Daerah untuk tahun 2022 sebagaimana terlihat pada tabel 6.1 berikut.

Tabel 6.1
Pagu Indikatif Perangkat Daerah Tahun 2022

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Proritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah
			Tahun-2 (2022)		
			target	Rp	
1	2	3	4	5	6
Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar					
1. Pendidikan					
Program Pengelolaan Pendidikan	Meningkatnya Persentase Partisipasi Sekolah			**1.942.686.281.705**	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	APS kelompok 16 - 18 Tahun (SMA dan SMK) (Data Terpilah Gender)	%	100		
	- APS SLB	%	100		
	Meningkatnya SMK yang direvitalisasi menjadi SMK Percontohan dengan kualitas lulusan yang bersaing (Jurusan Pariwisata, Kuliner, Fashion, dan Maritim) (8 Unit)	%	75		
Program Pengembangan Kurikulum	Cakupan SLB, SMA dan SMK berakreditasi B			**980.000.000**	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1. Cakupan SLB berakreditasi B (32 unit)	%	13%		
	2. Cakupan SMA berakreditasi B (554 Unit)	%	35,0		
	3. Cakupan SMK berakreditasi B (295 unit)	%	19,0		
	Cakupan Pemenuhan SPM Pendidikan	%	100		
Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Cakupan Ketersediaan Guru SLB, SMA dan SMK berkompeten (bersertifikat) setiap tahun			**700.590.700**	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1. Cakupan Ketersediaan Guru SLB berkompeten (bersertifikat) setiap tahun (847 orang)	%	74,97		
	2. Cakupan Ketersediaan Guru SMA berkompeten (bersertifikat) setiap tahun (16.164 orang)	%	74,86		DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	3. Cakupan Ketersediaan Guru SMK berkompeten (bersertifikat) setiap tahun (8.024 orang)	%	74,78		
Program Pengembangan Bahasa dan Sastra	Meningkatnya Pembinaan, Pengembangan dan Perlindungan Bahasa dan Sastra yang Penuturannya Lintas Daerah Kab/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi (12 paket bahasa dan sastra)	%	66,67	**779.802.582**	
2. Kesehatan					

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Proritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah
			Tahun-2 (2022)		
			target	Rp	
1	2	3	4	5	6
Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat				**230.733.110.022**	
	Pelayanan Kesehatan bagi penduduk terdampak Krisis Kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana (SPM Kesehatan Provinsi)	%	100		DINAS KESEHATAN dan DUKCAPIL
	Pelayanan kesehatan bagi orang yang terdampak dan berisiko pada situasi KLB Provinsi (SPM Kesehatan Provinsi)	%	100		DINAS KESEHATAN dan DUKCAPIL
	Peningkatan kualitas layanan UKM dan UKP (Akreditasi Puskesmas : 418 Unit, Akreditasi RS: 53 Unit, 471 Unit)	%	84,9		DINAS KESEHATAN dan DUKCAPIL
	Peningkatan cakupan pelayanan kesehatan masyarakat melalui layanan kesehatan bergerak di DTPK (Daerah Tertinggal, Perbatasan dan Kepulauan) (Total 7 Unit)	%	71,4		DINAS KESEHATAN dan DUKCAPIL
	Kasus Kematian Ibu	Kasus	0		DINAS KESEHATAN dan DUKCAPIL
	Kasus Kematian Bayi	Kasus	0		
	Kasus Kematian Balita	Kasus	0		
	Wasting (Gizi Buruk dan Gizi Kurang)	%	7,5		
	Underweight	%	15,4		
	Prevalensi Stunting	%	16,0		
	Angka Kelahiran Total (TFR)	Poin	2,8		DINAS KESEHATANdan DUKCAPIL
	Angka Pemakaian Kontrasepsi (CPR)	%	53		
	Peningkatan Fasilitas Pelayanan, Sarana Prasarana dan Alkes untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Provinsi (Target : 6 unit)	%	66,7		DINAS KESEHATAN dan DUKCAPIL
	Persentase Kasus HIV yang diobati	%	54		DINAS KESEHATAN dan DUKCAPIL
	Persentase Kabupaten / Kota mencapai Eliminasi Malaria	%	77,3		
	Kab/kota dengan angka keberhasilan pengobatan (success Rate) TBC>85%	%	77,3		

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Proritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah
			Tahun-2 (2022)		
			target	Rp	
1	2	3	4	5	6
	Kabupaten / kota dengan prevalensi Rate Kusta <1/10.000	%	95,5		
	Meningkatnya pencapaian SPM Rumah Sakit	%	100		RSUD PROF. DR. W.Z. JOHANNES KUPANG
	Meningkatnya Kemandirian BLUD RSU	%	50		RSUD PROF. DR. W.Z. JOHANNES KUPANG
Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Persentasi Puskesmas dengan Tenaga Kesehatan Sesuai Standar (Puskesmas : 9 Jenis tenaga kesehatan) Target : dari 92 menjadi 418 unit	%	74,16	**25.669.406.874**	DINAS KESEHATAN
	Persentasi Rumah Sakit dengan Tenaga Kesehatan Sesuai Standar (53 RS : 12 Jenis tenaga kesehatan)	%	73,58		DINAS KESEHATAN
	Persentasi SDM Kesehatan yang ditingkatkan Kompetensi dan Kualifikasinya	%	81,00		DINAS KESEHATAN
	Persentasi SDM RSU Daerah yang ditingkatkan Kompetensi dan Kualifikasinya	%	100,00		RSUD PROF. W. Z JOHANNES KUPANG
Program Sediaan Farmasi Alat Kesehatan dan Makanan dan Minuman	Ketaatan dan Kepatuhan Pedagang Besar Farmasi (PBF) Cabang dan Cabang Penyalur Alat Kesehatan (PAK)	%	100,0	**750.581.000**	DINAS KESEHATAN
Program Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kesehatan	Peningkatan Cakupan Pemberdayaan Masyarakat melalui pos Upaya Kesehatan Kerja (UKK)	%	86,4	**435.560.000**	DINAS KESEHATAN
	Peningkatan Cakupan upaya kesehatan berbasis masyarakat (22 Kab x 20 Desa = 440 Desa)	%	72,7		DINAS KESEHATAN
3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman					
Program Pengelolaan Sumber Daya Air	Cakupan Pembangunan Embung dan Bangunan Penampung Air setiap tahun (Target pembangunan 142 embung)	%	33,10	**219.573.727.220**	Dinas PUPR
	Cakupan Pemeliharaan embung Kecil (142 Buah) dan bangunan penampung air setiap tahun	%	66,90		Dinas PUPR
	Cakupan Pemeliharaan Saluran irigasi menurut	%	76.74		Dinas PUPR

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Proritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah
			Tahun-2 (2022)		
			target	Rp	
1	2	3	4	5	6
	Klasifikasinya setiap tahun				
	Cakupan Pemeliharaan Daerah Irigasi Kewenangan Provinsi setiap tahunnya (42 DI = 60.328 ha)	%	64,42		Dinas PUPR
	Cakupan Koordinasi dan Sinkronisasi Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Provinsi	%	80		Dinas PUPR
	Cakupan Pemeliharaan Bangunan Perkuatan Tebing pada 22 Sungai	%	95.45		Dinas PUPR
Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Cakupan KK yang mampu mengakses air minum layak tingkat Provinsi	%	85	**6.825.804.434**	Dinas PUPR
	Cakupan KK yang mampu mengakses air minum layak di di Kawasan Destinasi Pariwisata	%	80		Dinas PUPR
Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional	Cakupan Pembangunan TPA / TPST / SPA terbangun lingkup Provinsi	%	64	415.275.000	Dinas PUPR
Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Cakupan Pengelolaan Limbah Domestik	%	72		Dinas PUPR
Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	Cakupan Penanganan Kawasan banjir sekitar wilayah sungai yang merupakan kewenangan Provinsi	%	0	-	Dinas PUPR
Program Pengembangan Permukiman	Cakupan Kawasan Permukiman Kumuh yang ditangani setiap tahun	%	90	**114.478.551.010**	Dinas PUPR
	Cakupan Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Provinsi yang ditangani setiap tahun	%	70		Dinas PUPR
	Cakupan Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum Layak Lingkup Provinsi setiap tahun di Kawasan Destinasi Wisata	%	63,64		Dinas PUPR
Program Penataan Bangunan Gedung	Cakupan Penataan bangunan sesuai ketentuan tata bangunan setiap tahun	%	3	**925.208.680**	Dinas PUPR

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Proritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah
			Tahun-2 (2022)		
			target	Rp	
1	2	3	4	5	6
	Cakupan Pembinaan penyelenggaraan bangunan gedung setiap tahun	%	60	-	Dinas PUPR
Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya	Terlaksananya penyelenggaraan penataan bangunan dan lingkungan untuk kepentingan strategis daerah provinsi dan lintas Kab/Kota	%	66		Dinas PUPR
Program Penyelenggaraan Jalan	Peningkatan Cakupan Kemantapan Jalan Provinsi	%	100	**488.063.323.408**	Dinas PUPR
	Persentase ketersediaan jalan dan jembatan ke 22 Pariwisata Estate	%	100		Dinas PUPR
Program Pengembangan Jasa Konstruksi	Terselenggaranya industri konstruksi yang memenuhi 5 aspek jasa konstruksi yaitu Tepat waku, Tepat Mutu, Tepat Kuantitas, Tepat sasaran dan Tepat Manfaat	%	84	**3.255.843.368**	Dinas PUPR
Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Cakupan wilayah provinsi dan Kabupaten/Kota yang telah memiliki Perda RUTR dan RDTR	%	42,2	**6.957.317.502**	Dinas PUPR
	Penurunan Cakupan Penyimpangan terhadap RUTR dan RDTR pada Tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota	%	14,3		Dinas PUPR
4. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman					
Program Pengembangan Perumahan	Ketersediaan rumah bagi warga yang terkena relokasi rumah program pemerintah provinsi	%	67	**4.400.000.000,00**	Dinas PUPR
Program Kawasan Permukiman	Peningkatan Cakupan Rumah Layak Huni (Target penanganan RTLH sampai dengan 2023 = 47.948 Unit)	%	72	**42.932.122.751**	Dinas PUPR
	Persentase rumah tangga menurut sanitasi layak	%	80		Dinas PUPR
Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	Peningkatan Cakupan Prasarana dan Utilitas Umum pada Permukiman	%	78	**13.674.243.475**	Dinas PUPR
5. Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyakarat					
Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Meningkatnya pencapaian SPM Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	%	100	**3.441.218.192**	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Proritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah
			Tahun-2 (2022)		
			target	Rp	
1	2	3	4	5	6
	Meningkatnya Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat (Jumlah Perda yang ditegakkan)	%	100		SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
Program Penanggulangan Bencana	Cakupan Daerah (Provinsi dan Kabupaten/Kota) yang memiliki rencana Kontinjensi Kebencanaan	%	80	**1.646.646.258**	BPBD
	Cakupan Pemasangan Rambu Peringatan dini pada daerah rawan bencana	%	80		BPBD
	Cakupan Pemasangan Rambu Peringatan dini pada Kawasan Pariwisata Estate	%	66,6		BPBD
	Cakupan Desa/Kelurahan tangguh bencana pada Kawasan Pariwisata Estate	%	87,5		BPBD
Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Cakupan Pencegahan Daerah Berpotensi Rawan Kebakaran setiap Tahun	%	100	187.558.781	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	Cakupan Penanggulangan Daerah Berpotensi Rawan Kebakaran setiap Tahun	%	85		
	Cakupan Penyelamatan Daerah Berpotensi Rawan kebakaran:				
	a. Kebakaran	%	85		
	b. Non Kebakaran	%	85		
6. Sosial					
Program Pemberdayaan Sosial	Peningkatan Cakupan PMKS (Target Total PSKS=110 Unit)	%	90	**4.207.151.114**	DINAS SOSIAL
Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan	Meningkatnya penanganan warga negara pekerja migran korban tindak kekerasan (Jumlah Warga Negara Migran Yang Ditangani)	%	90	**255.526.847**	DINAS SOSIAL
Program Rehabilitasi Sosial	Meningkatnya pencapaian SPM bidang sosial	%	90	**11.147.139.607**	DINAS SOSIAL
Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Peningkatan Cakupan Jaminan Sosial bagi PMKS	%	90	**3.414.706.409**	DINAS SOSIAL
Program Penanganan Bencana	Peningkatan Cakupan Penanganan Korban Bencana Skala Provinsi	%	90	**602.582.265**	DINAS SOSIAL
Program Pengelolaan Taman Makam	Meningkatnya pengelolaan Taman Makam Pahlawan	%	100	**75.974.408**	DINAS SOSIAL

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Proritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah
			Tahun-2 (2022)		
			target	Rp	
1	2	3	4	5	6
Pahlawan	kewenangan provinsi				
Urusan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar					
1. Tenaga Kerja					
Program pelatihan kerja dan produktivitas tenaga kerja	Peningkatan cakupan peserta pelatihan bersertifikat kompetensi dibanding jumlah peserta pelatihan	%	80	**327.957.444**	DINAS KOPERASI, UKM, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	Persentasi penyerapan eks peserta pelatihan di pasar kerja	%	55		DINAS KOPERASI, UKM, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
Program Penempatan Tenaga Kerja	Persentasi besaran pencari kerja terdaftar yang ditempatkan	%	50	**201.353.194**	DINAS KOPERASI, UKM, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	Persentasi meningkatnya PMI prosedural	%	75		DINAS KOPERASI, UKM, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
Program Hubungan Industrial	Persentase jumlah perusahaan yang melaksanakan Upah Minimum Provinsi	%	70	**106.483.564**	DINAS KOPERASI, UKM, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	Persentase kasus ketenagakerjaan yang diselesaikan	%	80		DINAS KOPERASI, UKM, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
Program Pengawasan Ketenagakerjaan	Persentase Jumlah Perusahaan yang melaksanakan Norma Kerja di Provinsi NTT	%	55	**120.348.400**	DINAS KOPERASI, UKM, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	Persentase Pemeriksaan Perusahaan oleh Pengawas	%	55		DINAS KOPERASI, UKM, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
2. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak					
Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Cakupan Kabupaten dan Kota yang melaksanakan Pengarusutamaan Gender (PUG) (22 Kabupaten/Kota)	%	50,7	**1.843.753.698**	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	Cakupan Perangkat Daerah yang melaksanakan Pengarusutamaan Gender (PUG) (53 Unit)	%	90		

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Proritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah
			Tahun-2 (2022)		
			target	Rp	
1	2	3	4	5	6
Program Perlindungan Perempuan	Peningkatan Cakupan penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan (Total 290 Kasus)	%	80	**1.029.225.236**	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	Peningkatan Cakupan penanganan kasus kekerasan terhadap anak (295 Kasus)	%	80		
Program Peningkatan Kualitas Keluarga	Peningkatan Cakupan Keluarga yang melaksanakan pola asuh setara gender (0 KK menjadi 750 KK)	%	50	**485.614.344**	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	Peningkatan lembaga yang memfasilitasi terwujudnya ketahanan keluarga (Target total = 10 Lembaga)	%	80		
	Peningkatan Cakupan pendampingan Champion Gender dalam pola asuh pemenuhan hak anak untuk pencegahan stunting (Target: 500 Keluarga)	%	62,5		
Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak	Cakupan ketersediaan dan pemanfaatan data gender dan anak	%	40	**187.881.645**	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	Peningkatan Cakupan Desa Layak Anak (Jumlah Desa yang telah mencapai tahapan Desa layak anak : Target 250 Desa)	%	75,6	**835.914.157**	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
Program Perlindungan Khusus Anak	Peningkatan cakupan perlindungan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum yang mendapatkan layanan komprehensif / sesuai standar (Target : 125 ABH)	%	55,2	**94.105.062**	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
3. Pangan					
Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Prosentase Peningkatan konsumsi pangan perkapita sesuai angka kecukupan gizi di kantong kemiskinan dan Stunting	%	2,79	**3.279.328.758**	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	Prosentase Peningkatan Konsumsi Pangan Pokok Non Beras di kantong kemiskinan dan Stunting	%	9,30		DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Proritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah
			Tahun-2 (2022)		
			target	Rp	
1	2	3	4	5	6
Penanganan kerawanan pangan	Persentase Penurunan Jumlah Desa Rawan Pangan (Tahun 2019 = 742 Desa, 2023 = 0 Desa)	%	25,07	**130.205.934**	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
Program Pengawasan keamanan pangan	Persentase Peningkatan produsen pangan segar terjamin keamanan pangan (Target 2023=86 Kelompok)	%	74,42	**332.396.979**	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
4. Pertanahan					
Program Pengelolaan Izin Lokasi	Pelayanan Rekomendasi Izin Lokasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota Dalam Daerah Provinsi	%	54,55	-	Dinas PUPR
Program Penyelesaian Ganti Kerugian Dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan	Penyelesaian masalah ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan oleh pemerintah Provinsi	%	54,55	-	Dinas PUPR
Program Redistribusi Tanah Dan Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum Dan Tanah Absentee	Penetapan subyek dan obyek redistribusi tanah serta ganti kerugian tanah kelebihan maksimum dan tanah absentee lintas daerah Kabupaten/Kota dalam daerah Provinsi	%	54,55	-	Dinas PUPR
Program Penetapan Tanah Ulayat	Penetapan tanah ulayat yang lokasinya lintas daerah Kabupaten/Kota dalam daerah Provinsi	%	54,55	-	Dinas PUPR
Program Pengelolaan Tanah Kosong	Fasilitasi penyelesaian masalah tanah kosong lintas daerah kabupaten/kota dalam provinsi serta Inventarisir dan memanfaatkan tanah kosong lintas daerah Kabupaten/Kota dalam daerah Provinsi	%	54,55	-	Dinas PUPR
Program Penatagunaan Tanah	Perencanaan penggunaan tanah yang hamparannya lintas daerah Kabupaten/Kota dalam daerah Provinsi	%	54,55	**353.995.591**	Dinas PUPR
5. Lingkungan Hidup					
Program Perencanaan lingkungan hidup	Persentase Pemanfaatan dokumen Perencanaan LH	%	78,26	**1.039.471.691**	DINAS KEHUTANAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
Program Pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Poin	75,42	**2.055.530.070**	DINAS KEHUTANAN DAN LINGKUNGAN HIDUP

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Proritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah
			Tahun-2 (2022)		
			target	Rp	
1	2	3	4	5	6
Program Pengendalian bahan berbahaya dan beracun (B3) dan limbah bahan berbahaya dan beracun (Limbah B3)	Persentase limbah B3 yang diangkut atau diolah	%	27,33	**7.642.505.016**	DINAS KEHUTANAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
Program Pembinaan dan pengawasan terhadap izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (PPLH)	Persentase pemenuhan ketentuan ijin lingkungan dan ijin PPLH	%	79,09	**308.692.114**	DINAS KEHUTANAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
Program Penghargaan lingkungan hidup untuk masyarakat	Persentase peningkatan kualitas LH di suatu daerah	%	16,67	**541.932.352**	DINAS KEHUTANAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	Persentase pengaduan lingkungan hidup yang tertangani	%	41,67	**277.451.100**	DINAS KEHUTANAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
Program Pengelolaan persampahan	Persentase Pengurangan dan Penanganan Sampah	%	26	**555.283.426**	DINAS KEHUTANAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
6. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil					
Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Cakupan kepemilikan KTP elektronik untuk penduduk wajib KTP	%	97	**638.092.112**	DINAS KESEHATAN
	Cakupan penduduk <17 tahun memiliki kartu identitas anak	%	80		DINAS KESEHATAN
	Cakupan anak 0-18 tahun memiliki akta kelahiran	%	90		DINAS KESEHATAN
	Cakupan Pemanfaatan Data Kependudukan (Perjanjian Kerjasama dengan Perangkat Daerah = 10 PD)	%	76,9		DINAS KESEHATAN
7. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa					
Program Penataan Desa	Meningkatnya penataan pemerintahan dan pelayanan kemasyarakatan di desa (Jumlah Desa persiapan yang telah memiliki kode registrasi)	%	100	-	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Proritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah
			Tahun-2 (2022)		
			target	Rp	
1	2	3	4	5	6
Program Peningkatanan Kerjasama Desa	Meningkatnya kerja sama desa dengan pihak non pemerintah (Jumlah perjanjian kerjasama desa dengan Pihak Ketiga (Bumdes Bersama; BKAD; BPMD, Posyandu)	%	68,2	-	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA
Program Administrasi Pemerintahan Desa	Meningkatnya status desa minimal Desa Berkembang sebanyak 132 desa sampai dengan tahun 2023	%	66,7	**2.043.212.130**	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA
Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	**Peningkatan Cakupan Pemberdayaan Kelompok Masyarakat**			**37.065.094.088**	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA
	Bidang Ekonomi (Target Tahun 2023 = 1.500 Unit)	%	88,00		DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA
	Bidang Sosial (Target Tahun 2023 = 6.652 Unit Aktif)	%	91,73		
	Adat (Target 2023= 132 Unit)	%	66,67		
	Peningkatan Cakupan Pemberdayaan				DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA
	PKK Aktif	%	80		
	Persentase Peningkatan BUMDES Aktif (Tahun 2010=780 Bumdes, 2023 = 1500 Bumdes)	%	88		
8. Perhubungan					
Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Peningkatan Cakupan fasilitas keselamatan jalan terpasang pada Ruas Jalan Provinsi	%	30	**3.519.981.244**	DINAS PERHUBUNGAN
Program Pengelolaan Pelayaran	Peningkatan Kecepatan Layanan Pemberian Ijin dan Rekomendasi di Bidang Pelayaran	%	30	**23.709.201.697**	DINAS PERHUBUNGAN
	Persentase Peningkatan Arus Masuk dan Keluar Barang di Pelabuhan yang dikelola Pemerintah Provinsi	%	60		DINAS PERHUBUNGAN
Program Pengelolaan Perkeretaapian	Meningkatnya perencanaan kapasitas mobilisasi orang dan distribusi barang serta terpenuhinya kebutuhan pertahanan keamanan di kawasan perbatasan	%	100	**1.354.567.073**	DINAS PERHUBUNGAN
9. Komunikasi dan Informatika					

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Proritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah
			Tahun-2 (2022)		
			target	Rp	
1	2	3	4	5	6
Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	Persentase Peningkatan Skor keterbukaan informasi publik	Skor	85 (Menuju Informatif)	**1.130.177.866**	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	Persentase Kelengkapan Informasi Publik pada Kawasan Pariwisata Estate	%	68,2		DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Meningkatnya Indeks Penyelenggaraan SPBE	Skor	2,5	**3.255.210.465**	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
10. Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah					
Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam	Persentase Koperasi aktif	%	96		DINAS KOPERASI, UKM, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	Persentase Pemberian Ijin Usaha Simpan Pinjam	%	5		
	Persentase Pembentukan Koperasi Kelompok Perempuan	%	15		
Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)	Persentase Peningkatan Nilai Transaksi UMKM	%	83	**517.120.426**	DINAS KOPERASI, UKM, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	Persentase Peningkatan Nilai Transaksi UMKM di Kawasan Pariwisata Estate	%	68	**1.110.084.639**	DINAS KOPERASI, UKM, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	Persentase Kelompok Perempuan yang mendapatkan bantuan Modal Usaha	%	74	**1.350.000.000**	DINAS KOPERASI, UKM, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	Persentase Kelompok Perempuan yang mendapatkan pelatihan Kewirausahaan	%	82	**1.110.084.639**	DINAS KOPERASI, UKM, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
11. Penanaman Modal					
Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Persentase PMA dan PMDN yang direalisasi setiap tahun	%	25	**458.473.508**	DPMPTSP
Program Promosi Penanaman Modal	Persentase Peningkatan MOU dengan calon investor setiap tahun	%	66.66	**599.051.406**	DPMPTSP
Program Pelayanan Penanaman Modal	Persentase izin dan non izin yang diterbitkan tepat waktu sesuai SOP	%	100	**797.128.135**	DPMPTSP
Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman	Persentase PMA dan PMDN yang taat pada ketentuan yang berlaku	%	100	**343.856.728**	DPMPTSP

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Proritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah
			Tahun-2 (2022)		
			target	Rp	
1	2	3	4	5	6
Modal					
Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Persentase Calon Investor yang terlayani kebutuhan datanya	%	100	**154.215.291**	DPMPTSP
	Persentase Calon Investor yang terlayani kebutuhan informasi perijinan investasi	%	100		DPMPTSP
12. Kepemudaan dan Olahraga					
Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Proporsi Pertambahan Wirausaha Muda termasuk Kelompok Disabilitas dengan data terpilah gender setiap tahun (2.000 calon wirausaha muda)	%	90,0	**3.045.447.113**	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
Program Pengembangan Daya Saing Keolahragaan	Presentasi Peningkatan Perolehan Medali Cabang Olahraga Prestasi dan Paralimpik			**47.428.840.461**	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	Medali (200 buah)	%	75,0		
	Cabor (13 cabor)	%	92,3		
	Cakupan pembinaan olahraga tradisional dan rekreasi untuk mendukung Pariwisata Estate, Total 7 Cabor tradisional dan 6 Cabor rekreasi				DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	Cabor tradisional	%	100,0		
	Cabor rekreasi	%	100,0		
	Presentasi Peningkatan Perolehan Medali dari Atlit Paralimpik (Atletik, Catur, Renang) setiap dua tahun	Medali/%	0		DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	Cakupan Pembinaan terhadap organisasi kepramukaan binaan Kwartir Daerah dan Kwartir Cabang setiap tahun (23 Kwartir Daerah dan Kwartir Cabang)	%	65,2	**1.042.000.000**	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
13. Statistik					
Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Data Statistik Sektoral untuk Perencanaan Pembangunan Sektoral	%	100	**104.109.763**	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Proritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah
			Tahun-2 (2022)		
			target	Rp	
1	2	3	4	5	6
	Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Data Statistik Sektoral untuk Evaluasi Hasil Pembangunan Sektoral	%	100		DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
14. Persandian					
Program Penyelenggaraan Persandian untuk pengamanan informasi	Indeks Kematangan Keamanan Informasi	Level	4-4,9 (Baik)	**290.366.450**	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
15. Kebudayaan					
Program Pengembangan Kebudayaan	Meningkatnya Persentase Warisan Nilai Budaya yang dilestarikan (Rumah Budaya Nusantara 5 unit; Warisan Budaya Tak Benda 20 unit, Bahasa Daerah 68 unit)	%	49,46	**7.828.203.807**	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Program Pengembangan Kesenian Tradisional	Cakupan Kesenian Tradisional Ikonik/Langka pada setiap daerah yang dilestarikan	%	8	**2.664.261.145**	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	Cakupan Kesenian Tradisional Populer pada setiap daerah yang dikembangkan	%	8		
Program Pembinaan Sejarah	Cakupan Sejarah Lokal dari setiap daerah yang dipublikasi (Sanggar Budaya 25 Unit)	%	38	**260.500.000**	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya	Cakupan Cagar Budaya setiap daerah yang dilestarikan (Cagar Budaya 2 buah, Desa Adat 25 buah)	%	26	**2.377.723.701**	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Program Pengelolaan Permuseuman	Meningkatnya Akses masyarakat terhadap Museum (4 unit) (Total per tahun 20.000 orang)	%	80	**1.152.977.168**	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
16. Perpustakaan					
Program Pembinaan Perpustakaan	Cakupan Perpustakaan aras Provinsi dan Kabupaten/Kota yang menerapkan *e-library*	%	100	**5.354.949.861**	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
	Persentase Peningkatan Jumlah Kunjungan Perpustakaan berbasis Jejaring dan Fisik	%	75,0		DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
Program Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno	Persentase Koleksi Daerah yang diserahkan ke Nasional setiap tahun (22 Kab/Kota)	%	45,5		DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Proritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah
			Tahun-2 (2022)		
			target	Rp	
1	2	3	4	5	6
	Cakupan Koleksi Naskah Kuno yang dilestarikan setiap tahun	%	45,5		DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
17. Kearsipan					
Program Pengelolaan Arsip	Meningkatnya pengelolaan arsip daerah	%	100,0	**1.417.446.302**	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip	Meningkatnya perlindungan dan penyelamatan arsip	%	100,0	**312.599.823**	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
Urusan Pemerintahan Pilihan					
1. Kelautan dan Perikanan					
Program Pengelolaan Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Cakupan Luas Kawasan Konservasi Perairan Daerah yang dikelola	%	94	**2.648.457.130**	DKP
Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Presentase peningkatan Produksi Perikanan Tangkap	%	6	**22.997.500.000**	DKP
	Presentase peningkatan Produksi Perikanan Tangkap di Pariwisata Estate	%	6		DKP
Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Presentase peningkatan Produksi Perikanan Budidaya	%	10	**15.474.512.250**	DKP
	Presentase peningkatan Produksi Perikanan Budidaya di Pariwisata Estate	%	10		DKP
Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	Penurunan Kasus UU Fishing (Illegal, Unregulation, Unreported Fishing)	%	20	**4.189.275.862**	DKP
Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Persentase Peningkatan Angka Konsumsi Ikan	%	8,70	**935.000.000**	DKP
2. Pariwisata					
Program peningkatan daya tarik destinasi pariwisata	Persentase peningkatan jumlah kunjungan wisatawan pada Destinasi Pariwisata yang mendapatkan program peningkatan	%	42,27	**20.000.000.000**	DISPAREKRAF
	Peningkatan Cakupan Desa Wisata pada Kawasan Pariwisata Estate	%	79,17		
Program Pemasaran Pariwisata	Pertumbuhan kunjungan wisatawan	%	42,27	**8.996.918.074**	DISPAREKRAF

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Proritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah
			Tahun-2 (2022)		
			target	Rp	
1	2	3	4	5	6
Program Pengembangan Ekonomi Kreatif melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	Cakupan Produk Sub Sektor Ekonomi Kreatif yang mendapatkan Hak Paten (HKI)	%	5,00	**7.289.546.133**	DISPAREKRAF
	Cakupan Produk Sub Sektor Ekonomi Kreatif yang mendapatkan perlindungan dari penggunaan yang tidak sah	%	93,75		
Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Peningkatan Cakupan Ketersediaan SDM Pariwisata bersertifikasi menurut jenis keahliannya:			**5.835.420.194**	DISPAREKRAF
	a. Tour operator	%	79,17		
	b. Guide/Pemandu Wisata	%	79,17		
	c. Pelaku Ekonomi Kreatif	%	79,17		
	d. Restourant	%	79,17		
	e. Perhotelan	%	79,17		
	f. Pramuwisata	%	79,17		
	g. Transportasi	%	79,17		
	h. Informasi	%	79,17		
	Peningkatan Cakupan POKDARWIS pada Kawasan Pariwisata Estate (Target 24 Pokdarwis di Tahun 2023)	%	79,17		DISPAREKRAF
3. Pertanian					
Program Penyediaan dan pengembangan sarana pertanian	**Pertumbuhan Populasi Ternak:**			**45.396.204.718**	DINAS PETERNAKAN
	a. Ternak Besar	%	6,5		DINAS PETERNAKAN
	- Sapi	Ekor	1.305.137		
	- Kerbau	Ekor	206.782		
	- Kuda	Ekor	135.129		
	b. Ternak Kecil	%	11,02		DINAS PETERNAKAN
	- Kambing	Ekor	1.083.865		
	- Domba	Ekor	89.336		
	- Babi	Ekor	3.246.707		
	c. Unggas	%	5,8		
	- Unggas	Ekor	21.306.593		
	Pertumbuhan Populasi Ternak di kantong kemiskinan dan Stunting				
	a. Unggas	%	5,8		DINAS PETERNAKAN
	Produksi unggas untuk penanggulangan gizi buruk	Ekor	21.306.593		
	Persentase pertumbuhan populasi peternakan di Pariwisata estate				

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Proritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah
			Tahun-2 (2022)		
			target	Rp	
1	2	3	4	5	6
	a. Ternak Besar	%	6,5		DINAS PETERNAKAN
	- Sapi	Ekor	1.305.137		
	- Kerbau	Ekor	206.782		
	- Kuda	Ekor	135.129		
	b. Ternak Kecil	%	11,02		DINAS PETERNAKAN
	- Kambing	Ekor	1.083.865		
	- Domba	Ekor	89.336		
	- Babi	Ekor	3.246.707		
	c. Unggas	%	5,8		DINAS PETERNAKAN
	- Unggas	Ekor	21.306.593		
Program Penyediaan dan pengembangan sarana pertanian	**Persentase penggunaan benih bersertifikat**	%	100		DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
Program Penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian	**Pertumbuhan Produksi tanaman pangan dan perkebunan yang difasilitasi**			**5.405.624.440**	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	Produksi Padi (Tahun 2019 = 1.269.406 Ton, 2023 = 1.471.176 Ton)	%	95,24		DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	Produksi Jagung (Tahun 2019 = 848.998 Ton, 2013 = 1.853.552 Ton)	%	76,09		
	Produksi Cabe (Tahun 2019 = 7.100 Ton, 2023 = 8.910 Ton)	%	95,24		
	Produksi kacang tanah (Tahun 2019 = 10.040 Ton, 2023 = 12.105 Ton)	%	95,24		
	Produksi kacang hijau (Tahun 2019 = 7.966 Ton, 2023 = 8.382 Ton)	%	95,23		
	Produksi Bawang Merah (Tahun 2019 = 4542 ton, 2023 = 5.264 ton)	%	95		DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	Pertumbuhan Produksi tanaman perkebunan yang difasilitasi				
	Produksi daun basah = Luas Panen x Produktivitas Marungga (Tahun 2019 = 0 , 2023 = 1300 ton)	%	100		DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	Produksi daun Kering = 10 % x produksi daun basah (Tahun 2019 = 0, 2023 = 130 Ton)	%	100		

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Proritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah
			Tahun-2 (2022)		
			target	Rp	
1	2	3	4	5	6
	Produksi tepung = 10% x daun kering (Tahun 2019 = 0, 2023 = 13 Ton)	%	100		
	Produksi Kelapa (Tahun 2019 = 69.408 Ton, 2023 = 87.327 Ton)	%	95		
	Produksi Kopi (Tahun 2019 = 23.730 Ton, 2023 = 30.846 Ton)	%	93		
	Produksi Kakao (Tahun 2019 = 19.295 Ton, 2023 = 27.260 Ton)	%	90		
	Produksi Jambu Mete (Tahun 2019 = 49.858 Ton, 2023 = 78.823 Ton)	%	90		
	Produksi Cengkeh (Tahun 2019 = 3.514 Ton, 2023 = 5158 Ton)	%	87		
	Produksi Pinang (Tahun 2019 = 5.448 Ton, 2023 = 7.664 Ton)	%	91		
	Pertumbuhan Produksi tanaman pangan di kawasan Pariwisata Estate yang difasilitasi				
	Produksi Bawang Merah (Tahun 2019 = 189,20 ton, 2023 = 200,72 ton)	%	98,52		DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	Produksi Kentang (Tahun 2019= 110,40 ton, 2023 = 117,17 ton)	%	99		
	Produksi Wortel (Tahun 2019= 1.100 ton, 2023 = 1.167,50 ton)	%	99		DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	Produksi Semangka (Tahun 2019= 103 ton, 2023 = 109,32 ton)	%	99		
	Produksi Mangga (Tahun 2019= 824 ton, 2023 = 874,56 ton)	%	99		
	Pertumbuhan Produksi tanaman Perkebunan di kawasan Pariwisata Estate yang difasilitasi				DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Proritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah
			Tahun-2 (2022)		
			target	Rp	
1	2	3	4	5	6
	Produksi Kelapa (Tahun 2019= 381,43 ton, 2023 = 429,30 ton)	%	97		
	Produksi Kopi (Tahun 2019= 431,70 ton, 2023 = 485,88 ton)	%	97		
	Cakupan populasi ternak besar, kecil dan unggas di kawasan pariwisata estate	%	100		DINAS PETERNAKAN
	a. Ternak Besar	%	6,5		
	- Sapi (Tahun 2019 = 1.027.256 ekor, 2023 = 1.398.971 ekor)	%	93		
	- Kerbau (Tahun 2019 = 165.551 ekor, 2023 = 221.682 ekor)	%	93		DINAS PETERNAKAN
	- Kuda (Tahun 2019= 114.514 ekor, 2023 = 141.672)	%	95		
	b. Ternak Kecil	%	11,02		
	- Kambing (Tahun 2019= 693.577 ekor, 2023= 1.184.828 ekor)	%	91		
	- Domba (Tahun 2019= 68.388 ekor, 2023 = 95.507 ekor)	%	94		DINAS PETERNAKAN
	- Babi (Tahun 2019=2.141.246 ekor, 2023=3.650.523 ekor)	%	89		
	c. Unggas	%	5,8		DINAS PETERNAKAN
	- Unggas (Tahun 2019=17.248.318 ekor, 2023= 22.584.988 ekor)	%	94		DINAS PETERNAKAN
Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Ternak yang sehat	%	80	**4.675.539.635**	DINAS PETERNAKAN
	Unit usaha pangan asal ternak yang memenuhi standar	Unit	20		DINAS PETERNAKAN
Program Pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian	Prosentase areal serangan OPT yang dikendalikan	%	75	**989.789.798**	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
Program Penyuluhan pertanian	Cakupan Peningkatan Kompentensi Kelompok Tani menurut kelas			**3.304.808.211**	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Proritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah
			Tahun-2 (2022)		
			target	Rp	
1	2	3	4	5	6
	Kelas Pemula Baru (Tahun 2019 = 0 kelompok , 2023 = 1000 kelompok)	%	60		PANGAN
	Kelas Lanjut Baru (Tahun 2019 = 0 kelompok , 2023 = 400 kelompok)	%	50		
	Kelas Madya Baru (Tahun 2019 = 0 kelompok , 2023 = 40 kelompok)	%	50		
	Kelas Utama Baru (Tahun 2019 = 0 kelompok , 2023 = 3 kelompok)	%	66,67		
	Cakupan Peningkatan Kompetensi Pelaku Utama (Tahun 2019 = 245 orang , 2023 =520 orang)	%	80,77		
4. Kehutanan					
Program Pengelolaan Hutan	Peningkatan Cakupan lahan kritis yang tertangani setiap tahun	%	1,22	**48.840.684.622**	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
Program Konservasi Sumber daya Alam hayati dan ekosistemnya	Persentase perlindungan terhadap objek kawasan konservasi SDA	%	4,2	**8.741.420.016**	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	Persentase peningkatan perlindungan terhadap ekosistem essensial di destinasi wisata	%	75		DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
Program Pendidikan dan Pelatihan, Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	Persentase pemenuhan SDM berkeahlian khusus	%	32,75	**1.323.838.941**	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	Persentase luasan hutan yang dimanfaatkan untuk Perhutanan Sosial	%	10,32		DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
Program Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS)	Persentase meningkatnya kualitas DAS	%	0,25	**121.248.631**	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
5. Energi dan Sumber Daya Mineral					
Program Pengelolaan aspek kegeologian	Cakupan Pengelolaan Zona konservasi air tanah pada CAT setiap tahun	%	15,79	**1.572.327.150**	Dinas ESDM
	Cakupan Pengelolaan Air Tanah setiap tahun (Tahun 2019 = 41 Rekomendasi Teknis, Tahun 2023 = 59 Rekomendasi Teknis)	%	91,53		Dinas ESDM

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Proritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah
			Tahun-2 (2022)		
			target	Rp	
1	2	3	4	5	6
Program Pengelolaan Mineral dan Batubara	Persentase Potensi sumber daya mineral yang terkelola (Tahun 2019 = 12 Jenis, Tahun 2023 = 6 Jenis)	%	100	**650.304.172**	Dinas ESDM
Program Pengelolaan Energi Terbarukan	Cakupan Pemanfaatan Energi Listrik Berbasis EBT ***setiap*** tahun (Target Tahun 2018 = 8.76 kW, Target Tahun 2019= 11.25kW, Target Tahun 2020: 36,15 kW, Target Tahun 2023 = 103.32 kW)	%/ (kW)	17.28/(17.85)	**1.472.720.557**	Dinas ESDM
	Cakupan Pemanfaatan Energi Listrik Berbasis EBT pada Kawasan Pariwisata Estate (Target Tahun 2019= 5.625 kW, 2023 = 42.19 kW)	%/ (kW)	18.88/ (8,93)		Dinas ESDM
Program Pengelolaan Ketenagalistrikan	Rasio elektrifikasi dari non EBT (bagi masyarakat tidak mampu, terpencil dan pedesaan)	%	59	**1.228.903.790**	Dinas ESDM
	Rasio elektrifikasi dari non EBT di destinasi wisata (Target Tahun 2020:34%)	%	33		Dinas ESDM
6. Perdagangan					
Program Perizinan dan pendaftaran perusahaan	Cakupan Penerapan Sistem Perijinan Usaha dan Investasi berbasis Online	%	75	**202.912.776**	DISPERINDAG
Program Peningkatan sarana distribusi perdagangan	Persentase Peningkatan Cakupan distribusi barang di dalam wilayah NTT	%	50	**275.511.052**	DISPERINDAG
Program Stabilisasi harga kebutuhan pokok dan barang penting	Persentase Kenaikan Harga setiap tahun	%	10	**1.238.311.049**	DISPERINDAG
	a. Barang Kebutuhan Pokok	%	10		DISPERINDAG
	b. Barang Penting	%	10		DISPERINDAG
Program Pengembangan ekspor	Persentase Peningkatan Jumlah Komoditas Ekspor	%	28,57	**814.014.360**	DISPERINDAG
Program Standarisasi dan perlindungan konsumen	Persentase Penurunan Pengaduan Konsumen yang menggunakan barang tidak sesuai standar	%	55,7	**3.090.077.717**	DISPERINDAG
	Persentase pelaku usaha yang melakukan pengujian dan sertifikasi mutu produk (Target 2023 = 34 Pelaku Usaha)	%	44,12		DISPERINDAG
Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	Persentase Peningkatan Transaksi Produk Lokal di dalam wilayah NTT	%	70	**3.799.414.707**	DISPERINDAG

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Proritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah
			Tahun-2 (2022)		
			target	Rp	
1	2	3	4	5	6
	Persentase Peningkatan Transaksi Produk Lokal di Kawasan Pariwisata Estate	%	70		DISPERINDAG
7. Perindustrian					
Program Perencanaan dan pembangunan industri	Pertumbuhan industri pengolahan dengan memanfaatkan teknologi industri	%	2,24	**10.573.521.070**	DISPERINDAG
Program Pengendalian ijin usaha industri	Persentase Penurunan Pelanggaran Ijin Usaha Industri	%	70	**313.580.147**	DISPERINDAG
Program Pengelolaan sistem informasi industri nasional	Kesesuaian data informasi industri provinsi dalam mendukung SIINas	%	11,42	**210.479.769**	DISPERINDAG
8. Transmigrasi					
Program Perencanaan Kawasan Transmigrasi	Persentase Kawasan dan Lokasi Transmigrasi yang difasilitasi pencadangannya	%	85	**59.693.794**	Dinas Koperasi, Nakertrans
Program Pembangunan Kawasan transmigrasi	Persentase Lokasi Transmigrasi yang difasilitasi pembangunan dan penempatannya	%	85	**278.199.777**	Dinas Koperasi, Nakertrans
Program Pengembangan Kawasan Transmigrasi	Persentase Unit Permukiman Transmigrasi yang difasilitasi pembinaannya	%	85	**183.105.375**	Dinas Koperasi, Nakertrans
Pendukung Urusan Pemerintahan					
1.Sekretariat Daerah					
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Meningkatnya pelayanan terhadap kepala daerah/wakil kepala daerah dan Sekertaris daerah	%	100	**137.527.349.341**	BIRO UMUM
Program Administrasi Umum	Cakupan pelayanan administrasi pimpinan	%	100		Biro Administrasi Pimpinan
	Cakupan Pemenuhan Pelayanan Keprotokolan	%	100		Biro Administrasi Pimpinan
	Cakupan Pemenuhan Layanan Administrasi Perencanaan, Pelaporan, Kepegawaian dan Tata Usaha	%	100		Biro Administrasi Pimpinan
Program Penataan Organisasi	Persentase Perangkat Daerah yang efektif dan efisien	%	92.98	**4.225.254.076**	BIRO ORGANISASI
Program Pemerintahan dan Otonomi Daerah	Cakupan Kegiatan Tugas Pemerintahan yang dilaksanakan setiap tahun	%	100	**2.215.542.155**	Biro Pemerintahan, Kesra dan Kerjasama
	Cakupan Kegiatan Tugas Otonomi Daerah yang dilaksanakan setiap tahun	%	100		Biro Pemerintahan, Kesra dan Kerjasama

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Proritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah
			Tahun-2 (2022)		
			target	Rp	
1	2	3	4	5	6
	Cakupan Kegiatan Penataan Urusan yang dilaksanakan setiap tahun	%	100		Biro Pemerintahan, Kesra dan Kerjasama
	Cakupan Kerjasama Daerah yang difasilitasi setiap tahun	%	100		Biro Pemerintahan, Kesra dan Kerjasama
Program Kesejahteraan Rakyat	Persentase peningkatan pelayanan kesejahteraan rakyat (kegiatan di bidang kesejahteraan rakyat yang dilaksanakan)	%	100	**6.243.381.654**	Biro Pemerintahan, Kesra dan Kerjasama
	Persentase peningkatan kerjasama antar pemerintah dan non pemerintah (Jumlah kerjasama yang dilaksanakan)	%	100		Biro Pemerintahan, Kesra dan Kerjasama
Program Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Peningkatan persentase rancangan Peraturan Daerah yang diselesaikan setiap tahun	%	100	**3.400.382.983**	BIRO HUKUM
	Cakupan penyelesaian kasus hukum setiap tahun	%	100		BIRO HUKUM
Program Perekonomian dan Pembangunan	Cakupan kebijakan bidang perekonomian yang terkonsolidasi dengan baik (Target tahun 2023= 12 rekomendasi)	%	66,67	**1.780.348.290**	Biro Ekonomi dan Administrasi Pembangunan
	Cakupan kebijakan Pengelolaan SDA yang terkonsolidasi dengan baik (Target tahun 2023= 12 rekomendasi)	%	66,67		
	Persentasi BUMD yang memiliki kinerja baik (Target tahun 2023= 9 rekomendasi)	%	66,67		
Program Kebijakan dan Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa	Persentase ketercapaian pelaksanaan layanan barang dan jasa pemerintah daerah	%	100	**6.498.958.860**	Biro PBJ
Program Kebijakan Administrasi Pembangunan	Efektivitas peningkatan kinerja administrasi pembangunan	%	100	**31.259.583**	Biro Ekonomi dan Administrasi Pembangunan
2. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat					
Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Cakupan fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD (Jumlah peraturan daerah yang dihasilkan)	%	100	**75.330.276.389**	SEKRETARIAT DPRD PROVINSI NTT
Penunjang Urusan Pemerintahan					
1. Perencanaan					

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Proritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah
			Tahun-2 (2022)		
			target	Rp	
1	2	3	4	5	6
Program Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Konsistensi penjabaran Program-Program RPJMD ke dalam RKPD Provinsi	%	100	**3.499.680.951**	BAPPELITBANGDA
	Persentase Cakupan Pemanfaatan hasil Pengendalian dan Evaluasi.	%	100		BAPPELITBANGDA
Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Kesesuaian Dokumen perencanaan (RPJMD, RKPD, PPAS, Renstra, Renja, RKA, DPA) Perangkat Daerah Provinsi, lingkup bidang: - Pemerintahan dan Pembangunan manusia	%	100	**7.289.836.658**	BAPPELITBANGDA
	Kesesuaian Dokumen perencanaan (RPJMD, RKPD, PPAS, Renstra, Renja, RKA, DPA) Perangkat Daerah Provinsi, lingkup bidang: - SDA	%	100		BAPPELITBANGDA
	Kesesuaian Dokumen perencanaan (RPJMD, RKPD, PPAS, Renstra, Renja, RKA, DPA) Perangkat Daerah Provinsi, lingkup bidang: - Infrastrukur dan Kewilayahan	%	100		BAPPELITBANGDA
2. Keuangan					
Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase Penyampaian dan Penetapan Dokumen Keuangan secara tepat waktu dan sesuai ketentuan perundang - undangan	%	100	**812.023.806.770**	Badan Keuda
Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Penatausahaan Barang Milik Daerah	%	100	**5.958.962.696**	BAPENDA
	Pemanfaatan, Pemindahtanganan dan Pengamanan Barang Milik Daerah	%	100		BAPENDA
Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase Peningkatan Kontribusi PAD terhadap pendapatan daerah	%	34,04	**43.939.793.924**	BAPENDA
3. Kepegawaian					
Program Kepegawaian Daerah	Persentase formasi jabatan sesuai kualifikasi dan kompetensi	%	100	**10.155.108.077**	BKD

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Proritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah
			Tahun-2 (2022)		
			target	Rp	
1	2	3	4	5	6
	Persentase pelaksanaan lelang jabatan terbuka dan akuntabel untuk Eselon 1 dan 2 Lingkup Pemprov NTT	%	100		BKD
4. Pendidikan dan Pelatihan					
Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	Akreditasi latihan dasar minimal "B" dan diklat kepemimpinan "A"	Akreditasi	Kepemimpinan "A"	**49.870.445.297**	BPSDM
	Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal (Jumlah ASN yang mengikuti diklat Formal)	%	100		BPSDM
	Persentase Pejabat ASN yang mengikuti Diklat struktural (Pejabat ASN yang telah mengikuti Diklat)	%	100		BPSDM
	Peningkatan pengendalian dan mutu pendidikan dan pelatihan	%	80		BPSDM
5. Penelitian dan Pengembangan					
Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	Persentase Kebijakan Pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota atau pengguna lainnya yang memanfaatkan Rekomendasi hasil Kelitbangan dan Inovasi yang dihasilkan setiap tahun (Target 2019 = 40 rekomendasi, 2023= 75 rekomendasi)	%	82,86	**3.263.249.594**	BAPPELITBANGDA
	Persentase Penyediaan Inovasi Daerah yang dihasilkan dari Inkubator Inovasi Daerah kepada Pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota atau pengguna lainnya setiap tahun (Target 2023 = 145 Inovasi)	%	96,55		BAPPELITBANGDA
	Persentase Produk Inovasi Daerah yang difasilitasi untuk mendapatkan perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) setiap tahun (Target 2023 = 10 Dokumen Fasilitasi)	%	60,00		BAPPELITBANGDA
6. Pengelolaan Perbatasan					
Program Pengelolaan Perbatasan	Meningkatnya Cakupan Layanan Pemerintah Daerah dan KL (Jumlah Layanan Pemerintah Daerah dan KL)	%	67	**4.153.338.101**	BADAN PERBATASAN DAERAH

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Proritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah
			Tahun-2 (2022)		
			target	Rp	
1	2	3	4	5	6
	Meningkatnya Cakupan Koordinasi, Integrasi dan Sinkronisasi Pembangunan dan Pemanfaatan Kawasan Perbatasan	%	67		BADAN PERBATASAN DAERAH
7. Pengelolaan Penghubung					
Program Pelayanan Penghubung	Meningkatnya cakupan layanan pemerintah daerah dan KL	%	75	**5.310.010.193**	BADAN PENGHUBUNG
	Meningkatnya cakupan pembinaan kemasyarakatan	%	100		
	Meningkatnya cakupan promosi daerah	%	100		
Pengawasan Urusan Pemerintahan					
1. Inspektorat Daerah					
Program Penyelenggaraan Pengawasan	Persentase obyek pemeriksaan yang dilakukan pembinaan dan pengawasan	%	100,0	**13.715.955.478**	INSPEKTORAT DAERAH
	OPINI BPK	Opini	WTP		
Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	Persentase Pendampingan dan Asistensi pada PD Provinsi (Meningkatnya perumusan kebijakan, pendampingan dan asistensi terhadap Perangkat Daerah Provinsi)	%	100	**3.893.680.204**	INSPEKTORAT DAERAH
Pemerintahan Umum					
1. Kesatuan Bangsa dan Politik					
Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Cakupan Parpol, Ormas dan Forum Pembaruan Kebangsaan yang terlibat dalam Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan (141 Lembaga)	%	85,1	285.537.832	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DAERAH
Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik	Cakupan Parpol, Ormas dan Lembaga Pendidikan yang terlibat dalam Program Peningkatan Peran Parpol dalam Pendidikan Politik serta Pengembangan Etika dan Budaya Politik (309 Lembaga)	%	90,6	3.449.313.823	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DAERAH

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Proritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah
			Tahun-2 (2022)		
			target	Rp	
1	2	3	4	5	6
Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Cakupan peningkatan Pemberdayaan dan Pengawasan organisasi kemasyarakatan	%	65,3	182.235.213	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DAERAH
Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Meningkatnya ketahanan Organisasi Kemasyarakatan terhadap Ekonomi, Sosial dan Budaya	%	100,0	142.970.986	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DAERAH
Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	Cakupan Konflik Sosial yang ditangani setiap tahun	%	100,0	567.578.755	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DAERAH

Tabel 6.2
PERSANDINGAN RPJMD DAN RANCANGAN RKPD TAHUN 2022
PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

NO	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM	PAGU INDIKATIF RPJMD (Rp)	PAGU INDIKATIF RKPD (Rp)	SELISIH (Rp)	KETERANGAN
		NON URUSAN	1.575.603.684.445	0	1.575.603.684.445	
	Semua Perangkat Daerah	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	1.575.603.684.445	0	1.575.603.684.445	
		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	**3.385.182.210.508**	**5.173.535.725.366**	**-1.788.353.514.858**	
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	1.945.146.674.987	3.499.694.256.730	-1.554.547.581.743	
1.	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	0	871.194.619.500	-871.194.619.500	
2.	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.942.686.281.705	2.625.974.637.230	-683.288.355.525	
3.	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	980.000.000	1.825.000.000	-845.000.000	
4.	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	700.590.700	700.000.000	590.700	
5	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	PROGRAM PENGEMBANGAN BAHASA DAN SASTRA	779.802.582	0	779.802.582	
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	513.555.614.792	620.007.008.323	-106.451.393.531	
1.	Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	0	48.688.018.800	-48.688.018.800	
2.	Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	230.733.110.022	234.769.270.095	-4.036.160.073	
3.	Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	25.669.406.874	23.167.314.580	2.502.092.294	

NO	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM	PAGU INDIKATIF RPJMD (Rp)	PAGU INDIKATIF RKPD (Rp)	SELISIH (Rp)	KETERANGAN
4.	Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	750.581.000	450.818.000	299.763.000	
5.	RSUD Prof. DR. WZ Johannes Kupang	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI		218.992.918.102	-218.992.918.102	
6.	RSUD Prof. DR. WZ Johannes Kupang	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	230.733.110.022	86.257.602.114	144.475.507.908	
7.	RSUD Prof. DR. WZ Johannes Kupang	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	25.669.406.874	7.681.066.632	17.988.340.242	
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	840.495.050.622	846.074.147.284	-5.579.096.662	
1.	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	0	50.720.992.374	-50.720.992.374	
2.	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	219.573.727.220	206.351.706.046	13.222.021.174	
3.	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	6.825.804.434	7.875.000.000	-1.049.195.566	
4.	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	415.275.000	1.850.000.000	-1.434.725.000	
5.	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	0	1.850.000.000	-1.850.000.000	Tidak ada indikasi pendanaan dalam RPJMD
6.	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	0	2.100.000.000	-2.100.000.000	Tidak ada indikasi pendanaan dalam RPJMD
7.	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN	114.478.551.010	97.679.839.124	16.798.711.886	

NO	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM	PAGU INDIKATIF RPJMD (Rp)	PAGU INDIKATIF RKPD (Rp)	SELISIH (Rp)	KETERANGAN
8.	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	925.208.680	10.140.000.000	-9.214.791.320	
9.	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	0	2.150.000.000	-2.150.000.000	Tidak ada indikasi pendanaan dalam RPJMD
10.	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	488.063.323.408	455.074.388.620	32.988.934.788	
11.	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	3.255.843.368	3.324.903.618	-69.060.250	
12.	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	6.957.317.502	6.957.317.502	0	
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	61.006.366.226	138.929.109.025	-77.922.742.799	
1.	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	4.400.000.000	90.192.099.700	-85.792.099.700	
2.	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	42.932.122.751	21.522.902.750	21.409.220.001	
3.	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	13.674.243.475	27.214.106.575	-13.539.863.100	
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	5.275.423.231	25.961.934.280	-20.686.511.049	
1.	Satuan Polisi Pamongpraja	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	0	14.355.718.497	-14.355.718.497	
2.	Satuan Polisi Pamongpraja	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	3.441.218.192	2.744.384.225	696.833.967	

NO	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM	PAGU INDIKATIF RPJMD (Rp)	PAGU INDIKATIF RKPD (Rp)	SELISIH (Rp)	KETERANGAN
3.	Satuan Polisi Pamongpraja	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	187.558.781	0	187.558.781	
4.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	0	7.252.685.300	-7.252.685.300	
5.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	1.646.646.258	1.609.146.258	37.500.000	
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	19.703.080.650	42.869.269.724	-23.166.189.074	
	Dinas Sosial	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	0	21.966.080.650	-21.966.080.650	
1.	Dinas Sosial	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	4.207.151.114	3.957.151.114	250.000.000	
2.	Dinas Sosial	PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN	255.526.847	255.526.847	0	
3.	Dinas Sosial	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	11.147.139.607	10.867.248.031	279.891.576	
4.	Dinas Sosial	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	3.414.706.409	5.144.706.409	-1.730.000.000	
5.	Dinas Sosial	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	602.582.265	602.582.265	0	
6.	Dinas Sosial	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	75.974.408	75.974.408	0	
		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	**171.370.326.586**	**723.973.441.604**	**-552.603.115.018**	
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	756.142.602	17.645.520.000	-16.889.377.398	
1	Dinas Koperasi,Tenaga kerja dan Transmigrasi	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	327.957.444	15.460.520.000	-15.132.562.556	
2	Dinas Koperasi,Tenaga kerja dan Transmigrasi	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	201.353.194	975.000.000	-773.646.806	
3	Dinas Koperasi,Tenaga kerja dan Transmigrasi	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	106.483.564	1.000.000.000	-893.516.436	

NO	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM	PAGU INDIKATIF RPJMD (Rp)	PAGU INDIKATIF RKPD (Rp)	SELISIH (Rp)	KETERANGAN
4	Dinas Koperasi,Tenaga kerja dan Transmigrasi	PROGRAM PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN	120.348.400	210.000.000	-89.651.600	
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	4.476.494.142	13.736.156.327	-9.259.662.185	
1.	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	0	8.024.453.832	-8.024.453.832	
2.	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	1.843.753.698	1.460.843.200	382.910.498	
3.	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	1.029.225.236	1.483.918.750	-454.693.514	
4.	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	485.614.344	846.000.000	-360.385.656	
5.	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	187.881.645	537.881.645	-350.000.000	
6.	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	835.914.157	1.182.880.620	-346.966.463	
1.	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	94.105.062	200.178.280	-106.073.218	
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	3.741.931.671	3.204.999.860	536.931.811	
1.	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	3.279.328.758	2.844.999.940	434.328.818	

NO	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM	PAGU INDIKATIF RPJMD (Rp)	PAGU INDIKATIF RKPD (Rp)	SELISIH (Rp)	KETERANGAN
2.	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	130.205.934	49.999.920	80.206.014	
3.	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	332.396.979	310.000.000	22.396.979	
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN	0	2.050.046.500	-2.050.046.500	
1.	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	PROGRAM PENGELOLAAN IZIN LOKASI	0	106.555.500	-106.555.500	Tidak ada indikasi pendanaan dalam RPJMD
2.	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN	0	112.255.500	-112.255.500	Tidak ada indikasi pendanaan dalam RPJMD
3.	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH DAN GANTI KERUGIAN TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE	0	106.002.500	-106.002.500	Tidak ada indikasi pendanaan dalam RPJMD
4.	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	PROGRAM PENETAPAN TANAH ULAYAT	0	1.003.939.800	-1.003.939.800	Tidak ada indikasi pendanaan dalam RPJMD
5.	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	PROGRAM PENGELOLAAN TANAH KOSONG	0	507.232.500	-507.232.500	Tidak ada indikasi pendanaan dalam RPJMD
6.	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH	0	214.060.700	-214.060.700	Tidak ada indikasi pendanaan dalam RPJMD
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	12.420.865.769	106.543.252.669	-94.122.386.900	

NO	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM	PAGU INDIKATIF RPJMD (Rp)	PAGU INDIKATIF RKPD (Rp)	SELISIH (Rp)	KETERANGAN
1.	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	0	94.122.386.900	-94.122.386.900	
2.	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	1.039.471.691	1.039.471.691	0	
3.	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	2.055.530.070	2.055.530.070	0	
4.	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	7.642.505.016	7.642.505.016	0	
5.	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	308.692.114	308.692.114	0	
6.	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	541.932.352	541.932.352	0	
7.	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	277.451.100	277.451.100	0	
8.	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	555.283.426	555.283.426	0	
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	638.092.112	2.291.899.022	-1.653.806.910	
1.	Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	638.092.112	2.291.899.022	-1.653.806.910	
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	39.108.306.218	271.872.873.200	-232.764.566.982	

NO	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM	PAGU INDIKATIF RPJMD (Rp)	PAGU INDIKATIF RKPD (Rp)	SELISIH (Rp)	KETERANGAN
1.	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	0	11.253.913.200	-11.253.913.200	
2.	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	PROGRAM PENATAAN DESA	0	50.000.000	-50.000.000	Tidak ada indikasi pendanaan dalam RPJMD
3.	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA	0	250.000.000	-250.000.000	Tidak ada indikasi pendanaan dalam RPJMD
4.	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	2.043.212.130	11.485.710.000	-9.442.497.870	
5.	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	37.065.094.088	248.833.250.000	-211.768.155.912	
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	28.583.750.014	166.598.297.962	-138.014.547.948	
1.	Dinas Perhubungan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	0	37.111.696.142	-37.111.696.142	
2.	Dinas Perhubungan	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	3.519.981.244	109.968.484.961	-106.448.503.717	
3.	Dinas Perhubungan	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	23.709.201.697	18.218.072.859	5.491.128.838	
4.	Dinas Perhubungan	PROGRAM PENGELOLAAN PERKERETAAPIAN	1.354.567.073	1.300.044.000	54.523.073	
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	4.385.388.331	17.256.545.860	-12.871.157.529	
1.	Dinas Komunikasi dan Informatika	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	0	10.580.545.860	-10.580.545.860	
2.	Dinas Komunikasi dan Informatika	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	1.130.177.866	471.000.000	659.177.866	

NO	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM	PAGU INDIKATIF RPJMD (Rp)	PAGU INDIKATIF RKPD (Rp)	SELISIH (Rp)	KETERANGAN
3.	Dinas Komunikasi dan Informatika	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	3.255.210.465	6.205.000.000	-2.949.789.535	
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	1.627.205.065	36.601.816.000	-34.974.610.935	
1.	Dinas Koperasi,Tenaga kerja dan Transmigrasi	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	0	25.409.816.000	-25.409.816.000	
2.	Dinas Koperasi,Tenaga kerja dan Transmigrasi	PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM	0	7.692.000.000	-7.692.000.000	Tidak ada indikasi pendanaan dalam RPJMD
3.	Dinas Koperasi,Tenaga kerja dan Transmigrasi	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	1.627.205.065	3.500.000.000	-1.872.794.935	
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL	2.352.725.068	14.485.043.994	-12.132.318.926	
1.	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	0	10.250.043.994	-10.250.043.994	
2.	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	458.473.508	2.220.000.000	-1.761.526.492	
3.	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	599.051.406	770.000.000	-170.948.594	
4.	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	797.128.135	775.000.000	22.128.135	
5.	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	343.856.728	320.000.000	23.856.728	

NO	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM	PAGU INDIKATIF RPJMD (Rp)	PAGU INDIKATIF RKPD (Rp)	SELISIH (Rp)	KETERANGAN
6.	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	154.215.291	150.000.000	4.215.291	
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	51.516.287.574	24.521.653.447	26.994.634.127	
1.	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	0	15.616.653.447	-15.616.653.447	
2.	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	3.045.447.113	4.015.000.000	-969.552.887	
3.	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	PROGRAM PENGEMBANGAN DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	47.428.840.461	4.360.000.000	43.068.840.461	
4.	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	1.042.000.000	530.000.000	512.000.000	
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK	104.109.763	104.109.763	0	
1.	Dinas Komunikasi dan Informatika	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	104.109.763	104.109.763	-	
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN	290.366.450	270.000.000	20.366.450	
1.	Dinas Komunikasi dan Informatika	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	290.366.450	270.000.000	20.366.450	
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	14.283.665.821	19.440.700.000	-5.157.034.179	
1.	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	0	5.443.700.000	-5.443.700.000	
2.	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	7.828.203.807	7.627.000.000	201.203.807	
3.	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	2.664.261.145	2.330.000.000	334.261.145	

NO	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM	PAGU INDIKATIF RPJMD (Rp)	PAGU INDIKATIF RKPD (Rp)	SELISIH (Rp)	KETERANGAN
4.	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH	260.500.000	200.000.000	60.500.000	
5.	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	2.377.723.701	1.515.000.000	862.723.701	
6.	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN	1.152.977.168	2.325.000.000	-1.172.022.832	
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN	5.354.949.861	23.874.467.000	-18.519.517.139	
1.	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	0	15.940.470.000	-15.940.470.000	
2.	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	5.354.949.861	7.517.997.000	-2.163.047.139	
3.	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO	0	416.000.000	-416.000.000	Tidak ada indikasi pendanaan dalam RPJMD
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN	1.730.046.125	3.476.060.000	-1.746.013.875	
1.	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	1.417.446.302	2.536.000.000	-1.118.553.698	
2.	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	312.599.823	940.060.000	-627.460.177	
		URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	**233.858.950.722**	**584.584.341.322**	**-350.725.390.600**	
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	46.244.745.242	61.714.952.952	-15.470.207.710	
1.	Dinas Kelautan dan Perikanan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	0	20.359.663.572	-20.359.663.572	
2.	Dinas Kelautan dan Perikanan	PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL	2.648.457.130	2.203.057.130	445.400.000	
3.	Dinas Kelautan dan Perikanan	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	22.997.500.000	22.718.720.000	278.780.000	

NO	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM	PAGU INDIKATIF RPJMD (Rp)	PAGU INDIKATIF RKPD (Rp)	SELISIH (Rp)	KETERANGAN
4.	Dinas Kelautan dan Perikanan	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	15.474.512.250	10.998.512.250	4.476.000.000	
5.	Dinas Kelautan dan Perikanan	PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	4.189.275.862	4.200.000.000	-10.724.138	
6.	Dinas Kelautan dan Perikanan	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	935.000.000	1.235.000.000	-300.000.000	
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	42.121.884.401	59.052.999.172	-16.931.114.771	
1.	Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	0	15.107.860.000	-15.107.860.000	
2.	Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	20.000.000.000	25.505.279.000	-5.505.279.000	
3.	Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	8.996.918.074	4.224.023.830	4.772.894.244	
4.	Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	7.289.546.133	8.391.858.882	-1.102.312.749	
5.	Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	5.835.420.194	5.823.977.460	11.442.734	
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	60.502.051.607	358.063.825.211	-297.561.773.604	
1.	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	0	39.162.525.584	-39.162.525.584	
2.	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	0	10.482.350.500	-10.482.350.500	Menjadi satu pagu dengan Dinas Peternakan
3.	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	5.405.624.440	182.327.326.750	-176.921.702.310	

NO	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM	PAGU INDIKATIF RPJMD (Rp)	PAGU INDIKATIF RKPD (Rp)	SELISIH (Rp)	KETERANGAN
4.	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	989.789.798	655.522.660	334.267.138	
5.	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	3.304.808.211	4.226.999.850	-922.191.639	
6.	Dinas Peternakan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI		19.428.381.707	-19.428.381.707	
7.	Dinas Peternakan	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	45.396.204.718	21.797.992.520	23.598.212.198	Menjadi satu pagu dengan Dinas Pertanian KP
8.	Dinas Peternakan	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	0	72.751.629.500	-72.751.629.500	Tidak ada indikasi pendanaan dalam RPJMD
9.	Dinas Peternakan	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	5.405.624.440	7.231.096.140	-1.825.471.700	
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN	59.027.192.210	51.425.772.106	7.601.420.104	
1.	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	48.840.684.622	39.092.934.740	9.747.749.882	
2.	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA	8.741.420.016	8.117.966.126	623.453.890	
3.	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	1.323.838.941	3.431.871.240	-2.108.032.299	
4.	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	PROGRAM PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS)	121.248.631	783.000.000	-661.751.369	

NO	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM	PAGU INDIKATIF RPJMD (Rp)	PAGU INDIKATIF RKPD (Rp)	SELISIH (Rp)	KETERANGAN
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	4.924.255.669	18.781.181.970	-13.856.926.301	
1.	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	0	14.023.635.273	-14.023.635.273	
2.	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	PROGRAM PENGELOLAAN ASPEK KEGEOLOGIAN	1.572.327.150	1.558.112.370	14.214.780	
3.	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	PROGRAM PENGELOLAAN MINERAL DAN BATUBARA	650.304.172	515.498.590	134.805.582	
4.	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI TERBARUKAN	1.472.720.557	1.477.523.507	-4.802.950	
5.	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN	1.228.903.790	1.206.412.230	22.491.560	
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	9.420.241.661	7.089.154.440	2.331.087.221	
1.	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	202.912.776	347.235.600	-144.322.824	
2.	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	275.511.052	100.000.000	175.511.052	
3.	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	1.238.311.049	1.426.219.400	-187.908.351	
4.	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	814.014.360	1.588.381.000	-774.366.640	
5.	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	3.090.077.717	2.868.834.360	221.243.357	
6.	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	3.799.414.707	758.484.080	3.040.930.627	
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN	11.097.580.986	24.430.455.471	-13.332.874.485	
1.	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	0	13.814.270.631	-13.814.270.631	

NO	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM	PAGU INDIKATIF RPJMD (Rp)	PAGU INDIKATIF RKPD (Rp)	SELISIH (Rp)	KETERANGAN
2.	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	10.573.521.070	9.716.937.420	856.583.650	
3.	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	313.580.147	429.668.060	-116.087.913	
4.	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	210.479.769	469.579.360	-259.099.591	
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI	520.998.946	4.026.000.000	-3.505.001.054	
1.	Dinas Koperasi,Tenaga kerja dan Transmigrasi	PROGRAM PERENCANAAN KAWASAN TRANSMIGRASI	59.693.794	870.000.000	-810.306.206	
2.	Dinas Koperasi,Tenaga kerja dan Transmigrasi	PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI	278.199.777	776.000.000	-497.800.223	
3.	Dinas Koperasi,Tenaga kerja dan Transmigrasi	PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI	183.105.375	2.380.000.000	-2.196.894.625	
		UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	**237.252.753.331**	**455.992.939.473**	**-218.740.186.142**	
		SEKRETARIAT DAERAH	161.922.476.942	167.413.262.122	-5.490.785.180	
1.	Biro Umum	PROGRAM ADMINISTRASI UMUM	137.527.349.341	137.527.349.341	0	
2.	Biro Administrasi Pimpinan	PROGRAM ADMINISTRASI UMUM	0	5.895.601.580	-5.895.601.580	Tidak ada indikasi pendanaan dalam RPJMD
3.	Biro Hukum	PROGRAM ADMINISTRASI UMUM/PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	0	1.446.997.020	-1.446.997.020	
4.	Biro Hukum	PROGRAM FASILITASI DAN KOORDINASI HUKUM	3.400.382.983	2.695.382.983	705.000.000	
5.	Biro Organisasi	PROGRAM ADMINISTRASI UMUM		736.154.342	-736.154.342	
6.	Biro Organisasi	PROGRAM PENATAAN ORGANISASI	4.225.254.076	1.770.000.000	2.455.254.076	

NO	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM	PAGU INDIKATIF RPJMD (Rp)	PAGU INDIKATIF RKPD (Rp)	SELISIH (Rp)	KETERANGAN
7.	Biro Pemerintahan, Kesra dan Kerjasama	PROGRAM ADMINISTRASI UMUM/PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	0	398.650.800	-398.650.800	
8.	Biro Pemerintahan, Kesra dan Kerjasama	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH	2.215.542.155	2.215.542.155	0	
9.	Biro Pemerintahan, Kesra dan Kerjasama	PROGRAM KESEJAHTERAAN RAKYAT	6.243.381.654	2.611.690.827	3.631.690.827	
10.	Biro Ekonomi dan Administrasi Pembangunan	PROGRAM ADMINISTRASI UMUM/PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	0	733.522.539	-733.522.539	
11.	Biro Ekonomi dan Administrasi Pembangunan	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	1.780.348.290	976.911.675	803.436.615	
12.	Biro Ekonomi dan Administrasi Pembangunan	PROGRAM KEBIJAKAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	31.259.583	2.473.000.000	-2.441.740.417	
13.	Biro Pengadaan Barang dan Jasa	PROGRAM ADMINISTRASI UMUM/PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	0	1.433.500.000	-1.433.500.000	
14.	Biro Pengadaan Barang dan Jasa	PROGRAM KEBIJAKAN DAN PELAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA	6.498.958.860	6.498.958.860	0	
		SEKRETARIAT DPRD	75.330.276.389	288.579.677.351	-213.249.400.962	
1.	Sekretariat DPRD	PROGRAM ADMINISTRASI UMUM SEKRETARIAT DPRD PROVINSI	0	214.395.129.071	-214.395.129.071	
2.	Sekretariat DPRD	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	75.330.276.389	74.184.548.280	1.145.728.109	

NO	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM	PAGU INDIKATIF RPJMD (Rp)	PAGU INDIKATIF RKPD (Rp)	SELISIH (Rp)	KETERANGAN
		UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	**945.464.232.261**	**1.287.145.382.804**	**-341.681.150.543**	
		PERENCANAAN	10.789.517.609	31.360.891.469	-20.571.373.860	
1.	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	0	20.546.742.014	-20.546.742.014	
2.	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	3.499.680.951	3.499.680.938	13	
3.	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	7.289.836.658	7.314.468.517	-24.631.859	
		KEUANGAN	861.922.563.390	1.146.406.462.228	-284.483.898.838	
1.	Badan Keuangan Daerah	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	0	81.493.053.376	-81.493.053.376	
2.	Badan Keuangan Daerah	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	812.023.806.770	905.543.938.126	-93.520.131.356	
3.	Badan Pendapatan dan Aset Daerah	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	0	130.106.470.726	-130.106.470.726	
4.	Badan Pendapatan dan Aset Daerah	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	5.958.962.696	6.393.000.000	-434.037.304	
5.	Badan Pendapatan dan Aset Daerah	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	43.939.793.924	22.870.000.000	21.069.793.924	
		KEPEGAWAIAN	10.155.108.077	21.722.429.539	-11.567.321.462	
1.	Badan Kepegawaian Daerah	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	0	12.201.937.000	-12.201.937.000	
2.	Badan Kepegawaian Daerah	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	10.155.108.077	9.520.492.539	634.615.538	
		PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	49.870.445.297	61.119.792.817	-11.249.347.520	
1.	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	0	25.170.930.834	-25.170.930.834	

NO	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM	PAGU INDIKATIF RPJMD (Rp)	PAGU INDIKATIF RKPD (Rp)	SELISIH (Rp)	KETERANGAN
2.	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	49.870.445.297	35.948.861.983	13.921.583.314	
		PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	3.263.249.594	3.263.249.594	0	
1.	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	3.263.249.594	3.263.249.594	0	
		PENGELOAAN PERBATASAN	4.153.338.101	10.716.697.057	-6.563.358.956	
1.	Badan Pengelolaan Perbatasan Daerah	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	0	7.074.359.671	-7.074.359.671	
2.	Badan Pengelolaan Perbatasan Daerah	PROGRAM PENGELOLAAN PERBATASAN	4.153.338.101	3.642.337.386	511.000.715	
		PENGHUBUNG	5.310.010.193	12.555.860.100	-7.245.849.907	
1.	Badan Penghubung	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	0	5.951.249.600	-5.951.249.600	
2.	Badan Penghubung	PROGRAM PELAYANAN PENGHUBUNG	5.310.010.193	6.604.610.500	-1.294.600.307	
		UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN	**17.609.635.682**	**34.971.772.311**	**-17.362.136.629**	
		INSPEKTORAT DAERAH	17.609.635.682	34.971.772.311	-17.362.136.629	
1.	Inspektorat Daerah	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI		17.362.136.629	-17.362.136.629	
2.	Inspektorat Daerah	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	13.715.955.478	13.715.995.478	-40.000	
3.	Inspektorat Daerah	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	3.893.680.204	3.893.640.204	40.000	
		UNSUR PEMERINTAHAN UMUM	**4.627.636.609**	**14.308.548.141**	**-9.680.911.532**	
		KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	4.627.636.609	14.308.548.141	-9.680.911.532	
1.	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI		7.515.911.532	-7.515.911.532	
2.	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	285.537.832	1.900.537.832	-1.615.000.000	

NO	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM	PAGU INDIKATIF RPJMD (Rp)	PAGU INDIKATIF RKPD (Rp)	SELISIH (Rp)	KETERANGAN
3.	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	3.449.313.823	3.699.313.640	-249.999.817	
4.	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	182.235.213	232.237.411	-50.002.198	
5.	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	142.970.986	192.970.986	-50.000.000	
6.	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	567.578.755	767.576.740	-199.997.985	
	Total Pagu Urusan		**4.995.365.745.699**	**8.274.512.151.021**	**-3.279.146.405.322**	
	Total Pagu Urusan dan Non Urusan		**6.570.969.430.144**	**8.274.512.151.021**	**-1.703.542.720.877**	



BAB VII
KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Penetapan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah bertujuan untuk memberikan panduan dalam pencapaian kinerja tahunan yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) maupun Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada tahun 2022.

Target capaian indikator kinerja utama yang menggambarkan kinerja pemerintah daerah secara umum dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah Tahun 2021disajikan sebagaimana Tabel 7.1.dan 7.2 berikut.

Tabel 7.1
Indikator Kinerja Utama (IKU)
Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2022

INDIKATOR	TARGET 2022
Misi I Mewujudkan Masyarakat Sejahtera, Mandiri dan Adil	
Pertumbuhan PDRB (%)	6,33 – 6,90
Inflasi (%)	3-3,2
Persentase Penduduk di bawah Garis Kemiskinan (%)	19,35 – 16,15
PDRB per Kapita (Rp. Juta)	23 - 25
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) (%)	2,5 – 1,9
% PAD terhadap Pendapatan Daerah (%)	30,12
Indeks Gini (Poin)	0,34-0,33
Indeks Pembangunan Gender (Poin)	95
Misi II : Membangun NTT sebagai Salah Satu Gerbang dan Pusat Pengembangan Pariwisata Nasional *(Ring of Beauty)*	
Persentasi Pertumbuhan UMKM baru di Pariwisata Estate (%)	6
Lama Tinggal Wisatawan (hari)	4
Jumlah Kunjungan Wisatawan (orang)	1.278.453
Misi III : Meningkatkan Ketersediaan dan Kualitas Infrastruktur untuk Mempercepat Pembangunan	
Persentase Panjang Jalan Provinsi dalam dalam Kondisi Mantap (%)	100
Cakupan Pelayanan Angkutan Darat (%)	45,60
Terbangunannya Jaringan Irigasi bagi Petani (%)	76.74
Penambahan Rumah Layak Huni (unit)	9.238
Rasio Elektrifikasi (%)	80
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (Poin)	69
Jumlah Emisi Gas Rumah Kaca (Ton CO2)	17.248.829
Kesesuaian Fungsi, Struktur dan Pola ruang	85,70
Indeks Resiko Bencana (Poin)	138

INDIKATOR	TARGET 2022
Misi IV : Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	
Angka Melek Huruf (%)	98,47
Rata-rata Lama Sekolah (tahun)	8,65
Harapan Lama Sekolah (tahun)	14,6
Usia Harapan Hidup (Tahun)	68,8
Prevelensi Stunting (%)	16,7
Cakupan Pembinaan Pemuda dan Keolahragaan (%)	70
Misi V : Mewujudkan Reformasi Birokrasi Pemerintahan untuk Meningkatkan kualitas Pelayanan Publik	
Indeks Reformasi Birokrasi Pemerintah (Poin)	69
Opini BPK (Opini)	WTP
Nilai Akuntabilitas Kinerja (SAKIP) (Predikat)	A
Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) (Skor)	2,5
Tingkat Keterbukaan Informasi Publik (%)	60
Indeks Kepuasan Pelayanan Publik (Poin)	90
Indeks Demokrasi Indonesia (Poin)	82,50

Tabel 7.2
Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
Tahun 2022

No.	Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Target 2022
A.	**ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT**		
	- Pertumbuhan PDRB	%	6,33 – 6,90
	- Inflasi	%	3-3,2
	- PDRB per Kapita	(Rp. Juta)	23 - 25
	- Indeks Gini	Poin	0,34-0,33
	- Indeks Keparahan Kemiskinan	Poin	0,98
	- Indeks Kedalaman Kemiskinan	Poin	3,91
	- Indeks Pembangunan Manusia	Poin	67.35 – 69,00
	- Rata-Rata Lama Sekolah	Tahun	8,65
	- Angka Melek Huruf	%	98,47
	- Tingkat Pengangguran Terbuka	%	2,5 – 1,9
	- Persentase Pendapatan Asli Daerah (PAD)	%	30,12
	- Usia Harapan Hidup	Tahun	68,8
	- Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	%	69,67
	- Cakupan Pekerja Tanpa Upah dibandingkan Penduduk yang bekerja	%	22,69
	- Opini BPK	Opini	WTP

No.	Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Target 2022
	- Skor Pola Pangan Harapan (SPPH)	Skor	69
	- Share Lapangan Usaha Penyediaan akomodasi dan Makan Minum terhadap PDRB	%	0,77
	- Share Lapangan Usaha jasa lainnya terhadap PDRB	%	2,32
	- Share Lapangan usaha Perdagangan Besar dan Eceran terhadap PDRB	%	12,18
B	**ASPEK PELAYANAN UMUM**		
	Layanan Urusan Wajib Dasar		
1	**Pendidikan Menengah**		
	- Rata-rata Lama Sekolah	Tahun	8,65
	- Angka Melek Huruf	%	98,47
2	**Urusan Kesehatan**		
	- Kasus Kematian Ibu	Kasus	0
	- Kasus Kematian Bayi	Kasus	0
	- Kasus Kematian Balita	Kasus	0
3	**Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang**		
	- Persentase Jalan dalam Kondisi Baik	%	100
	- Persentase Daerah Irigasi dalam Kondisi Baik	%	80
	- Persentase Rumah Tangga menurut Air Layak	%	85
	- Persentase Rumah tangga menurut Sanitasi Layak	%	80
	- KesesuaianFungsi, Struktur dan Pola Ruang	%	85,70
4	**Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman**		
	- Penambahan Rumah Layak Huni	Unit	9.238
5	**Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat**		
	- Meningkatnya pencapaian SPM Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	%	100
	- Meningkatnya Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat (Jumlah Perda yang ditegakkan)	%	100
6	**Urusan Sosial**		
	- Meningkatnya Penyelenggaraan dan Perlindungan Jaminan Sosial bagi PMKS *Target 22 Kab/Kota)	%	90
	Layanan Urusan Wajib Non Dasar		
7	**Urusan Tenaga Kerja**		
	- Tingkat Pengangguran Terbuka	%	2,5 – 1,9
	- Cakupan Pekerja Tanpa Upah dibandingkan Penduduk yang bekerja	%	22,69
8	**Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**		

No.	Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Target 2022
	- Persentase Partisipasi Perempuan dalam Lembaga Perwakilan Provinsi	%	30
	- Persentase Kekerasan terhadap Perempuan yang Tertangani	%	80
	- Persentase Kekerasan terhadap Anak yang Tertangani	%	80
	- Persentase Pencapaian Tahapan Desa/Kelurahan Layak Anak	%	52,2
9	**Urusan Pangan**		
	- Skor Pola Pangan Harapan	Skor	69
10	**Urusan Pertanahan**		
	- Persentase Luas Lahan Bersertifikat	%	
11	**Urusan Lingkungan Hidup**		
	- Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Poin	69
12	**Urusan Kependudukan dan Pencatatan Sipil**		
	- Ketersediaan Database Kependudukan Skala Provinsi	Ada/ Tidak ada	Ada
13	**Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa**		
	- Posyandu Aktif	Unit	6.002
	- BUMDes Aktif	Unit	1.140
	- Cakupan Desa/Kelurahan Model Kerja PKK dan Perangkat Daerah	Desa/ Kel	16,64
14	**Urusan Perhubungan**		
	- Cakupan Pelayanan Angkutan Darat	%	45,60
	- Dweling Time Pelabuhan	Hari	4
15	**Urusan Komunikasi dan Informatika**		
	- Skor PeGi Pemeringkatan E-government	Skor	85 (Menuju Informatif)
	- Persentase Informasi Publik yang disediakan dan di Publikasi	%	85
	- Meningkatnya Indeks Penyelenggaraan SPBE	Poin	2,5
16	**Urusan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah**		
	- Rasio UMKM dan Koperasi terhadap Populasi Penduduk	Poin	1,1
17	**Urusan Penanaman Modal**		
	- Realisasi Nilai Investasi (PMA dan PMDN)	Rp.T	5,9
18	**Urusan Kepemudaan dan Olahraga**		
	- Jumlah medali yang diperoleh dalam Penyelenggaraan Olahraga Tingkat Regional, Nasional dan Internasional	Buah	12

No.	Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Target 2022
	- Cakupan Pembinaan Pemuda dan Keolahragaan	%	70
19	**Urusan Statistik**		
	- Tersedianya Sistem Data dan Statistik yang terintegrasi	Ada/ Tidak	Ada
20	**Urusan Kebudayaan**		
	- Persentase Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan	%	48,1
21	**Urusan Perpustakaan dan Kearsipan**		
	- Persentase Angka kunjungan Perpustakaan per Tahun	%	75,0
	- Pengelolaan Arsip secara Baku	%	100
	Layanan Urusan Pilihan		
22	**Urusan Pertanian**		
	- Nilai Tukar Petani	Poin	102,4
23	**Urusan Pariwisata**		
	- JumlahKunjungan Wisatawan	Orang	1.378.453
	- Rata-Rata Lama Tinggal Wisatawan	Hari	4
24	**Urusan Kehutanan**		
	- Peningkatan Cakupan lahan kritis yang tertangani setiap tahun	%	1,22
25	**Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral**		
	- Rasio Elektrifikasi (%)	73,29	85
26	**Urusan Kelautan dan Perikanan**		
	- Nilai Tukar Nelayan	Poin	106,3
27	**Urusan Perindustrian dan Perdagangan**		
	- Rasio Ekspor Impor terhadap PDRB (Indikator Keterbukaan Ekonomi)	%	62,23
28	**Urusan Transmigrasi**		
	- Persentase Warga Transmigrasi Yang Tertangani	%	80
	Penunjang Urusan		
29	**Urusan Perencanaan Pembangunan**		
	- Persentase Penjabaran Program RPJMD kedalam RKPD	%	100
	- Persentase Ketersediaan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan	%	100
30	**Urusan Keuangan**		
	- Persentase Penyampaian dan Penetapan Dokumen Keuangan secara tepat waktu dan sesuai ketentuan perundang - undangan	%	100

No.	Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Target 2022
31	**Urusan Kepegawaian dan Pendidikan dan Pelatihan**		
	- Persentase Keterisian SKP Online	%	100
32	**Urusan Penelitian dan Pengembangan**		
	- Capaian Indeks Inovasi Daerah	Poin	12.786
	- Capaian Indeks Daya Saing Daerah	Poin	3,700
33	**Urusan Pengawasan**		
	- Opini Laporan BPK	Opini	WTP
34	**Urusan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat**		
	- Cakupan fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD (Jumlah peraturan daerah yang dihasilkan)	%	100
C.	**ASPEK DAYA SAING DAERAH**		
1.	Nilai Tukar Petani	Poin	102,4
2.	Rasio Ketergantungan	%	62,79
3.	Rasio Ekspor Impor terhadap PDRB (Indikator Keterbukaan Ekonomi)	%	62,23

Tabel 7.3
Indikator Kinerja Urusan
Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2022

No	Urusan/ Kinerja Urusan	Indikator Kinerja Urusan	Satuan	Target Nasional 2022	Capaian Daerah 2020	Target Daerah 2021	Target Daerah 2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN						
	Terpenuhinya kebutuhan dasar SPM bidang pendidikan						
1		Jumlah Sekolah Lanjutan Tingkat Atas/SLTA Negeri terakreditasi	%	99.07	52,74	55	59
2		Jumlah satuan pendidikan khusus yang terakreditasi	%	98.17	66.67	74.19	83.87
3		Tingkat partisipasi warga negara usia 16-18 tahun dalam pendidikan menengah	%	100	60	65	70
4		Tingkat partisipasi warga negara usia 4-18 tahun penyandang disabilitas dalam pendidikan khusus	%	100	44.50	50.50	56.50
	Tercapainya penerapan kebijakan Merdeka Belajar di daerah						
5		Pesentase siswa dengan nilai kompetensi literasi yang memenuhi kompetensi minimum	%	59.2	40	45	50
6		Persentase siswa dengan nilai kompetensi numerasi yang memenuhi kompetensi minimum	%	28.3	30	34	37
	terwujudnya lulusan SMK yang berkualitas dan berdaya saing						
7		Jumlah SMK yang terevitalisasi	Unit	900		3	5
	1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN						
	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Rumah Sakit Rujukan						
8		Rasio Daya Tampung Rumah Sakit Rujukan	Ratio TT:1000 penduduk	1:1000	0,67:1000	0,84:1000	1,34:1000
9		Persentase Rumah Sakit Rujukan Provinsi yang	%	90	90	90	90

No	Urusan/ Kinerja Urusan	Indikator Kinerja Urusan	Satuan	Target Nasional 2022	Capaian Daerah 2020	Target Daerah 2021	Target Daerah 2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		Terakreditasi					
		Terpenuhinya Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan					
10		Persentase Pelayanan Kesehatan Bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	%	100	100	100	100
11		Persentase Pelayanan Kesehatan Bagi Orang yang Terdampak dan Berisiko Pada Situasi Kejadian Luar Biasa (KLB)	%	100	100	100	100
		Meningkatnya Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan					
12		Prevalensi Stunting (Pendek dan Sangat Pendek) Pada Balita (persen)	%	18.4	24.2	20	16
13		Persentase Puskesmas dengan 9 Jenis Tenaga Kesehatan Sesuai Standar	%	59		47.85	59
14		Insidensi Tuberkulosis (per 100.000 penduduk)	per 100.000 penduduk	231	63.6	63.6	89
15		Persentase Imunisasi Dasar Lengkap Pada Usia 12-23 Bulan	%	71	64.5	71	71
16		Jumlah Kabupaten/Kota yang Mencapai Eliminasi Malaria	kabupaten/kota	365	2	5	6
17		Persentase Merokok Penduduk Usia 10-18 Tahun	%	8.9	80	8.9	8.9
18		Angka Kematian Ibu (AKI) (per 100.000 kelahiran hidup)	per 100.000 penduduk	205	95	85	75
		Meningkatnya Efektivitas dan Cakupan Pengawasan Perizinan Berusaha Pedagang Besar Farmasi (PBF) Cabang dan Usaha Kecil Obat Tradisional (UKOT).					
19		Persentase Usaha Kecil Obat Tradisional (UKOT) Yang Memenuhi Ketentuan Perizinan	%	80	13.51	27	40.5
20		Persentase Pedagang Besar Farmasi (PBF) Cabang Yang Memenuhi Ketentuan Perizinan Berusaha	%	90	100	100	100
	1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG						
		Tersedianya Akses Air Minum dan Sanitasi Layak dan Aman					
21		Persentase rumah tangga yang menempati hunian dengan akses air minum layak	%	92.81	81.13	83	92.81
22		Jumlah sambungan rumah yang terlayani SPALD-T skala kota/regional	Sambungan Rumah (SR)	62352	-	-	-
23		Persentase angka BABS di tempat terbuka	%	4.46	9.54	9.14	7
24		Jumlah rumah tangga yang terlayani IPLT	Rumah Tangga	1730314	-	-	-
25		Persentase rumah tangga yang menempati hunian dengan akses sampah yang terkelola dengan baik di perkotaan	%	73.7	-	-	41
26		Jumlah rumah tangga yang terlayani TPA dengan standar sanitary landfill	Rumah Tangga	3383023	384353	414879	-
27		Jumlah rumah tangga yang terlayani TPST	Rumah Tangga	164717	144132	158735	-
28		Persentase rumah tangga yang menempati hunian dengan akses air minum aman	%	8.4	11.02	11.27	7.06
29		Jumlah rumah tangga dengan akses air minum aman	Rumah Tangga	5853992	295111	306603	-
30		Persentase rumah tangga dengan akses air minum jaringan	%	23.54	13.53	13.84	-

No	Urusan/ Kinerja Urusan	Indikator Kinerja Urusan	Satuan	Target Nasional 2022	Capaian Daerah 2020	Target Daerah 2021	Target Daerah 2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		perpipaan					
31		Jumlah rumah tangga dengan akses air minum jaringan perpipaan	Sambungan Rumah (SR)	16405116	162749	168992	266051
32		Persentase PDAM dengan kinerja sehat	%	75	26.67	33.33	100
33		Persentase rumah tangga yang menempati hunian dengan akses sanitasi (air limbah domestik) layak dan aman	%	79.43	69.70	73	79.43
		Terwujudnya konektivitas jalan					
34		Persentase kondisi mantap jalan provinsi	%	69.5	70.11	88.81	88.81
35		Panjang jalan daerah yang dibangun	Km	50	2108.91	2650	50
		Terlaksananya Pembangunan dan rehabilitasi jaringan irigasi					
36		Persentase luas sawah beririgasi	%	54	61.12	62.63	72.13
37		Luas jaringan irigasi teknis yang dibangun	Ha	85000	36876	37785	43521
38		Luas jaringan daerah irigasi teknis yang direhabilitasi	Ha	250000	35586	36876	37785
		Terpenuhinya penyelesaian rencana tata ruang dan rencana detail tata ruang					
39		Penyelesaian Materi Teknis dari Bimbingan Teknis RTRW	Materi Teknis	125	-	5	3
40		Penyelesaian Materi Teknis dari Bimbingan Teknis RDTR	Materi Teknis	1153	-	5	5
41		Pelaksanaan dan Pendampingan Persetujuan Substansi Teknis RTR	Persetujuan Substansi	1122	6	4	15
42		Penyelesaian Materi Teknis dari Bantuan Teknis RDTR	Materi Teknis	394	2	5	9
		1.04 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN					
		Terpenuhinya pelayanan dasar bidang perumahan rakyat					
43		Persentase warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	%	100	-	-	100
44		Persentase warga negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah provinsi yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni	%	100	-	36.05	100
		Meningkatnya luasan kawasan kumuh yang ditangani					
45		Persentase Luas Kawasan Kumuh 10 - 15 Ha yang ditangani	%				
46		Jumlah Luasan Permukiman Kumuh Yang Ditangani Secara Terpadu	Ha	5779	-	-	-
47		Jumlah Kawasan di Permukiman Kumuh Perkotaan Yang Ditangani Melalui Peremajaan Kota	Kawasan	4	-	-	-
		Meningkatnya jumlah rumah layak huni					
48		Jumlah Kab/Kota yang menerbitkan IMB dan SLF	kabupaten/kota	48	-	-	-
49		Jumlah penerbitan Sertipikat Hak Milik (SHM)/Sertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB)/Sertipikat Hak Satuan Rumah Susun (SHRS)	Persil	10000	-	-	-
50		Jumlah Hunian Baru Layak Yang Terbangun Melalui Peran	Unit	194763	1386	1000	-

No	Urusan/ Kinerja Urusan	Indikator Kinerja Urusan	Satuan	Target Nasional 2022	Capaian Daerah 2020	Target Daerah 2021	Target Daerah 2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		Masyarakat dan Dunia Usaha					
51		Jumlah Hunian Baru Layak Yang Terbangun Melalui Fasilitasi Pemerintah	Unit	154310	-	35	-
52		Jumlah Rumah Tangga Yang Mendapatkan Bantuan Peningkatan Kualitas	Unit	152510	-	-	1500
		Meningkatnya Penyediaan PSU Perumahan dan Kawasan Permukiman					
53		Jumlah Rumah Yang Dilayani Bantuan PSU Pada Perumahan, Termasuk PSU Kawasan Skala Besar	Unit	40000	-	70	-
54		Persentase satuan perumahan yang sudah dilengkapi PSU	%				
		Meningkatnya Fasilitasi Pembiayaan Penyediaan Perumahan					
55		Jumlah Rumah Tangga Berpendapatan Rendah Yang Menerima Bantuan/Subsidi Pembiayaan Perumahan Berupa Bantuan Uang Muka dan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP)	Rumah Tangga	225842	-	-	-
56		Jumlah Rumah Tangga Yang Mendapatkan Fasilitas Pembiayaan Dari Lembaga Keuangan	Rumah Tangga	85000	-	556	-
	1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT						
		Meningkatnya pelayanan Trantibum yang sesuai standar					
57		Persentase gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	%	100			
58		Persentase Perda dan Perkada yang di tegakkan	%	75			
		Meningkatnya manajemen kebencanaan yang terintegrasi pada fase pra bencana, tanggap darurat dan pasca bencana					
59		Persentase penyelesaian dokumen kebencanaan sampai dengan dinyatakan sah/legal	%	100	100	100	100
60		Persentase penanganan pra bencana	%	100	31.82	45.45	100
61		Persentase pendampingan penanganan tanggap darurat bencana	%	100	100	100	100
62		Persentase pendampingan penanganan pasca bencana	%	100	100	100	100
		Meningkatnya pelayanan pemadam kebakaran yang sesuai standar					
63		Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan Evakuasi korban kebakaran	%	100			
64		Persentase pendampingan pelayanan pemadaman dan penyelamatan kebakaran	%	100			
65		Persentase pendampingan pembentukan relawan pemadam kebakaran di desa/kelurahan	%	100			
66		Persentase pendampingan pembentukan pos pemadam kebakaran di kecamatan	%	100			
	1.06 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL						
		Tersedianya Data Fakir Miskin					

No	Urusan/ Kinerja Urusan	Indikator Kinerja Urusan	Satuan	Target Nasional 2022	Capaian Daerah 2020	Target Daerah 2021	Target Daerah 2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
67		Persentase daerah yang aktif melakukan pemutakhiran data terpadu penanggulangan kemiskinan	%	60	90	95	100
68		Peningkatan kapasitas bagi Pekerja Sosial Masyarakat (PSM)	Orang	3000			30
69		Peningkatan kapasitas bagi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK)	Orang	7230	44	265	309
70		Jumlah layanan data dan pengaduaan yang dimiliki	%	100	100	100	100
		Penguatan Pelaksanaan Perlindungan Sosial					
71		Penguatan Forum Tanggung Jawab Sosial Perusahaan	Badan Usaha	150	22	22	22
72		Bantuan Sosial Ekonomi Produktif Bagi Fakir Miskin	KPM	7000	3250	6500	6500
73		Keluarga Yang Mendapat Bantuan Sosial Bersyarat	KPM	10,000,000	356908	351894	401894
74		Peningkatan kapasitas pendamping PKH	Orang	150	1579	1701	1701
75		Peningkatan kapasitas pendamping PKH	Orang	8000	8000	8000	8000
76		Peningkatan kualitas pelayanan lembaga di bidang kesos	Lembaga	4000		35	35
77		Peningkatan kompetensi dan profesionalisme SDM Kesos	Orang	18000			480
		Terpenuhinya Kebutuhan Dasar Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Sosial					
78		Jumlah Korban Bencana Alam Yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Dasar	Jiwa	350,000	500	500	500
79		Jumlah Warga Masyarakat Rawan Bencana Alam Yang Mendapatkan Kesiapsiagaan Dan Mitigasi	Jiwa	250,000	1000	1000	1000
80		Jumlah Kelompok Masyarakat Di Lokasi Rawan Bencana Yang Mendapatkan Pencegahan Terorisme	Kelompok Masyarakat	358			
81		Jumlah Kelompok Masyarakat di Lokasi Rawan Bencana yang Mendapatkan Pencegahan Konflik Sosial	Kelompok Masyarakat	375	20	20	20
82		Jumlah Korban Bencana Sosial yang Mendapatkan Bantuan Perlindungan Sosial	Orang	120.000	100	200	200
83		Jumlah Tenaga Pelopor Perdamaian yang Siap Ditugaskan	Orang	1,200	72	72	100
84		Persentase penyandang disabilitas terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti	%	3,60	100	100	100
85		Persentase Anak Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti	%	24	100	100	100
86		Persentase lanjut usia terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti	%	0,53	100	100	100
87		Persentase Gelandangan dan Pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti	%	20.51			
	2.07 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA						
		Meningkatnya kompetensi dan daya saing tenaga kerja					

No	Urusan/ Kinerja Urusan	Indikator Kinerja Urusan	Satuan	Target Nasional 2022	Capaian Daerah 2020	Target Daerah 2021	Target Daerah 2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
88		Jumlah tenaga kerja yang mendapat pelatihan berbasis kompetensi dan pelatihan pemagangan dalam negeri	Orang	12.000	180	180	200
89		Jumlah Pekerja yang meningkat produktivitasnya	Orang	1.189.550	235	400	100
		Meningkatnya Jumlah Tenaga Kerja Yang Ditempatkan dan Diberdayakan					
90		Jumlah tenaga kerja yang ditempatkan di dalam negeri	Orang	17.800	415	600	500
		Meningkatnya kualitas pelindungan tenaga kerja dan pengusaha yang menerapkan norma ketenagakerjaan dan keselamatan dan kesehatan kerja					
91		Persentase perusahaan yang diawasi dari jumlah perusahaan dalam WLKP Online	%	60	2.90	3.1	88
		Meningkatnya Harmonisasi Hubungan Industrial dan Kualitas Jaminan Sosial Tenaga Kerja					
92		Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan)	%	19-20	1.28	1.37	1.45
	2.08 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK						
		Meningkatnya Kesetaraan Gender, Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan					
93		Persentase ARG pada belanja langsung APBD	%	75	0.07		
94		Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang Mendapatkan Layanan Komprehensif	%	85	57.2	75	80
95		Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	Nilai	73.74		70.76	72.76
		Meningkatnya Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak					
96		Indeks Perlindungan Anak (IPA)	Nilai	69.87			
97		Persentase anak memerlukan perlindungan khusus yang mendapatkan layanan komprehensif	%	50		5.6	55.2
	2.09 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN						
		Meningkatnya ketersediaan pangan strategis dalam negeri					
98		Persentase cadangan pangan pemerintah daerah	%	10	10	10.20	18.50
99		Persentase daerah rentan rawan pangan	%	14	60	50	25.07
		Terjaminnya keamanan dan mutu pangan strategis nasional					
100		Persentase pangan segar asal tumbuhan yang memenuhi persyaratan mutu dan keamanan pangan	%	85	40	48.84	74.42
101		Persentase pangan segar asal hewan yang memenuhi syarat mutu dan keamanan pangan	%	82.5	82.5	85	85
	2.10 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN						
		Terpenuhinya inventarisasi subyek dan obyek redistribusi tanah					
102		Jumlah bidang tanah yang diredistribusi	Bidang Tanah	423421			
103		Jumlah Kepala Keluarga penerima akses Reforma Agraria	Kepala Keluarga	129523			
		Tersedianya tanah untuk kepentingan umum					
104		Realisasi Luas Tanah yang disediakan bagi pembangunan untuk Kepentingan Umum dan Kepentingan Lainnya	Ha	42422			
	2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP						

No	Urusan/ Kinerja Urusan	Indikator Kinerja Urusan	Satuan	Target Nasional 2022	Capaian Daerah 2020	Target Daerah 2021	Target Daerah 2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		Meningkatnya Indeks Kualitas Lingkungan Hidup					
105		Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	poin	69.22	67.75	75.13	75.42
		Meningkatnya penanggung jawab usaha yang taat terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan izin PUU LH yang diterbitkan					
106		Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan	%	1700 Lembaga	4.34	56.52	78.26
	2.12 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL						
		Meningkatnya Kualitas Pelayanan Adminduk					
107		Penyajian data kependudukan skala Provinsi dalam 1 Tahun	%	100	100%	100%	100%
108		Persentase cakupan kepemilikan akta kelahiran pada anak usia 0-17 tahun	%	97	71.10%	85%	97%
109		Persentase cakupan kepemilikan akta kematian dari peristiwa kematian yang dilaporkan	%	100	100%	100%	100%
110		Persentase cakupan kepemilikan buku nikah/akta perkawinan pada semua pasangan yang perkawinannya dilaporkan	%	100	100%	100%	100%
111		Persentase cakupan kepemilikan akta perceraian pada semua individu yang perceraiannya dilaporkan	%	100	100%	100%	100%
112		Pemanfaatan data kependudukan	%	80	20%	40%	80%
	2.13 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA						
		Meningkatnya tata kelola pemerintahan desa yang efektif dan efesien					
113		Persentase aparatur/pengurus kelembagaan desa yang memiliki kompetensi dalam tatakelola pemdes	%	90	30	40	54
114		Persentase Kabupaten/Kota yang desanya telah ditata kelembagaan desanya sesuai standar	%	90	90	90	90
115		Persentase Kabupaten/Kota yang desanya telah ditata sistem pelayanan administrasi kelembagaan desa sesuai standar	%	90	90	90	90
		Berkembangnya status pembangunan desa					
116		Jumlah Desa Mandiri.	Desa	3944	1	1	1
117		Jumlah Desa Berkembang	Desa	56791	1049	1249	1449
118		Jumlah Desa Tertinggal	Desa	14402	1746	1546	1403
		Terevitalisasinya Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa)					
119		Jumlah Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Berkembang	Desa	7500	58	60	63
	2.14 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA						
		Meningkatnya Indeks Pembangunan Keluarga					
120		Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)	Indeks	57.00			
		Terkendalinya laju pertumbuhan penduduk dengan meningkatkan akses dan kualitas pelayanan keluarga berencana					
121		Angka kelahiran remaja umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR 15-19)	Kelahiran per 1000 WUS 15-19 tahun	21.00			

No	Urusan/ Kinerja Urusan	Indikator Kinerja Urusan	Satuan	Target Nasional 2022	Capaian Daerah 2020	Target Daerah 2021	Target Daerah 2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
122		Angka kelahiran total (Total Fertility Rate/TFR) per WUS usia 15-49 Tahun	Rata-rata Anak per Wanita	2.21			
123		Angka prevalensi kontrasepsi modern/modern Contraceptive (mCPR)	%	62.54			
124		Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)	%	8.00			
	2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN						
		Terwujudnya Konektivitas Nasional					
125		Rasio Konektivitas Nasional	Rasio	0.695			0.00
		Meningkatnya Kinerja Pelayanan Perhubungan					
126		On Time Performance Layanan Transportasi	%	78.44			0.00
127		Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik Sektor Transportasi	Nilai	85.00			0.00
		Meningkatnya Keselamatan Transportasi					
128		Rasio Kejadian Kecelakaan Transportasi per 1 Juta Keberangkatan	Rasio	28.85			0.00
	2.16 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA						
129		Persentase inovasi (terkait kependudukan online, dan inisiatif IoT sektor lingkungan) yang diimplementasi/direplikasi dalam mendukung smart city sesuai dengan Masterplan	%	100	30.76	38.46	43.58
		Tersedianya Infrastruktur Digital					
130		Persentase perangkat daerah yang saling terkoneksi di Jaringan Intra Pemerintah Daerah	%	80	38.46	51.28	80
131		Jumlah kegiatan fasilitasi penyediaan dan pengembangan ekosistem dalam rangka pemanfaatan infrastruktur pita lebar di daerah dalam mendukung penyelenggaraan e-government	Kegiatan	4	1	2	2
		Terlaksananya Layanan Pemerintah secara Digital					
132		Persentase perangkat daerah yang menggunakan layanan infrastruktur pusat data pemerintah daerah (NOC, ruang server) dan/atau pusat data pemerintah pusat (pusat data nasional sementara)	%	60			60
133		Persentase layanan publik yang diselenggarakan secara online	%	100	66.66	77.77	88.88
134		Persentase layanan publik yang terintegrasi dengan sistem penghubung layanan pemerintah daerah	%	100	27.27	30	35
135		Persentase layanan administrasi pemerintahan yang diselenggarakan secara online	%	65	75	80	85
136		Persentase layanan administrasi pemerintahan yang terintegrasi dengan sistem penghubung layanan pemerintah daerah	%	50	27.27	36.36	45

No	Urusan/ Kinerja Urusan	Indikator Kinerja Urusan	Satuan	Target Nasional 2022	Capaian Daerah 2020	Target Daerah 2021	Target Daerah 2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		Meningkatnya Pemanfaatan Teknologi Digital untuk pertumbuhan ekonomi					
137		Jumlah kegiatan fasilitasi pemanfaatan teknologi digital	Kegiatan	6	5	5	6
		Terwujudnya Peningkatan Kompetensi Masyarakat di bidang digital					
138		Persentase ASN pengelola infrastruktur TIK Pemerintah daerah yang mengikuti pelatihan dan pembinaan	%	55	40	50	55
139		Jumlah masyarakat yang mengikuti program pelatihan bidang digital	Orang	200			
140		Jumlah kegiatan fasilitasi literasi digital	Kegiatan	6			
		Meningkatnya Penguatan tata kelola Informasi dan Komunikasi Publik (IKP) di Daerah					
141		Persentase Kab/kota yang sudah melaksanakan urusan PIKP sesuai dengan peraturan yang berlaku	%	75	100	100	100
142		Persentase konten infomasi terkait program dan kebijakan pemerintah daerah, termasuk program prioritas nasional yang termasuk isu strategis pemerintah daerah yang didiseminasikan sesuai strategi komunikasi	%	70	65	65	70
143		Persentase narasi negatif, hoax, dan informasi misleading yang beredar di wilayah pemerintah daerah yang di counter oleh pemerintah daerah	%	70	15	20	50
144		Persentase tingkat kepuasan masyarakat terhadap akses dan kualitas konten informasi publik pemerintah daerah	%	70	60	65	70
145		Persentase Informasi Publik yang disediakan dan diumumkan oleh Dinas Provinsi dan Kab/kota sesuai amanat UU No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.	%	70	59	60	70
146		Persentase mitra strategis Pemda yang melaksanakan diseminasi informasi Kebijakan dan Program Prioritas Nasional	%	75			
	2.17 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH						
		Terwujudnya Koperasi yang Modern					
147		Meningkatnya Koperasi yang berkualitas	%	50			
		Terwujudnya UMKM yang Mampu Bersaing di Pasar Domestik dan Global					
148		Meningkatnya Usaha Kecil yang menjadi wirausaha	%	50	7	7	7
	2.18 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL						
		Tercapainya Realisasi Penanaman Modal					
149		Nilai Realisasi Penanaman Modal	Rp	968.4 triliun	4,292,054,576,669.89	4,506,657,305,503.38	4,731,990,170,778.55
	2.19 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA						
		Meningkatnya pemuda yang berwirausaha					
150		Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	%	0.55	0.11	0.28	0.31
		Meningkatnya partisipasi organisasi kepemudaan dan organisasi sosial					

No	Urusan/ Kinerja Urusan	Indikator Kinerja Urusan	Satuan	Target Nasional 2022	Capaian Daerah 2020	Target Daerah 2021	Target Daerah 2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
151		Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan	%	6.69	0.23	5.36	5.49
	Meningkatnya prestasi olahraga nasional dan internasional						
152		Peningkatan prestasi olahraga	Medali	12		15	50
	2.20 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK						
	Tersedianya data statistik dalam perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah						
153		Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	%	100	100	100	100
154		Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah	%	100	100	100	100
	2.21 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN						
	Terwujudnya Ketahanan dan Keamanan Siber						
155		Jumlah lulusan peningkatan kompetensi SDM pengelola keamanan siber untuk K/L/D	Orang	100	2	4	6
156		Jumlah CSIRT yang dibentuk di sektor pemerintah daerah	daerah	13			
157		Jumlah Lulusan sertifikasi yang mengikuti peningkatan kompetensi SDM pengelola keamanan Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE) dan CSIRT	Orang	200	4	5	8
	2.22 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN						
	Kelestarian Cagar Budaya						
158		Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang pernah terlibat sebagai pelaku/pendukung pertunjukan seni	%	36	20	25	36
159		Jumlah Cagar Budaya dan Warisan Budaya yang dilindungi	Unit	4,156	151	161	170
160		Jumlah Cagar Budaya dan Warisan Budaya Tak Benda yang ditetapkan	Unit	460		72	74
161		Register cagar budaya (pendaftaran, pengjasian, penetapan, pencatatan, pemeringkatan, penghapusan)	Unit	400			
162		Peningkatan akses masyarakat dalam penyelenggaraan dan pelaksanaan kegiatan museum (DAK)	Unit	113	1	1	1
163		Pembentukan tim pendaftaran cagar budaya	Orang	50		7	7
164		Pembentukan tim ahli cagar budaya Provinsi	Orang	50			
165		Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang menonton secara langsung pertunjukan seni	%	36			
166		Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang mengunjungi peninggalan sejarah	%	12	4	6	10
167		Persentase penduduk yang pernah terlibat sebagai pelaku/pendukung pertunjukan seni yang	%	0.31			

No	Urusan/ Kinerja Urusan	Indikator Kinerja Urusan	Satuan	Target Nasional 2022	Capaian Daerah 2020	Target Daerah 2021	Target Daerah 2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		menjadikan keterlibatan sebagai sumber penghasilan (terhadap penduduk usia 15 tahun ke atas)					
168		Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang pernah terlibat sebagai pelaku/pendukung pertunjukan seni	%	1.96			
169		Persentase rumah tangga yang menyelenggarakan upacara adat	%	22.33		1	3
		Pemajuan Kebudayaan					
170		Jumlah Cagar Budaya dan Warisan Budaya Tak Benda yang Ditetapkan	Unit	460	29	31	35
171		Jumlah Cagar Budaya dan Warisan Budaya yang Dilindungi	Unit	4.156			
	2.23 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN						
		Tingkat kegemaran membaca masyarakat bertambah					
172		Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat	Nilai	63.3	53.78	56.00	63.3
		Literasi masyarakat meningkat					
173		Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	Index	13	8.95	10.00	13.00
	2.24 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN						
		Terwujudnya revitalisasi dan aktualisasi nilai budaya dan kearifan lokal					
174		Jumlah pengguna pelayanan arsip sebagai memori kolektif dan jati diri bangsa	Orang	380273	3720	3720	4000
175		umlah arsip terjaga dan arsip statis sebagai warisan budaya yang dipreservasi	Arsip	63939	630	630	1200
	3.25 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN						
		Meningkatnya pengelolaan Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) dan penataan ruang laut dan rencana zonasi pesisir serta pengelolaan ruang laut					
176		Kawasan konservasi yang dikelola secara berkelanjutan (kumulatif)	Ha	19000000	276693,33	426690	633750
177		Jumlah dokumen monev/kajian PK/peraturan turunan Perda RZWP-3-K	Dokumen	34	-	-	2
		Terwujudnya industrialisasi kelautan dan perikanan berdaya saing					
178		Produksi garam	Ton	3200000	17000		
179		Produksi Perikanan Tangkap	Ton	8320000	172520	175000	185000
180		Produksi Perikanan Budidaya	Ton	20540000	2010895,23	1945000	2145000
181		Konsumsi ikan	Kg/KAP/TH	59.53	40,39	46	50
		Terselenggaranya pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan integratif					
182		Penanganan kasus Pelanggaran bidang Kelautan dan Perikanan	%	93			
183		Operasi kapal pengawas	Hari	180	15	50	70
	3.26 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA						
		Meningkatnya Kontribusi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif terhadap Ketahanan Ekonomi Nasional					
184		Nilai Tambah Ekonomi Kreatif	Rp	1.398.000.000.000	806.000.000.000	856.000.000.000	900.000.000.000
185		Kontribusi PDB Pariwisata	%	4.3	6.61	10	15
186		Jumlah Pergerakan Wisatawan Nusantara	Orang	260.000.000-280.000.000	129.977	900.000	1.500.000
	3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN						

No	Urusan/ Kinerja Urusan	Indikator Kinerja Urusan	Satuan	Target Nasional 2022	Capaian Daerah 2020	Target Daerah 2021	Target Daerah 2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		Meningkatnya produktivitas pertanian					
187		persentase peningkatan produktivitas tanaman pangan	%	2 (padi dan jagung)	-6.48	1.90	1.09
188		Persentase peningkatan produktivitas tanaman hortikultura	%	1.2	27.22	32.22	42.22
189		Persentase peningkatan produktivitas perkebunan	%	3.28 (kelapa sawit, kakao, kopi, jambu mete, kelapa, karet, teh, aren, sagu, tebu, lada, pala, cengkeh, nilam, sereh wangi, vanili, tembakau)	100	100	100
190		Persentase peningkatan produktivitas peternakan	%	1.2 (sapi, kerbau, kambing, domba, ayam, itik, babi)	21.73	6.2	7
		Terkendalinya penyebaran OPT dan DPI pada tanaman serta penyakit pada hewan					
191		Persentase penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular	%	80.5	80	80	80
192		Presentase luas areal pengendalian dan penanggulangan bencana OPT	%	TP=95, Horti= 90-95, Bun=80	100	100	100
	3.28 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN						
		Meningkatnya luas kawasan hutan yang dikelola oleh masyarakat					
193		Peningkatan akses legal kepada masyarakat dalam pengelolaan hutan melalui Perhutanan Sosial	Ha	2000000	45831	50000	55000
		Meningkatnya luas hutan dan lahan yang direhabilitasi dalam rangka konservasi sumber daya air					
194		Persentase Luas lahan kritis yang direhabilitasi	Ha	100000	5000	9586,4	10259,2
	3.29 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL						
		Meningkatnya Rumah Tangga yang Teraliri Listrik					
195		Rasio elektrifikasi	%	100	95.29	99	100
		Meningkatnya Penggunaan Energi yang Bersumber dari Energi Baru Terbarukan					
196		Porsi EBT dalam Bauran Energi Nasional	%	15.7	10.89	8.04	17.28
		Meningkatnya Jumlah Desa yang Teraliri Listrik					
197		Persentase Desa Teraliri Listrik (Rasio Desa Berlistrik)	%	100	95.29	99	100
	3.30 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN						
198		Inflasi Pangan Bergejolak	%	4.3			
		Meningkatnya Kinerja Ekspor Bernilai Tambah Tinggi					
199		Pertumbuhan nilai ekspor non migas	%	5,96 - 7.86	-41.34	-30	-10
		Meningkatnya Keberdayaan dan Kepercayaan Konsumen					
200		Persentase penanganan pengaduan konsumen	%	91	60	62	64
201		Persentase barang beredar yang diawasi yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan	%	42	78.86	80	82
		Meningkatnya Jaminan Mutu Komoditas Potensial Daerah					
202		Persentase komoditi potensial yang sesuai dengan ketentuan berlaku	%	50 - 75			
		Terwujudnya Iklim Usaha yang Kondusif					
203		Tertib Usaha	%	55 - 75	78.82	80	80
204		Persentase layanan yang sesuai ketepatan waktu SLA	%	80			
		Meningkatnya kepastian penyaluran pupuk/pestisida bersubsidi sesuai ketentuan jenis, jumlah, waktu, harga, mutu, dan tempat					

No	Urusan/ Kinerja Urusan	Indikator Kinerja Urusan	Satuan	Target Nasional 2022	Capaian Daerah 2020	Target Daerah 2021	Target Daerah 2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
205		Persentase kinerja realisasi pupuk	%	90		90	90
	Terwujudnya kecukupan bahan pangan untuk masyarakat						
206		Persentase stabilitas dan jumlah ketersediaan harga barang kebutuhan pokok	%	5.9			
	3.31 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN						
	Tercapainya Peningkatan Pertumbuhan Sektor Industri Pengolahan Nonmigas						
207		Persentase Pertumbuhan PDB Sektor Industri Pengolahan Nonmigas	%	6.8	2	2	2
	Meningkatnya Kontribusi Sektor Industri Pengolahan Nonmigas Terhadap PDB						
208		Persentase Kontribusi Sektor Industri Pengolahan Nonmigas Terhadap PDB	%	18.3	1.28	1.38	1.5
	Tercapainya Pertumbuhan Nilai Ekspor Produk Industri Pengolahan Nonmigas						
209		Nilai Ekspor Produk Industri Pengolahan Nonmigas (USD Miliar)	Nilai	151.9	1.8	2	2.2
	Meningkatnya Tenaga Kerja di Sektor Industri Pengolahan Nonmigas						
210		Jumlah Tenaga Kerja Sektor Industri Pengolahan Nonmigas	Orang	20.6 juta	1.215	1.250	1.300
	Terwujudnya Pertumbuhan Nilai Investasi Sektor Industri Pengolahan Nonmigas						
211		Nilai Investasi Sektor Industri Pengolahan Non Migas (Rp. Triliun)	Rp	425.3 Triliun	6.6	6.7	6.8
	3.32 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI						
	Meningkatnya status perkembangan kawasan transmigrasi yang direvitalisasi						
212		Nilai rata-rata indeks perkembangan 52 kawasan transmigrasi Prioritas Nasional yang direvitalisasi	Index	53.12	2	3	44.08
213		Nilai rata-rata indeks perkembangan 100 kawasan transmigrasi Prioritas Kementerian yang direvitalisasi	Index	42.03	2	3	33.94



BAB VIII
PENUTUP

BAB VIII PENUTUP

Sebagai upaya mengefektifkan pencapaian sasaran pembangunan daerah tahun 2022 dengan mendayagunakan sumber pendanaan yang terbatas maka dalam implementasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah semua Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur wajib menerapkan prinsip efisiensi, efektivitas, tranparansi, akuntabilitas dan partisipasi. Persyaratan utama dalam implementasi perencanaan pembangunan yang telah ditetapkan adalah koordinasi dan sinkronisasi dalam rangka mendapatkan keterpaduan program dan kegiatan yang dilakukan di Nusa Tenggara Timur dari berbagai sumber pendanaan, baik sumber pendanaan APBN, APBD Provinsi dan Kabupaten/Kota serta sumber pendanaan dari stakeholders lainnya yang berasal dari swasta, maupun bantuan pendanaan melalui NGO dan Lembaga Kejasama Bilateral dan Multilateral.

Bagian dari upaya koordinasi ini telah dilakukan melalui pelaksanaan Musrenbang mulai dari jenjang pemerintahan paling bawah yaitu Desa hingga pelaksanaan Musrenbang Nasional. Selanjutnya RKPD Provinsi NTT Tahun 2022 menjadi pedoman perumusan penyempurnaaan rancangan akhir Renja Perangkat Daerah Provinsi dan pedoman dalam penyusunan kebijakan publik, baik berupa kerangka regulasi maupun kerangka investasi dan pelayanan umum pemerintah. Secara sepsifik RKPD Provinsi NTT Tahun 2022 menjadi pedoman penyusunan Rancangan Kebijakan Umum APBD Provinsi serta Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Provinsi Tahun Anggaran 2022.

Untuk menjamin keterpaduan, sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan setiap program dan kegiatan, masing-masing perangkat daerah wajib menyempurnakan Renja Perangkat Daerah tahun 2022 sesuai RKPD 2022 sebagai berikut:

1. Usulan pembangunan tahun 2022 harus di dukung perencanaan berkualitas, oleh karena itu setiap usulan program/kegiatan pembangunan harus dilengkapi kelengkapan dokumen yaitu; (a) target dan sasaran yang terukur; (b) lokasi yang jelas; (c) dokumen teknis berupa TOR sesuai jenis program/kegiatan;

2. Untuk menjamin kepastian terpenuhinya dokumen pendukung usulan Program/kegiatan pembangunan tahun 2022, maka Bappelitbangda Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Bappeda/BP4D/Bappelitbang Kabupaten/Kota se-Nusa Tenggara Timur secara intensif berkoordinasi sehingga masing-masing perangkat daerah terkait Tingkat Provinsi dan perangkat daerah Kabupaten/Kota sebagai pengusul memenuhi kewajibannya;

3. Bagi usulan strategis yang lingkupnya lintas Kabupaten/Kota dan memiliki pengaruh besar terhadap pembangunan Nusa Tenggara Timur usulan program/kegiatan yang akan dilaksanakan dapat disiapkan oleh perangkat daerah Provinsi;

4. Untuk usulan strategis program/kegiatan dalam satu wilayah Kabupaten/Kota maka usulannya disiapkan perangkat daerah Kabupaten/Kota;

5. Kegiatan fisik yang membutuhkan desain, maka pembiayaan studi desain dapat dilakukan melalui pendanaan APBN, APBD Provinsi dan APBD Kabupaten/Kota;

Demikian Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2022 disusun untuk menjadi pedoman bagi semua Perangkat Daerah (PD) – Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagai dokumen acuan dalam proses perencanaan dan penganggaran pembangunan tahun 2022 selanjutnya.

Semua perencanaan Program dan Kegiatan selanjutnya, tidak dapat keluar dari kerangka yang telah ditetapkan di dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah ini, kecuali timbul hal-hal yang mendesak dan prioritas yang membutuhkan penanganan segera.

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

VIKTOR BUNGTILU LAISKODAT

LAMPIRAN

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

RKPD 2022

PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN 2022

PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN ANGGARAN 2021

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode RPJMD	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2020	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RKPD TAHUN 2021	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2023		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2022	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			terlaksananya Peningkatan Pelayanan dan Akses Masyarakat terhadap Museum (paket)				*1*		*(22 kab kota, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*1*		
		Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum						50.000.000,00							-	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
			terlaksananya Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum (paket)				*1*		*(22 kab kota, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*1*		
	2.23	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN**						**23.874.467.000,00**							**0,00**	
1.	**2.23.2-23.2-24.0-0.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**						**15.940.470.000,00**			**Tidak**	**Tidak**			**0,00**	**Dinas Perpustakaan dan Kearsipan**
			Prosentase Ketercapaian pelayanan administrasi perkantoran (%)				***100***									
	2.23.2-23.2-24.0-0.02.01.1.01	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						485.500.000,00		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Tidak	Tidak			-	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
			Tercapainya Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Kegiatan)				*2*		*(22 Kab./Kota, NUSA TENGGARA TIMUR, NUSA TENGGARA TIMUR)*	*Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum*				*2*		
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						114.500.000,00		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum					-	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
			Terlaksananya Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Kegiatan)				*2*		*(Kel. Merdeka, KOTA KUPANG, KOTA KUPANG)*	*Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum*				*2*		
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						371.000.000,00		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum					-	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
			Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Kegiatan)				*2*		*(22 Kab./Kota, NUSA TENGGARA TIMUR, NUSA TENGGARA TIMUR)*	*Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum*				*2*		
	2.23.2-23.2-24.0-0.02.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						13.000.000.000,00		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Tidak	Tidak			-	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
			Tercapainya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah (Kegiatan)				*1*		*(Kel. Merdeka, KOTA KUPANG, KOTA KUPANG)*	*Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum*				*1*		
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						13.000.000.000,00		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum					-	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
			Terlaksananya Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN (Kegiatan)				*1*		*(Kel. Merdeka, KOTA KUPANG, KOTA KUPANG)*	*Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum*				*1*		
	2.23.2-23.2-24.0-0.02.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						99.200.000,00		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Tidak	Tidak			-	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
			Tercapainya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah (Kegiatan)				*2*		*(Kel. Merdeka, KOTA KUPANG, ANRI-Jakarta, NUSA TENGGARA TIMUR)*	*Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum*				*2*		
		Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai						41.200.000,00		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum					-	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
			Terlaksananya Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai (Kegiatan)				*4*		*(Kel. Merdeka, KOTA KUPANG, KOTA KUPANG)*	*Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum*				*4*		

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode RPJMD	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2020	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RKPD TAHUN 2021	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2023		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2022	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi						58.000.000,00		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum					-	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
			Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi (Kegiatan)				*2*		*(Kel. Merdeka, KOTA KUPANG, ANRI-Jakarta, NUSA TENGGARA TIMUR)*	*Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum*				*2*		
	2.23.2-23.2-24.0-0.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						1.037.400.000,00		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Tidak	Tidak			-	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
			Tercapainya Pengadministrasian Umum Kantor (Kegiatan)				*7*		*(Jakarta, NUSA TENGGARA TIMUR, NUSA TENGGARA TIMUR)*	*Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum*				*7*		
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor						4.900.000,00		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum					-	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
			Terlaksananya Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor (Bulan)				*12*		*(Kel. Merdeka, KOTA KUPANG, KOTA KUPANG)*	*Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum*				*2*		
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						29.000.000,00		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum					-	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
			Terlaksananya Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan (Bulan)				*12*		*(Kel. Merdeka, KOTA KUPANG, KOTA KUPANG)*	*Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum*				*1*		
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan						7.500.000,00		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum					-	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
			Terlaksananya Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan (Bulan)				*12*		*(Kel. Merdeka, KOTA KUPANG, KOTA KUPANG)*	*Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum*				*1*		
		Penyediaan Bahan/Material						55.000.000,00		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum					-	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
			Terlaksananya Penyediaan Bahan/Material (Bulan)				*12*		*(Kel. Merdeka, KOTA KUPANG, KOTA KUPANG)*	*Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum*				*1*		
		Fasilitasi Kunjungan Tamu						7.000.000,00		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum					-	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
			Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu (Bulan)				*12*		*(Kel. Merdeka, KOTA KUPANG, KOTA KUPANG)*	*Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum*				*1*		
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						431.000.000,00		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum					-	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
			Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Kegiatan)				*4*		*(Jakarta, 22 Kab/Kota, NUSA TENGGARA TIMUR)*	*Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum*				*4*		
		Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD						503.000.000,00		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum					-	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
			Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Kegiatan)				*2*		*(Kel. Merdeka, KOTA KUPANG, KOTA KUPANG)*	*Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum*				*2*		
	2.23.2-23.2-24.0-0.02.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						310.000.000,00		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Tidak	Tidak			-	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
			Tercapainya Pengadaan Barang Milik Daerah Penjunjang Urusan Pemerintah Daerah (Kegiatan)				*1*		*(Kel. Merdeka, KOTA KUPANG, KOTA KUPANG)*	*Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum*				*1*		

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode RPJMD	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2020	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RKPD TAHUN 2021	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2023		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2022	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya						310.000.000,00		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum						Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
			Terlaksananya Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya (Paket)				*7*		*(Kel. Merdeka, KOTA KUPANG, KOTA KUPANG)*	*Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum*				*7*		
	2.23.2-23.2-24.0-0.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						643.000.000,00		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Tidak	Tidak				Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
			Tercapainya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (Kegiatan)				*3*		*(Kel. Merdeka, KOTA KUPANG, KOTA KUPANG)*	*Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum*				*3*		
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat						6.000.000,00		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum						Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
			Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Bulan)				*12*		*(Kel. Merdeka, KOTA KUPANG, KOTA KUPANG)*	*Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum*				*1*		
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						320.000.000,00		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum						Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
			Terlaksananya Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik (Bulan)				*12*		*(Kel. Merdeka, KOTA KUPANG, KOTA KUPANG)*	*Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum*				*1*		
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						317.000.000,00		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum						Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
			Terlaksananya Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (Kegiatan)				*3*		*(Kel. Merdeka, KOTA KUPANG, KOTA KUPANG)*	*Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum*				*3*		
	2.23.2-23.2-24.0-0.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						365.370.000,00		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Tidak	Tidak				Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
			Tercapainya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (Kegiatan)				*5*		*(Kel. Merdeka, KOTA KUPANG, KOTA KUPANG)*	*Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum*				*5*		
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						55.000.000,00		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum						Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
			Terlaksananya Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan (Bulan)				*12*		*(Kel. Merdeka, KOTA KUPANG, KOTA KUPANG)*	*Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum*				*1*		
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						180.000.000,00		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum						Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
			Terlaksananya Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan (Bulan)				*12*		*(Kel. Merdeka, KOTA KUPANG, KOTA KUPANG)*	*Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum*				*1*		
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						58.000.000,00		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum						Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
			Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya (Paket)				*6*		*(Kel. Merdeka, KOTA KUPANG, KOTA KUPANG)*	*Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum*				*6*		
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya						59.100.000,00		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum						Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode RPJMD	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2020	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RKPD TAHUN 2021	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2023		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2022	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya (M2)				*300*		*(Kel. Merdeka, KOTA KUPANG, KOTA KUPANG)*	*Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum*				*1*		
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						13.270.000,00		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum					-	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
			Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya (M2)				*67,40*		*(Kel. Merdeka, KOTA KUPANG, KOTA KUPANG)*	*Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum*				*1*		
2.	**2.23.2-23.2-24.0-0.02.02**	**PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN**						**7.517.997.000,00**			**Ya**	**Ya**			**0,00**	**Dinas Perpustakaan dan Kearsipan**
			Meningkatnya Jumlah Kunjungan Perpustakaan Berbasis Jejaring dan Fisik (%)				***75***			***Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum***						
			Meningkatnya Perpustakaan Aras Provinsi dan Kabupaten/Kota yang Menerapkan E-Library (%)				***100***			***Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum***						
	2.23.2-23.2-24.0-0.02.02.1.01	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Provinsi						6.123.467.000,00		DAK Fisik - Bidang Pendidikan - Reguler - Perpustakaan Daerah, Dana Transfer Umum -	Tidak	Tidak			-	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
			Tercapainya Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Provinsi (Kegiatan)				*5*		*(22 Kab/Kota,Jakarta, Yogyakarta, NUSA TENGGARA TIMUR)*	*DAK Fisik - Bidang Pendidikan - Reguler - Perpustakaan Daerah, Dana Transfer Umum -*				*5*		
		Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik						850.000.000,00		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum					-	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
			Terlaksananya Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik (Kegiatan)				*15*		*(22 Kab/Kota, NUSA TENGGARA TIMUR)*	*Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum*				*15*		
		Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus di Seluruh Wilayah Provinsi sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan						669.865.000,00		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum					-	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
			Terlaksananya Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus di Seluruh Wilayah Provinsi sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan (Kegiatan)				*3*		*(22 Kab/Kota, NUSA TENGGARA TIMUR)*	*Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum*				*3*		
		Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Provinsi						150.102.000,00		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum					-	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
			Terlaksananya Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Provinsi (Kegiatan)				*2*		*(Kab. TTS, Belu, Sumba Tengah, Sumba Barat, Sumba Barat Daya, NUSA TENGGARA TIMUR)*	*Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum*				*2*		
		Pengembangan Perpustakaan Deposit						967.500.000,00		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum					-	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
			Terlaksananya Pengembangan Perpustakaan Deposit (Kegiatan)				*7*		*(22 Kab/Kota,Jawa Timur,Jawa Tengah, Yogyakarta, NUSA TENGGARA TIMUR)*	*Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum*				*7*		

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode RPJMD	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2020	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RKPD TAHUN 2021	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2023		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2022	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka						3.486.000.000,00		DAK Fisik - Bidang Pendidikan - Reguler - Perpustakaan Daerah, Dana Transfer Umum -					-	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
			terlaksananya pengelolaan dan pengembangan bahan pustaka (paket)				*1*		*(22 kab kota, NUSA TENGGARA TIMUR)*	*DAK Fisik - Bidang Pendidikan - Reguler - Perpustakaan Daerah, Dana Transfer Umum -*				*1*		
	2.23.2-23.2-24.0-0.02.02.1.02	Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Provinsi						1.394.530.000,00		DAK Fisik - Bidang Pendidikan - Reguler - Perpustakaan Daerah, Dana Transfer Umum -	Tidak	Tidak			-	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
			Tercapainya Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Provinsi (Kegiatan)				*3*		*(22 Kab/Kota, Jakarta, NUSA TENGGARA TIMUR)*	*DAK Fisik - Bidang Pendidikan - Reguler - Perpustakaan Daerah, Dana Transfer Umum -*				*3*		
		Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Tingkat Menengah dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat						22.000.000,00		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum					-	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
			Terlaksananya Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Tingkat Menengah dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat (Kegiatan)				*1*		*(Kota Kupang, KOTA KUPANG)*	*Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum*				*1*		
		Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Perpustakaan di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi						922.530.000,00		DAK Fisik - Bidang Pendidikan - Reguler - Perpustakaan Daerah, Dana Transfer Umum -					-	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
			Terlaksananya Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Perpustakaan di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi (Kegiatan)				*2*		*(Kel. Merdeka, KOTA KUPANG, Kelaba Maja Sabu Raijua; Fatunausus TTS; Hasan Maubesi; Malaka; Wae Rebo Manggarai; Oeseli Role Ndao, NUSA TENGGARA TIMUR)*	*DAK Fisik - Bidang Pendidikan - Reguler - Perpustakaan Daerah, Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum*				*2*		
		Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial						450.000.000,00		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum					-	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
			Terlaksananya Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial (Kegiatan)				*4*		*(9 Kabupaten/Kota, Jakarta, NUSA TENGGARA TIMUR)*	*Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum*				*4*		
3.	**2.23.2-23.2-24.0-0.02.03**	**PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO**						**416.000.000,00**			**Ya**	**Ya**			**0,00**	**Dinas Perpustakaan dan Kearsipan**
			Meningkatnya Koleksi Daerah yang diserahkan ke Nasional setiap tahun (%)				***45,5***			***Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum***						
			Meningkatnya Koleksi Naskah Kuno yang dilestarikan setiap tahun (%)				***45,5***			***Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum***						
	2.23.2-23.2-24.0-0.02.03.1.01	Pelestarian Karya Cetak dan Karya Rekam Koleksi Daerah di Daerah Provinsi						346.000.000,00		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Tidak	Tidak			-	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
			Tercapainya Pelestarian Karya Cetak dan Karya Rekam Koleksi Daerah di Daerah Provinsi (Kegiatan)				*1*		*(22 Kab/Kota, NUSA TENGGARA TIMUR)*	*Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum*				*1*		

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode RPJMD	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2020	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RKPD TAHUN 2021	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2023		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2022	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		Penghimpunan dan Pengelolaan Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam						346.000.000,00		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum					-	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
			Terlaksananya Penghimpunan dan Pengelolaan Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam (Kegiatan)				*2*		*(22 Kab/Kota, NUSA TENGGARA TIMUR)*	*Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum*				*2*		
	2.23.2-23.2-24.0-0.02.03.1.02	Penerbitan Katalog Induk Daerah dan Bibliografi Daerah						70.000.000,00		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Tidak	Tidak			-	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
			Tercapainya Penerbitan Katalog Induk Daerah dan Bibliografi Daerah (Kegiatan)				*1*		*(22 Kab/Kota, Jakarta, NUSA TENGGARA TIMUR)*	*Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum*				*1*		
		Penerbitan Bibliografi Daerah						70.000.000,00		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum					-	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
			Terlaksananya Penerbitan Bibliografi Daerah (Kegiatan)				*1*		*(22 Kab/Kota, Jakarta, NUSA TENGGARA TIMUR)*	*Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum*				*1*		
	2.24	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN**						**3.476.060.000,00**							**0,00**	
1.	**2.24.2-23.2-24.0-0.02.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP**						**2.536.000.000,00**			**Ya**	**Ya**			**0,00**	**Dinas Perpustakaan dan Kearsipan**
			Meningkatnya Pengelolaan Arsip Daerah (%)				***100***			***Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum***						
	2.24.2-23.2-24.0-0.02.02.1.01	Pengelolaan Arsip Dinamis Provinsi						485.000.000,00		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Tidak	Tidak			-	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
			Tercapainya Pengelolaan Arsip Dinamis Provinsi (Kegiatan)				*1*		*(22 Kab/Kota, Jakarta, NUSA TENGGARA TIMUR)*	*Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum*				*1*		
		Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis						485.000.000,00		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum					-	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
			Terlaksananya Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis (Kegiatan)				*6*		*(22 Kab/Kota, Jakarta, NUSA TENGGARA TIMUR)*	*Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum*				*6*		
	2.24.2-23.2-24.0-0.02.02.1.02	Pengelolaan Arsip Statis Daerah Provinsi						1.476.000.000,00		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Tidak	Tidak			-	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
			Tercapainya Pengelolaan Arsip Statis Daerah Provinsi (Kegiatan)				*2*		*(22 kab/kota, Jakarta, NUSA TENGGARA TIMUR)*	*Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum*				*2*		
		Pengumpulan dan Penyampaian Salinan Otentik Naskah Asli Arsip Terjaga kepada ANRI						340.000.000,00		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum					-	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
			Terlaksananya Pengumpulan dan Penyampaian Salinan Otentik Naskah Asli Arsip Terjaga kepada ANRI (Kegiatan)				*2*		*(Kota Kupang, Jakarta, NUSA TENGGARA TIMUR)*	*Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum*				*2*		
		Akusisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis						1.136.000.000,00		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum					-	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
			Terlaksananya Akusisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis (Kegiatan)				*12*		*(22 kab/kota, Jakarta, NUSA TENGGARA TIMUR)*	*Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum*				*12*		
	2.24.2-23.2-24.0-0.02.02.1.03	Pengelolaan Simpul Jaringan dalam Sistem Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Provinsi						575.000.000,00		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Tidak	Tidak			-	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
			Tercapainya Pengelolaan Simpul Jaringan dalam Sistem Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Provinsi (Kegiatan)				*2*		*(22 Kab/Kota, NUSA TENGGARA TIMUR)*	*Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum*				*2*		

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode RPJMD	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2020	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RKPD TAHUN 2021	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2023		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2022	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Provinsi Melalui JIKN						415.000.000,00		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum					-	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
			Terlaksananya Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Provinsi Melalui JIKN (Kegiatan)				*6*		*(22 Kab/Kota, NUSA TENGGARA TIMUR)*	*Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum*				*6*		
		Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Provinsi						160.000.000,00		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum					-	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
			Terlaksananya Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Provinsi (Kegiatan)				*1*		*(Kel. Kayu Putih, KOTA KUPANG)*	*Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum*				*1*		
2.	**2.24.2-23.2-24.0-0.02.03**	**PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP**						**940.060.000,00**			**Ya**	**Ya**			**0,00**	**Dinas Perpustakaan dan Kearsipan**
			Meningkatnya Perlindungan dan Penyelamatan Arsip (%)				***100***			***Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum***						
	2.24.2-23.2-24.0-0.02.03.1.01	Pemusnahan Arsip dilingkungan Pemerintah Daerah Provinsi yang Memiliki Retensi di Bawah 10 Tahun						220.060.000,00		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Tidak	Tidak			-	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
			Tercapainya Pemusnahan Arsip dilingkungan Pemerintah Daerah Provinsi yang Memiliki Retensi di Bawah 10 Tahun (Kegiatan)				*1*		*(Kota Kupang, KOTA KUPANG)*	*Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum*				*1*		
		Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (sepuluh) Tahun						220.060.000,00		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum					-	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
			Terlaksananya Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (sepuluh) Tahun (Kegiatan)				*1*		*(Kota Kupang, KOTA KUPANG)*	*Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum*				*1*		
	2.24.2-23.2-24.0-0.02.03.1.02	Perlindungan dan Penyelamatan Arsip Akibat Bencana yang Berskala Provinsi						100.000.000,00		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Tidak	Tidak			-	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
			Tercapainya Perlindungan dan Penyelamatan Arsip Akibat Bencana yang Berskala Provinsi (Kegiatan)				*1*		*(Kota Kupang, KOTA KUPANG)*	*Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum*				*1*		
		Evakuasi, Identifikasi, Pemulihan dan Penyimpanan Akibat Bencana						100.000.000,00		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum					-	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
			Terlaksananya Evakuasi, Identifikasi, Pemulihan dan Penyimpanan Akibat Bencana (Kegiatan)				*1*		*(Kota Kupang, KOTA KUPANG)*	*Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum*				*1*		
	2.24.2-23.2-24.0-0.02.03.1.03	Penyelamatan Arsip Perangkat Daerah Provinsi yang digabung dan/atau dibubarkan, dan Pemekaran Daerah Kabupaten/Kota						300.000.000,00		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Tidak	Tidak			-	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
			Tercapainya Penyelamatan Arsip Perangkat Daerah Provinsi yang digabung dan/atau dibubarkan, dan Pemekaran Daerah Kabupaten/Kota (Kegiatan)				*2*		*(Kota Kupang, KOTA KUPANG)*	*Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum*				*2*		
		Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian serta Penyerahan Atau Pemusnahan Arsip Bagi Penggabungan Perangkat Daerah Provinsi						200.000.000,00		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum					-	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode RPJMD	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2020	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RKPD TAHUN 2021	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2023		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2022	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Terlaksananya Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian serta Penyerahan Atau Pemusnahan Arsip Bagi Penggabungan Perangkat Daerah Provinsi				*1,00*		*(Kota Kupang, KOTA KUPANG)*	*Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum*				*1,00*		
		Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian serta Penyerahan Atau Pemusnahan Arsip Bagi Pembubaran Perangkat Daerah Provinsi						100.000.000,00		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum					-	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
			Terlaksananya Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian serta Penyerahan Atau Pemusnahan Arsip Bagi Pembubaran Perangkat Daerah Provinsi (Kegiatan)				*1*		*(Kota Kupang, KOTA KUPANG)*	*Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum*				*1*		
	2.24.2-23.2-24.0-0.02.03.1.04	Autentifikasi Arsip Statis dan Arsip Hasil Alih Media yang dikelola Oleh Lembaga Kearsipan Provinsi						100.000.000,00		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Tidak	Tidak			-	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
			Tercapainya Autentifikasi Arsip Statis dan Arsip Hasil Alih Media yang dikelola Oleh Lembaga Kearsipan Provinsi (Kegiatan)				*1*		*(Kel. Kayu Putih, KOTA KUPANG, KOTA KUPANG)*	*Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum*				*1*		
		Penilaian dan Penetapan Hasil Alih Media Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip						100.000.000,00		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum					-	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
			Terlaksananya Penilaian dan Penetapan Hasil Alih Media Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip (Kegiatan)				*1*		*(Kel. Kayu Putih, KOTA KUPANG, KOTA KUPANG)*	*Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum*				*1*		
	2.24.2-23.2-24.0-0.02.03.1.05	Pencarian Arsip Statis Provinsi yang dinyatakan Hilang						220.000.000,00		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Tidak	Tidak			-	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
			Tercapainya Pencarian Arsip Statis Provinsi yang dinyatakan Hilang (Kegiatan)				*1*		*(Kota Kupang, Kab. Sikka dan Flores Timur, Bali, Sulawesi Selatan dan Jakarta, NUSA TENGGARA TIMUR)*	*Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum*				*1*		
		Penilaian dan Penetapan Autentisitas Arsip Statis yang dinyatakan Hilang						220.000.000,00		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum					-	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
			Terlaksananya Penilaian dan Penetapan Autentisitas Arsip Statis yang dinyatakan Hilang (Kegiatan)				*2*		*(Kota Kupang, Kab. Sikka dan Flores Timur Bali, Sulawesi Selatan dan Jakarta, NUSA TENGGARA TIMUR)*	*Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum*				*2*		
	3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**						**584.584.341.322,00**							**0,00**	
	3.25	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN**						**61.714.952.952,00**							**0,00**	
1.	**3.25.3-25.0-0.0-0.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**						**20.359.663.572,00**			**Tidak**	**Tidak**			**0,00**	**Dinas Kelautan dan Perikanan**
			Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran yang berkualitas				***100***			***Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum***						
	3.25.3-25.0-0.0-0.01.01.1.01	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						905.202.190,00			Tidak	Tidak			-	Dinas Kelautan dan Perikanan
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						15.000.000,00							-	Dinas Kelautan dan Perikanan

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode RPJMD	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2020	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RKPD TAHUN 2021	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2023		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2022	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Terlaksananya Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Paket)				*1*		*(Kota Kupang, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*1*		
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD						35.000.000,00								- Dinas Kelautan dan Perikanan
			Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Paket)				*1*		*(Kota Kupang, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*1*		
		Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD						434.128.230,00								- Dinas Kelautan dan Perikanan
			Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD (Paket)				*1*		*(Kota Kupang, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*1*		
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD						25.000.000,00								- Dinas Kelautan dan Perikanan
			Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Paket)				*1*		*(Kota Kupang, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*1*		
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						396.073.960,00								- Dinas Kelautan dan Perikanan
			Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Paket)				*1*		*(Kota Kupang)*					*1*		
	3.25.3-25.0-0.0-0.01.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						13.978.440.813,00			Tidak	Tidak				- Dinas Kelautan dan Perikanan
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						13.959.504.095,00								- Dinas Kelautan dan Perikanan
			Tersedianya Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN (Paket)				*1*		*(Kota Kupang, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*1*		
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD						18.936.718,00								- Dinas Kelautan dan Perikanan
			Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Paket)				*1*		*(Kota Kupang, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*1*		
	3.25.3-25.0-0.0-0.01.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah						75.000.000,00			Tidak	Tidak				- Dinas Kelautan dan Perikanan
		Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD						75.000.000,00								- Dinas Kelautan dan Perikanan
			Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Paket)				*1*		*(Kota Kupang, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*1*		
	3.25.3-25.0-0.0-0.01.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						100.000.000,00			Tidak	Tidak				- Dinas Kelautan dan Perikanan
		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi						100.000.000,00								- Dinas Kelautan dan Perikanan
			Tersedianya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi (Paket)				*1*		*(Kota Kupang, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*1*		
	3.25.3-25.0-0.0-0.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						792.557.740,00			Tidak	Tidak				- Dinas Kelautan dan Perikanan
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						54.716.000,00								- Dinas Kelautan dan Perikanan
			Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan (Paket)				*1*		*(Kota Kupang, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*1*		
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan						21.380.400,00								- Dinas Kelautan dan Perikanan

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode RPJMD	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2020	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RKPD TAHUN 2021	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2023		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2022	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan (Paket)				*1*		*(Kota Kupang, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*1*		
		Penyediaan Bahan/Material						75.218.320,00								- Dinas Kelautan dan Perikanan
			tersedianya Bahan/Material (Paket)				*1*		*(Kota Kupang, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*1*		
		Fasilitasi Kunjungan Tamu						35.750.000,00								- Dinas Kelautan dan Perikanan
			Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu (Paket)				*1*		*(Kota Kupang, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*1*		
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						605.493.020,00								- Dinas Kelautan dan Perikanan
			Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Paket)				*1*		*(Kota Kupang, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*1*		
	3.25.3-25.0-0.0-0.01.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						462.987.387,00			Tidak	Tidak				- Dinas Kelautan dan Perikanan
		Pengadaan Mebel						216.046.000,00								- Dinas Kelautan dan Perikanan
			Terlaksananya Pengadaan Mebel (Paket)				*1*		*(Kota Kupang, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*1*		
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya						246.941.387,00								- Dinas Kelautan dan Perikanan
			Tersedianya Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya (Paket)				*1*		*(Kota Kupang, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*1*		
	3.25.3-25.0-0.0-0.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						3.307.246.894,00			Tidak	Tidak				- Dinas Kelautan dan Perikanan
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat						31.920.000,00								- Dinas Kelautan dan Perikanan
			Tersedianya Jasa Surat Menyurat (Paket)				*1*		*(Kota Kupang, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*1*		
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						1.129.675.984,00								- Dinas Kelautan dan Perikanan
			tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik (Paket)				*1*		*(Kota Kupang, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*1*		
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						2.145.650.910,00								- Dinas Kelautan dan Perikanan
			Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor (Paket)				*1*		*(Kota Kupang, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*1*		
	3.25.3-25.0-0.0-0.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						738.228.548,00			Tidak	Tidak				- Dinas Kelautan dan Perikanan
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						433.764.668,00								- Dinas Kelautan dan Perikanan
			tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan (Paket)				*1*		*(Kota Kupang, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*1*		
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						93.393.880,00								- Dinas Kelautan dan Perikanan
			Terpeliharanya Peralatan dan Mesin Lainnya (Paket)				*1*		*(Kota Kupang, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*1*		
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya						211.070.000,00								- Dinas Kelautan dan Perikanan

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode RPJMD	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2020	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RKPD TAHUN 2021	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2023		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2022	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya (Paket)				*1*		*(Kota Kupang, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*1*		
2.	**3.25.3-25.0-0.0-0.01.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL**						**2.203.057.130,00**			**Ya**	**Ya**			**0,00**	**Dinas Kelautan dan Perikanan**
			Cakupan Luas Kawasan Konservasi Perairan Daerah yang dikelola (%)				***100***									
	3.25.3-25.0-0.0-0.01.02.1.01	Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi						1.833.057.130,00		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Tidak	Tidak			-	Dinas Kelautan dan Perikanan
		Pengelolaan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Berdasarkan Penetapan dari Pemerintah Pusat						1.405.000.000,00		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum					-	Dinas Kelautan dan Perikanan
			Terlaksananya Pengelolaan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Berdasarkan Penetapan dari Pemerintah Pusat (Paket)				*1*		*(22 Kabupaten Kota, NUSA TENGGARA TIMUR)*	*Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum*				*1*		
		Rehabilitasi Wilayah Perairan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil						428.057.130,00		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum					-	Dinas Kelautan dan Perikanan
			Terlaksananya Rehabilitasi Wilayah Perairan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Paket)				*1*		*(Kota Kupang, NUSA TENGGARA TIMUR)*	*Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum*				*1*		
	3.25.3-25.0-0.0-0.01.02.1.02	Penerbitan Izin Pemanfaatan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi						155.000.000,00			Tidak	Tidak			-	Dinas Kelautan dan Perikanan
		Penerbitan Rekomendasi Izin Lokasi dan Izin Pengelolaan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi						155.000.000,00							-	Dinas Kelautan dan Perikanan
			Terbitnya Rekomendasi Izin Lokasi dan Izin Pengelolaan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi (Paket)				*1*		*(22 Kabupaten/Kota, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*1*		
	3.25.3-25.0-0.0-0.01.02.1.03	Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil						215.000.000,00		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Tidak	Tidak			-	Dinas Kelautan dan Perikanan
		Pengembangan Kapasitas Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil						-		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum					-	Dinas Kelautan dan Perikanan
		Penguatan dan Pengembangan Kelembagaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil						215.000.000,00		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum					-	Dinas Kelautan dan Perikanan
			Terlaksananya Penguatan dan Pengembangan Kelembagaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Paket)				*1*		*(22 Kabupaten/Kota, NUSA TENGGARA TIMUR)*	*Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum*				*1*		
3.	**3.25.3-25.0-0.0-0.01.03**	**PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP**						**22.718.720.000,00**			**Ya**	**Ya**			**0,00**	**Dinas Kelautan dan Perikanan**
			Presentase peningkatan Produksi Perikanan Tangkap (%)				***23,7***			***Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum***						
	3.25.3-25.0-0.0-0.01.03.1.01	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil						14.362.440.000,00		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Tidak	Tidak			-	Dinas Kelautan dan Perikanan
		Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap						14.147.440.000,00		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum					-	Dinas Kelautan dan Perikanan

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode RPJMD	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2020	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RKPD TAHUN 2021	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2023		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2022	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Tersedianya Prasarana Usaha Perikanan Tangkap (Paket)				*1*		*(22 Kabupaten/Kota, NUSA TENGGARA TIMUR)*	*Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum*				*1*		
		Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap						215.000.000,00								- Dinas Kelautan dan Perikanan
			Terlaksananya Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap (Paket)				*1*		*(22 Kabupaten/Kota, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*1*		
	3.25.3-25.0-0.0-0.01.03.1.02	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi						25.000.000,00		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Tidak	Tidak				- Dinas Kelautan dan Perikanan
		Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan						25.000.000,00								- Dinas Kelautan dan Perikanan
			Tersedianya Data dan Informasi Sumber Daya Ikan (Paket)				*1*		*(22 Kabupaten/Kota, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*1*		
		Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap						-		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum						- Dinas Kelautan dan Perikanan
	3.25.3-25.0-0.0-0.01.03.1.03	Penerbitan Izin Usaha Perikanan Tangkap Untuk Kapal Perikanan Berukuran di atas 10 GT Sampai Dengan 30 GT						236.280.000,00		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Tidak	Tidak				- Dinas Kelautan dan Perikanan
		Penerbitan Rekomendasi Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran di Atas 10 GT sampai dengan 30 GT						236.280.000,00		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum						- Dinas Kelautan dan Perikanan
			Terlaksananya Penerbitan Rekomendasi Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran di Atas 10 GT sampai dengan 30 GT (Paket)				*1*		*(22 Kabupaten/Kota, NUSA TENGGARA TIMUR)*	*Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum*				*1*		
	3.25.3-25.0-0.0-0.01.03.1.05	Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT di Laut, Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi							95.000.000,00			Tidak	Tidak				- Dinas Kelautan dan Perikanan
		Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran Sampai Dengan 10 GT						95.000.000,00								- Dinas Kelautan dan Perikanan
			Terlaksananya Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran Sampai Dengan 10 GT (Paket)				*1*		*(22 Kabupaten/Kota, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*1*		
	3.25.3-25.0-0.0-0.01.03.1.06	Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi						8.000.000.000,00			Tidak	Tidak				- Dinas Kelautan dan Perikanan
		Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan						8.000.000.000,00								- Dinas Kelautan dan Perikanan
			Tersedianya Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan (Paket)				*1*		*(22 Kabupaten/kota, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*1*		
4.	**3.25.3-25.0-0.0-0.01.04**	**PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA**						**10.998.512.250,00**			Ya	Ya			**0,00**	**Dinas Kelautan dan Perikanan**
			Presentase peningkatan Produksi Perikanan Budidaya (%)				***42,8***									

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode RPJMD	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2020	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RKPD TAHUN 2021	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2023		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2022	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.25.3-25.0-0.0-0.01.04.1.01	Penerbitan Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi						50.000.000,00			Tidak	Tidak			-	Dinas Kelautan dan Perikanan
		Penerbitan Rekomendasi Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan						50.000.000,00							-	Dinas Kelautan dan Perikanan
			Terfaksananya Penerbitan Rekomendasi Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan (Paket)				*1*		*(22 Kabupaten/Kota, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*1*		
	3.25.3-25.0-0.0-0.01.04.1.05	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut						10.948.512.250,00		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Tidak	Tidak			-	Dinas Kelautan dan Perikanan
		Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Laut						8.974.000.000,00		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum					-	Dinas Kelautan dan Perikanan
			Tersedianya Prasarana Pembudidayaan Ikan di Laut (Paket)				*1*		*(22 Kabupaten/Kota, NUSA TENGGARA TIMUR)*	*Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum*				*1*		
		Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang Penggunaan Sumber Dayanya Lebih Efisien Apabila Dilakukan oleh Daerah Provinsi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota						1.750.000.000,00		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum					-	Dinas Kelautan dan Perikanan
			Tersedianya Prasarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang Penggunaan Sumber Dayanya Lebih Efisien Apabila Dilakukan oleh Daerah Provinsi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota (Paket)				*1*		*(22 Kabupaten/Kota, NUSA TENGGARA TIMUR)*	*Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum*				*1*		
		Penyediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang Penggunaan Sumber Dayanya lebih Efisien apabila dilakukan Oleh Daerah Provinsi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota						224.512.250,00		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum					-	Dinas Kelautan dan Perikanan
			Tersedianya Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang Penggunaan Sumber Dayanya lebih Efisien apabila dilakukan Oleh Daerah Provinsi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota (Paket)				*1*		*(22 Kabupaten/Kota, NUSA TENGGARA TIMUR)*	*Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum*				*1*		
5.	**3.25.3-25.0-0.0-0.01.05**	**PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN**						**4.200.000.000,00**			**Ya**	**Ya**			**0,00**	**Dinas Kelautan dan Perikanan**
			Penurunan Kasus UU Fishing (Illegal, Unregulation, Unreported Fishing (IUU)				***0***			***Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum***						
	3.25.3-25.0-0.0-0.01.05.1.01	Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Sampai Dengan 12 Mil						4.200.000.000,00			Tidak	Tidak			-	Dinas Kelautan dan Perikanan
		Pengawasan Pemanfaatan Ruang Laut sampai dengan 12 Mil						900.000.000,00							-	Dinas Kelautan dan Perikanan
			Terlaksananya Pengawasan Pemanfaatan Ruang Laut sampai dengan 12 Mil (Paket)				*1*		*(22 Kabupaten/Kota, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*1*		

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode RPJMD	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2020	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RKPD TAHUN 2021	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2023		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2022	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap sampai dengan 12 Mil						2.483.500.000,00							-	Dinas Kelautan dan Perikanan
			Terlaksananya Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap sampai dengan 12 Mil (Paket)				*1*		*(22 Kabupaten/Kota, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*1*		
		Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Laut sampai dengan 12 Mil						200.000.000,00							-	Dinas Kelautan dan Perikanan
			Terlaksananya Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Laut sampai dengan 12 Mil (Paket)				*1*		*(22 Kabupaten/Kota, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*1*		
		Penumbuhan dan Pengembangan Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS)						616.500.000,00							-	Dinas Kelautan dan Perikanan
			Terlaksananya Penumbuhan dan Pengembangan Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS) (Paket)				*1*		*(22 Kabupaten/Kota, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*1*		
6.	**3.25.3-25.0-0.0-0.01.06**	**PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN**						**1.235.000.000,00**			**Ya**	**Ya**			**0,00**	**Dinas Kelautan dan Perikanan**
			Persentase Peningkatan Angka Konsumsi Ikan (%)				***38,46***									
	3.25.3-25.0-0.0-0.01.06.1.02	Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar						1.235.000.000,00			Tidak	Tidak			-	Dinas Kelautan dan Perikanan
		Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan Atau Standar Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar						1.235.000.000,00							-	Dinas Kelautan dan Perikanan
			Terlaksananya Bimbingan dan Penerapan Persyaratan Atau Standar Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar (Paket)				*1*		*(22 Kabupaten/Kota, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*1*		
	3.26	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA**						**59.052.999.172,00**							**0,00**	
1.	**3.26.3-26.0-0.0-0.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**						**15.107.860.000,00**			**Tidak**	**Tidak**			**0,00**	**Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif**
			Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran yang berkualitas (%)				***100***									
			Meningkatnya sarana dan prasarana (%)				***100***									
			Tercapainya penyusunan capaian kinerja ikhtisar realisasi kinerja dan keuangan (%)				***100***									
	3.26.3-26.0-0.0-0.01.01.1.01	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						890.000.000,00			Tidak	Tidak			-	Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
			Terlaksananya Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (%)				*100*		*(Kota Kupang, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*100*		
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						140.000.000,00							-	Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode RPJMD	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2020	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RKPD TAHUN 2021	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2023		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2022	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Terlaksananya Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Paket)				*1*		*(22 Kabupaten/Kota, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*1*		
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD						60.000.000,00								- Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
			Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Paket)				*1*		*(22 Kabupaten/Kota, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*1*		
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD						25.000.000,00								- Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
			Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Paket)				*1*		*(22 Kabupaten/Kota, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*1*		
		Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD						40.000.000,00								- Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
			Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD (Paket)				*1*		*(22 Kabupaten/Kota, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*1*		
		Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD						25.000.000,00								- Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
			Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD (Paket)				*1*		*(22 Kabupaten/Kota, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*1*		
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD						350.000.000,00								- Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
			Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Paket)				*1*		*(22 Kabupaten/Kota, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*1*		
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						250.000.000,00								- Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
			terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Paket)				*1*		*(22 Kabupaten/Kota, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*1*		
	3.26.3-26.0-0.0-0.01.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						12.193.360.000,00			Tidak	Tidak				- Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
			Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah (%)				*100*		*(Kota Kupang, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*100*		
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						12.000.000.000,00								- Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
			Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN (Paket)				*1*		*(Kota Kupang, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*1*		
		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN						11.360.000,00								- Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
			Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Paket)				*1*		*(Kota Kupang, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*1*		
		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD						12.000.000,00								- Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
			Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Paket)				*1*		*(Kota Kupang, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*1*		
		Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD						20.000.000,00								- Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
			Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD (Paket)				*1*		*(Kota Kupang, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*1*		
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD						20.000.000,00								- Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode RPJMD	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2020	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RKPD TAHUN 2021	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2023		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2022	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Paket)				*1*		*(Kota Kupang, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*1*		
		Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan						100.000.000,00								- Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
			Terlaksananya Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan (Paket)				*1*		*(Kota Kupang, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*1*		
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD						30.000.000,00								- Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
			Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Paket)				*1*		*(Kota Kupang, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*1*		
	3.26.3-26.0-0.0-0.01.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah						10.000.000,00			Tidak	Tidak				- Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
			Terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah (%)				*100*		*(Kota Kupang, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*100*		
		Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD						10.000.000,00								- Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
			Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Paket)				*1*		*(Kota Kupang, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*1*		
	3.26.3-26.0-0.0-0.01.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						104.500.000,00			Tidak	Tidak				- Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
			Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah (%)				*100*		*(Kota Kupang, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*100*		
		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya						15.000.000,00								- Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
			Terlaksananya Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya (Paket)				*1*		*(Kota Kupang, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*1*		
		Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian						37.500.000,00								- Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
			Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Paket)				*1*		*(Kota Kupang, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*1*		
		Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian						12.000.000,00								- Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
			Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian (Paket)				*1*		*(Kota Kupang, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*1*		
		Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai						10.000.000,00								- Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
			Terlaksananya Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai (Paket)				*1*		*(Kota Kupang, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*1*		
		Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan						15.000.000,00								- Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
			Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan (Paket)				*1*		*(Kota Kupang, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*1*		
		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan						15.000.000,00								- Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
			Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Paket)				*1*		*(Kota Kupang, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*1*		

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode RPJMD	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2020	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RKPD TAHUN 2021	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2023		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2022	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.26.3-26.0-0.0-0.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						507.000.000,00			Tidak	Tidak			-	Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
			Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah (%)				*100*		*(Kota Kupang, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*100*		
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor						5.000.000,00							-	Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
			Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor (Paket)				*1*		*(Kota Kupang, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*1*		
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						200.000.000,00							-	Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
			Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor (Paket)				*1*		*(Kota Kupang, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*1*		
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor						10.000.000,00							-	Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
			Tersedianya Bahan Logistik Kantor (Paket)				*1*		*(Kota Kupang, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*1*		
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						12.000.000,00							-	Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
			Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan (P)				*1*		*(Kota Kupang, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*1*		
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan						15.000.000,00							-	Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
			Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan (Paket)				*1*		*(Kota Kupang, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*1*		
		Penyediaan Bahan/Material						25.000.000,00							-	Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
			Tersedianya Bahan/Material (Paket)				*1*		*(Kota Kupang, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*1*		
		Fasilitasi Kunjungan Tamu						35.000.000,00							-	Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
			Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu (Paket)				*1*		*(Kota Kupang, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*1*		
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						150.000.000,00							-	Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
			Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Paket)				*1*		*(Kota Kupang, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*1*		
		Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD						5.000.000,00							-	Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
			Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Paket)				*1*		*(Kota Kupang, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*1*		
		Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD						50.000.000,00							-	Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
			Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Paket)				*1*		*(Kota Kupang, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*1*		
	3.26.3-26.0-0.0-0.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						1.206.000.000,00			Tidak	Tidak			-	Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
			Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%)				*100*		*(Kota Kupang, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*100*		
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat						6.000.000,00							-	Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode RPJMD	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2020	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RKPD TAHUN 2021	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2023		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2022	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Tersedianya Jasa Surat Menyurat (Paket)				*1*		*(Kota Kupang, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*1*		
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						200.000.000,00							-	Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
			Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik (Paket)				*1*		*(Kota Kupang, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*1*		
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						1.000.000.000,00							-	Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
			Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor (Paket)				*1*		*(Kota Kupang, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*1*		
	3.26.3-26.0-0.0-0.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						197.000.000,00			Tidak	Tidak			-	Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
			Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%)				*100*		*(Kota Kupang, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*100*		
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						60.000.000,00							-	Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
			Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan (Paket)				*1*		*(Kota Kupang, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*1*		
		Pemeliharaan Mebel						2.000.000,00							-	Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
			Terlaksananya Pemeliharaan Mebel (Paket)				*1*		*(Kota Kupang, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*1*		
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						15.000.000,00							-	Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
			Terpeliharanya Peralatan dan Mesin Lainnya (Paket)				*1*		*(Kota Kupang, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*1*		
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya						120.000.000,00							-	Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
			Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya (Paket)				*1*		*(Kota Kupang, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*1*		
2.	**3.26.3-26.0-0.0-0.01.02**	**PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA**						**25.505.279.000,00**			**Ya**	**Ya**			**0,00**	**Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif**
			Persentase peningkatan jumlah kunjungan wisatawan pada Destinasi Pariwisata yang mendapatkan program peningkatan				***100***									
			Peningkatan Cakupan Desa Wisata pada Kawasan Pariwisata Estate (%)				***100***									
	3.26.3-26.0-0.0-0.01.02.1.01	Pengelolaan Daya Tarik Wisata Provinsi						-			Tidak	Tidak			-	Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
			Terlaksananya Pengelolaan Daya Tarik Wisata Provinsi (%)				*100*		*(22 Kab/Kota, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*100*		
		Pengembangan Daya Tarik Wisata Unggulan Provinsi						-							-	Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode RPJMD	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2020	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RKPD TAHUN 2021	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2023		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2022	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Terlaksananya Pengembangan Daya Tarik Wisata Unggulan Provinsi (Paket)				*1*		*(22 Kabupaten/kota, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*1*		
	3.26.3-26.0-0.0-0.01.02.1.02	Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi						25.294.095.400,00			Tidak	Tidak				- Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
			Terlaksananya Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi (%)				*100*		*(22 Kab/Kota, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*100*		
		Penetapan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi						-								- Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
			Terlaksananya Penetapan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi (Paket)				*1*		*(22 Kabupaten/Kota, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*1*		
		Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi						23.404.210.400,00								- Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
			Terlaksananya Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi (Paket)				*1*		*(22 Kabupaten/Kota, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*1*		
		Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi						500.000.000,00								- Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
			Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi (Paket)				*1*		*(22 Kabupaten/Kota, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*1*		
		Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi						1.389.885.000,00								- Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
			Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi (Paket)				*1*		*(22 Kabupaten/Kota, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*1*		
	3.26.3-26.0-0.0-0.01.02.1.03	Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi						211.183.600,00			Tidak	Tidak				- Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
			Terlaksananya Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi (%)				*100*		*(22 Kab/Kota, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*100*		
		Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi						50.000.000,00								- Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
			Terlaksananya Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi (Paket)				*1*		*(22 Kabupaten/Kota, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*1*		
		Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi						161.183.600,00								- Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
			Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi (Paket)				*1*		*(22 Kabupaten/Kota, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*1*		
3.	**3.26.3-26.0-0.0-0.01.03**	**PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA**						**4.224.023.830,00**			**Ya**	**Ya**			**0,00**	**Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif**
			Pertumbuhan kunjungan wisatawan (%)				***100***									
	3.26.3-26.0-0.0-0.01.03.1.01	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi						4.224.023.830,00			Tidak	Tidak				- Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode RPJMD	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2020	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RKPD TAHUN 2021	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2023		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2022	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Terlaksananya Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi (%)				*100*		*(22 Kab/Kota, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*100*		
		Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri						727.065.840,00								- Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
			Terlaksananya Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri (Paket)				*1*		*(22 Kabupaten/Kota, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*1*		
		Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri						1.446.957.990,00								- Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
			Terlaksananya Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri (Paket)				*1*		*(22 Kabupaten/Kota, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*1*		
		Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Provinsi, Baik Dalam dan Luar Negeri						1.700.000.000,00								- Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
			tersedianya Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Provinsi, Baik Dalam dan Luar Negeri (Paket)				*1*		*(22 Kabupaten/Kota, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*1*		
		Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri						350.000.000,00								- Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
			Terlaksananya Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri (Paket)				*1*		*(22 Kabupten/Kota, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*1*		
4.	**3.26.3-26.0-0.0-0.01.04**	**PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN**						**8.391.858.882,00**			**Ya**	**Ya**			**0,00**	**Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif**
			Cakupan Produk Sub Sektor Ekonomi Kreatif yang mendapatkan Hak Paten (HKI) (%)				***100***									
			Cakupan Produk Sub Sektor Ekonomi Kreatif yang mendapatkan perlindungan dari penggunaan yang tidak sah (%)				***100***									
	3.26.3-26.0-0.0-0.01.04.1.01	Penyediaan Sarana dan Prasarana Kota Kreatif						3.727.809.574,00			Tidak	Tidak				- Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
			Terlaksananya Penyediaan Sarana dan Prasarana Kota Kreatif (%)				*100*		*(22 Kab/Kota, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*100*		
		Layanan Penyediaan Sarana dan Prasarana Kota Kreatif						2.227.809.574,00								- Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
			Terlaksananya Layanan Penyediaan Sarana dan Prasarana Kota Kreatif (Paket)				*1*		*(22 Kabupaten/Kota, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*1*		
		Perluasan Pasar Produk Kreatif Baik di Pasar Ekspor Maupun Pasar Domestik						1.500.000.000,00								- Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
			Terlaksananya Perluasan Pasar Produk Kreatif Baik di Pasar Ekspor Maupun Pasar Domestik (Paket)				*1*		*(22 Kabupaten/Kota, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*1*		
	3.26.3-26.0-0.0-0.01.04.1.02	Pengembangan Ekosistem Ekonomi KreatifÃ						4.664.049.308,00			Tidak	Tidak				- Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode RPJMD	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2020	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RKPD TAHUN 2021	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2023		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2022	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Terlaksananya Pengembangan Ekosistem Ekonomi KreatifÂ (%)				*100*		*(22 Kab/Kota, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*100*		
		Pengembangan Riset						500.000.000,00							-	Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
			Terlaksananya Pengembangan Riset (Paket)				*1*		*(22 Kabupaten/Kota, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*1*		
		Penyediaan Infrastruktur						1.500.000.000,00							-	Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
			Tersedianya Penyediaan Infrastruktur (Paket)				*1*		*(22 Kabupaten/Kota, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*1*		
		Pemberian Insentif						1.463.773.068,00							-	Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
			Terlaksananya Pemberian Insentif (Paket)				*1*		*(22 Kabupten/Kota, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*1*		
		Fasilitasi Kekayaan Intelektual						700.000.000,00							-	Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
			Terlaksananya Fasilitasi Kekayaan Intelektual (Paket)				*1*		*(22 Kabupaten/Kota, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*1*		
		Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif						500.276.240,00							-	Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
			Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif (Paket)				*1*		*(22 Kabupaten/Kota, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*1*		
5.	**3.26.3-26.0-0.0-0.01.05**	**PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF**						**5.823.977.460,00**			**Ya**	**Ya**			**0,00**	**Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif**
			Peningkatan Cakupan Ketersediaan SDM Pariwisata bersertifikasi menurut jenis keahliannya (%)				***100***									
			Peningkatan Cakupan POKDARWIS pada Kawasan Pariwisata Estate (Target 24 Pokdarwis di Tahun 2023)				***100***									
	3.26.3-26.0-0.0-0.01.05.1.01	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Lanjutan						4.410.819.600,00			Tidak	Tidak			-	Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
			Terlaksananya Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Lanjutan (%)				*100*		*(22 Kab/Kota, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*100*		
		Pengembangan Kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Lanjutan						1.428.183.600,00							-	Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
			Terlaksananya Pengembangan Kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Lanjutan (Paket)				*1*		*(22 Kabupaten/Kota, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*1*		
		Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata						1.288.367.000,00							-	Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode RPJMD	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2020	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RKPD TAHUN 2021	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2023		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2022	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Terlaksananya Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata (Paket)				*1*		*(22 Kabupaten/Kota, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*1*		
		Pelatihan Berbasis Kompetensi Bidang Homestay dan Pemandu Wisata (Tour Guide) Tingkat Lanjutan						529.464.000,00							-	Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
			Terlaksananya Pelatihan Berbasis Kompetensi Bidang Homestay dan Pemandu Wisata (Tour Guide) Tingkat Lanjutan (Paket)				*1*		*(22 Kabupaten/Kota, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*1*		
		Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata						830.694.000,00							-	Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
			Terlaksananya Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata (Paket)				*1*		*(22 Kabupaten/Kota, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*1*		
		Pelatihan Asesor Kompetensi/Workplace Assesor (WPA)						334.111.000,00							-	Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
			Terlaksananya Pelatihan Asesor Kompetensi/Workplace Assesor (WPA) (Paket)				*1*		*(22 Kabupaten/Kota, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*1*		
	3.26.3-26.0-0.0-0.01.05.1.02	Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif						1.413.157.860,00			Tidak	Tidak			-	Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
			Terlaksananya Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif (%)				*100*		*(22 Kab/Kota, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*100*		
		Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif						557.825.520,00							-	Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
			Terlaksananya Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif (Paket)				*1*		*(22 Kabupaten/Kota, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*1*		
		Dukungan Fasilitasi Menghadapi Perkembangan Teknologi di Dunia Usaha						601.365.340,00							-	Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
			Terlaksananya Dukungan Fasilitasi Menghadapi Perkembangan Teknologi di Dunia Usaha (Paket)				*1*		*(22 Kabupaten/Kota, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*1*		
		Standarisasi Usaha dan Sertifikasi Profesi di Bidang Ekonomi Kreatif						253.967.000,00							-	Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
			Terlaksananya Standarisasi Usaha dan Sertifikasi Profesi di Bidang Ekonomi Kreatif (Paket)				*1*		*(22 Kabupaten/Kota, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*1*		
	3.27	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN**						**358.063.825.211,00**							**0,00**	
1.	**3.27.3-27.0-0.0-0.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**						**39.162.525.584,00**			**Tidak**	**Tidak**			**0,00**	**Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan**
			Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran yang berkualitas (%)				***100***									
			Meningkatnya sarana dan prasarana (%)				***100***									
			Tercapainya penyusunan capaian kinerja ikhtisar realisasi kinerja dan keuangan (%)				***100***									
	3.27.3-27.0-0.0-0.01.01.1.01	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						190.000.000,00			Tidak	Tidak			-	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode RPJMD	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2020	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RKPD TAHUN 2021	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2023		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2022	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Terlaksananya Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (%)				*100*		*(22 kab/kota, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*100*		
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						20.000.000,00								- Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
			Terlaksananya Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Paket)				*1*		*(Kota Kupang, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*1*		
		Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD						150.000.000,00								- Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
			Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD (Paket)				*1*		*(Kota Kupang, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*1*		
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD						20.000.000,00								- Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
			Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Paket)				*1*		*(Kota Kupang, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*1*		
	3.27.3-27.0-0.0-0.01.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						35.550.000.000,00			Tidak	Tidak				- Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
			Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah (%)				*100*		*(22 kab/kota, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*100*		
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						35.500.000.000,00								- Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
			Terlaksananya Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN (Paket)				*1*		*(Kota Kupang, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*1*		
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD						50.000.000,00								- Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
			Terlaksnanya Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Paket)				*1*		*(Kota Kupang, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*1*		
	3.27.3-27.0-0.0-0.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						555.811.540,00			Tidak	Tidak				- Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
			Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah (%)				*100*		*(22 kab/kota, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*100*		
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor						17.506.500,00								- Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
			Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor (Paket)				*1*		*(Kota Kupang, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*1*		
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						35.913.100,00								- Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
			Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor (Paket)				*1*		*(Kota Kupang, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*1*		
		Penyediaan Bahan/Material						57.225.940,00								- Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
			tersedianya Bahan/Material (Paket)				*1*		*(Kota Kupang, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*1*		
		Fasilitasi Kunjungan Tamu						45.166.000,00								- Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
			Terlaksnanya Fasilitasi Kunjungan Tamu (Paket)				*1*		*(Kota Kupang, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*1*		
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						400.000.000,00								- Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode RPJMD	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2020	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RKPD TAHUN 2021	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2023		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2022	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Terlaksnanya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Paket)				*1*		*(Kota Kupang, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*1*		
	3.27.3-27.0-0.0-0.01.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						178.120.000,00			Tidak	Tidak			-	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
			Terlaksanannya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (%)				*100*		*(22 kab/kota, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*100*		
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya						178.120.000,00							-	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
			Terlaksanannya Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya (Paket)				*1*		*(Kota Kupang, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*1*		
	3.27.3-27.0-0.0-0.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						2.026.372.544,00			Tidak	Tidak			-	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
			Terlaksanannya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%)				*100*		*(22 kab/kota, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*100*		
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat						9.280.000,00							-	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
			Tersedianya Jasa Surat Menyurat (Paket)				*1*		*(Kota Kupang, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*1*		
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						844.710.004,00							-	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
			Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik (Paket)				*1*		*(Kota Kupang, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*1*		
		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor						200.000.000,00							-	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
			Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor (Paket)				*1*		*(Kota Kupang, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*1*		
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						972.382.540,00							-	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
			Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor (Paket)				*1*		*(Kota Kupang, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*1*		
	3.27.3-27.0-0.0-0.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						662.221.500,00			Tidak	Tidak			-	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
			Terlaksanannya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%)				*100*		*(22 kab/kota, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*100*		
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						552.221.500,00							-	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
			Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan (Paket)				*1*		*(Kota Kupang, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*1*		
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						60.000.000,00							-	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
			Terlaksanannya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya (Paket)				*1*		*(Kota Kupang, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*1*		
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya						50.000.000,00							-	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode RPJMD	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2020	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RKPD TAHUN 2021	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2023		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2022	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya (Paket)				*1*		*(Kota Kupang, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*1*		
2.	**3.27.3-27.0-0.0-0.01.02**	**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN**						**10.482.350.500,00**			**Ya**	**Ya**			**0,00**	**Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan**
			Persentase penggunaan benih bersertifikat (%)				***100***									
	3.27.3-27.0-0.0-0.01.02.1.01	Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian						1.768.484.000,00		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Tidak	Tidak			-	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
			Terlaksananya Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian (%)				*100*		*(22 kab/kota, NUSA TENGGARA TIMUR)*	*Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum*				*100*		
		Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian						1.768.484.000,00		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum					-	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
			Terlaksananya Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian (Paket)				*1*		*(22 Kabupaten/Kota, NUSA TENGGARA TIMUR)*	*Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum*				*1*		
		Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian						-							-	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
			Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian (Paket)				*1*		*(22 Kabupaten/Kota, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*1*		
	3.27.3-27.0-0.0-0.01.02.1.02	Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman						8.713.866.500,00		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Tidak	Tidak			-	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
			Terlaksananya Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman (%)				*100*		*(22 kab/kota, NUSA TENGGARA TIMUR)*	*Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum*				*100*		
		Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Hortikultura						1.506.199.800,00		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum					-	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
			Terlaksananya Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Hortikultura (Paket)				*1*		*(22 Kabupaten/Kota, NUSA TENGGARA TIMUR)*	*Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum*				*1*		
		Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Tanaman Pangan						5.607.666.700,00		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum					-	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
			Terlaksananya Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Tanaman Pangan (Paket)				*1*		*(22 Kabupaten/Kota, NUSA TENGGARA TIMUR)*	*Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum*				*1*		
		Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Perkebunan						1.600.000.000,00		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum					-	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
			Terlaksananya Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Perkebunan (Paket)				*1*		*(22 Kabupaten/Kota, NUSA TENGGARA TIMUR)*	*Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum*				*1*		
3.	**3.27.3-27.0-0.0-0.01.03**	**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN**						**182.327.326.750,00**			**Ya**	**Ya**			**0,00**	**Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan**
			Pertumbuhan Produksi tanaman pangan dan perkebunan yang difasilitasi (%)				***95,24***			***Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum***						

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode RPJMD	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2020	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RKPD TAHUN 2021	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2023		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2022	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Pertumbuhan Produksi tanaman perkebunan yang difasilitasi (%)				***100***			***Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum***						
	3.27.3-27.0-0.0-0.01.03.1.01	Penataan Prasarana Pertanian						182.327.326.750,00		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Tidak	Tidak			-	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
			Terlaksananya Penataan Prasarana Pertanian (%)				*100*		*(22 kab/kota, NUSA TENGGARA TIMUR)*	*Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum*				*100*		
		Perencanaan Pengembangan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian						182.327.326.750,00		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum					-	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
			Terlaksananya Perencanaan Pengembangan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian (Paket)				*1*		*(22 Kabupaten/Kota, NUSA TENGGARA TIMUR)*	*Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum*				*1*		
		Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengelolaan Jaringan Irigasi di Tingkat Usaha Tani						-							-	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
			Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengelolaan Jaringan Irigasi di Tingkat Usaha Tani (Paket)				*1*		*(22 Kabupaten/Kota, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*1*		
		Koordinasi, Sinkronisasi dan Penataan Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya						-							-	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
			Terlaksannya Koordinasi, Sinkronisasi dan Penataan Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya (Paket)				*1*		*(22 Kabupeten/Kota, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*1*		
		Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rutin Gedung UPTD Pertanian serta Sarana Pendukungnya						-		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum					-	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
4.	**3.27.3-27.0-0.0-0.01.05**	**PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN**						**655.522.660,00**			**Ya**	**Ya**			**0,00**	**Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan**
			Prosentase areal serangan OPT yang dikendalikan (%)				***75***									
	3.27.3-27.0-0.0-0.01.05.1.01	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Provinsi						655.522.660,00		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Tidak	Tidak			-	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
			Terlaksananya Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Provinsi (%)				*100*		*(22 kab/kota, NUSA TENGGARA TIMUR)*	*Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum*				*100*		
		Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan						655.522.660,00		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum					-	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
			Terlaksananya Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan (Paket)				*1*		*(22 Kabupaten/Kota, NUSA TENGGARA TIMUR)*	*Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum*				*1*		
5.	**3.27.3-27.0-0.0-0.01.07**	**PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN**						**4.226.999.850,00**			**Ya**	**Ya**			**0,00**	**Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan**
			Cakupan Peningkatan Kompentensi Kelompok Tani menurut kelas (%)				***60***			***Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum***						
	3.27.3-27.0-0.0-0.01.07.1.01	Pengembangan Ketenagaan Penyuluhan Pertanian						4.226.999.850,00		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Tidak	Tidak			-	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
			Terlaksananya Pengembangan Ketenagaan Penyuluhan Pertanian (%)				*100*		*(22 kab/kota, NUSA TENGGARA TIMUR)*	*Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum*				*100*		

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode RPJMD	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2020	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RKPD TAHUN 2021	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2023		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2022	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		Pengembangan Kompetensi Penyuluh Pertanian ASN						224.999.850,00							-	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
			Terleksnanya Pengembangan Kompetensi Penyuluh Pertanian ASN (Paket)				*1*		*(22 Kabupaten/Kota, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*1*		
		Kerja Sama Pengembangan Kompetensi Penyuluh Pertanian Swadaya dan Swasta						4.002.000.000,00		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum					-	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
			TerlaksananyaKerja Sama Pengembangan Kompetensi Penyuluh Pertanian Swadaya dan Swasta (Paket)				*1*		*(22 Kabupaten/Kota, NUSA TENGGARA TIMUR)*	*Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum*				*1*		
	3.27.3-27.0-0.0-0.01.07.1.02	Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian						-			Tidak	Tidak			-	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
			Terlaksananya Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian (%)				*100*		*(22 kab/kota, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*100*		
		Pelaksanaan Penyuluhan dan Pemberdayaan Petani						-							-	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
			Terlaksananya Pelaksanaan Penyuluhan dan Pemberdayaan Petani (Paket)				*1*		*(22 Kabupaten/kota, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*1*		
6.	**3.27.3-27.0-0.0-0.08.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**						**19.428.381.707,00**			**Tidak**	**Tidak**			**0,00**	**Dinas Peternakan**
			Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran yang berkualitas (%)				***100***									
			Meningkatnya sarana dan prasarana (%)				***100***									
			Tercapainya penyusunan capaian kinerja ikhtisar realisasi kinerja dan keuangan (%)				***100***									
	3.27.3-27.0-0.0-0.08.01.1.01	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						10.418.000,00			Tidak	Tidak			-	Dinas Peternakan
			Terlaksananya Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (%)				*100*		*(22 kab/kota, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*100*		
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD						10.418.000,00							-	Dinas Peternakan
			Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Paket)				*1*		*(Kota Kupang, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*1*		
	3.27.3-27.0-0.0-0.08.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						17.552.884.002,00			Tidak	Tidak			-	Dinas Peternakan
			Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah (%)				*100*		*(22 kab/kota, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*100*		
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						17.552.884.002,00							-	Dinas Peternakan
			Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN (Paket)				*1*		*(Kota Kupang, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*1*		
	3.27.3-27.0-0.0-0.08.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						57.500.000,00			Tidak	Tidak			-	Dinas Peternakan
			Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah (%)				*100*		*(22 kab/kota, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*100*		
		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi						57.500.000,00							-	Dinas Peternakan

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode RPJMD	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2020	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RKPD TAHUN 2021	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2023		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2022	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi (Paket)				*1*		*(Kota Kupang, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*1*		
	3.27.3-27.0-0.0-0.08.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						279.681.988,00			Tidak	Tidak			-	Dinas Peternakan
			Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah (%)				*100*		*(22 kab/kota, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*100*		
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor						25.110.900,00							-	Dinas Peternakan
			Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor (Paket)				*1*		*(Kota Kupang, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*1*		
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor						18.342.500,00							-	Dinas Peternakan
			Tersedianya Bahan Logistik Kantor (Paket)				*1*		*(Kota Kupang, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*1*		
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						31.364.840,00							-	Dinas Peternakan
			Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan (Paket)				*1*		*(Kota Kupang, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*1*		
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan						15.319.400,00							-	Dinas Peternakan
			Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan (Paket)				*1*		*(Kota Kupang, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*1*		
		Penyediaan Bahan/Material						86.790.348,00							-	Dinas Peternakan
			Tersedianya Bahan/Material (Paket)				*1*		*(Kota Kupang, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*1*		
		Fasilitasi Kunjungan Tamu						14.400.000,00							-	Dinas Peternakan
			Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu (Paket)				*1*		*(Kota Kupang, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*1*		
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						88.354.000,00							-	Dinas Peternakan
			Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Paket)				*1*		*(Kota Kupang, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*1*		
	3.27.3-27.0-0.0-0.08.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						41.894.200,00			Tidak	Tidak			-	Dinas Peternakan
			Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (%)				*100*		*(22 kab/kota, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*100*		
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya						41.894.200,00							-	Dinas Peternakan
			Terlaksananya Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya (Paket)				*1*		*(Kota Kupang, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*1*		
	3.27.3-27.0-0.0-0.08.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						1.179.602.967,00			Tidak	Tidak			-	Dinas Peternakan
			Terlaksana Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%)				*100*		*(22 kab/kota, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*100*		
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat						8.475.575,00							-	Dinas Peternakan
			Tersedianya Jasa Surat Menyurat (Paket)				*1*		*(Kota Kupang, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*1*		

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode RPJMD	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2020	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RKPD TAHUN 2021	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2023		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2022	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						402.829.692,00							-	Dinas Peternakan
			Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik (Paket)				*1*		*(Kota Kupang, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*1*		
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						768.297.700,00							-	Dinas Peternakan
			Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor (Paket)				*1*		*(Kota Kupang, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*1*		
	3.27.3-27.0-0.0-0.08.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						306.400.550,00			Tidak	Tidak			-	Dinas Peternakan
			Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%)				*100*		*(22 kab/kota, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*100*		
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						158.131.250,00							-	Dinas Peternakan
			Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan (Paket)				*1*		*(Kota Kupang, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*1*		
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						79.000.000,00							-	Dinas Peternakan
			Terlaksnanya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya (Paket)				*1*		*(Kota Kupang, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*1*		
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						69.269.300,00							-	Dinas Peternakan
			Terlaksanannya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya (Paket)				*1*		*(Kota Kupang, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*1*		
7.	**3.27.3-27.0-0.0-0.08.02**	**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN**						**21.797.992.520,00**			**Ya**	**Ya**			**0,00**	**Dinas Peternakan**
			Pertumbuhan Populasi Ternak Besar (%)				***6,5***									
	3.27.3-27.0-0.0-0.08.02.1.04	Peningkatan Ketersediaan dan Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi						2.046.795.540,00		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Tidak	Tidak			-	Dinas Peternakan
			Terlaksanannya Peningkatan Ketersediaan dan Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi (%)				*100*		*(22 kab/kota, NUSA TENGGARA TIMUR)*	*Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum*				*100*		
		Pemberian Bimbingan Peningkatan Produksi Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi						1.363.395.540,00		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum					-	Dinas Peternakan
			Terlaksanannya Pemberian Bimbingan Peningkatan Produksi Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi (Paket)				*1*		*(22 Kabupaten/Kota, NUSA TENGGARA TIMUR)*	*Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum*				*1*		

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode RPJMD	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2020	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RKPD TAHUN 2021	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2023		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2022	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		Pengembangan dan Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi						683.400.000,00							-	Dinas Peternakan
			Terlaksananya Pengembangan dan Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi (Paket)				*1*		*(22 Kabupaten/Kota, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*1*		
	3.27.3-27.0-0.0-0.08.02.1.05	Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan Kewenangan Provinsi						19.751.196.980,00		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Tidak	Tidak			-	Dinas Peternakan
			Terlaksananya Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan Kewenangan Provinsi (%)				*100*		*(22 kab/kota, NUSA TENGGARA TIMUR)*	*Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum*				*100*		
		Pengendalian Penyediaan dan Produksi Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak						8.109.946.980,00		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum					-	Dinas Peternakan
			Terlaksananya Pengendalian Penyediaan dan Produksi Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak (Paket)				*1*		*(22 Kabupaten/Kota, NUSA TENGGARA TIMUR)*	*Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum*				*1*		
		Penjaminan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan, Pakan						11.641.250.000,00		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum					-	Dinas Peternakan
			Terlaksananya Penjaminan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan, Pakan (Paket)				*1*		*(22 Kabupaten/Kota, NUSA TENGGARA TIMUR)*	*Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum*				*1*		
	3.27.3-27.0-0.0-0.08.02.1.07	Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain						-			Tidak	Tidak			-	Dinas Peternakan
			Terlaksananya Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain (%)				*100*		*(22 kab/kota, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*100*		
		Pengadaan Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain						-							-	Dinas Peternakan
			Terlaksananya Pengadaan Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain (Paket)				*1*		*(22 Kabupaten/Kota, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*1*		
8.	**3.27.3-27.0-0.0-0.08.03**	**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN**						**72.751.629.500,00**			**Ya**	**Ya**			**0,00**	**Dinas Peternakan**
			Persentase penggunaan benih bersertifikat (%)				***100***									
	3.27.3-27.0-0.0-0.08.03.1.01	Penataan Prasarana Pertanian						72.751.629.500,00		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Tidak	Tidak			-	Dinas Peternakan
			Penataan Prasarana Pertanian (%)				*100*		*(22 kab/kota, NUSA TENGGARA TIMUR)*	*Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum*				*100*		
		Perencanaan Pengembangan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian						72.344.161.500,00		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum					-	Dinas Peternakan
			Terlaksananya Perencanaan Pengembangan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian (Paket)				*1*		*(22 Kabupaten/Kota, NUSA TENGGARA TIMUR)*	*Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum*				*1*		

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode RPJMD	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2020	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RKPD TAHUN 2021	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2023		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2022	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		Koordinasi, Sinkronisasi dan Penataan Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya						407.468.000,00							-	Dinas Peternakan
			Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi dan Penataan Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya (Paket)				*1*		*(22 Kabupaten/Kota, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*1*		
	3.27.3-27.0-0.0-0.08.03.1.02	Pengelolaan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak yang Wilayahnya Lebih Dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi						-			Tidak	Tidak			-	Dinas Peternakan
			Terlaksananya Pengelolaan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak yang Wilayahnya Lebih Dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi (%)				*100*		*(22 kab/kota, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*100*		
		Pelestarian dan Pemanfaatan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak						-							-	Dinas Peternakan
			Terlaksananya Pelestarian dan Pemanfaatan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak (Paket)				*1*		*(22 Kabupaten/Kota, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*1*		
9.	**3.27.3-27.0-0.0-0.08.04**	**PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER**						**7.231.096.140,00**			**Ya**	**Ya**			**0,00**	**Dinas Peternakan**
			Ternak yang sehat (%)				***80***									
	3.27.3-27.0-0.0-0.08.04.1.01	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi						5.759.070.140,00		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Tidak	Tidak			-	Dinas Peternakan
			Terlaksananya Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi (%)				*100*		*(22 kab/kota, NUSA TENGGARA TIMUR)*	*Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum*				*100*		
		Pengendalian Risiko dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis						4.892.472.000,00							-	Dinas Peternakan
			Terlaksananya Pengendalian Risiko dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis (Paket)				*1*		*(Kota Kupang, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*1*		
		Pembebasan Penyakit Hewan Menular Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi						116.598.140,00							-	Dinas Peternakan
			Terlaksananya Pembebasan Penyakit Hewan Menular Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi (Paket)				*1*		*(22 Kabupaten/Kota, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*1*		
		Penanggulangan Daerah Terdampak Wabah Penyakit Hewan Menular						750.000.000,00		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum					-	Dinas Peternakan
			Terlaksananya Penanggulangan Daerah Terdampak Wabah Penyakit Hewan Menular (Paket)				*1*		*(22 Kabupaten/Kota, NUSA TENGGARA TIMUR)*	*Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum*				*1*		
	3.27.3-27.0-0.0-0.08.04.1.02	Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Lintas Daerah Provinsi						422.026.000,00			Tidak	Tidak			-	Dinas Peternakan

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode RPJMD	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2020	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RKPD TAHUN 2021	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2023		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2022	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Terlaksananya Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Lintas Daerah Provinsi (%)				*100*		*(22 kab/kota, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*100*		
		Pengawasan atas Penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemasukan dan/atau Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan						338.896.000,00								- Dinas Peternakan
			Terlaksananya Pengawasan atas Penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemasukan dan/atau Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan (Paket)				*1*		*(22 Kabupaten/Kota, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*1*		
		Pengawasan dan Pemeriksaan Kesehatan Hewan dan Produk Hewan di Perbatasan Lintas Daerah Provinsi						83.130.000,00								- Dinas Peternakan
			Terlaksannya Pengawasan dan Pemeriksaan Kesehatan Hewan dan Produk Hewan di Perbatasan Lintas Daerah Provinsi (Paket)				*1*		*(22 Kabupaten/kota, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*1*		
	3.27.3-27.0-0.0-0.08.04.1.03	Penerapan Persyaratan Teknis Sertifikasi Zona/Kompartemen Bebas Penyakit dan Unit Usaha Produk Hewan						1.050.000.000,00			Tidak	Tidak				- Dinas Peternakan
			Terlaksananya Penerapan Persyaratan Teknis Sertifikasi Zona/Kompartemen Bebas Penyakit dan Unit Usaha Produk Hewan (%)				*100*		*(22 kab/kota, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*100*		
		Pemenuhan Persyaratan Teknis Sertifikasi Zona/Kompartemen Bebas Penyakit						250.000.000,00								- Dinas Peternakan
			Terlaksananya Pemenuhan Persyaratan Teknis Sertifikasi Zona/Kompartemen Bebas Penyakit (Paket)				*1*		*(22 Kabupaten/Kota, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*1*		
		Pengujian Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner						800.000.000,00								- Dinas Peternakan
			Terlaksananya Pengujian Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner (Paket)				*1*		*(22 Kabupaten/Kota, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*1*		
	3.28	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN**						**51.425.772.106,00**							**0,00**	
1.	**3.28.2-11.3-28.0-0.02.03**	**PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN**						**39.092.934.740,00**			**Ya**	**Ya**			**0,00**	**Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan**
			Peningkatan Cakupan lahan kritis yang tertangani setiap tahun (%)				***1,30***									
	3.28.2-11.3-28.0-0.02.03.1.01	Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi						1.451.250.000,00			Tidak	Tidak				- Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
			Terlaksananya Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi (%)				*100*		*(Kota Kupang, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*100*		
		Penyusunan Rancang Bangun Tata Hutan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan						1.451.250.000,00								- Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode RPJMD	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2020	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RKPD TAHUN 2021	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2023		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2022	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Terlaksananya Penyusunan Rancang Bangun Tata Hutan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan (Paket)				*1*		*(22 Kabubaten Kupang, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*1*		
	3.28.2-11.3-28.0-0.02.03.1.04	Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara						23.250.062.801,00		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Tidak	Tidak				- Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
			Terlaksananya Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara (%)				*100*		*(Kota Kupang, NUSA TENGGARA TIMUR)*	*Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum*				*100*		
		Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara						13.549.355.600,00		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum						- Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
			Terlaksananya Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara (Paket)				*1*		*(22 KAbupaten/Kota, NUSA TENGGARA TIMUR)*	*Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum*				*1*		
		Penerapan Teknik Konservasi Tanah dan Air Hutan dan Lahan						6.430.309.540,00								- Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
			Terlaksananya Penerapan Teknik Konservasi Tanah dan Air Hutan dan Lahan (Paket)				*1*		*(22 Kabupaten/Kota, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*1*		
		Pengembangan Perbenihan untuk Rehabilitasi Lahan						3.270.397.661,00								- Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
			Terlaksananya Pengembangan Perbenihan untuk Rehabilitasi Lahan (Paket)				*1*		*(22 Kabupaten/Kota, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*1*		
	3.28.2-11.3-28.0-0.02.03.1.05	Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi						6.639.478.399,00			Tidak	Tidak				- Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
			Terlaksananya Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi (%)				*100*		*(22 KAb?kota, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*100*		
		Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Hutan						5.210.453.975,00								- Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
			Terlaksananya Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Hutan (Paket)				*1*		*(22 Kabupaten/Kota, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*1*		
		Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan						375.000.000,00								- Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
			Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan (Paket)				*1*		*(22 Kabupaten/Kota, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*1*		
		Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan						1.054.024.424,00								- Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
			Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan (Paket)				*1*		*(22 Kabupaten/Kota, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*1*		
	3.28.2-11.3-28.0-0.02.03.1.06	Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)						6.611.113.768,00			Tidak	Tidak				- Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
			Terlaksananya Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) (%)				*100*		*(22 Kab/Kota, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*100*		
		Pengolahan Bahan Baku Hasil Hutan Bukan Kayu Hayati						1.007.385.670,00								- Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
			Terlaksananya Pengolahan Bahan Baku Hasil Hutan Bukan Kayu Hayati (Paket)				*1*		*(22 Kabupaten/Kota, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*1*		

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode RPJMD	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2020	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RKPD TAHUN 2021	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2023		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2022	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		Pembudidayaan Hasil Hutan Bukan Kayu dengan tidak Mengurangi Fungsi Pokoknya						5.303.728.098,00							-	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
			Terlaksananya Pembudidayaan Hasil Hutan Bukan Kayu dengan tidak Mengurangi Fungsi Pokoknya (Paket)				*1*		*(22 Kabupten/Kota, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*1*		
		Pengawasan Perizinan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu						300.000.000,00							-	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
			Terlaksananya Pengawasan Perizinan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu (Paket)				*1*		*(22 Kabupten/Kota, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*1*		
	3.28.2-11.3-28.0-0.02.03.1.07	Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu Dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun						1.141.029.772,00			Tidak	Tidak			-	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
			Terlaksananya Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu Dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun (%)				*100*		*(22 Kab/Kota, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*100*		
		Pembinaan dan Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu Dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun						1.041.029.772,00							-	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
			Terlaksananya Pembinaan dan Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu Dengan Kapasitas Produksi 6000 m3/Tahun (Paket)				*1*		*(22 Kabupaten/Kota, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*1*		
		Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK) dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik						100.000.000,00							-	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
			Terlksananya Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK) dengan Kapasitas Produksi 6000 m3/Tahun melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik (Paket)				*1*		*(22 KAbupaten/Kota, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*1*		
2.	**3.28.2-11.3-28.0-0.02.04**	**PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA**						**8.117.966.126,00**			**Ya**	**Ya**			**0,00**	**Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan**
			Persentase perlindungan terhadap objek kawasan konservasi SDA (%)				***8,5***									
			Persentase peningkatan perlindungan terhadap ekosistem essensial di destinasi wisata (%)				***100***									
	3.28.2-11.3-28.0-0.02.04.1.02	Perlindungan Tumbuhan dan Satwa Liar yang Tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran (Appendix) CITES (Convension On International Trade In Endangered Species) untuk Kewenangan Daerah Provinsi						1.400.000.000,00			Tidak	Tidak			-	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
		Pengendalian dan Pengawasan Tumbuhan dan Satwa Liar yang tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran CITES						1.400.000.000,00							-	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode RPJMD	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2020	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RKPD TAHUN 2021	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2023		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2022	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Terlaksananya Pengendalian dan Pengawasan Tumbuhan dan Satwa Liar yang tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran CITES (Paket)				*1*		*(22 Kabupaten/Kota, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*1*		
	3.28.2-11.3-28.0-0.02.04.1.03	Pengelolaan Kawasan Bernilai Ekosistem Penting, Daerah Penyangga Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam						6.717.966.126,00			Tidak	Tidak				- Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
		Penguatan Kapasitas dan Pemberdayaan Masyarakat di Kawasan Bernilai Ekosistem Penting Kewenangan Daerah Provinsi						145.000.000,00								- Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
			Terlaksanya Penguatan Kapasitas dan Pemberdayaan Masyarakat di Kawasan Bernilai Ekosistem Penting Kewenangan Daerah Provinsi (Paket)				*1*		*(22 kabupaten/Kota, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*1*		
		Pengelolaan Daerah Penyangga di Kawasan Bernilai Ekosistem Penting Kewenangan Daerah Provinsi						6.572.966.126,00								- Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
			Terlaksananya Pengelolaan Daerah Penyangga di Kawasan Bernilai Ekosistem Penting Kewenangan Daerah Provinsi (Paket)				*1*		*(22 Kabupaten/Kota, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*1*		
3.	**3.28.2-11.3-28.0-0.02.05**	**PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN**						**3.431.871.240,00**			**Ya**	**Ya**			**0,00**	**Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan**
			Persentase pemenuhan SDM berkeahlian khusus (%)				***33,91***									
			Persentase luasan hutan yang dimanfaatkan untuk Perhutanan Sosial (%)				***11,25***									
	3.28.2-11.3-28.0-0.02.05.1.01	Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan						3.431.871.240,00			Tidak	Tidak				- Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
		Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan dan SDM Bidang Kehutanan						611.000.000,00								- Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
			Terlaksananya Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan dan SDM Bidang Kehutanan (Paket)				*1*		*(22 Kabupaten/Kota, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*1*		
		Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan						1.103.660.000,00								- Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
			Terlaksananya Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan (Paket)				*1*		*(22 Kabupaten/Kota, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*1*		
		Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial						1.717.211.240,00								- Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
			Terlaksananya Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial (Paket)				*1*		*(22 Kabupaten/kota, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*1*		
4.	**3.28.2-11.3-28.0-0.02.06**	**PROGRAM PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS)**						**783.000.000,00**			**Ya**	**Ya**			**0,00**	**Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan**
			Persentase meningkatnya kualitas DAS (%)				***0,30***									

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode RPJMD	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2020	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RKPD TAHUN 2021	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2023		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2022	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.28.2-11.3-28.0-0.02.06.1.01	Pelaksanaan Pengelolaan DAS Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan dalam Daerah Kab/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi						783.000.000,00			Tidak	Tidak			-	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
		Optimalisasi Fungsi dan Daya Dukung Wilayah DAS						783.000.000,00							-	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
			Terlaksananya Optimalisasi Fungsi dan Daya Dukung Wilayah DAS (Paket)				*1*		*(22 Kabupaten/Kota, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*1*		
	3.29	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL**						**18.781.181.970,00**							**0,00**	
1.	**3.29.3-29.0-0.0-0.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**						**14.023.635.273,00**			**Tidak**	**Tidak**			**0,00**	**Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral**
			Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran yang berkualitas (%)				***100***									
			Meningkatnya sarana dan prasarana (%)				***100***									
			Tercapainya penyusunan capaian kinerja ikhtisar realisasi kinerja dan keuangan (%)				***100***									
	3.29.3-29.0-0.0-0.01.01.1.01	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						122.176.820,00			Tidak	Tidak			-	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
			Terlaksananya Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (%)				*100*		*(Kota Kupang, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*100*		
		Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD						90.547.440,00							-	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
			Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD (Paket)				*1*		*(Kota Kupang, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*1*		
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD						31.629.380,00							-	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
			Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Paket)				*1*		*(Kota Kupang, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*1*		
	3.29.3-29.0-0.0-0.01.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						11.851.335.221,00			Tidak	Tidak			-	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
			Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah (%)				*100*		*(Kota Kupang, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*100*		
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						11.824.095.221,00							-	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
			Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN (Paket)				*1*		*(Kota Kupang, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*1*		
		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD						27.240.000,00							-	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
			Terlaksananya Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Paket)				*1*		*(Kota Kupang, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*1*		
			Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Paket)				*1*		*(Kota Kupang, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*1*		

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode RPJMD	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2020	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RKPD TAHUN 2021	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2023		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2022	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.29.3-29.0-0.0-0.01.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						115.154.674,00			Tidak	Tidak			-	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
			Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah (%)				*100*		*(Kota Kupang, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*100*		
		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi						115.154.674,00							-	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
			Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi (Paket)				*1*		*(Kota Kupang, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*1*		
	3.29.3-29.0-0.0-0.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						303.902.151,00			Tidak	Tidak			-	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
			Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah (%)				*100*		*(Kota Kupang, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*100*		
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor						11.862.041,00							-	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
			Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor (Paket)				*1*		*(Kota Kupang, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*1*		
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						32.087.150,00							-	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
			Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan (Paket)				*1*		*(Kota Kupang, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*1*		
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan						16.470.400,00							-	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
			Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan (Paket)				*1*		*(Kota Kupang, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*1*		
		Penyediaan Bahan/Material						109.305.560,00							-	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
			Tersedianya Bahan/Material (Paket)				*1*		*(Kota Kupang, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*1*		
		Fasilitasi Kunjungan Tamu						59.424.000,00							-	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
			Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu (Paket)				*1*		*(Kota Kupang, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*1*		
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						74.753.000,00							-	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
			Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Paket)				*1*		*(Kota Kupang, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*1*		
	3.29.3-29.0-0.0-0.01.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						40.162.000,00			Tidak	Tidak			-	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
			Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (%)				*100*		*(Kota Kupang, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*100*		
		Pengadaan Mebel						10.860.000,00							-	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
			Terlaksnanya Pengadaan Mebel (Paket)				*1*		*(Kota Kupang, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*1*		
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya						29.302.000,00							-	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
			Terlaksananya Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya (Paket)				*1*		*(Kota Kupang, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*1*		
	3.29.3-29.0-0.0-0.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						1.125.395.508,00			Tidak	Tidak			-	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode RPJMD	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2020	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RKPD TAHUN 2021	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2023		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2022	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%)				*100*		*(Kota Kupang, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*100*		
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat						20.479.800,00								- Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
			Tersedianya Jasa Surat Menyurat (Paket)				*1*		*(Kota Kupang, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*1*		
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						217.948.376,00								- Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
			Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik (Paket)				*1*		*(Kota Kupang, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*1*		
		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor						2.000.000,00								- Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
			Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor (Paket)				*1*		*(Kota Kupang, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*1*		
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						884.967.332,00								- Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
			Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor (Paket)				*1*		*(Kota Kupang, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*1*		
	3.29.3-29.0-0.0-0.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						465.508.899,00			Tidak	Tidak				- Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
			Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%)				*100*		*(Kota Kupang, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*100*		
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						51.700.000,00								- Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
			Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan (Paket)				*1*		*(Kota Kupang, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*1*		
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						63.624.900,00								- Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
			Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya (Paket)				*1*		*(Kota Kupang, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*1*		
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya						347.283.999,00								- Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
			Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya (Paket)				*1*		*(Kota Kupang, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*1*		
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						2.900.000,00								- Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
			Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya (Paket)				*1*		*(Kota Kupang, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*1*		
2.	**3.29.3-29.0-0.0-0.01.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN ASPEK KEGEOLOGIAN**						**1.558.112.370,00**			**Ya**	**Ya**			**0,00**	**Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral**
			Cakupan Pengelolaan Zona konservasi air tanah pada CAT setiap tahun (%)				***21,05***									

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode RPJMD	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2020	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RKPD TAHUN 2021	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2023		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2022	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Cakupan Pengelolaan Air Tanah setiap tahun (Tahun 2019 = 41 Rekomendasi Teknis, Tahun 2023 = 59 Rekomendasi Teknis)				***100***									
	3.29.3-29.0-0.0-0.01.02.1.01	Penetapan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi						1.428.286.370,00			Tidak	Tidak			-	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
			Terlaksananya Penetapan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi (%)				*100*		*(22 Kab/Kota, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*100*		
		Pengumpulan dan Pengolahan Data Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah						319.781.410,00							-	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
			Terlaksananya Pengumpulan dan Pengolahan Data Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah (Paket)				*1*		*(22 Kabupaten/Kota, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*1*		
		Penentuan dan Penetapan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah						898.778.000,00							-	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
			Terlaksananya Penentuan dan Penetapan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah (Paket)				*1*		*(22 Kabupaten/Kota, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*1*		
		Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah						209.726.960,00							-	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
			Terlaksananya Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah (Paket)				*1*		*(22 Kabupaten/Kota, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*1*		
	3.29.3-29.0-0.0-0.01.02.1.02	Penatausahaan Izin Pengeboran, Izin Penggalian, Izin Pemakaian, dan Izin Pengusahaan Air Tanah dalam Daerah Provinsi						129.826.000,00			Tidak	Tidak			-	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
			Terlaksananya Penatausahaan Izin Pengeboran, Izin Penggalian, Izin Pemakaian, dan Izin Pengusahaan Air Tanah dalam Daerah Provinsi (%)				*100*		*(22 Kab/Kota, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*100*		
		Penyusunan Rekomendasi Layanan Perizinan dan Informasi Izin Pengeboran, Izin Penggalian, Izin Pemakaian, dan Izin Pengusahaan Air Tanah						41.940.000,00							-	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
			Terlaksananya Penyusunan Rekomendasi Layanan Perizinan dan Informasi Izin Pengeboran, Izin Penggalian, Izin Pemakaian, dan Izin Pengusahaan Air Tanah (Paket)				*1*		*(22 Kabupaten/Kota, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*1*		
		Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Pengeboran, Penggalian, Pemakaian, dan Pengusahaan Air Tanah						87.886.000,00							-	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
			Terlaksananya Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Pengeboran, Penggalian, Pemakaian, dan Pengusahaan Air Tanah (Paket)				*1*		*(22 Kabupaten/Kota, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*1*		
3.	**3.29.3-29.0-0.0-0.01.03**	**PROGRAM PENGELOLAAN MINERAL DAN BATUBARA**						**515.498.590,00**			**Ya**	**Ya**			**0,00**	**Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral**

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode RPJMD	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2020	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RKPD TAHUN 2021	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2023		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2022	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Persentase Potensi sumber daya mineral yang terkelola (Tahun 2019 = 12 Jenis, Tahun 2023 = 6 Jenis)				***100***									
	3.29.3-29.0-0.0-0.01.03.1.01	Penetapan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil						146.032.850,00			Tidak	Tidak				- Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
			Terlaksananya Penetapan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil				*100*		*(22 Kab/Kota, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*100*		
		Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil						146.032.850,00								- Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
			Terlaksananya Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil				*1*		*(22 kabupaten/kota, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*1*		
	3.29.3-29.0-0.0-0.01.03.1.03	Penatausahaan Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam Rangka Penanaman Modal dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut Sampai Dengan						312.390.000,00		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Tidak	Tidak				- Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
			Terlaksananya Penatausahaan Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam Rangka Penanaman Modal dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil Laut				*100*		*(22 Kab/Kota, NUSA TENGGARA TIMUR)*	*Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum*				*100*		
		Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam Rangka Penanaman Modal dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut Sampai Dengan						312.390.000,00		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum						- Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
			Terlaksananya Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam Rangka Penanaman Modal dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil Laut				*1,00*		*(22 kab kota, NUSA TENGGARA TIMUR)*	*Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum*				*1*		
	3.29.3-29.0-0.0-0.01.03.1.07	Penetapan Harga Patokan Mineral Bukan Logam dan Batuan						57.075.740,00			Tidak	Tidak				- Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode RPJMD	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2020	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RKPD TAHUN 2021	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2023		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2022	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Terlaksananya Penetapan Harga Patokan Mineral Bukan Logam dan Batuan (%)				*100*		*(22 Kab/Kota, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*100*		
		Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Harga Patokan Mineral Bukan Logam dan Batuan						26.998.960,00							-	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
			terlaksananya Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Harga Patokan Mineral Bukan Logam dan Batuan (paket)				*1*		*(22 kab kota, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*1*		
		Penentuan dan Penetapan Harga Patokan Mineral Bukan Logam dan Batuan						30.076.780,00							-	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
			Terlaksananya Penentuan dan Penetapan Harga Patokan Mineral Bukan Logam dan Batuan (Paket)				*1*		*(22 Kabupaten/Kota, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*1*		
4.	**3.29.3-29.0-0.0-0.01.05**	**PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI TERBARUKAN**						**1.477.523.507,00**			**Ya**	**Ya**			**0,00**	**Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral**
			Cakupan Pemanfaatan Energi Listrik Berbasis EBT setiap tahun (Target Tahun 2018 = 8.76 kW, Target Tahun 2019= 11.25kW, Target Tahun 2020: 36,15 kW, Target Tahun 2023 = 103.32 kW)				***100***									
			Cakupan Pemanfaatan Energi Listrik Berbasis EBT pada Kawasan Pariwisata Estate (Target Tahun 2019= 5.625 kW, 2023 = 42.19 kW)				***100***									
	3.29.3-29.0-0.0-0.01.05.1.02	Penatausahaan Surat Keterangan Terdaftar Usaha Jasa Penunjang yang Kegiatan Usahanya dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi						44.855.960,00			Tidak	Tidak			-	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
			Terlaksananya Penatausahaan Surat Keterangan Terdaftar Usaha Jasa Penunjang yang Kegiatan Usahanya dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi (%)				*100*		*(22 Kab/Kota, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*100*		
		Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Surat Keterangan Terdaftar Usaha Jasa Penunjang yang Kegiatan Usahanya dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi						44.855.960,00							-	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
			Terlaksananya Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Surat Keterangan Terdaftar Usaha Jasa Penunjang yang Kegiatan Usahanya dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi (Paket)				*1*		*(22 Kabupaten/Kota, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*1*		
	3.29.3-29.0-0.0-0.01.05.1.04	Pelaksanaan Konservasi Energi di Wilayah Provinsi						1.432.667.547,00			Tidak	Tidak			-	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
			Terlaksananya Pelaksanaan Konservasi Energi di Wilayah Provinsi (%)				*100*		*(22 Kab/Kota, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*100*		
		Pengalokasian Anggaran untuk Program Konservasi Energi						1.157.775.187,00							-	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode RPJMD	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2020	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RKPD TAHUN 2021	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2023		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2022	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Terlaksananya Pengalokasian Anggaran untuk Program Konservasi Energi (Paket)				*1*		*(22 Kabupaten/Kota, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*1*		
		Pembinaan dan Pengawasan Konservasi Energi Kewenangan Provinsi						274.892.360,00							-	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
			Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Konservasi Energi Kewenangan Provinsi (Paket)				*1*		*(22 Kabupaten/Kota, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*1*		
5.	**3.29.3-29.0-0.0-0.01.06**	**PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN**						**1.206.412.230,00**			**Ya**	**Ya**			**0,00**	**Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral**
			Rasio elektrifikasi dari non EBT (bagi masyarakat tidak mampu, terpencil dan pedesaan) (%)				***59,58***									
			Rasio elektrifikasi dari non EBT di destinasi wisata (Target Tahun 2020:34%) (%)				***100***									
	3.29.3-29.0-0.0-0.01.06.1.06	Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu, Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan						1.206.412.230,00		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Tidak	Tidak			-	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
			Terlaksananya Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu, Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan (%)				*100*		*(22 Kab/Kota, NUSA TENGGARA TIMUR)*	*Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum*				*100*		
		Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Penerima Manfaat dari Kelompok Masyarakat Tidak Mampu						1.206.412.230,00		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum					-	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
			Terlaksananya Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Penerima Manfaat dari Kelompok Masyarakat Tidak Mampu (Paket)				*1*		*(22 kabupaten/Kota, NUSA TENGGARA TIMUR)*	*Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum*				*1*		
		Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan						-							-	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
			Terlaksananya Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan (Paket)				*1*		*(22 Kabupaten/kota, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*1*		
		Pengendalian dan Pengawasan Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan						-							-	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
			Terlaksananya Pengendalian dan Pengawasan Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan (Paket)				*1*		*(22 Kabupaten/Kota, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*1*		
	3.30	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN**						**7.089.154.440,00**							**0,00**	
1.	**3.30.3-31.3-30.0-0.02.02**	**PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN**						**347.235.600,00**			**Ya**	**Ya**			**0,00**	**Dinas Perindustrian dan Perdagangan**

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode RPJMD	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2020	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RKPD TAHUN 2021	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2023		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2022	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Cakupan Penerapan Sistem Perijinan Usaha dan Investasi berbasis Online *(%)*				***75***									
	3.30.3-31.3-30.0-0.02.02.1.03	Pengendalian Usaha Perdagangan Bahan Berbahaya Pengecer Terdaftar						171.587.200,00			Tidak	Tidak			-	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
			Terlaksananya Pengendalian Usaha Perdagangan Bahan Berbahaya Pengecer Terdaftar (%)				*100*		*(22 kab/kota, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*100*		
		Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya						171.587.200,00							-	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
			terlaksananya Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya (paket)				*1*		*(kota kupang, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*1*		
	3.30.3-31.3-30.0-0.02.02.1.04	Penerbitan Surat Keterangan Asal (SKA) Bagi Daerah Provinsi yang Telah Ditetapkan Sebagai Instansi Penerbit SKA dan Angka Pengenal Importir (API)						175.648.400,00			Tidak	Tidak			-	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
			Terlaksananya Penerbitan Surat Keterangan Asal (SKA) Bagi Daerah Provinsi yang Telah Ditetapkan Sebagai Instansi Penerbit SKA dan Angka Pengenal Importir (API) (%)				*100*		*(22 kab/kota, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*100*		
		Koordinasi dan Sinkronisasi Layanan Penerbitan SKA						170.419.400,00							-	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
			terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Layanan Penerbitan SKA (paket)				*1*		*(kota kupang, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*1*		
		Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Penerbitan API melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik						5.229.000,00							-	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
			terlaksananya Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Penerbitan API melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik (paket)				*1*		*(kota kupang, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*1*		
2.	**3.30.3-31.3-30.0-0.02.03**	**PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN**						**100.000.000,00**			**Ya**	**Ya**			**0,00**	**Dinas Perindustrian dan Perdagangan**
			Persentase Peningkatan Cakupan distribusi barang di dalam wilayah NTT *(%)*				***50***									
	3.30.3-31.3-30.0-0.02.03.1.01	Pembangunan dan Pengelolaan Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi serta Pasar Lelang Komoditas						100.000.000,00			Tidak	Tidak			-	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
			Terlaksananya Pembangunan dan Pengelolaan Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi serta Pasar Lelang Komoditas (%)				*100*		*(22 kab/kota, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*100*		
		Penyediaan Sarana dan Prasarana Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi						100.000.000,00							-	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
			terlaksananya Penyediaan Sarana dan Prasarana Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi (paket)				*1*		*(kota kupang, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*1*		
3.	**3.30.3-31.3-30.0-0.02.04**	**PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING**						**1.426.219.400,00**			**Ya**	**Ya**			**0,00**	**Dinas Perindustrian dan Perdagangan**

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode RPJMD	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2020	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RKPD TAHUN 2021	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2023		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2022	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Persentase Kenaikan Harga setiap tahun (%)				***10***									
	3.30.3-31.3-30.0-0.02.04.1.01	Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Provinsi						900.254.620,00		DANA UMUM	Tidak	Tidak				- Dinas Perindustrian dan Perdagangan
			Terlaksananya Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Provinsi (%)				*100*		*(22 kab/kota, NUSA TENGGARA TIMUR)*	*DANA UMUM*				*100*		
		Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok di Tingkat Distributor dan Sub Distributor						900.254.620,00		DANA UMUM						- Dinas Perindustrian dan Perdagangan
			terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok di Tingkat Distributor dan Sub Distributor (paket)				*1*		*(kota kupang, NUSA TENGGARA TIMUR)*	*DANA UMUM*				*1*		
	3.30.3-31.3-30.0-0.02.04.1.02	Pengendalian Harga, informasi Ketersediaan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan						352.417.780,00			Tidak	Tidak				- Dinas Perindustrian dan Perdagangan
			Terlaksananya Pengendalian Harga, Informasi Ketersediaan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan (%)				*100*		*(22 kab/kota, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*100*		
		Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota						170.291.620,00								- Dinas Perindustrian dan Perdagangan
			terlaksananya Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota (paket)				*1*		*(kota kupang, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*1*		
		Operasi Pasar dalam Rangka Stabilisasi Harga Pangan Pokok yang Dampaknya Beberapa Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi						182.126.160,00								- Dinas Perindustrian dan Perdagangan
			terlaksananya Operasi Pasar dalam Rangka Stabilisasi Harga Pangan Pokok yang Dampaknya Beberapa Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi (paket)				*1*		*(kota kupang, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*1*		
	3.30.3-31.3-30.0-0.02.04.1.03	Pengawasan Pupuk dan Pestisida Tingkat Daerah Provinsi dalam Melakukan Pelaksanaan Pengadaan, Penyaluran dan Penggunaan Pupuk Bersubsidi di Wilayah Kerjanya						173.547.000,00			Tidak	Tidak				- Dinas Perindustrian dan Perdagangan
			Terlaksananya Pengawasan Pupuk dan Pestisida Tingkat Daerah Provinsi dalam Melakukan Pelaksanaan Pengadaan, Penyaluran dan Penggunaan Pupuk Bersubsidi di Wilayah Kerjanya (%)				*100*		*(22 kab/kota, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*100*		
		Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk Bersubsidi						173.547.000,00								- Dinas Perindustrian dan Perdagangan

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode RPJMD	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2020	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RKPD TAHUN 2021	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2023		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2022	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			terlaksananya Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk Bersubsidi (paket)				*1*		*(kota kupang, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*1*		
4.	**3.30.3-31.3-30.0-0.02.05**	**PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR**						**1.588.381.000,00**			**Ya**	**Ya**			**0,00**	**Dinas Perindustrian dan Perdagangan**
			Persentase Peningkatan Jumlah Komoditas Ekspor (%)				***28,57***									
	3.30.3-31.3-30.0-0.02.05.1.01	Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang Bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada 1 (satu) daerah kabupaten/kota						1.568.381.000,00		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum, DANA UMUM	Tidak	Tidak			-	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
			Terlaksananya Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang Bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada 1 (satu) daerah kabupaten/kota (%)				*100*		*(22 kab/kota, NUSA TENGGARA TIMUR)*	*Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum, DANA UMUM*				*100*		
		Pameran Dagang Internasional/Nasional						527.169.000,00		DANA UMUM					-	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
			terlaksananya Pameran Dagang Internasional/Nasional (paket)				*1*		*(kota kupang, NUSA TENGGARA TIMUR)*	*DANA UMUM*				*1*		
		Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan						225.385.000,00		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum					-	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
			Terlaksananya Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan (pelaku usaha)				*20*		*(NUSA TENGGARA TIMUR)*	*Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum*				*0*		
		Peningkatan Citra Produk Ekspor						85.827.000,00							-	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
			terlaksananya Peningkatan Citra Produk Ekspor (paket)				*1*		*(kota kupang, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*1*		
		Pembinaan Pelaku Usaha Ekspor						750.000.000,00		DANA UMUM					-	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
			terlaksananya Pembinaan Pelaku Usaha Ekspor (paket)				*1*		*(kota kupang, NUSA TENGGARA TIMUR)*	*DANA UMUM*				*1*		
5.	**3.30.3-31.3-30.0-0.02.06**	**PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN**						**2.868.834.360,00**			**Ya**	**Ya**			**0,00**	**Dinas Perindustrian dan Perdagangan**
			Persentase Penurunan Pengaduan Konsumen yang menggunakan barang tidak sesuai standar (%)				***55,7***			***DANA UMUM***						
			Persentase pelaku usaha yang melakukan pengujian dan sertifikasi mutu produk (Target 2023= 34 PelakuUsaha (%)				***44,12***			***DANA UMUM***						
	3.30.3-31.3-30.0-0.02.06.1.01	Pelaksanaan Perlindungan Konsumen di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota						608.383.800,00			Tidak	Tidak			-	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
			Terlaksananya Pelaksanaan Perlindungan Konsumen di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota (%)				*100*		*(22 kab/kota, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*100*		
		Pemberdayaan Konsumen dan Kelembagaan Perlindungan Konsumen						152.569.000,00							-	Dinas Perindustrian dan Perdagangan

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode RPJMD	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2020	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RKPD TAHUN 2021	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2023		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2022	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			terlaksananya Pemberdayaan Konsumen dan Kelembagaan Perlindungan Konsumen (paket)				*1*		*(kota kupang, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*1*		
		Peningkatan Hubungan Kerja dengan Lembaga Perlindungan Konsumen						305.839.800,00								- Dinas Perindustrian dan Perdagangan
			terlaksananya Peningkatan Hubungan Kerja dengan Lembaga Perlindungan Konsumen (paket)				*1*		*(kota kupang, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*1*		
		Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan dan Penyelesaian Sengketa Konsumen						149.975.000,00								- Dinas Perindustrian dan Perdagangan
			terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan dan Penyelesaian Sengketa Konsumen (paket)				*1*		*(kota kupang, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*1*		
	3.30.3-31.3-30.0-0.02.06.1.02	Pelaksanaan Pengujian dan Sertifikasi Mutu Produk di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota						1.400.559.860,00			Tidak	Tidak				- Dinas Perindustrian dan Perdagangan
			Terlaksananya Pelaksanaan Pengujian dan Sertifikasi Mutu Produk di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota (%)				*100*		*(22 kab/kota, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*100*		
		Pengembangan Layanan Pengujian						733.943.860,00								- Dinas Perindustrian dan Perdagangan
			terlaksananya Pengembangan Layanan Pengujian (paket)				*1*		*(kota kupang, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*1*		
		Pengembangan Layanan Kalibrasi						666.616.000,00								- Dinas Perindustrian dan Perdagangan
			terlaksananya Pengembangan Layanan Kalibrasi (paket)				*1*		*(kota kupang, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*1*		
	3.30.3-31.3-30.0-0.02.06.1.03	Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota						859.890.700,00			Tidak	Tidak				- Dinas Perindustrian dan Perdagangan
			Terlaksananya Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota (%)				*100*		*(22 kab/kota, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*100*		
		Peningkatan Kapasitas dan Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa Sesuai Parameter Ketentuan Perlindungan Konsumen						491.000.000,00								- Dinas Perindustrian dan Perdagangan
			terlaksananya Peningkatan Kapasitas dan Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa Sesuai Parameter Ketentuan Perlindungan Konsumen (paket)				*1*		*(kota kupang, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*1*		
		Fasilitasi Penanganan Terhadap Pelanggaran Atas Ketentuan Perlindungan Konsumen						368.890.700,00								- Dinas Perindustrian dan Perdagangan
			terlaksananya Fasilitasi Penanganan Terhadap Pelanggaran Atas Ketentuan Perlindungan Konsumen (paket)				*1*		*(kota kupang, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*1*		
6.	**3.30.3-31.3-30.0-0.02.07**	**PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI**						**758.484.080,00**			**Ya**	**Ya**			**0,00**	**Dinas Perindustrian dan Perdagangan**
			Persentase Peningkatan Transaksi Produk Lokal di dalam wilayah NTT (%)				***70***									

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode RPJMD	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2020	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RKPD TAHUN 2021	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2023		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2022	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Persentase Peningkatan Transaksi Produk Lokal di Kawasan Pariwisata Estate (%)				***70***									
	3.30.3-31.3-30.0-0.02.07.1.01	Pelaksanaan Promosi Produk Dalam Negeri						136.033.000,00			Tidak	Tidak			-	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
			Terlaksananya Pelaksanaan Promosi Produk Dalam Negeri (%)				*100*		*(22 kab/kota, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*100*		
		Fasilitasi Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Provinsi						136.033.000,00							-	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
			terlaksananya Fasilitasi Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Provinsi (paket)				*1*		*(kota kupang, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*1*		
	3.30.3-31.3-30.0-0.02.07.1.02	Pelaksanaan Pemasaran Penggunaan Produk Dalam Negeri						323.537.720,00			Tidak	Tidak			-	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
			Terlaksananya Pelaksanaan Pemasaran Penggunaan Produk Dalam Negeri (%)				*100*		*(22 kab/kota, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*100*		
		Fasilitasi Pemasaran Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Provinsi						323.537.720,00							-	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
			terlaksananya Fasilitasi Pemasaran Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Provinsi (paket)				*1*		*(kota kupang, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*1*		
	3.30.3-31.3-30.0-0.02.07.1.03	Pelaksanaan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri						298.913.360,00			Tidak	Tidak			-	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
			Terlaksananya Pelaksanaan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (%)				*100*		*(22 kab/kota, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*100*		
		Sosialisasi Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri						298.913.360,00							-	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
			terlaksananya Sosialisasi Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (paket)				*1*		*(kota kupang, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*1*		
	3.31	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN**						**24.430.455.471,00**							**0,00**	
1.	**3.31.3-31.3-30.0-0.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**						**13.814.270.631,00**			**Tidak**	**Tidak**			**0,00**	**Dinas Perindustrian dan Perdagangan**
			Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran yang berkualitas (%)				***100***									
	3.31.3-31.3-30.0-0.02.01.1.01	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						562.571.900,00		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Tidak	Tidak			-	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						311.910.360,00							-	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
			terlaksananya Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (paket)				*1*		*(kota kupang, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*1*		
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD						15.199.540,00							-	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
			terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (paket)				*1*		*(kota kupang, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*1*		

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode RPJMD	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2020	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RKPD TAHUN 2021	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2023		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2022	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD						15.236.850,00							-	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
			terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (paket)				*1*		*(kota kupang, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*1*		
		Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD						14.493.900,00							-	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
			terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD (paket)				*1*		*(kota kupang, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*1*		
		Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD						14.493.900,00							-	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
			terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD (paket)				*1*		*(kpta kupang, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*1*		
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD						20.123.930,00		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum					-	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
			Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (laporan)				*3*		*(KOTA KUPANG)*	*Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum*				*0*		
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						171.113.420,00							-	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
			terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (paket)				*1*		*(kota kupang, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*1*		
	3.31.3-31.3-30.0-0.02.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						9.810.925.905,00			Tidak	Tidak			-	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						9.767.970.385,00							-	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
			terlaksananya Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN (paket)				*1*		*(kota kupang, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*1*		
		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD						20.665.000,00							-	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
			terlaksananya Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (paket)				*1*		*(kota kupang, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*1*		
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD						7.031.280,00							-	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
			terlaksanaya Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (paket)				*1*		*(kota kupang, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*1*		
		Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan						7.874.480,00							-	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
			terlaaksananya Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan (paket)				*1*		*(kota kupang, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*1*		
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD						7.364.760,00							-	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
			terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (paket)				*1*		*(kota kupang, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*1*		
	3.31.3-31.3-30.0-0.02.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						307.843.970,00		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Tidak	Tidak			-	Dinas Perindustrian dan Perdagangan

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode RPJMD	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2020	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RKPD TAHUN 2021	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2023		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2022	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian						1.312.120,00							-	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
			terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (paket)				*1*		*(kota kupang, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*1*		
		Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai						324.750,00		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum					-	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
			Terlaksananya Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai (laporan)				*1*		*(Kota Kupang, KOTA KUPANG)*	*Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum*				*0*		
		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi						306.207.100,00							-	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
			terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi (paket)				*1*		*(kota kupang, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*1*		
	3.31.3-31.3-30.0-0.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						432.781.172,00			Tidak	Tidak			-	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor						17.734.000,00							-	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
			terlaksananya Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor (paket)				*1*		*(kota kupang, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*1*		
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						37.106.240,00							-	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
			terlaksananya Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan (paket)				*1*		*(kota kupang, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*1*		
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan						10.262.400,00							-	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
			terlaksananya Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan (paket)				*1*		*(kota kupang, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*1*		
		Penyediaan Bahan/Material						119.879.532,00							-	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
			terlaksananya Penyediaan Bahan/Material (paket)				*1*		*(kota kupang, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*1*		
		Fasilitasi Kunjungan Tamu						29.650.000,00							-	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
			terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu (paket)				*1*		*(kota kupang, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*1*		
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						218.149.000,00							-	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
			terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (paket)				*1*		*(kota kupang, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*1*		
	3.31.3-31.3-30.0-0.02.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						248.542.320,00			Tidak	Tidak			-	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
		Pengadaan Mebel						95.690.000,00							-	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
			terlaksananya Pengadaan Mebel (paket)				*1*		*(kota kupang, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*1*		
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya						124.833.600,00							-	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
			terlaksnanya Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya (paket)				*1*		*(kota kupang, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*1*		

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode RPJMD	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2020	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RKPD TAHUN 2021	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2023		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2022	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		Pengadaan Aset Tetap Lainnya						28.018.720,00							-	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
			terlaksananya Pengadaan Aset Tetap Lainnya (paket)				*1*		*(kota kupang, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*1*		
	3.31.3-31.3-30.0-0.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						2.190.660.524,00			Tidak	Tidak			-	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat						13.398.980,00							-	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
			terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat (paket)				*1*		*(kota kupang, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*1*		
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						180.260.544,00							-	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
			terlaksananya Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik (paket)				*1*		*(kota kupang, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*1*		
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						1.997.001.000,00							-	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
			terlaksananya Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (paket)				*1*		*(kota kupang, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*1*		
	3.31.3-31.3-30.0-0.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						260.944.840,00			Tidak	Tidak			-	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						91.364.750,00							-	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
			terlaksnanya Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan (paket)				*1*		*(kota kupang, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*1*		
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						63.960.000,00							-	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
			terlaksananya Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan (paket)				*1*		*(kota kupang, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*1*		
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						16.500.000,00							-	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
			terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya (paket)				*1*		*(kota kupang, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*1*		
		Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya						35.195.400,00							-	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
			terlaksananya Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya (paket)				*1*		*(kota kupang, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*1*		
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya						53.924.690,00							-	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
			terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya (paket)				*1*		*(kota kupang, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*1*		
2.	**3.31.3-31.3-30.0-0.02.02**	**PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI**						**9.716.937.420,00**			**Ya**	**Ya**			**0,00**	**Dinas Perindustrian dan Perdagangan**

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode RPJMD	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2020	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RKPD TAHUN 2021	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2023		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2022	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Pertumbuhan industri pengolahan dengan memanfaatkan teknologi industri (%)				***2,24***									
	3.31.3-31.3-30.0-0.02.02.1.01	Penyusunan dan Evaluasi Rencana pembangunan Industri Provinsi						9.716.937.420,00		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Tidak	Tidak			-	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
			Terlaksananya Penyusunan dan Evaluasi Rencana pembangunan Industri Provinsi (%)				*100*		*(22 kab/kota, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*100*		
		Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri						480.968.800,00							-	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
			terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri (paket)				*1*		*(kota kupang, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*1*		
		Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri						5.813.008.400,00							-	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
			terKoordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri (paket)				*1*		*(kota kupang, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*1*		
		Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri						3.422.960.220,00		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum					-	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
			Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri (Paket)				*1,00*		*(NUSA TENGGARA TIMUR)*	*Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum*				*0,00*		
3.	**3.31.3-31.3-30.0-0.02.03**	**PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI**						**429.668.060,00**			**Ya**	**Ya**			**0,00**	**Dinas Perindustrian dan Perdagangan**
			Persentase Penurunan Pelanggaran Ijin Usaha Industri (%)				***70***			***Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum***						
	3.31.3-31.3-30.0-0.02.03.1.01	Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Provinsi						429.668.060,00			Tidak	Tidak			-	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
			Terlaksananya Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Provinsi				*100*		*(22 kab/kota, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*100*		
		Fasilitasi Pemenuhan Komitmen perolehan IUI, IPUI, IUKI, dan IPKI Kewenangan Provinsi dalam Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang Terintegrasi dengan Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara						177.369.640,00							-	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
			terlaksananya Fasilitasi Pemenuhan Komitmen perolehan IUI, IPUI, IUKI, dan IPKI Kewenangan Provinsi dalam Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang Terintegrasi dengan Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik				*1*		*(kota kupang, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*1*		

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode RPJMD	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2020	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RKPD TAHUN 2021	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2023		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2022	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri dalam Lingkup IUI, IPUI, IUKI, dan IPKI Kewenangan Provinsi						252.298.420,00							-	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
			terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri dalam Lingkup IUI, IPUI, IUKI, dan IPKI Kewenangan Provinsi (paket)				*1*		*(kota kupang, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*1*		
4.	**3.31.3-31.3-30.0-0.02.04**	**PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL**						**469.579.360,00**			**Ya**	**Ya**			**0,00**	**Dinas Perindustrian dan Perdagangan**
			Kesesuaian data informasi industri provinsi dalam mendukung SIINas (%)				***11,42***									
	3.31.3-31.3-30.0-0.02.04.1.01	Penyediaan Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Provinsi berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS)						469.579.360,00			Tidak	Tidak			-	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
			Terlaksananya Penyediaan Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Provinsi berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS) (%)				*100*		*(22 kab/kota, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*100*		
		Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Provinsi melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)						290.257.160,00							-	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
			terlaksananya Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Provinsi melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) (paket)				*1*		*(kota kupang, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*1*		
		Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Provinsi dalam Penyampaian Data ke SIINas						179.322.200,00							-	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
			terlaksananya Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Provinsi dalam Penyampaian Data ke SIINas (paket)				*1*		*(kota kupang, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*1*		
	3.32	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI**						**4.026.000.000,00**							**0,00**	
1.	**3.32.2-17.3-32.2-7.16.02**	**PROGRAM PERENCANAAN KAWASAN TRANSMIGRASI**						**870.000.000,00**			**Ya**	**Ya**			**0,00**	**Dinas Koperasi,Tenaga kerja dan Transmigrasi**
			i 3 32 02 Program Perencanaan Kawasan Transmigrasi Persentase Kawasan dan Lokasi Transmigrasi yang difasilitasi pencadangannya				***100***									
	3.32.2-17.3-32.2-7.16.02.1.01	Pencadangan Tanah untuk Kawasan Transmigrasi						870.000.000,00		DANA UMUM	Tidak	Tidak			-	Dinas Koperasi,Tenaga kerja dan Transmigrasi

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode RPJMD	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2020	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RKPD TAHUN 2021	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2023		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2022	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		Identifikasi Potensi Kawasan Transmigrasi						100.000.000,00							-	Dinas Koperasi,Tenaga kerja dan Transmigrasi
			Terlaksananya Identifikasi Potensi Kawasan Transmigrasi (Paket)				*1*		*(22 Kabupaten/Kota, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*1*		
		Advokasi dan Musyawarah Penetapan Kawasan						70.000.000,00							-	Dinas Koperasi,Tenaga kerja dan Transmigrasi
			Terlaksananya Advokasi dan Musyawarah Penetapan Kawasan (Paket)				*1*		*(22 Kabupaten/Kota, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*1*		
		Penyediaan Tanah untuk Pembangunan Kawasan Transmigrasi						275.000.000,00		DANA UMUM					-	Dinas Koperasi,Tenaga kerja dan Transmigrasi
			Tersedianya Tanah untuk Pembangunan Kawasan Transmigrasi (Paket)				*1*		*(22 Kabupaten/Kota, NUSA TENGGARA TIMUR)*	*DANA UMUM*				*1*		
		Penatausahaan Pencadangan Tanah untuk Kawasan Transmigrasi						425.000.000,00		DANA UMUM					-	Dinas Koperasi,Tenaga kerja dan Transmigrasi
			Terlaksananya Penatausahaan Pencadangan Tanah untuk Kawasan Transmigrasi (Paket)				*1*		*(22 Kabupaten/Kota, NUSA TENGGARA TIMUR)*	*DANA UMUM*				*1*		
2.	**3.32.2-17.3-32.2-7.16.03**	**PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI**						**776.000.000,00**			**Ya**	**Ya**			**0,00**	**Dinas Koperasi,Tenaga kerja dan**
			Persentase Lokasi Transmigrasi yang difasilitasi pembangunan dan penempatannya (%)				***100***			***DANA UMUM***						
	3.32.2-17.3-32.2-7.16.03.1.01	Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi						776.000.000,00		DANA UMUM	Tidak	Tidak			-	Dinas Koperasi,Tenaga kerja dan Transmigrasi
		Pelaksanaan Penataan Penduduk Setempat Sekitar Lokasi Kawasan Transmigrasi						256.000.000,00		DANA UMUM					-	Dinas Koperasi,Tenaga kerja dan Transmigrasi
			Terlaksananya Pelaksanaan Penataan Penduduk Setempat Sekitar Lokasi Kawasan Transmigrasi (Paket)				*1*		*(22 Kabupaten/Kota, NUSA TENGGARA TIMUR)*	*DANA UMUM*				*1*		
		Pemindahan dan Penempatan Transmigran yang Berasal dari Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam Provinsi						250.000.000,00		DANA UMUM					-	Dinas Koperasi,Tenaga kerja dan Transmigrasi
			Terlaksananya Pemindahan dan Penempatan Transmigran yang Berasal dari Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam Provinsi (Paket)				*1*		*(22 Kabupaten/Kota, NUSA TENGGARA TIMUR)*	*DANA UMUM*				*1*		
		Pelatihan Transmigrasi						270.000.000,00		DANA UMUM					-	Dinas Koperasi,Tenaga kerja dan Transmigrasi
			Terlaksananya Pelatihan Transmigrasi (Paket)				*1*		*(22 Kabupaten/Kota, NUSA TENGGARA TIMUR)*	*DANA UMUM*				*1*		

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode RPJMD	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2020	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RKPD TAHUN 2021	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2023		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2022	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
3.	**3.32.2-17.3-32.2-7.16.04**	**PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI**						**2.380.000.000,00**			**Ya**	**Ya**			**0,00**	**Dinas Koperasi,Tenaga kerja dan**
			ersentase Unit Permukiman Transmigrasi yang difasilitasi pembinaannya				***100***			***DANA UMUM***						
	3.32.2-17.3-32.2-7.16.04.1.01	Pengembangan Satuan Permukiman pada Tahap Pemantapan						2.380.000.000,00		DANA UMUM	Tidak	Tidak			-	Dinas Koperasi,Tenaga kerja dan Transmigrasi
		Penguatan SDM dalam rangka Pemantapan Satuan Pemukiman						580.000.000,00		DANA UMUM					-	Dinas Koperasi,Tenaga kerja dan Transmigrasi
			Terlaksananya Penguatan SDM dalam rangka Pemantapan Satuan Pemukiman (Paket)				*1*		*(22 Kabupaten/Kota, NUSA TENGGARA TIMUR)*	*DANA UMUM*				*1*		
		Penguatan Infrastruktur Sosial, Ekonomi dan Kelembagaan dalam rangka Pemantapan Satuan Pemukiman						1.800.000.000,00		DANA UMUM					-	Dinas Koperasi,Tenaga kerja dan Transmigrasi
			Terlaksananya Penguatan Infrastruktur Sosial, Ekonomi dan Kelembagaan dalam rangka Pemantapan Satuan Pemukiman (Paket)				*1*		*(22 Kabupaten/Kota, NUSA TENGGARA TIMUR)*	*DANA UMUM*				*1*		
	4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**						**455.992.939.473,00**							**0,00**	
	4.01	**SEKRETARIAT DAERAH**						**167.413.262.122,00**							**0,00**	
1.	**4.01.4-1.0-0.0-0.01.01.01**	**PROGRAM ADMINISTRASI UMUM**						**137.527.349.341,00**			**Ya**	**Ya**			**0,00**	**Biro Umum**
			Cakupan pelayanan administrasi pimpinan (%)				***100***			***DANA UMUM***						
			Cakupan Pemenuhan Pelayanan Keprotokolan (%)				***100***			***DANA UMUM***						
			Cakupan Pemenuhan Layanan Administrasi Perencanaan, Pelaporan, Kepegawaian dan Tata Usaha (%)				***100***			***DANA UMUM***						
	4.01.4-1.0-0.0-0.01.01.01.1.01	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						127.389.400,00		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Tidak	Tidak			-	Biro Umum
			Terlaksananya Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (%)				*100*		*(22 Kab/Kota, NUSA TENGGARA TIMUR)*	*Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum*				*100*		
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD						48.716.200,00							-	Biro Umum
			terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (paket)				*1*		*(22kab/kota, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*1*		
		Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD						48.716.200,00							-	Biro Umum
			terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD (paket)				*1*		*(22kab/kota, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*1*		

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode RPJMD	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2020	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RKPD TAHUN 2021	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2023		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2022	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD						29.957.000,00		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum					-	Biro Umum
			Tersedianya Laporan-laporan Capaian Kinerja dan Realisasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)				*8,00*		*(Kota Kupang, NUSA TENGGARA TIMUR)*	*Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum*				*8*		
	4.01.4-1.0-0.0-0.01.01.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						47.768.297.000,00		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Tidak	Tidak			-	Biro Umum
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						47.768.297.000,00		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum					-	Biro Umum
			Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN (Tahun)				*1,00*		*(Kota Kupang, NUSA TENGGARA TIMUR)*	*Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum*				*1*		
	4.01.4-1.0-0.0-0.01.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						18.563.672.195,00		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Tidak	Tidak			-	Biro Umum
			Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah (%)				*100*		*(22 Kab./Kota, NUSA TENGGARA TIMUR)*	*Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum*				*100*		
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor						1.013.384.750,00		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum					-	Biro Umum
			Tersedianya Tenaga Ahli dan Alat serta Bahan Penerangan Listrik pada Kantor Gubernur dan Rumah Jabatan (%)				*100,00*		*(Kota Kupang, NUSA TENGGARA TIMUR)*	*Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum*				*100*		
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						742.666.000,00		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum					-	Biro Umum
			Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan, Bahan Dokumentasi dan Publikasi Pelaksanaan Acara (%)				*100,00*		*(Kota Kupang, NUSA TENGGARA TIMUR)*	*Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum*				*100*		
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan						149.963.600,00		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum					-	Biro Umum
			Tersedianya Koran dan Majalah Pada Ruang Pimpinan dan Biro Umum (%)				*100,00*		*(Kota Kupang, NUSA TENGGARA TIMUR)*	*Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum*				*100*		
		Penyediaan Bahan/Material						732.144.845,00		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum					-	Biro Umum
			Tersedianya Alat Tulis Kantor dalam rangka mendukung kelancaran pengadministrasian dan pelaporan (%)				*100,00*		*(Kota Kupang, NUSA TENGGARA TIMUR)*	*Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum*				*100*		
		Fasilitasi Kunjungan Tamu						5.121.528.900,00		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum					-	Biro Umum
			Terlaksananya Fasilitasi Transportasi Akomodasi dan Makan Minum Kegiatan (%)				*100,00*		*(Kota Kupang, NUSA TENGGARA TIMUR)*	*Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum*				*100*		
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						10.803.984.100,00							-	Biro Umum
			terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (paket)				*1*		*(22kab/kota, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*1*		
	4.01.4-1.0-0.0-0.01.01.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						1.938.108.794,00			Tidak	Tidak			-	Biro Umum

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode RPJMD	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2020	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RKPD TAHUN 2021	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2023		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2022	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (%)				*100*		*(22 Kab./Kota, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*100*		
		Pengadaan Mebel						483.675.470,00							-	Biro Umum
			terlaksananya Pengadaan Mebel (paket)				*1*		*(22kab/kota, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*1*		
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya						600.533.324,00							-	Biro Umum
			terlaksananya Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya (paket)				*1*		*(22kab/kota, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*1*		
		Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						853.900.000,00							-	Biro Umum
			terlaksananya Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya (paket)				*1*		*(22kab/kota, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*1*		
	4.01.4-1.0-0.0-0.01.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						27.612.552.592,00			Tidak	Tidak			-	Biro Umum
			Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%)				*100*		*(22 Kab./Kota, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*100*		
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat						999.924.000,00							-	Biro Umum
			terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat (paket)				*1*							*0*		
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						4.104.432.672,00							-	Biro Umum
			terlaksananya Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik (paket)				*1*		*(22kab/kota, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*1*		
		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor						2.378.936.000,00							-	Biro Umum
			terlaksananya Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor (paket)				*1*		*(22kab/kota, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*1*		
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						20.129.259.920,00							-	Biro Umum
			terlaksananya Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (paket)				*1*		*(22kab/kota, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*1*		
	4.01.4-1.0-0.0-0.01.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						22.931.833.200,00		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Tidak	Tidak			-	Biro Umum
			Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%)				*100*		*(22 Kab./Kota, NUSA TENGGARA TIMUR)*	*Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum*				*100*		
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						207.600.000,00		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum					-	Biro Umum
			Tersedianya Bahan Bakar Minyak Kendaraan Dinas Jabatan dan Terbayarnya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Dinas Jabatan (%)				*100,00*		*(Kota Kupang, NUSA TENGGARA TIMUR)*	*Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum*				*100*		
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						1.913.300.000,00		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum					-	Biro Umum

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode RPJMD	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2020	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RKPD TAHUN 2021	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2023		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2022	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Tersedianya Bahan Bakar Minyak Kendaraan Dinas Operasional dan Terbayarnya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Dinas Operasional (%)				*100,00*		*(Kota Kupang, NUSA TENGGARA TIMUR)*	*Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum*				*100*		
		Pemeliharaan Mebel						330.000.000,00		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum					-	Biro Umum
			Tersedianya Bahan dan Kebutuhan Mebeleur Kantor (%)				*100,00*		*(Kota Kupang, NUSA TENGGARA TIMUR)*	*Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum*				*100*		
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						730.480.000,00							-	Biro Umum
			terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya (paket)				*1*		*(22kab/kota, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*1*		
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						19.750.453.200,00							-	Biro Umum
			terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya (paket)				*1*		*(22kab/kota, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*1*		
	4.01.4-1.0-0.0-0.01.01.01.1.11	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah						3.339.297.000,00		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Tidak	Tidak			-	Biro Umum
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah						2.693.797.000,00		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum					-	Biro Umum
			Terbayarnya Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (%)				*100,00*		*(Kota Kupang, NUSA TENGGARA TIMUR)*	*Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum*				*100*		
		Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah						475.000.000,00		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum					-	Biro Umum
			Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (%)				*100,00*		*(Kota Kupang, NUSA TENGGARA TIMUR)*	*Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum*				*100*		
		Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah						170.500.000,00		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum					-	Biro Umum
			Terfasilitasinya Pemeriksaan Kesehatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (%)				*100,00*		*(Kota Kupang, NUSA TENGGARA TIMUR)*	*Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum*				*100*		
	4.01.4-1.0-0.0-0.01.01.01.1.12	Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah						7.448.486.160,00			Tidak	Tidak			-	Biro Umum
			Terlaksananya Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah (%)				*100*		*(22 Kab./Kota, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*100*		
		Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah						2.356.282.000,00							-	Biro Umum
			terlaksananya Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah (paket)				*1*		*(22kab/kota, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*1*		
		Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah						1.482.378.960,00							-	Biro Umum
			terlaksananya Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah (paket)				*1*		*(22kab/kota, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*1*		
		Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah						3.609.825.200,00							-	Biro Umum

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode RPJMD	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2020	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RKPD TAHUN 2021	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2023		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2022	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			terlaksananya Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah (paket)				*1*		*(22kab/kota, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*1*		
	4.01.4-1.0-0.0-0.01.01.01.1.13	Fasilitasi Materi dan Komunikasi Pimpinan						7.797.713.000,00		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Tidak	Tidak			-	Biro Umum
		Fasilitasi Komunikasi Pimpinan						7.797.713.000,00		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum					-	Biro Umum
			Terfasilitasinya Komunikasi Pimpinan dan Kebutuhan Penunjang Kegiatan (%)				*100,00*		*(Kota Kupang, NUSA TENGGARA TIMUR)*	*Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum*				*100*		
2.	**4.01.4-1.0-0.0-0.01.02.01**	**PROGRAM ADMINISTRASI UMUM**						**5.895.601.580,00**			**Ya**	**Ya**			**0,00**	**Biro Administrasi Pimpinan**
			Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran yang Berkualitas (%)				***100***			***Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum***						
			Meningkatnya sarana dan prasarana (%)				***100***			***Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum***						
			Tercapainya penyusunan capaian kinerja ikhtisar realisasi kinerja dan Keuangan (%)				***100***			***Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum***						
	4.01.4-1.0-0.0-0.01.02.01.1.01	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						311.138.010,00			Tidak	Tidak			-	Biro Administrasi Pimpinan
			Terlaksananya Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (%)				*100*		*(22 Kab./Kota, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*100*		
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						218.063.400,00							-	Biro Administrasi Pimpinan
			terlaksananya Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Paket)				*1*		*(22kab/kota, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*1*		
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD						2.684.000,00							-	Biro Administrasi Pimpinan
			terlakasananya Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Paket)				*1*							*0*		
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD						33.725.860,00							-	Biro Administrasi Pimpinan
			terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (paket)				*1*							*0*		
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						56.664.750,00							-	Biro Administrasi Pimpinan
			terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Paket)				*1*		*(22kab/kota, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*1*		
	4.01.4-1.0-0.0-0.01.02.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						79.397.000,00			Tidak	Tidak			-	Biro Administrasi Pimpinan
			Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah (%)				*100*		*(22 Kab./Kota, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*100*		
		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD						57.480.000,00							-	Biro Administrasi Pimpinan
			terlaksananya Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (paket)				*1*		*(22kab/kota, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*1*		

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode RPJMD	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2020	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RKPD TAHUN 2021	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2023		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2022	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD						21.917.000,00							-	Biro Administrasi Pimpinan
			terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (paket)				*1*		*(22kab/kota, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*1*		
	4.01.4-1.0-0.0-0.01.02.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						623.671.960,00		DANA UMUM	Tidak	Tidak			-	Biro Administrasi Pimpinan
			Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah (%)				*100*		*(22 Kab./Kota, NUSA TENGGARA TIMUR)*	*DANA UMUM*				*100*		
		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya						23.950.000,00		DANA UMUM					-	Biro Administrasi Pimpinan
			terlaksananya Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya (Paket)				*1*		*(22kab/kota, NUSA TENGGARA TIMUR)*	*DANA UMUM*				*1*		
		Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian						21.052.320,00							-	Biro Administrasi Pimpinan
			terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Paket)				*1*		*(22kab/kota, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*1*		
		Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian						59.914.000,00							-	Biro Administrasi Pimpinan
			terlakasanannya Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian (paket)				*1*		*(22kab/kota, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*1*		
		Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai						47.364.640,00							-	Biro Administrasi Pimpinan
			terlaksananya Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai (paket)				*1*		*(22kab/kota, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*1*		
		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi						316.651.000,00		DANA UMUM					-	Biro Administrasi Pimpinan
			terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi (paket)				*1*		*(22kab/kota, NUSA TENGGARA TIMUR)*	*DANA UMUM*				*1*		
		Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan						34.641.080,00							-	Biro Administrasi Pimpinan
			terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan (paket)				*1*		*(22kab/kota, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*1*		
		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan						120.098.920,00							-	Biro Administrasi Pimpinan
			terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Paket)				*1*		*(22kab/kota, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*1*		
	4.01.4-1.0-0.0-0.01.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						1.156.271.230,00		DANA UMUM	Tidak	Tidak			-	Biro Administrasi Pimpinan
			Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah (%)				*100*		*(22 Kab./Kota, NUSA TENGGARA TIMUR)*	*DANA UMUM*				*100*		
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						39.660.550,00		DANA UMUM					-	Biro Administrasi Pimpinan
			terlaksananya Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan (Paket)				*1*		*(22kab/kota, NUSA TENGGARA TIMUR)*	*DANA UMUM*				*1*		
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan						48.999.400,00							-	Biro Administrasi Pimpinan

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode RPJMD	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2020	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RKPD TAHUN 2021	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2023		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2022	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			terlaksananya Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan (paket)				*1*		*(22kab/kota, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*1*		
		Penyediaan Bahan/Material						45.749.780,00							-	Biro Administrasi Pimpinan
			terlaksananya Penyediaan Bahan/Material (paket)				*1*		*(22kab/kota, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*1*		
		Fasilitasi Kunjungan Tamu						83.380.000,00		DANA UMUM					-	Biro Administrasi Pimpinan
			terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu (Paket)				*1*		*(22kab/kota, NUSA TENGGARA TIMUR)*	*DANA UMUM*				*1*		
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						187.292.000,00		DANA UMUM					-	Biro Administrasi Pimpinan
			Terlaksananya koordinasi dan konsultasi dalam daerah (Paket)				*1*		*(10 kabupaten, NUSA TENGGARA TIMUR)*	*DANA UMUM*				*0*		
			terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (paket)				*1*		*(22kab/kota, NUSA TENGGARA TIMUR)*	*DANA UMUM*				*1*		
		Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD						1.189.500,00							-	Biro Administrasi Pimpinan
			terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (paket)				*1*		*(22kab/kota, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*1*		
		Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD						750.000.000,00							-	Biro Administrasi Pimpinan
			terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Paket)				*1*		*(22kab/kota, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*1*		
	4.01.4-1.0-0.0-0.01.02.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						266.546.000,00			Tidak	Tidak			-	Biro Administrasi Pimpinan
			Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (%)				*100*		*(22 Kab./Kota, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*100*		
		Pengadaan Mebel						27.448.000,00							-	Biro Administrasi Pimpinan
			terlaksananya Pengadaan Mebel (paket)				*1*		*(22kab/kota, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*1*		
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya						239.098.000,00							-	Biro Administrasi Pimpinan
			terlaksananya Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya (paket)				*1*		*(22kab/kota, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*1*		
	4.01.4-1.0-0.0-0.01.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						83.284.500,00		DANA UMUM	Tidak	Tidak			-	Biro Administrasi Pimpinan
			Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%)				*100*		*(22 Kab./Kota, NUSA TENGGARA TIMUR)*	*DANA UMUM*				*100*		
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat						11.000.000,00							-	Biro Administrasi Pimpinan
			terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Paket)				*1*		*(22kab/kota, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*1*		
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						18.000.000,00		DANA UMUM					-	Biro Administrasi Pimpinan

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode RPJMD	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2020	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RKPD TAHUN 2021	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2023		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2022	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Terlaksananya penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik (bulan)				*12*		*(Kota Kupang, NUSA TENGGARA TIMUR)*	*DANA UMUM*				*12*		
			terlaksananya Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik (paket)				*1*		*(22kab/kota, NUSA TENGGARA TIMUR)*	*DANA UMUM*				*1*		
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						54.284.500,00								Biro Administrasi Pimpinan
			terlaksananya Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (paket)				*1*		*(22kab/kota, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*1*		
	4.01.4-1.0-0.0-0.01.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						202.639.660,00		DANA UMUM	Tidak	Tidak				Biro Administrasi Pimpinan
			Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%)				*100*		*(22 Kab./Kota, NUSA TENGGARA TIMUR)*	*DANA UMUM*				*100*		
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						74.502.220,00								Biro Administrasi Pimpinan
			terlaksananya Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan (paket)				*1*		*(22kab/kota, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*1*		
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						104.937.440,00		DANA UMUM						Biro Administrasi Pimpinan
			terlaksananya Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan (paket)				*1*		*(22kab/kota, NUSA TENGGARA TIMUR)*	*DANA UMUM*				*1*		
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						23.200.000,00								Biro Administrasi Pimpinan
			terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya (paket)				*1*		*(22kab/kota, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*1*		
	4.01.4-1.0-0.0-0.01.02.01.1.13	Fasilitasi Materi dan Komunikasi Pimpinan						2.037.572.840,00			Tidak	Tidak				Biro Administrasi Pimpinan
			Terlaksananya Fasilitasi Materi dan Komunikasi Pimpinan (%)				*100*		*(22 Kab./Kota, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*100*		
		Penyiapan Materi Pimpinan						58.684.500,00								Biro Administrasi Pimpinan
			terlaksananya Penyiapan Materi Pimpinan (paket)				*1*		*(22kab/kota, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*1*		
		Fasilitasi Komunikasi Pimpinan						783.500.580,00								Biro Administrasi Pimpinan
			terlaksananya Fasilitasi Komunikasi Pimpinan (paket)				*1*		*(22kab/kota, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*1*		
		Pengelolaan Dokumentasi Pimpinan						1.195.387.760,00								Biro Administrasi Pimpinan
			terlaksananya Pengelolaan Dokumentasi Pimpinan (paket)				*1*		*(22kab/kota, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*1*		
	4.01.4-1.0-0.0-0.01.02.01.1.14	Fasilitasi Keprotokolan						1.135.080.380,00			Tidak	Tidak				Biro Administrasi Pimpinan

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode RPJMD	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2020	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RKPD TAHUN 2021	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2023		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2022	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Terlaksananya Fasilitasi Keprotokolan (%)				*100*		*(22 Kab./Kota, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*100*		
		Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Acara						575.382.340,00							-	Biro Administrasi Pimpinan
			terlaksananya Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Acara (paket)				*1*		*(22kab/kota, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*1*		
		Fasilitasi Kunjungan Tamu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah						192.404.000,00							-	Biro Administrasi Pimpinan
			terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (paket)				*1*		*(22kab/kota, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*1*		
		Pengelolaan Hubungan Keprotokolan						367.294.040,00							-	Biro Administrasi Pimpinan
			terlaksananya (paket)				*1*		*(22kab/kota, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*1*		
3.	**4.01.4-1.0-0.0-0.01.03.01**	**PROGRAM ADMINISTRASI UMUM**						**1.446.997.020,00**			**Tidak**	**Tidak**			**0,00**	**Biro Hukum**
			Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran yang berkualitas (%)				***100***									
			Meningkatnya sarana dan prasarana (%)				***100***									
			Tercapainya penyusunan capaian kinerja ikhtisar realisasi kinerja dan keuangan (%)				***100***									
	4.01.4-1.0-0.0-0.01.03.01.1.01	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						180.000.000,00			Tidak	Tidak			-	Biro Hukum
			Terlaksananya Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (%)				*100*		*(22 Kab./Kota, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*100*		
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD						30.000.000,00							-	Biro Hukum
			terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Paket)				*1*		*(22kab/kota, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*1*		
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD						30.000.000,00							-	Biro Hukum
			terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (paket)				*1*		*(22kab/kota, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*1*		
		Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD						10.000.000,00							-	Biro Hukum
			terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD (Paket)				*1*		*(22kab/kota, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*1*		
		Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD						10.000.000,00							-	Biro Hukum
			terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD (paket)				*1*		*(22kab/kota, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*1*		
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD						100.000.000,00							-	Biro Hukum
			terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Paket)				*1*		*(22kab/kota, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*1*		
	4.01.4-1.0-0.0-0.01.03.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						75.000.000,00		DANA UMUM	Tidak	Tidak			-	Biro Hukum

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode RPJMD	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2020	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RKPD TAHUN 2021	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2023		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2022	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi						75.000.000,00		DANA UMUM					-	Biro Hukum
			Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi (kali)				*1*		*(Oebobo, KOTA KUPANG)*	*DANA UMUM*				*1,00*		
	4.01.4-1.0-0.0-0.01.03.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						632.307.900,00		DANA UMUM	Tidak	Tidak			-	Biro Hukum
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						3.500.000,00		DANA UMUM					-	Biro Hukum
			Terlaksananya Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan (kali)				*6*		*(Oebobo, KOTA KUPANG)*	*DANA UMUM*				*0,00*		
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan						2.496.000,00		DANA UMUM					-	Biro Hukum
			Terlaksananya Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan (kali)				*12*		*(Oebobo, KOTA KUPANG)*	*DANA UMUM*				*0,00*		
		Penyediaan Bahan/Material						39.812.920,00		DANA UMUM					-	Biro Hukum
			Terlaksananya Penyediaan Bahan/Material (kali)				*12*		*(Oebobo, KOTA KUPANG)*	*DANA UMUM*				*0,00*		
		Fasilitasi Kunjungan Tamu						24.984.000,00		DANA UMUM					-	Biro Hukum
			Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu (kali)				*24*		*(KOTA KUPANG)*	*DANA UMUM*				*0*		
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						561.514.980,00		DANA UMUM					-	Biro Hukum
			Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (kali)				*55*		*(22 Kabupaten/Kota, NUSA TENGGARA TIMUR)*	*DANA UMUM*				*0*		
	4.01.4-1.0-0.0-0.01.03.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						386.574.000,00		DANA UMUM	Tidak	Tidak			-	Biro Hukum
		Pengadaan Mebel						111.424.000,00		DANA UMUM					-	Biro Hukum
			Terlaksananya Pengadaan Mebel (kali)				*2*		*(KOTA KUPANG)*	*DANA UMUM*				*0*		
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya						246.150.000,00		DANA UMUM					-	Biro Hukum
			Terlaksanaya Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya (kali)				*2*		*(KOTA KUPANG)*	*DANA UMUM*				*0*		
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						29.000.000,00		DANA UMUM					-	Biro Hukum
			Terlaksananya Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya (kali)				*2*		*(KOTA KUPANG)*	*DANA UMUM*				*0*		
	4.01.4-1.0-0.0-0.01.03.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						121.332.000,00		DANA UMUM	Tidak	Tidak			-	Biro Hukum
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat						5.292.000,00		DANA UMUM					-	Biro Hukum
			Terlaksananya penyediaan jasa surat menyurat (Bulan)				*12*		*(KOTA KUPANG)*	*DANA UMUM*				*0*		
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						8.400.000,00		DANA UMUM					-	Biro Hukum
			Terlaksananya Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik (Bulan)				*12*		*(KOTA KUPANG)*	*DANA UMUM*				*0*		

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode RPJMD	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2020	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RKPD TAHUN 2021	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2023		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2022	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						107.640.000,00		DANA UMUM					-	Biro Hukum
			Terlaksananya Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (Bulan)				*12*		*(KOTA KUPANG)*	*DANA UMUM*				*0*		
	4.01.4-1.0-0.0-0.01.03.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						51.783.120,00		DANA UMUM	Tidak	Tidak			-	Biro Hukum
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						44.841.520,00		DANA UMUM					-	Biro Hukum
			Terlaksananya Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan (Bulan)				*12*		*(KOTA KUPANG)*	*DANA UMUM*				*0*		
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						3.050.000,00		DANA UMUM					-	Biro Hukum
			Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya (Bulan)				*12*		*(KOTA KUPANG)*	*DANA UMUM*				*0*		
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						3.891.600,00		DANA UMUM					-	Biro Hukum
			Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya (Bulan)				*12,00*		*(KOTA KUPANG)*	*DANA UMUM*				*0,00*		
4.	**4.01.4-1.0-0.0-0.01.03.05**	**PROGRAM FASILITASI DAN KOORDINASI HUKUM**						**2.695.382.983,00**			**Ya**	**Ya**			**0,00**	**Biro Hukum**
			Peningkatan persentase rancangan Peraturan Daerah yang diselesaikan setiap tahun (%)				***100***			***DANA UMUM***						
			Cakupan penyelesaian kasus hukum setiap tahun (%)				***100***			***DANA UMUM***						
	4.01.4-1.0-0.0-0.01.03.05.1.01	Fasilitasi Penyusunan Perundang-Undangan						1.024.747.983,00		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Tidak	Tidak			-	Biro Hukum
			Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Perundang-Undangan (%)				*100*		*(22 Kab./Kota, NUSA TENGGARA TIMUR)*	*Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum*				*100*		
		Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Pengaturan						353.026.163,00		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum					-	Biro Hukum
			terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Pengaturan (paket)				*1*		*(22kab/kota, NUSA TENGGARA TIMUR)*	*Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum*				*1*		
		Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Penetapan						210.600.900,00		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum					-	Biro Hukum
			terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Penetapan (paket)				*1*		*(22kab/kota, NUSA TENGGARA TIMUR)*	*Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum*				*1*		
		Pendokumentasian Produk Hukum dan Naskah Hukum Lainnya						200.620.920,00		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum					-	Biro Hukum
			terlaksananya Pendokumentasian Produk Hukum dan Naskah Hukum Lainnya (Paket)				*1*		*(22kab/kab, NUSA TENGGARA TIMUR)*	*Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum*				*1*		

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode RPJMD	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2020	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RKPD TAHUN 2021	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2023		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2022	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		Fasilitasi dan Evaluasi Produk Hukum Kabupaten/Kota						260.500.000,00		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum					-	Biro Hukum
			terlaksananya Fasilitasi dan Evaluasi Produk Hukum Kabupaten/Kota (Paket)				*1*		*(22kab/kota, Luar Wilayah)*	*Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum*				*1*		
	4.01.4-1.0-0.0-0.01.03.05.1.02	Fasilitasi Bantuan Hukum						1.670.635.000,00		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Tidak	Tidak			-	Biro Hukum
			Terlaksananya Fasilitasi Bantuan Hukum (%)				*100*		*(22 Kab./Kota, NUSA TENGGARA TIMUR)*	*Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum*				*100*		
		Fasilitasi Penyelesaian Masalah Hukum						1.240.555.000,00		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum					-	Biro Hukum
			terlaksananya Fasilitasi Penyelesaian Masalah Hukum (Paket)				*1*		*(22kab/kota, NUSA TENGGARA TIMUR)*	*Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum*				*1*		
		Fasilitasi Penyelesaian Masalah Non Litigasi dan HAM						430.080.000,00		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum					-	Biro Hukum
			terlaksananya Fasilitasi Penyelesaian Masalah Non Litigasi dan HAM (paket)				*1*		*(22kab/kota, NUSA TENGGARA TIMUR)*	*Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum*				*1*		
5.	**4.01.4-1.0-0.0-0.01.04.01**	**PROGRAM ADMINISTRASI UMUM**						**736.154.342,00**			**Tidak**	**Tidak**			**0,00**	**Biro Organisasi**
			Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran yang berkualitas (%)				***100***			***Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum***						
			Meningkatnya sarana dan prasarana (%)				***100***			***Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum***						
			Tercapainya penyusunan capaian kinerja ikhtisar realisasi kinerja dan keuangan (%)				***100***			***Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum***						
	4.01.4-1.0-0.0-0.01.04.01.1.01	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						117.215.900,00		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Tidak	Tidak			-	Biro Organisasi
			Terlaksannaya Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Dokumen)				*11*		*(Jalan El Tari Nomor 52 Oebobo Kota Kupang, KOTA KUPANG, NUSA TENGGARA TIMUR)*	*Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum*				*11*		
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						24.244.710,00		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum					-	Biro Organisasi
			Penyusunan Dokumen Rencana Kerja Biro Organisasi Tahun 2023 dan Penyusunan Program Kerja Reformasi Birokrasi Biro Organisasi Tahun 2022 (Dokumen)				*2*		*(Jalan El Tari Nomor 52 Oebobo Kota Kupang, KOTA KUPANG, NUSA TENGGARA TIMUR)*	*Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum*				*2*		
			terlaksananya Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (paket)				*1*		*(22kab/kota, NUSA TENGGARA TIMUR)*	*Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum*				*1*		
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD						24.909.780,00		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum					-	Biro Organisasi
			Penyusunan Rencana Kerja Anggaran Biro Organisasi Tahun 2023 (Dokumen)				*1*		*(Jalan El Tari Nomor 52 Oebobo Kota Kupang, KOTA KUPANG, NUSA TENGGARA TIMUR)*	*Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum*				*1*		
			terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (paket)				*1*		*(22kab/kota, NUSA TENGGARA TIMUR)*	*Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum*				*1*		

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode RPJMD	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2020	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RKPD TAHUN 2021	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2023		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2022	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD						23.164.650,00		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum					-	Biro Organisasi
			Penyusunan Rencana Kerja Anggaran Perubahan Biro Organisasi Tahun Anggaran 2022 (Dokumen)				*1*		*(Jalan El Tari Nomor 52 Oebobo Kota Kupang, KOTA KUPANG, NUSA TENGGARA TIMUR)*	*Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum*				*1*		
			terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (paket)				*1*		*(22kab/kota, NUSA TENGGARA TIMUR)*	*Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum*				*1*		
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD						23.133.260,00		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum					-	Biro Organisasi
			Penyusunan LKIP Biro Organisasi Tahun 2021, RKT dan PK 2022, LKPJ Tahun 2021, Laporan Laporan PPID (Dokumen)				*5*		*(Jalan El Tari Nomor 52 Oebobo, KOTA KUPANG, NUSA TENGGARA TIMUR)*	*Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum*				*5*		
			terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (paket)				*1*		*(22kab/kota, NUSA TENGGARA TIMUR)*	*Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum*				*1*		
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						21.763.500,00		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum					-	Biro Organisasi
			Penyusunan Laporan Semesteran Evaluasi Kinerja Biro Organisasi Tahun 2022 (Dokumen)				*2*		*(Jalan El Tari Nomor 52 Oebobo, KOTA KUPANG, NUSA TENGGARA TIMUR)*	*Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum*				*2*		
			terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (paket)				*1*		*(22kab/kota, NUSA TENGGARA TIMUR)*	*Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum*				*1*		
	4.01.4-1.0-0.0-0.01.04.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						96.756.740,00		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Tidak	Tidak			-	Biro Organisasi
			Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah (PNS)				*30*		*(Jalan El Tari Nomor 52 Oebobo, KOTA KUPANG, NUSA TENGGARA TIMUR)*	*Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum*				*30*		
		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi						43.736.000,00		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum					-	Biro Organisasi
			Pendidikan dan Pelatihan Berdasarkan Tupoksi Bagi Pegawai Biro Organisasi (Bulan)				*12,00*		*(Jalan El Tari Nomor 52 Oebobo, KOTA KUPANG, NUSA TENGGARA TIMUR)*	*Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum*				*12,00*		
			terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi (Paket)				*1*		*(22kab/kota, NUSA TENGGARA TIMUR)*	*Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum*				*1*		
		Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan						53.020.740,00		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum					-	Biro Organisasi
			Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Bagi PNS Biro Organisasi (Kali)				*4,00*		*(Jalan El Tari Nomor 52 Oebobo, KOTA KUPANG, NUSA TENGGARA TIMUR)*	*Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum*				*4,00*		
			terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan (paket)				*1*		*(22kab/kota, NUSA TENGGARA TIMUR)*	*Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum*				*1*		
	4.01.4-1.0-0.0-0.01.04.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						213.845.500,00		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Tidak	Tidak			-	Biro Organisasi

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode RPJMD	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2020	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RKPD TAHUN 2021	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2023		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2022	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah (Bulan)				*12*		*(Jalan El Tari Nomor 52 Oebobo, KOTA KUPANG, NUSA TENGGARA TIMUR)*	*Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum*				*12*		
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						20.001.000,00		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum					-	Biro Organisasi
			Penyediaan Barang cetakan dan penggandaan (Bulan)				*12*		*(Jalan El Tari Nomor 52 Oebobo, KOTA KUPANG, NUSA TENGGARA TIMUR)*	*Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum*				*12*		
			terlaksananya Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan (paket)				*1*		*(22KAB/KOTA, NUSA TENGGARA TIMUR)*	*Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum*				*1*		
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan						4.492.800,00		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum					-	Biro Organisasi
			Penyediaan Bahan Bacaan Harian Umum (Surat Kabar)				*4*		*(Jalan El Tari Nomor 52 Oebobo, KOTA KUPANG, NUSA TENGGARA TIMUR)*	*Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum*				*5*		
			terlaksananya Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan (Paket)				*1*		*(22kab/kota, NUSA TENGGARA TIMUR)*	*Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum*				*1*		
		Penyediaan Bahan/Material						20.007.700,00		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum					-	Biro Organisasi
			Penyediaan Alat Tulis Kantor (Bulan)				*12*		*(Jalan El Tari Nomor 52 Oebobo Kota Kupang, KOTA KUPANG, NUSA TENGGARA TIMUR)*	*Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum*				*12*		
			terlaksananya Penyediaan Bahan/Material (Paket)				*1*		*(22kab/kota, NUSA TENGGARA TIMUR)*	*Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum*				*1*		
		Fasilitasi Kunjungan Tamu						21.918.000,00		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum					-	Biro Organisasi
			Penyediaan Makan dan Minum Untuk Kegiatan Rutin Biro (Bulan)				*12*		*(Jalan El Tari Nomor 52 Oebobo, KOTA KUPANG, NUSA TENGGARA TIMUR)*	*Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum*				*12*		
			terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu (Paket)				*1*		*(22kab/kota, NUSA TENGGARA TIMUR)*	*Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum*				*1*		
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						147.426.000,00		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum					-	Biro Organisasi
			Penyediaan Makan dan Minum Rapat serta Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Bulan)				*12*		*(Jalan El Tari Nomor 52 Oebobo, KOTA KUPANG, NUSA TENGGARA TIMUR)*	*Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum*				*12*		
			terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (paket)				*1*		*(22kba/kota, NUSA TENGGARA TIMUR)*	*Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum*				*1*		
	4.01.4-1.0-0.0-0.01.04.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						114.898.560,00		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum, Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Tidak	Tidak			-	Biro Organisasi
			Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (Bulan)				*12*		*(Jalan El Tari Nomor 52 Oebobo, KOTA KUPANG, NUSA TENGGARA TIMUR)*	*Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum, Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil*				*12*		

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode RPJMD	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2020	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RKPD TAHUN 2021	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2023		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2022	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		Pengadaan Mebel						80.931.000,00		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum					-	Biro Organisasi
			Pengadaan Meubelair Pada Biro Organisasi (Unit)				*10*		*(Jalan El Tari Nomor 52 Oebobo, KOTA KUPANG, NUSA TENGGARA TIMUR)*	*Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum*				*15*		
			terlaksananya Pengadaan Mebel (paket)				*1*		*(22kab/kota, NUSA TENGGARA TIMUR)*	*Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum*				*1*		
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya						33.967.560,00		Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil					-	Biro Organisasi
			Pengadaan Peralatan dan Mesin Kantor (Unit)				*10*		*(Jalan El Tari Nomor 52 Oebobo, KOTA KUPANG, NUSA TENGGARA TIMUR)*	*Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil*				*12*		
			terlaksananya Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya (Paket)				*1*		*(22kab/kota, NUSA TENGGARA TIMUR)*	*Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil*				*1*		
	4.01.4-1.0-0.0-0.01.04.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						70.481.000,00		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Tidak	Tidak			-	Biro Organisasi
			Terlaksananya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (bulan)				*12*		*(Jalan El Tari Nomor 52 Oebobo, KOTA KUPANG, NUSA TENGGARA TIMUR)*	*Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum*				*12*		
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat						1.834.500,00		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum					-	Biro Organisasi
			Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Bulan)				*12*		*(Jalan El Tari Nomor 52 Oebobo, KOTA KUPANG, NUSA TENGGARA TIMUR)*	*Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum*				*12*		
			terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat (paket)				*1*		*(22kab/kota, NUSA TENGGARA TIMUR)*	*Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum*				*1*		
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						15.000.000,00		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum					-	Biro Organisasi
			Penyediaan Jasa Layanan Internet (Bulan)				*12*		*(Jalan El Tari Nomor 52 Oebobo, KOTA KUPANG, NUSA TENGGARA TIMUR)*	*Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum*				*12*		
			terlaksananya Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik (Paket)				*1*		*(22kba/kota, NUSA TENGGARA TIMUR)*	*Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum*				*1*		
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						53.646.500,00		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum					-	Biro Organisasi
			Pengelola Keuangan, Pengadaan Barang/Jasa dan Pengelola BMD (Bulan)				*12*		*(Jalan El Tari Nomor 52 Oebobo, KOTA KUPANG, NUSA TENGGARA TIMUR)*	*Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum*				*12*		
			terlaksananya Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (paket)				*1*		*(22kab/kota, NUSA TENGGARA TIMUR)*	*Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum*				*1*		
	4.01.4-1.0-0.0-0.01.04.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						122.956.642,00		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Tidak	Tidak			-	Biro Organisasi
			Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Bulan)				*12*		*(Jalan El Tari Nomor 52 Oebobo, KOTA KUPANG, NUSA TENGGARA TIMUR)*	*Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum*				*12*		

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode RPJMD	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2020	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RKPD TAHUN 2021	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2023		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2022	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						37.986.642,00		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum					-	Biro Organisasi
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Dinas (Unit)				*1*		*(alan El Tari Nomor 52 Oebobo, KOTA KUPANG, NUSA TENGGARA TIMUR)*	*Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum*				*1*		
			terlaksananya Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan (Paket)				*1*		*(22kab/kota, NUSA TENGGARA TIMUR)*	*Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum*				*1*		
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						84.970.000,00		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum					-	Biro Organisasi
			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Kantor (PC, Laptop dan Printer) (Bulan)				*12*		*(alan El Tari Nomor 52 Oebobo, KOTA KUPANG, NUSA TENGGARA TIMUR)*	*Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum*				*12*		
			terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya (Paket)				*1*		*(22kab/kota, NUSA TENGGARA TIMUR)*	*Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum*				*1*		
6.	**4.01.4-1.0-0.0-0.01.04.02**	**PROGRAM PENATAAN ORGANISASI**						**1.770.000.000,00**			**Ya**	**Ya**			**0,00**	**Biro Organisasi**
			Persentase Perangkat Daerah yang efektif dan efisien (%)				***92,98***			***Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum***						
	4.01.4-1.0-0.0-0.01.04.02.1.01	Fasilitasi Kelembagaan dan Analisis Jabatan						640.000.000,00		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Tidak	Tidak			-	Biro Organisasi
			Terlaksananya Fasilitasi Kelembagaan dan Analisis Jabatan (%)				*100*		*(22 Kab./Kota, NUSA TENGGARA TIMUR)*	*Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum*				*100*		
		Fasilitasi Penataan Kelembagaan Provinsi						190.000.000,00		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum					-	Biro Organisasi
			terlaksananya Fasilitasi Penataan Kelembagaan Provinsi (Paket)				*1*		*(22kab/kota, NUSA TENGGARA TIMUR)*	*Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum*				*1*		
		Fasilitasi Penataan Kelembagaan Kabupaten/Kota						100.000.000,00		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum					-	Biro Organisasi
			terlaksananya Fasilitasi Penataan Kelembagaan Kabupaten/Kota (Paket)				*1*		*(22kab/kota, NUSA TENGGARA TIMUR)*	*Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum*				*1*		
		Penataan Analisis Jabatan						350.000.000,00		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum					-	Biro Organisasi
			terlaksananya Penataan Analisis Jabatan (paket)				*1*		*(22kab/kota, NUSA TENGGARA TIMUR)*	*Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum*				*1*		
	4.01.4-1.0-0.0-0.01.04.02.1.02	Fasilitasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja						1.130.000.000,00		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Tidak	Tidak			-	Biro Organisasi
			Terlaksananya Fasilitasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja (%)				*100*		*(22 Kab./Kota, NUSA TENGGARA TIMUR)*	*Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum*				*100*		
		Pembinaan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi						300.000.000,00		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum					-	Biro Organisasi
			terlaksananya Pembinaan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (paket)				*1*		*(22kab/kota, NUSA TENGGARA TIMUR)*	*Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum*				*1*		

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode RPJMD	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2020	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RKPD TAHUN 2021	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2023		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2022	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		Monitoring dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja						200.000.000,00		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum					-	Biro Organisasi
			terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja (paket)				*1*		*(22kab/kota, NUSA TENGGARA TIMUR)*	*Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum*				*1*		
		Evaluasi Pelaksanaan Budaya Kerja						-		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum					-	Biro Organisasi
			terlaksananya Evaluasi Pelaksanaan Budaya Kerja (paket)				*1*		*(22kab/kota, NUSA TENGGARA TIMUR)*	*Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum*				*1*		
		Pengelolaan Tata Laksana Pemerintahan						380.000.000,00		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum					-	Biro Organisasi
			terlaksananya Pengelolaan Tata Laksana Pemerintahan (Paket)				*1*		*(22kab/kota, NUSA TENGGARA TIMUR)*	*Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum*				*1*		
		Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Publik						250.000.000,00		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum					-	Biro Organisasi
			terlaksananya Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Publik (Paket)				*1*		*(22kab/kota, NUSA TENGGARA TIMUR)*	*Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum*				*1*		
7.	**4.01.4-1.0-0.0-0.01.05.01**	**PROGRAM ADMINISTRASI UMUM**						**398.650.800,00**			**Tidak**	**Tidak**			**0,00**	**Biro Pemerintahan, Kesra dan Kerjasama**
			Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran yang berkualitas (%)				***100***			***Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum***						
			Meningkatnya sarana dan prasarana (%)				***100***			***Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum***						
			Tercapainya penyusunan capaian kinerja ikhtisar realisasi kinerja dan keuangan (%)				***100***			***Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum***						
	4.01.4-1.0-0.0-0.01.05.01.1.01	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						24.000.000,00			Tidak	Tidak			-	Biro Pemerintahan, Kesra dan Kerjasama
			Terlaksananya Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (%)				*100*		*(22 Kab./Kota, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*100*		
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD						6.000.000,00							-	Biro Pemerintahan, Kesra dan Kerjasama
			terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (paket)				*1*		*(22kab/kota, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*1*		
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD						6.000.000,00							-	Biro Pemerintahan, Kesra dan Kerjasama
			terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (paket)				*1*		*(22kab/kota, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*1*		
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD						3.000.000,00							-	Biro Pemerintahan, Kesra dan Kerjasama
			terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (paket)				*1*		*(22kab/kota, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*1*		
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						9.000.000,00							-	Biro Pemerintahan, Kesra dan Kerjasama

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode RPJMD	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2020	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RKPD TAHUN 2021	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2023		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2022	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (paket)				*1*		*(22kab/kota, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*1*		
	4.01.4-1.0-0.0-0.01.05.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						27.358.000,00			Tidak	Tidak				- Biro Pemerintahan, Kesra dan Kerjasama
			Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah (%)				*100*		*(22 Kab./Kota, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*100*		
		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi						27.358.000,00								- Biro Pemerintahan, Kesra dan Kerjasama
			terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi (paket)				*1*		*(22kab/kota, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*1*		
	4.01.4-1.0-0.0-0.01.05.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						167.492.800,00			Tidak	Tidak				- Biro Pemerintahan, Kesra dan Kerjasama
			Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah (%)				*100*		*(22 Kab./Kota, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*100*		
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						15.000.000,00								- Biro Pemerintahan, Kesra dan Kerjasama
			terlaksananya Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan (paket)				*1*		*(22kab/kota, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*1*		
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan						4.492.800,00								- Biro Pemerintahan, Kesra dan Kerjasama
			terlaksananya Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan (paket)				*1*		*(22kab/kota, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*1*		
		Penyediaan Bahan/Material						25.000.000,00								- Biro Pemerintahan, Kesra dan Kerjasama
			terlaksananya Penyediaan Bahan/Material (paket)				*1*		*(22kab/kota, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*1*		
		Fasilitasi Kunjungan Tamu						15.000.000,00								- Biro Pemerintahan, Kesra dan Kerjasama
			terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu (paket)				*1*		*(22kab/kota, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*1*		
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						108.000.000,00								- Biro Pemerintahan, Kesra dan Kerjasama
			terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Paket)				*1*		*(22kab/kota, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*1*		
	4.01.4-1.0-0.0-0.01.05.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						50.000.000,00			Tidak	Tidak				- Biro Pemerintahan, Kesra dan Kerjasama
			Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (%)				*100*		*(22 Kab./Kota, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*100*		
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya						50.000.000,00								- Biro Pemerintahan, Kesra dan Kerjasama
			terlaksananya Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya (Paket)				*1*		*(22kab/kota, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*1*		
	4.01.4-1.0-0.0-0.01.05.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						69.800.000,00			Tidak	Tidak				- Biro Pemerintahan, Kesra dan Kerjasama
			Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%)				*100*		*(22 Kab./Kota, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*100*		

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode RPJMD	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2020	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RKPD TAHUN 2021	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2023		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2022	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat						15.000.000,00							-	Biro Pemerintahan, Kesra dan Kerjasama
			terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat (paket)				*1*		*(22kab/kota, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*1*		
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						20.000.000,00							-	Biro Pemerintahan, Kesra dan Kerjasama
			terlaksananya Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik (paket)				*1*		*(22kab/kota, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*1*		
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						34.800.000,00							-	Biro Pemerintahan, Kesra dan Kerjasama
			terlaksananya Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (paket)				*1*		*(22kab/kota, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*1*		
	4.01.4-1.0-0.0-0.01.05.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						60.000.000,00			Tidak	Tidak			-	Biro Pemerintahan, Kesra dan Kerjasama
			Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%)				*100*		*(22 Kab./Kota, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*100*		
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						50.000.000,00							-	Biro Pemerintahan, Kesra dan Kerjasama
			terlaksananya Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan (paket)				*1*		*(22kab/kota, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*1*		
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						10.000.000,00							-	Biro Pemerintahan, Kesra dan Kerjasama
			terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya (paket)				*1*		*(22kab/kota, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*1*		
8.	**4.01.4-1.0-0.0-0.01.05.03**	**PROGRAM PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH**						**2.215.542.155,00**			**Ya**	**Ya**			**0,00**	**Biro Pemerintahan, Kesra dan Kerjasama**
			Cakupan Kegiatan Tugas Pemerintahan yang dilaksanakan setiap tahun (%)				***100***									
			Cakupan Kegiatan Tugas Otonomi Daerah yang dilaksanakan setiap tahun (%)				***100***									
			Cakupan Kegiatan Penataan Urusan yang dilaksanakan setiap tahun (%)				***100***									
			Cakupan Kerjasama Daerah yang difasilitasi setiap tahun (%)				***100***									
	4.01.4-1.0-0.0-0.01.05.03.1.01	Pelaksanaan Tugas Pemerintahan						446.000.000,00		Dana Perimbangan	Tidak	Tidak			-	Biro Pemerintahan, Kesra dan Kerjasama
			Terlaksananya Pelaksanaan Tugas Pemerintahan (%)				*100*		*(22 Kab./Kota, NUSA TENGGARA TIMUR)*	*Dana Perimbangan*				*100*		
		Pengelolaan Administrasi Kebijakan Pemerintahan						103.000.000,00							-	Biro Pemerintahan, Kesra dan Kerjasama
			terlaksananya Pengelolaan Administrasi Kebijakan Pemerintahan (paket)				*1*		*(22kab/kota, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*1*		

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode RPJMD	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2020	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RKPD TAHUN 2021	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2023		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2022	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		Fasilitasi Pelaksanaan Pemerintahan Umum						173.000.000,00		Dana Perimbangan					-	Biro Pemerintahan, Kesra dan Kerjasama
			terlaksananya Fasilitasi Pelaksanaan Pemerintahan Umum (paket)				*1*		*(22kab/kota, NUSA TENGGARA TIMUR)*	*Dana Perimbangan*				*1*		
		Fasilitasi Penataan Wilayah						170.000.000,00		Dana Perimbangan					-	Biro Pemerintahan, Kesra dan Kerjasama
			terlaksananya Fasilitasi Penataan Wilayah (Paket)				*1*		*(22kab/kota, NUSA TENGGARA TIMUR)*	*Dana Perimbangan*				*1*		
	4.01.4-1.0-0.0-0.01.05.03.1.02	Pelaksanaan Otonomi Daerah						866.412.155,00		Dana Perimbangan	Tidak	Tidak			-	Biro Pemerintahan, Kesra dan Kerjasama
			Terlaksananya Pelaksanaan Otonomi Daerah (%)				*100*		*(22 Kab./Kota, NUSA TENGGARA TIMUR)*	*Dana Perimbangan*				*100*		
		Fasilitasi Administrasi Kepala Daerah dan DPRD						365.641.095,00							-	Biro Pemerintahan, Kesra dan Kerjasama
			terlaksananya Fasilitasi Administrasi Kepala Daerah dan DPRD (paket)				*1*		*(22kab/kota, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*1*		
		Evaluasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan						500.771.060,00		Dana Perimbangan					-	Biro Pemerintahan, Kesra dan Kerjasama
			terlaksananya Evaluasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan (paket)				*1*		*(22kab/kota, NUSA TENGGARA TIMUR)*	*Dana Perimbangan*				*1*		
	4.01.4-1.0-0.0-0.01.05.03.1.03	Evaluasi Administrasi Pembangunan						903.130.000,00		Dana Perimbangan	Tidak	Tidak			-	Biro Pemerintahan, Kesra dan Kerjasama
			Terlaksananya Evaluasi Administrasi Pembangunan (%)				*100*		*(22 Kab./Kota, NUSA TENGGARA TIMUR)*	*Dana Perimbangan*				*100*		
		Fasilitasi Kerjasama antar Pemerintah						551.930.000,00		Dana Perimbangan					-	Biro Pemerintahan, Kesra dan Kerjasama
			terlaksananya Fasilitasi Kerjasama antar Pemerintah (paket)				*1*		*(22kab/kota, NUSA TENGGARA TIMUR)*	*Dana Perimbangan*				*1*		
		Fasilitasi Kerjasama Badan Usaha/Swasta						146.000.000,00							-	Biro Pemerintahan, Kesra dan Kerjasama
			terlaksananya Fasilitasi Kerjasama Badan Usaha/Swasta (paket)				*1*		*(22kab/kota, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*1*		
		Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama						205.200.000,00							-	Biro Pemerintahan, Kesra dan Kerjasama
			terlaksananya Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama (paket)				*1*		*(22kab/kota, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*1*		
9.	**4.01.4-1.0-0.0-0.01.05.04**	**PROGRAM KESEJAHTERAAN RAKYAT**						**2.611.690.827,00**			**Ya**	**Ya**			**0,00**	**Biro Pemerintahan, Kesra dan Kerjasama**
			Persentase peningkatan pelayanan kesejahteraan rakyat (kegiatan di bidang kesejahteraan rakyat yang dilaksanakan) (%)				***100***									
			Persentase peningkatan kerjasama antar pemerintah dan non pemerintah (Jumlah kerjasama yang dilaksanakan) (%)				***100***									
	4.01.4-1.0-0.0-0.01.05.04.1.01	Fasilitasi Pembinaan Mental Spiritual						287.400.000,00		DANA UMUM	Tidak	Tidak			-	Biro Pemerintahan, Kesra dan Kerjasama
		Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual						287.400.000,00		DANA UMUM					-	Biro Pemerintahan, Kesra dan Kerjasama

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode RPJMD	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2020	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RKPD TAHUN 2021	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2023		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2022	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Terlaksananya Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual (Tahun)				*1*		*(22 kab/kota, NUSA TENGGARA TIMUR)*	*DANA UMUM*				*1*		
	4.01.4-1.0-0.0-0.01.05.04.1.02	Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar						1.844.290.827,00		DANA UMUM	Tidak	Tidak			-	Biro Pemerintahan, Kesra dan Kerjasama
			Terlaksananya Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar (%)				*100*		*(22 Kab./Kota, NUSA TENGGARA TIMUR)*	*DANA UMUM*				*100*		
		Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pendidikan						425.000.000,00							-	Biro Pemerintahan, Kesra dan Kerjasama
			terlaksananya Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pendidikan (paket)				*1*		*(22kab/kota, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*1*		
		Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kesehatan						1.276.290.827,00		DANA UMUM					-	Biro Pemerintahan, Kesra dan Kerjasama
			terlaksananya Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kesehatan (Paket)				*1*		*(22kab/kota, NUSA TENGGARA TIMUR)*	*DANA UMUM*				*1*		
		Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Sosial						143.000.000,00							-	Biro Pemerintahan, Kesra dan Kerjasama
			terlaksananya Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Sosial (paket)				*1*							*0*		
	4.01.4-1.0-0.0-0.01.05.04.1.03	Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar						480.000.000,00		DANA UMUM	Tidak	Tidak			-	Biro Pemerintahan, Kesra dan Kerjasama
			Terlaksananya Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar (%)				*100*		*(22 Kab./Kota, NUSA TENGGARA TIMUR)*	*DANA UMUM*				*100*		
		Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata						154.000.000,00							-	Biro Pemerintahan, Kesra dan Kerjasama
			terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata (paket)				*1*		*(22kab/kota, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*1*		
		Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Transmigrasi dan						246.000.000,00		DANA UMUM					-	Biro Pemerintahan, Kesra dan Kerjasama

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode RPJMD	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2020	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RKPD TAHUN 2021	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2023		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2022	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Transmigrasi dan Tenaga Kerja				*1*		*(22kab/kota, NUSA TENGGARA TIMUR)*	*DANA UMUM*				*1*		
		Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Komunikasi, Informatika, Statistik, Persandian, dan Perhubungan						80.000.000,00		DANA UMUM					-	Biro Pemerintahan, Kesra dan Kerjasama
			terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Komunikasi, Informatika, Statistik, Persandian, dan Perhubungan (paket)				*1*		*(22kab/kota, NUSA TENGGARA TIMUR)*	*DANA UMUM*				*1*		
10.	**4.01.4-1.0-0.0-0.01.06.01**	**PROGRAM ADMINISTRASI UMUM**						**733.522.539,00**			**Tidak**	**Tidak**			**0,00**	**Biro Ekonomi dan Administrasi Pembangunan**
			Meningkatnya pelayanan administrasiperkantoran yang berkualitas (%)				***100***			***DANA UMUM***						
			Meningkatnya sarana dan prasarana (%)				***100***			***DANA UMUM***						
			Tercapainya penyusunan capaian kinerja ikhtisar realisasi kinerja dan keuangan (%)				***100***			***DANA UMUM***						
	4.01.4-1.0-0.0-0.01.06.01.1.01	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						20.000.000,00			Tidak	Tidak			-	Biro Ekonomi dan Administrasi Pembangunan
			Terlaksananya Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (%)				*100*		*(22 Kab./Kota, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*100*		
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD						20.000.000,00							-	Biro Ekonomi dan Administrasi Pembangunan
			terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (paket)				*1*		*(22kab/kota, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*1*		
	4.01.4-1.0-0.0-0.01.06.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						22.500.000,00			Tidak	Tidak			-	Biro Ekonomi dan Administrasi Pembangunan
			Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah (%)				*100*		*(22 Kab./Kota, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*100*		
		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi						22.500.000,00							-	Biro Ekonomi dan Administrasi Pembangunan
			terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi (paket)				*1*		*(22kab/kota, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*1*		
	4.01.4-1.0-0.0-0.01.06.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						300.000.000,00		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Tidak	Tidak			-	Biro Ekonomi dan Administrasi Pembangunan
			Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah (%)				*100*		*(22 Kab./Kota, NUSA TENGGARA TIMUR)*	*Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum*				*100*		

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode RPJMD	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2020	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RKPD TAHUN 2021	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2023		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2022	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						25.000.000,00							-	Biro Ekonomi dan Administrasi Pembangunan
			terlaksananya Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan (paket)				*1*		*(22kab/kota, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*1*		
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan						5.000.000,00							-	Biro Ekonomi dan Administrasi Pembangunan
			terlaksananya Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan (paket)				*1*		*(22kab/kota, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*1*		
		Penyediaan Bahan/Material						30.000.000,00							-	Biro Ekonomi dan Administrasi Pembangunan
			terlaksananya Penyediaan Bahan/Material (paket)				*1*		*(22kab/kota, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*1*		
		Fasilitasi Kunjungan Tamu						65.000.000,00							-	Biro Ekonomi dan Administrasi Pembangunan
			terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu (paket)				*1*		*(22kab/kota, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*1*		
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						175.000.000,00		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum					-	Biro Ekonomi dan Administrasi Pembangunan
			terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (paket)				*1*		*(22kab/kota, NUSA TENGGARA TIMUR)*	*Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum*				*1*		
	4.01.4-1.0-0.0-0.01.06.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						120.000.000,00			Tidak	Tidak			-	Biro Ekonomi dan Administrasi Pembangunan
			Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (%)				*100*		*(22 Kab./Kota, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*100*		
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya						120.000.000,00							-	Biro Ekonomi dan Administrasi Pembangunan
			terlaksananya Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya (paket)				*1*		*(22kab/kota, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*1*		
	4.01.4-1.0-0.0-0.01.06.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						126.311.400,00			Tidak	Tidak			-	Biro Ekonomi dan Administrasi Pembangunan
			Terlaksananya (%)				*100*		*(22 Kab./Kota, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*100*		
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat						6.500.000,00							-	Biro Ekonomi dan Administrasi Pembangunan
			terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat (paket)				*1*		*(kota kupang, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*1*		
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						17.000.000,00							-	Biro Ekonomi dan Administrasi Pembangunan
			terlaksananya Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik (paket)				*1*		*(22kab/kota, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*1*		
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						102.811.400,00							-	Biro Ekonomi dan Administrasi Pembangunan

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode RPJMD	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2020	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RKPD TAHUN 2021	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2023		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2022	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			terlaksananya Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (paket)				*1*		*(22kab/kota, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*1*		
	4.01.4-1.0-0.0-0.01.06.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						144.711.139,00			Tidak	Tidak			-	Biro Ekonomi dan Administrasi Pembangunan
			Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%)				*100*		*(22 Kab./Kota, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*100*		
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						124.711.139,00							-	Biro Ekonomi dan Administrasi Pembangunan
			terlaksananya Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan (paket)				*1*		*(22kab/kota, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*1*		
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						20.000.000,00							-	Biro Ekonomi dan Administrasi Pembangunan
			terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya (paket)				*1*		*(22kab/kota, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*1*		
11.	**4.01.4-1.0-0.0-0.01.06.06**	**PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN**						**976.911.675,00**			**Ya**	**Ya**			**0,00**	**Biro Ekonomi dan Administrasi Pembangunan**
			Cakupan kebijakan bidang perekonomian yang terkonsolidasi dengan baik (Target tahun 2023= 12 rekomendasi) (%)				***66,67***									
			Cakupan kebijakan Pengelolaan SDA yang terkonsolidasi dengan baik (Target tahun 2023= 12 rekomendasi) (%)				***66,67***									
			Persentasi BUMD yang memiliki kinerja baik (Target tahun 2023= 9 rekomendasi) (%)				***66,67***									
	4.01.4-1.0-0.0-0.01.06.06.1.01	Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Perekonomian						436.911.675,00		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Tidak	Tidak			-	Biro Ekonomi dan Administrasi Pembangunan
			Terlaksananya Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Perekonomian (%)				*100*		*(22 Kab./Kota, NUSA TENGGARA TIMUR)*	*Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum*				*100*		
		Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Makro						200.000.000,00		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum					-	Biro Ekonomi dan Administrasi Pembangunan
			terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Makro (paket)				*1*		*(22kab/kota, NUSA TENGGARA TIMUR)*	*Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum*				*1*		
		Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Mikro						236.911.675,00		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum					-	Biro Ekonomi dan Administrasi Pembangunan
			terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Mikro (paket)				*1*		*(22kab/kota, NUSA TENGGARA TIMUR)*	*Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum*				*1*		
	4.01.4-1.0-0.0-0.01.06.06.1.02	Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Sumber Daya Alam						540.000.000,00			Tidak	Tidak			-	Biro Ekonomi dan Administrasi Pembangunan
			Terlaksananya Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Sumber Daya Alam (%)				*100*		*(22 Kab./Kota, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*100*		

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode RPJMD	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2020	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RKPD TAHUN 2021	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2023		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2022	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan						400.000.000,00							-	Biro Ekonomi dan Administrasi Pembangunan
			terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan (paket)				*1*		*(22kab/kota, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*1*		
		Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup						60.000.000,00							-	Biro Ekonomi dan Administrasi Pembangunan
			terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup (paket)				*1*		*(22kab/kota, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*1*		
		Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air						80.000.000,00							-	Biro Ekonomi dan Administrasi Pembangunan
			terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air (paket)				*1*		*(22kab/kota, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*1*		
12.	**4.01.4-1.0-0.0-0.01.06.08**	**PROGRAM KEBIJAKAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN**						**2.473.000.000,00**			**Ya**	**Ya**			**0,00**	**Biro Ekonomi dan Administrasi Pembangunan**
			Efektivitas peningkatan kinerja administrasi pembangunan (%)				***100***									
	4.01.4-1.0-0.0-0.01.06.08.1.01	Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah						888.000.000,00		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Tidak	Tidak			-	Biro Ekonomi dan Administrasi Pembangunan
			Terlaksananya Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah (%)				*100*		*(22 kab./Kota, NUSA TENGGARA TIMUR)*	*Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum*				*100*		
		Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBD						319.000.000,00		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum					-	Biro Ekonomi dan Administrasi Pembangunan
			terlaksananya Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBD (paket)				*1*		*(22kab/kota, NUSA TENGGARA TIMUR)*	*Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum*				*1*		
			terlaksananya Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBD (paket)				*1*		*(22kab/kota, NUSA TENGGARA TIMUR)*	*Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum*				*1*		
		Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBN						219.000.000,00		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum					-	Biro Ekonomi dan Administrasi Pembangunan
			terlaksananya Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBN (paket)				*1*		*(22kab/kota, NUSA TENGGARA TIMUR)*	*Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum*				*1*		
		Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah						350.000.000,00		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum					-	Biro Ekonomi dan Administrasi Pembangunan
			terlaksananya Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah (paket)				*1*		*(22kab/kota, NUSA TENGGARA TIMUR)*	*Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum*				*1*		
	4.01.4-1.0-0.0-0.01.06.08.1.02	Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah						1.585.000.000,00		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Tidak	Tidak			-	Biro Ekonomi dan Administrasi Pembangunan
			Terlaksananya Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah (%)				*100*		*(22 Kab./Kota, NUSA TENGGARA TIMUR)*	*Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum*				*100*		

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode RPJMD	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2020	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RKPD TAHUN 2021	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2023		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2022	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		Analisis Capaian Kinerja Pembangunan Daerah						450.000.000,00		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum					-	Biro Ekonomi dan Administrasi Pembangunan
			terlaksananya Analisis Capaian Kinerja Pembangunan Daerah (paket)				*1*		*(22kab/kota, NUSA TENGGARA TIMUR)*	*Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum*				*1*		
		Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah						400.000.000,00		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum					-	Biro Ekonomi dan Administrasi Pembangunan
			terlaksananya Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah (paket)				*1*		*(22kab/kota, NUSA TENGGARA TIMUR)*	*Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum*				*1*		
		Fasilitasi Perumusan Kebijakan Teknis Pembangunan Daerah						735.000.000,00		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum					-	Biro Ekonomi dan Administrasi Pembangunan
			terlaksananya Fasilitasi Perumusan Kebijakan Teknis Pembangunan Daerah (paket)				*1*		*(22kab/kota, NUSA TENGGARA TIMUR)*	*Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum*				*1*		
13.	**4.01.4-1.0-0.0-0.01.07.01**	**PROGRAM ADMINISTRASI UMUM**						**1.433.500.000,00**			**Tidak**	**Tidak**			**0,00**	**Biro Pengadaan Barang dan Jasa**
			Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran yang berkualitas (%)				***100***			***Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum***						
			Meningkatnya sarana dan prasarana (%)				***100***			***Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum***						
			Tercapainya penyusunan capaian kinerja ikhtisar realisasi kinerja dan keuangan (%)				***100***			***Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum***						
	4.01.4-1.0-0.0-0.01.07.01.1.01	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						45.150.000,00			Tidak	Tidak			-	Biro Pengadaan Barang dan Jasa
			Terlaksananya Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (%)				*100*		*(22 Kab./Kota, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*100*		
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD						29.400.000,00							-	Biro Pengadaan Barang dan Jasa
			terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (paket)				*1*		*(22kab/kota, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*1*		
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD						15.750.000,00							-	Biro Pengadaan Barang dan Jasa
			terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (paket)				*1*		*(22kab/kota, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*1*		
	4.01.4-1.0-0.0-0.01.07.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						250.000.000,00			Tidak	Tidak			-	Biro Pengadaan Barang dan Jasa
			Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah (%)				*100*		*(22 Kab./Kota, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*100*		
		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi						250.000.000,00							-	Biro Pengadaan Barang dan Jasa
			terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi (paket)				*1*		*(22kab/kota, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*1*		
	4.01.4-1.0-0.0-0.01.07.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						185.850.000,00			Tidak	Tidak			-	Biro Pengadaan Barang dan Jasa
			Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah (%)				*100*		*(22 kab./Kota, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*100*		

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode RPJMD	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2020	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RKPD TAHUN 2021	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2023		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2022	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor						3.150.000,00							-	Biro Pengadaan Barang dan Jasa
			terlaksananya Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor (paket)				*1*		*(22kab/kota, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*1*		
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan						9.450.000,00							-	Biro Pengadaan Barang dan Jasa
			terlaksananya Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan (paket)				*1*		*(22kab/kota, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*1*		
		Penyediaan Bahan/Material						47.250.000,00							-	Biro Pengadaan Barang dan Jasa
			terlaksananya Penyediaan Bahan/Material (paket)				*1*		*(22kab/kota, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*1*		
		Fasilitasi Kunjungan Tamu						78.750.000,00							-	Biro Pengadaan Barang dan Jasa
			terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu (paket)				*1*		*(kota kupang, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*1*		
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						47.250.000,00							-	Biro Pengadaan Barang dan Jasa
			terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (paket)				*1*		*(22kab/kota, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*1*		
	4.01.4-1.0-0.0-0.01.07.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						99.750.000,00			Tidak	Tidak			-	Biro Pengadaan Barang dan Jasa
			Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (%)				*100*		*(22 Kab./Kota, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*100*		
		Pengadaan Mebel						78.750.000,00							-	Biro Pengadaan Barang dan Jasa
			terlaksananya Pengadaan Mebel (paket)				*1*		*(22kab/kota, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*1*		
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya						21.000.000,00							-	Biro Pengadaan Barang dan Jasa
			terlaksananya Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya (paket)				*1*		*(22kab/kota, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*1*		
	4.01.4-1.0-0.0-0.01.07.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						753.000.000,00			Tidak	Tidak			-	Biro Pengadaan Barang dan Jasa
			Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%)				*100*		*(22 Kab./Kota, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*100*		
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat						52.500.000,00							-	Biro Pengadaan Barang dan Jasa
			terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat (paket)				*1*		*(22kab/kota, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*1*		
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						480.000.000,00							-	Biro Pengadaan Barang dan Jasa
			terlaksananya Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik (paket)				*1*		*(22kab/kota, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*1*		
		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor						10.500.000,00							-	Biro Pengadaan Barang dan Jasa

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode RPJMD	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2020	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RKPD TAHUN 2021	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2023		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2022	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			terlaksananya Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor (paket)				*1*		*(22kab/kota, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*1*		
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						210.000.000,00								Biro Pengadaan Barang dan Jasa
			terlaksananya Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (paket)				*1*		*(22kab/kota, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*1*		
	4.01.4-1.0-0.0-0.01.07.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						99.750.000,00			Tidak	Tidak				Biro Pengadaan Barang dan Jasa
			Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%)				*100*		*(22 Kab./Kota, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*100*		
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						76.750.000,00								Biro Pengadaan Barang dan Jasa
			terlaksananya Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan (paket)				*1*		*(22kab/kota, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*1*		
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						21.000.000,00								Biro Pengadaan Barang dan Jasa
			terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya (paket)				*1*		*(kota kupang, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*1*		
14.	**4.01.4-1.0-0.0-0.01.07.07**	**PROGRAM KEBIJAKAN DAN PELAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA**						**6.498.958.860,00**			**Ya**	**Ya**			**0,00**	**Biro Pengadaan Barang dan Jasa**
			Persentase ketercapaian pelaksanaan layanan barang dan jasa pemerintah daerah (%)				***100***									
	4.01.4-1.0-0.0-0.01.07.07.1.01	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa						5.026.108.860,00			Tidak	Tidak				Biro Pengadaan Barang dan Jasa
			Terlaksananya Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa (%)				*100*		*(22 Kab./Kota, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*100*		
		Pengelolaan Strategi Pengadaan Barang dan Jasa						73.608.860,00								Biro Pengadaan Barang dan Jasa
			terlaksananya Pengelolaan Strategi Pengadaan Barang dan Jasa (paket)				*1*		*(kota kupang, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*1*		
		Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa						4.800.000.000,00								Biro Pengadaan Barang dan Jasa
			terlaksananya Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa (paket)				*1*		*(kota kupang, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*1*		
		Pemantauan dan Evaluasi Pengadaan Barang dan Jasa						154.500.000,00								Biro Pengadaan Barang dan Jasa
			terlaksananya Pemantauan dan Evaluasi Pengadaan Barang dan Jasa (paket)				*1*		*(kota kupang, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*1*		
	4.01.4-1.0-0.0-0.01.07.07.1.02	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik						518.000.000,00			Tidak	Tidak				Biro Pengadaan Barang dan Jasa
			Terlaksananya Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik (%)				*100*		*(22 kab./Kota, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*100*		
		Pengelolaan Sistem Pengadaan secara Elektronik						258.500.000,00								Biro Pengadaan Barang dan Jasa

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode RPJMD	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2020	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RKPD TAHUN 2021	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2023		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2022	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			terlaksananya Pengelolaan Sistem Pengadaan secara Elektronik (paket)				*1*		*(kota kupang, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*1*		
		Pengembangan Sistem Informasi Pengadaan Barang dan Jasa						154.500.000,00								- Biro Pengadaan Barang dan Jasa
			terlaksananya Pengembangan Sistem Informasi Pengadaan Barang dan Jasa (paket)				*1*		*(kota kupang, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*1*		
		Pengelolaan Informasi Pengadaan Barang dan Jasa						105.000.000,00								- Biro Pengadaan Barang dan Jasa
			terlaksananya Pengelolaan Informasi Pengadaan Barang dan Jasa (paket)				*1*		*(kota kupang, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*1*		
	4.01.4-1.0-0.0-0.01.07.07.1.03	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa						952.850.000,00			Tidak	Tidak				- Biro Pengadaan Barang dan Jasa
			Terlaksananya Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa (%)				*100*		*(22 kab./Kota, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*100*		
		Pembinaan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang dan Jasa						200.000.000,00								- Biro Pengadaan Barang dan Jasa
			terlaksananya Pembinaan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang dan Jasa (paket)				*1*		*(kota kupang, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*1*		
		Pembinaan Kelembagaan Pengadaan Barang dan Jasa						542.850.000,00								- Biro Pengadaan Barang dan Jasa
			terlakasananya Pembinaan Kelembagaan Pengadaan Barang dan Jasa (paket)				*1*		*(kota kupang, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*1*		
		Pendampingan, Konsultasi, dan/atau Bimbingan Teknis Pengadaan Barang dan Jasa						210.000.000,00								- Biro Pengadaan Barang dan Jasa
			terlaksananya Pendampingan, Konsultasi, dan/atau Bimbingan Teknis Pengadaan Barang dan Jasa (paket)				*1*		*(kota kupang, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*1*		
	4.02	**SEKRETARIAT DPRD**						**288.579.677.351,00**							**0,00**	
1.	**4.02.4-2.0-0.0-0.01.01**	**PROGRAM ADMINISTRASI UMUM SEKRETARIAT DPRD PROVINSI**						**214.395.129.071,00**			**Tidak**	**Tidak**			**0,00**	**Sekretariat DPRD**
			Cakupan pelayanan administrasi pimpinan (%)				***100***									
	4.02.4-2.0-0.0-0.01.01.1.01	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						116.008.000,00			Tidak	Tidak				- Sekretariat DPRD
			Terlaksananya perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (%)				*100*		*(22 Kab/kota, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*100*		
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						102.500.000,00								- Sekretariat DPRD
			terlaksananya Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (paket)				*1*		*(22kab/kota, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*1*		
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD						13.508.000,00								- Sekretariat DPRD
			terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (paket)				*1*		*(22kab/kota, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*1*		
	4.02.4-2.0-0.0-0.01.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						10.062.498.686,00			Tidak	Tidak				- Sekretariat DPRD

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode RPJMD	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2020	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RKPD TAHUN 2021	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2023		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2022	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah (%)				*100*		*(22 kab/kota, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*100*		
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						10.019.208.186,00								- Sekretariat DPRD
			terlaksananya Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN (paket)				*1*		*(22kab/kota, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*1*		
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD						43.290.500,00								- Sekretariat DPRD
			terlaksanakannya Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (paket)				*1*		*(22kab/kota, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*1*		
	4.02.4-2.0-0.0-0.01.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						74.818.000,00			Tidak	Tidak				- Sekretariat DPRD
		Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai						10.582.000,00								- Sekretariat DPRD
			terlaksananya Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai (paket)				*1*		*(22kab/kota, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*1*		
			terlaksananya Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai (paket)				*1*		*(22kab/kota, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*1*		
		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan						64.236.000,00								- Sekretariat DPRD
			terlaksakannya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (paket)				*1*		*(22kab/kota, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*1*		
	4.02.4-2.0-0.0-0.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						1.536.635.552,00			Tidak	Tidak				- Sekretariat DPRD
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor						95.280.650,00								- Sekretariat DPRD
			terlaksananya Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor (paket)				*1*		*(22kab/kota, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*1*		
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga						65.919.532,00								- Sekretariat DPRD
			terlaksananya Penyediaan Peralatan Rumah Tangga (paket)				*1*		*(22kab/kota, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*1*		
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						187.910.000,00								- Sekretariat DPRD
			terlaksananya Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan (paket)				*1*		*(22kab/kota, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*1*		
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan						590.474.600,00								- Sekretariat DPRD
			terlaksananya Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan (paket)				*1*		*(22kab/kota, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*1*		
		Penyediaan Bahan/Material						327.781.770,00								- Sekretariat DPRD
			terlaksananya Penyediaan Bahan/Material (paket)				*1*		*(22kab/kota, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*1*		
		Fasilitasi Kunjungan Tamu						166.494.000,00								- Sekretariat DPRD
			terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu (paket)				*1*		*(22kab/kota, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*1*		

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode RPJMD	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2020	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RKPD TAHUN 2021	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2023		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2022	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						102.775.000,00							-	Sekretariat DPRD
			terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (paket)				*1*		*(22kab/kota, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*1*		
	4.02.4-2.0-0.0-0.01.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						126.312.325.000,00			Tidak	Tidak			-	Sekretariat DPRD
		Pengadaan Mebel						799.625.000,00							-	Sekretariat DPRD
			terlaksananya Pengadaan Mebel (paket)				*1*		*(22kab/kota, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*1*		
		Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						125.512.700.000,00							-	Sekretariat DPRD
			terlaksananya Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya (paket)				*1*		*(22kab/kota, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*1*		
	4.02.4-2.0-0.0-0.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						3.858.461.520,00			Tidak	Tidak			-	Sekretariat DPRD
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat						17.749.320,00							-	Sekretariat DPRD
			terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat (paket)				*1*		*(22kab/kota, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*1*		
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						1.228.228.200,00							-	Sekretariat DPRD
			terlaksanakannya Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik (paket)				*1*		*(22kab/kota, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*1*		
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						2.612.484.000,00							-	Sekretariat DPRD
			terlaksanakannya Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (paket)				*1*		*(22kab/kota, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*1*		
	4.02.4-2.0-0.0-0.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						2.278.156.290,00			Tidak	Tidak			-	Sekretariat DPRD
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						105.130.450,00							-	Sekretariat DPRD
			terlaksananya Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan (paket)				*1*		*(22kab/kota, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*1*		
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						186.548.400,00							-	Sekretariat DPRD
			terlaksanakannya Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan (paket)				*1*		*(22kab/kota, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*1*		
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						355.037.334,00							-	Sekretariat DPRD
			terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya (paket)				*1*		*(22kab/kota, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*1*		
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya						1.631.440.106,00							-	Sekretariat DPRD

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode RPJMD	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2020	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RKPD TAHUN 2021	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2023		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2022	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan						764.790.382,00								Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
			terlaksananya Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan (paket)				*1*		*(kota kupang, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*1*		
		Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)						225.883.886,00								Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
			terlaksananya Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD) (paket)				*1*		*(kota kupang, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*1*		
		Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia						63.823.121,00								Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
			terlaksananya Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia (paket)				*1*		*(Kota kupang, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*1*		
		Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia						872.621.227,00								Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
			terlaksananya Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia (paket)				*1*		*(kota kupang, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*1*		
		Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia						657.414.713,00								Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
			terlaksananya Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (paket)				*1*		*(kota kupang, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*1*		
	5.01.5-1.5-5.0-0.02.03.1.02	Koordinasi Peemcanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)						1.526.380.245,00			Tidak	Tidak				Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
			Terlaksananya oordinasi Peerncanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam) (%)				*100*		*(22 kab/kota, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*100*		
		Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian						418.373.060,00								Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
			terlaksananya Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (paket)				*1*		*(kota kupang, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*1*		
		Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)						570.517.932,00								Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode RPJMD	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2020	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RKPD TAHUN 2021	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2023		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2022	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		Pembahasan Rancangan Perda						1.076.072.200,00		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum						- Sekretariat DPRD
			terlaksananya Pembahasan Rancangan Perda (paket)				*1*		*(22kab/kota, NUSA TENGGARA TIMUR)*	*Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum*				*1*		
		Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan						1.497.828.000,00		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum						- Sekretariat DPRD
			terlaksananya Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan (paket)				*1*		*(22kab/kota, NUSA TENGGARA TIMUR)*	*Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum*				*1*		
		Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan dan/atau Naskah Akademik						560.000.000,00								- Sekretariat DPRD
			terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan dan/atau Naskah Akademik (paket)				*1*		*(22kab/kota, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*1*		
		Penyusunan Tata Tertib DPRD						725.520.940,00								- Sekretariat DPRD
			terlaksanakannya Penyusunan Tata Tertib DPRD (paket)				*1*		*(22kab/kota, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*1*		
	4.02.4-2.0-0.0-0.01.02.1.02	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD						4.746.565.250,00		Dana Perimbangan , Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Tidak	Tidak				- Sekretariat DPRD
			Terlaksananya Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD (%)				*100*		*(22 kab/kota, NUSA TENGGARA TIMUR)*	*Dana Perimbangan , Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum*				*100*		
		Pembahasan KUA dan PPAS						34.490.000,00								- Sekretariat DPRD
			terlaksananya Pembahasan KUA dan PPAS (paket)				*1*		*(22kab/kota, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*1*		
		Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS						21.400.000,00								- Sekretariat DPRD
			terlaksanakannya Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS (paket)				*1*		*(22kab/kota, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*1*		
		Pembahasan Perubahan APBD						3.046.869.000,00		Dana Perimbangan , Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum						- Sekretariat DPRD
			terlaksananya Pembahasan Perubahan APBD (paket)				*1*		*(22kab/kota, NUSA TENGGARA TIMUR)*	*Dana Perimbangan , Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum*				*1*		
		Pembahasan Laporan Semester						15.200.000,00								- Sekretariat DPRD
			terlaksananya Pembahasan Laporan Semester (paket)				*1*		*(22kab/kota, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*1*		
		Pembahasan Pertanggungjawaban APBD						1.628.606.250,00		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum						- Sekretariat DPRD
			terlaksananya Pembahasan Pertanggungjawaban APBD (paket)				*1*		*(22kab/kota, NUSA TENGGARA TIMUR)*	*Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum*				*1*		
	4.02.4-2.0-0.0-0.01.02.1.03	Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan						25.168.355.000,00			Tidak	Tidak				- Sekretariat DPRD
			Terlaksananya Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan (%)				*100*		*(22 kab/kota, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*100*		

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode RPJMD	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2020	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RKPD TAHUN 2021	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2023		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2022	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum						4.387.106.000,00							-	Sekretariat DPRD
			terlakasananya Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum (paket)				*1*		*(22kab/kota, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*1*		
		Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur						5.551.226.000,00							-	Sekretariat DPRD
			terlaksananya Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur (paket)				*1*		*(22kab/kota, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*1*		
		Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat						5.551.226.000,00							-	Sekretariat DPRD
			terlaksananya Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat (paket)				*1*		*(22kab/kota, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*1*		
		Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian						2.844.392.000,00							-	Sekretariat DPRD
			terlaksananya Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian (paket)				*1*		*(22kab/kota, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*1*		
		Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam						2.135.224.000,00							-	Sekretariat DPRD
			terlaksananya Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam (paket)				*1*		*(22kab/kota, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*1*		
		Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan						2.013.617.000,00							-	Sekretariat DPRD
			terlaksananya Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (paket)				*1*		*(22kab/kota, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*1*		
		Pengawasan Penggunaan Anggaran						2.685.564.000,00							-	Sekretariat DPRD
			terlaksananya Pengawasan Penggunaan Anggaran (paket)				*1*		*(22kab/kota, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*1*		
	4.02.4-2.0-0.0-0.01.02.1.04	Peningkatan Kapasitas DPRD						3.089.020.020,00		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Tidak	Tidak			-	Sekretariat DPRD
			Terlaksananya Peningkatan Kapasitas DPRD (%)				*100*		*(22 kab/kota, NUSA TENGGARA TIMUR)*	*Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum*				*100*		
		Bimbingan Teknis DPRD						967.703.000,00							-	Sekretariat DPRD
			terlaksananya Bimbingan Teknis DPRD (paket)				*1*		*(22kab/kota, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*1*		
		Publikasi dan Dokumentasi Dewan						553.341.200,00		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum					-	Sekretariat DPRD
			terlaksananya Publikasi dan Dokumentasi Dewan (paket)				*1*		*(22kab/kota, NUSA TENGGARA TIMUR)*	*Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum*				*1*		
		Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli						527.290.000,00		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum					-	Sekretariat DPRD
			terlaksananya Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli (paket)				*1*		*(22kab/kota, NUSA TENGGARA TIMUR)*	*Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum*				*1*		
		Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi						540.000.000,00							-	Sekretariat DPRD

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode RPJMD	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2020	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RKPD TAHUN 2021	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2023		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2022	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			terlaksananya Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi (paket)				*1*		*(22kab/kota, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*1*		
		Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat						412.919.020,00							-	Sekretariat DPRD
			terlaksananya Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat (paket)				*1*		*(22kab/kota, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*1*		
		Penyusunan Program Kerja DPRD						87.766.800,00							-	Sekretariat DPRD
			terlaksananya Penyusunan Program Kerja DPRD (paket)				*1*		*(22kab/kota, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*1*		
	4.02.4-2.0-0.0-0.01.02.1.05	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat						26.107.818.320,00			Tidak	Tidak			-	Sekretariat DPRD
			Terlaksananya Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat (%)				*100*		*(22 kab/kota, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*100*		
		Kunjungan Kerja dalam Daerah						2.653.654.000,00							-	Sekretariat DPRD
			terlaksananya Kunjungan Kerja dalam Daerah (paket)				*1*		*(22kab/kota, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*1*		
		Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD						62.072.320,00							-	Sekretariat DPRD
			terlaksananya Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD (paket)				*1*		*(22kab/kota, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*1*		
		Pelaksanaan Reses						23.392.092.000,00							-	Sekretariat DPRD
			terlaksananya Pelaksanaan Reses (paket)				*1*		*(22kab/kota, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*1*		
	4.02.4-2.0-0.0-0.01.02.1.06	Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD						441.575.000,00			Tidak	Tidak			-	Sekretariat DPRD
			Terlaksananya Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD (%)				*100*		*(22 kab/kota, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*100*		
		Pengawasan Kode Etik DPRD						441.575.000,00							-	Sekretariat DPRD
			terlaksananya Pengawasan Kode Etik DPRD (paket)				*1*		*(22kab/kota, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*1*		
	4.02.4-2.0-0.0-0.01.02.1.08	Fasilitasi Tugas DPRD						8.570.629.750,00			Tidak	Tidak			-	Sekretariat DPRD
			Terlaksananya Fasilitasi Tugas DPRD (%)				*100*		*(22 kab/kota, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*100*		
		Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD						2.355.168.000,00							-	Sekretariat DPRD
			terlaksananya Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD (paket)				*1*		*(22kab/kota, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*1*		
		Penyusunan Laporan Kinerja DPRD						458.562.750,00							-	Sekretariat DPRD
			terlaksananya Penyusunan Laporan Kinerja DPRD (paket)				*1*		*(22kab/kota, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*1*		
		Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah						5.756.899.000,00							-	Sekretariat DPRD
			terlaksanakannya Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah (paket)				*1*		*(22kab/kota, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*1*		
	5	**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**						**1.287.145.382.804,00**							**0,00**	

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode RPJMD	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2020	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RKPD TAHUN 2021	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2023		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2022	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.01	**PERENCANAAN**						**31.360.891.469,00**							**0,00**	
1.	**5.01.5-1.5-5.0-0.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**						**20.546.742.014,00**			**Tidak**	**Tidak**			**0,00**	**Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah**
	5.01.5-1.5-5.0-0.02.01.1.01	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						936.494.574,00		Dana Perimbangan	Tidak	Tidak			-	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						52.011.200,00							-	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
			terlajsananya Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (paket)				*1*		*(kota kupang, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*1*		
			terlaksananya Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (paket)				*1*		*(Kota Kupang, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*1*		
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD						100.000.000,00		Dana Perimbangan					-	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
			terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (paket)				*1*		*(kota kupang, NUSA TENGGARA TIMUR)*	*Dana Perimbangan*				*1*		
			terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (paket)				*1*		*(Kotra Kupang, NUSA TENGGARA TIMUR)*	*Dana Perimbangan*				*1*		
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD						150.000.000,00		Dana Perimbangan					-	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
			terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (paket)				*1*		*(kota kupang, NUSA TENGGARA TIMUR)*	*Dana Perimbangan*				*1*		
			terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (paket)				*1*		*(kota kupang, NUSA TENGGARA TIMUR)*	*Dana Perimbangan*				*1*		
		Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD						3.127.160,00							-	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
			terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD (paket)				*1*		*(kota kupang, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*1*		
			Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD (paket)				*1*		*(Kota Kupang, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*1*		
		Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD						3.160.910,00							-	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
			Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD (paket)				*1*		*(Kota Kupang, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*1*		
			Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD (paket)				*1*		*(Kota Kupang, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*1*		

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode RPJMD	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2020	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RKPD TAHUN 2021	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2023		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2022	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD						108.045.970,00							-	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
			Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (paket)				*1*		*(Kota Kupang, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*1*		
			Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (paket)				*1*		*(Kota Kupang, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*1*		
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						520.149.334,00							-	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
			Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (paket)				*1*		*(Kota Kupang, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*1*		
	5.01.5-1.5-5.0-0.02.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						17.028.182.760,00		Dana Perimbangan	Tidak	Tidak			-	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						16.237.929.000,00		Dana Perimbangan					-	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
			terlaksananya Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN (paket)				*1*		*(Kota Kupang, NUSA TENGGARA TIMUR)*	*Dana Perimbangan*				*1*		
		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD						790.253.760,00							-	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
			terlaksananya Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (paket)				*1*		*(Kota Kupang, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*1*		
	5.01.5-1.5-5.0-0.02.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah						260.462.000,00			Tidak	Tidak			-	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
		Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD						232.937.760,00							-	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
			terlaksananya Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD (paket)				*1*		*(kota kupang, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*1*		
		Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD						27.524.240,00							-	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
			terlaksananya Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (paket)				*1*		*(kota kupang, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*1*		
	5.01.5-1.5-5.0-0.02.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						244.740.800,00			Tidak	Tidak			-	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
		Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai						30.773.920,00							-	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode RPJMD	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2020	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RKPD TAHUN 2021	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2023		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2022	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			terlaksananya Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai (paket)				*1*		*(kota kupang, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*1*		
		Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian						80.194.880,00								- Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
			terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (paket)				*1*		*(kota kupang, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*1*		
		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi						133.772.000,00								- Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
			terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi (PAKET)				*1*		*(kota kupang, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*1*		
	5.01.5-1.5-5.0-0.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						610.644.300,00			Tidak	Tidak				- Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor						18.555.200,00								- Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
			terlaksananya Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor (Paket)				*1*		*(kota kupang, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*1*		
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						19.573.300,00								- Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
			terlaksananya Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan (paket)				*1*		*(kota kupang, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*1*		
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan						17.596.800,00								- Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
			terlaksananya Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan (paket)				*1*		*(kota kupang, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*1*		
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						554.919.000,00								- Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
			terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (paket)				*1*		*(kota kupang, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*1*		
	5.01.5-1.5-5.0-0.02.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						223.660.000,00			Tidak	Tidak				- Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						223.660.000,00								- Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
			terlaksananya Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya (paket)				*1*		*(kota kupang, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*1*		

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode RPJMD	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2020	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RKPD TAHUN 2021	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2023		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2022	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.01.5-1.5-5.0-0.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						799.206.910,00		Dana Perimbangan	Tidak	Tidak			-	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat						14.680.000,00							-	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
			terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat (paket)				*1*		*(kota kupang, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*1*		
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						626.091.330,00							-	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
			terlaksananya Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik (paket)				*1*		*(kota kupang, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*1*		
		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor						65.350.720,00							-	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
			terlaksananya Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor (paket)				*1*		*(kota kupang, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*1*		
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						93.084.860,00		Dana Perimbangan					-	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
			terlaksananya Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (paket)				*1*		*(kota kupang, NUSA TENGGARA TIMUR)*	*Dana Perimbangan*				*1*		
	5.01.5-1.5-5.0-0.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						443.350.670,00			Tidak	Tidak			-	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						291.533.670,00							-	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
			terlaksananya Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan (paket)				*1*		*(kota kupang, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*1*		
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya						90.817.000,00							-	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
			terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya (paket)				*1*		*(kota kupang, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*1*		
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						61.000.000,00							-	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
			terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya (paket)				*1*		*(kota kupang, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*1*		
2.	**5.01.5-1.5-5.0-0.02.02**	**PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH**						**3.499.680.938,00**			**Ya**	**Ya**			**0,00**	**Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah**

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode RPJMD	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2020	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RKPD TAHUN 2021	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2023		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2022	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Konsistensi penjabaran Program-Program RPJMD ke dalam RKPD Provinsi Persentase Cakupan Pemanfaatan hasil Pengendalian dan Evaluasi.				***100***									
	5.01.5-1.5-5.0-0.02.02.1.01	Koordinasi Perencanaan Pembangunan Daerah						1.308.714.773,00			Tidak	Tidak			-	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
			Terlaksananya Koordinasi Perencanaan Pembangunan Daerah (%)				*100*		*(22 kab/kota, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*100*		
		Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya						132.892.275,00							-	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
			terlaksananya Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya (paket)				*1*		*(Kota Kupang, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*1*		
			trrlaksananya Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya (paket)				*1*		*(kota kupang, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*1*		
		Koordinasi Pelaksanaaan Forum SKPD/Lintas SKPD						123.500.583,00							-	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
			terlaksananya Koordinasi Pelaksanaaan Forum SKPD/Lintas SKPD (paket)				*1*		*(Kota Kupang, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*1*		
			terlaksananya Koordinasi Pelaksanaaan Forum SKPD/Lintas SKPD (paket)				*1*		*(kota kupang, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*1*		
		Pelaksanaan Musrenbang Provinsi						178.933.746,00							-	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
			terlaksananya Pelaksanaan Musrenbang Provinsi (paket)				*1*		*(Kota Kupang, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*1*		
			terlaksananya Pelaksanaan Musrenbang Provinsi (paket)				*1*		*(kota kupang, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*1*		
		Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi						873.388.169,00							-	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
			Terlaksananya Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi (paket)				*1*		*(NUSA TENGGARA TIMUR)*					*1*		
			terlaksananya Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi (paket)				*1*		*(kota kupang, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*1*		
	5.01.5-1.5-5.0-0.02.02.1.02	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah						1.433.968.295,00			Tidak	Tidak			-	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode RPJMD	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2020	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RKPD TAHUN 2021	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2023		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2022	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Terlaksananya Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah (%)				*100*		*(22 kab/kota, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*100*		
		Analisis Data dan informasi Perencanaan Pembangunan Daerah						31.303.091,00								- Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
			terlaksananya Analisis Data dan informasi Perencanaan Pembangunan Daerah (paket)				*1*		*(kota kupang, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*1*		
			terlaksananya Analisis Data dan informasi Perencanaan Pembangunan Daerah (paket)				*1*		*(kota kupang, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*1*		
		Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan SKPD						1.045.044.161,00								- Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
			terlaksananya Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan SKP (paket)				*1*		*(kota kupang, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*1*		
			terlaksananya Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan SKPD (paket)				*1*		*(kota kupang, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*1*		
		Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota						357.621.043,00								- Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
			terlaksananya Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota (paket)				*1*		*(kota kupang, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*1*		
			terlaksananya Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota (paket)				*1*		*(kota kupang, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*1*		
	5.01.5-1.5-5.0-0.02.02.1.03	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah						756.997.870,00			Tidak	Tidak				- Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
			Terlaksananya Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah (%)				*100*		*(22 kab/kota, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*100*		
		Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Provinsi						270.990.991,00								- Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
			terlaksananya Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Provinsi (paket)				*1*		*(kota kupang, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*1*		
		Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah						445.291.051,00								- Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
			terlaksananya Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah (paket)				*1*		*(kota kupang, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*1*		

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode RPJMD	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2020	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RKPD TAHUN 2021	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2023		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2022	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		Fasilitasi/Evaluasi Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota						40.715.828,00							-	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
			terlaksananya Fasilitasi/Evaluasi Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota (paket)				*1*		*(kota kupang, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*1*		
3.	**5.01.5-1.5-5.0-0.02.03**	**PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**						**7.314.468.517,00**			**Ya**	**Ya**			**0,00**	**Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan**
			Kesesuaian Dokumen perencanaan (RPJMD, RKPD, PPAS, Renstra, Renja, RKA, DPA) Perangkat Daerah Provinsi, lingkup bidang: - Pemerintahan dan Pembangunan manusia				***100***									
			Kesesuaian Dokumen perencanaan (RPJMD, RKPD, PPAS, Renstra, Renja, RKA, DPA) Perangkat Daerah Provinsi, lingkup bidang: - SDA				***100***									
			Kesesuaian Dokumen perencanaan (RPJMD, RKPD, PPAS, Renstra, Renja, RKA, DPA) Perangkat Daerah Provinsi, lingkup bidang: - Infrastrukur dan Kewilayahan				***100***									
	5.01.5-1.5-5.0-0.02.03.1.01	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia						3.241.317.486,00			Tidak	Tidak			-	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
			Terlaksananya Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia (%)				*100*		*(22 kab/kota, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*100*		
		Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)						548.140.918,00							-	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
			terlaksananya Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD) (paket)				*1*		*(kota kupang, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*1*		
		Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan						108.643.239,00							-	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
			terlaksananya Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan (paket)				*1*		*(kota kupang, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*1*		

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode RPJMD	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2020	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RKPD TAHUN 2021	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2023		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2022	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya (paket)				*1*		*(22kab/kota, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*1*		
	4.02.4-2.0-0.0-0.01.01.1.15	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD						64.085.062.033,00			Tidak	Tidak			-	Sekretariat DPRD
		Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD						62.579.539.283,00							-	Sekretariat DPRD
			terlaksanakannya Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD (paket)				*1*		*(22kab/kota, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*1*		
		Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD						1.108.450.000,00							-	Sekretariat DPRD
			terlaksananya Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD (paket)				*1*		*(22kab/kota, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*1*		
		Pelaksanaan Medical Check Up DPRD						397.072.750,00							-	Sekretariat DPRD
			terlaksanakannya Pelaksanaan Medical Check Up DPRD (paket)				*1*		*(22kab/kota, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*1*		
	4.02.4-2.0-0.0-0.01.01.1.16	Layanan Adminstrasi DPRD						6.071.163.990,00			Tidak	Tidak			-	Sekretariat DPRD
		Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD						10.636.230,00							-	Sekretariat DPRD
			terlaksananya Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD (paket)				*1*		*(22kab/kota, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*1*		
		Fasilitasi Fraksi DPRD						492.167.760,00							-	Sekretariat DPRD
			terlaksananya Fasilitasi Fraksi DPRD (paket)				*1*		*(22kab/kota, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*1*		
		Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD						906.750.000,00							-	Sekretariat DPRD
			terlaksananya Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD (paket)				*1*		*(22kab/kota, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*1*		
		Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD						4.661.610.000,00							-	Sekretariat DPRD
			terlaksanakannya Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD (paket)				*1*		*(22kab/kota, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*1*		
2.	**4.02.4-2.0-0.0-0.01.02**	**PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD**						**74.184.548.280,00**			**Ya**	**Ya**			**0,00**	**Sekretariat DPRD**
			Cakupan fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD (Jumlah peraturan daerah yang dihasilkan)				***100***									
	4.02.4-2.0-0.0-0.01.02.1.01	Layanan Administrasi DPRD						6.060.584.940,00		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Tidak	Tidak			-	Sekretariat DPRD
			Terlaksananya Layanan Administrasi DPRD (%)				*100*		*(22 kab/kota, NUSA TENGGARA TIMUR)*	*Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum*				*100*		
		Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah						2.201.163.800,00							-	Sekretariat DPRD
			terlaksananya Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah (paket)				*1*		*(22kab/kota, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*1*		

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode RPJMD	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2020	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RKPD TAHUN 2021	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2023		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2022	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			terlaksananya Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD) (paket)				*1*		*(kota kupang, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*1*		
		Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA						100.743.363,00								Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
			terlaksananya Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA (paket)				*1*		*(kota kupang, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*1*		
		Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA						436.745.890,00								Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
			terlaksananya Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA (paket)				*1*		*(kota kupang, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*1*		
	5.01.5-1.5-5.0-0.02.03.1.03	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan						2.546.770.786,00			Tidak	Tidak				Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
			Terlaksananya Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan (%)				*100*		*(22 kab/kota, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*100*		
		Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur						431.770.037,00								Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
			terlaksananya Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (paket)				*1*		*(kota kupang, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*1*		
			terlaksananya Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (paket)				*1*		*(kota kupang, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*1*		
		Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)						1.300.719.812,00								Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
			terlaksananya Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD) (paket)				*1*		*(kota kupang, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*1*		
			terlaksananya Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD) (paket)				*1*		*(kota kupang, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*1*		
		Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan						118.215.253,00								Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
			terlaksananya Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan (paket)				*1*		*(kota kupang, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*1*		

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode RPJMD	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2020	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RKPD TAHUN 2021	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2023		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2022	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan						407.315.544,00							-	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
			terlaksananya Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan (paket)				*1*		*(kota kupang, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*1*		
			terlaksananya Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan (paket)				*1*		*(kota kupang, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*1*		
		Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan						288.750.140,00							-	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
			terlaksananya Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (paket)				*1*		*(kota kupang, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*1*		
			terlaksananya Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (paket)				*1*		*(kota kupang, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*1*		
	5.02	**KEUANGAN**						**1.146.406.462.228,00**							**0,00**	
1.	**5.02.5-2.0-0.0-0.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**						**81.493.053.376,00**			**Tidak**	**Tidak**			**0,00**	**Badan Keuangan Daerah**
			Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran yang berkualitas (%)				***100***									
			Meningkatnya sarana dan prasarana (%)				***100***									
			Tercapainya penyusunan capaian kinerja ikhtisar realisasi kinerja dan keuangan (%)				***100***									
	5.02.5-2.0-0.0-0.01.01.1.01	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						904.162.000,00		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Tidak	Tidak			-	Badan Keuangan Daerah
			Terlaksananya Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (%)				*100*		*(22 Kab/kota, NUSA TENGGARA TIMUR)*	*Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum*				*100*		
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						250.000.000,00		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum					-	Badan Keuangan Daerah
			terlaksananya Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (paket)				*1*		*(kota kupang, NUSA TENGGARA TIMUR)*	*Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum*				*1*		
			terlaksananya Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (paket)				*1*		*(kota kupang, NUSA TENGGARA TIMUR)*	*Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum*				*1*		
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD						164.162.000,00							-	Badan Keuangan Daerah

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode RPJMD	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2020	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RKPD TAHUN 2021	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2023		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2022	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (paket)				*1*		*(kota kupang, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*1*		
			terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (paket)				*1*		*(kota kupang, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*1*		
		Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD						100.000.000,00		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum						- Badan Keuangan Daerah
			terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD (paket)				*1*		*(kota kupang, NUSA TENGGARA TIMUR)*	*Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum*				*1*		
			terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD (paket)				*1*		*(kota kupang, NUSA TENGGARA TIMUR)*	*Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum*				*1*		
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD						290.000.000,00		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum						- Badan Keuangan Daerah
			terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (paket)				*1*		*(kota kupang, NUSA TENGGARA TIMUR)*	*Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum*				*1*		
			terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (paket)				*1*		*(kota kupang, NUSA TENGGARA TIMUR)*	*Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum*				*1*		
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						100.000.000,00		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum						- Badan Keuangan Daerah
			terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (paket)				*1*		*(kota kupang, NUSA TENGGARA TIMUR)*	*Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum*				*1*		
			terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (paket)				*1*		*(kota kupang, NUSA TENGGARA TIMUR)*	*Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum*				*1*		
	5.02.5-2.0-0.0-0.01.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						72.473.729.728,00		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Tidak	Tidak				- Badan Keuangan Daerah
			Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah (%)				*100*		*(22 Kab/Kota, NUSA TENGGARA TIMUR)*	*Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum*				*100*		
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						26.586.818.264,00								- Badan Keuangan Daerah
			terlaksananya Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN (paket)				*1*		*(kota kupang, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*1*		
		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN						2.476.535.000,00								- Badan Keuangan Daerah
			terlaksananya Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (paket)				*1*		*(kota kupang, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*1*		
		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD						42.745.494.580,00								- Badan Keuangan Daerah
			terlaksananya Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (paket)				*1*		*(kota kupang, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*1*		
		Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD						205.719.830,00								- Badan Keuangan Daerah
			terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD (paket)				*1*		*(kota kupang, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*1*		
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD						139.162.144,00								- Badan Keuangan Daerah

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode RPJMD	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2020	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RKPD TAHUN 2021	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2023		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2022	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (paket)				*1*		*(kota kupang, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*1*		
		Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan						34.999.910,00								Badan Keuangan Daerah
			terlaksananya Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan (paket)				*1*		*(kota kupang, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*1*		
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD						160.000.000,00		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum						Badan Keuangan Daerah
			terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (paket)				*1*		*(kota kupang, NUSA TENGGARA TIMUR)*	*Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum*				*1*		
		Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran						125.000.000,00		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum						Badan Keuangan Daerah
			terlaksananya Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (paket)				*1*		*(kota kupang, NUSA TENGGARA TIMUR)*	*Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum*				*1*		
	5.02.5-2.0-0.0-0.01.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah						181.255.930,00			Tidak	Tidak				Badan Keuangan Daerah
			Terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah (%)				*100*		*(22 Kab/Kota, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*100*		
		Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD						49.999.716,00								Badan Keuangan Daerah
			terlaksananya Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (paket)				*1*		*(kota kupang, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*1*		
		Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD						81.256.340,00								Badan Keuangan Daerah
			terlaksananya Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD (Paket)				*1*		*(kota kupang, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*1*		
		Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD						49.999.874,00								Badan Keuangan Daerah
			terlaksananya Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Paket)				*1*		*(kota kupang, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*1*		
	5.02.5-2.0-0.0-0.01.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						449.832.160,00		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Tidak	Tidak				Badan Keuangan Daerah
			Trlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah (%)				*100*		*(22 Kab/Kota, NUSA TENGGARA TIMUR)*	*Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum*				*100*		
		Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian						99.832.160,00								Badan Keuangan Daerah
			terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Paket)				*1*		*(kota kupang, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*1*		
		Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai						50.000.000,00		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum						Badan Keuangan Daerah
			terlakasananya Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai (Paket)				*1*		*(kota kupang, NUSA TENGGARA TIMUR)*	*Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum*				*1*		

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode RPJMD	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2020	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RKPD TAHUN 2021	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2023		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2022	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi						200.000.000,00		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum					-	Badan Keuangan Daerah
			terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi (Paket)				*1*		*(kota kupang, NUSA TENGGARA TIMUR)*	*Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum*				*1*		
		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan						100.000.000,00		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum					-	Badan Keuangan Daerah
			terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Paket)				*1*		*(kota kupang, NUSA TENGGARA TIMUR)*	*Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum*				*1*		
	5.02.5-2.0-0.0-0.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						2.949.409.158,00		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Tidak	Tidak			-	Badan Keuangan Daerah
			Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah (%)				*100*		*(22 Kab/Kota, NUSA TENGGARA TIMUR)*	*Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum*				*100*		
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor						39.494.750,00							-	Badan Keuangan Daerah
			terlaksananya Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor (Paket)				*1*		*(kota kupang, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*1*		
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						19.808.160,00							-	Badan Keuangan Daerah
			telaksananya Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor (paket)				*1*		*(kota kupang, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*1*		
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga						25.106.248,00							-	Badan Keuangan Daerah
			terlaksananya Penyediaan Peralatan Rumah Tangga (paket)				*1*		*(kota kupang, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*1*		
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						475.000.000,00		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum					-	Badan Keuangan Daerah
			terlaksananya Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan (Paket)				*1*		*(kota kupang, NUSA TENGGARA TIMUR)*	*Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum*				*1*		
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan						90.000.000,00		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum					-	Badan Keuangan Daerah
			terlaksananya Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan (Paket)				*1*		*(kota kupang, NUSA TENGGARA TIMUR)*	*Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum*				*1*		
		Penyediaan Bahan/Material						350.000.000,00		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum					-	Badan Keuangan Daerah
			terlaksananya Penyediaan Bahan/Material (paket)				*1*		*(kota kupang, NUSA TENGGARA TIMUR)*	*Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum*				*1*		
		Fasilitasi Kunjungan Tamu						575.000.000,00		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum					-	Badan Keuangan Daerah
			terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu (paket)				*1*		*(kota kupang, NUSA TENGGARA TIMUR)*	*Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum*				*1*		
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						1.000.000.000,00		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum					-	Badan Keuangan Daerah

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode RPJMD	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2020	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RKPD TAHUN 2021	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2023		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2022	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Paket)				*1*		*(kota kupang, NUSA TENGGARA TIMUR)*	*Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum*				*1*		
		Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD						375.000.000,00		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum						- Badan Keuangan Daerah
			terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (paket)				*1*		*(kota kupang, NUSA TENGGARA TIMUR)*	*Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum*				*1*		
	5.02.5-2.0-0.0-0.01.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						750.000.000,00		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Tidak	Tidak				- Badan Keuangan Daerah
			Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (%)				*100*		*(22Kab/Kota, NUSA TENGGARA TIMUR)*	*Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum*				*100*		
		Pengadaan Mebel						250.000.000,00		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum						- Badan Keuangan Daerah
			terlaksananya Pengadaan Mebel (Paket)				*1*		*(kota kupang, NUSA TENGGARA TIMUR)*	*Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum*				*1*		
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya						500.000.000,00		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum						- Badan Keuangan Daerah
			terlaksananya Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya (paket)				*1*		*(kota kupang, NUSA TENGGARA TIMUR)*	*Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum*				*1*		
	5.02.5-2.0-0.0-0.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						2.710.000.000,00		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Tidak	Tidak				- Badan Keuangan Daerah
			Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%)				*100*		*(22 Kab/kota, NUSA TENGGARA TIMUR)*	*Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum*				*100*		
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat						60.000.000,00		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum						- Badan Keuangan Daerah
			terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat (paket)				*1*		*(kota kupang, NUSA TENGGARA TIMUR)*	*Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum*				*1*		
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						1.000.000.000,00		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum						- Badan Keuangan Daerah
			terlaksananya Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik (paket)				*1*		*(kota kupang, NUSA TENGGARA TIMUR)*	*Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum*				*1*		
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						1.650.000.000,00		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum						- Badan Keuangan Daerah
			tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor (Paket)				*1*		*(kota kupang, NUSA TENGGARA TIMUR)*	*Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum*				*1*		
	5.02.5-2.0-0.0-0.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						1.074.664.400,00		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Tidak	Tidak				- Badan Keuangan Daerah
			Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%)				*100*		*(22 Kab/Kota, NUSA TENGGARA TIMUR)*	*Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum*				*100*		
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						385.664.400,00								- Badan Keuangan Daerah

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode RPJMD	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2020	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RKPD TAHUN 2021	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2023		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2022	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			terlaksananya Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan (Paket)				*1*		*(kota kupang, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*1*		
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						400.000.000,00		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum					-	Badan Keuangan Daerah
			terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya (paket)				*1*		*(kota kupang, NUSA TENGGARA TIMUR)*	*Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum*				*1*		
		Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya						250.000.000,00		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum					-	Badan Keuangan Daerah
			terlaksananya Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya (paket)				*1*		*(kota kupang, NUSA TENGGARA TIMUR)*	*Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum*				*1*		
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya						39.000.000,00							-	Badan Keuangan Daerah
			terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya (paket)				*1*		*(kota kupang, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*1*		
2.	**5.02.5-2.0-0.0-0.01.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH**						**905.543.938.126,00**			**Ya**	**Ya**			**0,00**	**Badan Keuangan Daerah**
			Persentase Penyampaian dan Penetapan Dokumen Keuangan secara tepat waktu dan sesuai ketentuan perundang - undangan				***100***									
	5.02.5-2.0-0.0-0.01.02.1.01	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah						13.410.000.000,00		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Tidak	Tidak			-	Badan Keuangan Daerah
			Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah (%)				*100*		*(22 kab/kota, NUSA TENGGARA TIMUR)*	*Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum*				*100*		
		Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS						650.000.000,00		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum					-	Badan Keuangan Daerah
			terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS (Paket)				*1*		*(kota kupang, NUSA TENGGARA TIMUR)*	*Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum*				*1*		
		Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS						750.000.000,00		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum					-	Badan Keuangan Daerah
			terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS (paket)				*1*		*(22kab/kota, NUSA TENGGARA TIMUR)*	*Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum*				*1*		
		Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD						235.000.000,00		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum					-	Badan Keuangan Daerah
			terlaksananya Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD (paket)				*1*		*(22kab/kota, NUSA TENGGARA TIMUR)*	*Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum*				*1*		
		Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD						450.000.000,00		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum					-	Badan Keuangan Daerah
			terlaksananya Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD (paket)				*1*		*(22kab/kota, NUSA TENGGARA TIMUR)*	*Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum*				*1*		

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode RPJMD	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2020	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RKPD TAHUN 2021	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2023		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2022	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA- SKPD						350.000.000,00		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum					-	Badan Keuangan Daerah
			terlaksananya Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA- SKPD (paket)				*1*		*(22kab/kota, NUSA TENGGARA TIMUR)*	*Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum*				*1*		
		Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD						450.000.000,00		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum					-	Badan Keuangan Daerah
			terlaksananya Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD (paket)				*1*		*(22kab/kota, NUSA TENGGARA TIMUR)*	*Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum*				*1*		
		Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD						3.200.000.000,00		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum					-	Badan Keuangan Daerah
			terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD (paket)				*1*		*(22kab/kota, NUSA TENGGARA TIMUR)*	*Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum*				*1*		
		Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD						3.250.000.000,00		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum					-	Badan Keuangan Daerah
			terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD (paket)				*1*		*(22kab/kota, NUSA TENGGARA TIMUR)*	*Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum*				*1*		
		Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran						2.650.000.000,00		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum					-	Badan Keuangan Daerah
			terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran (paket)				*1*		*(22kab/kota, NUSA TENGGARA TIMUR)*	*Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum*				*1*		
		Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan						375.000.000,00		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum					-	Badan Keuangan Daerah
			terlaksanakannya Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan (paket)				*1*		*(22kab/kota, NUSA TENGGARA TIMUR)*	*Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum*				*1*		
		Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah						450.000.000,00		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum					-	Badan Keuangan Daerah
			terlaksananya Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah (paket)				*1*		*(22kab/kota, NUSA TENGGARA TIMUR)*	*Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum*				*1*		
		Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan						600.000.000,00		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum					-	Badan Keuangan Daerah
			terlaksananya Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan (paket)				*1*		*(22kab/kota, NUSA TENGGARA TIMUR)*	*Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum*				*1*		
	5.02.5-2.0-0.0-0.01.02.1.02	Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota						3.565.000.000,00		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Tidak	Tidak			-	Badan Keuangan Daerah
			Terlaksananya Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota (%)				*100*		*(22 kab/kota, NUSA TENGGARA TIMUR)*	*Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum*				*100*		
		Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak dan Retribusi Kabupaten/Kota						600.000.000,00		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum					-	Badan Keuangan Daerah

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode RPJMD	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2020	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RKPD TAHUN 2021	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2023		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2022	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			terlaksananya Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak dan Retribusi Kabupaten/Kota (Paket)				*1*		*(22kab/kota, NUSA TENGGARA TIMUR)*	*Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum*				*1*		
		Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Kabupaten/Kota						450.000.000,00		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum					-	Badan Keuangan Daerah
			terlaksananya Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Kabupaten/Kota (paket)				*1*		*(22kab/kota, NUSA TENGGARA TIMUR)*	*Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum*				*1*		
		Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten/Kota						450.000.000,00		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum					-	Badan Keuangan Daerah
			terlaksananya Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten/Kota				*1*		*(22kab/kota, NUSA TENGGARA TIMUR)*	*Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum*				*1*		
		Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota						400.000.000,00		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum					-	Badan Keuangan Daerah
			terlaksananya Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota				*1*		*(22kab/kota, NUSA TENGGARA TIMUR)*	*Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum*				*1*		
		Asistensi Pengeloaan Keuangan Kabupaten/Kota						300.000.000,00		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum					-	Badan Keuangan Daerah
			terlaksananya Asistensi Pengeloaan Keuangan Kabupaten/Kota (paket)				*1*		*(22kab/kota, NUSA TENGGARA TIMUR)*	*Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum*				*1*		
		Sosialisasi Regulasi Bidang Keuangan						500.000.000,00		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum					-	Badan Keuangan Daerah
			terlaksananya Sosialisasi Regulasi Bidang Keuangan (paket)				*1*		*(22kab/kota, NUSA TENGGARA TIMUR)*	*Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum*				*1*		
		Asistensi Pengelolaan Keuangan BLUD Kabupaten/Kota						70.000.000,00		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum					-	Badan Keuangan Daerah
			terlaksananya Asistensi Pengelolaan Keuangan BLUD Kabupaten/Kota (paket)				*1*		*(22kab/kota, NUSA TENGGARA TIMUR)*	*Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum*				*1*		
		Konsultasi dan Koordinasi Pembinaan Penyusunan dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Kabupaten/Kota						55.000.000,00		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum					-	Badan Keuangan Daerah

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode RPJMD	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2020	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RKPD TAHUN 2021	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2023		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2022	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			terlaksanakannya Konsultasi dan Koordinasi Pembinaan Penyusunan dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Kabupaten/Kota				*1*		*(22kab/kota, NUSA TENGGARA TIMUR)*	*Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum*				*1*		
		Konsultasi dan Koordinasi Pembinaan Penyusunan dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD						45.000.000,00		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum					-	Badan Keuangan Daerah
			terlaksanakannya Konsultasi dan Koordinasi Pembinaan Penyusunan dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten/Kota				*1*		*(22kab/kota, NUSA TENGGARA TIMUR)*	*Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum*				*1*		
		Konsultasi dan Koordinasi Pembinaan Penyusunan dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban						45.000.000,00		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum					-	Badan Keuangan Daerah
			terlaksanakannya Konsultasi dan Koordinasi Pembinaan Penyusunan dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota (paket)				*1*		*(22kab/kota, NUSA TENGGARA TIMUR)*	*Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum*				*1*		
		Pembinaan Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah bidang Keuangan Daerah Kabupaten/Kota						400.000.000,00		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum					-	Badan Keuangan Daerah
			terlaksanakannya Pembinaan Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah bidang Keuangan Daerah Kabupaten/Kota (paket)				*1*		*(22kab/kota, NUSA TENGGARA TIMUR)*	*Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum*				*1*		
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Konsolidasian Provinsi dan Kabupaten/Kota dan Statistik Keuangan Pemerintahan Daerah						250.000.000,00		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum					-	Badan Keuangan Daerah
			terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Konsolidasian Provinsi dan Kabupaten/Kota dan Statistik Keuangan Pemerintahan Daerah (paket)				*1*		*(22kab/kota, NUSA TENGGARA TIMUR)*	*Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum*				*1*		
	5.02.5-2.0-0.0-0.01.02.1.03	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah						3.800.000.000,00		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Tidak	Tidak			-	Badan Keuangan Daerah
			Terlaksananya Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah (%)				*100*		*(22 kab/kota, NUSA TENGGARA TIMUR)*	*Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum*				*100*		

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode RPJMD	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2020	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RKPD TAHUN 2021	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2023		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2022	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah						1.000.000.000,00		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum					-	Badan Keuangan Daerah
			terlaksananya Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah (paket)				*1*		*(22kab/kota, NUSA TENGGARA TIMUR)*	*Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum*				*1*		
		Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD						200.000.000,00		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum					-	Badan Keuangan Daerah
			terlakasananya Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD (paket)				*1*		*(22kab/kota, NUSA TENGGARA TIMUR)*	*Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum*				*1*		
		Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya						800.000.000,00		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum					-	Badan Keuangan Daerah
			terlaksanakannya Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya (paket)				*1*		*(22kab/kota, NUSA TENGGARA TIMUR)*	*Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum*				*1*		
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)						400.000.000,00		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum					-	Badan Keuangan Daerah
			terlaksanakannya Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) (paket)				*1*		*(22kab/kota, NUSA TENGGARA TIMUR)*	*Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum*				*1*		
		Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas						600.000.000,00		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum					-	Badan Keuangan Daerah
			terlaksanakannya Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas				*1*		*(22kab/kota, NUSA TENGGARA TIMUR)*	*Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum*				*1*		
		Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan						800.000.000,00		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum					-	Badan Keuangan Daerah
			terlaksanakannya Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan (paket)				*1*		*(22kab/kota, NUSA TENGGARA TIMUR)*	*Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum*				*1*		
	5.02.5-2.0-0.0-0.01.02.1.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah						4.269.980.432,00		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Tidak	Tidak			-	Badan Keuangan Daerah

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode RPJMD	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2020	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RKPD TAHUN 2021	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2023		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2022	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah (%)				*100*		*(22 kab/kota, NUSA TENGGARA TIMUR)*	*Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum*				*100*		
		Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah						79.980.432,00								Badan Keuangan Daerah
			terlaksananya Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah (paket)				*1*		*(22kab/kota, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*1*		
		Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban						900.000.000,00		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum						Badan Keuangan Daerah
			terlaksananya Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban (paket)				*1*		*(22kab/kota, NUSA TENGGARA TIMUR)*	*Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum*				*1*		
		Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran						1.300.000.000,00		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum						Badan Keuangan Daerah
			terlaksanakannya Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran (paket)				*1*		*(22kab/kota, NUSA TENGGARA TIMUR)*	*Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum*				*1*		
		Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD						1.500.000.000,00		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum						Badan Keuangan Daerah
			terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi (paket)				*1*		*(22kab/kota, NUSA TENGGARA TIMUR)*	*Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum*				*1*		
		Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah						150.000.000,00		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum						Badan Keuangan Daerah
			terlaksanakannya Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah (paket)				*1*		*(22kab/kota, NUSA TENGGARA TIMUR)*	*Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum*				*1*		
		Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah						200.000.000,00		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum						Badan Keuangan Daerah
			terlaksanakannya Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah (paket)				*1*		*(22kab/kota, NUSA TENGGARA TIMUR)*	*Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum*				*1*		
		Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Provinsi						140.000.000,00		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum						Badan Keuangan Daerah
			terlaksanakannya Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Provinsi (paket)				*1*		*(22kab/kota, NUSA TENGGARA TIMUR)*	*Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum*				*1*		

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode RPJMD	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2020	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RKPD TAHUN 2021	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2023		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2022	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.02.5-2.0-0.0-0.01.02.1.05	Kegiatan Penunjang Urusan						880.498.957.694,00			Tidak	Tidak				- Badan Keuangan Daerah
			Terlaksananya Kegiatan Penunjang Urusan (%)				*100*		*(22 kab/kota, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*100*		
		Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah						41.272.935.029,00								- Badan Keuangan Daerah
			terlaksanakannya Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah (paket)				*1*		*(22kab/kota, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*1*		
		Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan						115.405.891.134,00								- Badan Keuangan Daerah
			terlaksanakannya Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan (paket)				*1*		*(22kab/kota, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*1*		
		Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak						82.030.111.233,00								- Badan Keuangan Daerah
			terlaksananya Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak (paket)				*1*		*(22kab/kota, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*1*		
		Pengelolaan Dana bagi Hasil Provinsi						641.790.020.298,00								- Badan Keuangan Daerah
			terlaksananya Pengelolaan Dana bagi Hasil Provinsi (paket)				*1*		*(22kab/kota, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*1*		
3.	**5.02.5-2.0-0.0-0.03.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**						**130.106.470.726,00**			**Tidak**	**Tidak**			**0,00**	**Badan Pendapatan dan Aset Daerah**
			Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran yang berkualitas (%)				***100***									
			Meningkatnya sarana dan prasarana (%)				***100***									
			Tercapainya penyusunan capaian kinerja ikhtisar realisasi kinerja dan keuangan (%)				***100***									
	5.02.5-2.0-0.0-0.03.01.1.01	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						835.881.270,00		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Tidak	Tidak				- Badan Pendapatan dan Aset Daerah
			Terlaksananya Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (%)				*100*		*(22 Kab/Kota, NUSA TENGGARA TIMUR)*	*Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum*				*100*		
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						74.994.500,00								- Badan Pendapatan dan Aset Daerah
			terlaksananya Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (paket)				*1*		*(22kab/kota, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*1*		
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD						7.057.250,00								- Badan Pendapatan dan Aset Daerah
			terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (paket)				*1*		*(22kab/kota, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*1*		
		Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD						24.994.940,00								- Badan Pendapatan dan Aset Daerah

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode RPJMD	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2020	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RKPD TAHUN 2021	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2023		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2022	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD (paket)				*1*		*(22kab/kota, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*1*		
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD						28.834.580,00								- Badan Pendapatan dan Aset Daerah
			terlaksanannya Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (paket)				*1*		*(22kab/kota, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*1*		
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						700.000.000,00		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum						- Badan Pendapatan dan Aset Daerah
			terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (paket)				*1*		*(22kab/kota, NUSA TENGGARA TIMUR)*	*Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum*				*1*		
	5.02.5-2.0-0.0-0.03.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						50.707.011.696,00			Tidak	Tidak				- Badan Pendapatan dan Aset Daerah
			Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah (%)				*100*		*(22 Kab/Kota, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*100*		
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						50.589.508.246,00								- Badan Pendapatan dan Aset Daerah
			terlaksananya Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN (paket)				*1*		*(kota kupang, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*1*		
		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD						29.331.750,00								- Badan Pendapatan dan Aset Daerah
			terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (PAKET)				*1*		*(KOTA KUPANG, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*1*		
		Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD						18.279.750,00								- Badan Pendapatan dan Aset Daerah
			terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD (PAKET)				*1*		*(KOTA KUPANG, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*1*		
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD						24.472.800,00								- Badan Pendapatan dan Aset Daerah
			Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (paket)				*1*		*(22kab/kota, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*1*		
		Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan						6.919.900,00								- Badan Pendapatan dan Aset Daerah
			terlaksananya Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan (PAKET)				*1*		*(KOTA KUPANG, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*1*		
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD						28.499.750,00								- Badan Pendapatan dan Aset Daerah
			terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (paket)				*1*		*(kota kupang, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*1*		
		Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran						9.999.500,00								- Badan Pendapatan dan Aset Daerah
			terlaksananya Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (paket)				*1*		*(kota kupang, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*1*		
	5.02.5-2.0-0.0-0.03.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah						1.948.900.000,00		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Tidak	Tidak				- Badan Pendapatan dan Aset Daerah

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode RPJMD	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2020	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RKPD TAHUN 2021	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2023		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2022	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah (%)				*100*		*(22 Kab/Kota, NUSA TENGGARA TIMUR)*	*Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum*				*100*		
		Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD						10.000.000,00		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum						Badan Pendapatan dan Aset Daerah
			terlaksananya Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (paket)				*1*		*(22kab/kota, NUSA TENGGARA TIMUR)*	*Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum*				*1*		
		Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD						1.900.000.000,00		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum						Badan Pendapatan dan Aset Daerah
			terlaksananya Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD (paket)				*1*		*(kota kupang, NUSA TENGGARA TIMUR)*	*Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum*				*1*		
		Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD						14.900.000,00		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum						Badan Pendapatan dan Aset Daerah
			terlaksananya Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (PAKET)				*1*		*(KOTA KUPANG, NUSA TENGGARA TIMUR)*	*Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum*				*1*		
		Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD						24.000.000,00		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum						Badan Pendapatan dan Aset Daerah
			terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (PAKET)				*1*		*(KOTA KUPANG, NUSA TENGGARA TIMUR)*	*Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum*				*1*		
	5.02.5-2.0-0.0-0.03.01.1.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah						72.677.760,00			Tidak	Tidak				Badan Pendapatan dan Aset Daerah
			Terlaksananya Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah (%)				*100*		*(22 Kab/Kota, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*100*		
		Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah						72.677.760,00								Badan Pendapatan dan Aset Daerah
			terlaksananya Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah (PAKET)				*1*		*(KOTA KUPANG, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*1*		
	5.02.5-2.0-0.0-0.03.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						109.000.000,00		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Tidak	Tidak				Badan Pendapatan dan Aset Daerah
			Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah (%)				*100*		*(22 Kab/Kota, NUSA TENGGARA TIMUR)*	*Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum*				*100*		
		Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian						19.000.000,00		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum						Badan Pendapatan dan Aset Daerah
			terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (PAKET)				*1*		*(KOTA KUPANG, NUSA TENGGARA TIMUR)*	*Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum*				*1*		
		Pemindahan Tugas ASN						45.000.000,00		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum						Badan Pendapatan dan Aset Daerah
			terlaksananya Pemindahan Tugas ASN (paket)				*1*		*(kota kupang, NUSA TENGGARA TIMUR)*	*Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum*				*1*		
		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi						45.000.000,00		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum						Badan Pendapatan dan Aset Daerah
			terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi (paket)				*1*		*(kota kupang, NUSA TENGGARA TIMUR)*	*Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum*				*1*		

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode RPJMD	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2020	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RKPD TAHUN 2021	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2023		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2022	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.02.5-2.0-0.0-0.03.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						3.963.000.000,00		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Tidak	Tidak			-	Badan Pendapatan dan Aset Daerah
			Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah (%)				*100*		*(22 Kab/Kota, NUSA TENGGARA TIMUR)*	*Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum*				*100*		
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor						90.000.000,00		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum					-	Badan Pendapatan dan Aset Daerah
			terlaksanakannya Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor (paket)				*1*		*(kota kupang, NUSA TENGGARA TIMUR)*	*Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum*				*1*		
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						1.400.000.000,00		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum					-	Badan Pendapatan dan Aset Daerah
			terlaksananya Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan (paket)				*1*		*(kota kupang)*	*Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum*				*1*		
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan						45.000.000,00		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum					-	Badan Pendapatan dan Aset Daerah
			pelaksanaan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan (paket)				*1*		*(kota kupang, NUSA TENGGARA TIMUR)*	*Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum*				*1*		
		Penyediaan Bahan/Material						1.358.000.000,00		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum					-	Badan Pendapatan dan Aset Daerah
			terlaksananya Penyediaan Bahan/Material (PAKET)				*1*		*(KOTA KUPANG, NUSA TENGGARA TIMUR)*	*Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum*				*1*		
		Fasilitasi Kunjungan Tamu						590.000.000,00		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum					-	Badan Pendapatan dan Aset Daerah
			terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu (paket)				*1*		*(kota kupang, NUSA TENGGARA TIMUR)*	*Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum*				*1*		
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						480.000.000,00		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum					-	Badan Pendapatan dan Aset Daerah
			terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (paket)				*1*		*(kota kupang, NUSA TENGGARA TIMUR)*	*Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum*				*1*		
	5.02.5-2.0-0.0-0.03.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						26.240.000.000,00		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Tidak	Tidak			-	Badan Pendapatan dan Aset Daerah
			Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (%)				*100*		*(22 Kab/Kota, NUSA TENGGARA TIMUR)*	*Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum*				*100*		
		Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						4.000.000.000,00		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum					-	Badan Pendapatan dan Aset Daerah
			terlaksananya Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan (paket)				*1*		*(kota kupang, NUSA TENGGARA TIMUR)*	*Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum*				*1*		
		Pengadaan Mebel						490.000.000,00		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum					-	Badan Pendapatan dan Aset Daerah
			tersedianya Mebel (paket)				*1*		*(kota kupangf, NUSA TENGGARA TIMUR)*	*Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum*				*1*		

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode RPJMD	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2020	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RKPD TAHUN 2021	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2023		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2022	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						19.000.000.000,00		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum					-	Badan Pendapatan dan Aset Daerah
			terlaksananya Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya (paket)				*1*		*(kota kupang, NUSA TENGGARA TIMUR)*	*Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum*				*1*		
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						1.200.000.000,00		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum					-	Badan Pendapatan dan Aset Daerah
			terlaksananya Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya (paket)				*1*		*(kota kupang, NUSA TENGGARA TIMUR)*	*Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum*				*1*		
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						1.550.000.000,00		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum					-	Badan Pendapatan dan Aset Daerah
			terlaksananya Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya (paket)				*1*		*(kota kupang, NUSA TENGGARA TIMUR)*	*Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum*				*1*		
	5.02.5-2.0-0.0-0.03.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						43.210.000.000,00		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Tidak	Tidak			-	Badan Pendapatan dan Aset Daerah
			Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%)				*100*		*(22 Kab/Kota, NUSA TENGGARA TIMUR)*	*Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum*				*100*		
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat						60.000.000,00		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum					-	Badan Pendapatan dan Aset Daerah
			tersedianya Jasa Surat Menyurat (paket)				*1*		*(kota kupang, NUSA TENGGARA TIMUR)*	*Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum*				*1*		
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						41.600.000.000,00		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum					-	Badan Pendapatan dan Aset Daerah
			terlaksananya Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik (PAKET)				*1*		*(KOTA KUPANG, NUSA TENGGARA TIMUR)*	*Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum*				*1*		
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						1.350.000.000,00		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum					-	Badan Pendapatan dan Aset Daerah
			terlaksananya Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (paket)				*1*		*(kota kupang, NUSA TENGGARA TIMUR)*	*Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum*				*1*		
	5.02.5-2.0-0.0-0.03.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						3.020.000.000,00		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Tidak	Tidak			-	Badan Pendapatan dan Aset Daerah
			Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%)				*100*		*(22 Kab/Kota, NUSA TENGGARA TIMUR)*	*Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum*				*100*		
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						1.400.000.000,00		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum					-	Badan Pendapatan dan Aset Daerah
			terlaksananya Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan (paket)				*1*		*(kota kupang, NUSA TENGGARA TIMUR)*	*Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum*				*1*		
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						190.000.000,00		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum					-	Badan Pendapatan dan Aset Daerah

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode RPJMD	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2020	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RKPD TAHUN 2021	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2023		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2022	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya (paket)				*1*		*(kota kupang, NUSA TENGGARA TIMUR)*	*Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum*				*1*		
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya						1.250.000.000,00		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum						- Badan Pendapatan dan Aset Daerah
			terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya (paket)				*1*		*(kota kupang, NUSA TENGGARA TIMUR)*	*Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum*				*1*		
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						180.000.000,00		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum						- Badan Pendapatan dan Aset Daerah
			terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya (paket)				*1*		*(kota kupang, NUSA TENGGARA TIMUR)*	*Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum*				*1*		
4.	**5.02.5-2.0-0.0-0.03.03**	**PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH**						**6.393.000.000,00**			**Ya**	**Ya**			**0,00**	**Badan Pendapatan dan Aset Daerah**
			Penatausahaan Barang Milik Daerah (%)				***100***			***Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum***						
			Pemanfaatan, Pemindahtanganan dan Pengamanan Barang Milik Daerah (%)				***100***			***Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum***						
	5.02.5-2.0-0.0-0.03.03.1.01	Pengelolaan Barang Milik Daerah						6.393.000.000,00		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum, Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Tidak	Tidak				- Badan Pendapatan dan Aset Daerah
			Terlaksananya Pengelolaan Barang Milik Daerah (%)				*100*		*(22 Kab/Kota, NUSA TENGGARA TIMUR)*	*Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum, Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil*				*100*		
		Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah						335.000.000,00		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum						- Badan Pendapatan dan Aset Daerah
			terlaksananya Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (paket)				*1*		*(kota kupang, NUSA TENGGARA TIMUR)*	*Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum*				*1*		
		Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah						400.000.000,00		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum						- Badan Pendapatan dan Aset Daerah
			terlaksananya Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah (paket)				*1*		*(kota kupang, NUSA TENGGARA TIMUR)*	*Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum*				*1*		
		Penatausahaan Barang Milik Daerah						183.000.000,00		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum						- Badan Pendapatan dan Aset Daerah
			terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah (paket)				*1*		*(kota kupang, NUSA TENGGARA TIMUR)*	*Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum*				*1*		
		Inventarisasi Barang Milik Daerah						1.225.000.000,00		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum						- Badan Pendapatan dan Aset Daerah
			terlaksananya Inventarisasi Barang Milik Daerah (paket)				*1*		*(kota kupang, NUSA TENGGARA TIMUR)*	*Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum*				*1*		
		Pengamanan Barang Milik Daerah						2.350.000.000,00		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum						- Badan Pendapatan dan Aset Daerah

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode RPJMD	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2020	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RKPD TAHUN 2021	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2023		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2022	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			terlaksananya Pengamanan Barang Milik Daerah (paket)				*1*		*(kota kupang, NUSA TENGGARA TIMUR)*	*Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum*				*1*		
		Penilaian Barang Milik Daerah						170.000.000,00		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum					-	Badan Pendapatan dan Aset Daerah
			terlaksananya Penilaian Barang Milik Daerah (paket)				*1*		*(22kab/kota, NUSA TENGGARA TIMUR)*	*Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum*				*1*		
		Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah						700.000.000,00		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum					-	Badan Pendapatan dan Aset Daerah
			terlaksananya Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah (paket)				*1*		*(22kab/kota, NUSA TENGGARA TIMUR)*	*Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum*				*1*		
		Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah						500.000.000,00		Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil					-	Badan Pendapatan dan Aset Daerah
			terlaksananya Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah (paket)				*1*		*(22kab/kota, NUSA TENGGARA TIMUR)*	*Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil*				*1*		
		Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah						185.000.000,00		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum					-	Badan Pendapatan dan Aset Daerah
			terlaksananya Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah (paket)				*1*		*(22kab/kota, NUSA TENGGARA TIMUR)*	*Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum*				*1*		
		Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah						200.000.000,00		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum					-	Badan Pendapatan dan Aset Daerah
			terlaksananya Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah (paket)				*1*		*(22kab/kota, NUSA TENGGARA TIMUR)*	*Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum*				*1*		
		Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota						145.000.000,00		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum					-	Badan Pendapatan dan Aset Daerah
			terlaksananya Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota (paket)				*1*		*(22kab/kota, NUSA TENGGARA TIMUR)*	*Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum*				*1*		
5.	**5.02.5-2.0-0.0-0.03.04**	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH**						**22.870.000.000,00**			**Ya**	**Ya**			**0,00**	**Badan Pendapatan dan Aset Daerah**
			Persentase Peningkatan Kontribusi PAD terhadap pendapatan daerah (%)				***34,04***			***Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum***						
	5.02.5-2.0-0.0-0.03.04.1.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah						22.870.000.000,00		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Tidak	Tidak			-	Badan Pendapatan dan Aset Daerah
			Terlaksananya Pengelolaan Pendapatan Daerah (%)				*100*		*(22 Kab/Kota, NUSA TENGGARA TIMUR)*	*Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum*				*100*		
		Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah						125.000.000,00		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum					-	Badan Pendapatan dan Aset Daerah
			terlaksananya Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah (paket)				*1*		*(kota kupang, NUSA TENGGARA TIMUR)*	*Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum*				*1*		

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode RPJMD	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2020	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RKPD TAHUN 2021	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2023		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2022	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah						65.000.000,00		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum					-	Badan Pendapatan dan Aset Daerah
			terlaksananya Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah (paket)				*1*		*(kota kupang, NUSA TENGGARA TIMUR)*	*Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum*				*1*		
		Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah						160.000.000,00		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum					-	Badan Pendapatan dan Aset Daerah
			terlaksananya Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah (paket)				*1*		*(kota kupang, NUSA TENGGARA TIMUR)*	*Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum*				*1*		
		Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah						220.000.000,00		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum					-	Badan Pendapatan dan Aset Daerah
			terlaksananya Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah (paket)				*1*		*(kota kupang, NUSA TENGGARA TIMUR)*	*Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum*				*1*		
		Penagihan Pajak Daerah						20.500.000.000,00		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum					-	Badan Pendapatan dan Aset Daerah
			terlaksananya Penagihan Pajak Daerah (paket)				*1*		*(kota kupang, NUSA TENGGARA TIMUR)*	*Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum*				*1*		
		Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah						400.000.000,00		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum					-	Badan Pendapatan dan Aset Daerah
			terlaksananya Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah (paket)				*1*		*(kota kupang, NUSA TENGGARA TIMUR)*	*Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum*				*1*		
		Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah						1.400.000.000,00		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum					-	Badan Pendapatan dan Aset Daerah
			terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah (paket)				*1*		*(kota kupang, NUSA TENGGARA TIMUR)*	*Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum*				*1*		
	5.03	**KEPEGAWAIAN**						**21.722.429.539,00**							**0,00**	
1.	**5.03.5-3.0-0.0-0.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**						**12.201.937.000,00**			**Tidak**	**Tidak**			**0,00**	**Badan Kepegawaian Daerah**
			Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran yang berkualitas (%)				***100***			***Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum***						
			Meningkatnya sarana dan prasarana (%)				***100***			***Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum***						
			Tercapainya penyusunan capaian kinerja ikhtisar realisasi kinerja dan keuangan (%)				***100***			***Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum***						
			Tersedianya Gaji dan Tunjangan PNS (Orang)				***97***			***Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum***						
	5.03.5-3.0-0.0-0.01.01.1.01	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						52.000.000,00			Tidak	Tidak			-	Badan Kepegawaian Daerah

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode RPJMD	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2020	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RKPD TAHUN 2021	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2023		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2022	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Terlaksananya Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (%)				*100*		*(22 Kab/Kota, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*100*		
		Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD						20.000.000,00							-	Badan Kepegawaian Daerah
			Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD (Paket)				*1*		*(KOTA KUPANG, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*1*		
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD						32.000.000,00							-	Badan Kepegawaian Daerah
			terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (paket)				*1*		*(kota kupang, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*1*		
	5.03.5-3.0-0.0-0.01.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						9.399.298.440,00		DANA UMUM	Tidak	Tidak			-	Badan Kepegawaian Daerah
			Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah (%)				*100*		*(22 Kab/Kota, NUSA TENGGARA TIMUR)*	*DANA UMUM*				*100*		
			Tersedianya Gaji dan Tunjangan PNS (Orang)				*97*		*(Kota Kupang, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*97*		
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						9.314.298.440,00		DANA UMUM					-	Badan Kepegawaian Daerah
			Tersedianya Gaji dan Tunjangan PNS (orang)				*97*		*(Kota Kupang, NUSA TENGGARA TIMUR)*	*DANA UMUM*				*97*		
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD						85.000.000,00							-	Badan Kepegawaian Daerah
			terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (paket)				*1*		*(kota kupang, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*1*		
	5.03.5-3.0-0.0-0.01.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						100.000.000,00			Tidak	Tidak			-	Badan Kepegawaian Daerah
			Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah (%)				*100*		*(22 Kab/Kota, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*100*		
		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi						100.000.000,00							-	Badan Kepegawaian Daerah
			terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi (paket)				*1*		*(kota kupang, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*1*		
	5.03.5-3.0-0.0-0.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						461.500.000,00			Tidak	Tidak			-	Badan Kepegawaian Daerah
			Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah (%)				*100*		*(22 Kab/Kota, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*100*		
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor						1.500.000,00							-	Badan Kepegawaian Daerah
			tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor (PAKET)				*1*		*(kota kupang, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*1*		
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor						8.000.000,00							-	Badan Kepegawaian Daerah
			tersedianya Bahan Logistik Kantor (paket)				*1*		*(kota kupang, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*1*		
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan						18.000.000,00							-	Badan Kepegawaian Daerah
			tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan (PAKET)				*1*		*(KOTA KUPANG, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*1*		

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode RPJMD	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2020	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RKPD TAHUN 2021	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2023		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2022	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		Penyediaan Bahan/Material						56.000.000,00								- Badan Kepegawaian Daerah
			TERSEDIANYA BAHAN/MATERIAL (paket)				*1*		*(kota kupang, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*1*		
		Fasilitasi Kunjungan Tamu						32.000.000,00								- Badan Kepegawaian Daerah
			terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu (PAKET)				*1*		*(kota kupang, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*1*		
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						346.000.000,00								- Badan Kepegawaian Daerah
			terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (PAKET)				*1*		*(KOTA KUPANG, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*1*		
	5.03.5-3.0-0.0-0.01.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						1.641.118.460,00			Tidak	Tidak				- Badan Kepegawaian Daerah
			Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (%)				*100*		*(22 Kab/Kota, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*100*		
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						1.641.118.460,00								- Badan Kepegawaian Daerah
			terlaksananya Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya (PAKET)				*1*		*(KOTA KUPANG, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*1*		
	5.03.5-3.0-0.0-0.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						425.020.100,00			Tidak	Tidak				- Badan Kepegawaian Daerah
			Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%)				*100*		*(22 Kab/Kota, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*100*		
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat						20.000.000,00								- Badan Kepegawaian Daerah
			tersedianya Jasa Surat Menyurat (PAKET)				*1*		*(KOTA KUPANG, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*1*		
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						384.447.000,00								- Badan Kepegawaian Daerah
			tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik (PAKET)				*1*		*(KOTA KUPANG, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*1*		
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						20.573.100,00								- Badan Kepegawaian Daerah
			tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor (PAKET)				*1*		*(KOTA KUPANG, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*1*		
	5.03.5-3.0-0.0-0.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						123.000.000,00			Tidak	Tidak				- Badan Kepegawaian Daerah
			Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%)				*100*		*(22 Kab/Kota, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*100*		
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						85.000.000,00								- Badan Kepegawaian Daerah
			tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan (PAKET)				*1*		*(KOTA KUPANG, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*1*		

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode RPJMD	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2020	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RKPD TAHUN 2021	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2023		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2022	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						38.000.000,00							-	Badan Kepegawaian Daerah
			terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya (paket)				*1*		*(KOTA KUPANG, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*1*		
2.	**5.03.5-3.0-0.0-0.01.02**	**PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH**						**9.520.492.539,00**			**Ya**	**Ya**			**0,00**	**Badan Kepegawaian Daerah**
			Persentase formasi jabatan sesuai kualifikasi dan kompetensi (%)				***100***									
			Persentase pelaksanaan lelang jabatan terbuka dan akuntabel untuk Eselon 1 dan 2 Lingkup Pemprov NTT (%)				***100***									
	5.03.5-3.0-0.0-0.01.02.1.01	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN						3.649.482.599,00			Tidak	Tidak			-	Badan Kepegawaian Daerah
			Terlaksananya Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN (%)				*100*		*(22 Kab/Kota, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*100*		
		Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN						176.000.000,00							-	Badan Kepegawaian Daerah
			terlaksananya Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN (paket)				*1*		*(22kab/kota, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*1*		
		Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK						317.000.000,00							-	Badan Kepegawaian Daerah
			terlaksananya Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK (PAKET)				*1*		*(22KAB/KOTA, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*1*		
		Evaluasi Pengadaan ASN dan Pengadaan ASN						2.340.662.219,00							-	Badan Kepegawaian Daerah
			Terlaksananya Evaluasi Pengadaan ASN dan Pengadaan ASN (paket)				*1*		*(22kab/kota, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*1*		
		Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian						216.500.000,00							-	Badan Kepegawaian Daerah
			terlaksananya Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian (paket)				*1*		*(22kab/kota, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*1*		
		Fasilitasi Lembaga Profesi ASN						385.451.420,00							-	Badan Kepegawaian Daerah
			terlaksananya Fasilitasi Lembaga Profesi ASN (paket)				*1*		*(22KAB/KOTA, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*1*		
		Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian						138.868.960,00							-	Badan Kepegawaian Daerah
			terlaksananya Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian (paket)				*1*		*(22kab/kota, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*1*		
		Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian						75.000.000,00							-	Badan Kepegawaian Daerah
			terlaksananya Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian (paket)				*1*		*(22kab/kota, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*1*		

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode RPJMD	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2020	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RKPD TAHUN 2021	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2023		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2022	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.03.5-3.0-0.0-0.01.02.1.02	Administrasi Kepegawaian						1.470.659.070,00			Tidak	Tidak			-	Badan Kepegawaian Daerah
			Terlaksananya Administrasi Kepegawaian (%)				*100*		*(22 Kab/Kota, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*100*		
		Pengelolaan Mutasi ASN						219.228.980,00							-	Badan Kepegawaian Daerah
			terlaksananya Pengelolaan Mutasi ASN (PAKET)				*1*		*(22kab/kota, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*1*		
		Perataan dan Mutasi Jabatan						311.362.270,00							-	Badan Kepegawaian Daerah
			terlaksananya Penataan dan Mutasi Jabatan (PAKET)				*1*		*(22kab/kota, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*1*		
		Pengelolaan Promosi ASN						940.067.820,00							-	Badan Kepegawaian Daerah
			terlaksananya Pengelolaan Promosi ASN (PAKET)				*1*		*(22KAB/KOTA, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*1*		
	5.03.5-3.0-0.0-0.01.02.1.03	Pengembangan Kompetensi ASN						3.710.082.540,00			Tidak	Tidak			-	Badan Kepegawaian Daerah
			Terlaksananya Pengembangan Kompetensi ASN (%)				*100*		*(22 Kab/Kota, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*100*		
		Peningkatan Kapasitas ASN						2.962.035.360,00							-	Badan Kepegawaian Daerah
			terlaksananya Peningkatan Kapasitas ASN (paket)				*1*		*(22kab/kota, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*1*		
		Pengelolaan Assessment Center						197.414.700,00							-	Badan Kepegawaian Daerah
			terlaksananya Pembinaan Disiplin ASN (paket)				*1*		*(22kab/kota, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*1*		
		Pembinaan Jabatan Fungsional ASN						196.495.620,00							-	Badan Kepegawaian Daerah
			terlaksanaya Pembinaan Jabatan Fungsional ASN (paket)				*1*		*(22kab/kota, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*1*		
		Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional						354.136.860,00							-	Badan Kepegawaian Daerah
			terlaksananya Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional (paket)				*1*		*(22kab/kota, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*1*		
	5.03.5-3.0-0.0-0.01.02.1.04	Pengembangan Karir ASN						690.268.330,00			Tidak	Tidak			-	Badan Kepegawaian Daerah
			Terlaksananya Pengembangan Karir ASN (%)				*100*		*(22 Kab/Kota, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*100*		
		Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur						366.679.500,00							-	Badan Kepegawaian Daerah
			terlaksananya Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur (paket)				*1*		*(22kab/kota, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*1*		
		Pembinaan Disiplin ASN						211.192.400,00							-	Badan Kepegawaian Daerah
			terlaksana Pembinaan Disiplin ASN (paket)				*1*		*(22kab/kota, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*1*		
		Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN						78.360.000,00							-	Badan Kepegawaian Daerah

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode RPJMD	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2020	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RKPD TAHUN 2021	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2023		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2022	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			terlaksananya Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN (paket)				*1*		*(22kab/kota, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*1*		
		Evaluasi Disiplin ASN						34.036.430,00							-	Badan Kepegawaian Daerah
			terlaksananya Evaluasi Disiplin ASN (paket)				*1*		*(22kab/kota, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*1*		
	5.04	**PENDIDIKAN DAN PELATIHAN**						**61.119.792.817,00**							**0,00**	
1.	**5.04.5-4.0-0.0-0.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**						**25.170.930.834,00**			**Tidak**	**Tidak**			**0,00**	**Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia**
			Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran yang berkualitas (%)				***100***									
			Meningkatnya sarana dan prasarana (%)				***100***									
			Tercapainya penyusunan capaian kinerja ikhtisar realisasi kinerja dan keuangan (%)				***100***									
	5.04.5-4.0-0.0-0.01.01.1.01	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						46.283.608,00			Tidak	Tidak			-	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
			Terlaksananya Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (%)				*100*		*(22 Kab/Kota, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*100*		
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						7.807.054,00							-	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
			terlaksananya Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (paket)				*1*		*(kota kupang, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*1*		
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD						7.881.521,00							-	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
			terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (paket)				*1*		*(kota kupang, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*1*		
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD						7.572.033,00							-	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
			terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (paket)				*1*		*(kota kupang, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*1*		
		Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD						8.011.040,00							-	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
			terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD (paket)				*1*		*(kota kupang, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*1*		

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode RPJMD	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2020	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RKPD TAHUN 2021	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2023		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2022	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD						15.011.960,00							-	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
			terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (paket)				*1*		*(kota kupang, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*1*		
	5.04.5-4.0-0.0-0.01.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						10.728.203.020,00			Tidak	Tidak			-	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
			Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah (%)				*100*		*(22 Kab/Kota, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*100*		
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						10.715.044.000,00							-	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
			tersedianya Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN (paket)				*1*		*(kota kupang, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*1*		
		Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan						6.079.360,00							-	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
			terlaksananya Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan (paket)				*1*		*(KOTA KUPANG, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*1*		
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD						7.079.660,00							-	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
			terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (paket)				*1*		*(kota kupang, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*1*		
	5.04.5-4.0-0.0-0.01.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah						10.075.320,00			Tidak	Tidak			-	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
			Terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah (%)				*100*		*(22 Kab/Kota, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*100*		
		Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD						10.075.320,00							-	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
			terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (paket)				*1*		*(kota kupang, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*1*		
	5.04.5-4.0-0.0-0.01.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						100.000.000,00			Tidak	Tidak			-	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
			Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah (%)				*100*		*(22 Kab/Kota, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*100*		
		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi						100.000.000,00							-	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
			terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi (paket)				*1*		*(kota kupang, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*1*		

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode RPJMD	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2020	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RKPD TAHUN 2021	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2023		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2022	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.04.5-4.0-0.0-0.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						333.187.277,00			Tidak	Tidak			-	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
			Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah (%)				*100*		*(22 Kab/Kota, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*100*		
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor						37.072.000,00							-	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
			tersedianya Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor (paket)				*1*		*(kota kupang, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*1*		
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						33.980.000,00							-	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
			tersedianya Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan (paket)				*1*		*(kota kupang, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*1*		
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan						69.727.300,00							-	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
			tersedianya Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan (paket)				*1*		*(kota kupang, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*1*		
		Penyediaan Bahan/Material						74.771.977,00							-	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
			tersedianya Penyediaan Bahan/Material (paket)				*1*		*(KOTA KUPANG, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*1*		
		Fasilitasi Kunjungan Tamu						48.744.000,00							-	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
			TERLAKSANANYA Fasilitasi Kunjungan Tamu (paket)				*1*		*(kota kupang, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*1*		
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						68.892.000,00							-	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
			terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (paket)				*1*		*(KOTA KUPANG, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*1*		
	5.04.5-4.0-0.0-0.01.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						714.267.465,00			Tidak	Tidak			-	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
			Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (%)				*100*		*(22 Kab/Kota, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*100*		
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya						503.267.465,00							-	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
			terlaksananya Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya (paket)				*1*		*(kota kupang, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*1*		

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode RPJMD	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2020	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RKPD TAHUN 2021	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2023		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2022	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		Pengadaan Aset Tetap Lainnya						211.000.000,00								Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
			terlaksananya Pengadaan Aset Tetap Lainnya (paket)				*1*		*(kota kupang, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*1*		
	5.04.5-4.0-0.0-0.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						1.936.012.344,00			Tidak	Tidak				Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
			Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%)				*100*		*(22 Kab/Kota, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*100*		
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat						15.120.000,00								Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
			tersedianya Penyediaan Jasa Surat Menyurat (paket)				*1*		*(kota kupang, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*1*		
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						648.018.744,00								Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
			tersedianya Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik (paket)				*1*		*(kota kupang, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*1*		
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						1.272.873.600,00								Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
			terlaksananya Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (paket)				*1*		*(kota kupang, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*1*		
	5.04.5-4.0-0.0-0.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						11.302.881.800,00			Tidak	Tidak				Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
			Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%)				*100*		*(22 Kab/Kota, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*100*		
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						90.000.000,00								Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
			terlaksananya Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan (paket)				*1*		*(kota kupang, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*1*		
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						155.932.800,00								Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
			terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya (paket)				*1*		*(kota kupang, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*100*		
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya						11.056.949.000,00								Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode RPJMD	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2020	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RKPD TAHUN 2021	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2023		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2022	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya (paket)				*1*		*(kota kupang, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*1*		
2.	**5.04.5-4.0-0.0-0.01.02**	**PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA**						**35.948.861.983,00**			**Ya**	**Ya**			**0,00**	**Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia**
			Akreditasi latihan dasar minimal "B" dan diklat kepemimpinan "A" (%)				***100***									
			Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal (Jumlah ASN yang mengikuti diklat Formal)				***100***									
			Persentase Pejabat ASN yang mengikuti Diklat struktural (Pejabat ASN yang telah mengikuti Diklat) (%)				***100***									
			Peningkatan pengendalian dan mutu pendidikan dan pelatihan (%)				***80***									
	5.04.5-4.0-0.0-0.01.02.1.01	Pengembangan Kompetensi Teknis						1.460.000.000,00		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Tidak	Tidak			-	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
			Terlaksananya Pengembangan Kompetensi Teknis (%)				*100*		*(22 Kab/Kota, NUSA TENGGARA TIMUR)*	*Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum*				*100*		
		Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan						150.000.000,00		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum					-	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
			terlaksananya Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum (paket)				*1*		*(kota kupang, NUSA TENGGARA TIMUR)*	*Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum*				*1*		
		Penyusunan Standar Perangkat Pembelajaran Pemerintahan Dalam Negeri Kompetensi Teknisumum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum						150.000.000,00		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum					-	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
			terlaksananya Penyusunan Standar Perangkat Pembelajaran Pemerintahan Dalam Negeri Kompetensi Teknisumum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum				*1*		*(kota kupang, NUSA TENGGARA TIMUR)*	*Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum*				*1*		

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode RPJMD	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2020	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RKPD TAHUN 2021	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2023		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2022	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan Bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum						1.160.000.000,00		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum					-	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
			terlaksananya Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan Bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum				*1*		*(kota kupang, NUSA TENGGARA TIMUR)*	*Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum*				*1*		
	5.04.5-4.0-0.0-0.01.02.1.02	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional						34.488.861.983,00		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Tidak	Tidak			-	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
			Terlaksananya Sertifikasi, Kelembegaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional (%)				*100*		*(22 Kab/Kota, NUSA TENGGARA TIMUR)*	*Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum*				*100*		
		Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi Kompetensi, Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, Sumber Belajar, Kerjasama, Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan dan						150.000.000,00		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum					-	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
			terlaksananya Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi Kompetensi, Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, Sumber Belajar, Kerjasama, Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan dan Prajabatan, Sertajabatan Fungsional				*1*		*(kota kupang, NUSA TENGGARA TIMUR)*	*Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum*				*1*		
		Pengelolaan Lembaga Sertifikasi Penyelenggara Pemerintahan Dalam Negeri Provinsi						125.000.000,00		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum					-	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
			terlaksananya Pengelolaan Lembaga Sertifikasi Penyelenggara Pemerintahan Dalam Negeri Provinsi (paket)				*1*		*(kota kupang, NUSA TENGGARA TIMUR)*	*Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum*				*1*		
			terlaksananya Pengelolaan Lembaga Sertifikasi Penyelenggara Pemerintahan Dalam Negeri Provinsi (paket)				*1*		*(22kab/kota, NUSA TENGGARA TIMUR)*	*Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum*				*1*		
		Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota						500.000.000,00		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum					-	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
			terlaksananya Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota (paket)				*1*		*(kota kupang, NUSA TENGGARA TIMUR)*	*Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum*				*1*		
			terlaksananya Sertifikasi Kompetensi di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota (paket)				*1*		*(22kab/kota, NUSA TENGGARA TIMUR)*	*Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum*				*1*		
		Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, dan Sumber Belajar						515.000.000,00		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum					-	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode RPJMD	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2020	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RKPD TAHUN 2021	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2023		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2022	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			terlaksananya Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, dan Sumber Belajar (paket)				*1*		*(kota kupang, NUSA TENGGARA TIMUR)*	*Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum*				*1*		
			terlaksananya Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, dan Sumber Belajar (paket)				*1*		*(22kab/kota, NUSA TENGGARA TIMUR)*	*Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum*				*1*		
		Pelaksanaan Kerjasama Antar Lembaga						50.000.000,00		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum					-	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
			terlaksananya Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, dan Sumber Belajar (paket)				*1*		*(kota kupang, NUSA TENGGARA TIMUR)*	*Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum*				*100*		
			terlaksananya Kerjasama Antar Lembaga (paket)				*1*		*(22kab/kota, NUSA TENGGARA TIMUR)*	*Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum*				*1*		
		Penyusunan Standar Perangkat Pembelajaran Pemerintahan Dalam Negeri Bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, dan Jabatan Fungsional						75.000.000,00		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum					-	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
			terlaksananya Penyusunan Standar Perangkat Pembelajaran Pemerintahan Dalam Negeri Bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, dan Jabatan Fungsional (paket)				*1*		*(22kab/kota, NUSA TENGGARA TIMUR)*	*Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum*				*1*		
		Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan						32.823.861.983,00		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum					-	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
			terlaksananya Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan (Paket)				*1*		*(22KAB/KOTA, NUSA TENGGARA TIMUR)*	*Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum*				*1*		
		Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerjasama, Serta Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi,						250.000.000,00		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum					-	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
			terlaksanannya Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerjasama, Serta Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan, dan Prajabatan				*1*		*(22kab/kota, NUSA TENGGARA TIMUR)*	*Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum*				*1*		
	5.05	**PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN**						**3.263.249.594,00**							**0,00**	
1.	**5.05.5-1.5-5.0-0.02.02**	**PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH**						**3.263.249.594,00**			**Ya**	**Ya**			**0,00**	**Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan**

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode RPJMD	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2020	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RKPD TAHUN 2021	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2023		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2022	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Persentase Kebijakan Pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota atau pengguna lainnya yang memanfaatkan Rekomendasi hasil Kelitbangan dan Inovasi yang dihasilkan setiap tahun (Target 2019 = 40 rekomendasi, 2023= 75				***82,86***			***Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum***						
			Persentase Penyediaan Inovasi Daerah yang dihasilkan dari Inkubator Inovasi Daerah kepada Pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota atau pengguna lainnya setiap tahun (Target 2023 = 145 Inovasi)				***96,55***			***Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum***						
			Persentase Produk Inovasi Daerah yang difasilitasi untuk mendapatkan perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) setiap tahun (Target 2023 = 10 Dokumen Fasilitasi) (%)				***60,00***			***Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum***						
	5.05.5-1.5-5.0-0.02.02.1.02	Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan						549.402.716,00			Tidak	Tidak			-	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
			Terlaksananya Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan (%)				*100*		*(22 kab/kota, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*100*		
		Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial						549.402.716,00							-	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
			terlaksananya Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial (paket)				*1*		*(kota kupang, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*1*		
			terlaksananya Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial (paket)				*1*		*(kota kupang, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*1*		
	5.05.5-1.5-5.0-0.02.02.1.03	Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi Dan Pembangunan						581.267.276,00			Tidak	Tidak			-	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
			Terlaksananya Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi Dan Pembangunan (%)				*100*		*(22 kab/kota, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*100*		
		Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan						581.267.276,00							-	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
			terlaksananya Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan (paket)				*1*		*(kota kupang, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*1*		

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode RPJMD	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2020	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RKPD TAHUN 2021	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2023		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2022	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.05.5-1.5-5.0-0.02.02.1.04	Pengembangan Inovasi dan Teknologi						2.132.579.602,00			Tidak	Tidak			-	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
			Terlaksananya Pengembangan Inovasi dan Teknologi (%)				*100*		*(22 kab/kota, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*100*		
		Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi						833.897.872,00							-	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
			trerlaksananya Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi (paket)				*1*		*(kota kupang, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*1*		
		Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Yang Bersifat Inovatif						391.630.252,00							-	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
			terlaksananya Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Yang Bersifat Inovatif (paket)				*1*		*(kota kupang, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*1*		
		Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan						620.598.609,00							-	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
			terlaksananya Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan (paket)				*1*		*(kota kupang, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*1*		
		Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual						286.452.869,00							-	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
			terlaksananya Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual (paket)				*1*		*(kota kupang, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*1*		
	5.06	**PENGHUBUNG**						**10.716.697.057,00**							**0,00**	
1.	**5.06.5-7.0-0.0-0.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**						**7.074.359.671,00**			**Tidak**	**Tidak**			**0,00**	**Badan Pengelolaan Perbatasan Daerah**
			Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran yang berkualitas (%)				***100***									
			Meningkatnya sarana dan prasarana (%)				***100***									
			Tercapainya penyusunan capaian kinerja ikhtisar realisasi kinerja dan keuangan (%)				***100***									
	5.06.5-7.0-0.0-0.01.01.1.01	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						88.336.000,00			Tidak	Tidak			-	Badan Pengelolaan Perbatasan Daerah
			Terlaksananya Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (%)				*100*		*(22 Kab/Kota, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*100*		
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						14.821.250,00							-	Badan Pengelolaan Perbatasan Daerah
			tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (paket)				*1*		*(kota kupang, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*1*		
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD						14.821.250,00							-	Badan Pengelolaan Perbatasan Daerah

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode RPJMD	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2020	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RKPD TAHUN 2021	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2023		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2022	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			terlaksanya Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (paket)				*1*		*(kota kupang, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*1*		
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD						14.821.250,00								Badan Pengelolaan Perbatasan Daerah
			terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (paket)				*1*		*(kota kupang, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*1*		
		Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD						14.821.250,00								Badan Pengelolaan Perbatasan Daerah
			terlaksanya Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD (paket)				*1*		*(kota kupang, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*1*		
		Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD						14.821.250,00								Badan Pengelolaan Perbatasan Daerah
			terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD (paket)				*1*		*(kota kupang, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*1*		
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD						14.229.750,00								Badan Pengelolaan Perbatasan Daerah
			terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (paket)				*1*		*(kota kupang, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*1*		
	5.06.5-7.0-0.0-0.01.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						5.405.852.004,00			Tidak	Tidak				Badan Pengelolaan Perbatasan Daerah
			Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah (%)				*100*		*(22 Kab/Kota, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*100*		
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						5.405.852.004,00								Badan Pengelolaan Perbatasan Daerah
			tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN (paket)				*1*		*(kota kupang, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*1*		
	5.06.5-7.0-0.0-0.01.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah						16.200.000,00			Tidak	Tidak				Badan Pengelolaan Perbatasan Daerah
			Terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah (%)				*100*		*(22 Kab/Kota, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*100*		
		Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD						16.200.000,00								Badan Pengelolaan Perbatasan Daerah
			Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (paket)				*1*		*(kOTA kUPANG, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*1*		
	5.06.5-7.0-0.0-0.01.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						61.332.250,00			Tidak	Tidak				Badan Pengelolaan Perbatasan Daerah
			Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah (%)				*100*		*(22 Kab/Kota, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*100*		
		Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian						35.384.000,00								Badan Pengelolaan Perbatasan Daerah
			terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (paket)				*1*		*(kota kupang, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*1*		
		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi						25.948.250,00								Badan Pengelolaan Perbatasan Daerah
			terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi (paket)				*1*		*(kota kupang, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*1*		
	5.06.5-7.0-0.0-0.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						480.479.680,00			Tidak	Tidak				Badan Pengelolaan Perbatasan Daerah

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode RPJMD	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2020	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RKPD TAHUN 2021	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2023		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2022	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah (%)				*100*		*(22 Kab/Kota, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*100*		
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor						9.860.800,00								- Badan Pengelolaan Perbatasan Daerah
			tersedianya Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor (Paket)				*1*		*(kota kupang, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*1*		
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						13.104.000,00								- Badan Pengelolaan Perbatasan Daerah
			tersedianya Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan (paket)				*1*		*(kota kupang, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*1*		
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan						26.083.200,00								- Badan Pengelolaan Perbatasan Daerah
			tersedianya Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan (paket)				*1*		*(kota kupang, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*1*		
		Penyediaan Bahan/Material						97.795.680,00								- Badan Pengelolaan Perbatasan Daerah
			tersedianya Penyediaan Bahan/Material (paket)				*1*		*(kota kupang, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*1*		
		Fasilitasi Kunjungan Tamu						30.804.000,00								- Badan Pengelolaan Perbatasan Daerah
			terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu (paket)				*1*		*(kota kupang, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*1*		
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						302.832.000,00								- Badan Pengelolaan Perbatasan Daerah
			terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (paket)				*100*		*(kota kupang, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*1*		
	5.06.5-7.0-0.0-0.01.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						384.078.737,00			Tidak	Tidak				- Badan Pengelolaan Perbatasan Daerah
			Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (%)				*100*		*(22 Kab/Kota, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*100*		
		Pengadaan Mebel						112.721.124,00								- Badan Pengelolaan Perbatasan Daerah
			tersedianya Mebel (paket)				*1*		*(kota kupang, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*1*		
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya						271.357.613,00								- Badan Pengelolaan Perbatasan Daerah
			terlaksananya Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya (paket)				*1*		*(kota kupang, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*1*		
	5.06.5-7.0-0.0-0.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						475.652.000,00			Tidak	Tidak				- Badan Pengelolaan Perbatasan Daerah
			Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%)				*100*		*(22 Kab/Kota, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*100*		
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat						7.344.000,00								- Badan Pengelolaan Perbatasan Daerah
			tersedianya Jasa Surat Menyurat (paket)				*1*		*(kota kupang, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*1*		
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						90.312.000,00								- Badan Pengelolaan Perbatasan Daerah

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode RPJMD	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2020	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RKPD TAHUN 2021	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2023		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2022	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik (paket)				*1*		*(kota kupang, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*1*		
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						377.996.000,00								- Badan Pengelolaan Perbatasan Daerah
			tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor (paket)				*1*		*(kota kupang, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*1*		
	5.06.5-7.0-0.0-0.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						162.429.000,00			Tidak	Tidak				- Badan Pengelolaan Perbatasan Daerah
			Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%)				*100*		*(22 Kab/Kota, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*100*		
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						118.816.000,00								- Badan Pengelolaan Perbatasan Daerah
			tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan (paket)				*1*		*(kota kupang, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*1*		
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						31.100.000,00								- Badan Pengelolaan Perbatasan Daerah
			tersedianya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya (paket)				*1*		*(kota kupang, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*1*		
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya						12.513.000,00								- Badan Pengelolaan Perbatasan Daerah
			terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya (paket)				*1*		*(kota kupang, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*1*		
2.	**5.06.5-7.0-0.0-0.01.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN PERBATASAN**						**3.642.337.386,00**			**Ya**	**Ya**			**0,00**	**Badan Pengelolaan Perbatasan Daerah**
			Meningkatnya Cakupan Layanan Pemerintah Daerah dan KL (Jumlah Layanan Pemerintah Daerah dan KL) (%)				**67**									
			Meningkatnya Cakupan Koordinasi, Integrasi dan Sinkronisasi Pembangunan dan Pemanfaatan Kawasan Perbatasan (%)				**67**									
	5.06.5-7.0-0.0-0.01.02.1.01	Pelaksanaan Pelayanan Penghubung						922.500.000,00		Dana Perimbangan	Tidak	Tidak				- Badan Pengelolaan Perbatasan Daerah
			Terlaksananya Pelayanan Penghubung (%)				*100*		*(22 Kab/Kota, NUSA TENGGARA TIMUR)*	*Dana Perimbangan*				*100*		
		Koordinasi, Integrasi, dan Sinkronisasi Kebijakan Otonomi Daerah						467.500.000,00		Dana Perimbangan						- Badan Pengelolaan Perbatasan Daerah
			terlaksananya Koordinasi, Integrasi, dan Sinkronisasi Kebijakan Otonomi Daerah (paket)				*1*		*(DKI Jakarta, NUSA TENGGARA TIMUR)*	*Dana Perimbangan*				*1*		
		Penyusunan Rencana Aksi Pembangunan Kawasan Perbatasan						455.000.000,00		Dana Perimbangan						- Badan Pengelolaan Perbatasan Daerah
			terlaksananya Penyusunan Rencana Aksi Pembangunan Kawasan Perbatasan (paket)				*1*		*(DKI Jakarta, NUSA TENGGARA TIMUR)*	*Dana Perimbangan*				*1*		
	5.06.5-7.0-0.0-0.01.02.1.02	Pelaksanaan Kewilayahan Perbatasan						1.994.500.000,00		Dana Perimbangan	Tidak	Tidak				- Badan Pengelolaan Perbatasan Daerah

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode RPJMD	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2020	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RKPD TAHUN 2021	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2023		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2022	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Terlaksananya Kewilayahan Perbatasan (%)				*100*		*(22 Kab/Kota, NUSA TENGGARA TIMUR)*	*Dana Perimbangan*				*100*		
		Koordinasi, Integrasi, dan Sinkronisasi Pembangunan Kawasan Perbatasaan						1.002.000.000,00		Dana Perimbangan					-	Badan Pengelolaan Perbatasan Daerah
			terlaksananya Koordinasi, Integrasi, dan Sinkronisasi Pembangunan Kawasan Perbatasaan (paket)				*1*		*(DKI Jakarta, NUSA TENGGARA TIMUR)*	*Dana Perimbangan*				*1*		
		Koordinasi, Integrasi, dan Sinkronisasi Pemanfaatan Kawasan Perbatasan						185.000.000,00		Dana Perimbangan					-	Badan Pengelolaan Perbatasan Daerah
			terlaksananya Koordinasi, Integrasi, dan Sinkronisasi Pemanfaatan Kawasan Perbatasan (paket)				*1*		*(DKI Jakarta, NUSA TENGGARA TIMUR)*	*Dana Perimbangan*				*1*		
		Fasilitasi Penegasan, Pemeliharaan, dan Pengamanan Batas Wilayah Negara						467.500.000,00		Dana Perimbangan					-	Badan Pengelolaan Perbatasan Daerah
			terlaksananya Fasilitasi Penegasan, Pemeliharaan, dan Pengamanan Batas Wilayah Negara (paket)				*1*		*(DKI Jakarta, NUSA TENGGARA TIMUR)*	*Dana Perimbangan*				*1*		
		Inventarisasi Potensi Sumber Daya untuk Pengusulan Penetapan Zona Pengembangan Ekonomi, Sosial Budaya, Lingkungan Hidup, dan Zona Lainnya di Kawasan Perbatasan						340.000.000,00		Dana Perimbangan					-	Badan Pengelolaan Perbatasan Daerah
			terlaksananya Inventarisasi Potensi Sumber Daya untuk Pengusulan Penetapan Zona Pengembangan Ekonomi, Sosial Budaya, Lingkungan Hidup, dan Zona Lainnya di Kawasan Perbatasan				*1*		*(DKI Jakarta, NUSA TENGGARA TIMUR)*	*Dana Perimbangan*				*1*		
	5.06.5-7.0-0.0-0.01.02.1.03	Monitoring dan Evaluasi						725.337.386,00		Dana Perimbangan	Tidak	Tidak			-	Badan Pengelolaan Perbatasan Daerah
			Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi (%)				*100*		*(22 Kab/Kota, NUSA TENGGARA TIMUR)*	*Dana Perimbangan*				*100*		
		Pengendalian dan Pengawasan serta Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perbatasan						510.000.000,00		Dana Perimbangan					-	Badan Pengelolaan Perbatasan Daerah
			terlaksananya Pengendalian dan Pengawasan serta Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perbatasan (paket)				*1*		*(DKI Jakarta, NUSA TENGGARA TIMUR)*	*Dana Perimbangan*				*1*		
		Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perbatasan						170.000.000,00		Dana Perimbangan					-	Badan Pengelolaan Perbatasan Daerah
			terlaksananya Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perbatasan (paket)				*1*		*(DKI Jakarta, NUSA TENGGARA TIMUR)*	*Dana Perimbangan*				*1*		
		Pengawasan Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perbatasan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota						45.337.386,00		Dana Perimbangan					-	Badan Pengelolaan Perbatasan Daerah
			terlaksananya pengawasan Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perbatasan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (paket)				*1*		*(DKI Jakarta, NUSA TENGGARA TIMUR)*	*Dana Perimbangan*				*1*		
	5.07	**PENGELOAAN PERBATASAN**						**12.555.860.100,00**							**0,00**	
1.	**5.07.5-6.0-0.0-0.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**						**5.951.249.600,00**			**Tidak**	**Tidak**			**0,00**	**Badan Penghubung**

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode RPJMD	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2020	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RKPD TAHUN 2021	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2023		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2022	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran yang berkualitas (%)				***100***			***Dana Perimbangan***						
			Meningkatnya sarana dan prasarana (%)				***100***			***Dana Perimbangan***						
			Tercapainya penyusunan capaian kinerja ikhtisar realisasi kinerja dan keuangan (%)				***100***			***Dana Perimbangan***						
	5.07.5-6.0-0.0-0.01.01.1.01	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						9.192.000,00			Tidak	Tidak			-	Badan Penghubung
			Terlaksananya Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (%)				*100*		*(22 Kab/Kota, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*100*		
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD						9.192.000,00							-	Badan Penghubung
			terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (paket)				*1*		*(jakarta, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*1*		
	5.07.5-6.0-0.0-0.01.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah						37.000.000,00			Tidak	Tidak			-	Badan Penghubung
			Terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah (%)				*100*		*(22 Kab/Kota, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*100*		
		Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD						37.000.000,00							-	Badan Penghubung
			terlaksananya Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD (paket)				*1*		*(22kab/kota, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*1*		
	5.07.5-6.0-0.0-0.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						840.556.000,00		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Tidak	Tidak			-	Badan Penghubung
			Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah (%)				*100*		*(22 Kab/Kota, NUSA TENGGARA TIMUR)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*				*100*		
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor						46.409.000,00							-	Badan Penghubung
			terlaksananya Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor (paket)				*1*		*(Jakarta, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*1*		
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						49.100.000,00							-	Badan Penghubung
			terlaksananya Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan (paket)				*1*		*(jakarta, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*1*		
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan						5.928.000,00							-	Badan Penghubung
			terlaksananya Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan (paket)				*1*		*(Jakarta, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*1*		
		Penyediaan Bahan/Material						82.811.000,00							-	Badan Penghubung
			terlaksananya Penyediaan Bahan/Material (paket)				*1*		*(jakarta, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*1*		
		Fasilitasi Kunjungan Tamu						84.968.000,00							-	Badan Penghubung
			terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu (paket)				*1*		*(jakarta, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*1*		

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode RPJMD	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2020	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RKPD TAHUN 2021	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2023		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2022	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						571.340.000,00		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					-	Badan Penghubung
			Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Paket)				*1*		*(Kupang, NUSA TENGGARA TIMUR)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*				*1*		
			terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (paket)				*1*		*(jakarta, NUSA TENGGARA TIMUR)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*				*1*		
	5.07.5-6.0-0.0-0.01.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						375.800.000,00			Tidak	Tidak			-	Badan Penghubung
			Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (%)				*100*		*(22 Kab/Kota, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*100*		
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya						375.800.000,00							-	Badan Penghubung
			terlaksananya Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya (paket)				*1*		*(jakarta, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*1*		
	5.07.5-6.0-0.0-0.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						1.835.674.000,00			Tidak	Tidak			-	Badan Penghubung
			Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%)				*100*		*(22 Kab/Kota, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*100*		
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat						162.000.000,00							-	Badan Penghubung
			terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat (paket)				*1*		*(jakarta, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*1*		
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						292.416.000,00							-	Badan Penghubung
			terlaksananya Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik (paket)				*1*		*(jakarta, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*1*		
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						1.381.258.000,00							-	Badan Penghubung
			terlaksananya Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (paket)				*1*		*(jakarta, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*1*		
	5.07.5-6.0-0.0-0.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						2.483.027.600,00		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Tidak	Tidak			-	Badan Penghubung
			Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%)				*100*		*(22 Kab/Kota, NUSA TENGGARA TIMUR)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*				*100*		
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						1.351.447.600,00							-	Badan Penghubung
			terlaksananya Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan (paket)				*1*		*(jakarta, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*1*		
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						71.780.000,00							-	Badan Penghubung
			terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya (paket)				*1*		*(jakarta, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*1*		
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						1.059.800.000,00		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					-	Badan Penghubung

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode RPJMD	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2020	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RKPD TAHUN 2021	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2023		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2022	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya (paket)				*1*		*(Jakarta, NUSA TENGGARA TIMUR)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*				*1*		
	5.07.5-6.0-0.0-0.01.01.1.14	Fasilitasi Keprotokolan						370.000.000,00			Tidak	Tidak			-	Badan Penghubung
			Terlaksananya Fasilitasi Keprotokolan (%)				*100*		*(22 Kab/Kota, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*100*		
		Fasilitasi Kunjungan Tamu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah						370.000.000,00							-	Badan Penghubung
			terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (paket)				*1*		*(DKI Jakarta, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*1*		
2.	**5.07.5-6.0-0.0-0.01.02**	**PROGRAM PELAYANAN PENGHUBUNG**						**6.604.610.500,00**			**Ya**	**Ya**			**0,00**	**Badan Penghubung**
			Meningkatnya cakupan layanan pemerintah daerah dan KL (%)				***75***									
			Meningkatnya cakupan pembinaan kemasyarakatan (%)				***100***									
			Meningkatnya cakupan promosi daerah (%)				***100***									
	5.07.5-6.0-0.0-0.01.02.1.01	Pelaksanaan Pelayanan Penghubung						6.604.610.500,00			Tidak	Tidak			-	Badan Penghubung
			Terlaksananya Pelayanan Penghubung (%)				*100*		*(22 Kab/Kota, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*100*		
		Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik bagi Aparatur dan Masyarakat						232.800.000,00							-	Badan Penghubung
			terlaksananya Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik bagi Aparatur dan Masyarakat (paket)				*1*		*(Jkarta, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*1*		
		Pelayanan Kelembagaan Aparatur dan Masyarakat						2.263.306.000,00							-	Badan Penghubung
			terlaksananya Pelayanan Kelembagaan Aparatur dan Masyarakat (paket)				*1*		*(Jakarta, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*1*		
		Peningkatan Fasilitasi Promosi Produk Unggulan dan Pelestarian Seni Budaya						2.358.298.500,00							-	Badan Penghubung
			terlaksananya Peningkatan Fasilitasi Promosi Produk Unggulan dan Pelestarian Seni Budaya (paket)				*1*		*(Jakarta, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*1*		
		Kegiatan Fasilitasi Pameran Produk Unggulan dan pelestarian Seni Budaya						1.193.636.000,00							-	Badan Penghubung
			terlaksananya Kegiatan Fasilitasi Pameran Produk Unggulan dan pelestarian Seni Budaya (paket)				*1*		*(Jakarta, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*1*		
		Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pelayanan Penghubung						556.370.000,00							-	Badan Penghubung
			terlaksanakannya Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pelayanan Penghubung (paket)				*1*		*(Jakarta, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*1*		
	6	**UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN**						**34.971.772.311,00**							**0,00**	
	6.01	**INSPEKTORAT DAERAH**						**34.971.772.311,00**							**0,00**	

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode RPJMD	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2020	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RKPD TAHUN 2021	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2023		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2022	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.	**6.01.6-1.0-0.0-0.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**						**17.362.136.629,00**			**Tidak**	**Tidak**			**0,00**	**Inspektorat Daerah**
			Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran yang berkualitas (%)				***100***									
			Meningkatnya sarana dan prasarana (%)				***100***									
			Tercapainya penyusunan capaian kinerja ikhtisar realisasi kinerja dan keuangan (%)				***100***									
	6.01.6-1.0-0.0-0.01.01.1.01	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						205.000.000,00			Tidak	Tidak			-	Inspektorat Daerah
			Terlaksananya Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (%)				*100*		*(22 Kab/Kota, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*100*		
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						70.000.000,00							-	Inspektorat Daerah
			terlaksananya Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (paket)				*1*		*(kota kupang, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*1*		
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD						30.000.000,00							-	Inspektorat Daerah
			terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (paket)				*1*		*(kota kupang, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*1*		
		Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD						30.000.000,00							-	Inspektorat Daerah
			terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD (paket)				*1*		*(kota kupang, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*1*		
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD						65.000.000,00							-	Inspektorat Daerah
			terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (paket)				*1*		*(kota kupang, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*1*		
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						10.000.000,00							-	Inspektorat Daerah
			terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (paket)				*1*		*(kota kupang, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*1*		
	6.01.6-1.0-0.0-0.01.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						11.725.136.629,00			Tidak	Tidak			-	Inspektorat Daerah
			Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah (%)				*100*		*(22 Kab/Kota, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*100*		
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						11.636.136.629,00							-	Inspektorat Daerah
			tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN (paket)				*1*		*(kota kupang, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*1*		
		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD						24.000.000,00							-	Inspektorat Daerah
			terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (paket)				*1*		*(kota kupaang, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*1*		
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD						65.000.000,00							-	Inspektorat Daerah

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode RPJMD	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2020	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RKPD TAHUN 2021	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2023		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2022	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (paket)				*1*		*(kota kupang, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*1*		
	6.01.6-1.0-0.0-0.01.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						1.988.000.000,00			Tidak	Tidak			-	Inspektorat Daerah
			Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah (%)				*100*		*(22 Kab/Kota, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*100*		
		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya						88.000.000,00							-	Inspektorat Daerah
			terlaksananya Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya (PAKET)				*1*		*(kota kupang, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*1*		
		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi						1.800.000.000,00							-	Inspektorat Daerah
			terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi (paket)				*1*		*(kota kupang, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*1*		
		Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan						100.000.000,00							-	Inspektorat Daerah
			terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan (paket)				*1*		*(kota kupang, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*1*		
	6.01.6-1.0-0.0-0.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						248.000.000,00			Tidak	Tidak			-	Inspektorat Daerah
			Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah (%)				*100*		*(22 Kab/Kota, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*100*		
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor						15.000.000,00							-	Inspektorat Daerah
			tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor (paket)				*1*		*(kota kupang, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*1*		
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						40.000.000,00							-	Inspektorat Daerah
			tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan (paket)				*1*		*(kota kupang, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*1*		
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan						3.000.000,00							-	Inspektorat Daerah
			tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan (paket)				*1*		*(22 kab/kota, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*1*		
		Penyediaan Bahan/Material						40.000.000,00							-	Inspektorat Daerah
			tersedianya Bahan/Material (paket)				*1*		*(kota kupang, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*1*		
		Fasilitasi Kunjungan Tamu						150.000.000,00							-	Inspektorat Daerah
			terlaskasanya Fasilitasi Kunjungan Tamu (paket)				*1*		*(kota kupang, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*1*		
	6.01.6-1.0-0.0-0.01.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						1.880.000.000,00			Tidak	Tidak			-	Inspektorat Daerah
			Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (%)				*100*		*(22 Kab/Kota, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*100*		
		Pengadaan Mebel						1.000.000.000,00							-	Inspektorat Daerah
			terlaksananya pengadaan Mebel (paket)				*1*		*(kota kupang, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*1*		

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode RPJMD	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2020	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RKPD TAHUN 2021	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2023		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2022	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya						880.000.000,00							-	Inspektorat Daerah
			terlaksananya Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya (paket)				*1*		*(kota kupang, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*1*		
	6.01.6-1.0-0.0-0.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						866.000.000,00			Tidak	Tidak			-	Inspektorat Daerah
			Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%)				*100*		*(22 Kab/Kota, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*100*		
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat						10.000.000,00							-	Inspektorat Daerah
			tersedianya Jasa Surat Menyurat (paket)				*1*		*(kota kupang, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*1*		
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						350.000.000,00							-	Inspektorat Daerah
			tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik (paket)				*1*		*(kota kupang, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*1*		
		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor						6.000.000,00							-	Inspektorat Daerah
			tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor (paket)				*1*		*(kota kupang, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*1*		
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						500.000.000,00							-	Inspektorat Daerah
			tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor (paket)				*1*		*(kota kupang, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*1*		
	6.01.6-1.0-0.0-0.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						450.000.000,00			Tidak	Tidak			-	Inspektorat Daerah
			Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%)				*100*		*(22 Kab/Kota, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*100*		
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						300.000.000,00							-	Inspektorat Daerah
			tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan (paket)				*1*		*(kota kupang, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*1*		
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						100.000.000,00							-	Inspektorat Daerah
			terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya (paket)				*1*		*(kota kupang, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*1*		
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya						50.000.000,00							-	Inspektorat Daerah
			terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya (paket)				*1*		*(kota kupang, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*1*		
2.	**6.01.6-1.0-0.0-0.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN**						**13.715.995.478,00**			**Ya**	**Ya**			**0,00**	**Inspektorat Daerah**
			Persentase obyek pemeriksaan yang dilakukan pembinaan dan pengawasan (%)				***100***									
	6.01.6-1.0-0.0-0.01.02.1.01	Penyelenggaraan Pengawasan Internal						12.565.995.478,00			Tidak	Tidak			-	Inspektorat Daerah

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode RPJMD	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2020	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RKPD TAHUN 2021	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2023		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2022	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Terlaksananya Penyelenggaraan Pengawasan Internal (%)				*100*		*(22 Kab/Kota, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*100*		
		Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah						8.217.000.000,00							-	Inspektorat Daerah
			terlaksananya Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah (paket)				*1*		*(22kab/kota, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*1*		
		Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah						1.890.995.478,00							-	Inspektorat Daerah
			terlaksananya Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah (paket)				*1*		*(22kab/kota, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*1*		
		Reviu Laporan Kinerja						167.000.000,00							-	Inspektorat Daerah
			terlaksananya Reviu Laporan Kinerja (paket)				*1*		*(22kab/kota, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*1*		
		Reviu Laporan Keuangan						95.000.000,00							-	Inspektorat Daerah
			terlaksananya Reviu Laporan Keuangan (paket)				*1*		*(22kab/kota, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*1*		
		Pengawasan Umum dan Teknis Kabupaten/Kota						2.196.000.000,00							-	Inspektorat Daerah
			terlaksananya Pengawasan Umum dan Teknis Kabupaten/Kota (paket)				*1*		*(22kab/kota, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*1*		
	6.01.6-1.0-0.0-0.01.02.1.02	Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu						1.150.000.000,00			Tidak	Tidak			-	Inspektorat Daerah
			Terlaksananya Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu (%)				*100*		*(22 Kab/Kota, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*100*		
		Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah						100.000.000,00							-	Inspektorat Daerah
			terlaksananya Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah (paket)				*1*		*(22kab/kota, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*1*		
		Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu						1.050.000.000,00							-	Inspektorat Daerah
			terlaksananya Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu (paket)				*1*		*(22kab/kota, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*1*		
3.	**6.01.6-1.0-0.0-0.01.03**	**PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI**						**3.893.640.204,00**			**Ya**	**Ya**			**0,00**	**Inspektorat Daerah**
			Persentase Pendampingan dan Asistensi pada PD Provinsi (Meningkatnya perumusan kebijakan, pendampingan dan asistensi terhadap Perangkat Daerah Provinsi) (%)				***100***									
	6.01.6-1.0-0.0-0.01.03.1.01	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan						3.256.640.204,00			Tidak	Tidak			-	Inspektorat Daerah
			Terlaksananya Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan (%)				*100*		*(22 Kab/Kota, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*100*		
		Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan						985.000.000,00							-	Inspektorat Daerah
			terlaksananya Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan (paket)				*1*		*(22kab/kota, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*1*		

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode RPJMD	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2020	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RKPD TAHUN 2021	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2023		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2022	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan						2.271.640.204,00							-	Inspektorat Daerah
			terlaksananya Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan (paket)				*1*		*(22kab/kota, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*1*		
	6.01.6-1.0-0.0-0.01.03.1.02	Asistensi dan Pendampingan						637.000.000,00			Tidak	Tidak			-	Inspektorat Daerah
			Terlaksananya Asistensi dan Pendampingan (%)				*100*		*(22 Kab/Kota, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*100*		
		Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah						540.000.000,00							-	Inspektorat Daerah
			terlaksananya Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah (paket)				*1*		*(22kab/kota, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*1*		
		Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi						13.000.000,00							-	Inspektorat Daerah
			terlaksananya Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korups (paket)				*1*		*(22kab/kota, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*1*		
		Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas						84.000.000,00							-	Inspektorat Daerah
			terlaksananya Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas (paket)				*1*		*(22 kab/kota, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*1*		
	8	**UNSUR PEMERINTAHAN UMUM**						**14.308.548.141,00**							**0,00**	
	8.01	**KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**						**14.308.548.141,00**							**0,00**	
1.	**8.01.8-1.0-0.0-0.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**						**7.515.911.532,00**			**Tidak**	**Tidak**			**0,00**	**Badan Kesatuan Bangsa dan Politik**
			Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran yang berkualitas (%)				***100***									
			Meningkatnya sarana dan prasarana (%)				***100***									
			Tercapainya penyusunan capaian kinerja ikhtisar realisasi kinerja dan keuangan (%)				***100***									
	8.01.8-1.0-0.0-0.01.01.1.01	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						333.151.740,00		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Tidak	Tidak			-	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
			terlaksananya Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (%)				*100*		*(22 kab/kota, NUSA TENGGARA TIMUR)*	*Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum*				*100*		
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						15.000.000,00		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum					-	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
			Tercapainya Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Paket)				*1*		*(KOTA KUPANG)*	*Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum*				*1*		
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD						15.000.000,00		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum					-	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
			Terwujudnya Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Paket)				*1*		*(KOTA KUPANG)*	*Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum*				*1*		

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode RPJMD	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2020	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RKPD TAHUN 2021	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2023		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2022	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD						15.000.000,00		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum						Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
			Tercapainya Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Paket)				*1*		*(KOTA KUPANG)*	*Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum*				*1*		
		Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD						15.000.000,00		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum						Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
			Tercapainya Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD (Paket)				*1,00*		*(KOTA KUPANG)*	*Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum*				*1,00*		
		Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD						15.000.000,00		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum						Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
			Terwujudnya Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD (Paket)				*1*		*(KOTA KUPANG)*	*Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum*				*1*		
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD						49.000.000,00								Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
			terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Paket)				*1*		*(kota kupang, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*1*		
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						209.151.740,00		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum						Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
			Terlaksananya Monitoring Evaluasi Terpadu Perangkat Daerah (Paket)				*1,00*		*(22 Kab/Kota, NUSA TENGGARA TIMUR)*	*Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum*				*1,00*		
	8.01.8-1.0-0.0-0.01.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						5.201.281.914,00		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Tidak	Tidak				Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
			Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah (%)				*100*		*(22 Kab/Kota, NUSA TENGGARA TIMUR)*	*Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum*				*100*		
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						5.176.281.914,00								Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN (paket)				*1*		*(kota kupang, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*1*		
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD						25.000.000,00		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum						Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
			Tercapainya Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Paket)				*1*		*(KOTA KUPANG)*	*Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum*				*1*		
	8.01.8-1.0-0.0-0.01.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						133.500.000,00		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Tidak	Tidak				Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
			Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah (%)				*100*		*(22 Kab/Kota, NUSA TENGGARA TIMUR)*	*Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum*				*100*		
		Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian						25.000.000,00		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum						Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
			Tercapainya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Paket)				*1*		*(KOTA KUPANG)*	*Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum*				*1*		
		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi						58.500.000,00		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum						Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode RPJMD	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2020	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RKPD TAHUN 2021	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2023		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2022	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			terlaksananya Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN (paket)				*1*		*(kota kupang, NUSA TENGGARA TIMUR)*	*Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum*				*1*		
		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan						50.000.000,00		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum						Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
			Tercapainya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Paket)				*1,00*		*(Luar Wilayah)*	*Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum*				*1,00*		
	8.01.8-1.0-0.0-0.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						565.863.772,00		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Tidak	Tidak				Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
			Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah (%)				*100*		*(22 Kab/Kota, NUSA TENGGARA TIMUR)*	*Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum*				*100*		
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor						5.494.300,00								Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
			terlaksananya Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor (paket)				*1*		*(kota kupang, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*1*		
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga						7.221.422,00								Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
			terlaksananya penyediaan Peralatan Rumah Tangga (paket)				*1*		*(kota kupang, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*1*		
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						24.023.250,00								Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
			terlaksananya Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan (paket)				*1*		*(kota kupang, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*1*		
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan						13.379.600,00								Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
			terlaksananya Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan (paket)				*1*		*(kota kupang, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*1*		
		Penyediaan Bahan/Material						38.750.000,00								Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
			terlaksananya Penyediaan Bahan/Material (paket)				*1*		*(kota kupang, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*1*		
		Fasilitasi Kunjungan Tamu						9.020.000,00								Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
			terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu (paket)				*1*		*(kota kupang, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*1*		
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						401.137.000,00		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum						Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
			terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (paket)				*1,00*		*(kota kupang, NUSA TENGGARA TIMUR)*	*Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum*				*1,00*		
		Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD						66.838.200,00		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum						Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
			terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (paket)				*1*		*(kota kupang, NUSA TENGGARA TIMUR)*	*Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum*				*1*		
	8.01.8-1.0-0.0-0.01.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						139.723.102,00			Tidak	Tidak				Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode RPJMD	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2020	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RKPD TAHUN 2021	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2023		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2022	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (%)				*100*		*(22 Kab/Kota, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*100*		
		Pengadaan Mebel						50.118.200,00								- Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
			terlaksananya Pengadaan Mebel (paket)				*1*		*(kota kupang, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*1*		
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya						40.498.262,00								- Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
			terlaksananya Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya (paket)				*1*		*(kota kupang, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*1*		
		Pengadaan Aset Tetap Lainnya						49.106.640,00								- Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
			terlaksananya Pengadaan Aset Tetap Lainnya (paket)				*1*		*(kota kupang, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*1*		
	8.01.8-1.0-0.0-0.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						458.602.160,00		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Tidak	Tidak				- Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
			Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%)				*100*		*(22 Kab/Kota, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*100*		
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat						1.260.000,00								- Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
			terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat (paket)				*1*		*(kota kupang, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*1*		
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						129.496.000,00								- Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
			terlaksananya Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik (paket)				*1*		*(kota kupang, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*1*		
		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor						6.850.000,00								- Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
			terlaksananya Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor (PAKET)				*1*		*(KOTA KUPANG, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*1*		
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						320.996.160,00		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum						- Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
			Terciptanya Penyedian Jasa Pelayanan Umum Kantor (Paket)				*1*		*(Kupang, KOTA KUPANG)*	*Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum*				*1*		
	8.01.8-1.0-0.0-0.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						683.788.844,00			Tidak	Tidak				- Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
			Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%)				*100*		*(22 Kab/Kota, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*100*		
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						24.500.000,00								- Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
			terlaksananya Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan (paket)				*1*		*(kota kupang, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*1*		

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode RPJMD	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2020	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RKPD TAHUN 2021	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2023		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2022	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						14.500.000,00							-	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
			terlaksananya Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan (paket)				*1*		*(kota kupang, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*1*		
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya						644.788.844,00							-	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
			terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya (paket)				*1*		*(kota kupang, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*1*		
2.	**8.01.8-1.0-0.0-0.01.02**	**PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN**						**1.900.537.832,00**			**Ya**	**Ya**			**0,00**	**Badan Kesatuan Bangsa dan Politik**
			Cakupan Parpol, Ormas dan Forum Pembaruan Kebangsaan yang terlibat dalam Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan (141 Lembaga)				***85,1***									
	8.01.8-1.0-0.0-0.01.02.1.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan						1.900.537.832,00		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Tidak	Tidak			-	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
			Terlaksananya Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan				*100*		*(22 Kab/Kota, NUSA TENGGARA TIMUR)*	*Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum*				*100*		
		Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika, dan Sejarah Kebangsaan						1.750.537.832,00		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum					-	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
			terlaksananya Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika, dan Sejarah Kebangsaan				*1,00*		*(22 kab/kota, NUSA TENGGARA TIMUR)*	*Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum*				*1,00*		
		Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika, dan Sejarah Kebangsaan						150.000.000,00		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum					-	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
			terlaksananya Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika, dan Sejarah Kebangsaan (paket)				*1*		*(22 kab/kota, NUSA TENGGARA TIMUR)*	*Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum*				*1*		
3.	**8.01.8-1.0-0.0-0.01.03**	**PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN**						**3.699.313.640,00**			**Ya**	**Ya**			**0,00**	**Badan Kesatuan Bangsa dan Politik**
			Cakupan Parpol, Ormas dan Lembaga Pendidikan yang terlibat dalam Program Peningkatan Peran Parpol dalam Pendidikan Politik serta Pengembangan Etika dan Budaya Politik (309 Lembaga)				***90,6***			***Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum***						

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode RPJMD	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2020	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RKPD TAHUN 2021	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2023		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2022	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	8.01.8-1.0-0.0-0.01.03.1.01	Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik						3.699.313.640,00		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Tidak	Tidak			-	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
			Terlaksananya Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik (%)				*100*		*(22 Kab/Kota, NUSA TENGGARA TIMUR)*	*Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum*				*100*		
		Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan, dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di						3.699.313.640,00		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum					-	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
			terlaksananya Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan, dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah				*1,00*		*(22 kab/kota, NUSA TENGGARA TIMUR)*	*Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum*				*1,00*		
4.	**8.01.8-1.0-0.0-0.01.04**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN**						**232.237.411,00**			**Ya**	**Ya**			**0,00**	**Badan Kesatuan Bangsa dan Politik**
			Cakupan peningkatan Pemberdayaan dan Pengawasan organisasi kemasyarakatan (49 Lembaga) (%)				**65,3**			***Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum***						
	8.01.8-1.0-0.0-0.01.04.1.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan						232.237.411,00		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Tidak	Tidak			-	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
			Terlaksananya Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan (%)				*100*		*(22 Kab/Kota, NUSA TENGGARA TIMUR)*	*Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum*				*100*		
		Pelaksanaan Kebijakan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi, dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah						144.029.798,00		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum					-	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
			terlaksananya Pelaksanaan Kebijakan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi, dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah (PAKET)				*1,00*		*(22 kab/kota, NUSA TENGGARA TIMUR)*	*Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum*				*1,00*		
		Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi, dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah						88.207.613,00							-	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode RPJMD	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2020	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RKPD TAHUN 2021	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2023		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2022	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			terlaksananya Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi, dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah				*1*		*(22 kab/kota, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*1*		
5.	**8.01.8-1.0-0.0-0.01.05**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA**						**192.970.986,00**			**Ya**	**Ya**			**0,00**	**Badan Kesatuan Bangsa dan Politik**
			Meningkatnya ketahanan Organisasi Kemasyarakatan terhadap Ekonomi, Sosial dan Budaya (%)				***100***									
	8.01.8-1.0-0.0-0.01.05.1.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya						192.970.986,00		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Tidak	Tidak			-	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
			Terlaksananya Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya (%)				*100*		*(22 Kab/Kota, NUSA TENGGARA TIMUR)*	*Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum*				*100*		
		Penyusunan Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah						30.000.000,00							-	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
			terlaksananya Penyusunan Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah				*1*		*(22 kab/kota, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*1*		
		Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah						117.970.986,00		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum					-	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
			terlaksananya Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah				*1,00*		*(22kab/kota, NUSA TENGGARA TIMUR)*	*Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum*				*1,00*		
		Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah						45.000.000,00							-	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
			terlaksananya Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah				*1*		*(22 kab/kota, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*1*		
6.	**8.01.8-1.0-0.0-0.01.06**	**PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK**						**767.576.740,00**			**Ya**	**Ya**			**0,00**	**Badan Kesatuan Bangsa dan Politik**

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode RPJMD	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2020	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RKPD TAHUN 2021	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2023		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2022	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Cakupan Konflik Sosial yang ditangani setiap tahun (%)				***100***									
	8.01.8-1.0-0.0-0.01.06.1.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial						767.576.740,00		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Tidak	Tidak			-	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
			Terlaksananya Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial (%)				*100*		*(22 Kab/Kota, NUSA TENGGARA TIMUR)*	*Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum*				*100*		
		Penyusunan Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing, dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik						82.873.000,00							-	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
			terlaksananya Penyusunan Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing, dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah				*1*		*(22 kab/kota, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*1*		
		Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing, dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik						-							-	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
			terlaksananya Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing, dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah				*1*		*(22 kab/kota, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*1*		
		Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik						575.552.000,00		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum					-	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
			terlaksananya Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah				*1*		*(22 kab/kota, NUSA TENGGARA TIMUR)*	*Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum*				*1*		
		Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik						109.151.740,00							-	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode RPJMD	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2020	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RKPD TAHUN 2021	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2023		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2022	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			terlaksananya Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah				*1*		*(22 kab/kota, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*1*		
	JUMLAH							**8.274.512.151.020,43**							-	

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN 2022

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode RPJMD	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2020	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RKPD TAHUN 2021	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2023		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2022	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**5.173.535.725.365,43**							**0,00**	
	1.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**						**3.499.694.256.730,00**							**0,00**	
1.	**1.01.1-1.2-22.0-0.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**						**871.194.619.500,00**			**Tidak**	**Tidak**			**0,00**	**Dinas Pendidikan dan Kebudayaan**
			Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran yang berkualitas (%)				***100***									
			Meningkatnya sarana dan prasarana (%)				***100***									
			Tercapainya penyusunan capaian kinerja ikhtisar realisasi kinerja dan keuangan (%)				***100***									
	1.01.1-1.2-22.0-0.02.01.1.01	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						382.696.500,00			Tidak	Tidak			-	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
			Terlaksananya Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (%)				*100*		*(22 kab/kota, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*100*		
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						55.000.000,00							-	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
			Terlaksana Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (paket)				*1*		*(kota kupang, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*0*		
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD						53.696.500,00							-	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
			Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (paket)				*1*		*(Kota Kupang, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*1*		
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD						50.000.000,00							-	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
			Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (paket)				*1*		*(Kota Kupang, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*1*		
		Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD						52.000.000,00							-	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
			Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD (paket)				*1*		*(Kota Kupang, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*1*		
		Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD						57.000.000,00							-	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
			Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD (paket)				*1*		*(Kota Kupang, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*1*		

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode RPJMD	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2020	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RKPD TAHUN 2021	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2023		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2022	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD						60.000.000,00							-	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
			Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (paket)				*1*		*(Kota Kupang, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*1*		
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						55.000.000,00							-	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
			terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (paket)				*1*		*(Kota Kupang, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*1*		
	1.01.1-1.2-22.0-0.02.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						858.489.023.000,00			Tidak	Tidak			-	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
			Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah (%)				*100*		*(22 kab/kota, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*100*		
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						858.178.023.000,00							-	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
			Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN (paket)				*1*		*(Kupang, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*1*		
		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN						5.000.000,00							-	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
			Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (paket)				*1*		*(22 Kab Kota, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*1*		
		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD						306.000.000,00							-	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
			Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi keuangan SKPD (paket)				*1*		*(kota kupang, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*1*		
	1.01.1-1.2-22.0-0.02.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah						450.000.000,00			Tidak	Tidak			-	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
			Terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah (%)				*100*		*(22 kab/kota, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*100*		
		Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD						450.000.000,00							-	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
			Terlaksananya pengamanan barang milik daerah SKPD (paket)				*1*		*(Kota Kupang, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*1*		
	1.01.1-1.2-22.0-0.02.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						312.000.000,00			Tidak	Tidak			-	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah (%)				*100*		*(22 kab/kota, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*100*		
		Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai						40.000.000,00							-	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
			Terlaksananya peningkatan sarana dan prasarana disiplin pegawai (paket)				*1*		*(22 kab kota, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*1*		
		Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian						202.000.000,00							-	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
			terlaksananya pendataan dan pengolahan administrasi kepegwaian (paket)				*1*		*(kota kupang, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*1*		
		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi						70.000.000,00							-	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
			terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi (paket)				*1*		*(kota kupang, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*1*		

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode RPJMD	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2020	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RKPD TAHUN 2021	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2023		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2022	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.01.1-1.2-22.0-0.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						2.038.000.000,00			Tidak	Tidak			-	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
			Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah (%)				*100*		*(22 kab/kota, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*100*		
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor						110.000.000,00							-	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
			terlaksananya Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor (paket)				*1*		*(kota kupang, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*1*		
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor						70.000.000,00							-	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
			Terlaksananya Penyediaan Bahan Logistik Kantor (paket)				*1*		*(kota kupang, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*1*		
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						355.000.000,00							-	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
			Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan (paket)				*1*		*(kota kupang, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*1*		
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan						65.000.000,00							-	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
			terlaksananya Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan (paket)				*1*		*(kota kupang, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*1*		
		Penyediaan Bahan/Material						291.000.000,00							-	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
			tersedianya Bahan/Material (paket)				*1*		*(kota kupang, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*1*		
		Fasilitasi Kunjungan Tamu						177.000.000,00							-	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
			terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu (paket)				*1*		*(kota kupang, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*1*		
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						970.000.000,00							-	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
			Terlenggaranya rapat koordinasi dan konsultasi SKPD (paket)				*1*		*(22 kab kota, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*1*		
	1.01.1-1.2-22.0-0.02.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						1.289.000.000,00			Tidak	Tidak			-	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
			Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (%)				*100*		*(22 kab/kota, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*100*		
		Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						300.000.000,00							-	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
			terlaksananya Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan (paket)				*1*		*(kota kupang, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*1*		
		Pengadaan Mebel						280.000.000,00							-	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
			terlaksananya Pengadaan Mebel (paket)				*1*		*(kota kupang, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*1*		
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya						709.000.000,00							-	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
			terlaksananya pengadaan peralatan dan mesin lainnya (paket)				*1*		*(kota kupang, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*1*		
	1.01.1-1.2-22.0-0.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						6.276.900.000,00			Tidak	Tidak			-	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode RPJMD	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2020	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RKPD TAHUN 2021	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2023		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2022	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%)				*100*		*(22 kab/kota, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*100*		
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat						62.500.000,00								Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
			tersedianya jasa surat menyurat (paket)				*1*		*(kota kupang, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*1*		
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						1.018.400.000,00								Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
			terlaksananya Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik (paket)				*1*		*(kota kupang, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*1*		
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						5.196.000.000,00								Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
			terlaksananya Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (paket)				*1*		*(Kota Kupang, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*1*		
	1.01.1-1.2-22.0-0.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						1.957.000.000,00			Tidak	Tidak				Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
			Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%)				*100*		*(22 kab/kota, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*100*		
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						283.000.000,00								Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
			terlaksananya Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan (paket)				*1*		*(22 kab kota, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*1*		
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						155.000.000,00								Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
			terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya (paket)				*1*		*(kota kupang, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*1*		
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya						1.519.000.000,00								Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
			terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya (paket)				*1*		*(kota kupang, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*1*		
2.	**1.01.1-1.2-22.0-0.02.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**						**2.625.974.637.230,00**			**Ya**	**Ya**			**0,00**	**Dinas Pendidikan dan Kebudayaan**
			APS kelompok 16 - 18 Tahun (SMA dan SMK) (Data Terpilah Gender (%)				***100***									
			APS SLB (%)				***100***									
			Meningkatnya SMK yang direvitalisasi menjadi SMK Percontohan dengan kualitas lulusan yang bersaing (Jurusan Pariwisata, Kuliner, Fashion, dan Maritim) (8 Unit) (%)				***75***									
	1.01.1-1.2-22.0-0.02.02.1.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas						669.567.849.790,00		Dana Perimbangan , Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Tidak	Tidak				Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode RPJMD	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2020	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RKPD TAHUN 2021	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2023		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2022	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Terlaksananya Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas (%)				*100*		*(22 kab/kota, NUSA TENGGARA TIMUR)*	*Dana Perimbangan , Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum*				*100*		
		Penambahan Ruang Kelas Baru						105.011.958.990,00		Dana Perimbangan						- Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
			terlaksananya Penambahan Ruang Kelas Baru (paket)				*1*		*(22 kab kota, NUSA TENGGARA TIMUR)*	*Dana Perimbangan*				*1*		
		Pembangunan Ruang Laboratorium Biologi						27.513.750.000,00		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum						- Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
			terlaksananya Pembangunan Ruang Laboratorium Biologi (paket)				*1*		*(22 kab kota, NUSA TENGGARA TIMUR)*	*Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum*				*1*		
		Pembangunan Ruang Laboratorium Fisika						27.513.750.000,00		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum						- Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
			terlaksananya Pembangunan Ruang Laboratorium Fisika (paket)				*1*		*(22 kab kota, NUSA TENGGARA TIMUR)*	*Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum*				*1*		
		Pembangunan Ruang Laboratorium Kimia						27.513.750.000,00		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum						- Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
			terlaksananya Pembangunan Ruang Laboratorium Kimia (paket)				*1*		*(22 kab kota, NUSA TENGGARA TIMUR)*	*Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum*				*1*		
		Pembangunan Ruang Laboratorium Komputer						33.863.750.000,00		Dana Perimbangan						- Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
			terlaksananya Pembangunan Ruang Laboratorium Komputer (paket)				*1*		*(22 kab kota, NUSA TENGGARA TIMUR)*	*Dana Perimbangan*				*1*		
		Pembangunan Ruang Laboratorium Bahasa						16.963.750.000,00		Dana Perimbangan						- Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
			terlaksananya Pembangunan Ruang Laboratorium Bahasa (paket)				*1*		*(22 kab kota, NUSA TENGGARA TIMUR)*	*Dana Perimbangan*				*1*		
		Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah						500.000.000,00		Dana Perimbangan						- Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
			terlaksananya Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah (paket)				*1*		*(22 kab/kota, NUSA TENGGARA TIMUR)*	*Dana Perimbangan*				*1*		
		Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU						210.000.000,00								- Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
			Terlaksananya Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU (paket)				*1*		*(22 kab/kota, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*1*		
		Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Biologi						210.000.000,00								- Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
			terlaksananya Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Biologi (paket)				*1*		*(22 kab kota, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*1*		
		Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Fisika						11.810.000.000,00		Dana Perimbangan						- Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
			Terlaksananya Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Fisika (paket)				*1*		*(22 kab kota, NUSA TENGGARA TIMUR)*	*Dana Perimbangan*				*1*		
		Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Kimia						1.210.000.000,00								- Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode RPJMD	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2020	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RKPD TAHUN 2021	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2023		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2022	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Terlaksananya Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Kimia (paket)				*1*		*(22 kab kota, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*1*		
		Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Komputer						610.000.000,00								Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
			terlaksananya Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Komputer (paket)				*1*		*(22 kab kota, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*1*		
		Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Bahasa						810.000.000,00								Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
			terlaksananya Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Bahasa (paket)				*1*		*(22 kab kota, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*1*		
		Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium IPA						210.000.000,00								Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
			terlaksananya Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium IPA (paket)				*1*		*(22 kab kota, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*1*		
		Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah						310.000.000,00								Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
			terlaksana Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah (paket)				*1*		*(22 kab kota, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*1*		
		Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah						1.810.000.000,00		Dana Perimbangan						Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
			terlaksananya Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah (paket)				*1*		*(22 kab kota, NUSA TENGGARA TIMUR)*	*Dana Perimbangan*				*1*		
		Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Serba Guna/Aula						210.000.000,00								Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
			terlaksananya Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Serba Guna/Aula (paket)				*1*		*(22 kab kota, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*1*		
		Rehabilitasi Asrama Sekolah						2.210.000.000,00								Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
			terlaksananya Rehabilitasi Asrama Sekolah (paket)				*1*		*(22 kab kota, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*1*		
		Rehabilitasi Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah						840.000.000,00								Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
			Terlaksananya Rehabilitasi Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah (paket)				*1*		*(22 kab kota, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*1*		
		Rehabilitasi Kantin Sekolah						105.000.000,00								Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
			terlaksananya Rehabilitasi Kantin Sekolah (paket)				*1*		*(22 kab kota, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*1*		
		Rehabilitasi Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah						1.010.000.000,00								Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
			terlaksananya Rehabilitasi Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah (paket)				*1*		*(22 kab kota, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*1*		
		Rehabilitasi Ruang/Sudut Baca						50.000.000,00								Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
			terlaksananya Rehabilitasi Ruang/Sudut Baca (paket)				*1*		*(22 kab kota, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*1*		

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode RPJMD	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2020	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RKPD TAHUN 2021	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2023		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2022	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		Pengadaan Mebel Sekolah						750.000.000,00							-	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
			terlaksananya Pengadaan Mebel Sekolah (paket)				*1*		*(22 kab kota, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*1*		
		Pengadaan Perlengkapan Sekolah						32.000.000,00		Dana Perimbangan					-	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
			Terlaksananya Pengadaan Perlengkapan Sekolah (paket)				*1*		*(22 kab kota, NUSA TENGGARA TIMUR)*	*Dana Perimbangan*				*1*		
		Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik						355.000.000,00							-	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
			terlaksananya Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik (paket)				*1*		*(22 kab kota, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*1*		
		Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Siswa						5.000.000.000,00							-	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
			terlaksananya Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Siswa (paket)				*1*		*(22 kabupaten kota, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*1*		
		Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Menengah Atas						1.500.000.000,00		Dana Perimbangan					-	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
			terlaksana Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Menengah Atas (paket)				*1*		*(22 kab kota, NUSA TENGGARA TIMUR)*	*Dana Perimbangan*				*1*		
		Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa						1.050.000.000,00		Dana Perimbangan					-	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
			terlaksananya Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa (paket)				*1*		*(22 kab kota, NUSA TENGGARA TIMUR)*	*Dana Perimbangan*				*1*		
		Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menegah Atas						36.553.030.800,00							-	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
			terlaksananya Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menegah Atas (paket)				*1*		*(22 kab kota, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*1*		
		Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menegah Atas						62.415.000.000,00		Dana Perimbangan					-	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
			terlaksananya Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menegah Atas (paket)				*1*		*(22 kab kota, NUSA TENGGARA TIMUR)*	*Dana Perimbangan*				*1*		
		Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Atas						660.000.000,00		Dana Perimbangan					-	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
			terlaksananya Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Atas (paket)				*1*		*(22 kab kota, NUSA TENGGARA TIMUR)*	*Dana Perimbangan*				*1*		
		Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas						291.457.110.000,00							-	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
			terlaksananya Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas (paket)				*1*		*(22 kab kota, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*1*		
		Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas						9.300.000.000,00							-	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
			terlaksananya Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas (paket)				*1*		*(22 kab/kota, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*1*		

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode RPJMD	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2020	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RKPD TAHUN 2021	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2023		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2022	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.01.1-1.2-22.0-0.02.02.1.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan						324.023.587.440,00		Dana Perimbangan , Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Tidak	Tidak			-	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
			Terlaksananya Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan (%)				*100*		*(22 kab/kota, NUSA TENGGARA TIMUR)*	*Dana Perimbangan , Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum*				*100*		
		Pembangunan USB (Unit Sekolah Baru)						3.000.000.000,00		Dana Perimbangan					-	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
			terlaksananya Pembangunan USB (Unit Sekolah Baru) (paket)				*1*		*(22 kab kota, NUSA TENGGARA TIMUR)*	*Dana Perimbangan*				*1*		
		Penambahan Ruang Kelas Sekolah						2.817.500.000,00		Dana Perimbangan					-	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
			terlaksananya Penambahan Ruang Kelas Sekolah (paket)				*1*		*(22 kab kota, NUSA TENGGARA TIMUR)*	*Dana Perimbangan*				*1*		
		Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU						1.362.000.000,00							-	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
			terlaksananya Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU (paket)				*1*		*(22 kab kota, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*1*		
		Pembangunan Ruang Praktik Siswa						35.070.000.000,00							-	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
			terlaksananya Pembangunan Ruang Praktik Siswa (paket)				*1*		*(22 kab kota, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*1*		
		Pembangunan Ruang Laboratorium						12.020.000.000,00		Dana Perimbangan					-	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
			terlaksananya Pembangunan Ruang Laboratorium (paket)				*1*		*(22 kab kota, NUSA TENGGARA TIMUR)*	*Dana Perimbangan*				*1*		
		Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah						765.000.000,00							-	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
			terlaksananya Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah (paket)				*1*		*(22 kab kota, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*1*		
		Pembangunan Ruang Serba Guna/Aula						350.000.000,00							-	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
			Terlaksananya Pembangunan Ruang Serba Guna/Aula (paket)				*1*		*(22 kabupaten/kota, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*1*		
		Pembangunan Asrama Sekolah						210.000.000,00							-	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
			terlaksananya Pembangunan Asrama Sekolah (paket)				*1*		*(22 kab kota, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*1*		
		Pembangunan Kantin Sekolah						105.000.000,00							-	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
			terlaksananya Pembangunan Kantin Sekolah (paket)				*1*		*(22 kab kota, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*1*		
		Rehabilitasi Ruang Kelas Sekolah						2.410.000.000,00		Dana Perimbangan					-	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
			terlaksananya Rehabilitasi Ruang Kelas Sekolah (paket)				*1*		*(22 kab kota, NUSA TENGGARA TIMUR)*	*Dana Perimbangan*				*1*		
		Rehabilitasi Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU						210.000.000,00							-	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
			terlaksananya Rehabilitasi Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU (paket)				*1*		*(22 kab kota, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*1*		

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode RPJMD	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2020	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RKPD TAHUN 2021	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2023		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2022	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		Rehabilitasi Ruang Praktik Siswa						210.000.000,00							-	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
			terlaksananya Rehabilitasi Ruang Praktik Siswa (paket)				*1*		*(22 kab kota, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*1*		
		Rehabilitasi Ruang Laboratorium						5.000.000.000,00		Dana Perimbangan					-	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
			terlaksananya Rehabilitasi Ruang Laboratorium (paket)				*1*		*(22 kab kota, NUSA TENGGARA TIMUR)*	*Dana Perimbangan*				*1*		
		Rehabilitasi Perpustakaan Sekolah						100.000.000,00		Dana Perimbangan					-	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
			terlaksananya Rehabilitasi Perpustakaan Sekolah (paket)				*1*		*(22 kab kota, NUSA TENGGARA TIMUR)*	*Dana Perimbangan*				*1*		
		Rehabilitasi Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah						210.000.000,00							-	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
			terlaksananya Rehabilitasi Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah (paket)				*1*		*(22 kab kota, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*1*		
		Pengadaan Mebel Sekolah						220.000.000,00							-	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
			terlaksananya Pengadaan Mebel Sekolah (paket)				*1*		*(22 kab kota, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*1*		
		Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik						45.000.000.000,00		Dana Perimbangan					-	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
			terlaksananya Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik (paket)				*1*		*(22 kab kota, NUSA TENGGARA TIMUR)*	*Dana Perimbangan*				*1*		
		Pemeliharaan Rutin Bangunan Gedung dan Ruang Sekolah						2.500.000.000,00							-	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
			terlaksananya Pemeliharaan Rutin Bangunan Gedung dan Ruang Sekolah (paket)				*1*		*(22 kab kota, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*1*		
		Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah						840.000.000,00							-	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
			terlaksananya Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah (paket)				*1*		*(22 kab kota, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*1*		
		Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Menengah Kejuruan						1.505.000.000,00							-	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
			terlaksananya Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Menengah Kejuruan (paket)				*1*		*(22 kab kota, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*1*		
		Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa						1.872.000.000,00							-	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
			terlaksananya Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa (paket)				*1*		*(22 kab/kota, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*1*		
		Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan						23.568.127.440,00							-	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
			Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan (paket)				*1*		*(22 kab kota, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*1*		
		Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan						7.835.000.000,00		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum					-	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode RPJMD	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2020	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RKPD TAHUN 2021	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2023		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2022	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			terlaksananya Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan (paket)				*1*		*(22 kab kota, NUSA TENGGARA TIMUR)*	*Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum*				*1*		
		Pembangunan Bengkel/Unit Produksi						200.000.000,00								- Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
			Terlaksananya Pembangunan Bengkel/Unit Produksi (paket)				*1*		*(22 kab kota, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*1*		
		Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Kejuruan						8.420.000.000,00								- Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
			terlaksananya Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Kejuruan (paket)				*1*		*(22 kab kota, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*1*		
		Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan						160.803.960.000,00								- Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
			terlaksananya Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan (paket)				*1*		*(22 kab kota, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*1*		
		Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan						7.420.000.000,00								- Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
			terlaksananya Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan (paket)				*1*		*(22 kab kota, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*1*		
	1.01.1-1.2-22.0-0.02.02.1.03	Pengelolaan Pendidikan Khusus						1.632.383.200.000,00		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Tidak	Tidak				- Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
			Terlaksananya Pengelolaan Pendidikan Khusus (%)				*100*		*(22 kab/kota, NUSA TENGGARA TIMUR)*	*Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum*				*100*		
		Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)						-								- Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
			Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) (paket)				*1*		*(22 kab kota, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*1*		
		Penambahan Ruang Kelas Sekolah						5.750.000.000,00								- Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
			terlaksananya Penambahan Ruang Kelas Sekolah (paket)				*1*		*(22 kab kota, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*1*		
		Pembangunan Asrama Sekolah						-								- Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
			terlaksananya Pembangunan Asrama Sekolah (paket)				*1*		*(22 kab kota, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*1*		
		Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah						324.000.000,00								- Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
			terlaksananya Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah (paket)				*1*		*(22 kab kota, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*1*		
		Pembangunan Ruang Laboratorium						1.500.000.000,00								- Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
			terlaksananya Pembangunan Ruang Laboratorium (paket)				*1*		*(22 kab kota, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*1*		
		Rehabilitasi Ruang Kelas Sekolah						1.500.000.000,00								- Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode RPJMD	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2020	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RKPD TAHUN 2021	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2023		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2022	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			terlaksananya Rehabilitasi Ruang Kelas Sekolah (paket)				*1*		*(22 kab kota, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*1*		
		Rehabilitasi Perpustakaan Sekolah						850.000.000,00								Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
			terlaksananya Rehabilitasi Perpustakaan Sekolah (paket)				*1*		*(22 kab kota, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*1*		
		Rehabilitasi Asrama Sekolah						3.750.000.000,00								Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
			terlaksananya Rehabilitasi Asrama Sekolah (paket)				*1*		*(22 kab kota, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*1*		
		Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa						50.000.000,00								Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
			terlaksananya Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa (paket)				*1*		*(22 kab kota, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*1*		
		Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Khusus						350.000.000,00								Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
			terlaksananya Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Khusus (paket)				*1*		*(22 kab kota, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*1*		
		Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Pendidikan Khusus						17.609.200.000,00								Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
			terlaksananya Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Pendidikan Khusus (paket)				*1*		*(22 kab kota, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*1*		
		Pengelolaan Dana BOS Sekolah Pendidikan Khusus						1.600.000.000.000,00		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum						Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
			terlaksananya Pengelolaan Dana BOS Sekolah Pendidikan Khusus (paket)				*1*		*(22 kab kota, NUSA TENGGARA TIMUR)*	*Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum*				*1*		
		Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Pendidikan Khusus						700.000.000,00								Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
			terlaksananya Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Pendidikan Khusus (paket)				*1*		*(22 kab kota, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*1*		
3.	**1.01.1-1.2-22.0-0.02.03**	**PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM**						**1.825.000.000,00**			**Ya**	**Ya**			**0,00**	**Dinas Pendidikan dan Kebudayaan**
			Cakupan SLB berakreditasi B (32 unit) (%)				***13***									
			. Cakupan SMA berakreditasi B (554 Unit) (%)				***35***									
			Cakupan SMK berakreditasi B (295 unit) (%)				***19***									
			cakupan Pemenuhan SPM Pendidikan (%)				***100***									
	1.01.1-1.2-22.0-0.02.03.1.01	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Menengah						1.825.000.000,00		Dana Perimbangan	Tidak	Tidak				Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
			Terlaksananya Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Menengah (%)				*100*		*(22 kab/kota, NUSA TENGGARA TIMUR)*	*Dana Perimbangan*				*100*		

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode RPJMD	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2020	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RKPD TAHUN 2021	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2023		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2022	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		Penyusunan Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Menengah						1.825.000.000,00		Dana Perimbangan					-	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
			terlaksananya Penyusunan Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Menengah (paket)				*1*		*(22 kab kota, NUSA TENGGARA TIMUR)*	*Dana Perimbangan*				*1*		
		Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Menengah						-							-	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
			terlaksananya Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Menengah (paket)				*1*		*(22 kab kota, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*1*		
4.	**1.01.1-1.2-22.0-0.02.04**	**PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN**						**700.000.000,00**			**Ya**	**Ya**			**0,00**	**Dinas Pendidikan dan Kebudayaan**
			Cakupan ketersediaan Guru SLB berkompeten (bersertifikat) setiap tahun (847 orang (%)				***74,97***									
			Cakupan Ketersediaan Guru SMA berkompeten (bersertifikat) setiap tahun (16.164 orang) (%)				***74,86***									
			Cakupan Ketersediaan Guru SMK berkompeten (bersertifikat) setiap tahun (8.024 orang (%)				***74,78***									
	1.01.1-1.2-22.0-0.02.04.1.01	Pemindahan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Provinsi						700.000.000,00		Dana Perimbangan	Tidak	Tidak			-	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
			Terlaksananya Pemindahan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Provinsi (%)				*100*		*(22 kab/kota, NUSA TENGGARA TIMUR)*	*Dana Perimbangan*				*100*		
		Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus						400.000.000,00		Dana Perimbangan					-	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
			terlaksananya Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus (paket)				*1*		*(22 kab kota, NUSA TENGGARA TIMUR)*	*Dana Perimbangan*				*1*		
		Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus						300.000.000,00		Dana Perimbangan					-	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
			terlaksananya Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus (paket)				*1*		*(22 kab kota, NUSA TENGGARA TIMUR)*	*Dana Perimbangan*				*1*		
5.	**1.01.1-1.2-22.0-0.02.06**	**PROGRAM PENGEMBANGAN BAHASA DAN SASTRA**						**0,00**			**Tidak**	**Tidak**			**0,00**	**Dinas Pendidikan dan Kebudayaan**
			Meningkatnya Pembinaan, Pengembangan dan Perlindungan Bahasa dan Sastra yang Penuturannya Lintas Daerah Kab/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi (12 paket bahasa dan sastra) (%)				***66,67***			***Dana Perimbangan***						
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**						**620.007.008.323,00**							**0,00**	
1.	**1.02.1-2.0-0.0-0.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**						**48.688.018.800,00**			**Tidak**	**Tidak**			**0,00**	**Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil**

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode RPJMD	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2020	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RKPD TAHUN 2021	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2023		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2022	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran yang berkualitas (%)				***100***			***Dana Perimbangan***						
			Meningkatnya sarana dan prasarana (%)				***100***			***Dana Perimbangan***						
			Tercapainya penyusunan capaian kinerja ikhtisar realisasi kinerja dan keuangan (%)				***100***			***Dana Perimbangan***						
	1.02.1-2.0-0.0-0.01.01.1.01	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						811.000.000,00		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Tidak	Tidak			-	Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil
			Terlaksananya Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (%)				*100*		*(22 kab/kota, NUSA TENGGARA TIMUR)*	*Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum*				*100*		
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						75.000.000,00		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum					-	Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil
			terlaksananya Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (dokumen)				*1*		*(kota kupang, NUSA TENGGARA TIMUR)*	*Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum*				*1*		
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD						36.000.000,00		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum					-	Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil
			Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (paket)				*1,00*		*(Provinsi NTT, NUSA TENGGARA TIMUR)*	*Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum*				*1,00*		
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						700.000.000,00		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum					-	Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil
			terlaksana Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (paket)				*1,00*		*(kota kupang, NUSA TENGGARA TIMUR)*	*Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum*				*1,00*		
	1.02.1-2.0-0.0-0.01.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						26.843.806.000,00		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Tidak	Tidak			-	Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil
			Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah (%)				*100*		*(22 kab/kota, NUSA TENGGARA TIMUR)*	*Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum*				*100*		
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						26.000.000.000,00		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum					-	Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil
			Terlaksananya Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN (Tahun)				*1*		*(kota Kupang, NUSA TENGGARA TIMUR)*	*Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum*				*0*		
		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD						240.000.000,00		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum					-	Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil
			terlaksananya Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (paket)				*1*		*(Dinas Kesehatan Prov NTT, NUSA TENGGARA TIMUR)*	*Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum*				*0*		
		Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD						50.000.000,00		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum					-	Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil
			Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD (Paket)				*1*		*(Luar Wilayah, Luar Wilayah)*	*Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum*				*0*		
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD						55.000.000,00		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum					-	Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode RPJMD	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2020	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RKPD TAHUN 2021	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2023		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2022	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Tahun)				*1*		*(Dinas Kesehatan Prov NTT, NUSA TENGGARA TIMUR)*	*Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum*				*0*		
		Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan						398.806.000,00		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum						Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil
			Terlaksananya Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan (tahun)				*1*		*(Dinas Kesehatan Prov. NTT, NUSA TENGGARA TIMUR)*	*Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum*				*1*		
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD						100.000.000,00		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum						Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil
			Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKP (tahun)				*1,00*		*(Dinas Kesehatan Prov. NTT, NUSA TENGGARA TIMUR)*	*Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum*				*1,00*		
	1.02.1-2.0-0.0-0.01.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah						200.000.000,00		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Tidak	Tidak				Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil
			Terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah (%)				*100*		*(22 kab/kota, NUSA TENGGARA TIMUR)*	*Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum*				*100*		
		Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD						200.000.000,00		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum						Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil
			Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (tahun)				*1*		*(22 kab/ kota, NUSA TENGGARA TIMUR)*	*Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum*				*0*		
	1.02.1-2.0-0.0-0.01.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						871.573.400,00		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Tidak	Tidak				Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil
			Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah (%)				*100*		*(22 kab/kota, NUSA TENGGARA TIMUR)*	*Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum*				*100*		
		Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai						480.325.400,00		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum						Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil
			Terlaksananya Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai (dokumen)				*1,00*		*(Dinas Kesehatan Prov. NTT, NUSA TENGGARA TIMUR)*	*Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum*				*1,00*		
			Terlaksananya Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai (tahun)				*1*		*(Dinas Kesehatan Prov NTT)*	*Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum*				*0*		
		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi						300.000.000,00		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum						Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil
			Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi (tahun)				*1,00*		*(Luar Provinsi, Kota Kupang, NUSA TENGGARA TIMUR)*	*Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum*				*1,00*		
		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan						91.248.000,00		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum						Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil
			terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (tahun)				*1*		*(kota kupang, NUSA TENGGARA TIMUR)*	*Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum*				*0*		
	1.02.1-2.0-0.0-0.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						4.072.825.000,00		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Tidak	Tidak				Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil
			Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah (%)				*100*		*(22 kab/kota, NUSA TENGGARA TIMUR)*	*Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum*				*100*		

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode RPJMD	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2020	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RKPD TAHUN 2021	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2023		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2022	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor						105.130.000,00		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum					-	Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil
			Terlaksananya Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor (Tahun)				*1*		*(Dinas Kesehatan Prov NTT, NUSA TENGGARA TIMUR)*	*Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum*				*0*		
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						843.310.000,00		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum					-	Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil
			terlaksananya Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor (paket)				*1*		*(kota kupang, NUSA TENGGARA TIMUR)*	*Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum*				*1*		
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor						850.000.000,00		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum					-	Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil
			terlaksananya Penyediaan Bahan Logistik Kantor (tahun)				*1*		*(kota kupang, NUSA TENGGARA TIMUR)*	*Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum*				*0*		
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						283.000.000,00		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum					-	Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil
			terlaksananya Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan (tahun)				*1*		*(kota kupang, NUSA TENGGARA TIMUR)*	*Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum*				*0*		
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan						84.500.000,00		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum					-	Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil
			terlaksananya Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan (tahun)				*1*		*(kota kupang, NUSA TENGGARA TIMUR)*	*Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum*				*0*		
		Penyediaan Bahan/Material						252.000.000,00		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum					-	Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil
			Terlaksananya Penyediaan Bahan/Material (tahun)				*1*		*(Kota Kupang, NUSA TENGGARA TIMUR)*	*Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum*				*0*		
		Fasilitasi Kunjungan Tamu						1.070.885.000,00		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum					-	Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil
			terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu (tahun)				*1*		*(kota kupang, NUSA TENGGARA TIMUR)*	*Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum*				*0*		
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						584.000.000,00		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum					-	Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil
			terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (tahun)				*1*		*(kota kupang, NUSA TENGGARA TIMUR)*	*Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum*				*0*		
	1.02.1-2.0-0.0-0.01.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						500.692.000,00		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Tidak	Tidak			-	Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil
			Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (tahun)				*1*		*(kota kupang, NUSA TENGGARA TIMUR)*	*Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum*				*650.000.000*		
		Pengadaan Mebel						450.000.000,00		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum					-	Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil
			terklaksananya Pengadaan Mebel (tahun)				*1*		*(kota kupang, NUSA TENGGARA TIMUR)*	*Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum*				*0*		

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode RPJMD	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2020	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RKPD TAHUN 2021	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2023		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2022	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						50.692.000,00		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum					-	Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil
			terlaksananya Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya (tahun)				*1*		*(kota kupang, NUSA TENGGARA TIMUR)*	*Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum*				*0*		
	1.02.1-2.0-0.0-0.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						13.375.822.400,00		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Tidak	Tidak			-	Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil
			Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%)				*100*		*(22 kab/kota, NUSA TENGGARA TIMUR)*	*Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum*				*100*		
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat						22.500.000,00		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum					-	Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil
			terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat (tahun)				*1*		*(Kota Kupang, NUSA TENGGARA TIMUR)*	*Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum*				*0*		
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						2.044.900.000,00		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum					-	Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil
			terlaksananya Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik (tahun)				*1*		*(Kota Kupang, NUSA TENGGARA TIMUR)*	*Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum*				*0*		
		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor						336.560.000,00		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum					-	Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil
			terlaksananya Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor (tahun)				*1*		*(kota kupang, NUSA TENGGARA TIMUR)*	*Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum*				*0*		
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						10.971.862.400,00		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum					-	Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (Paket)				*1*		*(Dinas Kesehatan dan RSj Naimata Kupang, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*0*		
			terlaksananya Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (Tahun)				*1*		*(Kota Kupang, NUSA TENGGARA TIMUR)*	*Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum*				*0*		
	1.02.1-2.0-0.0-0.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						2.012.300.000,00		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Tidak	Tidak			-	Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil
			Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%)				*100*		*(22 kab/kota, NUSA TENGGARA TIMUR)*	*Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum*				*100*		
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						21.300.000,00		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum					-	Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan (tahun)				*1*		*(Kota kupang, NUSA TENGGARA TIMUR)*	*Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum*				*0*		
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						871.000.000,00		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum					-	Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil
			terlaksananya Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan (tahun)				*1*		*(Kota Kupang, NUSA TENGGARA TIMUR)*	*Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum*				*0*		

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode RPJMD	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2020	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RKPD TAHUN 2021	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2023		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2022	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						35.000.000,00		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum					-	Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil
			terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya (tahun)				*1*		*(kota kupang, NUSA TENGGARA TIMUR)*	*Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum*				*0*		
		Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya						385.000.000,00		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum					-	Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil
			terlaksananya Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya (tahun)				*1*		*(Kota kupang, NUSA TENGGARA TIMUR)*	*Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum*				*0*		
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya						700.000.000,00		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum					-	Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil
			terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya (tahun)				*1*		*(kota kupang, NUSA TENGGARA TIMUR)*	*Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum*				*0*		
2.	**1.02.1-2.0-0.0-0.01.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**						**234.769.270.095,00**			**Ya**	**Ya**			**0,00**	**Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil**
			TERLAKSANANYA PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT (TAHUN)				***1***			***Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum***						
			Pelayanan Kesehatan bagi penduduk terdampak Krisis Kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana (SPM Kesehatan Provinsi) (%)				***100***			***Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum***						
	1.02.1-2.0-0.0-0.01.02.1.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi						50.809.767.930,00		DAK Fisik - Bidang Kesehatan - Reguler - Pelayanan Kesehatan Dasar, Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Fisik, Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum, DANA UMUM	Tidak	Tidak			-	Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil
			Terlaksananya Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi (%)				*100*		*(22 kab kota, NUSA TENGGARA TIMUR)*	*Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Fisik, Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum, DANA UMUM*				*100*		
		Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya						29.234.918.000,00		DAK Fisik - Bidang Kesehatan - Reguler - Pelayanan Kesehatan Dasar, Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Fisik, Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum					-	Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil
			Terlaksananya Pembangunan Fasilitas Kesehatan yang bermutu dan berkesinambungan (Kegiatan)				*4*		*(UPTD Labkes, Povabekkes dan Dinkes Provinsi NTT, NUSA TENGGARA TIMUR)*	*DAK Fisik - Bidang Kesehatan - Reguler - Pelayanan Kesehatan Dasar, Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Fisik, Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum*				*5*		

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode RPJMD	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2020	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RKPD TAHUN 2021	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2023		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2022	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		Pengembangan Rumah Sakit						7.149.002.000,00		Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Fisik, Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum						Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil
			Terlaksananya Pengembangan Rumah Sakit yang sesuai standar (Kab/Kota)				*22*		*(UPTD RSJ Naimata, NUSA TENGGARA TIMUR)*	*Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Fisik, Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum*				*22*		
		Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya						-								Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil
			terlaksananya Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya (paket)				*1*		*(kota kupang, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*1*		
		Pengembangan Pendekatan Pelayanan Kesehatan di DTPK (Pelayanan Kesehatan Bergerak, Gugus Pulau, Pelayanan Kesehatan Berbasis Telemedicine, dll)						3.603.300.810,00		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum						Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil
			Terlaksananya Pelayanan Kesehatan di DTPK yang bermutu (Kegiatan)				*10*		*(DTPK di Provinsi NTT, NUSA TENGGARA TIMUR)*	*Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum*				*10*		
		Pengadaan Sarana di Fasilitas Layanan Kesehatan						1.800.000.000,00		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum, DANA UMUM						Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil
			Terlaksananya Pengadaan Sarana di Fasilitas Layanan Kesehatan (Kegiatan)				*1*		*(Provinsi NTT, NUSA TENGGARA TIMUR)*	*Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum, DANA UMUM*				*1*		
		Pengadaaaan Prasarana Fasilitas Layanan Kesehatan						-								Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil
			terlaksananya Pengadaaaan Prasarana Fasilitas Layanan Kesehatan (paket)				*1*		*(kota kupang, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*1*		
		Pengadaan Bahan Habis Pakai Lainnya (Sprei, Handuk dan Habis Pakai Lainnya)						3.847.377.200,00		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum						Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil
			Terlaksananya Pengadaan Bahan Habis Pakai Lainnya (Sprei, Handuk dan Habis Pakai Lainnya) (PT)				*1*		*(Labkes Prov.NTT, NUSA TENGGARA TIMUR)*	*Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum*				*1*		
			Terlaksananya Pengadaan Bahan Habis Pakai Lainnya (Sprei, Handuk dan Habis Pakai Lainnya) (kegitan)				*1*		*(UPTD Labkes Provinsi, NUSA TENGGARA TIMUR)*	*Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum*				*0*		
		Pengadaan dan Pemeliharaan Alat-alat Kesehatan/Peralatan Laboratorium Kesehatan						958.954.000,00		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum						Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil
			Terlaksananya Pengadaan dan Pemeliharaan Alat-alat Kesehatan/Peralatan Laboratorium Kesehatan (Kegiatan)				*2*		*(Kota Kupang, NUSA TENGGARA TIMUR)*	*Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum*				*2*		
		Pemeliharaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan						185.893.140,00		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum						Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil
			Terlaksananya Pemeliharaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan (Kegiatan)				*1*		*(22 Kab/Kota, NUSA TENGGARA TIMUR)*	*Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum*				*1*		

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode RPJMD	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2020	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RKPD TAHUN 2021	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2023		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2022	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Makanan dan Minuman serta Fasilitas Kesehatan Lainnya						4.030.322.780,00		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum, DANA UMUM						Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil
			Distribusi Makanan dan Minuman yang memenuhi syarat (Paket)				*1,00*		*(Kota Kupang, KOTA KUPANG)*	*Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum*				*1*		
			Distribusi Obat, Vaksin dan Perbekalan Kesehatan yang memenuhi syarat (Kegiatan)				*1,00*		*(Nusa Tenggara Timur, NUSA TENGGARA TIMUR)*	*Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum*				*1,00*		
		Pengadaan Obat, Vaksin, Makanan dan Minuman serta Fasilitas Kesehatan Lainnya						-								Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil
			Terlaksananya Pengadaan Obat, Vaksin, Makanan dan Minuman serta Fasilitas Kesehatan Lainnya (paket)				*1*		*(kota kupang, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*1*		
	1.02.1-2.0-0.0-0.01.02.1.02	Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi						180.918.035.525,00		Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Fisik, Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik, Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum, Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Tidak	Tidak				Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil
			Terlaksananya Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi (Kab/Kota)				*22*		*(22 Kab/Kota, NUSA TENGGARA TIMUR)*	*Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Fisik, Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik, Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum, Dana Transfer Umum -*				*22*		
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/Atau Berpotensi Bencana						4.001.827.600,00		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum						Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil
			Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akiba (Paket)				*1*		*(22 Kabupaten/Kota, NUSA TENGGARA TIMUR)*	*Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum*				*0*		
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)						1.018.991.000,00		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum						Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil
			Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (Paket)				*1*		*(22 Kab/Kota dan Provinsi, NUSA TENGGARA TIMUR)*	*Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum*				*0*		
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak						1.902.002.960,00		Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik, Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum						Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil
			Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak (Paket)				*1*		*(22 kabupaten kota, NUSA TENGGARA TIMUR)*	*Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik, Dana Transfer Umum - Dana Alokasi*				*0*		
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut						179.336.000,00		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum						Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode RPJMD	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2020	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RKPD TAHUN 2021	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2023		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2022	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Puskesmas yang Teregistrasi dan Terakreditasi (Paket)				*1*		*(22 Kab/Kota, NUSA TENGGARA TIMUR)*	*Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum*				*1*		
		Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)						126.203.300,00		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum					-	Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil
			Tersedianya Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT) yang bermutu (Kegiatan)				*1*		*(Nusa Tenggara Timur, NUSA TENGGARA TIMUR)*	*Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum*				*1*		
		Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan						4.960.955.300,00		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum					-	Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil
			Terlaksananya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan (Paket)				*1,00*		*(Provinsi NTT, NUSA TENGGARA TIMUR)*	*Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum*				*1*		
		Pendampingan Fasilitas Pelayanan Kesehatan						835.194.400,00		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum					-	Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil
			Terlaksananya Pendampingan Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Kab/Kota)				*22*		*(Provinsi NTT, NUSA TENGGARA TIMUR)*	*Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum*				*22*		
	1.02.1-2.0-0.0-0.01.02.1.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi						602.192.667,00		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Tidak	Tidak			-	Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil
			Terlaksananya Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi (Kab/Kota)				*22*		*(22 Kab/Kota, NUSA TENGGARA TIMUR)*	*Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum*				*22*		
		Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan						602.192.667,00		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum					-	Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil
			Terlaksananya Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan (orang/kali)				*105*		*(22 Kabupaten/Kota dan Provinsi, NUSA TENGGARA TIMUR)*	*Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum*				*44,00*		
		Pengadaan Alat/Perangkat Sistem Informasi Kesehatan dan Jaringan Internet						-		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum					-	Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil
			Terlaksananya Pengadaan Alat/Perangkat Sistem Informasi Kesehatan dan Jaringan Internet (Kegiatan)				*2*		*(Kota kupang, NUSA TENGGARA TIMUR)*	*Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum*				*2*		
	1.02.1-2.0-0.0-0.01.02.1.04	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi						2.439.273.973,00		Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik, Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Tidak	Tidak			-	Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil
			Terlaksananya Peningkatan Mutu Pelayanan Rujukan dan Laboratorium (Kab/Kota)				*22*		*(22 Kab/Kota, NUSA TENGGARA TIMUR)*	*Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik, Dana Transfer Umum - Dana Alokasi*				*22*		
		Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan						2.439.273.973,00		Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik, Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum					-	Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil
			Meningkatnya Mutu Pelayanan Rujukan dan Laboratorium (Persen)				*100*		*(22 Kab/Kota, NUSA TENGGARA TIMUR)*	*Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik, Dana Transfer Umum - Dana Alokasi*				*100*		

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode RPJMD	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2020	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RKPD TAHUN 2021	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2023		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2022	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
3.	1.02.1-2.0-0.0-0.01.03	**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN**						**23.167.314.580,00**			**Ya**	**Ya**			**0,00**	**Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil**
			TERLAKSANANYA PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN (TAHUN)				***1***			***Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik, Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum***						
			Persentasi Puskesmas dengan Tenaga Kesehatan Sesuai Standar (Puskesmas : 9 Jenis tenaga kesehatan) Target : dari 92 menjadi 418 unit (%)				***74,16***			***Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik, Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum***						
			Persentasi Rumah Sakit dengan Tenaga Kesehatan Sesuai Standar (53 RS : 12 Jenis tenaga kesehatan) (%)				***73,58***			***Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik, Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum***						
			Persentasi SDM Kesehatan yang ditingkatkan Kompetensi dan Kualifikasinya (%)				***81***			***Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik, Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum***						
	1.02.1-2.0-0.0-0.01.03.1.01	Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKM dan UKP Provinsi						21.691.262.080,00		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Tidak	Tidak			-	Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil
			terlaksananya Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKM dan UKP Provinsi (%)				*100*		*(22 kab kota, NUSA TENGGARA TIMUR)*	*Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum*				*100*		
		Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan						21.691.262.080,00		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum					-	Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil
			Pengumpulan data dalam rangka Analis Kebutuhan Tenaga Kesehatan (Orang / Perjalanan)				*48*		*(22 Kab/kota, NUSA TENGGARA TIMUR)*	*Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum*				*0*		
		Distribusi dan Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan						-							-	Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	1.02.1-2.0-0.0-0.01.03.1.02	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi						1.476.052.500,00		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Tidak	Tidak			-	Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil
			Terlaksananya Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi (%)				*100*		*(22 kab/kota, NUSA TENGGARA TIMUR)*	*Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum*				*100*		
		Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan						1.476.052.500,00		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum					-	Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil
			Tersedianya bantuan Beasiswa Non ASN kepadaMahasiswa/wi Kedokteran Umum Lanjutan (Tahun 2021) danBaru , Dokter Spesialis, dan Sub Spesialis (orang)				*43*		*(Dinas Kesehatan Prov.NTT, NUSA TENGGARA TIMUR)*	*Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum*				*0*		
		Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan						-		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum					-	Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode RPJMD	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2020	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RKPD TAHUN 2021	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2023		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2022	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Terlaksananya Pengawasan terhadap tenaga kesehatan (paket)				*1*		*(22 kab/kota, NUSA TENGGARA TIMUR)*	*Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum*				*0*		
4.	**1.02.1-2.0-0.0-0.01.04**	**PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN**						**450.818.000,00**			**Ya**	**Ya**			**0,00**	**Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil**
			TERLAKSANANYA PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN (TAHUN)				***1***			***Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum***						
			Ketaatan dan Kepatuhan Pedagang Besar Farmasi (PBF) Cabang dan Cabang Penyalur Alat Kesehatan (PAK) (%)				***100***			***Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum***						
	1.02.1-2.0-0.0-0.01.04.1.01	Penerbitan Pengakuan Pedagang Besar Farmasi (PBF) Cabang dan Cabang Penyalur Alat Kesehatan (PAK)						423.667.500,00		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum, DANA UMUM	Tidak	Tidak			-	Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil
			Terlaksananya Penerbitan Pengakuan Pedagang Besar Farmasi (PBF) Cabang dan Cabang Penyalur Alat Kesehatan (PAK) (Kegiatan)				*3*		*(22 kab/Kota, NUSA TENGGARA TIMUR)*	*Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum, DANA UMUM*				*3*		
		Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Pengakuan PBF Cabang dan Cabang PAK						50.115.500,00		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum					-	Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil
			Terlaksananya Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Pengakuan PBF Cabang dan Cabang PAK (Kegiatan)				*1*		*(Provinsi NTT, NUSA TENGGARA TIMUR)*	*Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum*				*2*		
		Penyediaan dan Pengelolaan Data Perizinan Pengakuan PBF Cabang dan Cabang PAK Berbasis Elektronik						373.552.000,00		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum, DANA UMUM					-	Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil
			Terlaksananya Penyediaan dan Pengelolaan Data Perizinan Pengakuan PBF Cabang dan Cabang PAK Berbasis Elektronik (Kegiatan)				*7*		*(Provinsi NTT, NUSA TENGGARA TIMUR)*	*Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum, DANA UMUM*				*7*		
	1.02.1-2.0-0.0-0.01.04.1.02	Penerbitan Izin Usaha Kecil Obat Tradisional (UKOT)						27.150.500,00		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Tidak	Tidak			-	Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil
			terlaksananya Penerbitan Izin Usaha Kecil Obat Tradisional (UKOT) (%)				*100*		*(22 kab/kota, NUSA TENGGARA TIMUR)*	*Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum*				*100*		
		Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Izin Usaha Kecil Obat Tradisional						27.150.500,00		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum					-	Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil
			Terlaksananya Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Izin Usaha Kecil Obat Tradisional (Kegiatan)				*1*		*(Kab/Kota, NUSA TENGGARA TIMUR)*	*Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum*				*2*		
5.	**1.02.1-2.0-0.0-0.01.05**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**						**0,00**			**Tidak**	**Tidak**			**0,00**	**Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil**
			Peningkatan Cakupan Pemberdayaan Masyarakat melalui pos Upaya Kesehatan Kerja (UKK) (%)				***86,4***			***Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum***						
6.	**1.02.1-2.0-0.0-0.01.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**						**218.992.918.102,00**			**Tidak**	**Tidak**			**0,00**	**RSUD Prof. DR. WZ Johannes Kupang**

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode RPJMD	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2020	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RKPD TAHUN 2021	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2023		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2022	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran yang berkualitas (%)				***100***			***Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum***						
			Meningkatnya sarana dan prasarana (%)				***100***			***Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum***						
			Tercapainya penyusunan capaian kinerja ikhtisar realisasi kinerja dan keuangan (%)				***100***			***Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum***						
	1.02.1-2.0-0.0-0.01.01.01.1.01	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						9.375.850,00			Tidak	Tidak			-	RSUD Prof. DR. WZ Johannes Kupang
			Terlaksananya Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (%)				*100*		*(22 kab/kota, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*100*		
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD						1.237.500,00							-	RSUD Prof. DR. WZ Johannes Kupang
			terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (paket)				*1*		*(RSUD, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*1*		
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD						1.237.500,00							-	RSUD Prof. DR. WZ Johannes Kupang
			terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (paket)				*1*		*(RSUD, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*1*		
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD						6.900.850,00							-	RSUD Prof. DR. WZ Johannes Kupang
			terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (paket)				*1*		*(RSUD, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*1*		
	1.02.1-2.0-0.0-0.01.01.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						99.353.704.100,00			Tidak	Tidak			-	RSUD Prof. DR. WZ Johannes Kupang
			Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah (%)				*100*		*(22 kab/kota, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*100*		
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						99.350.357.900,00							-	RSUD Prof. DR. WZ Johannes Kupang
			terlaksananya Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN (paket)				*1*		*(RSUD, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*1*		
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD						1.673.100,00							-	RSUD Prof. DR. WZ Johannes Kupang
			terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (paket)				*1*		*(RSUD, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*1*		
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD						1.673.100,00							-	RSUD Prof. DR. WZ Johannes Kupang
			terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (paket)				*1*		*(RSUD, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*1*		
	1.02.1-2.0-0.0-0.01.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						359.138.985,00			Tidak	Tidak			-	RSUD Prof. DR. WZ Johannes Kupang
			Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah (%)				*100*		*(22 kab/kota, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*100*		
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor						31.548.865,00							-	RSUD Prof. DR. WZ Johannes Kupang

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode RPJMD	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2020	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RKPD TAHUN 2021	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2023		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2022	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			terlaksananya Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor (paket)				*1*		*(RSUD, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*1*		
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						11.423.500,00								- RSUD Prof. DR. WZ Johannes Kupang
			terlaksananya Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan (paket)				*1*		*(RSUD, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*1*		
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan						4.324.320,00								- RSUD Prof. DR. WZ Johannes Kupang
			terlaksananya Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan (paket)				*1*		*(RSUD, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*1*		
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						311.842.300,00								- RSUD Prof. DR. WZ Johannes Kupang
			terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (paket)				*1*		*(RSUD, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*1*		
	1.02.1-2.0-0.0-0.01.01.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						30.054.090,00			Tidak	Tidak				- RSUD Prof. DR. WZ Johannes Kupang
			Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (%)				*100*		*(22 kab/kota, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*100*		
		Pengadaan Mebel						30.054.090,00								- RSUD Prof. DR. WZ Johannes Kupang
			terlaksananya Pengadaan Mebel (paket)				*1*		*(RSUD, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*1*		
	1.02.1-2.0-0.0-0.01.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						4.182.015.077,00			Tidak	Tidak				- RSUD Prof. DR. WZ Johannes Kupang
			Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%)				*100*		*(22 kab/kota, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*100*		
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat						18.000.000,00								- RSUD Prof. DR. WZ Johannes Kupang
			terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat (paket)				*1*		*(RSUD, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*1*		
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						3.887.861.390,00								- RSUD Prof. DR. WZ Johannes Kupang
			Terlaksananya Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik (paket)				*1*		*(RSUD, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*1*		
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						276.153.687,00								- RSUD Prof. DR. WZ Johannes Kupang
			terlaksananya Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (paket)				*1*		*(RSUD, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*1*		
	1.02.1-2.0-0.0-0.01.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						58.630.000,00			Tidak	Tidak				- RSUD Prof. DR. WZ Johannes Kupang
			Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%)				*100*		*(22 kab/kota, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*100*		
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						25.630.000,00								- RSUD Prof. DR. WZ Johannes Kupang

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode RPJMD	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2020	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RKPD TAHUN 2021	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2023		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2022	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			terlaksananya Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan (paket)				*1*		*(RSUD, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*1*		
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						33.000.000,00								RSUD Prof. DR. WZ Johannes Kupang
			terlaksananya Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan (paket)				*1*		*(RSUD, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*1*		
	1.02.1-2.0-0.0-0.01.01.01.1.10	Peningkatan Pelayanan BLUD						115.000.000.000,00			Tidak	Tidak				RSUD Prof. DR. WZ Johannes Kupang
			Terlaksananya Peningkatan Pelayanan BLUD (%)				*100*		*(22 kab/kota, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*100*		
		Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD						115.000.000.000,00								RSUD Prof. DR. WZ Johannes Kupang
			Terlaksananya pelayanan dan penunjang pelayanan BLUD (paket)				*1*		*(RSUD, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*1*		
7.	**1.02.1-2.0-0.0-0.01.01.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**						**86.257.602.114,00**			**Ya**	**Ya**			**0,00**	**RSUD Prof. DR. WZ Johannes Kupang**
			Meningkatnya pencapaian SPM Rumah Sakit (%)				***100***									
			Meningkatnya Kemandirian BLUD RSU (%)				***50***									
	1.02.1-2.0-0.0-0.01.01.02.1.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi						75.325.503.099,00			Tidak	Tidak				RSUD Prof. DR. WZ Johannes Kupang
			Terlaksananya Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi (%)				*100*		*(Kota Kupang, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*100*		
		Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit						81.038.485,00								RSUD Prof. DR. WZ Johannes Kupang
			terlaksananya Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit (paket)				*1*		*(RSUD, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*1*		
		Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan						61.640.348.630,00								RSUD Prof. DR. WZ Johannes Kupang
			terlaksananya Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan (paket)				*1*		*(RSUD, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*1*		
		Pengadaan Sarana di Fasilitas Layanan Kesehatan						575.355.000,00								RSUD Prof. DR. WZ Johannes Kupang
			terlaksananya Pengadaan Sarana di Fasilitas Layanan Kesehatan (paket)				*1*		*(RSUD, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*1*		
		Pengadaaaan Prasarana Fasilitas Layanan Kesehatan						5.390.000,00								RSUD Prof. DR. WZ Johannes Kupang
			terlaksananya Pengadaaaan Prasarana Fasilitas Layanan Kesehatan (paket)				*1*		*(RSUD, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*1*		

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode RPJMD	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2020	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RKPD TAHUN 2021	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2023		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2022	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		Pengadaan dan Pemeliharaan Alat-alat Kesehatan/Peralatan Laboratorium Kesehatan						14.414.222,00							-	RSUD Prof. DR. WZ Johannes Kupang
			terlaksananya Pengadaan dan Pemeliharaan Alat-alat Kesehatan/Peralatan Laboratorium Kesehatan (paket)				*1*		*(RSUD, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*1*		
		Pengadaan Barang Penunjang Operasional Rumah Sakit						13.008.956.762,00							-	RSUD Prof. DR. WZ Johannes Kupang
			terlaksananya Pengadaan Barang Penunjang Operasional Rumah Sakit (paket)				*1*		*(RSUD, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*1*		
	1.02.1-2.0-0.0-0.01.01.02.1.02	Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi						10.885.501.200,00			Tidak	Tidak			-	RSUD Prof. DR. WZ Johannes Kupang
			Terlaksananya Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi (%)				*100*		*(kota kupang, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*100*		
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan						1.219.961.000,00							-	RSUD Prof. DR. WZ Johannes Kupang
			terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan (paket)				*1*		*(RSUD, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*1*		
		Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat						9.665.540.200,00							-	RSUD Prof. DR. WZ Johannes Kupang
			terlaksananya Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat (paket)				*1*		*(RSUD, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*1*		
	1.02.1-2.0-0.0-0.01.01.02.1.04	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi						46.597.815,00			Tidak	Tidak			-	RSUD Prof. DR. WZ Johannes Kupang
			Terlaksananya Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi (%)				*100*		*(22 kab/kota, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*100*		
		Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan						46.597.815,00							-	RSUD Prof. DR. WZ Johannes Kupang
			terlaksananya Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan (paket)				*1*		*(RSUD, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*1*		
8.	**1.02.1-2.0-0.0-0.01.01.03**	**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN**						**7.681.066.632,00**			**Ya**	**Ya**			**0,00**	**RSUD Prof. DR. WZ Johannes Kupang**
			Persentasi SDM RSU Daerah yang ditingkatkan Kompetensi dan Kualifikasinya (%)				***100***									
	1.02.1-2.0-0.0-0.01.01.03.1.01	Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKM dan UKP Provinsi						7.515.885.432,00			Tidak	Tidak			-	RSUD Prof. DR. WZ Johannes Kupang
			Terlaksananya Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKM dan UKP Provinsi (%)				*100*		*(22 kab/kota, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*100*		
		Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan						7.515.885.432,00							-	RSUD Prof. DR. WZ Johannes Kupang
			Terlaksananya Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan (paket)				*1*		*(RSUD, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*1*		

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode RPJMD	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2020	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RKPD TAHUN 2021	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2023		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2022	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.02.1-2.0-0.0-0.01.01.03.1.02	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi						165.181.200,00			Tidak	Tidak			-	RSUD Prof. DR. WZ Johannes Kupang
			Terlaksananya Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi (%)				*100*		*(22 kab/kota, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*100*		
		Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan						165.181.200,00							-	RSUD Prof. DR. WZ Johannes Kupang
			terlaksananya Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan (paket)				*1*		*(RSUD, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*1*		
	1.03	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**						**846.074.147.283,71**							**0,00**	
1.	**1.03.1-3.0-0.0-0.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**						**50.720.992.374,00**			**Tidak**	**Tidak**			**0,00**	**Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat**
			Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran yang berkualitas (%)				***100***									
			Meningkatnya sarana dan prasarana (%)				***100***									
			Tercapainya penyusunan capaian kinerja ikhtisar realisasi kinerja dan keuangan (%)				***100***									
	1.03.1-3.0-0.0-0.01.01.1.01	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						674.439.660,00			Tidak	Tidak			-	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
			Terlaksananya Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (%)				*100*		*(Kota Kupang, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*100*		
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						90.634.860,00							-	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
			Terlaksananya Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (paket)				*1*		*(Kota Kupang, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*1*		
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD						58.975.140,00							-	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
			Terlaksana Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (paket)				*1*		*(Kota Kupang, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*1*		
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD						20.522.060,00							-	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
			terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (paket)				*1*		*(Kota Kupang, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*1*		
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						504.307.600,00							-	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode RPJMD	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2020	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RKPD TAHUN 2021	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2023		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2022	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (paket)				*1*		*(KOta Kupang, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*1*		
	1.03.1-3.0-0.0-0.01.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						32.261.190.633,00			Tidak	Tidak			-	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
			Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah (%)				*100*		*(Kota Kupang, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*100*		
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						31.723.299.513,00							-	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
			Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN (paket)				*1*		*(Kota Kupang, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*1*		
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD						60.707.500,00							-	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
			Terlaksana Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (paket)				*1*		*(kota Kupang, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*1*		
		Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan						76.311.820,00							-	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
			terlaksananya Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan (paket)				*1*		*(Kota Kupang, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*1*		
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD						375.680.280,00							-	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
			terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (paket)				*1*		*(Kota Kupang, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*1*		
		Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran						25.191.520,00							-	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
			Terlaksananya Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (paket)				*1*		*(kota kupang, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*1*		
	1.03.1-3.0-0.0-0.01.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah						609.712.360,00			Tidak	Tidak			-	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
			Terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah (%)				*100*		*(Kota Kupang, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*100*		
		Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD						282.145.020,00							-	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
			terlaksananya Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD (paket)				*1*		*(kota kupang, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*1*		
		Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD						264.145.560,00							-	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
			terlaksananya Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD (paket)				*1*		*(Kota Kupang, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*1*		
		Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD						63.421.780,00							-	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode RPJMD	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2020	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RKPD TAHUN 2021	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2023		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2022	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (paket)				*1*		*(kota kupang, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*1*		
	1.03.1-3.0-0.0-0.01.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						289.396.980,00			Tidak	Tidak			-	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
			Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah (%)				*100*		*(Kota Kupang, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*100*		
		Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian						97.711.780,00							-	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
			terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (paket)				*1*		*(kota kupang, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*1*		
		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi						99.913.000,00							-	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
			terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi (paket)				*1*		*(Kota Kupang, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*1*		
		Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan						91.772.200,00							-	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
			terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan (paket)				*1*		*(kota kupang, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*1*		
	1.03.1-3.0-0.0-0.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						1.362.053.625,00			Tidak	Tidak			-	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
			Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah (%)				*100*		*(Kota Kupang, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*100*		
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor						29.994.091,00							-	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
			Terlaksananya Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor (paket)				*1*		*(kota kupang, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*1*		
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						188.951.950,00							-	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
			terlaksananya Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan (paket)				*1*		*(Kota KUpang, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*1*		
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan						23.478.000,00							-	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
			Terlaksananya Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan (paket)				*1*		*(Kota kupang, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*1*		
		Penyediaan Bahan/Material						266.844.184,00							-	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
			terlaksananya Penyediaan Bahan/Material (paket)				*1*		*(kota kupang, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*1*		
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						420.172.880,00							-	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode RPJMD	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2020	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RKPD TAHUN 2021	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2023		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2022	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (paket)				*1*		*(Kota kupang, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*1*		
		Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD						432.612.520,00								- Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
			Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (paket)				*1*		*(Kota Kupang, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*1*		
	1.03.1-3.0-0.0-0.01.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						683.340.420,00			Tidak	Tidak				- Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
			Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (%)				*100*		*(Kota Kupang, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*100*		
		Pengadaan Mebel						16.760.080,00								- Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
			Terlaksanaan Pengadaan Mebel (paket)				*1*		*(Kota Kupang, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*1*		
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya						39.920.340,00								- Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
			Terlaksananya Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya (paket)				*1*		*(Kota Kupang, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*1*		
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						626.660.000,00								- Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
			terlaksananya Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya (paket)				*1*		*(Kota Kupang, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*1*		
	1.03.1-3.0-0.0-0.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						4.882.827.820,00			Tidak	Tidak				- Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
			Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%)				*100*		*(Kota Kupang, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*100*		
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat						60.720.000,00								- Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
			Tersedianya Jasa Surat Menyurat (paket)				*1*		*(Kota Kupang, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*1*		
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						2.021.134.200,00								- Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
			Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik (paket)				*1*		*(Kota Kupang, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*1*		
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						2.800.973.620,00								- Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
			Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor (paket)				*1*		*(Kota Kupang, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*1*		
	1.03.1-3.0-0.0-0.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						1.340.496.876,00			Tidak	Tidak				- Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode RPJMD	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2020	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RKPD TAHUN 2021	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2023		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2022	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%)				*100*		*(Kota Kupang, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*100*		
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						511.580.000,00								Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
			Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan (paket)				*1*		*(Kota Kupang, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*1*		
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						281.797.000,00								Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
			Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya (paket)				*1*		*(Kota Kupang, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*1*		
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya						547.119.876,00								Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
			terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya (paket)				*1*		*(Kota Kupang, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*1*		
	1.03.1-3.0-0.0-0.01.01.1.10	Peningkatan Pelayanan BLUD						8.617.534.000,00			Tidak	Tidak				Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
			Terlaksananya Peningkatan Pelayanan BLUD (%)				*100*		*(Kota Kupang, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*100*		
		Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD						8.617.534.000,00								Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
			terlaksananya Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD (paket)				*1*		*(Kota Kupang, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*1*		
2.	**1.03.1-3.0-0.0-0.01.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)**						**206.351.706.045,62**			**Ya**	**Ya**			**0,00**	**Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat**
			Cakupan Pemeliharaan embung Kecil (142 Buah) dan bangunan penampung air setiap tahun (%)				***100***									
			Cakupan Pembangunan Embung dan Bangunan Penampung Air setiap tahun (Target pembangunan 142 embung)				***100***									
			Cakupan Pemeliharaan Saluran irigasi menurut Klasifikasinya setiap tahun (%)				***100***									
			Cakupan Pemeliharaan Daerah Irigasi Kewenangan Provinsi setiap tahunnya (42 DI = 60.328 ha) (%)				***100***									

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode RPJMD	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2020	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RKPD TAHUN 2021	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2023		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2022	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Cakupan Koordinasi dan Sinkronisasi Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Provinsi (%)				***100***									
			Cakupan Pemeliharaan Bangunan Perkuatan Tebing pada 22 Sungai (%)				***100***									
	1.03.1-3.0-0.0-0.01.02.1.01	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota						129.669.948.520,00			Tidak	Tidak			-	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
			Terlaksananya pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota (%)				*100*		*(22 kab/kota, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*100*		
		Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Embung, dan Bangunan Penampung Air Lainnya						11.755.000.000,00							-	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
			Tersusunnya Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Embung, dan Bangunan Penampung Air Lainnya (paket)				*1*		*(22 kab kota, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*1*		
		Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, Drainase Utama Perkotaan dan Pengaman Pantai						10.224.000.000,00							-	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
			Tersusunnya Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, Drainase Utama Perkotaan dan Pengaman Pantai (paket)				*1*		*(22 kab kota, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*1*		
		Pembangunan Embung dan Penampung Air Lainnya						74.916.000.000,00							-	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
			Terlaksananya Pembangunan Embung dan Penampung Air Lainnya (paket)				*1*		*(22 kab kota, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*1*		
		Pembangunan Sumur Air Tanah untuk Air Baku						15.706.000.000,00							-	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
			Terlaksananya Pembangunan Sumur Air Tanah untuk Air Baku (paket)				*1*		*(22 kab kota, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*1*		
		Rehabilitasi Embung dan Penampungan Air Lainnya						15.000.000.000,00							-	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
			Terlaksananya Rehabilitasi Embung dan Penampungan Air Lainnya (paket)				*1*		*(22 kab kota, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*1*		
		Pengelolaan Hidrologi dan Kualitas Air WS Kewenangan Provinsi						1.500.000.000,00							-	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
			Terlaksananya Pengelolaan Hidrologi dan Kualitas Air WS Kewenangan Provinsi (paket)				*1*		*(22 kab kota, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*1*		
		Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Provinsi						568.948.520,00							-	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode RPJMD	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2020	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RKPD TAHUN 2021	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2023		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2022	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Provinsi (paket)				*1*		*(22 Kab Kota, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*1*		
	1.03.1-3.0-0.0-0.01.02.1.02	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha - 3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota						76.681.757.525,62		Dana Perimbangan	Tidak	Tidak			-	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
			Terlaksananya Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha - 3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota (%)				*100*		*(22 kab/kota, NUSA TENGGARA TIMUR)*	*Dana Perimbangan*				*100*		
		Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa						6.261.000.000,00							-	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
			Tersusunnya Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa (paket)				*1*		*(22 kab kota, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*1*		
		Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan						50.000.000.000,00		Dana Perimbangan					-	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
			terlaksananya Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan (paket)				*1*		*(22 kab kota, NUSA TENGGARA TIMUR)*	*Dana Perimbangan*				*1*		
		Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan						-							-	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
			terlaksananya Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan (paket)				*1*		*(22 kab kota, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*1*		
		Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan						-							-	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
			Terlaksana Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan (paket)				*1*		*(22 kab/kota, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*1*		
		Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan						20.420.757.525,62		Dana Perimbangan					-	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
			Terlaksananya Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan (paket)				*1*		*(22 kab/kota, NUSA TENGGARA TIMUR)*	*Dana Perimbangan*				*1*		
3.	**1.03.1-3.0-0.0-0.01.03**	**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM**						**7.875.000.000,00**			**Ya**	**Ya**			**0,00**	**Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat**
			Cakupan KK yang mampu mengakses air minum layak tingkat Provinsi (%)				***100***			***Dana Perimbangan***						
			Cakupan KK yang mampu mengakses air minum layak di di Kawasan Destinasi Pariwisata (%)				***100***			***Dana Perimbangan***						
	1.03.1-3.0-0.0-0.01.03.1.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota						7.875.000.000,00			Tidak	Tidak			-	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode RPJMD	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2020	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RKPD TAHUN 2021	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2023		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2022	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Terlaksananya Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota (%)				*100*		*(22 kab/kota, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*100*		
		Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM						600.000.000,00								Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
			Tersusunnya Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM (paket)				*1*		*(22 kab kota, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*1*		
		Supervisi Pembangunan/Peningkatan/Perluasan/Perbaikan SPAM						225.000.000,00								Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
			terlaksananya Supervisi Pembangunan/Peningkatan/Perluasan/Perbaikan SPAM (paket)				*1*		*(22 kab/kota, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*1*		
		Pembangunan Baru SPAM Jaringan Perpipaan						7.050.000.000,00								Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
			terlaksananya Pembangunan Baru SPAM Jaringan Perpipaan (paket)				*1*		*(22 kab/kota, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*1*		
		Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan						-								Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
			terlaksananya Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan (paket)				*1*		*(22 kab/kota, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*1*		
		Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan						-								Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
			terlaksananya Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan (paket)				*1*		*(22 kab kota, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*1*		
		Pembentukan Organisasi Pengelola SPAM Lintas Kabupaten/Kota						-								Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
			Terlaksananya Pembentukan Organisasi Pengelola SPAM Lintas Kabupaten/Kota (paket)				*1*		*(22 kab/kota, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*1*		
4.	**1.03.1-3.0-0.0-0.01.04**	**PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL**						**1.850.000.000,00**			**Ya**	**Ya**			**0,00**	**Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat**
			Cakupan Pembangunan TPA / TPST / SPA terbangun lingkup Provinsi (%)				***100***									
	1.03.1-3.0-0.0-0.01.04.1.01	Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional						1.850.000.000,00			Tidak	Tidak				Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
			Terlaksananya Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional (%)				*100*		*(22 Kab/kota, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*100*		
		Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan TPA/TPST/SPA Kewenangan Provinsi						1.850.000.000,00								Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
			Tersusunnya Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan TPA/TPST/SPA Kewenangan Provinsi (paket)				*1*		*(22 kab kota, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*1*		

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode RPJMD	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2020	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RKPD TAHUN 2021	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2023		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2022	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
5.	**1.03.1-3.0-0.0-0.01.05**	**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH**						**1.850.000.000,00**			**Ya**	**Ya**			**0,00**	**Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat**
			Cakupan Pengelolaan Limbah Domestik (%)				***80***									
	1.03.1-3.0-0.0-0.01.05.1.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Regional						1.850.000.000,00			Tidak	Tidak			-	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
			Terlaksananya Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Regional (%)				*100*		*(22 Kab/Kota, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*100*		
		Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik						1.850.000.000,00							-	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
			Tersusunnya Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (paket)				*1*		*(22 kab/kota, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*1*		
6.	**1.03.1-3.0-0.0-0.01.06**	**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE**						**2.100.000.000,00**			**Ya**	**Ya**			**0,00**	**Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat**
			Cakupan Penanganan Kawasan banjir sekitar wilayah sungai yang merupakan kewenangan Provinsi (%)				***100***									
	1.03.1-3.0-0.0-0.01.06.1.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan Kawasan Strategis Provinsi						2.100.000.000,00			Tidak	Tidak			-	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
			Terlaksananya Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan Kawasan Strategis Provinsi (%)				*100*		*(22 Kab/Kota, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*100*		
		Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan						2.100.000.000,00							-	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
			Tersusunnya Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan (paket)				*1*		*(22 kab/kota, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*1*		
7.	**1.03.1-3.0-0.0-0.01.07**	**PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN**						**97.679.839.124,00**			**Ya**	**Ya**			**0,00**	**Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat**
			Cakupan Kawasan Permukiman Kumuh yang ditangani setiap tahun (%)				***100***									
			Cakupan Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Provinsi yang ditangani setiap tahun				***100***									

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode RPJMD	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2020	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RKPD TAHUN 2021	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2023		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2022	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Cakupan Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum Layak Lingkup Provinsi setiap tahun di Kawasan Destinasi Wisata				***100***									
	1.03.1-3.0-0.0-0.01.07.1.01	Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Provinsi						97.679.839.124,00			Tidak	Tidak			-	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
			Terlaksananya penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Provinsi (%)				*100*		*(22 Kab/Kota, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*100*		
		Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Provinsi						95.329.839.124,00							-	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
			terlaksananya Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Provinsi (paket)				*1*		*(22 kab/kota, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*1*		
		Pengawasan dan Pengendalian Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Provinsi						2.350.000.000,00							-	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
			Terlaksananya Pengawasan dan Pengendalian Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Provinsi (paket)				*1*		*(22 kab kota, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*1*		
8.	**1.03.1-3.0-0.0-0.01.08**	**PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG**						**10.140.000.000,00**			**Ya**	**Ya**			**0,00**	**Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat**
			Cakupan Penataan bangunan sesuai ketentuan tata bangunan setiap tahun (%)				***4***									
			Cakupan Pembinaan penyelenggaraan bangunan gedung setiap tahun (%)				***100***									
	1.03.1-3.0-0.0-0.01.08.1.01	Penetapan dan Penyelenggaraan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi						10.140.000.000,00			Tidak	Tidak			-	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
			Terlaksananya Penetapan dan Penyelenggaraan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi (%)				*100*		*(22 Kab/Kota, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*100*		
		Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan dan Pemanfaatan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi						10.140.000.000,00							-	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
			Terlaksananya Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan dan Pemanfaatan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi (paket)				*1*		*(22 kab kota, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*1*		
9.	**1.03.1-3.0-0.0-0.01.09**	**PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA**						**2.150.000.000,00**			**Ya**	**Ya**			**0,00**	**Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat**

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode RPJMD	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2020	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RKPD TAHUN 2021	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2023		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2022	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Terlaksananya penyelenggaraan penataan bangunan dan lingkungan untuk kepentingan strategis daerah provinsi dan lintas Kab/Kota				***100***									
	1.03.1-3.0-0.0-0.01.09.1.01	Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota						2.150.000.000,00			Tidak	Tidak			-	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
			Terlaksananya Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota (%)				*100*		*(22 Kab/Kota, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*100*		
		Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota						200.000.000,00							-	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
			Tersusunnya Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota (paket)				*1*		*(22 kab kota, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*1*		
		Supervisi Penataan/Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan						100.000.000,00							-	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
			terlaksananya Supervisi Penataan/Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan (paket)				*1*		*(22 kab kota, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*1*		
		Penataan Bangunan dan Lingkungan						1.850.000.000,00							-	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
			Terlaksananya Penataan Bangunan dan Lingkungan (paket)				*1*		*(22 kab kota, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*1*		
10.	**1.03.1-3.0-0.0-0.01.10**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN**						**455.074.388.620,09**			**Ya**	**Ya**			**0,00**	**Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat**
			Peningkatan Cakupan Kemantapan Jalan Provinsi (%)				***100***									
			Persentase ketersediaan jalan dan jembatan ke 22 Pariwisata Estate (%)				***100***									
	1.03.1-3.0-0.0-0.01.10.1.01	Penyelenggaraan Jalan Provinsi						455.074.388.620,09		Dana Perimbangan	Tidak	Tidak			-	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
			Terlaksananya Penyelenggaraan Jalan Provinsi (%)				*100*		*(22 Kab/Kota, NUSA TENGGARA TIMUR)*	*Dana Perimbangan*				*100*		
		Survey Kondisi Jalan/Jembatan						2.156.549.020,00							-	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
			Terlaksananya Survey Kondisi Jalan/Jembatan (paket)				*1*		*(22 kab kota, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*1*		
		Pembangunan Jalan						-							-	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode RPJMD	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2020	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RKPD TAHUN 2021	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2023		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2022	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Terlaksananya Pembangunan Jalan (paket)				*1*		*(22 kab/kota, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*1*		
		Pelebaran Jalan Menambah Lajur						-								- Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
			terlaksananya Pelebaran Jalan Menambah Lajur (paket)				*1*		*(22 kab kota, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*1*		
		Rekonstruksi Jalan						57.817.839.600,09		Dana Perimbangan						- Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
			terlaksananya Rekonstruksi Jalan (paket)				*1*		*(22 kab/kota, NUSA TENGGARA TIMUR)*	*Dana Perimbangan*				*1*		
		Rehabilitasi Jalan						384.000.000.000,00		Dana Perimbangan						- Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
			Terlaksananya Rehabilitasi Jalan (paket)				*1,00*		*(22 kab/kota, NUSA TENGGARA TIMUR)*	*Dana Perimbangan*				*1,00*		
		Pemeliharaan Rutin Jalan						750.000.000,00								- Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
			terlaksananya Pemeliharaan Rutin Jalan (paket)				*1*		*(22 kab/kota, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*1*		
		Pembangunan Jembatan						-								- Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
			Pembangunan Jembatan (paket)				*1*		*(22 kab/kota, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*1*		
		Penggantian Jembatan						2.850.000.000,00								- Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
			terlaksananya Penggantian Jembatan (paket)				*1*		*(22 kab/kota, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*1*		
		Rehabilitasi Jembatan						5.000.000.000,00								- Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
			terlaksananya Rehabilitasi Jembatan (paket)				*1*		*(22 kab/kota, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*1*		
		Penanggulangan Bencana/Tanggap Darurat						2.500.000.000,00								- Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
			Terlaksananya Penanggulangan Bencana/Tanggap Darurat (paket)				*1*		*(22 kab/kota, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*1*		
11.	**1.03.1-3.0-0.0-0.01.11**	**PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI**						**3.324.903.618,00**			**Ya**	**Ya**			**0,00**	**Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat**
			Terselenggaranya industri konstruksi yang memenuhi 5 aspek jasa konstruksi yaitu Tepat waku, Tepat Mutu, Tepat Kuantitas, Tepat sasaran dan Tepat Manfaat				***100***									
	1.03.1-3.0-0.0-0.01.11.1.01	Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi						1.667.727.966,00			Tidak	Tidak				- Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
			Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi (%)				*100*		*(22 Kab/Kota, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*100*		

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode RPJMD	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2020	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RKPD TAHUN 2021	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2023		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2022	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		Penyiapan Instruktur/Asesor/Penyelenggara Pelatihan						251.499.624,00								- Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
			Terlaksananya Penyiapan Instruktur/Asesor/Penyelenggara Pelatihan (paket)				*1*		*(22 kab kota, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*1*		
		Pelaksanaan Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi						1.058.853.000,00								- Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
			Terlaksananya Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi (paket)				*1*		*(22 kab kota, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*1*		
		Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Ahli Konstruksi						357.375.342,00								- Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
			terlaksananya Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Ahli Konstruksi (paket)				*1*		*(22 kab/kota, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*1*		
	1.03.1-3.0-0.0-0.01.11.1.02	Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi (SIPJAKI) Cakupan Daerah Provinsi						1.158.780.600,00			Tidak	Tidak				- Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
			Terlaksananya Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi (SIPJAKI) Cakupan Daerah Provinsi (%)				*100*		*(22 Kab/Kota, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*100*		
		Penyediaan Perangkat Pendukung Layanan Informasi Jasa Konstruksi						169.630.228,00								- Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
			Tersedianya Perangkat Pendukung Layanan Informasi Jasa Konstruksi (paket)				*1*		*(22 kab/kota, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*1*		
		Penyelenggaraan Pelatihan untuk Peningkatan Kapasitas Administrator SIPJAKI						301.655.192,00								- Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
			terselenggaranya Pelatihan untuk Peningkatan Kapasitas Administrator SIPJAKI (paket)				*1*		*(22 kab kota, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*1*		
		Penyediaan Data dan Informasi Jasa Konstruksi						687.495.180,00								- Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
			tersedianya Data dan Informasi Jasa Konstruksi (paket)				*1*		*(22 kab/kota, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*1*		
	1.03.1-3.0-0.0-0.01.11.1.03	Kebijakan Khusus terhadap Penyelenggaraan Jasa Konstruksi						498.395.052,00			Tidak	Tidak				- Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
			Terlaksananya Kebijakan Khusus terhadap Penyelenggaraan Jasa Konstruksi (%)				*100*		*(22 Kab/Kota, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*100*		
		Penyiapan/Pembuatan NSPK Kebijakan Khusus Penyelenggaraan Jasa Konstruksi sesuai Peraturan Perundang-Undangan						100.565.628,00								- Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
			terlaksananya Penyiapan/Pembuatan NSPK Kebijakan Khusus Penyelenggaraan Jasa Konstruksi sesuai Peraturan Perundang-Undangan (paket)				*1*		*(22 kab/kota, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*1*		
		Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha, Tertib Pengelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi pada APBD Provinsi						397.829.424,00								- Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode RPJMD	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2020	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RKPD TAHUN 2021	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2023		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2022	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			terlaksananya Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha, Tertib Pengelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi pada APBD Provinsi (paket)				*1*		*(22 kab/kota, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*1*		
12.	**1.03.1-3.0-0.0-0.01.12**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG**						**6.957.317.502,00**			**Ya**	**Ya**			**0,00**	**Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat**
			Cakupan wilayah provinsi dan Kabupaten/Kota yang telah memiliki Perda RUTR dan RDTR (%)				***100***									
			Penurunan Cakupan Penyimpangan terhadap RUTR dan RDTR pada Tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota (%)				***0***									
	1.03.1-3.0-0.0-0.01.12.1.01	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencana Rinci Tata Ruang Provinsi						1.950.000.000,00			Tidak	Tidak			-	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
			Terlaksananya Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencana Rinci Tata Ruang Provinsi (%)				*100*		*(22 Kab/Kota, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*100*		
		Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi dan Penetapan RTRW Provinsi						1.000.000.000,00							-	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
			terlaksananya Persetujuan Substansi, Evaluasi dan Penetapan RTRW Provinsi (paket)				*1*		*(22 kab/kota, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*1*		
		Penetapan Kebijakan dalam rangka Pelaksanaan Penataan Ruang						600.000.000,00							-	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
			terlaksananya Penetapan Kebijakan dalam rangka Pelaksanaan Penataan Ruang (paket)				*1*		*(22 kab/kota, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*1*		
		Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-Undangan Bidang Penataan Ruang						350.000.000,00							-	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
			terlaksananya Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-Undangan Bidang Penataan Ruang (paket)				*1*		*(22 kab/kota, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*1*		
	1.03.1-3.0-0.0-0.01.12.1.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang						2.657.317.502,00			Tidak	Tidak			-	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
			Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang (%)				*100*		*(22 Kab/Kota, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*100*		
		Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RTRW Provinsi						2.257.317.502,00							-	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
			terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RTRW Provinsi (paket)				*1*		*(22 kab/kota, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*1*		
		Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RTRW dan RRTR Kabupaten/Kota						400.000.000,00							-	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode RPJMD	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2020	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RKPD TAHUN 2021	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2023		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2022	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			terlaksananya Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RTRW dan RRTR Kabupaten/Kota (paket)				*1*		*(22 kab/kota, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*1*		
	1.03.1-3.0-0.0-0.01.12.1.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfataan Ruang Daerah Provinsi						700.000.000,00			Tidak	Tidak				- Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
			Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfataan Ruang Daerah Provinsi (%)				*100*		*(22 Kab/Kota, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*100*		
		Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah						700.000.000,00								- Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
			terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah (paket)				*1*		*(22 kab/kota, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*1*		
	1.03.1-3.0-0.0-0.01.12.1.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfataan Ruang Daerah Provinsi						1.650.000.000,00			Tidak	Tidak				- Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
			Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfataan Ruang Daerah Provinsi (%)				*100*		*(22 Kab/Kota, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*100*		
		Koordinasi dan Sinkronisasi Penertiban dan Penegakan Hukum Bidang Penataan Ruang						600.000.000,00								- Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
			terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Penertiban dan Penegakan Hukum Bidang Penataan Ruang (paket)				*1*		*(22 kab kota, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*1*		
		Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang						1.050.000.000,00								- Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
			Terlaksananya Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang (paket)				*1*		*(22 kab/kota, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*1*		
	1.04	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN**						**138.929.109.025,00**							**0,00**	
1.	**1.04.1-3.0-0.0-0.01.02**	**PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN**						**90.192.099.700,00**			**Ya**	**Ya**			**0,00**	**Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat**
			Ketersediaan rumah bagi warga yang terkena relokasi rumah program pemerintah provinsi (%)				***100***									
	1.04.1-3.0-0.0-0.01.02.1.01	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi						20.067.668.200,00			Tidak	Tidak				- Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
			Terlaksanannya Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi (%)				*100*		*(22 Kab/Kota, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*100*		
		Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana atau Terkena Relokasi Program Provinsi						2.849.431.500,00								- Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
			terlaksananya Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana atau Terkena Relokasi Program Provinsi (paket)				*1*		*(22 kab/kota, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*1*		

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode RPJMD	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2020	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RKPD TAHUN 2021	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2023		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2022	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		Pengumpulan Data Rumah Korban Bencana Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani						17.096.589.000,00							-	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
			terlaksananya Pengumpulan Data Rumah Korban Bencana Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani (paket)				*1*		*(22 kab/kota, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*1*		
		Pendataan dan Verifikasi Penerima Rumah bagi Korban Bencana Alam atau Terkena Relokasi Program Provinsi						121.647.700,00							-	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
			terlaksananya Pendataan dan Verifikasi Penerima Rumah bagi Korban Bencana Alam atau Terkena Relokasi Program Provinsi (paket)				*1*		*(22 kab/kota, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*1*		
	1.04.1-3.0-0.0-0.01.02.1.03	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi						70.124.431.500,00		Dana Perimbangan	Tidak	Tidak			-	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
			Terlaksananya Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi (%)				*100*		*(22 Kab/Kota, NUSA TENGGARA TIMUR)*	*Dana Perimbangan*				*100*		
		Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana						2.849.431.500,00							-	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
			Terlaksananya Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana (paket)				*1*		*(22 kab/kota, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*1*		
		Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi						67.275.000.000,00		Dana Perimbangan					-	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
			Terlaksananya Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi (paket)				*1*		*(22 kab/kota, NUSA TENGGARA TIMUR)*	*Dana Perimbangan*				*1*		
2.	**1.04.1-3.0-0.0-0.01.03**	**PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN**						**21.522.902.750,00**			**Ya**	**Ya**			**0,00**	**Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat**
			Peningkatan Cakupan Rumah Layak Huni (Target penanganan RTLH sampai dengan 2023 = 47.948 Unit) (%)				***100***			***Dana Perimbangan***						
			Persentase rumah tangga menurut sanitasi layak (%)				***100***			***Dana Perimbangan***						
	1.04.1-3.0-0.0-0.01.03.1.01	Penataan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha						614.608.500,00			Tidak	Tidak			-	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
			Terlaksananya Penataan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha (%)				*100*		*(22 Kab/Kota, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*100*		
		Pelaksanaan Pembagian Rumah bagi Masyarakat Terdampak Program Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh						-							-	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
			terlaksananya Pembagian Rumah bagi Masyarakat Terdampak Program Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh (paket)				*1*		*(22 kab/kota, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*1*		

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode RPJMD	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2020	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RKPD TAHUN 2021	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2023		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2022	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		Penatausahaan Serah Terima Rumah bagi Masyarakat Terdampak Program Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh						-							-	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
			terlaksananya Penatausahaan Serah Terima Rumah bagi Masyarakat Terdampak Program Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh (paket)				*1*		*(22 kab/kota, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*1*		
		Penyusunan/Review/Legalisasi Kebijakan Bidang PKP						614.608.500,00							-	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
			terlaksananya Penyusunan/Review/Legalisasi Kebijakan Bidang PKP (paket)				*1*		*(22 kab/kota, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*1*		
	1.04.1-3.0-0.0-0.01.03.1.02	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha						20.908.294.250,00		Dana Perimbangan	Tidak	Tidak			-	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
			Terlaksananya Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha (s/)				*100*		*(22 Kab/Kota, NUSA TENGGARA TIMUR)*	*Dana Perimbangan*				*100*		
		Penyusunan Rencana Tapak (Site Plan) dan Detail Engineering Design (DED) Peremajaan/Pemugaran Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha						1.134.951.000,00							-	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
			Tersusunnya Rencana Tapak (Site Plan) dan Detail Engineering Design (DED) Peremajaan/Pemugaran Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha				*1*		*(22 kab/kota, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*1*		
		Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni dalam Kawasan Permukiman dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha						5.689.086.500,00							-	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
			Terlaksananya Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni dalam Kawasan Permukiman dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha (paket)				*1*		*(22 kab/kota, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*1*		
		Pelaksanaan Pembangunan Pemugaran/ Peremajaan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha						14.084.256.750,00		Dana Perimbangan					-	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
			terlaksananya Pelaksanaan Pembangunan Pemugaran/ Peremajaan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha (paket)				*1*		*(22 kab/kota, NUSA TENGGARA TIMUR)*	*Dana Perimbangan*				*1*		
3.	**1.04.1-3.0-0.0-0.01.05**	**PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)**						**27.214.106.575,00**			**Ya**	**Ya**			**0,00**	**Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat**
			Peningkatan Cakupan Prasarana dan Utilitas Umum pada Permukiman (s/)				***100***			***Dana Perimbangan***						

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode RPJMD	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2020	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RKPD TAHUN 2021	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2023		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2022	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.04.1-3.0-0.0-0.01.05.1.01	Urusan Penyelenggaraan PSU Permukiman						27.214.106.575,00		Dana Perimbangan	Tidak	Tidak			-	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
		Perencanaan Penyediaan PSU Permukiman						3.764.373.250,00							-	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
			terlaksananya Perencanaan Penyediaan PSU Permukiman (paket)				*1*		*(22 kab/kota, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*1*		
		Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman						23.449.733.325,00		Dana Perimbangan					-	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
			tersedianya Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman (paket)				*1*		*(22 kab/kota, NUSA TENGGARA TIMUR)*	*Dana Perimbangan*				*1*		
	1.05	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT**						**25.961.934.279,72**							**0,00**	
1.	**1.05.1-5.0-0.0-0.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**						**14.355.718.496,72**			**Tidak**	**Tidak**			**0,00**	**Satuan Polisi Pamongpraja**
			Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran yang berkualitas (%)				***100***			***Dana Perimbangan***						
			Meningkatnya sarana dan prasarana (%)				***100***			***Dana Perimbangan***						
			ercapainya penyusunan capaian kinerja ikhtisar realisasi kinerja dan keuangan (%)				***100***			***Dana Perimbangan***						
			Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran yang berkualitas (%)				***100***			***Dana Perimbangan***						
			Meningkatnya sarana dan prasarana (%)				***100***			***Dana Perimbangan***						
			Tercapainya penyusunan capaian kinerja ikhtisar realisasi kinerja dan keuangan (%)				***100***			***Dana Perimbangan***						
	1.05.1-5.0-0.0-0.01.01.1.01	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						13.149.708,00			Tidak	Tidak			-	Satuan Polisi Pamongpraja
			Terlasananya Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (%)				*100*		*(22 Kab/Kota, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*100*		
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD						13.149.708,00							-	Satuan Polisi Pamongpraja
			terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (paket)				*1*		*(kota kupang, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*1*		
	1.05.1-5.0-0.0-0.01.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						11.726.613.600,00			Tidak	Tidak			-	Satuan Polisi Pamongpraja

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode RPJMD	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2020	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RKPD TAHUN 2021	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2023		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2022	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah (%)				*100*		*(22 Kab/Kota, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*100*		
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						11.728.613.600,00								- Satuan Polisi Pamongpraja
			terlaksananya Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN (paket)				*1*		*(kota kupang, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*1*		
	1.05.1-5.0-0.0-0.01.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						387.488.200,00			Tidak	Tidak				- Satuan Polisi Pamongpraja
			Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah (%)				*100*		*(22 Kab/Kota, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*100*		
		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya						345.950.000,00								- Satuan Polisi Pamongpraja
			terlaksananya Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya (paket)				*1*		*(kota kupang, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*1*		
		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi						41.538.200,00								- Satuan Polisi Pamongpraja
			terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi (paket)				*1*		*(kota kupang, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*1*		
	1.05.1-5.0-0.0-0.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						406.303.972,00			Tidak	Tidak				- Satuan Polisi Pamongpraja
			Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah (%)				*100*		*(22 Kab/Kota, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*100*		
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor						5.497.800,00								- Satuan Polisi Pamongpraja
			terlaksananya Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor (paket)				*1*		*(kota kupang, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*1*		
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						16.652.900,00								- Satuan Polisi Pamongpraja
			terlaksananya Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan (paket)				*1*		*(kota kupang, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*1*		
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan						5.495.380,00								- Satuan Polisi Pamongpraja
			terlaksananya Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan (paket)				*1*		*(kota kupang, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*1*		
		Penyediaan Bahan/Material						43.998.592,00								- Satuan Polisi Pamongpraja
			terlaksananya Penyediaan Bahan/Material (paket)				*1*		*(kota kupang, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*1*		
		Fasilitasi Kunjungan Tamu						85.027.200,00								- Satuan Polisi Pamongpraja
			terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu (paket)				*1*		*(kota kupang, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*1*		
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						219.917.100,00								- Satuan Polisi Pamongpraja
			terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (paket)				*1*		*(kota kupang, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*1*		

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode RPJMD	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2020	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RKPD TAHUN 2021	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2023		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2022	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD						29.715.000,00								- Satuan Polisi Pamongpraja
			terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (paket)				*1*		*(kota kupang, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*1*		
	1.05.1-5.0-0.0-0.01.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						1.292.538.350,20			Tidak	Tidak				- Satuan Polisi Pamongpraja
			Terlaksasananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (%)				*100*		*(22 Kab/kota, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*100*		
		Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						1.172.219.618,40								- Satuan Polisi Pamongpraja
			terlaksananya Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan (paket)				*1*		*(kota ,kupang, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*1*		
		Pengadaan Mebel						31.497.952,50								- Satuan Polisi Pamongpraja
			terlaksananya Pengadaan Mebel (paket)				*1*		*(kota kupang, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*1*		
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya						88.820.779,30								- Satuan Polisi Pamongpraja
			terlaksananya Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya (paket)				*1*		*(kota kupang, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*1*		
	1.05.1-5.0-0.0-0.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						197.649.511,12			Tidak	Tidak				- Satuan Polisi Pamongpraja
			Terlasananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%)				*100*		*(22 Kab/Kota, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*100*		
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat						1.544.410,72								- Satuan Polisi Pamongpraja
			terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat (paket)				*1*		*(kota kupang, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*1*		
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						33.104.086,40								- Satuan Polisi Pamongpraja
			terlaksananya Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik (paket)				*1*		*(kota kupang, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*1*		
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						163.001.014,00								- Satuan Polisi Pamongpraja
			terlaksananya Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (paket)				*1*		*(kota kupang, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*1*		
	1.05.1-5.0-0.0-0.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						329.975.155,40			Tidak	Tidak				- Satuan Polisi Pamongpraja
			Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%)				*100*		*(22 Kab/Kota, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*100*		
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						188.779.155,40								- Satuan Polisi Pamongpraja

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode RPJMD	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2020	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RKPD TAHUN 2021	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2023		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2022	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			terlaksananya Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan (paket)				*1*		*(kota kupang, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*1*		
		Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya						31.196.000,00								- Satuan Polisi Pamongpraja
			terlaksananya Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya (paket)				*1*		*(kota kupang, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*1*		
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya						110.000.000,00								- Satuan Polisi Pamongpraja
			terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya (paket)				*1*		*(kota kupang, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*1*		
2.	**1.05.1-5.0-0.0-0.01.02**	**PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**						**2.744.384.225,00**			**Ya**	**Ya**			**0,00**	**Satuan Polisi Pamongpraja**
			Meningkatnya pencapaian SPM Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat (%)				***100***									
			Meningkatnya Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat (Jumlah Perda yang ditegakkan) (%)				***100***									
	1.05.1-5.0-0.0-0.01.02.1.01	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi						2.516.291.712,00		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Tidak	Tidak				- Satuan Polisi Pamongpraja
			Terlaksananya Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi (%)				*100*		*(22 Kab/kota, NUSA TENGGARA TIMUR)*	*Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum*				*100*		
		Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan						2.008.993.814,00								- Satuan Polisi Pamongpraja
			terlaksananya Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan				*1*		*(kota kupang, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*1*		
			terlaksananya Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan				*1*		*(kota kupang, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*1*		
		Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penerbitan dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa						507.297.898,00								- Satuan Polisi Pamongpraja

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode RPJMD	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2020	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RKPD TAHUN 2021	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2023		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2022	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			terlaksananya Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penerbitan dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa (paket)				*1*		*(kota kupang, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*1*		
			terlaksananya Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penerbitan dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa (paket)				*1*		*(kota kupang, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*1*		
		Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Provinsi						-		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum						- Satuan Polisi Pamongpraja
			terlaksananya Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Provinsi (paket)				*1*		*(kota kupang, NUSA TENGGARA TIMUR)*	*Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum*				*1*		
		Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum						-		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum						- Satuan Polisi Pamongpraja
			terlaksananya Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum (paket)				*1*		*(kota kupang, NUSA TENGGARA TIMUR)*	*Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum*				*1*		
			terlaksananya Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum (paket)				*1*		*(kota kupang, NUSA TENGGARA TIMUR)*	*Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum*				*1*		
		Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang bernuansa Hak Asasi Manusia						-		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum						- Satuan Polisi Pamongpraja
			terlaksananya Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang bernuansa Hak Asasi Manusia (paket)				*1*		*(kota kupang, NUSA TENGGARA TIMUR)*	*Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum*				*1*		
			terlaksananya Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang bernuansa Hak Asasi Manusia (paket)				*1*		*(kota kupang, NUSA TENGGARA TIMUR)*	*Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum*				*1*		
		Kerja sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan						-		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum						- Satuan Polisi Pamongpraja
			terlaksananya Kerja sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan (paket)				*1*		*(kota kupang, NUSA TENGGARA TIMUR)*	*Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum*				*1*		
			terlaksananya Kerja sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan (paket)				*1*		*(kota kupang, NUSA TENGGARA TIMUR)*	*Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum*				*1*		
	1.05.1-5.0-0.0-0.01.02.1.02	Penegakan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Gubernur						228.092.513,00			Tidak	Tidak				- Satuan Polisi Pamongpraja
			Terlaksakananya Penegakan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Gubernur (%)				*100*		*(22 Kab/kota, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*100*		

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode RPJMD	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2020	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RKPD TAHUN 2021	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2023		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2022	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur						228.092.513,00							-	Satuan Polisi Pamongpraja
			terlaksananya Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur (paket)				*1*		*(kota kupang, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*1*		
	1.05.1-5.0-0.0-0.01.02.1.03	Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Provinsi						-		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Tidak	Tidak			-	Satuan Polisi Pamongpraja
			Terlaksananya Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Provinsi (%)				*100*		*(22 Kab/kota, NUSA TENGGARA TIMUR)*	*Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum*				*100*		
		Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS						-		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum					-	Satuan Polisi Pamongpraja
			terlaksananya Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS (paket)				*1*		*(kota kupang, NUSA TENGGARA TIMUR)*	*Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum*				*1*		
3.	**1.05.1-5.0-0.0-0.01.04**	**PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN**						**0,00**			**Ya**	**Ya**			**0,00**	**Satuan Polisi Pamongpraja**
			Cakupan Pencegahan Daerah Berpotensi Rawan Kebakaran setiap Tahun (%)				***100***			***Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum***						
			Cakupan Penanggulangan Daerah Berpotensi Rawan Kebakaran setiap Tahun (%)				***100***			***Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum***						
			n Daerah Berpotensi Rawan kebakaran: a. Kebakaran b. Non Kebakaran (%)				***100***			***Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum***						
	1.05.1-5.0-0.0-0.01.04.1.01	Penyelenggaraan Pemetaan Rawan Bencana Kebakaran						-		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Tidak	Tidak			-	Satuan Polisi Pamongpraja
		Penyediaan dan Pemutakhiran Informasi Daerah Rawan Kebakaran dan Peta Rawan Kebakaran						-		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum					-	Satuan Polisi Pamongpraja
			terlaksananya Penyediaan dan Pemutakhiran Informasi Daerah Rawan Kebakaran dan Peta Rawan Kebakaran (paket)				*1*		*(kota kupang, NUSA TENGGARA TIMUR)*	*Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum*				*1*		
		Bimbingan Teknis Terkait Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran Provinsi dan Kabupaten/Kota						-		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum					-	Satuan Polisi Pamongpraja
			terlaksananya Bimbingan Teknis Terkait Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran Provinsi dan Kabupaten/Kota (paket)				*1*		*(kota kupang, NUSA TENGGARA TIMUR)*	*Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum*				*1*		
4.	**1.05.1-5.0-0.0-0.04.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**						**7.252.685.300,00**			**Tidak**	**Tidak**			**0,00**	**Badan Penanggulangan Bencana Daerah**

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode RPJMD	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2020	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RKPD TAHUN 2021	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2023		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2022	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran yang berkualitas				***100***			***Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum***						
			Meningkatnya sarana dan prasarana (%)				***100***			***Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum***						
			Tercapainya penyusunan capaian kinerja ikhtisar realisasi kinerja dan keuangan				***100***			***Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum***						
	1.05.1-5.0-0.0-0.04.01.1.01	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						32.000.000,00			Tidak	Tidak				Badan Penanggulangan Bencana Daerah
			Terlaksananya Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (%)				*100*		*(22 Kab/Kota, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*100*		
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						5.000.000,00								Badan Penanggulangan Bencana Daerah
			terlaksananya Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (paket)				*1*		*(kota kupang, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*1*		
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD						5.000.000,00								Badan Penanggulangan Bencana Daerah
			terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (paket)				*1*		*(kota kupang, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*1*		
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD						5.000.000,00								Badan Penanggulangan Bencana Daerah
			terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (paket)				*1*		*(kota kupang, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*1*		
		Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD						5.000.000,00								Badan Penanggulangan Bencana Daerah
			Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD (paket)				*1*		*(kota kupang, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*1*		
		Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD						5.000.000,00								Badan Penanggulangan Bencana Daerah
			terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD (paket)				*1*		*(kota kupang, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*1*		
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD						7.000.000,00								Badan Penanggulangan Bencana Daerah
			terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (paket)				*1*		*(kota kupang, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*1*		
	1.05.1-5.0-0.0-0.04.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						5.930.428.900,00			Tidak	Tidak				Badan Penanggulangan Bencana Daerah
			Terlaskananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah (%)				*100*		*(22 Kab/Kota, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*100*		

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode RPJMD	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2020	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RKPD TAHUN 2021	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2023		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2022	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						5.930.428.900,00								- Badan Penanggulangan Bencana Daerah
			terlaksananya Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN (paket)				*1*		*(kota kupang, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*1*		
	1.05.1-5.0-0.0-0.04.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						13.750.000,00			Tidak	Tidak				- Badan Penanggulangan Bencana Daerah
			Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah (%)				*100*		*(22 Kab/Kota, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*100*		
		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi						13.750.000,00								- Badan Penanggulangan Bencana Daerah
			terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi (paket)				*1*		*(kota kupang, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*1*		
	1.05.1-5.0-0.0-0.04.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						266.748.400,00			Tidak	Tidak				- Badan Penanggulangan Bencana Daerah
			Trlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah (%)				*100*		*(22 Kab/kota, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*100*		
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor						13.354.000,00								- Badan Penanggulangan Bencana Daerah
			terlaksananya Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor (paket)				*1*		*(kota kupang, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*1*		
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						43.950.500,00								- Badan Penanggulangan Bencana Daerah
			terlaksananya Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan (paket)				*1*		*(kota kupang, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*1*		
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan						9.679.000,00								- Badan Penanggulangan Bencana Daerah
			terlaksananya Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan (paket)				*1*		*(kota kupang, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*1*		
		Penyediaan Bahan/Material						62.464.000,00								- Badan Penanggulangan Bencana Daerah
			terlaksananya Penyediaan Bahan/Material (paket)				*1*		*(kota kupang, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*1*		
		Fasilitasi Kunjungan Tamu						26.510.000,00								- Badan Penanggulangan Bencana Daerah
			terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu (paket)				*1*		*(kota kupang, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*1*		
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						110.790.900,00								- Badan Penanggulangan Bencana Daerah
			terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (paket)				*1*		*(kota kupang, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*1*		

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode RPJMD	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2020	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RKPD TAHUN 2021	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2023		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2022	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.05.1-5.0-0.0-0.04.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						34.900.000,00			Tidak	Tidak				Badan Penanggulangan Bencana Daerah
			Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (%)				*100*		*(22 Kab/Kota, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*100*		
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya						34.900.000,00								Badan Penanggulangan Bencana Daerah
			terlaksananya Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya (paket)				*1*		*(kota kupang, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*1*		
	1.05.1-5.0-0.0-0.04.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						653.082.000,00			Tidak	Tidak				Badan Penanggulangan Bencana Daerah
			Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%)				*100*		*(22 Kab/Kota, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*100*		
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat						6.594.000,00								Badan Penanggulangan Bencana Daerah
			terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat (paket)				*1*		*(kota kupang, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*1*		
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						170.188.000,00								Badan Penanggulangan Bencana Daerah
			terlaksananya Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik (paket)				*1*		*(kota kupang, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*1*		
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						476.300.000,00								Badan Penanggulangan Bencana Daerah
			terlaksananya Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (paket)				*1*		*(kota kupang, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*1*		
	1.05.1-5.0-0.0-0.04.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						321.776.000,00			Tidak	Tidak				Badan Penanggulangan Bencana Daerah
			Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%)				*100*		*(22 Kab/Kota, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*100*		
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						263.617.000,00								Badan Penanggulangan Bencana Daerah
			terlaksananya Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan (paket)				*1*		*(kota kupang, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*1*		
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						7.810.000,00								Badan Penanggulangan Bencana Daerah
			terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya (paket)				*1*		*(kota kupang, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*1*		
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						50.349.000,00								Badan Penanggulangan Bencana Daerah

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode RPJMD	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2020	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RKPD TAHUN 2021	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2023		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2022	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya (paket)				*1*		*(kota kupang, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*1*		
5.	**1.05.1-5.0-0.0-0.04.03**	**PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA**						**1.609.146.258,00**			**Ya**	**Ya**			**0,00**	**Badan Penanggulangan Bencana Daerah**
			Cakupan Daerah (Provinsi dan Kabupaten/Kota) yang memiliki rencana Kontinjensi Kebencanaan				***100***									
			Cakupan Pemasangan Rambu Peringatan dini pada daerah rawan bencana (%)				***100***									
			Cakupan Pemasangan Rambu Peringatan dini pada Kawasan Pariwisata Estate (%)				***100***									
			Cakupan Desa/Kelurahan tangguh bencana pada Kawasan Pariwisata Estate (%)				***100***									
	1.05.1-5.0-0.0-0.04.03.1.02	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana						1.139.146.258,00		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Tidak	Tidak			-	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
			Terlaksananya Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana (%)				*100*		*(22 Kab/kota, NUSA TENGGARA TIMUR)*	*Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum*				*100*		
		Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana						212.500.000,00		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum					-	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
			terlaksananya Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana (paket)				*1*		*(kota kupang, NUSA TENGGARA TIMUR)*	*Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum*				*1*		
		Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan terhadap Bencana						100.000.000,00							-	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
			terlaksananya Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan terhadap Bencana (paket)				*1*		*(kota kupang, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*1*		
		Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Bencana						296.646.258,00		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum					-	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
			terlaksananya Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Bencana (paket)				*1*		*(kota kupang, NUSA TENGGARA TIMUR)*	*Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum*				*1*		
		Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana						250.000.000,00							-	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
			terlaksananya Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana (paket)				*1*		*(kota kupang, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*1*		
		Penanganan Pascabencana						80.000.000,00							-	Badan Penanggulangan Bencana Daerah

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode RPJMD	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2020	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RKPD TAHUN 2021	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2023		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2022	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			terlaksananya Penanganan Pascabencana (paket)				*1*		*(kota kupang, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*1*		
		Penyusunan Rencana Kontijensi						200.000.000,00								Badan Penanggulangan Bencana Daerah
			terlaksananya Penyusunan Rencana Kontijensi (paket)				*1*		*(kota kupang, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*1*		
	1.05.1-5.0-0.0-0.04.03.1.03	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana						300.000.000,00			Tidak	Tidak				Badan Penanggulangan Bencana Daerah
			Terlaksananya Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana (%)				*100*		*(22 Kab/kota, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*100*		
		Respon Cepat Penanganan Darurat Bencana						50.000.000,00								Badan Penanggulangan Bencana Daerah
			terlaksananya Respon Cepat Penanganan Darurat Bencana (paket)				*1*		*(kota kupang, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*1*		
		Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana						250.000.000,00								Badan Penanggulangan Bencana Daerah
			terlaksananya Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana (paket)				*1*		*(kota kupang, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*1*		
	1.05.1-5.0-0.0-0.04.03.1.04	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana						170.000.000,00			Tidak	Tidak				Badan Penanggulangan Bencana Daerah
			Terlaksananya Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana (%)				*100*		*(22 Kab/Kota, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*100*		
		Penguatan Kelembagaan Bencana Daerah						120.000.000,00								Badan Penanggulangan Bencana Daerah
			terlaksananya Penguatan Kelembagaan Bencana DaerahBidang (paket)				*1*		*(kota kupang, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*1*		
		Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota di Wilayah Provinsi						50.000.000,00								Badan Penanggulangan Bencana Daerah
			terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota di Wilayah Provinsi (paket)				*1*		*(kota kupang, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*1*		
	1.06	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL**						**42.869.269.724,00**							**0,00**	
1.	**1.06.1-6.0-0.0-0.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**						**21.966.080.650,00**			**Tidak**	**Tidak**			**0,00**	**Dinas Sosial**
			Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran yang berkualitas (%)				***100***									
			Meningkatnya sarana dan prasarana (%)				***100***									

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode RPJMD	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2020	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RKPD TAHUN 2021	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2023		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2022	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Tercapainya penyusunan capaian kinerja ikhtisar realisasi kinerja dan keuangan				***100***									
	1.06.1-6.0-0.0-0.01.01.1.01	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						145.000.000,00		DANA UMUM	Tidak	Tidak			-	Dinas Sosial
			Terlaksananya Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (%)				*100*		*(Kota Kuapng, NUSA TENGGARA TIMUR)*	*DANA UMUM*				*100*		
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						20.000.000,00		DANA UMUM					-	Dinas Sosial
			Terlaksananya Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Tahun)				*1,00*		*(Kota Kupang, NUSA TENGGARA TIMUR)*	*DANA UMUM*				*1,00*		
			terlaksananya Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (paket)				*1*		*(kota kupang, NUSA TENGGARA TIMUR)*	*DANA UMUM*				*1*		
			Terlaksananya Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (%)				*1*		*(Kota Kupang, NUSA TENGGARA TIMUR)*	*DANA UMUM*				*1*		
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD						55.000.000,00		DANA UMUM					-	Dinas Sosial
			Terlaksananya Koordinsi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Tahun)				*1,00*		*(Kota Kupang, NUSA TENGGARA TIMUR)*	*DANA UMUM*				*1*		
			Terlaksnanya Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (%)				*1*		*(Kota Kupang, NUSA TENGGARA TIMUR)*	*DANA UMUM*				*1*		
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD						20.000.000,00		DANA UMUM					-	Dinas Sosial
			Terlaksnanya Koordinas Penyusunan Laporan Capaian Kienerka dan Ikthisar Realisasi Klnerja SKPD (Tahun)				*1,00*		*(Kecamatan Maulafa, KOTA KUPANG)*	*DANA UMUM*				*1*		
			Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Paket)				*1*		*(Kota Kupang, NUSA TENGGARA TIMUR)*	*DANA UMUM*				*1*		
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						50.000.000,00		DANA UMUM					-	Dinas Sosial
			Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Tahun)				*1,00*		*(22 Kab/Kota, NUSA TENGGARA TIMUR)*	*DANA UMUM*				*1*		
			Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Paket)				*1*		*(KOta Kupang, NUSA TENGGARA TIMUR)*	*DANA UMUM*				*1*		
	1.06.1-6.0-0.0-0.01.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						18.439.080.650,00		DANA UMUM	Tidak	Tidak			-	Dinas Sosial
			TerlaksananyaAdministrasi Keuangan Perangkat Daerah (%)				*100*		*(Kota Kupang, NUSA TENGGARA TIMUR)*	*DANA UMUM*				*100*		
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						18.419.080.650,00		DANA UMUM					-	Dinas Sosial
			Terlaksananya Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN (Tahun)				*1,00*		*(Kota Kupang, Kab Kupang, Sumba Barat, Sikka, Lembata, NUSA TENGGARA TIMUR)*	*DANA UMUM*				*1,00*		
		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN						5.000.000,00		DANA UMUM					-	Dinas Sosial
			Terlaksananya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Tahun)				*1,00*		*(Kec Maulafa, KOTA KUPANG)*	*DANA UMUM*				*1,00*		

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode RPJMD	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2020	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RKPD TAHUN 2021	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2023		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2022	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD						10.000.000,00		DANA UMUM					-	Dinas Sosial
			Terlaksananya Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi SKPD (Tahun)				*1,00*		*(Kec Maulafa, KOTA KUPANG)*	*DANA UMUM*				*1,00*		
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD						5.000.000,00		DANA UMUM					-	Dinas Sosial
			Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Laporan Akhir Tahun SKPD (Tahun)				*1,00*		*(Kec Maulafa, KOTA KUPANG)*	*DANA UMUM*				*1*		
	1.06.1-6.0-0.0-0.01.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah						-			Tidak	Tidak			-	Dinas Sosial
			Terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah (%)				*100*		*(Kota Kupang, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*100*		
	1.06.1-6.0-0.0-0.01.01.1.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah						-			Tidak	Tidak			-	Dinas Sosial
			Terlaksananya Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah (%)				*100*		*(Kota Kupang, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*100*		
	1.06.1-6.0-0.0-0.01.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						100.000.000,00		DANA UMUM	Tidak	Tidak			-	Dinas Sosial
			Terlaksanya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah (%)				*100*		*(Kota Kupang, NUSA TENGGARA TIMUR)*	*DANA UMUM*				*100*		
		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan						100.000.000,00		DANA UMUM					-	Dinas Sosial
			Terlaksananya Bimbingan Teknis Implemetasi Peraturan Perundang-undangan (kegiatan)				*1,00*		*(Kec. Maulafa, KOTA KUPANG)*	*DANA UMUM*				*1,00*		
	1.06.1-6.0-0.0-0.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						470.000.000,00		DANA UMUM	Tidak	Tidak			-	Dinas Sosial
			Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah (%)				*100*		*(Kota Kupang, NUSA TENGGARA TIMUR)*	*DANA UMUM*				*100*		
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor						35.000.000,00		DANA UMUM					-	Dinas Sosial
			Terlaksananya Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor (Tahun)				*1,00*		*(Kota Kupang, Kupang, Sumba Barat, Sikka, Lembata, NUSA TENGGARA TIMUR)*	*DANA UMUM*				*1*		
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						25.000.000,00		DANA UMUM					-	Dinas Sosial
			Terlaksananya Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor (Tahun)				*1,00*		*(Kota Kupang, Kupang, Sumba Barat, Sikka, Lembata, NUSA TENGGARA TIMUR)*	*DANA UMUM*				*1*		
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						27.000.000,00		DANA UMUM					-	Dinas Sosial
			Terlaksananya Penyediaan Barang Cetakan dan Pengadaan (Tahun)				*1,00*		*(Kota Kupang, Kupang, Sumba Barat, Sikka, Lembata, NUSA TENGGARA TIMUR)*	*DANA UMUM*				*1*		
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan						13.000.000,00		DANA UMUM					-	Dinas Sosial
			Terlaksananya Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan (Tahun)				*1,00*		*(Kota Kupang, Kupang, Sumba Barat, Sikka, Lembata, NUSA TENGGARA TIMUR)*	*DANA UMUM*				*1*		
		Penyediaan Bahan/Material						244.000.000,00		DANA UMUM					-	Dinas Sosial

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode RPJMD	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2020	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RKPD TAHUN 2021	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2023		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2022	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Terlaksananya Penyediaan Bahan/ Material (Tahun)				*1,00*		*(Kota Kupang, Kupang, Sumba Barat, Sikka, Lembata, NUSA TENGGARA TIMUR)*	*DANA UMUM*				*1,00*		
		Fasilitasi Kunjungan Tamu						32.000.000,00		DANA UMUM					-	Dinas Sosial
			Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu (Tahun)				*1,00*		*(Kota Kupang, Kupang, Sumba Barat, Sikka, Lembata, NUSA TENGGARA TIMUR)*	*DANA UMUM*				*1*		
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						74.000.000,00		DANA UMUM					-	Dinas Sosial
			Terlaksananya Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Tahun)				*1,00*		*(22 Kab/Kota, NUSA TENGGARA TIMUR)*	*DANA UMUM*				*1,00*		
		Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD						20.000.000,00		DANA UMUM					-	Dinas Sosial
			Terlaksananya Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Tahun)				*1,00*		*(Kota Kupang, Kupang, Sumba Barat, Sikka, Lembata, NUSA TENGGARA TIMUR)*	*DANA UMUM*				*1,00*		
	1.06.1-6.0-0.0-0.01.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						100.000.000,00		DANA UMUM	Tidak	Tidak			-	Dinas Sosial
			Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (%)				*100*		*(Kota Kupang, NUSA TENGGARA TIMUR)*	*DANA UMUM*				*100*		
		Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						-							-	Dinas Sosial
		Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						-							-	Dinas Sosial
		Pengadaan Alat Besar						-							-	Dinas Sosial
		Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor						-							-	Dinas Sosial
		Pengadaan Mebel						50.000.000,00		DANA UMUM					-	Dinas Sosial
			Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (Tahun)				*1,00*		*(Kota Kupang, Kupang, Sumba Barat, Sikka, Lembata, NUSA TENGGARA TIMUR)*	*DANA UMUM*				*1,00*		
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya						50.000.000,00		DANA UMUM					-	Dinas Sosial
			Terlaksananya Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya (Tahun)				*1*		*(Kota Kupang, Kupang, Sumba Barat, Sikka, Lembata, NUSA TENGGARA TIMUR)*	*DANA UMUM*				*1*		
		Pengadaan Aset Tetap Lainnya						-							-	Dinas Sosial
		Pengadaan Aset Tak Berwujud						-							-	Dinas Sosial
		Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						-							-	Dinas Sosial
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						-							-	Dinas Sosial
	1.06.1-6.0-0.0-0.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						1.887.000.000,00		DANA UMUM	Tidak	Tidak			-	Dinas Sosial
			Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%)				*100*		*(Kota Kupang, NUSA TENGGARA TIMUR)*	*DANA UMUM*				*100*		
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat						15.000.000,00		DANA UMUM					-	Dinas Sosial

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode RPJMD	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2020	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RKPD TAHUN 2021	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2023		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2022	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Tahun)				*1*		*(Kota Kupang, Kupang, Sumba Barat, Sikka, Lembata, NUSA TENGGARA TIMUR)*	*DANA UMUM*				*1*		
			Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Paket)				*1*		*(Kota Kupang, NUSA TENGGARA TIMUR)*	*DANA UMUM*				*1*		
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						572.000.000,00		DANA UMUM					-	Dinas Sosial
			Terlaksanannya Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik (Tahun)				*1*		*(Kota Kupang, Kupang, Sumba Barat, Sikka, Lembata, NUSA TENGGARA TIMUR)*	*DANA UMUM*				*1*		
			Terlaksananya Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik (Paket)				*1*		*(Kota Kupang, NUSA TENGGARA TIMUR)*	*DANA UMUM*				*1*		
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						1.300.000.000,00		DANA UMUM					-	Dinas Sosial
			Terlaksananya Jasa Pelayanan Umum Kantor (Tahun)				*1*		*(Kota Kupang, Kupang, Sumba Barat, Sikka, Lembata, NUSA TENGGARA TIMUR)*	*DANA UMUM*				*1*		
			Terlaksanannya Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (Paket)				*1*		*(Kota Kupang, NUSA TENGGARA TIMUR)*	*DANA UMUM*				*1*		
	1.06.1-6.0-0.0-0.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						825.000.000,00		DANA UMUM	Tidak	Tidak			-	Dinas Sosial
			Terlaksananya (%)				*100*		*(Kota Kupang, NUSA TENGGARA TIMUR)*	*DANA UMUM*				*100*		
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						250.000.000,00		DANA UMUM					-	Dinas Sosial
			Terlaksananya Jasa Pemeliharaan Kendaraan Dinas atau Lapangan (Tahun)				*1*		*(Kota Kupang, Kab Kupang, Sumba Barat, Sikka, Lembata, NUSA TENGGARA TIMUR)*	*DANA UMUM*				*1*		
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						-							-	Dinas Sosial
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya						575.000.000,00		DANA UMUM					-	Dinas Sosial
			Terlaksananya Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya (Tahun)				*1*		*(Kec Maulafa, KOTA KUPANG)*	*DANA UMUM*				*1*		
2.	**1.06.1-6.0-0.0-0.01.02**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL**						**3.957.151.114,00**			**Ya**	**Ya**			**0,00**	**Dinas Sosial**
			Peningkatan Cakupan PMKS (Target Total PSKS=110 Unit) (%)				***100***			***DANA UMUM***						
	1.06.1-6.0-0.0-0.01.02.1.01	Penerbitan Izin Pengumpulan Sumbangan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi						25.000.000,00			Tidak	Tidak			-	Dinas Sosial
			Terlaksananaya Penerbitan Izin Pengumpulan Sumbangan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi (%)				*100*		*(22 Kab/Kota, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*100*		

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode RPJMD	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2020	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RKPD TAHUN 2021	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2023		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2022	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang						25.000.000,00							-	Dinas Sosial
			terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang (paket)				*1*		*(DKI Jakarta, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*1*		
			terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang (paket)				*1*		*(22 kab/kota, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*1*		
	1.06.1-6.0-0.0-0.01.02.1.02	Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Provinsi						3.932.151.114,00		Dana Perimbangan	Tidak	Tidak			-	Dinas Sosial
			Terlaksananaya Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Provinsi (%)				*100*		*(22 Kab/Kota, NUSA TENGGARA TIMUR)*	*Dana Perimbangan*				*100*		
		Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Provinsi						2.802.151.114,00		Dana Perimbangan					-	Dinas Sosial
			Terlaksananya Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Provinsi (paket)				*1*		*(22 kab/kota, NUSA TENGGARA TIMUR)*	*Dana Perimbangan*				*1*		
		Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Provinsi						70.000.000,00		Dana Perimbangan					-	Dinas Sosial
			Terlaksananya Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Provinsi (paket)				*1*		*(22 kab/kota, NUSA TENGGARA TIMUR)*	*Dana Perimbangan*				*1*		
		Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Provinsi						150.000.000,00		Dana Perimbangan					-	Dinas Sosial
			Terlaksananya Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Provinsi (paket)				*1*		*(22 kab/kota, NUSA TENGGARA TIMUR)*	*Dana Perimbangan*				*1*		
		Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Provinsi						910.000.000,00		Dana Perimbangan					-	Dinas Sosial
			Terlaksananya Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Provinsi (paket)				*1*		*(22 kab/kota, NUSA TENGGARA TIMUR)*	*Dana Perimbangan*				*1*		
3.	**1.06.1-6.0-0.0-0.01.03**	**PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN**						**255.526.847,00**			**Ya**	**Ya**			**0,00**	**Dinas Sosial**
			Meningkatnya penanganan warga negara pekerja migran korban tindak kekerasan (Jumlah Warga Negara Migran Yang Ditangani)				***100***			***Dana Perimbangan***						
	1.06.1-6.0-0.0-0.01.03.1.01	Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk dipulangkan Ke Daerah Kabupaten/Kota Asal						255.526.847,00			Tidak	Tidak			-	Dinas Sosial

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode RPJMD	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2020	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RKPD TAHUN 2021	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2023		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2022	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Terlaksananya Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk dipulangkan Ke Daerah Kabupaten/Kota Asal (%)				*100*		*(22 Kab/Kota, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*100*		
		Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk dipulangkan Ke Daerah Kabupaten/Kota Asal						255.526.847,00							-	Dinas Sosial
			terlaksananya Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk dipulangkan Ke Daerah Kabupaten/Kota Asal (paket)				*1*		*(22 kab/kota, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*1*		
4.	**1.06.1-6.0-0.0-0.01.04**	**PROGRAM REHABILITASI SOSIAL**						**10.867.248.031,00**			**Ya**	**Ya**			**0,00**	**Dinas Sosial**
			Meningkatnya pencapaian SPM bidang sosia (%)				***100***									
	1.06.1-6.0-0.0-0.01.04.1.01	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam Panti						2.165.541.132,00		Dana Perimbangan	Tidak	Tidak			-	Dinas Sosial
			Terlaksananya Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam Panti (%)				*100*		*(22 Kab/kota, NUSA TENGGARA TIMUR)*	*Dana Perimbangan*				*100*		
		Penyediaan Permakanan						587.922.000,00		Dana Perimbangan					-	Dinas Sosial
			tersedianya Permakanan (paket)				*1*		*(kota kupang, NUSA TENGGARA TIMUR)*	*Dana Perimbangan*				*1*		
		Penyediaan Sandang						209.580.900,00							-	Dinas Sosial
			tersedianya sandang (paket)				*1*		*(kota kupang, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*1*		
		Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses						2.013.800,00							-	Dinas Sosial
			tersedianya Asrama yang Mudah Diakses (paket)				*1*		*(22 kab/kota, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*1*		
		Penyediaan Alat Bantu						517.658.600,00		Dana Perimbangan					-	Dinas Sosial
			tersedianya Alat Bantu (paket)				*1*		*(22 kab/kota, NUSA TENGGARA TIMUR)*	*Dana Perimbangan*				*1*		
		Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Dalam Panti						52.830.512,00							-	Dinas Sosial
			tersedianya Perbekalan Kesehatan di Dalam Panti (paket)				*1*		*(22 kab/kota, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*1*		
		Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial						412.715.320,00							-	Dinas Sosial
			terlaksananya Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial (paket)				*1*		*(22 kab/kota, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*1*		
		Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari						100.000.000,00							-	Dinas Sosial
			terlaksananya Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari (paket)				*1*		*(22 kab/kota, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*1*		
		Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar						72.300.000,00							-	Dinas Sosial
			terlaksananya Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar (paket)				*1*		*(22 kab/kota, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*1*		

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode RPJMD	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2020	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RKPD TAHUN 2021	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2023		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2022	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga						60.157.000,00		Dana Perimbangan					-	Dinas Sosial
			terlaksananya Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga (paket)				*1*		*(22 kab/kota, NUSA TENGGARA TIMUR)*	*Dana Perimbangan*				*1*		
		Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga						50.363.000,00							-	Dinas Sosial
			terlaksananya Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga (paket)				*1*		*(22 kab/kota, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*1*		
		Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Bidang Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar						100.000.000,00		Dana Perimbangan					-	Dinas Sosial
			terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Bidang Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar (paket)				*1*		*(22 kab/kota, NUSA TENGGARA TIMUR)*	*Dana Perimbangan*				*1*		
	1.06.1-6.0-0.0-0.01.04.1.02	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Dalam Panti						5.046.052.369,00		Dana Perimbangan	Tidak	Tidak			-	Dinas Sosial
			Terlaksananya Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Dalam Panti (%)				*100*		*(22 kab/Kota, NUSA TENGGARA TIMUR)*	*Dana Perimbangan*				*100*		
		Pengasuhan						705.600.000,00							-	Dinas Sosial
			terlaksananya Pengasuhan (paket)				*1*		*(22 kab/kota, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*1*		
		Penyediaan Makanan						2.018.838.886,00		Dana Perimbangan					-	Dinas Sosial
			tersedianya Makanan (paket)				*1*		*(22 kab/kota, NUSA TENGGARA TIMUR)*	*Dana Perimbangan*				*1*		
		Penyediaan Sandang						844.604.090,00							-	Dinas Sosial
			tersedianya Sandang (paket)				*1*		*(22 kab/kota, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*1*		
		Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Dalam Panti						65.518.670,00							-	Dinas Sosial
			tersedianya Perbekalan Kesehatan di Dalam Panti (paket)				*1*		*(22 kab kota, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*1*		
		Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial						262.074.600,00							-	Dinas Sosial
			terlaksananya Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial (paket)				*1*		*(22 kab/kota, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*1*		
		Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-hari						179.985.483,00							-	Dinas Sosial
			terlaksananya Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-hari (paket)				*1*		*(22 kab/kota, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*1*		
		Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar						563.012.640,00							-	Dinas Sosial
			Terlaksananya Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar (paket)				*1*		*(22 kab kota, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*1*		
		Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga						20.410.000,00							-	Dinas Sosial
			terlaksananya Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga (paket)				*1*		*(22 kab/kota, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*1*		
		Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga						256.008.000,00							-	Dinas Sosial

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode RPJMD	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2020	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RKPD TAHUN 2021	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2023		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2022	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			terlaksananya Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga (paket)				*1*		*(22 kab/kota, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*1*		
		Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti						130.000.000,00		Dana Perimbangan					-	Dinas Sosial
			Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti (paket)				*1*		*(22 kab/kota, NUSA TENGGARA TIMUR)*	*Dana Perimbangan*				*1*		
	1.06.1-6.0-0.0-0.01.04.1.03	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Dalam Panti						2.407.535.590,00			Tidak	Tidak			-	Dinas Sosial
			Terlaksananya Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Dalam Panti (%)				*100*		*(22 Kab/Kota, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*100*		
		Penyediaan Permakanan						1.335.160.000,00							-	Dinas Sosial
			Penyediaan Permakanan (paket)				*1*		*(NUSA TENGGARA TIMUR)*					*1*		
		Penyediaan Sandang						404.409.590,00							-	Dinas Sosial
			Penyediaan Sandang (paket)				*1*		*(NUSA TENGGARA TIMUR)*					*1*		
		Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses						45.000.000,00							-	Dinas Sosial
			Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses (paket)				*1*		*(NUSA TENGGARA TIMUR)*					*1*		
		Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Dalam Panti Sosial						104.526.000,00							-	Dinas Sosial
			Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Dalam Panti Sosial (paket)				*1*		*(NUSA TENGGARA TIMUR)*					*1*		
		Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial						69.000.000,00							-	Dinas Sosial
			Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial (paket)				*1*		*(NUSA TENGGARA TIMUR)*					*1*		
		Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari						188.400.000,00							-	Dinas Sosial
			Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari (paket)				*1*		*(NUSA TENGGARA TIMUR)*					*1*		
		Akses Ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar						72.042.000,00							-	Dinas Sosial
			Akses Ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar (paket)				*1*		*(NUSA TENGGARA TIMUR)*					*1*		
		Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga						60.000.000,00							-	Dinas Sosial
			Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga (paket)				*1*		*(NUSA TENGGARA TIMUR)*					*1*		
		Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga						11.498.000,00							-	Dinas Sosial
			Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga (paket)				*1*		*(NUSA TENGGARA TIMUR)*					*1*		
		Pemulasaraan						97.500.000,00							-	Dinas Sosial

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode RPJMD	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2020	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RKPD TAHUN 2021	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2023		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2022	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Pemulasaraan (paket)				*1*		*(NUSA TENGGARA TIMUR)*					*1*		
		Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis Terlantar di dalam Panti						20.000.000,00							-	Dinas Sosial
			Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis Terlantar di dalam Panti (paket)				*1*		*(NUSA TENGGARA TIMUR)*					*1*		
	1.06.1-6.0-0.0-0.01.04.1.05	Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA di Dalam Panti						1.248.118.940,00			Tidak	Tidak			-	Dinas Sosial
		Penyediaan Permakanan						472.137.200,00							-	Dinas Sosial
			Penyediaan Permakanan (paket)				*1*		*(NUSA TENGGARA TIMUR)*					*1*		
		Penyediaan Sandang						178.570.850,00							-	Dinas Sosial
			Penyediaan Sandang (paket)				*1*		*(NUSA TENGGARA TIMUR)*					*1*		
		Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Dalam Panti						37.597.820,00							-	Dinas Sosial
			Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Dalam Panti (paket)				*1*		*(NUSA TENGGARA TIMUR)*					*1*		
		Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial						340.203.070,00							-	Dinas Sosial
			Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial (paket)				*1*		*(NUSA TENGGARA TIMUR)*					*1*		
		Akses Kelayanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar						50.000.000,00							-	Dinas Sosial
			Akses Kelayanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar (paket)				*1*		*(NUSA TENGGARA TIMUR)*					*1*		
		Pemulangan ke Daerah Asal						169.610.000,00							-	Dinas Sosial
			Pemulangan ke Daerah Asal (paket)				*1*		*(NUSA TENGGARA TIMUR)*					*1*		
5.	**1.06.1-6.0-0.0-0.01.05**	**PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL**						**5.144.706.409,00**			**Ya**	**Ya**			**0,00**	**Dinas Sosial**
			Peningkatan Cakupan Jaminan Sosial bagi PMKS (%)				***100***									
	1.06.1-6.0-0.0-0.01.05.1.01	Pengangkatan Anak antar WNI dan Pengangkatan Anak oleh Orang Tua Tunggal						55.000.000,00			Tidak	Tidak			-	Dinas Sosial
			Terlaksananya Pengangkatan Anak antar WNI dan Pengangkatan Anak oleh Orang Tua Tunggal (Paket)				*100*		*(22 Kab/Kota, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*100*		
		Pengangkatan Anak antar WNI						30.000.000,00							-	Dinas Sosial
			terlaksananya Pengangkatan Anak antar WNI (Paket)				*1*		*(22 kabupaten kota, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*1*		
			Pengangkatan Anak antar WNI (paket)				*1*		*(NUSA TENGGARA TIMUR)*					*1*		
		Pengangkatan Anak oleh Orang Tua Tunggal						25.000.000,00							-	Dinas Sosial

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode RPJMD	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2020	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RKPD TAHUN 2021	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2023		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2022	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Pengangkatan Anak oleh Orang Tua Tunggal (paket)				*1*		*(NUSA TENGGARA TIMUR)*					*1*		
	1.06.1-6.0-0.0-0.01.05.1.02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Provinsi						5.089.706.409,00		Dana Perimbangan	Tidak	Tidak			-	Dinas Sosial
			Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Provinsi (%)				*100*		*(22 kab/kota, NUSA TENGGARA TIMUR)*	*Dana Perimbangan*				*100*		
		Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga						3.460.706.409,00		Dana Perimbangan					-	Dinas Sosial
			terlaksananya Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga (paket)				*1*		*(NUSA TENGGARA TIMUR)*	*Dana Perimbangan*				*1*		
		Pengelolaan Fakir Miskin Lintas Daerah Kabupaten/Kota						259.000.000,00							-	Dinas Sosial
			terlaksananya Pengelolaan Fakir Miskin Lintas Daerah Kabupaten/Kota (paket)				*1*		*(NUSA TENGGARA TIMUR)*					*1*		
		Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat						1.370.000.000,00		Dana Perimbangan					-	Dinas Sosial
			Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat (paket)				*1*		*(NUSA TENGGARA TIMUR)*	*Dana Perimbangan*				*1*		
6.	**1.06.1-6.0-0.0-0.01.06**	**PROGRAM PENANGANAN BENCANA**						**602.582.265,00**			**Ya**	**Ya**			**0,00**	**Dinas Sosial**
			Peningkatan Cakupan Penanganan Korban Bencana Skala Provinsi (%)				***100***			***Dana Perimbangan***						
	1.06.1-6.0-0.0-0.01.06.1.01	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Provinsi						602.582.265,00			Tidak	Tidak			-	Dinas Sosial
			Terlaksananya Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Provinsi (%)				*100*		*(22 Kab/Kota, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*100*		
		Penyediaan Permakanan						300.000.000,00							-	Dinas Sosial
			terlaksananya Penyediaan Permakanan (Paket)				*1*		*(22 Kabupaten/kota, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*1*		
		Penyediaan Sandang						150.000.000,00							-	Dinas Sosial
			Terlaksananya Penyediaan Sandang (Paket)				*1*		*(22 kabupaten /kota, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*1*		
		Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi						52.582.265,00							-	Dinas Sosial
			terlaksananya Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi (Paket)				*1*		*(22 Kabupaten/kota, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*1*		
		Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan						50.000.000,00							-	Dinas Sosial
			terlaksananya Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan (Paket)				*1*		*(22 kabupaten/kota, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*1*		
		Pelayanan Dukungan Psikososial						50.000.000,00							-	Dinas Sosial
			Terlaksananya Pelayanan Dukungan Psikososial (Paket)				*1*		*(22 Kabupaten/kota, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*1*		
7.	**1.06.1-6.0-0.0-0.01.07**	**PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN**						**75.974.408,00**			**Ya**	**Ya**			**0,00**	**Dinas Sosial**

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode RPJMD	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2020	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RKPD TAHUN 2021	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2023		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2022	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Meningkatnya pengelolaan Taman Makam Pahlawan kewenangan provinsi (%)				***100***									
	1.06.1-6.0-0.0-0.01.07.1.01	Pengelolaan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi						75.974.408,00			Tidak	Tidak			-	Dinas Sosial
			terlaksananya Pengelolaan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi (%)				*100*		*(22 kab/kota NUSA TENGGARA TIMUR)*					*100*		
		Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi						21.974.408,00							-	Dinas Sosial
			Terlaksananya Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi (Paket)				*1*		*(22 Kabupaten/kota, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*1*		
		Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi						54.000.000,00							-	Dinas Sosial
			Terlaksananya Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi (Paket)				*1*		*(22 kabupaten/Kota, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*1*		
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**723.973.441.604,00**							**0,00**	
	2.07	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA**						**17.645.520.000,00**							**0,00**	
1.	**2.07.2-17.3-32.2-7.16.03**	**PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA**						**15.460.520.000,00**			**Ya**	**Ya**			**0,00**	**Dinas Koperasi,Tenaga kerja dan**
			Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran yang berkualitas (%)				***100***									
			eningkatnya sarana dan prasarana (%)				***100***									
			Tercapainya penyusunan capaian kinerja ikhtisar realisasi kinerja dan keuangan (%)				***100***									
	2.07.2-17.3-32.2-7.16.03.1.01	Pelaksanaan Latihan Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi						15.460.520.000,00			Tidak	Tidak			-	Dinas Koperasi,Tenaga kerja dan Transmigrasi
		Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi						15.460.520.000,00							-	Dinas Koperasi,Tenaga kerja dan Transmigrasi
			Terlaksananya Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi (Paket)				*1*		*(22 Kabupaten/Kota, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*1*		
2.	**2.07.2-17.3-32.2-7.16.04**	**PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA**						**975.000.000,00**			**Ya**	**Ya**			**0,00**	**Dinas Koperasi,Tenaga kerja dan**
			Persentasi besaran pencari kerja terdaftar yang ditempatkan (%)				***55***									

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode RPJMD	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2020	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RKPD TAHUN 2021	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2023		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2022	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			ersentasi meningkatnya PMI prosedural (%)				***85***									
	2.07.2-17.3-32.2-7.16.04.1.01	Pelayanan antar Kerja Lintas Daerah Kabupaten/Kota						160.000.000,00			Tidak	Tidak			-	Dinas Koperasi,Tenaga kerja dan Transmigrasi
		Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja						180.000.000,00							-	Dinas Koperasi,Tenaga kerja dan Transmigrasi
			Terlaksananya Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja (Paket)				*1*		*(22 Kabupaten/Kota, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*1*		
		Perluasan Kesempatan Kerja						-							-	Dinas Koperasi,Tenaga kerja dan Transmigrasi
			Terlaksnaanya Perluasan Kesempatan Kerja (Paket)				*1*		*(22 Kabupaten/Kota, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*1*		
	2.07.2-17.3-32.2-7.16.04.1.03	Pengelolaan Informasi Pasar Kerja						495.000.000,00			Tidak	Tidak			-	Dinas Koperasi,Tenaga kerja dan Transmigrasi
		Pemeliharaan dan Operasional Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online						170.000.000,00							-	Dinas Koperasi,Tenaga kerja dan Transmigrasi
			Terlaksananya Pemeliharaan dan Operasional Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online (Paket)				*1*		*(22 Kabupaten/Kota, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*1*		
		Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online						175.000.000,00							-	Dinas Koperasi,Tenaga kerja dan Transmigrasi
			Terlaksananya Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online (Paket)				*1*		*(22 Kabupaten/Kota, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*1*		
		Job Fair/Bursa Kerja						150.000.000,00							-	Dinas Koperasi,Tenaga kerja dan Transmigrasi
			Terlaksananya Job Fair/Bursa Kerja (Paket)				*1*		*(22 Kabupaten/Kota, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*1*		
	2.07.2-17.3-32.2-7.16.04.1.04	Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Provinsi						300.000.000,00			Tidak	Tidak			-	Dinas Koperasi,Tenaga kerja dan Transmigrasi
		Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)						300.000.000,00							-	Dinas Koperasi,Tenaga kerja dan Transmigrasi
			Terlaksananya Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)				*1*		*(22 Kabupaten/Kota, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*1*		
3.	**2.07.2-17.3-32.2-7.16.05**	**PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL**						**1.000.000.000,00**			**Ya**	**Ya**			**0,00**	**Dinas Koperasi,Tenaga kerja dan**

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode RPJMD	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2020	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RKPD TAHUN 2021	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2023		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2022	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Persentase jumlah perusahaan yang melaksanakan Upah Minimum Provinsi (%)				***90***									
			Persentase kasus ketenagakerjaan yang diselesaikan (%)				***85***									
	2.07.2-17.3-32.2-7.16.05.1.01	Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk yang Mempunyai Wilayah Kerja lebih dari 1 (Satu) Kabupaten/Kota						505.000.000,00			Tidak	Tidak				Dinas Koperasi,Tenaga kerja dan Transmigrasi
		Pengesahan Peraturan Perusahaan yang terkait dengan Hubungan Industrial						105.000.000,00								Dinas Koperasi,Tenaga kerja dan Transmigrasi
			Terlaksananya Pengesahan Peraturan Perusahaan yang terkait dengan Hubungan Industrial (Paket)				*1*		*(22 Kabupaten/Kota, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*1*		
		Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama yang terkait dengan Hubungan Industrial						75.000.000,00								Dinas Koperasi,Tenaga kerja dan Transmigrasi
			Terlaksananya Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama yang terkait dengan Hubungan Industrial (Paket)				*1*		*(22 Kabupaten/Kota, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*1*		
		Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja						325.000.000,00								Dinas Koperasi,Tenaga kerja dan Transmigrasi
			Terlaksannya Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Paket)				*1*		*(22 Kabupaten/kota, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*1*		
	2.07.2-17.3-32.2-7.16.05.1.02	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Provinsi						295.000.000,00			Tidak	Tidak				Dinas Koperasi,Tenaga kerja dan Transmigrasi
		Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Provinsi						165.000.000,00								Dinas Koperasi,Tenaga kerja dan Transmigrasi
			Terlaksananya Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Provinsi (Paket)				*1*		*(22 Kabupaten/Kota, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*1*		
		Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi						80.000.000,00								Dinas Koperasi,Tenaga kerja dan Transmigrasi

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode RPJMD	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2020	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RKPD TAHUN 2021	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2023		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2022	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Terlaksananya Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi (Paket)				*1*		*(22 Kabupaten/Kota, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*1*		
		Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Provinsi						50.000.000,00								- Dinas Koperasi,Tenaga kerja dan Transmigrasi
			Terlaksananya Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Provinsi (Paket)				*1*		*(22 Kabupaten/Kota, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*1*		
	2.07.2-17.3-32.2-7.16.05.1.03	Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP), Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP), Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK), dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK)						200.000.000,00			Tidak	Tidak				- Dinas Koperasi,Tenaga kerja dan Transmigrasi
		Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP)						200.000.000,00								- Dinas Koperasi,Tenaga kerja dan Transmigrasi
			Terlaksananya Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) (Paket)				*1*		*(22 Kabupaten/Kota, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*1*		
4.	**2.07.2-17.3-32.2-7.16.06**	**PROGRAM PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN**						**210.000.000,00**			**Ya**	**Ya**			**0,00**	**Dinas Koperasi,Tenaga kerja dan Transmigrasi**
			Persentase Jumlah Perusahaan yang melaksanakan Norma Kerja di Provinsi NTT (%)				***70***									
	2.07.2-17.3-32.2-7.16.06.1.01	Penyelenggaraan Pengawasan Ketenagakerjaan						210.000.000,00			Tidak	Tidak				- Dinas Koperasi,Tenaga kerja dan Transmigrasi
		Pengawasan Pelaksanaan Norma Kerja di Perusahaan						170.000.000,00								- Dinas Koperasi,Tenaga kerja dan Transmigrasi
			Terlaksananya Pengawasan Pelaksanaan Norma Kerja di Perusahaan (Paket)				*1*		*(22 Kabupaten/Kota, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*1*		
		Penegakan Hukum Ketenagakerjaan di Perusahaan						40.000.000,00								- Dinas Koperasi,Tenaga kerja dan Transmigrasi
			Terlaksananya Penegakan Hukum Ketenagakerjaan di Perusahaan (Paket)				*1*		*(22 Kabupaten/Kota, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*1*		
	2.08	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**						**13.736.156.327,00**							**0,00**	
1.	**2.08.2-8.0-0.0-0.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**						**8.024.453.832,00**			**Tidak**	**Tidak**			**0,00**	**Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%)				***100***									

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode RPJMD	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2020	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RKPD TAHUN 2021	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2023		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2022	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Meningkatnya sarana dan prasarana (%)				***100***									
			Tercapainya penyusunan capaian kinerja ikhtisar realisasi kinerja dan keuangan (%)				***100***									
	2.08.2-8.0-0.0-0.01.01.1.01	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						277.000.000,00		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum, DANA UMUM	Tidak	Tidak			-	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
			Terlakananya Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (%)				*100*		*(Kota Kupang, NUSA TENGGARA TIMUR)*	*Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum, DANA UMUM*				*100*		
			Terlaksananya Peningkatan cakupan perlindungan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum yang mendapatkan layanan komprehensif / sesuai standar (Target : 125 ABH)				*100*		*(22 Kab/Kota , NUSA TENGGARA TIMUR)*					*100*		
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						130.000.000,00		DANA UMUM					-	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
			Terlaksananya Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Paket)				*1*		*(Kota Kupang, NUSA TENGGARA TIMUR)*	*DANA UMUM*				*1*		
			Terlaksananya Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Paket)				*1*		*(Kota Kupang, NUSA TENGGARA TIMUR)*	*DANA UMUM*				*1*		
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD						10.000.000,00							-	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
			Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Paket)				*1*		*(Kota Kupang, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*1*		
		Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD						12.000.000,00							-	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
			Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD (Paket)				*1*		*(Kota Kupang, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*1*		
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD						100.000.000,00		DANA UMUM					-	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
			Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Paket)				*1*		*(Kota Kupang, NUSA TENGGARA TIMUR)*	*DANA UMUM*				*1*		
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						25.000.000,00		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum					-	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
			Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Paket)				*1*		*(Kota Kupang, NUSA TENGGARA TIMUR)*	*Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum*				*1*		
	2.08.2-8.0-0.0-0.01.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						5.957.503.832,00		DANA UMUM	Tidak	Tidak			-	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
			Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah (%)				*100*		*(Kota Kupang, NUSA TENGGARA TIMUR)*	*DANA UMUM*				*100*		

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode RPJMD	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2020	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RKPD TAHUN 2021	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2023		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2022	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah (%)				*100*		*(22 Kab/kota, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*100*		
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						5.745.003.832,00								- Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
			Terlaksananya Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN (Paket)				*1*		*(Kota Kupang, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*1*		
		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN						135.000.000,00								- Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
			Terlaksananya Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Paket)				*1*		*(Kota Kupang, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*1*		
		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD						27.500.000,00		DANA UMUM						- Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
			Terlaksananya Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Paket)				*1*		*(Kota Kupang, NUSA TENGGARA TIMUR)*	*DANA UMUM*				*1*		
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD						50.000.000,00		DANA UMUM						- Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
			Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Paket)				*1*		*(Kota Kupang)*	*DANA UMUM*				*1*		
	2.08.2-8.0-0.0-0.01.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah						-			Tidak	Tidak				- Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	2.08.2-8.0-0.0-0.01.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						60.000.000,00			Tidak	Tidak				- Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
			Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah (%)				*100*		*(Kota Kuapng , NUSA TENGGARA TIMUR)*					*100*		
		Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian						10.000.000,00								- Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
			Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Paket)				*1*		*(Kota Kupang)*					*1*		
		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi						30.000.000,00								- Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
			Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi (Paket)				*1*		*(Kota Kupang)*					*1*		
		Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan						20.000.000,00								- Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
			Terlaksananya (Paket)				*1*		*(Kota Kupang, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*1*		
	2.08.2-8.0-0.0-0.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						519.950.000,00		DANA UMUM	Tidak	Tidak				- Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
			Terelaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah (%)				*100*		*(Kota Kupang, NUSA TENGGARA TIMUR)*	*DANA UMUM*				*100*		
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor						3.000.000,00								- Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode RPJMD	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2020	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RKPD TAHUN 2021	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2023		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2022	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Terlaksananya Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor (Paket)				*1*		*(Kota Kupang)*					*1*		
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						100.000.000,00		DANA UMUM						- Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
			Terlaksananya Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan (Paket)				*1*		*(Kota Kupang)*	*DANA UMUM*				*1*		
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan						3.250.000,00								- Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
			Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan (Paket)				*1*		*(Kota Kupang)*					*1*		
		Penyediaan Bahan/Material						100.000.000,00		DANA UMUM						- Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
			Tersedianya Bahan/Material (Paket)				*1*		*(Kota Kupang)*	*DANA UMUM*				*1*		
		Fasilitasi Kunjungan Tamu						43.500.000,00		DANA UMUM						- Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
			Tersedianya Fasilitasi Kunjungan Tamu (Paket)				*1*		*(Kota Kupang)*	*DANA UMUM*				*1*		
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						70.000.000,00								- Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
			Tersedianya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Paket)				*1*		*(Kota Kupang)*					*1*		
		Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD						60.000.000,00								- Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
			Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Paket)				*1*		*(Kota Kupang)*					*1*		
		Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD						140.200.000,00		DANA UMUM						- Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
			Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Paket)				*1*		*(Kota Kupang)*	*DANA UMUM*				*1*		
	2.08.2-8.0-0.0-0.01.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						600.000.000,00		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum, DANA UMUM	Tidak	Tidak				- Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
			Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (%)				*100*		*(Kota Kupang, NUSA TENGGARA TIMUR)*	*Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum, DANA UMUM*				*100*		
		Pengadaan Mebel						400.000.000,00		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum						- Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
			Terlaksananya pengadaan mebel (paket)				*1*		*(22 kab kota, NUSA TENGGARA TIMUR)*	*Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum*				*1*		
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya						200.000.000,00		DANA UMUM						- Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
			Terlaksananya Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya (Paket)				*1*		*(Kota Kupang, NUSA TENGGARA TIMUR)*	*DANA UMUM*				*1*		

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode RPJMD	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2020	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RKPD TAHUN 2021	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2023		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2022	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.08.2-8.0-0.0-0.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						455.000.000,00		DANA UMUM	Tidak	Tidak			-	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
			Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%)				*100*		*(Kota Kupang, NUSA TENGGARA TIMUR)*	*DANA UMUM*				*100*		
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat						5.000.000,00							-	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
			Tersedianya Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Paket)				*1*		*(Kota Kupang)*					*1*		
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						200.000.000,00		DANA UMUM					-	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
			Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik (Paket)				*1*		*(Kota Kupang, NUSA TENGGARA TIMUR)*	*DANA UMUM*				*1*		
		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor						50.000.000,00							-	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
			Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor (Paket)				*1*		*(Kota Kupang, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*1*		
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						200.000.000,00		DANA UMUM					-	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
			Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor (Paket)				*1*		*(Kota Kupang, NUSA TENGGARA TIMUR)*	*DANA UMUM*				*1*		
	2.08.2-8.0-0.0-0.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						155.000.000,00			Tidak	Tidak			-	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
			Trlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%)				*100*		*(Kota Kupang, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*100*		
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						55.000.000,00							-	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
			Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan (Paket)				*1*		*(Kota Kupang, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*1*		
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya						100.000.000,00							-	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
			Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya (Paket)				*1*		*(Kota Kupang, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*1*		
2.	**2.08.2-8.0-0.0-0.01.02**	**PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN**						**1.460.843.200,00**			**Ya**	**Ya**			**0,00**	**Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**
			Cakupan Kabupaten dan Kota yang melaksanakan Pengarusutamaan Gender (PUG) (22 Kabupaten/Kota)				***100***									

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode RPJMD	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2020	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RKPD TAHUN 2021	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2023		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2022	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Cakupan Perangkat Daerah yang melaksanakan Pengarusutamaan Gender (PUG) (53 Unit) *(%)*				***100***									
	2.08.2-8.0-0.0-0.01.02.1.01	Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Provinsi						565.545.700,00		Dana Perimbangan , DANA UMUM	Tidak	Tidak			-	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
			Terlaksananya Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Provinsi (%)				*100*		*(22 Kab/kota, NUSA TENGGARA TIMUR)*	*Dana Perimbangan , DANA UMUM*				*100*		
		Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG Kewenangan Provinsi						310.000.000,00		Dana Perimbangan					-	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
			Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG Kewenangan Provinsi (Paket)				*1*		*(22 Kabupaten/Kota, NUSA TENGGARA TIMUR)*	*Dana Perimbangan*				*1*		
		Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG Kewenangan Provinsi						255.545.700,00		Dana Perimbangan , DANA UMUM					-	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
			Terlaksananya Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG Kewenangan Provinsi (Paket)				*1*		*(22 Kabupaten/Kota, NUSA TENGGARA TIMUR)*	*Dana Perimbangan , DANA UMUM*				*1*		
	2.08.2-8.0-0.0-0.01.02.1.02	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Provinsi						502.000.000,00		DANA UMUM	Tidak	Tidak			-	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
			Terlaksananya Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Provinsi (%)				*100*		*(22 Kab/Kota, NUSA TENGGARA TIMUR)*	*DANA UMUM*				*100*		
		Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Provinsi						110.000.000,00		DANA UMUM					-	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
			Terlaksananya Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Provinsi (Paket)				*1*		*(22 Kabupaten/Kota, NUSA TENGGARA TIMUR)*	*DANA UMUM*				*1*		
		Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dalam Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Provinsi						392.000.000,00		DANA UMUM					-	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
			Terlaksananya Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dalam Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Provinsi (Paket)				*1*		*(22 Kabupaten/Kota, NUSA TENGGARA TIMUR)*	*DANA UMUM*				*1*		
	2.08.2-8.0-0.0-0.01.02.1.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi						393.297.500,00		DANA UMUM	Tidak	Tidak			-	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
			Terlaksananya Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi (%)				*100*		*(22 KAb/Kota, NUSA TENGGARA TIMUR)*	*DANA UMUM*				*100*		

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode RPJMD	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2020	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RKPD TAHUN 2021	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2023		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2022	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi						150.000.000,00		DANA UMUM					-	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
			Terlaksananya Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi (Paket)				*1*		*(22 Kabupaten/Kota, NUSA TENGGARA TIMUR)*	*DANA UMUM*				*1*		
		Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi						175.000.000,00		DANA UMUM					-	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
			Terlaksananya Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi (Paket)				*1*		*(22 Kabupaten/Kota, NUSA TENGGARA TIMUR)*	*DANA UMUM*				*1*		
		Pengembangan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi						68.297.500,00		DANA UMUM					-	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
			Terlaksananya Pengembangan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi (Paket)				*1*		*(22 Kabupaten/Kota, NUSA TENGGARA TIMUR)*	*DANA UMUM*				*1*		
3.	**2.08.2-8.0-0.0-0.01.03**	**PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN**						**1.483.918.750,00**			**Ya**	**Ya**			**0,00**	**Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**
			Peningkatan Cakupan penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan (Total 290 Kasus) (%)				***100***			***DANA UMUM***						
			Peningkatan Cakupan penanganan kasus kekerasan terhadap anak (295 Kasus) (%)				***100***			***DANA UMUM***						
	2.08.2-8.0-0.0-0.01.03.1.01	Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota						301.686.280,00		Dana Perimbangan , Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Tidak	Tidak			-	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
			Terlaksananya Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota (%)				*100*		*(22 Kab/kota, NUSA TENGGARA TIMUR)*	*Dana Perimbangan , Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum*				*100*		
		Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Kewenangan Provinsi						281.686.280,00		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum					-	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
			Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Kewenangan Provinsi (Paket)				*1*		*(22 Kabupaten/Kota, NUSA TENGGARA TIMUR)*	*Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum*				*1*		
		Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi						20.000.000,00		Dana Perimbangan					-	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
			Terlaksananya Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi (Paket)				*1*		*(22 Kabupaten/Kota, NUSA TENGGARA TIMUR)*	*Dana Perimbangan*				*1*		

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode RPJMD	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2020	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RKPD TAHUN 2021	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2023		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2022	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.08.2-8.0-0.0-0.01.03.1.02	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota						703.922.590,00		DANA UMUM	Tidak	Tidak			-	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
			Terlaksananya Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota (%)				*100*		*(2 KAB/KOTA, NUSA TENGGARA TIMUR)*	*DANA UMUM*				*100*		
		Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota						703.922.590,00		DANA UMUM					-	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
			Terlaksananya Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota (Paket)				*1*		*(22 Kabupaten/Kota, NUSA TENGGARA TIMUR)*	*DANA UMUM*				*1*		
	2.08.2-8.0-0.0-0.01.03.1.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi						478.309.880,00		Dana Perimbangan , DANA UMUM	Tidak	Tidak			-	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
			Terlaksananya Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi (%)				*100*		*(22 kab/Kota, NUSA TENGGARA TIMUR)*	*Dana Perimbangan , DANA UMUM*				*100*		
		Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi						108.309.880,00		DANA UMUM					-	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
			Terlaksananya Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi (Paket)				*1*		*(22 Kabupaten/Kota, NUSA TENGGARA TIMUR)*	*DANA UMUM*				*1*		
		Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota						370.000.000,00		Dana Perimbangan					-	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
			Terlaksananya Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota (Paket)				*1*		*(22 Kabupaten/Kota, NUSA TENGGARA TIMUR)*	*Dana Perimbangan*				*1*		
4.	**2.08.2-8.0-0.0-0.01.04**	**PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA**						**846.000.000,00**			**Ya**	**Ya**			**0,00**	**Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**
			Peningkatan Cakupan Keluarga yang melaksanakan pola asuh setara gender (0 KK menjadi 750 KK) (%)				***100***			***Dana Perimbangan***						
			Peningkatan lembaga yang memfasilitasi terwujudnya ketahanan keluarga (Target total = 10 Lembaga) (%)				***100***			***Dana Perimbangan***						

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode RPJMD	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2020	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RKPD TAHUN 2021	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2023		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2022	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Peningkatan Cakupan pendampingan Champion Gender dalam pola asuh pemenuhan hak anak untuk pencegahan stunting (Target: 500 Keluarga)				***100***			***Dana Perimbangan***						
	2.08.2-8.0-0.0-0.01.04.1.01	Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Kewenangan Provinsi						532.000.000,00		DANA UMUM	Tidak	Tidak			-	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
			Terlaksananya Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Kewenangan Provinsi				*100*		*(22 kab/Kota, NUSA TENGGARA TIMUR)*	*DANA UMUM*				*100*		
		Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Keluarga untuk Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak Kewenangan Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota						257.000.000,00		DANA UMUM					-	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
			Terlaksananya Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Keluarga untuk Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak Kewenangan Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota				*1*		*(22 Kabupaten/Kota, NUSA TENGGARA TIMUR)*	*DANA UMUM*				*1*		
		Pelaksanaan Komunikasi, Informasi, Edukasi KG dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Provinsi						25.000.000,00		DANA UMUM					-	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
			Terlaksananya Pelaksanaan Komunikasi, Informasi, Edukasi KG dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Provinsi (Paket)				*1*		*(22 Kabupaten/Kota, NUSA TENGGARA TIMUR)*	*DANA UMUM*				*1*		
		Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Provinsi						250.000.000,00		DANA UMUM					-	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
			Terlaksananya Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Provinsi (Paket)				*1*		*(22 Kabupaten/Kota, NUSA TENGGARA TIMUR)*	*DANA UMUM*				*1*		
	2.08.2-8.0-0.0-0.01.04.1.02	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak Kewenangan Provinsi						314.000.000,00		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum, DANA UMUM	Tidak	Tidak			-	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
			Terlaksananya Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak Kewenangan Provinsi				*100*		*(22 kab/kota, NUSA TENGGARA TIMUR)*	*Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum, DANA UMUM*				*100*		
		Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Provinsi						314.000.000,00		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum, DANA UMUM					-	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
			Terlaksananya Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Provinsi (Paket)				*1*		*(22 Kabupaten/Kota, NUSA TENGGARA TIMUR)*	*Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum, DANA UMUM*				*1*		
	2.08.2-8.0-0.0-0.01.04.1.03	Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya Lintas Daerah Kabupaten/Kota						-		DANA UMUM	Tidak	Tidak			-	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode RPJMD	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2020	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RKPD TAHUN 2021	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2023		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2022	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya Lintas Daerah Kabupaten/Kota (%)				*0*		*(22 Kab/Kota, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*0*		
		Pelaksanaan Penyediaan Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota						-		DANA UMUM					-	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
5.	**2.08.2-8.0-0.0-0.01.05**	**PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK**						**537.881.645,00**			**Ya**	**Ya**			**0,00**	**Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**
			Cakupan ketersediaan dan pemanfaatan data gender dan ana (%)				***100***									
	2.08.2-8.0-0.0-0.01.05.1.01	Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Provinsi						537.881.645,00		DANA UMUM	Tidak	Tidak			-	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
			Terlaksananya Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Provinsi (%)				*100*		*(22 Kab/Kota, NUSA TENGGARA TIMUR)*	*DANA UMUM*				*100*		
		Penyediaan Data Gender dan Anak Provinsi						300.000.000,00		DANA UMUM					-	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
			Tersedianya Data Gender dan Anak Provinsi (Paket)				*1*		*(22 Kabupaten/Kota, NUSA TENGGARA TIMUR)*	*DANA UMUM*				*1*		
		Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data Provinsi						237.881.645,00		DANA UMUM					-	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
			Terlaksananya Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data Provinsi (Paket)				*1*		*(22 kabupaten/Kota, NUSA TENGGARA TIMUR)*	*DANA UMUM*				*1*		
6.	**2.08.2-8.0-0.0-0.01.06**	**PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)**						**1.182.880.620,00**			**Ya**	**Ya**			**0,00**	**Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**
			Peningkatan Cakupan Desa Layak Anak (Jumlah Desa yang telah mencapai tahapan Desa layak anak : Target 250 Desa)				***100***			***DANA UMUM***						
	2.08.2-8.0-0.0-0.01.06.1.01	Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi						36.443.120,00			Tidak	Tidak			-	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
			Terlaksananya Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi (%)				*100*		*(22 kab/kota, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*100*		
		Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi						36.443.120,00							-	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode RPJMD	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2020	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RKPD TAHUN 2021	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2023		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2022	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Terlaksananya Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi (Paket)				*1*		*(22 Kabupaten/Kota, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*1*		
	2.08.2-8.0-0.0-0.01.06.1.02	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi						1.146.437.500,00		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum, DANA UMUM	Tidak	Tidak			-	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
			Terlaksananya Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi (Kl)				*100*		*(22 Kab/Kota, NUSA TENGGARA TIMUR)*	*Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum, DANA UMUM*				*100*		
		Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi						635.987.500,00		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum, DANA UMUM					-	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
			Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi (Paket)				*1*		*(22 Kabupaten/Kota, NUSA TENGGARA TIMUR)*	*Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum, DANA UMUM*				*1*		
		Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi						8.442.860,00		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum					-	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
			Terlaksananya Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi (Paket)				*1*		*(22 Kabupaten/Kota, NUSA TENGGARA TIMUR)*	*Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum*				*1*		
		Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota						502.007.140,00		DANA UMUM					-	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
			Terlaksananya Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota (Paket)				*1*		*(22 Kabupaten/Kota, NUSA TENGGARA TIMUR)*	*DANA UMUM*				*1*		
7.	**2.08.2-8.0-0.0-0.01.07**	**PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK**						**200.178.280,00**			**Ya**	**Ya**			**0,00**	**Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**
			Peningkatan cakupan perlindungan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum yang mendapatkan layanan komprehensif / sesuai standar (Target : 125 ABH)				***100***			***DANA UMUM***						
	2.08.2-8.0-0.0-0.01.07.1.01	Pencegahan Kekerasan terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota						200.178.280,00		DANA UMUM	Tidak	Tidak			-	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
			Terlaksananya Pencegahan Kekerasan terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota (Kl)				*100*		*(22Kab/Kota, NUSA TENGGARA TIMUR)*	*DANA UMUM*				*100*		

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode RPJMD	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2020	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RKPD TAHUN 2021	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2023		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2022	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Provinsi						54.000.000,00		DANA UMUM					-	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
			Terlaksananya Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Provinsi (Paket)				*1*		*(22 Kabupaten/Kota, NUSA TENGGARA TIMUR)*	*DANA UMUM*				*1*		
		Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Provinsi						146.178.280,00		DANA UMUM					-	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
			Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Provinsi (Paket)				*1*		*(22 Kabupaten/Kota, NUSA TENGGARA TIMUR)*	*DANA UMUM*				*1*		
	2.09	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN**						**3.204.999.860,00**							**0,00**	
1.	**2.09.3-27.0-0.0-0.01.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN**						**0,00**			**Ya**	**Ya**			**0,00**	**Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan**
			Terlaksananya PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN (%)				***100***			***DANA UMUM***						
	2.09.3-27.0-0.0-0.01.02.1.01	Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan pada Berbagai Sektor Sesuai Kewenangan Daerah Provinsi						-			Tidak	Tidak			-	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
			Terlaksananya Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan pada Berbagai Sektor Sesuai Kewenangan Daerah Provinsi (%)				*100*		*(22 kab/kota, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*100*		
		Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya						-							-	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
			Terlaksananya Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya (Paket)				*1*		*(22 Kabupaten/Kota, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*1*		
2.	**2.09.3-27.0-0.0-0.01.03**	**PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT**						**2.844.999.940,00**			**Ya**	**Ya**			**0,00**	**Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan**
			Prosentase Peningkatan konsumsi pangan perkapita sesuai angka kecukupan gizi di kantong kemiskinan dan Stunting (%)				**2,79**									
	2.09.3-27.0-0.0-0.01.03.1.01	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Provinsi dalam Rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan						549.999.980,00			Tidak	Tidak			-	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
			Terlaksananya Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Provinsi dalam Rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (%)				*100*		*(22 kab/kota, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*100*		
		Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal						300.000.000,00							-	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode RPJMD	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2020	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RKPD TAHUN 2021	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2023		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2022	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Tersedianya Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal (Paket)				*1*		*(22 Kabupaten/Kota, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*1*		
		Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan						249.999.980,00								- Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
			Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan (Paket)				*1*		*(22 Kabupaten/Kota, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*1*		
	2.09.3-27.0-0.0-0.01.03.1.02	Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Provinsi						694.999.960,00		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Tidak	Tidak				- Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
			Terlaksananya Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Provinsi (%)				*100*		*(22 kab/kota, NUSA TENGGARA TIMUR)*	*Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum*				*100*		
		Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi						194.999.960,00								- Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
			Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi (Paket)				*1*		*(22 Kabupaten/Kota, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*1*		
		Pemeliharaan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi						500.000.000,00		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum						- Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
			Terlaksananya Pemeliharaan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi (Paket)				*1*		*(22 Kabupaten/Kota, NUSA TENGGARA TIMUR)*	*Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum*				*1*		
	2.09.3-27.0-0.0-0.01.03.1.04	Promosi Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun Sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi melalui Media Provinsi						1.600.000.000,00		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Tidak	Tidak				- Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
			Terlaksananya Promosi Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun Sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi melalui Media Provinsi (%)				*100*		*(22 kab/kota, NUSA TENGGARA TIMUR)*	*Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum*				*100*		
		Promosi Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal						100.000.000,00								- Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
			Terlaksananya Promosi Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal (P)				*1*		*(22 Kabupaten/Kota, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*1*		
		Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Advokasi, Edukasi, dan Sosialisasi Konsumsi Pangan Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA)						1.500.000.000,00		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum						- Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
			Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Advokasi, Edukasi, dan Sosialisasi Konsumsi Pangan Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA) (Paket)				*1*		*(22 Kabupaten/Kota, NUSA TENGGARA TIMUR)*	*Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum*				*1*		
3.	**2.09.3-27.0-0.0-0.01.04**	**PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN**						**49.999.920,00**			**Ya**	**Ya**			**0,00**	**Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan**
			Persentase Penurunan Jumlah Desa Rawan Pangan (Tahun 2019 = 742 Desa, 2023 = 0 Desa) (%)				***25,07***			***Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum***						
	2.09.3-27.0-0.0-0.01.04.1.01	Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan kewenangan Provinsi						49.999.920,00			Tidak	Tidak				- Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode RPJMD	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2020	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RKPD TAHUN 2021	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2023		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2022	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Terlaksananya Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan kewenangan Provinsi (%)				*100*		*(22 kab/kota, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*100*		
		Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan Provinsi dan Kabupaten/Kota						49.999.920,00							-	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
			Terlaksananya Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan Provinsi dan Kabupaten/Kota (Paket)				*1*		*(22 Kabupaten/Kota, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*1*		
4.	**2.09.3-27.0-0.0-0.01.05**	**PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN**						**310.000.000,00**			**Ya**	**Ya**			**0,00**	**Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan**
			Persentase Peningkatan produsen pangan segar terjamin keamanan pangan (Target 2023=86 Kelompok) (%)				***74,42***									
	2.09.3-27.0-0.0-0.01.05.1.01	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Distribusi Lintas Daerah Kabupaten/Kota						310.000.000,00			Tidak	Tidak			-	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
			Terlaksananya Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Distribusi Lintas Daerah Kabupaten/Kota (%)				*100*		*(22 kab/kota, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*100*		
		Sertifikasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Lintas Daerah Kabupaten/Kota						80.000.000,00							-	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
			Terlaksnanya Sertifikasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Lintas Daerah Kabupaten/Kota (Paket)				*1*		*(22 Kabupaten/Kota, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*1*		
		Registrasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Lintas Daerah Kabupaten/Kota						80.000.000,00							-	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
			Terlaksananya Registrasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Lintas Daerah Kabupaten/Kota (Paket)				*1*		*(22 Kabupaten/Kota, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*1*		
		Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Lintas Daerah Kabupaten/Kota						150.000.000,00							-	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
			Terlaksananya Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Lintas Daerah Kabupaten/Kota (Paket)				*1*		*(22 Kabupaten/Kota, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*1*		
	2.10	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN**						**2.050.046.500,00**							**0,00**	
1.	**2.10.1-3.0-0.0-0.01.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN IZIN LOKASI**						**106.555.500,00**			**Ya**	**Ya**			**0,00**	**Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat**
			Pelayanan Rekomendasi Izin Lokasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota Dalam Daerah Provinsi (%)				***100***									
	2.10.1-3.0-0.0-0.01.02.1.01	Pemberian Izin Lokasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi						106.555.500,00			Tidak	Tidak			-	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
			Terlaksananya Pemberian Izin Lokasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi (%)				*100*		*(22 Kab/Kota, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*100*		

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode RPJMD	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2020	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RKPD TAHUN 2021	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2023		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2022	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Izin Lokasi dalam rangka Penanaman Modal dan Kemudahan Berusaha Kewenangan Provinsi						106.555.500,00							-	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
			terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Izin Lokasi dalam rangka Penanaman Modal dan Kemudahan Berusaha Kewenangan Provinsi (paket)				*1*		*(22 kabupaten/kota, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*1*		
2.	**2.10.1-3.0-0.0-0.01.05**	**PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN**						**112.255.500,00**			**Ya**	**Ya**			**0,00**	**Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat**
			Penyelesaian masalah ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan oleh pemerintah Provinsi (%)				***100***									
	2.10.1-3.0-0.0-0.01.05.1.01	Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Provinsi						112.255.500,00			Tidak	Tidak			-	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
			Terlaksananya Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Provinsi (%)				*100*		*(22 Kab/Kota, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*100*		
		Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Provinsi						112.255.500,00							-	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
			terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Provinsi (paket)				*1*		*(22 kab/kota, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*1*		
3.	**2.10.1-3.0-0.0-0.01.06**	**PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH DAN GANTI KERUGIAN TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE**						**106.002.500,00**			**Ya**	**Ya**			**0,00**	**Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat**
			Penetapan subyek dan obyek redistribusi tanah serta ganti kerugian tanah kelebihan maksimum dan tanah absentee lintas daerah Kabupaten/Kota dalam daerah Provinsi				***100***									
	2.10.1-3.0-0.0-0.01.06.1.01	Penetapan Subyek dan Obyek Redistribusi Tanah Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi						106.002.500,00			Tidak	Tidak			-	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
			Terlaksannya Penetapan Subyek dan Obyek Redistribusi Tanah Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi (%)				*100*		*(22 Kab/Kota, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*100*		
		Inventarisasi Subjek dan Objek Redistribusi Tanah						106.002.500,00							-	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
			terlaksananya Inventarisasi Subjek dan Objek Redistribusi Tanah (paket)				*1*		*(22 kab/kota, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*1*		
4.	**2.10.1-3.0-0.0-0.01.07**	**PROGRAM PENETAPAN TANAH ULAYAT**						**1.003.939.800,00**			**Ya**	**Ya**			**0,00**	**Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat**

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode RPJMD	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2020	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RKPD TAHUN 2021	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2023		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2022	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Penetapan tanah ulayat yang lokasinya lintas daerah Kabupaten/Kota dalam daerah Provinsi *(%)*				***100***									
	2.10.1-3.0-0.0-0.01.07.1.01	Penetapan Tanah Ulayat yang Lokasinya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi						1.003.939.800,00			Tidak	Tidak			-	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
			Terlaksanannya Penetapan Tanah Ulayat yang Lokasinya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi (%)				*100*		*(22 Kab/Kota, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*100*		
		Koordinasi dan Sinkronisasi Survei dan Pemetaan Batas Tanah Ulayat Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi						1.003.939.800,00							-	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
			Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Survei dan Pemetaan Batas Tanah Ulayat Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi (paket)				*1*		*(22 kab/kota, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*1*		
5.	**2.10.1-3.0-0.0-0.01.08**	**PROGRAM PENGELOLAAN TANAH KOSONG**						**507.232.500,00**			**Ya**	**Ya**			**0,00**	**Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat**
			Fasilitasi penyelesaian masalah tanah kosong lintas daerah kabupaten/kota dalam provinsi serta Inventarisir dan memanfaatkan tanah kosong lintas daerah Kabupaten/Kota dalam daerah Provinsi				***100***									
	2.10.1-3.0-0.0-0.01.08.1.02	Inventarisasi dan Pemanfaatan Tanah Kosong						507.232.500,00			Tidak	Tidak			-	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
			Terlaksananya Inventarisasi dan Pemanfaatan Tanah Kosong (%)				*100*		*(22 Kab/Kota, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*100*		
		Pelaksanaan Inventarisasi Tanah Kosong						507.232.500,00							-	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
			Terlaksananya Inventarisasi Tanah Kosong (paket)				*1*		*(22 kab/kota, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*1*		
6.	**2.10.1-3.0-0.0-0.01.10**	**PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH**						**214.060.700,00**			**Ya**	**Ya**			**0,00**	**Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat**
			Perencanaan penggunaan tanah yang hamparannya lintas daerah Kabupaten/Kota dalam daerah Provinsi *(%)*				***100***									
	2.10.1-3.0-0.0-0.01.10.1.01	Perencanaan Penggunaan Tanah yang Hamparannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi						214.060.700,00			Tidak	Tidak			-	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
			Terlaksananya Perencanaan Penggunaan Tanah yang Hamparannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi (%)				*100*		*(22 Kab/Kota, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*100*		

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode RPJMD	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2020	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RKPD TAHUN 2021	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2023		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2022	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah						214.060.700,00							-	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
			Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah (paket)				*1*		*(22 kab/kota, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*1*		
	2.11	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP**						**106.543.252.669,00**							**0,00**	
1.	**2.11.2-11.3-28.0-0.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**						**94.122.386.900,00**			**Tidak**	**Tidak**			**0,00**	**Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan**
			eningkatnya pelayanan administrasi perkantoran yang berkualitas (%)				***100***									
			Meningkatnya sarana dan prasarana (%)				***100***									
			Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran yang berkualitas (%)				***100***									
	2.11.2-11.3-28.0-0.02.01.1.01	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						1.315.333.810,00			Tidak	Tidak			-	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
			Teralaksananya Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (%)				*100*		*(22 Kab/kota, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*100*		
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						404.639.720,00							-	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
			Terlaksananya Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Paket)				*1*		*(Kota Kupang, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*1*		
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD						280.348.770,00							-	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
			Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPDBidang (Paket)				*1*		*(Kota Kupang)*					*1*		
		Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD						230.024.000,00							-	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
			Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD (Paket)				*1*		*(Kota Kupang, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*1*		
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD						400.321.320,00							-	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
			Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Paket)				*1*		*(Kota Kupang, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*1*		
	2.11.2-11.3-28.0-0.02.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						80.989.697.540,00			Tidak	Tidak			-	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
			Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah (%)				*100*		*(22 KAB/KOTA, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*100*		
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						80.603.542.000,00							-	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
			Terlaksananya Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN (Paket)				*1*		*(Kota Kupang, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*1*		

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode RPJMD	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2020	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RKPD TAHUN 2021	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2023		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2022	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD						161.461.300,00							-	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
			Terlaksananya Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Paket)				*1*		*(Kota Kupang, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*1*		
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD						224.694.240,00							-	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
			Terlaksanaya Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Paket)				*1*		*(Kota Kupang, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*1*		
	2.11.2-11.3-28.0-0.02.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah						481.531.670,00			Tidak	Tidak			-	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
			Terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah (%)				*100*		*(22 Kab/Kota, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*100*		
		Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD						215.087.290,00							-	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
			Terlksananya Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD (Paket)				*1*		*(Kota Kupang, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*1*		
		Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD						266.444.380,00							-	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
			Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Paket)				*1*		*(Kota Kupang, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*1*		
	2.11.2-11.3-28.0-0.02.01.1.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah						246.054.590,00			Tidak	Tidak			-	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
			Terlaksananya Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah (%)				*100*		*(22 Kab/kota, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*100*		
		Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah						246.054.590,00							-	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
			Terlaksananya Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah (Paket)				*1*		*(Kota Kupang, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*1*		
	2.11.2-11.3-28.0-0.02.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						294.428.550,00			Tidak	Tidak			-	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
			Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah (%)				*100*		*(22 Kab/Kota, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*100*		
		Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai						244.428.550,00							-	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
			Terlaksananya Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai (Paket)				*1*		*(Kota Kupang, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*1*		
		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi						50.000.000,00							-	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
			Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi (Paket)				*1*		*(Kota Kupang, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*1*		
	2.11.2-11.3-28.0-0.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						3.206.046.250,00			Tidak	Tidak			-	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
			Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah (%)				*100*		*(KOta Kupang, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*100*		
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor						150.000.000,00							-	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode RPJMD	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2020	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RKPD TAHUN 2021	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2023		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2022	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Terlaksananya Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor (Paket)				*1*		*(Kota Kupang, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*1*		
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor						150.000.000,00								- Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
			Terlaksananya Penyediaan Bahan Logistik Kantor (Paket)				*1*		*(Kota Kupang, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*1*		
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						257.676.870,00								- Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
			Terlaksananya Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan (Paket)				*1*		*(Kota Kupang, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*1*		
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan						25.000.000,00								- Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
			Terlaksananya Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undanganBidang (Paket)				*1*		*(Kota Kupang, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*1*		
		Penyediaan Bahan/Material						468.439.580,00								- Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
			Terlaksananya Penyediaan Bahan/Material (Paket)				*1*		*(Kota Kupang, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*1*		
		Fasilitasi Kunjungan Tamu						138.563.000,00								- Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
			Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu (Paket)				*1*		*(Kota Kupang, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*1*		
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						2.016.366.800,00								- Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
			Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Paket)				*1*		*(Kota Kupang, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*1*		
	2.11.2-11.3-28.0-0.02.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						678.829.913,00			Tidak	Tidak				- Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
			Terlaksanannya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (%)				*100*		*(Kota Kupang, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*100*		
		Pengadaan Mebel						49.802.000,00								- Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
			Terlaksananya Pengadaan Mebel (Paket)				*1*		*(Kota Kupang, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*1*		
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya						629.027.913,00								- Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
			Terlaksananya Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya (Paket)				*1*		*(Kota Kupang, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*1*		
	2.11.2-11.3-28.0-0.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						5.042.574.036,00			Tidak	Tidak				- Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
			Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%)				*100*		*(Kota Kupang, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*100*		
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat						116.871.640,00								- Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
			Terlkasananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Paket)				*1*		*(Kota Kupang, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*1*		
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						1.085.944.556,00								- Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode RPJMD	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2020	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RKPD TAHUN 2021	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2023		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2022	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Terlaksananya Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik (Paket)				*1*		*(Kota Kupang, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*1*		
		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor						415.180.000,00							-	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
			Terlaksananya Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor (Paket)				*1*		*(Kota Kupang, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*1*		
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						3.424.577.840,00							-	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
			Terlaksananya Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (Paket)				*1*		*(Kota Kupang, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*1*		
	2.11.2-11.3-28.0-0.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						1.867.890.541,00			Tidak	Tidak			-	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
			Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%)				*100*		*(Kota Kupang, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*100*		
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						164.837.671,00							-	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
			Terlaksananya Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan (Paket)				*1*		*(Kota Kupang, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*1*		
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						1.212.636.070,00							-	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
			Terlaksananya Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan (Paket)				*1*		*(Kota Kupang, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*1*		
		Pemeliharaan Mebel						29.000.000,00							-	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
			Terlaksananya Pemeliharaan Mebel (Paket)				*1*		*(Kota Kupang, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*1*		
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						234.185.300,00							-	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
			Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya (Paket)				*1*		*(Kota Kupang, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*1*		
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya						227.231.500,00							-	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
			Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan LainnyaBidang (Paket)				*1*		*(Kota Kupang, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*1*		
2.	**2.11.2-11.3-28.0-0.02.02**	**PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP**						**1.039.471.691,00**			**Ya**	**Ya**			**0,00**	**Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan**
			Persentase Pemanfaatan dokumen Perencanaan LH (%)				***100***									
	2.11.2-11.3-28.0-0.02.02.1.01	Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Provinsi						359.471.691,00			Tidak	Tidak			-	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode RPJMD	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2020	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RKPD TAHUN 2021	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2023		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2022	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Terlaksananya Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Provinsi (%)				*100*		*(22 kab/kota, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*100*		
		Penyusunan dan Penetapan RPPLH Provinsi						359.471.691,00								- Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
			Terlaksanakan Penyusunan dan Penetapan RPPLH Provinsi (Paket)				*1*		*(22 Kabupaten/Kota, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*1*		
	2.11.2-11.3-28.0-0.02.02.1.02	Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Provinsi						680.000.000,00			Tidak	Tidak				- Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
			Terlaksananya Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Provinsi (%)				*100*		*(2 kab/kota, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*100*		
		Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS Rencana Tata Ruang						500.000.000,00								- Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
			Terlaksananya Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS Rencana Tata Ruang (Paket)				*1*		*(22 Kabupaten/ Kota, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*1*		
		Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD						180.000.000,00								- Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
			Terlaksananya Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD (Paket)				*1*		*(22 Kabupaten/kota, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*1*		
3.	**2.11.2-11.3-28.0-0.02.03**	**PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP**						**2.055.530.070,00**			**Ya**	**Ya**			**0,00**	**Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan**
			Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (%)				***100***									
	2.11.2-11.3-28.0-0.02.03.1.01	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkugan Hidup						1.970.530.070,00			Tidak	Tidak				- Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
			Terlaksananya Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkugan Hidup (%)				*100*		*(22 Kab/Kota, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*100*		
		Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut						525.000.000,00								- Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
			Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut (Paket)				*1*		*(22 Kabupaten / Kota, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*1*		
		Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim						90.000.000,00								- Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
			Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim (Paket)				*1*		*(22 Kabupaten/Kota, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*1*		
		Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Provinsi						1.355.530.070,00								- Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
			Terlaksananya Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Provinsi (Paket)				*1*		*(22 Kabupaten/Kota, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*1*		
	2.11.2-11.3-28.0-0.02.03.1.02	Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup						85.000.000,00			Tidak	Tidak				- Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode RPJMD	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2020	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RKPD TAHUN 2021	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2023		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2022	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Terlaksananya Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup (%)				*100*		*(22 Kab/Kota, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*100*		
		Penghentian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup						85.000.000,00							-	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
			Terlaksananya Penghentian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup (Paket)				*1*		*(22 Kabupaten/Kota, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*1*		
4.	**2.11.2-11.3-28.0-0.02.05**	**PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)**						**7.642.505.016,00**			**Ya**	**Ya**			**0,00**	**Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan**
			Persentase limbah B3 yang diangkut atau diolah (%)				***100***									
	2.11.2-11.3-28.0-0.02.05.1.01	Pengumpulan Limbah B3 Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi						7.642.505.016,00			Tidak	Tidak			-	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
			Terlaksananya Pengumpulan Limbah B3 Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi (%)				*100*		*(22 Kab/Kota, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*100*		
		Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Pusat dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan						7.642.505.016,00							-	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
			terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Pusat dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan (Paket)				*1*		*(22 Kabupaten/kota, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*1*		
5.	**2.11.2-11.3-28.0-0.02.06**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP**						**308.692.114,00**			**Ya**	**Ya**			**0,00**	**Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan**
			Persentase pemenuhan ketentuan ijin lingkungan dan ijin PPLH (%)				***100***									
	2.11.2-11.3-28.0-0.02.06.1.01	Pembinaan dan Pengawasan Izin Lingkungan dan Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi						308.692.114,00			Tidak	Tidak			-	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
			Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Izin Lingkungan dan Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi (%)				*100*		*(22 Kab/Kota, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*100*		
		Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH						258.692.114,00							-	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
			Terlksananya Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH (Paket)				*1*		*(22 Kabupaten/Kota, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*1*		
		Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi						50.000.000,00							-	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode RPJMD	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2020	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RKPD TAHUN 2021	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2023		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2022	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Terlaksananya Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi (Paket)				*1*		*(22 Kabupaten/Kota, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*1*		
6.	**2.11.2-11.3-28.0-0.02.09**	**PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT**						**541.932.352,00**			**Ya**	**Ya**			**0,00**	**Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan**
			Persentase peningkatan kualitas LH di suatu daerah (%)				***100***									
	2.11.2-11.3-28.0-0.02.09.1.01	Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Provinsi						541.932.352,00			Tidak	Tidak			-	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
			Terlaksananya Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Provinsi (%)				*100*		*(22 Kab/Kota, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*100*		
		Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/ Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup						541.932.352,00							-	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
			Terlaksananya Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/ Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Paket)				*1*		*(22 Kabupaten/kota, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*1*		
7.	**2.11.2-11.3-28.0-0.02.10**	**PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP**						**277.451.100,00**			**Ya**	**Ya**			**0,00**	**Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan**
			Persentase pengaduan lingkungan hidup yang tertangani (%)				***50***									
	2.11.2-11.3-28.0-0.02.10.1.01	Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Provinsi						277.451.100,00			Tidak	Tidak			-	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
		Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan Sanksi Administrasi, Penyelesaian Sengketa, dan/atau Penyidikan Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan atau melalui Pengadilan						277.451.100,00							-	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
			Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan Sanksi Administrasi, Penyelesaian Sengketa, dan/atau Penyidikan Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan atau melalui Pengadilan (Paket)				*1*		*(22 Kabupaten/Kota, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*1*		
8.	**2.11.2-11.3-28.0-0.02.11**	**PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN**						**555.283.426,00**			**Ya**	**Ya**			**0,00**	**Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan**
			Persentase Pengurangan dan Penanganan Sampah (%)				***27***									
	2.11.2-11.3-28.0-0.02.11.1.01	Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional						555.283.426,00			Tidak	Tidak			-	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
			Terlaksananya Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional (%)				*100*		*(22 Kab/Kota, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*100*		
		Penyusunan Rencana, Kebijakan dan Teknis Penanganan Sampah Regional						205.283.426,00							-	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode RPJMD	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2020	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RKPD TAHUN 2021	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2023		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2022	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Terlaksananya Penyusunan Rencana, Kebijakan dan Teknis Penanganan Sampah Regional (Paket)				*1*		*(22 Kabupaten/Kota, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*1*		
		Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penanganan Sampah pada Kondisi Khusus						350.000.000,00							-	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
			Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penanganan Sampah pada Kondisi Khusus (Paket)				*1*		*(22 Kabupaten/Kota, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*1*		
	2.12	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**						**2.291.899.022,00**							**0,00**	
1.	**2.12.1-2.0-0.0-0.01.04**	**PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN**						**2.291.899.022,00**			**Ya**	**Ya**			**0,00**	**Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil**
			Cakupan kepemilikan KTP elektronik untuk penduduk wajib KTP (%)				***97***									
			Cakupan penduduk <17 tahun memiliki kartu identitas anak (%)				***80***									
			Cakupan anak 0-18 tahun memiliki akta kelahiran (%)				***90***									
			Cakupan Pemanfaatan Data Kependudukan (Perjanjian Kerjasama dengan Perangkat Daerah = 10 PD) (%)				***76,9***									
	2.12.1-2.0-0.0-0.01.04.1.02	Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Provinsi						2.100.977.138,00		Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik, Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Tidak	Tidak			-	Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil
			Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Provinsi (tahun)				*1*		*(Dinas Kessehatan Prov. NTT, NUSA TENGGARA TIMUR)*	*Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik, Dana Transfer Umum - Dana Alokasi*				*1*		
		Fasilitasi Penyelenggaraan Urusan Administrasi Kependudukan						262.472.123,00		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum					-	Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil
			Terlaksananya Fasilitasi Penyelenggaraan Urusan Administrasi Kependudukan (Kabupaten/kota)				*22*		*(22 Kabupaten/Kota, NUSA TENGGARA TIMUR)*	*Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum*				*22*		
		Sosialisasi Penyelenggaraan Urusan Administrasi Kependudukan						1.838.505.015,00		Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik, Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum					-	Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil
			Terlaksananya Sosialisasi Penyelenggaraan Urusan Administrasi Kependudukan (Paket)				*1,00*		*(Dinas Kesehatan Provinsi NTT, NUSA TENGGARA TIMUR)*	*Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik, Dana Transfer Umum - Dana Alokasi*				*1,00*		
	2.12.1-2.0-0.0-0.01.04.1.03	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Provinsi						190.921.884,00		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Tidak	Tidak			-	Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode RPJMD	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2020	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RKPD TAHUN 2021	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2023		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2022	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Provinsi (%)				*100*		*(22 kab/kota, NUSA TENGGARA TIMUR)*	*Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum*				*100*		
		Bimbingan Teknis Pendaftaran Penduduk, Pencatatan Sipil, Pengelolaan Informasi Kependudukan, dan Pendayagunaan Data Kependudukan						190.921.884,00		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum					-	Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil
			Terlaksananya Bimbingan Teknis Pendaftaran Penduduk, Pencatatan Sipil, Pengelolaan Informasi Kependudukan, dan Pendayagunaan Data Kependudukan (tahun)				*1,00*		*(Dinas Kesehatan Prov. NTT, NUSA TENGGARA TIMUR)*	*Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum*				*1*		
	2.13	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**						**271.872.873.200,00**							**0,00**	
1.	**2.13.2-13.0-0.0-0.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**						**11.253.913.200,00**			**Tidak**	**Tidak**			**0,00**	**Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa**
			Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran yang berkualitas (%)				***100***			***Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum***						
			Meningkatnya sarana dan prasarana (%)				***100***			***Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum***						
			Tercapainya penyusunan capaian kinerja ikhtisar realisasi kinerja dan keuangan (%)				***100***			***Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum***						
	2.13.2-13.0-0.0-0.01.01.1.01	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						2.347.000.000,00		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Tidak	Tidak			-	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
			Terlaksananya Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (%)				*100*		*(Kota Kupang, NUSA TENGGARA TIMUR)*	*Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum*				*100*		
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						110.000.000,00							-	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
			Terlaksananya Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Paket)				*1*		*(Kota Kupang, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*1*		
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD						15.000.000,00							-	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
			Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Paket)				*1*		*(Kota Kupang, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*1*		
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD						7.000.000,00							-	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
			Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Paket)				*1*		*(Kota Kupang, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*1*		
		Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD						2.200.000.000,00		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum					-	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
			Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD (Paket)				*1*		*(Kota Kupang, NUSA TENGGARA TIMUR)*	*Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum*				*1*		

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode RPJMD	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2020	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RKPD TAHUN 2021	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2023		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2022	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD						15.000.000,00								- Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
			Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Paket)				*1*		*(Kota Kupang, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*1*		
	2.13.2-13.0-0.0-0.01.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						7.043.000.000,00			Tidak	Tidak				- Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
			Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah (%)				*100*		*(Kota Kupang, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*100*		
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						7.000.000.000,00								- Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
			Terlaksananya Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN (Paket)				*1*		*(Kota Kupang, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*1*		
		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD						20.000.000,00								- Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
			Terlaksanaya Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Paket)				*1*		*(Kota Kota, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*1*		
		Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD						6.000.000,00								- Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
			Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD (Paket)				*1*		*(Kota Kupang, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*1*		
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD						5.000.000,00								- Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
			Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Paket)				*1*		*(Kota Kupang, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*1*		
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD						12.000.000,00								- Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
			Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Paket)				*1*		*(Koat Kupang, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*1*		
	2.13.2-13.0-0.0-0.01.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah						229.000.000,00			Tidak	Tidak				- Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
			Terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah (%)				*100*		*(Kota Kupang, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*100*		
		Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD						159.000.000,00								- Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
			Terlaksananya Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD (Paket)				*1*		*(Kota Kupang, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*1*		
		Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD						35.000.000,00								- Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
			Terlaksananya Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD (Paket)				*1*		*(Kota Kupang, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*1*		
		Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD						35.000.000,00								- Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
			Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Paket)				*1*		*(Kota Kupang, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*1*		

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode RPJMD	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2020	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RKPD TAHUN 2021	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2023		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2022	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.13.2-13.0-0.0-0.01.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						77.000.000,00			Tidak	Tidak			-	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
			Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah (%)				*100*		*(Kot Kupang, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*100*		
		Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian						12.000.000,00							-	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
			Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Paket)				*1*		*(Kota Kupang, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*1*		
		Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian						50.000.000,00							-	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
			Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian (Paket)				*1*		*(Kota Kupang, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*1*		
		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan						15.000.000,00							-	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
			Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Paket)				*1*		*(Kota Kupang, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*1*		
	2.13.2-13.0-0.0-0.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						587.540.160,00			Tidak	Tidak			-	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
			Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah (%)				*100*		*(Kota Kupang, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*100*		
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor						6.000.000,00							-	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
			Terlaksananya Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor (Paket)				*1*		*(Kota Kupang, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*1*		
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						50.000.000,00							-	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
			Terlaksananya Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor (Paket)				*1*		*(Kota Kupang, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*1*		
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga						50.000.000,00							-	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
			Terlaksananya Penyediaan Peralatan Rumah Tangga (Paket)				*1*		*(Kota Kupang, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*1*		
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						12.000.000,00							-	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
			Terlaksananya Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan (Paket)				*1*		*(Kota Kupang, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*1*		
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan						7.820.800,00							-	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
			Terlaksananya Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan (Paket)				*1*		*(Kota Kupang, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*1*		
		Penyediaan Bahan/Material						72.000.000,00							-	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
			Terlaksananya Penyediaan Bahan/Material (Paket)				*1*		*(Kota Kupang, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*1*		
		Fasilitasi Kunjungan Tamu						12.480.000,00							-	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode RPJMD	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2020	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RKPD TAHUN 2021	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2023		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2022	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu (Paket)				*1*		*(Kota Kupang, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*1*		
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						250.000.000,00								- Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
			Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Paket)				*1*		*(Kota KUpang, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*1*		
		Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD						127.239.360,00								- Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
			Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Paket)				*1*		*(Kota Kupang, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*1*		
	2.13.2-13.0-0.0-0.01.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						100.000.000,00			Tidak	Tidak				- Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
			Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (%)				*100*		*(Kota Kupang, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*100*		
		Pengadaan Mebel						50.000.000,00								- Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
			Terlaksananya Pengadaan Mebel (Paket)				*1*		*(Kota Kupang, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*1*		
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya						50.000.000,00								- Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
			Terlaksananya Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya (Paket)				*1*		*(Kota Kupang, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*1*		
	2.13.2-13.0-0.0-0.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						580.373.040,00			Tidak	Tidak				- Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
			Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (%)				*100*		*(KOta Kupang, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*100*		
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat						10.000.000,00								- Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
			Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Paket)				*1*		*(Kota Kupang, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*1*		
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						195.373.040,00								- Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
			Terlaksananya Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik (Paket)				*1*		*(Kota Kupang, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*1*		
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						375.000.000,00								- Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
			Terlaksananya Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (Paket)				*1*		*(Kota Kupang, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*0*		
	2.13.2-13.0-0.0-0.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						290.000.000,00			Tidak	Tidak				- Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
			Trrlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%)				*100*		*(Kota Kupang, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*100*		
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						200.000.000,00								- Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode RPJMD	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2020	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RKPD TAHUN 2021	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2023		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2022	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Terlaksananya Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan (Paket)				*1*		*(Kota Kupang, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*1*		
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						10.000.000,00								- Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
			Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya (Paket)				*1*		*(Kota Kupang, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*1*		
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya						80.000.000,00								- Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
			Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya (Paket)				*1*		*(Kota Kupang, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*1*		
2.	**2.13.2-13.0-0.0-0.01.02**	**PROGRAM PENATAAN DESA**						**50.000.000,00**			**Tidak**	**Tidak**			**0,00**	**Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa**
	2.13.2-13.0-0.0-0.01.02.1.01	Penatausahaan Penetapan Susunan Kelembagaan, Pengisian Jabatan, dan Masa Jabatan Kepala Desa Adat Berdasarkan Hukum Adat						50.000.000,00		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Tidak	Tidak				- Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
		Fasilitasi Kabupaten/Kota dan Desa dalam rangka Penataan Desa						50.000.000,00		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum						- Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
			Terlaksananya Fasilitasi Kabupaten/Kota dan Desa dalam rangka Penataan Desa (paket)				*1*		*(22 kab kota, NUSA TENGGARA TIMUR)*	*Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum*				*1*		
3.	**2.13.2-13.0-0.0-0.01.03**	**PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA**						**250.000.000,00**			**Tidak**	**Tidak**			**0,00**	**Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa**
										Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum						
	2.13.2-13.0-0.0-0.01.03.1.01	Fasilitasi Kerja Sama antar desa yang Menjadi Kewenangan Provinsi						250.000.000,00		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Tidak	Tidak				- Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
		Fasilitasi Kerja Sama Desa dengan Pihak Ketiga						250.000.000,00		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum						- Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
			terlaksananya Fasilitasi Kerja Sama Desa dengan Pihak Ketiga (paket)				*1*		*(22 kab/kota, NUSA TENGGARA TIMUR)*	*Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum*				*1*		
4.	**2.13.2-13.0-0.0-0.01.04**	**PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA**						**11.485.710.000,00**			**Tidak**	**Tidak**			**0,00**	**Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa**
										Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum						
	2.13.2-13.0-0.0-0.01.04.1.01	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa						11.485.710.000,00		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Tidak	Tidak				- Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
		Fasilitasi Penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/wali kota yang Mengatur Desa						49.960.000,00		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum						- Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
			Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/wali kota yang Mengatur Desa (paket)				*1*		*(22 kab/kota, NUSA TENGGARA TIMUR)*	*Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum*				*1*		

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode RPJMD	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2020	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RKPD TAHUN 2021	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2023		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2022	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		Fasilitasi Penyusunan, Perencanaan, Pelaksanaan dan Pengawasan Pembangunan Desa						50.000.000,00		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum					-	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
			Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan, Perencanaan, Pelaksanaan dan Pengawasan Pembangunan Desa (paket)				*1*		*(22 kab/kota, NUSA TENGGARA TIMUR)*	*Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum*				*1*		
		Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa						113.460.000,00		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum					-	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
			Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa (paket)				*1*		*(22 kab/kota, NUSA TENGGARA TIMUR)*	*Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum*				*1*		
		Fasilitasi Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa						50.000.000,00		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum					-	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
			terlaksananya Fasilitasi Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (paket)				*1*		*(22 kab/kota, NUSA TENGGARA TIMUR)*	*Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum*				*1*		
		Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan						419.470.000,00		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum					-	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
			terlaksananya Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan (paket)				*1*		*(22 kabupaten/kota, NUSA TENGGARA TIMUR)*	*Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum*				*1*		
		Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD						127.820.000,00		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum					-	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
			terlaksananya Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD (paket)				*1*		*(22 kab/kota, NUSA TENGGARA TIMUR)*	*Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum*				*1*		
		Pembinaan dan Pengawasan Penetapan Pengaturan BUM Desa Kabupaten/Kota dan Lembaga Kerjasama antar Desa						10.475.000.000,00		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum					-	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
			Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Penetapan Pengaturan BUM Desa Kabupaten/Kota dan Lembaga Kerjasama antar Desa (paket)				*1*		*(22 kabupaten, NUSA TENGGARA TIMUR)*	*Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum*				*1*		
		Fasilitasi Pengembangan Inovasi Desa						200.000.000,00		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum					-	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
			Terlaksananya Fasilitasi Pengembangan Inovasi Desa (paket)				*1*		*(22 kab/kota, NUSA TENGGARA TIMUR)*	*Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum*				*1*		
5.	**2.13.2-13.0-0.0-0.01.05**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT**						**248.833.250.000,00**			Ya	Ya			**0,00**	**Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa**
			Peningkatan Cakupan Pemberdayaan Kelompok Masyarakat (%)				***100***			***Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum***						
			Bidang Ekonomi (Target Tahun 2023 = 1.500 Unit) (%)				***100***			***Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum***						
			Bidang Sosial (Target Tahun 2023 = 6.652 Unit Aktif) (%)				***100***			***Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum***						
			Adat (Target 2023= 132 Unit) (%)				***100***			***Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum***						

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode RPJMD	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2020	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RKPD TAHUN 2021	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2023		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2022	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			PKK Aktif (%)				***100***			***Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum***						
			Persentase Peningkatan BUMDES Aktif (Tahun 2010=780 Bumdes, 2023 = 1500 Bumdes) (%)				***100***			***Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum***						
	2.13.2-13.0-0.0-0.01.05.1.01	Pemberdayaan Lembaga kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama Berada di Lintas Daerah Kabupaten/Kota					248.833.250.000,00		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Tidak	Tidak				- Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
			Terlaksananya Pemberdayaan Lembaga kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama Berada di Lintas Daerah Kabupaten/Kota (%)				*100*		*(22 Kab/Kota, NUSA TENGGARA TIMUR)*	*Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum*				*100*		
		Identifikasi dan Inventarisasi Masyarakat Hukum Adat						200.000.000,00		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum						- Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
			Terlaksananya Identifikasi dan Inventarisasi Masyarakat Hukum Adat (paket)				*1*		*(22 kab/kota, NUSA TENGGARA TIMUR)*	*Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum*				*1*		
		Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat						15.400.000.000,00		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum						- Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
			Terlaksananya Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat (Paket)				*1*		*(22 kabupaten/ Kota, NUSA TENGGARA TIMUR)*	*Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum*				*1*		
		Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat						250.000.000,00								- Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
			Terlaksananya Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat (Paket)				*1*		*(22 Kabupaten/Kota, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*1*		
		Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa						750.000.000,00								- Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode RPJMD	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2020	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RKPD TAHUN 2021	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2023		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2022	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Terlaksananya Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa (Paket)				*1*		*(22 Kabupaten/Kota, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*1*		
		Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna						15.883.250.000,00		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum					-	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
			Terlaksananya Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna (Paket)				*1*		*(22 Kabupaten/Kota, NUSA TENGGARA TIMUR)*	*Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum*				*1*		
		Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat						350.000.000,00							-	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
			Terlaksananya Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (Paket)				*1*		*(22 Kabupaten/Kota, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*1*		
		Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga						216.000.000.000,00		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum					-	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
			Terlaksananya Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga (Paket)				*1*		*(22 KAbupaten/Kota, NUSA TENGGARA TIMUR)*	*Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum*				*1*		
	2.15	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN**						**166.598.297.962,00**							**0,00**	
1.	**2.15.2-15.0-0.0-0.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**						**37.111.696.142,00**			**Tidak**	**Tidak**			**0,00**	**Dinas Perhubungan**
			Peningkatan Kecepatan Layanan Pemberian Ijindan Rekomendasi di Bidang Pelayaran (%)				***30***			***Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum***						
	2.15.2-15.0-0.0-0.01.01.1.01	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						285.555.920,00			Tidak	Tidak			-	Dinas Perhubungan
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD						41.823.640,00							-	Dinas Perhubungan
			Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Paket)				*1*		*(Kota Kupang, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*1*		
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD						42.593.640,00							-	Dinas Perhubungan
			Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Paket)				*1*		*(Kota Kupang, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*1*		
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD						18.193.000,00							-	Dinas Perhubungan
			Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Paket)				*1*		*(Kota Kupang, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*1*		
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						182.945.640,00							-	Dinas Perhubungan
			Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Paket)				*1*		*(Kota Kupang, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*1*		
	2.15.2-15.0-0.0-0.01.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						13.453.190.976,00			Tidak	Tidak			-	Dinas Perhubungan

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode RPJMD	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2020	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RKPD TAHUN 2021	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2023		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2022	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						13.434.294.476,00							-	Dinas Perhubungan
			Terlaksananya Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN (Paket)				*1*		*(Kota Kupang, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*1*		
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD						9.448.250,00							-	Dinas Perhubungan
			Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Paket)				*1*		*(Kota Kupang, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*1*		
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD						9.448.250,00							-	Dinas Perhubungan
			Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Paket)				*1*		*(Kota Kuapng, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*1*		
	2.15.2-15.0-0.0-0.01.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah						17.024.640,00			Tidak	Tidak			-	Dinas Perhubungan
		Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD						17.024.640,00							-	Dinas Perhubungan
			Terlaksananya Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD (Paket)				*1*		*(Kota kupang, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*1*		
	2.15.2-15.0-0.0-0.01.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						447.162.640,00			Tidak	Tidak			-	Dinas Perhubungan
		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya						7.200.000,00							-	Dinas Perhubungan
			Terlaksananya Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya (Paket)				*1*		*(Kota Kupang, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*1*		
		Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai						17.024.640,00							-	Dinas Perhubungan
			Terlaksananya Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai (Paket)				*1*		*(Kota Kupang, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*1*		
		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi						422.938.000,00							-	Dinas Perhubungan
			Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi (Paket)				*1*		*(Kota Kupang, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*1*		
	2.15.2-15.0-0.0-0.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						1.013.199.596,00			Tidak	Tidak			-	Dinas Perhubungan
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor						41.088.933,00							-	Dinas Perhubungan
			Terlksananya Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor (Paket)				*1*		*(Kota kupang, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*1*		
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						50.968.000,00							-	Dinas Perhubungan
			Terlaksananya Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan (Paket)				*1*		*(Kota Kupang, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*1*		
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan						15.583.200,00							-	Dinas Perhubungan
			Terlaksananya Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan (Paket)				*1*		*(Kota Kupang, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*1*		

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode RPJMD	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2020	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RKPD TAHUN 2021	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2023		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2022	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		Penyediaan Bahan/Material						88.534.383,00							-	Dinas Perhubungan
			Terlaksananya Penyediaan Bahan/Material (Paket)				*1*		*(Kota Kupang, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*1*		
		Fasilitasi Kunjungan Tamu						44.550.000,00							-	Dinas Perhubungan
			Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu (Paket)				*1*		*(Kota Kupang, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*1*		
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						772.475.080,00							-	Dinas Perhubungan
			Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Paket)				*1*		*(Kota Kupang, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*1*		
	2.15.2-15.0-0.0-0.01.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						16.088.728.000,00			Tidak	Tidak			-	Dinas Perhubungan
		Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						290.000.000,00							-	Dinas Perhubungan
			Terlaksananya 290.000.000,00 (Paket)				*1*		*(Kota Kupang, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*1*		
		Pengadaan Mebel						44.000.000,00							-	Dinas Perhubungan
			Terlaksananya Pengadaan Mebel (Paket)				*1*		*(Kota Kupang, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*1*		
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya						314.728.000,00							-	Dinas Perhubungan
			Terlaksananya Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya (Paket)				*1*		*(Kota kupang, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*1*		
		Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						15.440.000.000,00							-	Dinas Perhubungan
			Terlaksananya Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya (Paket)				*1*		*(Kota Kupang, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*1*		
	2.15.2-15.0-0.0-0.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						4.673.277.320,00			Tidak	Tidak			-	Dinas Perhubungan
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat						45.750.960,00							-	Dinas Perhubungan
			Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Paket)				*1*		*(Kota Kupang, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*1*		
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						369.806.800,00							-	Dinas Perhubungan
			Terlaksananya Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik (Paket)				*1*		*(Kota Kupang, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*1*		
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						4.257.719.560,00							-	Dinas Perhubungan
			Terlaksananya Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (Paket)				*1*		*(Kota Kupang, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*1*		
	2.15.2-15.0-0.0-0.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						1.133.557.050,00			Tidak	Tidak			-	Dinas Perhubungan
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						50.605.000,00							-	Dinas Perhubungan
			Terlaksananya Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan (Paket)				*1*		*(Kota Kupang, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*1*		

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode RPJMD	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2020	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RKPD TAHUN 2021	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2023		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2022	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor						83.211.250,00							-	Dinas Perhubungan
			Terlaksananya Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor (Paket)				*1*		*(Kota Kupang, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*1*		
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						38.550.000,00							-	Dinas Perhubungan
			Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya (Paket)				*1*		*(Kota kupang, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*1*		
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya						720.270.800,00							-	Dinas Perhubungan
			Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya (Paket)				*1*		*(Kota Kupang, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*1*		
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						160.920.000,00							-	Dinas Perhubungan
			Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya (Paket)				*1*		*(Kota Kupang, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*1*		
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						80.000.000,00							-	Dinas Perhubungan
			Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya (Paket)				*1*		*(Kota Kupang, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*1*		
2.	**2.15.2-15.0-0.0-0.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)**						**109.968.484.961,00**			**Ya**	**Ya**			**0,00**	**Dinas Perhubungan**
			Peningkatan Cakupan fasilitas keselamatan jalan terpasang pada Ruas Jalan Provinsi (%)				***30***									
	2.15.2-15.0-0.0-0.01.02.1.01	Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Provinsi						1.581.717.317,00		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Tidak	Tidak			-	Dinas Perhubungan
			Terlaksananya Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Provinsi (%)				*100*		*(22 kab/kota, NUSA TENGGARA TIMUR)*	*Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum*				*100*		
		Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Provinsi						1.581.717.317,00		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum					-	Dinas Perhubungan
			Terlaksananya Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Provinsi (Paket)				*1*		*(22 Kabuapten/kota, NUSA TENGGARA TIMUR)*	*Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum*				*1*		
	2.15.2-15.0-0.0-0.01.02.1.02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi						7.421.981.200,00		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Tidak	Tidak			-	Dinas Perhubungan
			Terlaksananya Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi (%)				*100*		*(22 kab/kota, NUSA TENGGARA TIMUR)*	*Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum*				*100*		
		Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Provinsi						-							-	Dinas Perhubungan
			Terlaksananya Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Provinsi (Paket)				*1*		*(22 Kabuapten / Kota, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*1*		

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode RPJMD	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2020	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RKPD TAHUN 2021	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2023		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2022	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi						6.581.296.600,00		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum					-	Dinas Perhubungan
			Terlaksananya Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi (Paket)				*1*		*(22 Kabupaten / Kota, NUSA TENGGARA TIMUR)*	*Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum*				*1*		
		Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan						840.684.600,00		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum					-	Dinas Perhubungan
			Terlaksananya Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan (Paket)				*1*		*(22 Kabupten/Kota, NUSA TENGGARA TIMUR)*	*Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum*				*1*		
	2.15.2-15.0-0.0-0.01.02.1.03	Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe B						62.892.561.286,00		Dana Perimbangan , Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Tidak	Tidak			-	Dinas Perhubungan
			Terlaksananya Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe B (%)				*100*		*(22 kab/kota, NUSA TENGGARA TIMUR)*	*Dana Perimbangan , Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum*				*100*		
		Penyusunan Rencana Pembangunan Terminal Penumpang Tipe B						1.449.053.000,00		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum					-	Dinas Perhubungan
			Terlaksananya Penyusunan Rencana Pembangunan Terminal Penumpang Tipe B (Paket)				*1*		*(22 Kabupaten/Kota, NUSA TENGGARA TIMUR)*	*Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum*				*1*		
		Pembangunan Gedung Terminal						61.443.508.286,00		Dana Perimbangan					-	Dinas Perhubungan
			Terlaksananya Pembangunan Gedung Terminal (Paket)				*1*		*(22 Kabupaten/Kota, NUSA TENGGARA TIMUR)*	*Dana Perimbangan*				*1*		
	2.15.2-15.0-0.0-0.01.02.1.05	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi						1.172.008.000,00		Dana Perimbangan	Tidak	Tidak			-	Dinas Perhubungan
			Terlaksananya elaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi (%)				*100*		*(22 kab/kota, NUSA TENGGARA TIMUR)*	*Dana Perimbangan*				*100*		
		Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Provinsi						265.260.000,00							-	Dinas Perhubungan
			Terlaksananya Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Provinsi (Paket)				*1*		*(22 Kabupaten/ Kota, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*1*		
		Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Provinsi						265.260.000,00							-	Dinas Perhubungan
			Terlaksananya Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Provinsi (Paket)				*1*		*(22 Kabuapten/kota, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*1*		
		Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Provinsi						641.488.000,00		Dana Perimbangan					-	Dinas Perhubungan
			Terlaksananya Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Provinsi (Paket)				*1*		*(22 Kabupaten/kota, NUSA TENGGARA TIMUR)*	*Dana Perimbangan*				*1*		
	2.15.2-15.0-0.0-0.01.02.1.06	Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Provinsi						328.764.000,00			Tidak	Tidak			-	Dinas Perhubungan
			Terlaksananya Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Provinsi (%)				*100*		*(22 kab/kota, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*100*		

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode RPJMD	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2020	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RKPD TAHUN 2021	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2023		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2022	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		Penetapan Kebijakan Tata Kelola Andalalin						113.538.000,00							-	Dinas Perhubungan
			Terlaksananya Penetapan Kebijakan Tata Kelola Andalalin (Paket)				*1*		*(22 Kabupaten/kota, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*1*		
		Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Andalalin						215.226.000,00							-	Dinas Perhubungan
			Terlaksananya Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Andalalin (Paket)				*1*		*(22 Kabupaten/Kota, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*1*		
	2.15.2-15.0-0.0-0.01.02.1.07	Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan						284.552.000,00			Tidak	Tidak			-	Dinas Perhubungan
			Terlaksananya Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan (%)				*100*		*(22 kab/kota, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*100*		
		Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal						65.270.000,00							-	Dinas Perhubungan
			Terlaksananya Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal (Paket)				*1*		*(22 Kabupaten/kota, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*1*		
		Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum						219.282.000,00							-	Dinas Perhubungan
			Terlaksananya Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum (Paket)				*1*		*(22 Kabupaten/Kota, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*1*		
	2.15.2-15.0-0.0-0.01.02.1.08	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi						34.288.701.598,00		Dana Perimbangan	Tidak	Tidak			-	Dinas Perhubungan
			Terlaksananya Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi (%)				*100*		*(22 kab/kota, NUSA TENGGARA TIMUR)*	*Dana Perimbangan*				*100*		
			Terlaksananya Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi (%)				*100*		*(22 kab/kota, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*100*		
		Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi						34.141.473.258,00		Dana Perimbangan					-	Dinas Perhubungan
			Tersedianya Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi (Paket)				*1*		*(22 kabupaten/kota, NUSA TENGGARA TIMUR)*	*Dana Perimbangan*				*1*		
		Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Provinsi						147.228.340,00							-	Dinas Perhubungan
			Terlaksananya Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Provinsi (Paket)				*1*		*(22 kabupaten/kota, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*1*		
	2.15.2-15.0-0.0-0.01.02.1.13	Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi						1.998.199.560,00			Tidak	Tidak			-	Dinas Perhubungan

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode RPJMD	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2020	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RKPD TAHUN 2021	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2023		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2022	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Terlaksananya Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi (%)				*100*		*(22 kab/kota, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*100*		
		Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik						523.088.000,00							-	Dinas Perhubungan
			Terlaksananya Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Paket)				*1*		*(22 Kabupaten/kota, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*1*		
		Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Provinsi						1.475.111.560,00							-	Dinas Perhubungan
			Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Provinsi (Paket)				*1*		*(22 Kabupaten/kota, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*1*		
3.	**2.15.2-15.0-0.0-0.01.03**	**PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN**						**18.218.072.859,00**			**Ya**	**Ya**			**0,00**	**Dinas Perhubungan**
			Peningkatan Kecepatan Layanan Pemberian Ijindan Rekomendasi diBidang Pelayaran (%)				***30***									
			Persentase Peningkatan Arus Masuk dan Keluar Barang di Pelabuhan yang dikelola Pemerintah Provinsi (%)				***60***									
	2.15.2-15.0-0.0-0.01.03.1.01	Penerbitan Izin Usaha Angkutan Laut Bagi Badan Usaha yang Berdomisili dalam Wilayah dan Beroperasi pada Lintas Pelabuhan Antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Wilayah Daerah Provinsi						102.075.130,00			Tidak	Tidak			-	Dinas Perhubungan
		Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Laut Kewenangan Provinsi						102.075.130,00							-	Dinas Perhubungan
			Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Laut Kewenangan Provinsi (Paket)				*1*		*(22 kabupaten/kota, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*1*		
	2.15.2-15.0-0.0-0.01.03.1.02	Penerbitan Izin Usaha Angkutan Laut Pelayaran Rakyat Bagi Orang Perorangan atau Badan Usaha yang Berdomisili dan yang Beroperasi pada Lintas Pelabuhan Antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi, Pelabuhan Antar Daerah Provinsi, dan							200.620.000,00			Tidak	Tidak			-	Dinas Perhubungan
		Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Laut Pelayaran Rakyat Kewenangan Provinsi						200.620.000,00							-	Dinas Perhubungan

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode RPJMD	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2020	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RKPD TAHUN 2021	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2023		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2022	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Laut Pelayaran Rakyat Kewenangan Provinsi (Rakpel)				*1*		*(22 Kabupten/kota, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*1*		
	2.15.2-15.0-0.0-0.01.03.1.04	Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Kapal antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi yang Terletak pada Jaringan Jalan Provinsi dan/atau Jaringan Jalur Kereta Api Provinsi						51.942.000,00				Tidak	Tidak			-	Dinas Perhubungan
		Penyediaan Data dan Informasi Jaringan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Kapal antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi pada Jaringan Jalan Provinsi dan/atau Jaringan Jalur Kereta Api Provinsi						51.942.000,00								-	Dinas Perhubungan
			Terlaksananya Penyediaan Data dan Informasi Jaringan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Kapal antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi pada Jaringan Jalan Provinsi dan/atau Jaringan Jalur Kereta Api Provinsi				*1*		*(22 Kabupaten/kota, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*1*		
	2.15.2-15.0-0.0-0.01.03.1.05	Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan Lintas Pelabuhan Antar Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi						1.943.901.800,00				Tidak	Tidak			-	Dinas Perhubungan
		Pengendalian dan Pengawasan Jaringan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Kapal Penyeberangan Lintas Pelabuhan Antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi						1.943.901.800,00								-	Dinas Perhubungan
			Terllaksananya Pengendalian dan Pengawasan Jaringan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Kapal Penyeberangan Lintas Pelabuhan Antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi				*1*		*(22 Kabupaten/Kota, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*1*		
	2.15.2-15.0-0.0-0.01.03.1.06	Penerbitan Izin Usaha Jasa Terkait Berupa Bongkar Muat Barang, Jasa Pengurusan Transportasi, Angkutan Perairan Pelabuhan, Penyewaan Peralatan Angkutan Laut Atau Peralatan Jasa Terkait Dengan Angkutan Laut, Tally Mandiri, dan Depo Peti Kemas						303.594.220,00				Tidak	Tidak			-	Dinas Perhubungan
		Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Usaha Jasa Terkait Berupa Bongkar Muat Barang, Jasa Pengurusan Transportasi, Angkutan Perairan Pelabuhan, Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan Jasa Terkait dengan Angkutan Laut, Tally Mandiri, dan Depo Peti Kemas dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik						64.967.000,00								-	Dinas Perhubungan

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode RPJMD	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2020	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RKPD TAHUN 2021	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2023		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2022	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Terlaksananya Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Usaha Jasa Terkait Berupa Bongkar Muat Barang, Jasa Pengurusan Transportasi, Angkutan Perairan Pelabuhan, Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan Jasa Terkait dengan Angkutan Laut, Tally Mandiri, dan Depo Peti Kemas dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Paket)				*1*		*(22 kabupate/Kota, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*1*		
		Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Jasa Terkait Berupa Bongkar Muat Barang, Jasa Pengurusan Transportasi, Angkutan Perairan Pelabuhan, Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan Jasa Terkait dengan Angkutan Laut, Tally Mandiri, dan Depo Peti Kemas						238.627.220,00							-	Dinas Perhubungan
			Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Jasa Terkait Berupa Bongkar Muat Barang, Jasa Pengurusan Transportasi, Angkutan Perairan Pelabuhan, Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan Jasa Terkait dengan Angkutan Laut, Tally Mandiri, dan Depo Peti Kemas (Paket)				*1*		*(22 Kabupaten/Kota, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*1*		
	2.15.2-15.0-0.0-0.01.03.1.07	Penetapan Tarif Angkutan Penyeberangan Penumpang Kelas Ekonomi dan Kendaraan Beserta Muatannya pada Lintas Penyeberangan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi						45.672.000,00			Tidak	Tidak			-	Dinas Perhubungan
		Pengendalian dan Pengawasan Tarif Angkutan Penyeberangan Penumpang Kelas Ekonomi dan Kendaraan Beserta Muatannya pada Lintas Penyeberangan antar Daerah Kabupaten/Kota						45.672.000,00							-	Dinas Perhubungan
			Terlaksananya Pengendalian dan Pengawasan Tarif Angkutan Penyeberangan Penumpang Kelas Ekonomi dan Kendaraan Beserta Muatannya pada Lintas Penyeberangan antar Daerah Kabupaten/Kota (Paket)				*1*		*(22 Kabupaten/Kota, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*1*		
	2.15.2-15.0-0.0-0.01.03.1.08	Penetapan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Regional						101.112.500,00			Tidak	Tidak			-	Dinas Perhubungan
		Pengendalian Pelaksanaan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Regional						101.112.500,00							-	Dinas Perhubungan
			Terlaksananya Pengendalian Pelaksanaan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Regional (Paket)				*1*		*(22 Kabupaten/Kota, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*1*		
	2.15.2-15.0-0.0-0.01.03.1.09	Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional						14.879.404.209,00		Dana Perimbangan	Tidak	Tidak			-	Dinas Perhubungan

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode RPJMD	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2020	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RKPD TAHUN 2021	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2023		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2022	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		Pembangunan Pelabuhan Pengumpan Regional						4.723.378.000,00		Dana Perimbangan					-	Dinas Perhubungan
			Terlaksananya Pembangunan Pelabuhan Pengumpan Regional (Paket)				*1*		*(22 Kabupaten/Kota, NUSA TENGGARA TIMUR)*	*Dana Perimbangan*				*1*		
		Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Pengumpan Regional						9.264.606.709,00		Dana Perimbangan					-	Dinas Perhubungan
			Terlaksananya Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Pengumpan Regional (Paket)				*1*		*(22 kabupaten/kota, NUSA TENGGARA TIMUR)*	*Dana Perimbangan*				*1*		
		Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional						891.419.500,00							-	Dinas Perhubungan
			Terlaksananya Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional (Paket)				*1*		*(22 Kabupaten/kota, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*1*		
	2.15.2-15.0-0.0-0.01.03.1.12	Penerbitan Izin Pengembangan Pelabuhan untuk Pelabuhan Pengumpan Regional						73.832.500,00			Tidak	Tidak			-	Dinas Perhubungan
		Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Pengembangan Pelabuhan untuk Pelabuhan Pengumpan Regional dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik						73.832.500,00							-	Dinas Perhubungan
			Terlaksananya Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Pengembangan Pelabuhan untuk Pelabuhan Pengumpan Regional dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Paket)				*1*		*(22 Kabupaten/kota, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*1*		
	2.15.2-15.0-0.0-0.01.03.1.13	Penerbitan Izin Pengoperasian Pelabuhan Selama 24 Jam untuk Pelabuhan Pengumpan Regional						101.192.500,00			Tidak	Tidak			-	Dinas Perhubungan
		Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Pengoperasian Pelabuhan Selama 24 Jam Untuk Pelabuhan Pengumpan Regional						101.192.500,00							-	Dinas Perhubungan
			Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Pengoperasian Pelabuhan Selama 24 Jam Untuk Pelabuhan Pengumpan Regional (Paket)				*1*		*(22 Kabupaten/kota, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*1*		
	2.15.2-15.0-0.0-0.01.03.1.14	Penerbitan Izin Pekerjaan Pengerukan di Wilayah Perairan Pelabuhan Pengumpan Regional						89.700.000,00			Tidak	Tidak			-	Dinas Perhubungan
		Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Pekerjaan Pengerukan di Wilayah Perairan Pelabuhan Pengumpan Regional						89.700.000,00							-	Dinas Perhubungan
			Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Pekerjaan Pengerukan di Wilayah Perairan Pelabuhan Pengumpan Regional (Paket)				*1*		*(22 Kabupaten/kota, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*1*		
	2.15.2-15.0-0.0-0.01.03.1.16	Penerbitan Izin Pengelolaan Terminal untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) di dalam DLKR/DLKP Pelabuhan Pengumpan Regional						325.026.000,00			Tidak	Tidak			-	Dinas Perhubungan

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode RPJMD	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2020	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RKPD TAHUN 2021	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2023		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2022	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Pengelolaan Terminal untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) di Dalam DLKR/DLKP Pelabuhan Pengumpan Regional						325.026.000,00							-	Dinas Perhubungan
			terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Pengelolaan Terminal untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) di Dalam DLKR/DLKP Pelabuhan Pengumpan Regional				*1*		*(22 kabupate/Kota, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*1*		
4.	**2.15.2-15.0-0.0-0.01.05**	**PROGRAM PENGELOLAAN PERKERETAAPIAN**						**1.300.044.000,00**			**Ya**	**Ya**			**0,00**	**Dinas Perhubungan**
			Meningkatnya perencanaan kapasitas mobilisasi orang dan distribusi barang serta terpenuhinya kebutuhan pertahanan keamanan di kawasan perbatasan (%)				***100***									
	2.15.2-15.0-0.0-0.01.05.1.01	Penetapan Rencana Induk Perkeretaapian						1.300.044.000,00			Tidak	Tidak			-	Dinas Perhubungan
		Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Perkeretaapian						1.300.044.000,00							-	Dinas Perhubungan
			Terlaksananya Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Perkeretaapian (Paket)				*1*		*(22 Kabupaten/kota, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*1*		
	2.16	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**						**17.256.545.860,00**							**0,00**	
1.	**2.16.2-16.0-0.0-0.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**						**10.580.545.860,00**			**Tidak**	**Tidak**			**0,00**	**Dinas Komunikasi dan Informatika**
			Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran yang berkualitas (%)				***100***									
			Meningkatnya sarana dan prasarana (%)				***100***									
			Tercapainya penyusunan capaian kinerja ikhtisar realisasi kinerja dan keuangan (%)				***100***									
	2.16.2-16.0-0.0-0.01.01.1.01	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						112.000.000,00			Tidak	Tidak			-	Dinas Komunikasi dan Informatika
			Terlaksananya Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (%)				*100*		*(22 Kab/Kota, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*100*		
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD						10.000.000,00							-	Dinas Komunikasi dan Informatika
			Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Paket)				*1*		*(Kota Kupang, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*1*		
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD						7.000.000,00							-	Dinas Komunikasi dan Informatika
			Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Paket)				*1*		*(Kota Kupang, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*1*		

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode RPJMD	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2020	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RKPD TAHUN 2021	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2023		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2022	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD						10.000.000,00							-	Dinas Komunikasi dan Informatika
			Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD (Paket)				*1*		*(Kota Kupang, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*1*		
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD						15.000.000,00							-	Dinas Komunikasi dan Informatika
			Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Paket)				*1*		*(KOta Kupang, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*1*		
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						70.000.000,00							-	Dinas Komunikasi dan Informatika
			Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Paket)				*1*		*(Kota Kupang, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*1*		
	2.16.2-16.0-0.0-0.01.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						8.810.000.000,00			Tidak	Tidak			-	Dinas Komunikasi dan Informatika
			Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah (%)				*100*		*(22 Kab/ Kota, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*100*		
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						8.700.000.000,00							-	Dinas Komunikasi dan Informatika
			Terlaksananya Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN (Paket)				*1*		*(Kota Kupang, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*1*		
		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD						100.000.000,00							-	Dinas Komunikasi dan Informatika
			Terlaksananya Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Paket)				*1*		*(Kota Kupang, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*1*		
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD						10.000.000,00							-	Dinas Komunikasi dan Informatika
			terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Paket)				*1*		*(kota kupang, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*1*		
	2.16.2-16.0-0.0-0.01.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						150.000.000,00			Tidak	Tidak			-	Dinas Komunikasi dan Informatika
			Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah (%)				*100*		*(22 Kab/Kota, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*100*		
		Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai						50.000.000,00							-	Dinas Komunikasi dan Informatika
			Terlaksananya Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai (Paket)				*1*		*(Kota Kupang, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*1*		
		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi						100.000.000,00							-	Dinas Komunikasi dan Informatika
			Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi (Paket)				*1*		*(Kota Kupang, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*1*		
	2.16.2-16.0-0.0-0.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						521.000.000,00			Tidak	Tidak			-	Dinas Komunikasi dan Informatika
			Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah (%)				*100*		*(22 Kab/Kota, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*100*		
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor						70.000.000,00							-	Dinas Komunikasi dan Informatika

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode RPJMD	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2020	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RKPD TAHUN 2021	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2023		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2022	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Terlaksananya Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor (Paket)				*1*		*(Kota Kupang, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*1*		
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						50.000.000,00								- Dinas Komunikasi dan Informatika
			Terlaksananya Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor (Paket)				*1*		*(Kota Kupang, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*1*		
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						47.000.000,00								- Dinas Komunikasi dan Informatika
			Terlaksananya Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan (Paket)				*1*		*(Kota Kuapng, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*1*		
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan						7.000.000,00								- Dinas Komunikasi dan Informatika
			Terlaksananya Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan (Paket)				*1*		*(Kota Kupang, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*1*		
		Penyediaan Bahan/Material						70.000.000,00								- Dinas Komunikasi dan Informatika
			Terlaksananya Penyediaan Bahan/Material (Paket)				*1*		*(Kota Kuapng, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*1*		
		Fasilitasi Kunjungan Tamu						17.000.000,00								- Dinas Komunikasi dan Informatika
			Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu (Paket)				*1*		*(Kota Kuapng, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*1*		
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						150.000.000,00								- Dinas Komunikasi dan Informatika
			Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Paket)				*1*		*(Kota Kupang, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*1*		
		Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD						10.000.000,00								- Dinas Komunikasi dan Informatika
			Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Paket)				*1*		*(Kota Kuapng, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*1*		
		Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD						100.000.000,00								- Dinas Komunikasi dan Informatika
			Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Paket)				*1*		*(Kota Kupanng, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*1*		
	2.16.2-16.0-0.0-0.01.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						200.000.000,00			Tidak	Tidak				- Dinas Komunikasi dan Informatika
			Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (%)				*100*		*(22 Kab/Kota, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*100*		
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya						200.000.000,00								- Dinas Komunikasi dan Informatika
			Terlaksnanya Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya (Paket)				*1*		*(Kota Kupang, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*1*		
	2.16.2-16.0-0.0-0.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						485.000.000,00			Tidak	Tidak				- Dinas Komunikasi dan Informatika
			Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%)				*100*		*(22 Kab/Kota , NUSA TENGGARA TIMUR)*					*100*		

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode RPJMD	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2020	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RKPD TAHUN 2021	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2023		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2022	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat						15.000.000,00							-	Dinas Komunikasi dan Informatika
			Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Paket)				*1*		*(Kota Kuapng, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*1*		
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						150.000.000,00							-	Dinas Komunikasi dan Informatika
			Terlaksananya Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik (Paket)				*1*		*(Kota Kupang, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*1*		
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						320.000.000,00							-	Dinas Komunikasi dan Informatika
			Terlaksananya Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (Paket)				*1*		*(Kota Kupang, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*1*		
	2.16.2-16.0-0.0-0.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						302.545.860,00			Tidak	Tidak			-	Dinas Komunikasi dan Informatika
			Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%)				*100*		*(22 Kab/Kota, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*100*		
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						112.545.860,00							-	Dinas Komunikasi dan Informatika
			Terlaksananya Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan (Paket)				*1*		*(Kota Kupang, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*1*		
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						100.000.000,00							-	Dinas Komunikasi dan Informatika
			Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya (Paket)				*1*		*(Kota Kupang, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*1*		
		Pemeliharaan Aset Tak Berwujud						10.000.000,00							-	Dinas Komunikasi dan Informatika
			Terlaksananya Pemeliharaan Aset Tak Berwujud (Paket)				*1*		*(Kota Kupang, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*1*		
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya						80.000.000,00							-	Dinas Komunikasi dan Informatika
			terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya (Paket)				*1*		*(Kota Kupang, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*1*		
2.	**2.16.2-16.0-0.0-0.01.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK**						**471.000.000,00**			**Ya**	**Ya**			**0,00**	**Dinas Komunikasi dan Informatika**
			Persentase Peningkatan Skor keterbukaan informasi publik (%)				***85***									
			Persentase Kelengkapan Informasi Publik pada Kawasan Pariwisata Estate (%)				***68,2***									
	2.16.2-16.0-0.0-0.01.02.1.01	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi						471.000.000,00		Dana Perimbangan	Tidak	Tidak			-	Dinas Komunikasi dan Informatika
			Terlaksananya Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi (%)				*100*		*(22 kab/kota, NUSA TENGGARA TIMUR)*	*Dana Perimbangan*				*100*		

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode RPJMD	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2020	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RKPD TAHUN 2021	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2023		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2022	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		Perumusan Kebijakan Teknis Bidang Informasi dan Komunikasi Publik						50.000.000,00		Dana Perimbangan					-	Dinas Komunikasi dan Informatika
			Terlksananya Perumusan Kebijakan Teknis Bidang Informasi dan Komunikasi Publik (Paket)				*1*		*(22 Kabupaten/kota, NUSA TENGGARA TIMUR)*	*Dana Perimbangan*				*1*		
		Monitoring Opini dan Aspirasi Publik						50.000.000,00		Dana Perimbangan					-	Dinas Komunikasi dan Informatika
			Terlaksananya Monitoring Opini dan Aspirasi Publik (Paket)				*1*		*(22 kabupaten /kota, NUSA TENGGARA TIMUR)*	*Dana Perimbangan*				*1*		
		Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik						61.000.000,00							-	Dinas Komunikasi dan Informatika
			terlaksananya Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik (Paket)				*1*		*(22 kabupaten/Kota, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*1*		
		Pengelolaan Media Komunikasi Publik						30.000.000,00		Dana Perimbangan					-	Dinas Komunikasi dan Informatika
			Terlaksananya Pengelolaan Media Komunikasi Publik (Paket)				*1*		*(22 Kabupaten/kota, NUSA TENGGARA TIMUR)*	*Dana Perimbangan*				*1*		
		Pelayanan Informasi Publik						100.000.000,00		Dana Perimbangan					-	Dinas Komunikasi dan Informatika
			Terlaksananya Pelayanan Informasi Publik (Paket)				*1*		*(22 Kabupaten/Kota, NUSA TENGGARA TIMUR)*	*Dana Perimbangan*				*1*		
		Layanan Hubungan Media						75.000.000,00							-	Dinas Komunikasi dan Informatika
			Terlaksananya Layanan Hubungan Media (Paket)				*1*		*(22 KAbupaten /Kota, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*1*		
		Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik						20.000.000,00		Dana Perimbangan					-	Dinas Komunikasi dan Informatika
			Terlaksananya Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik (Paket)				*1*		*(22 Kabuapten/Kota, NUSA TENGGARA TIMUR)*	*Dana Perimbangan*				*1*		
		Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas						85.000.000,00		Dana Perimbangan					-	Dinas Komunikasi dan Informatika
			terlaksananya 250.000.000,00 (Paket)				*1*		*(22 Kabupaten/Kota, NUSA TENGGARA TIMUR)*	*Dana Perimbangan*				*1*		
3.	**2.16.2-16.0-0.0-0.01.03**	**PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA**						**6.205.000.000,00**			**Ya**	**Ya**			**0,00**	**Dinas Komunikasi dan Informatika**
			eningkatnya Indeks Penyelenggaraan SPBE (%)				***2,5***			***Dana Perimbangan***						
	2.16.2-16.0-0.0-0.01.03.1.01	Pengelolaan Nama Domain yang Telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi						495.000.000,00			Tidak	Tidak			-	Dinas Komunikasi dan Informatika
		Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi						175.000.000,00							-	Dinas Komunikasi dan Informatika
			terlaksananya Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi (Paket)				*1*		*(22 Kabupaten/kota, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*1*		
		Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah						320.000.000,00							-	Dinas Komunikasi dan Informatika

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode RPJMD	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2020	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RKPD TAHUN 2021	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2023		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2022	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Terlaksananya Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah (Paket)				*1*		*(22 Kabupaten/Kota, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*1*		
	2.16.2-16.0-0.0-0.01.03.1.02	Pengelolaan e-government di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi						5.710.000.000,00		Dana Perimbangan	Tidak	Tidak			-	Dinas Komunikasi dan Informatika
		Penatalaksanaan dan Pengawasan e-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi						155.000.000,00		Dana Perimbangan					-	Dinas Komunikasi dan Informatika
			Terlaksananya Penatalaksanaan dan Pengawasan e-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi (Paket)				*1*		*(22 Kabupaten/Kota, NUSA TENGGARA TIMUR)*	*Dana Perimbangan*				*1*		
		Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik						10.000.000,00		Dana Perimbangan					-	Dinas Komunikasi dan Informatika
			Terlaksananya Sinkronisasi Pengelolaan Rencana induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik (Paket)				*1*		*(22 Kabupaten/kota, NUSA TENGGARA TIMUR)*	*Dana Perimbangan*				*1*		
		Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah						160.000.000,00		Dana Perimbangan					-	Dinas Komunikasi dan Informatika
			Terlaksananya Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah (Paket)				*1*		*(22 Kabupaten/kota, NUSA TENGGARA TIMUR)*	*Dana Perimbangan*				*1*		
		Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik						750.000.000,00							-	Dinas Komunikasi dan Informatika
			Terlaksananya Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik (Paket)				*1*		*(22 Kbupaten/kota, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*1*		
		Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Provinsi Cerdas dan Kota Cerdas						50.000.000,00		Dana Perimbangan					-	Dinas Komunikasi dan Informatika
			Terlaksananya Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Provinsi Cerdas dan Kota Cerdas (Paket)				*1*		*(22 KAbuapten/kota, NUSA TENGGARA TIMUR)*	*Dana Perimbangan*				*1*		
		Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah						4.565.000.000,00		Dana Perimbangan					-	Dinas Komunikasi dan Informatika
			Terlaksananya Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah (Paket)				*1*		*(22 KAbuapten/Kota, NUSA TENGGARA TIMUR)*	*Dana Perimbangan*				*1*		
		Pengelolaan Government Chief Information Officer (GCIO)						20.000.000,00		Dana Perimbangan					-	Dinas Komunikasi dan Informatika
			Terlaksananya Pengelolaan Government Chief Information Officer (GCIO) (Paket)				*1*		*(22 Kabupaten/Kota, NUSA TENGGARA TIMUR)*	*Dana Perimbangan*				*1*		
	2.17	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH**						**36.601.816.000,00**							**0,00**	
1.	**2.17.2-17.3-32.2-7.16.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**						**25.409.816.000,00**			**Tidak**	**Tidak**			**0,00**	**Dinas Koperasi,Tenaga kerja dan Transmigrasi**

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode RPJMD	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2020	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RKPD TAHUN 2021	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2023		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2022	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran yang berkualitas				***100***			***Dana Perimbangan***						
	2.17.2-17.3-32.2-7.16.01.1.01	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						885.000.000,00			Tidak	Tidak			-	Dinas Koperasi,Tenaga kerja dan Transmigrasi
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						235.000.000,00							-	Dinas Koperasi,Tenaga kerja dan Transmigrasi
			Terlaksananya Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Paket)				*1*		*(22 Kabupaten/Kota, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*1*		
		Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD						375.000.000,00							-	Dinas Koperasi,Tenaga kerja dan Transmigrasi
			Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD (Paket)				*1*		*(22 Kabupaten/Kota, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*1*		
		Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD						125.000.000,00							-	Dinas Koperasi,Tenaga kerja dan Transmigrasi
			Terlaksanya Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD (Paket)				*1*		*(22 Kabupaten/Kota, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*1*		
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD						150.000.000,00							-	Dinas Koperasi,Tenaga kerja dan Transmigrasi
			Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Paket)				*1*		*(22 Kabupaten/Kota, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*1*		
	2.17.2-17.3-32.2-7.16.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						21.834.816.000,00			Tidak	Tidak			-	Dinas Koperasi,Tenaga kerja dan Transmigrasi
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						21.619.816.000,00							-	Dinas Koperasi,Tenaga kerja dan Transmigrasi
			Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN (Paket)				*1*		*(22 Kabupaten/Kota, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*1*		
		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN						25.000.000,00							-	Dinas Koperasi,Tenaga kerja dan Transmigrasi
			Terlaksnanya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Paket)				*1*		*(22 Kabupaten/Kota, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*1*		
		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD						10.000.000,00							-	Dinas Koperasi,Tenaga kerja dan Transmigrasi
			Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Paket)				*1*		*(22 Kabupaten/Kota, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*1*		
		Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan						35.000.000,00							-	Dinas Koperasi,Tenaga kerja dan Transmigrasi

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode RPJMD	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2020	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RKPD TAHUN 2021	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2023		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2022	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Terlaksananya Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan (Paket)				*1*		*(22 Kabupaten/Kota, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*1*		
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD						125.000.000,00							-	Dinas Koperasi,Tenaga kerja dan Transmigrasi
			Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Paket)				*1*		*(22 Kabupaten/Kota, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*1*		
		Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran						20.000.000,00							-	Dinas Koperasi,Tenaga kerja dan Transmigrasi
			Terlaksananya Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (Paket)				*1*		*(22 Kabupaten/Kota, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*1*		
	2.17.2-17.3-32.2-7.16.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						75.000.000,00			Tidak	Tidak			-	Dinas Koperasi,Tenaga kerja dan Transmigrasi
		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi						75.000.000,00							-	Dinas Koperasi,Tenaga kerja dan Transmigrasi
			Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi (Paket)				*1*		*(22 Kabupaten/Kota, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*1*		
	2.17.2-17.3-32.2-7.16.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						335.000.000,00			Tidak	Tidak			-	Dinas Koperasi,Tenaga kerja dan Transmigrasi
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor						10.000.000,00							-	Dinas Koperasi,Tenaga kerja dan Transmigrasi
			Terlaksananya Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor (Paket)				*1*		*(Kota Kupang, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*1*		
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						35.000.000,00							-	Dinas Koperasi,Tenaga kerja dan Transmigrasi
			Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan (Paket)				*1*		*(Kota Kupang, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*1*		
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan						5.000.000,00							-	Dinas Koperasi,Tenaga kerja dan Transmigrasi
			Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan (Paket)				*1*		*(Kota Kupang, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*1*		
		Penyediaan Bahan/Material						50.000.000,00							-	Dinas Koperasi,Tenaga kerja dan Transmigrasi
			Tersedianya Bahan/Material (Paket)				*1*		*(Kota Kupang, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*1*		

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode RPJMD	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2020	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RKPD TAHUN 2021	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2023		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2022	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						235.000.000,00								- Dinas Koperasi, Tenaga kerja dan Transmigrasi
			Terlaksannya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Paket)				*1*		*(Kota Kupang, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*1*		
	2.17.2-17.3-32.2-7.16.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						230.000.000,00			Tidak	Tidak				- Dinas Koperasi, Tenaga kerja dan Transmigrasi
		Pengadaan Mebel						75.000.000,00								- Dinas Koperasi, Tenaga kerja dan Transmigrasi
			Terlaksananya Pengadaan Mebel (Paket)				*1*		*(Kota Kupang, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*1*		
		Pengadaan Aset Tetap Lainnya						155.000.000,00								- Dinas Koperasi, Tenaga kerja dan Transmigrasi
			Terlaksannya Pengadaan Aset Tetap Lainnya (Paket)				*1*		*(Kota Kupang, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*1*		
	2.17.2-17.3-32.2-7.16.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						1.630.000.000,00			Tidak	Tidak				- Dinas Koperasi, Tenaga kerja dan Transmigrasi
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat						10.000.000,00								- Dinas Koperasi, Tenaga kerja dan Transmigrasi
			Tersedianya Jasa Surat Menyurat (Paket)				*1*		*(Kota Kupang, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*1*		
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						350.000.000,00								- Dinas Koperasi, Tenaga kerja dan Transmigrasi
			Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik (Paket)				*1*		*(Kota Kupang, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*1*		
		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor						30.000.000,00								- Dinas Koperasi, Tenaga kerja dan Transmigrasi
			Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor (Paket)				*1*		*(Kota Kupang, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*1*		
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						1.240.000.000,00								- Dinas Koperasi, Tenaga kerja dan Transmigrasi
			Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor (Paket)				*1*		*(Kota Kupang, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*1*		
	2.17.2-17.3-32.2-7.16.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						420.000.000,00			Tidak	Tidak				- Dinas Koperasi, Tenaga kerja dan Transmigrasi
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						200.000.000,00								- Dinas Koperasi, Tenaga kerja dan Transmigrasi

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode RPJMD	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2020	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RKPD TAHUN 2021	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2023		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2022	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan (Paket)				*1*		*(Kota Kupang, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*1*		
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						220.000.000,00							-	Dinas Koperasi,Tenaga kerja dan Transmigrasi
			Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya (Paket)				*1*		*(Kota Kupang, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*1*		
2.	**2.17.2-17.3-32.2-7.16.02**	**PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM**						**7.692.000.000,00**			**Ya**	**Ya**			**0,00**	**Dinas Koperasi,Tenaga kerja dan Transmigrasi**
			Persentase Koperasi aktif (%)				***100***									
	2.17.2-17.3-32.2-7.16.02.1.01	Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi						7.692.000.000,00			Tidak	Tidak			-	Dinas Koperasi,Tenaga kerja dan Transmigrasi
		Fasilitasi Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi Dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi						7.692.000.000,00							-	Dinas Koperasi,Tenaga kerja dan Transmigrasi
			Terlaksananya Fasilitasi Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi Dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi (Paket)				*1*		*(22 Kabupaten/Kota, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*1*		
3.	**2.17.2-17.3-32.2-7.16.03**	**PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI**						**0,00**			**Tidak**	**Tidak**			**0,00**	**Dinas Koperasi,Tenaga kerja dan Transmigrasi**
	2.17.2-17.3-32.2-7.16.03.1.01	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi						-			Tidak	Tidak			-	Dinas Koperasi,Tenaga kerja dan Transmigrasi
		Meningkatkan Akuntabilitas, Kepercayaan, Kepatuhan, Kesinambungan, dan Memberikan Manfaat yang Sebesar-Besarnya ke pada Anggota dan Masyarakat						-							-	Dinas Koperasi,Tenaga kerja dan Transmigrasi
			Terlaksananya Meningkatkan Akuntabilitas, Kepercayaan, Kepatuhan, Kesinambungan, dan Memberikan Manfaat yang Sebesar-Besarnya ke pada Anggota dan Masyarakat (Paket)				*1*		*(22 Kabupaten/Kota, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*1*		
4.	**2.17.2-17.3-32.2-7.16.05**	**PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN**						**0,00**			**Tidak**	**Tidak**			**0,00**	**Dinas Koperasi,Tenaga kerja dan Transmigrasi**
	2.17.2-17.3-32.2-7.16.05.1.02	Pendidikan dan Latihan UKM bagi UKM yang Wilayah Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi						-			Tidak	Tidak			-	Dinas Koperasi,Tenaga kerja dan Transmigrasi

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode RPJMD	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2020	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RKPD TAHUN 2021	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2023		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2022	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UKM						-							-	Dinas Koperasi,Tenaga kerja dan Transmigrasi
			Terlaksananya Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UKM (Paket)				*1*		*(22 Kabupaten/Kota, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*1*		
5.	**2.17.2-17.3-32.2-7.16.06**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI**						**0,00**			**Tidak**	**Tidak**			**0,00**	**Dinas Koperasi,Tenaga kerja dan**
	2.17.2-17.3-32.2-7.16.06.1.01	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi						-			Tidak	Tidak			-	Dinas Koperasi,Tenaga kerja dan Transmigrasi
		Perluasan Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha						-							-	Dinas Koperasi,Tenaga kerja dan Transmigrasi
			Terlaksananya Perluasan Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha (Paket)				*1*		*(22 Kabupaten/Kota, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*1*		
6.	**2.17.2-17.3-32.2-7.16.07**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)**						**3.500.000.000,00**			**Ya**	**Ya**			**0,00**	**Dinas Koperasi,Tenaga kerja dan**
			Persentase Peningkatan Nilai Transaksi UMK (%)				***100***									
	2.17.2-17.3-32.2-7.16.07.1.01	Pemberdayaan Usaha Kecil yang dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi Dengan Para Pemangku Kepentingan						3.500.000.000,00			Tidak	Tidak			-	Dinas Koperasi,Tenaga kerja dan Transmigrasi
		Menumbuhkembangkan UMKM untuk menjadi Usaha yang Tangguh dan Mandiri sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan						3.500.000.000,00							-	Dinas Koperasi,Tenaga kerja dan Transmigrasi
			Terlaksananya Menumbuhkembangkan UMKM untuk menjadi Usaha yang Tangguh dan Mandiri sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan				*1*		*(22 Kabupaten/Kota, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*1*		
7.	**2.17.2-17.3-32.2-7.16.08**	**PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM**						**0,00**			**Tidak**	**Tidak**			**0,00**	**Dinas Koperasi,Tenaga kerja dan**
	2.17.2-17.3-32.2-7.16.08.1.01	Pengembangan Usaha Kecil Dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Menengah						-			Tidak	Tidak			-	Dinas Koperasi,Tenaga kerja dan Transmigrasi
		Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi						-							-	Dinas Koperasi,Tenaga kerja dan Transmigrasi

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode RPJMD	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2020	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RKPD TAHUN 2021	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2023		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2022	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Terlaksananya Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi (Paket)				*1*		*(Kota Kupang, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*1*		
	2.18	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL**						**14.485.043.994,00**							**0,00**	
1.	**2.18.2-18.0-0.0-0.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**						**10.250.043.994,00**			**Tidak**	**Tidak**			**0,00**	**Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu**
			Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran yang berkualitas				***100***									
	2.18.2-18.0-0.0-0.01.01.1.01	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						296.149.040,00			Tidak	Tidak			-	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						67.193.120,00							-	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
			terlaksananya Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (paket)				*1*		*(22kab/kota, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*1*		
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD						4.301.180,00							-	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
			terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (paket)				*1*		*(22kab/kota, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*1*		
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD						3.409.400,00							-	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
			terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (paket)				*1*		*(22kab/kota, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*1*		
		Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD						3.417.380,00							-	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
			terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD (paket)				*1*		*(22kab/kota, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*1*		
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD						9.799.600,00							-	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
			terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (paket)				*1*		*(22kab/kota, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*1*		
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						208.028.360,00							-	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
			terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (paket)				*1*		*(22kab/kota, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*1*		
	2.18.2-18.0-0.0-0.01.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						7.915.034.694,00			Tidak	Tidak			-	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						7.899.036.014,00							-	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode RPJMD	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2020	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RKPD TAHUN 2021	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2023		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2022	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			terlaksananya Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN (paket)				*1*		*(22kab/kota, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*1*		
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD						4.096.900,00								- Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
			terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (paket)				*1*		*(22kab/kota, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*1*		
		Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran						11.901.780,00								- Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
			terlaksananya Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (paket)				*1*		*(kota kupang, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*1*		
	2.18.2-18.0-0.0-0.01.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah						3.923.200,00			Tidak	Tidak				- Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
		Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD						3.923.200,00								- Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
			terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (paket)				*1*		*(22kab/kota, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*1*		
	2.18.2-18.0-0.0-0.01.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						330.999.500,00		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Tidak	Tidak				- Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
		Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian						3.500.000,00		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum						- Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
			terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (paket)				*1*		*(22kab/kota, NUSA TENGGARA TIMUR)*	*Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum*				*1*		
		Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian						1.499.520,00								- Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
			terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian (paket)				*1*		*(kota kupang, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*1*		
		Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai						1.999.980,00								- Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
			terlaksananya Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai (paket)				*1*		*(22kab/kota, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*1*		
		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi						270.000.000,00		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum						- Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
			terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi (paket)				*1*		*(22kab/kota, NUSA TENGGARA TIMUR)*	*Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum*				*1*		
		Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan						50.000.000,00								- Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
			terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan (paket)				*1*		*(kota kupang, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*1*		
		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan						4.000.000,00								- Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode RPJMD	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2020	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RKPD TAHUN 2021	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2023		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2022	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (paket)				*1*		*(kota kupang, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*1*		
	2.18.2-18.0-0.0-0.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						707.937.560,00		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Tidak	Tidak			-	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor						7.600.000,00							-	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
			terlaksananya Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor (paket)				*1*		*(22kab/kota, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*1*		
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						18.000.000,00		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum					-	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
			terlaksananya Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor (paket)				*1*		*(22kab/kota, NUSA TENGGARA TIMUR)*	*Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum*				*1*		
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						73.000.000,00		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum					-	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
			terlaksananya Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan (paket)				*1*		*(22kab/kota, NUSA TENGGARA TIMUR)*	*Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum*				*1*		
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan						9.000.000,00		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum					-	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
			terlaksananya Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan (paket)				*1*		*(22kab/kota, NUSA TENGGARA TIMUR)*	*Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum*				*1*		
		Penyediaan Bahan/Material						57.000.000,00		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum					-	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
			terlaksananya Penyediaan Bahan/Material (paket)				*1*		*(22kab/kota, NUSA TENGGARA TIMUR)*	*Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum*				*1*		
		Fasilitasi Kunjungan Tamu						21.300.000,00		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum					-	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
			terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu (paket)				*1*		*(22kab/kota, NUSA TENGGARA TIMUR)*	*Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum*				*1*		
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						465.000.000,00		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum					-	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
			terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (paket)				*1*		*(22kab/kota, NUSA TENGGARA TIMUR)*	*Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum*				*1*		
		Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD						2.037.560,00							-	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
			terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (paket)				*1*		*(22kab/kota, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*1*		
		Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD						55.000.000,00		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum					-	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
			terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (paket)				*1*		*(22kab/kota, NUSA TENGGARA TIMUR)*	*Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum*				*1*		

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode RPJMD	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2020	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RKPD TAHUN 2021	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2023		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2022	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.18.2-18.0-0.0-0.01.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						90.000.000,00		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Tidak	Tidak				Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
		Pengadaan Mebel						40.000.000,00		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum						Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
			terlaksananya Pengadaan Mebel (paket)				*1*			*Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum*				*0*		
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya						50.000.000,00		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum						Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
			terlaksananya Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya (paket)				*1*			*Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum*				*0*		
	2.18.2-18.0-0.0-0.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						809.000.000,00		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Tidak	Tidak				Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat						9.000.000,00		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum						Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
			terlaksanakannya Penyediaan Jasa Surat Menyurat (paket)				*1*		*(22kab/kota, NUSA TENGGARA TIMUR)*	*Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum*				*1*		
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						250.000.000,00		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum						Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
			terlaksananya Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik (paket)				*1*		*(22kab/kota, NUSA TENGGARA TIMUR)*	*Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum*				*1*		
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						550.000.000,00		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum						Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
			terlaksananya Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (paket)				*1*		*(terlaksananya)*	*Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum*				*0*		
	2.18.2-18.0-0.0-0.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						97.000.000,00		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Tidak	Tidak				Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						23.000.000,00		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum						Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
			terlaksananya Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan (paket)				*1*		*(22kab/kota, NUSA TENGGARA TIMUR)*	*Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum*				*1*		
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						45.000.000,00		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum						Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
			terlaksananya Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan (paket)				*1*		*(kota kupang, NUSA TENGGARA TIMUR)*	*Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum*				*1*		
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						5.000.000,00								Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
			terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya (paket)				*1*							*0*		

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode RPJMD	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2020	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RKPD TAHUN 2021	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2023		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2022	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya						9.000.000,00		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum					-	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
			terlaksananya Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya (paket)				*1*		*(22kab/kota, NUSA TENGGARA TIMUR)*	*Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum*				*1*		
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						15.000.000,00		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum					-	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
			terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya (paket)				*1*		*(kota kupang, NUSA TENGGARA TIMUR)*	*Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum*				*1*		
2.	**2.18.2-18.0-0.0-0.01.02**	**PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL**						**2.220.000.000,00**			**Ya**	**Ya**			**0,00**	**Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu**
			Persentase PMA dan PMDN yang direalisasi setiap tahun (%)				***25***			***Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum***						
	2.18.2-18.0-0.0-0.01.02.1.01	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi						120.000.000,00		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Tidak	Tidak			-	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
			TErlaksananya Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi (%)				*100*		*(22 kab/kota, NUSA TENGGARA TIMUR)*	*Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum*				*100*		
		Penetapan Kebijakan Daerah dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal						60.000.000,00		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum					-	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
			terlaksananya Penetapan Kebijakan Daerah dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal (paket)				*1*		*(22kab/kota, NUSA TENGGARA TIMUR)*	*Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum*				*1*		
		Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal						60.000.000,00		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum					-	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
			terlaksananya Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal (paket)				*1*		*(22kab/kota, NUSA TENGGARA TIMUR)*	*Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum*				*1*		
	2.18.2-18.0-0.0-0.01.02.1.02	Pembuatan Peta Potensi Investasi Provinsi						2.100.000.000,00		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Tidak	Tidak			-	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
			Terlaksananya Peta Potensi Investasi Provinsi (%)				*100*		*(22 kab/kota, NUSA TENGGARA TIMUR)*	*Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum*				*100*		
			Terlaksananya Pembuatan Peta Potensi Investasi Provinsi (%)				*100*		*(22 kab/kota, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*100*		
		Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Provinsi						100.000.000,00		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum					-	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
			terlaksanakannya Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Provinsi (paket)				*1*		*(22kab/kota, NUSA TENGGARA TIMUR)*	*Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum*				*1*		
		Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Provinsi						2.000.000.000,00							-	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
			terlaksanakannya Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Provinsi (paket)				*1*		*(22kab/kota, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*1*		

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode RPJMD	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2020	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RKPD TAHUN 2021	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2023		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2022	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
3.	**2.18.2-18.0-0.0-0.01.03**	**PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL**						**770.000.000,00**			**Ya**	**Ya**			**0,00**	**Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu**
			Program Pelayanan MOU dengan calon investor setiap tahun (%)				***66,66***									
	2.18.2-18.0-0.0-0.01.03.1.01	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi						770.000.000,00		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Tidak	Tidak			-	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
			Terlaksananya Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi (%)				*100*		*(22 kab/kota, NUSA TENGGARA TIMUR)*	*Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum*				*100*		
		Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi						560.000.000,00		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum					-	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
			terlaksananya Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi (paket)				*1*		*(22kab/kota, NUSA TENGGARA TIMUR)*	*Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum*				*1*		
		Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi						210.000.000,00		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum					-	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
			terlaksananya Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi (paket)				*1*		*(22kab/kota, NUSA TENGGARA TIMUR)*	*Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum*				*1*		
4.	**2.18.2-18.0-0.0-0.01.04**	**PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL**						**775.000.000,00**			**Ya**	**Ya**			**0,00**	**Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu**
			Persentase izin dan non izin yang diterbitkan tepat waktu sesuai SOP (%)				***100***			***Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum***						
	2.18.2-18.0-0.0-0.01.04.1.02	Penanaman Modal yang Menurut Ketentuan Peraturan Perundangan-Undangan Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi						775.000.000,00		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Tidak	Tidak			-	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
		Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik						240.000.000,00		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum					-	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
			terlaksananya Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (paket)				*1*		*(22kba/kota, NUSA TENGGARA TIMUR)*	*Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum*				*1*		
		Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal						500.000.000,00		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum					-	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
			terlaksananya Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal (paket)				*1*		*(22kab/kota, NUSA TENGGARA TIMUR)*	*Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum*				*1*		
		Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan						25.000.000,00		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum					-	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
			terlaksananya Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan (paket)				*1*		*(22kab/kota, NUSA TENGGARA TIMUR)*	*Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum*				*1*		

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode RPJMD	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2020	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RKPD TAHUN 2021	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2023		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2022	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah						10.000.000,00							-	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
			terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah (paket)				*1*		*(22kab/kota, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*1*		
5.	**2.18.2-18.0-0.0-0.01.05**	**PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL**						**320.000.000,00**			**Ya**	**Ya**			**0,00**	**Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu**
			Persentase PMA dan PMDN yang taat pada ketentuan yang berlaku (%)				***100***									
	2.18.2-18.0-0.0-0.01.05.1.01	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi						320.000.000,00		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Tidak	Tidak			-	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
		Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal						200.000.000,00		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum					-	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
			terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal (paket)				*1*		*(22kab/kota, NUSA TENGGARA TIMUR)*	*Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum*				*1*		
		Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal						50.000.000,00							-	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
			terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal (paket)				*1*		*(22kab/kota, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*1*		
		Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal						70.000.000,00		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum					-	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
			terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal (paket)				*1*		*(22kab/kota, NUSA TENGGARA TIMUR)*	*Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum*				*1*		
6.	**2.18.2-18.0-0.0-0.01.06**	**PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL**						**150.000.000,00**			**Ya**	**Ya**			**0,00**	**Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu**
			Persentase Calon Investor yang terlayani kebutuhan datanya (%)				***100***			***Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum***						
			Persentase Calon Investor yang terlayani kebutuhan informasi perijinan investasi (%)				***100***			***Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum***						
	2.18.2-18.0-0.0-0.01.06.1.01	Urusan Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Provinsi						150.000.000,00		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Tidak	Tidak			-	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
		Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik						150.000.000,00		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum					-	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
			terlaksananya Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik (paket)				*1*		*(22kab/kota, NUSA TENGGARA TIMUR)*	*Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum*				*1*		
	2.19	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA**						**24.521.653.447,00**							**0,00**	

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode RPJMD	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2020	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RKPD TAHUN 2021	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2023		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2022	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.	**2.19.2-19.0-0.0-0.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**						**15.616.653.447,00**			**Tidak**	**Tidak**			**0,00**	**Dinas Kepemudaan dan Olahraga**
			Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran yang berkualitas (%)				***100***			***Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum***						
			Meningkatnya sarana dan prasarana (%)				***100***			***Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum***						
			Tercapainya penyusunan capaian kinerja ikhtisar realisasi kinerja dan keuangan (%)				***100***			***Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum***						
	2.19.2-19.0-0.0-0.01.01.1.01	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						582.699.945,00			Tidak	Tidak			-	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
			Terlaksananya Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (%)				*100*		*(Kota Kupang, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*100*		
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						350.000.000,00							-	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
			terlaksananya Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (paket)				*1*		*(22kab/kota, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*1*		
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD						50.000.000,00							-	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
			terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (paket)				*1*		*(kota kupang, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*1*		
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD						50.000.000,00							-	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
			terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (paket)				*1*		*(kota kupang, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*1*		
		Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD						55.000.000,00							-	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
			terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD (paket)				*1*		*(kota kupang, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*1*		
		Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD						25.000.000,00							-	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
			terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD (paket)				*1*		*(kota kupang, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*1*		
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD						52.699.945,00							-	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
			terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (paket)				*1*		*(kota kupang, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*1*		
	2.19.2-19.0-0.0-0.01.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						11.234.408.000,00			Tidak	Tidak			-	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
			Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah (%)				*100*		*(Kota Kupang, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*100*		
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						11.084.408.000,00							-	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
			terlaksananya Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN (paket)				*1*		*(kota kupang, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*1*		

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode RPJMD	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2020	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RKPD TAHUN 2021	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2023		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2022	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD						50.000.000,00							-	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
			terlaksananya Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (paket)				*1*		*(kota kupang, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*1*		
		Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD						50.000.000,00							-	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
			terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD (paket)				*1*		*(kota kupang, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*1*		
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD						50.000.000,00							-	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
			terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (paket)				*1*		*(kota kupang, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*1*		
	2.19.2-19.0-0.0-0.01.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah						50.000.000,00			Tidak	Tidak			-	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
			Terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah (%)				*100*		*(Kota Kupang, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*100*		
		Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD						25.000.000,00							-	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
			terlaksananya Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD (paket)				*1*		*(kota kupang, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*1*		
		Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD						25.000.000,00							-	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
			terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (paket)				*1*		*(kota kupang, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*1*		
	2.19.2-19.0-0.0-0.01.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						100.000.000,00			Tidak	Tidak			-	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
			Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah (%)				*100*		*(Kota Kupang, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*100*		
		Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai						25.000.000,00							-	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
			terlaksananya Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai (paket)				*1*		*(kota kupang, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*1*		
		Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian						25.000.000,00							-	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
			terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (paket)				*1*		*(kota kupang, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*1*		
		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi						50.000.000,00							-	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
			terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi (paket)				*1*		*(kota kupang, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*1*		
	2.19.2-19.0-0.0-0.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						708.464.146,00			Tidak	Tidak			-	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
			Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah (%)				*100*		*(Kota Kupang, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*100*		
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor						89.587.966,00							-	Dinas Kepemudaan dan Olahraga

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode RPJMD	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2020	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RKPD TAHUN 2021	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2023		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2022	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			terlaksananya Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor (paket)				*1*		*(kota kupang, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*1*		
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						50.000.000,00								- Dinas Kepemudaan dan Olahraga
			terlaksananya Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor (paket)				*1*		*(kota kupang, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*1*		
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						38.400.000,00								- Dinas Kepemudaan dan Olahraga
			terlaksananya Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan (paket)				*1*		*(kota kupang, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*1*		
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan						5.998.400,00								- Dinas Kepemudaan dan Olahraga
			terlaksananya Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan (paket)				*1*		*(kota kupang, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*1*		
		Penyediaan Bahan/Material						37.927.780,00								- Dinas Kepemudaan dan Olahraga
			terlaksananya Penyediaan Bahan/Material (paket)				*1*		*(kota kupang, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*1*		
		Fasilitasi Kunjungan Tamu						45.550.000,00								- Dinas Kepemudaan dan Olahraga
			terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu (paket)				*1*		*(kota kupang, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*1*		
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						401.000.000,00								- Dinas Kepemudaan dan Olahraga
			terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (paket)				*1*		*(kota kupang, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*1*		
		Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD						40.000.000,00								- Dinas Kepemudaan dan Olahraga
			terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (paket)				*1*		*(kota kupang, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*1*		
	2.19.2-19.0-0.0-0.01.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						343.430.392,00			Tidak	Tidak				- Dinas Kepemudaan dan Olahraga
			Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (%)				*100*		*(Kota Kupang, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*100*		
		Pengadaan Mebel						108.900.000,00								- Dinas Kepemudaan dan Olahraga
			terlaksananya Pengadaan Mebel (paket)				*1*		*(kota kupang, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*1*		
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya						234.530.392,00								- Dinas Kepemudaan dan Olahraga
			terlaksananya Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya (paket)				*1*		*(kota kupang, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*1*		
	2.19.2-19.0-0.0-0.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						1.917.100.964,00			Tidak	Tidak				- Dinas Kepemudaan dan Olahraga
			Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%)				*100*		*(Kota Kupang, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*100*		
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat						11.890.000,00								- Dinas Kepemudaan dan Olahraga

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode RPJMD	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2020	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RKPD TAHUN 2021	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2023		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2022	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat (paket)				*1*		*(kota kupang, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*1*		
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						589.348.000,00								- Dinas Kepemudaan dan Olahraga
			terlaksananya Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik (paket)				*1*		*(kota kupang, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*1*		
		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor						115.466.864,00								- Dinas Kepemudaan dan Olahraga
			terlaksananya Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor (paket)				*1*		*(kota kupang, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*1*		
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						1.200.396.100,00								- Dinas Kepemudaan dan Olahraga
			terlaksananya Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (paket)				*1*		*(kota kupang, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*1*		
	2.19.2-19.0-0.0-0.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						680.550.000,00			Tidak	Tidak				- Dinas Kepemudaan dan Olahraga
			Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%)				*100*		*(Kota Kupang, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*100*		
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						137.000.000,00								- Dinas Kepemudaan dan Olahraga
			terlaksananya Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan (paket)				*1*		*(kota kupang, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*1*		
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						77.880.000,00								- Dinas Kepemudaan dan Olahraga
			terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya (paket)				*1*		*(kota kupang, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*1*		
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya						465.670.000,00								- Dinas Kepemudaan dan Olahraga
			terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya (paket)				*1*		*(kota kupang, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*1*		
2.	**2.19.2-19.0-0.0-0.01.02**	**PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN**						**4.015.000.000,00**			**Ya**	**Ya**			**0,00**	**Dinas Kepemudaan dan Olahraga**
			Proporsi Pertambahan Wirausaha Muda termasuk Kelompok Disabilitas dengan data terpilah gender setiap tahun (2.000 calon wirausaha muda)				***100***									
	2.19.2-19.0-0.0-0.01.02.1.01	Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Kewenangan Provinsi						3.815.000.000,00		Dana Perimbangan	Tidak	Tidak				- Dinas Kepemudaan dan Olahraga
			Terlaksananya Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Kewenangan Provinsi (%)				*100*		*(22 Kab/Kota, NUSA TENGGARA TIMUR)*	*Dana Perimbangan*				*100*		

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode RPJMD	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2020	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RKPD TAHUN 2021	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2023		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2022	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wirausaha Muda Provinsi						1.350.000.000,00		Dana Perimbangan					-	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
			terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wirausaha Muda Provinsi (paket)				*1*		*(kota kupang, NUSA TENGGARA TIMUR)*	*Dana Perimbangan*				*1*		
		Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Kader Provinsi						665.000.000,00		Dana Perimbangan					-	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
			terlaksanakannya Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Kader Provinsi (paket)				*1*		*(kota kupang, NUSA TENGGARA TIMUR)*	*Dana Perimbangan*				*1*		
		Penyelenggaraan Seleksi dan Pelatihan Pasukan Pengibar Bendera						1.800.000.000,00							-	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
			terlaksananya Penyelenggaraan Seleksi dan Pelatihan Pasukan Pengibar Bendera (paket)				*1*		*(kota kupang, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*1*		
	2.19.2-19.0-0.0-0.01.02.1.02	Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Provinsi						200.000.000,00		Dana Perimbangan	Tidak	Tidak			-	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
			Terlaksananya Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Provinsi (%)				*100*		*(22 Kab/Kota, NUSA TENGGARA TIMUR)*	*Dana Perimbangan*				*100*		
		Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepemudaan Provinsi						200.000.000,00		Dana Perimbangan					-	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
			terlaksananya Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepemudaan Provinsi (paket)				*1*		*(22kab/kota, NUSA TENGGARA TIMUR)*	*Dana Perimbangan*				*1*		
3.	**2.19.2-19.0-0.0-0.01.03**	**PROGRAM PENGEMBANGAN DAYA SAING KEOLAHRAGAAN**						**4.360.000.000,00**			**Ya**	**Ya**			**0,00**	**Dinas Kepemudaan dan Olahraga**
			Presentasi Peningkatan Perolehan Medali Cabang Olahraga Prestasi dan Paralimpik (%)				***100***			***Dana Perimbangan***						
			Medali (200 buah) (%)				***100***			***Dana Perimbangan***						
			Cabor (13 cabor) (%)				***100***			***Dana Perimbangan***						
			Cakupan pembinaan olahraga tradisional dan rekreasi untuk mendukung Pariwisata Estate, Total 7 Cabor tradisional dan 6 Cabor rekreasi				***100***			***Dana Perimbangan***						
			Cabor tradisional (%)				***100***			***Dana Perimbangan***						
			Cabor rekreasi (%)				***100***			***Dana Perimbangan***						
			Presentasi Peningkatan Perolehan Medali dari Atlit Paralimpik (Atletik, Catur, Renang) setiap dua tahun (%)				***100***			***Dana Perimbangan***						

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode RPJMD	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2020	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RKPD TAHUN 2021	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2023		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2022	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.19.2-19.0-0.0-0.01.03.1.01	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi						660.000.000,00		Dana Perimbangan	Tidak	Tidak			-	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
			Terlaksananya Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi (%)				*100*		*(22 Kab/Kota, NUSA TENGGARA TIMUR)*	*Dana Perimbangan*				*100*		
		Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Provinsi						660.000.000,00		Dana Perimbangan					-	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
			terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Provinsi (paket)				*1*		*(22kab/kota, NUSA TENGGARA TIMUR)*	*Dana Perimbangan*				*1*		
	2.19.2-19.0-0.0-0.01.03.1.02	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga						2.400.000.000,00		Dana Perimbangan	Tidak	Tidak			-	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
			Terlaksananya Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga (%)				*100*		*(22 Kab/Kota, NUSA TENGGARA TIMUR)*	*Dana Perimbangan*				*100*		
		Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Provinsi						1.100.000.000,00		Dana Perimbangan					-	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
			terlaksananya Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Provinsi (paket)				*1*		*(22kab/kota, NUSA TENGGARA TIMUR)*	*Dana Perimbangan*				*1*		
		Penyelenggaraan Kejuaraan Pekan Paralimpik Provinsi dan Pekan Paralimpik Pelajar Provinsi						200.000.000,00		Dana Perimbangan					-	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
			terlaksananya Penyelenggaraan Kejuaraan Pekan Paralimpik Provinsi dan Pekan Paralimpik Pelajar Provinsi (paket)				*1*		*(22kab/kota, NUSA TENGGARA TIMUR)*	*Dana Perimbangan*				*1*		
		Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan dalam Multi Event dan Single Event						1.100.000.000,00		Dana Perimbangan					-	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
			terlaksananya Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan dalam Multi Event dan Single Event (paket)				*1*		*(22kab/kota, NUSA TENGGARA TIMUR)*	*Dana Perimbangan*				*1*		
	2.19.2-19.0-0.0-0.01.03.1.03	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi						1.000.000.000,00		Dana Perimbangan	Tidak	Tidak			-	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
			Terlaksananya Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi (%)				*100*		*(22 Kab/Kota, NUSA TENGGARA TIMUR)*	*Dana Perimbangan*				*100*		
		Seleksi Atlet Daerah						650.000.000,00		Dana Perimbangan					-	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
			terlaksananya Seleksi Atlet Daerah (paket)				*1*		*(22kab/kota, NUSA TENGGARA TIMUR)*	*Dana Perimbangan*				*1*		
		Pemusatan Latihan Daerah, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science)						300.000.000,00		Dana Perimbangan					-	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
			terlaksananya Pemusatan Latihan Daerah, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science) (paket)				*1*		*(22kab/kota, NUSA TENGGARA TIMUR)*	*Dana Perimbangan*				*1*		
		Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Data dan Informasi Sektoral Olahraga						50.000.000,00		Dana Perimbangan					-	Dinas Kepemudaan dan Olahraga

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode RPJMD	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2020	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RKPD TAHUN 2021	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2023		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2022	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Data dan informasi Sektoral Olahraga (paket)				*1*		*(22kab/kota, Luar Wilayah)*	*Dana Perimbangan*				*1*		
	2.19.2-19.0-0.0-0.01.03.1.04	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga						300.000.000,00		Dana Perimbangan	Tidak	Tidak				- Dinas Kepemudaan dan Olahraga
			Terlaksananya Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga (%)				*100*		*(22 Kab/Kota, NUSA TENGGARA TIMUR)*	*Dana Perimbangan*				*100*		
		Standardisasi Organisasi Keolahragaan						50.000.000,00		Dana Perimbangan						- Dinas Kepemudaan dan Olahraga
			terlaksananya Standardisasi Organisasi Keolahragaan (paket)				*1*		*(22kab/kota, NUSA TENGGARA TIMUR)*	*Dana Perimbangan*				*1*		
		Pemberian Penghargaan bagi Organisasi Keolahragaan Berprestasi						250.000.000,00		Dana Perimbangan						- Dinas Kepemudaan dan Olahraga
			terlaksananya Pemberian Penghargaan bagi Organisasi Keolahragaan Berprestasi (paket)				*1*		*(22kab/kota, NUSA TENGGARA TIMUR)*	*Dana Perimbangan*				*1*		
4.	**2.19.2-19.0-0.0-0.01.04**	**PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN**						**530.000.000,00**			**Ya**	**Ya**			**0,00**	**Dinas Kepemudaan dan Olahraga**
			Cakupan Pembinaan terhadap organisasi kepramukaan binaan Kwartir Daerah dan Kwartir Cabang setiap tahun (23 Kwartir Daerah dan Kwartir Cabang)				***100***			***Dana Perimbangan***						
	2.19.2-19.0-0.0-0.01.04.1.01	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan						530.000.000,00		Dana Perimbangan	Tidak	Tidak				- Dinas Kepemudaan dan Olahraga
			Terlaksananya Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan (%)				*100*		*(22 Kab/Kota, NUSA TENGGARA TIMUR)*	*Dana Perimbangan*				*100*		
		Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Provinsi						530.000.000,00		Dana Perimbangan						- Dinas Kepemudaan dan Olahraga
			terlaksananya Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Provinsi (paket)				*1*		*(22kab/kota, NUSA TENGGARA TIMUR)*	*Dana Perimbangan*				*1*		
	2.20	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK**						**104.109.763,00**							**0,00**	
1.	**2.20.2-16.0-0.0-0.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL**						**104.109.763,00**			**Ya**	**Ya**			**0,00**	**Dinas Komunikasi dan Informatika**
			Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Data Statistik Sektoral untuk Perencanaan Pembangunan Sektoral (%)				***100***			***Dana Perimbangan***						
			Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Data Statistik Sektoral untukEvaluasi Hasil Pembangunan Sektoral (%)				***100***			***Dana Perimbangan***						
	2.20.2-16.0-0.0-0.01.02.1.01	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Provinsi						104.109.763,00			Tidak	Tidak				- Dinas Komunikasi dan Informatika
			Terlaksananya Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Provinsi (%)				*100*		*(22 kab/kota, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*100*		

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode RPJMD	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2020	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RKPD TAHUN 2021	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2023		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2022	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral						48.209.763,00							-	Dinas Komunikasi dan Informatika
			terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral (Paket)				1		(22 kabupaten/kota, Luar Wilayah)					1		
		Membangun Metadata Statistik Sektoral						46.000.000,00							-	Dinas Komunikasi dan Informatika
			terlaksananya Membangun Metadata Statistik Sektoral (Paket)				1		(22 kabupaten/kota, NUSA TENGGARA TIMUR)					1		
		Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral						9.900.000,00							-	Dinas Komunikasi dan Informatika
			Terlaksananya Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral (Paket)				1		(22 kabupaten/kota, NUSA TENGGARA TIMUR)					1		
	2.21	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN**						**270.000.000,00**							**0,00**	
1.	**2.21.2-16.0-0.0-0.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI**						**270.000.000,00**			**Ya**	**Ya**			**0,00**	**Dinas Komunikasi dan Informatika**
			Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Data Statistik Sektoral untuk Perencanaan Pembangunan Sektoral (%)				***100***									
			Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Data Statistik Sektoral untuk Evaluasi Hasil Pembangunan Sektoral (%)				***100***									
	2.21.2-16.0-0.0-0.01.02.1.01	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi						250.000.000,00		Dana Perimbangan	Tidak	Tidak			-	Dinas Komunikasi dan Informatika
		Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Provinsi Berbasis Elektronik dan Non Elektronik						100.000.000,00		Dana Perimbangan					-	Dinas Komunikasi dan Informatika
			Terlaksananya Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Provinsi Berbasis Elektronik dan Non Elektronik (Paket)				*1*		*(22 KABUPATEN/ KOTA, NUSA TENGGARA TIMUR)*	*Dana Perimbangan*				*1*		
		Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi						150.000.000,00		Dana Perimbangan					-	Dinas Komunikasi dan Informatika
			Terlaksananya Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi (Paket)				*1*		*(22 Kabupaten/kota, NUSA TENGGARA TIMUR)*	*Dana Perimbangan*				*1*		
	2.21.2-16.0-0.0-0.01.02.1.02	Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Provinsi						20.000.000,00		Dana Perimbangan	Tidak	Tidak			-	Dinas Komunikasi dan Informatika
		Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Provinsi						20.000.000,00		Dana Perimbangan					-	Dinas Komunikasi dan Informatika
			Terlaksananya Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Provinsi (Paket)				*1*		*(22 Kabupaten/kota, NUSA TENGGARA TIMUR)*	*Dana Perimbangan*				*1*		
	2.22	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN**						**19.440.700.000,00**							**0,00**	
1.	**2.22.1-1.2-22.0-0.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**						**5.443.700.000,00**			**Tidak**	**Tidak**			**0,00**	**Dinas Pendidikan dan Kebudayaan**

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode RPJMD	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2020	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RKPD TAHUN 2021	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2023		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2022	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran yang berkualitas (%)				***100***			***Dana Perimbangan***						
			Meningkatnya sarana dan prasarana (%)				***100***			***Dana Perimbangan***						
			Tercapainya penyusunan capaian kinerja ikhtisar realisasi kinerja dan keuangan (%)				***100***			***Dana Perimbangan***						
	2.22.1-1.2-22.0-0.02.01.1.01	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						63.300.000,00			Tidak	Tidak			-	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
			Terlaksanannya Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (%)				*100*		*(22 Kab/kota, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*100*		
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						20.000.000,00							-	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
			terlaksananya Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (paket)				*1*		*(UPT, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*1*		
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD						8.300.000,00							-	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
			Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (paket)				*1*		*(UPT, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*1*		
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD						10.000.000,00							-	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
			terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (paket)				*1*		*(UPT, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*1*		
		Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD						5.000.000,00							-	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
			terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD (paket)				*1*		*(UPT, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*1*		
		Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD						2.000.000,00							-	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
			terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD (paket)				*1*		*(UPT, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*1*		
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD						18.000.000,00							-	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
			terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (paket)				*1*		*(UPT, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*1*		
	2.22.1-1.2-22.0-0.02.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						27.000.000,00			Tidak	Tidak			-	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
			Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah (%)				*100*		*(22 kab/kota, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*100*		
		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD						27.000.000,00							-	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
			terlaksananya Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (paket)				*1*		*(UPT, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*1*		
	2.22.1-1.2-22.0-0.02.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah						9.000.000,00			Tidak	Tidak			-	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
			Terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah (%)				*100*		*(22 kab/kota, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*100*		

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode RPJMD	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2020	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RKPD TAHUN 2021	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2023		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2022	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD						2.000.000,00								- Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
			terlaksananya Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD (paket)				*1*		*(22 kab kota, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*1*		
		Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD						3.500.000,00								- Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
			terlaksananya Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD (paket)				*1*		*(UPT, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*1*		
		Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD						3.500.000,00								- Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
			terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (paket)				*1*		*(UPT, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*1*		
	2.22.1-1.2-22.0-0.02.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						23.500.000,00			Tidak	Tidak				- Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
			Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah (%)				*100*		*(22 kab/kota, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*100*		
		Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai						15.000.000,00								- Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
			terlaksananya Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai (paket)				*1*		*(UPT, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*1*		
		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya						3.500.000,00								- Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
			terlaksananya Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya (paket)				*1*		*(UPT, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*1*		
		Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian						3.000.000,00								- Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
			terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (paket)				*1*		*(UPT, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*1*		
		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi						2.000.000,00								- Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
			terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi (paket)				*1*		*(UPT, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*1*		
	2.22.1-1.2-22.0-0.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						212.400.000,00			Tidak	Tidak				- Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
			Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah (%)				*100*		*(22 kab/kota, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*100*		
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor						22.000.000,00								- Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
			terlaksananya Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor (paket)				*1*		*(UPT, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*1*		
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						18.000.000,00								- Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
			terlaksananya Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor (paket)				*1*		*(UPT, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*1*		
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor						3.000.000,00								- Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode RPJMD	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2020	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RKPD TAHUN 2021	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2023		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2022	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			terlaksananya Penyediaan Bahan Logistik Kantor (paket)				*1*		*(UPT, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*1*		
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						1.200.000,00								- Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
			terlaksananya Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan (paket)				*1*		*(UPT, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*1*		
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan						1.200.000,00								- Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
			terlaksananya Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan (paket)				*1*		*(UPT, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*1*		
		Penyediaan Bahan/Material						27.000.000,00								- Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
			terlaksananya Penyediaan Bahan/Material (paket)				*1*		*(UPT, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*1*		
		Fasilitasi Kunjungan Tamu						20.000.000,00								- Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
			terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu (paket)				*1*		*(UPT, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*1*		
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						120.000.000,00								- Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
			terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (paket)				*1*		*(UPT, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*1*		
	2.22.1-1.2-22.0-0.02.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						4.620.000.000,00			Tidak	Tidak				- Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
			Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (%)				*100*		*(22 kab/kota, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*100*		
		Pengadaan Mebel						200.000.000,00								- Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
			terlaksananya Pengadaan Mebel (paket)				*1*		*(UPT, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*1*		
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya						220.000.000,00								- Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
			terlaksananya Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya (paket)				*1*		*(UPT, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*1*		
		Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						4.200.000.000,00								- Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
			terlaksananya Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya (paket)				*1*		*(UPT, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*1*		
	2.22.1-1.2-22.0-0.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						213.500.000,00			Tidak	Tidak				- Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
			Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%)				*100*		*(22 kab/kota, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*100*		
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat						7.500.000,00								- Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
			terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat (paket)				*1*		*(UPT, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*1*		
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						200.000.000,00								- Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode RPJMD	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2020	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RKPD TAHUN 2021	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2023		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2022	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Terlaksananya Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik (paket)				*1*		*(22 Kabupaten Kota, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*1*		
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						6.000.000,00								- Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
			terlaksananya Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (paket)				*1*		*(UPT, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*1*		
	2.22.1-1.2-22.0-0.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						275.000.000,00			Tidak	Tidak				- Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
			Terlaksana Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%)				*100*		*(22 kab/kota, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*100*		
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						125.000.000,00								- Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
			terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya (paket)				*1*		*(UPT, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*1*		
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya						150.000.000,00								- Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
			terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya (paket)				*1*		*(UPT, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*1*		
2.	**2.22.1-1.2-22.0-0.02.02**	**PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN**						**7.627.000.000,00**			**Ya**	**Ya**			**0,00**	**Dinas Pendidikan dan Kebudayaan**
			Meningkatnya Persentase Warisan Nilai Budaya yang dilestarikan (Rumah Budaya Nusantara 5 unit; Warisan Budaya Tak Benda 20 unit, Bahasa Daerah 68 unit)				***49,46***									
	2.22.1-1.2-22.0-0.02.02.1.01	Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi						1.565.000.000,00			Tidak	Tidak				- Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
			Terlaksananya Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi (%)				*100*		*(22 kab/kota, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*100*		
		Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan						595.000.000,00								- Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
			terlaksananya Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan (paket)				*1*		*(UPT, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*1*		
		Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan						970.000.000,00								- Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
			terlaksananya Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan (paket)				*1*		*(UPT, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*1*		
	2.22.1-1.2-22.0-0.02.02.1.02	Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya Lintas Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi						3.960.000.000,00			Tidak	Tidak				- Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
			Terlaksananya Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya Lintas Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi (%)				*100*		*(22 kab/kota, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*100*		

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode RPJMD	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2020	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RKPD TAHUN 2021	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2023		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2022	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya						3.660.000.000,00							-	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
			terlaksananya Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya (paket)				*1*		*(UPT, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*1*		
		Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional						300.000.000,00							-	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
			terlaksananya Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional (paket)				*1*		*(UPT, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*1*		
	2.22.1-1.2-22.0-0.02.02.1.03	Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi						2.102.000.000,00			Tidak	Tidak			-	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
			Terlaksananya Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi (%)				*100*		*(22 kab/kota, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*100*		
		Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Lembaga Adat						745.000.000,00							-	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
			terlaksanana Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Lembaga Adat (paket)				*1*		*(UPT, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*1*		
		Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat						782.000.000,00							-	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
			Terlaksananya Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat (paket)				*1*		*(UPT, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*1*		
		Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembinaan Lembaga Adat						575.000.000,00							-	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
			terlaksananya Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembinaan Lembaga Adat (paket)				*1*		*(UPT, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*1*		
3.	**2.22.1-1.2-22.0-0.02.03**	**PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL**						**2.330.000.000,00**			**Ya**	**Ya**			**0,00**	**Dinas Pendidikan dan Kebudayaan**
			Cakupan Kesenian Tradisional Ikonik/Langka pada setiap daerah yang dilestarikan (%)				***8***									
			Cakupan Kesenian Tradisional Populer pada setiap daerah yang dikembangkan (%)				***8***									
	2.22.1-1.2-22.0-0.02.03.1.01	Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota						2.330.000.000,00		Dana Perimbangan	Tidak	Tidak			-	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
			Terlaksananya Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota (%)				*100*		*(22 kab/kota, NUSA TENGGARA TIMUR)*	*Dana Perimbangan*				*100*		
		Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional						400.000.000,00		Dana Perimbangan					-	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
			terlaksananya Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional (paket)				*1*		*(UPT, NUSA TENGGARA TIMUR)*	*Dana Perimbangan*				*1*		

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode RPJMD	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2020	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RKPD TAHUN 2021	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2023		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2022	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		Standardisasi dan Sertifikasi Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional sesuai dengan Kebutuhan dan Tuntutan						1.750.000.000,00							-	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
			terlaksananya Standardisasi dan Sertifikasi Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional sesuai dengan Kebutuhan dan Tuntutan (paket)				*1*		*(UPT, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*1*		
		Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional						180.000.000,00							-	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
			Terlaksananya Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional (paket)				*1*		*(UPT, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*1*		
4.	**2.22.1-1.2-22.0-0.02.04**	**PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH**						**200.000.000,00**			**Ya**	**Ya**			**0,00**	**Dinas Pendidikan dan Kebudayaan**
			Cakupan Sejarah Lokal dari setiap daerah yang dipublikasi (Sanggar Budaya 25 Unit) (%)				***38***									
	2.22.1-1.2-22.0-0.02.04.1.01	Pembinaan Sejarah Lokal Provinsi						200.000.000,00		Dana Perimbangan	Tidak	Tidak			-	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
			Terlaksananya Pembinaan Sejarah Lokal Provinsi (%)				*100*		*(22 kab/kota, NUSA TENGGARA TIMUR)*	*Dana Perimbangan*				*100*		
		Pemberdayaan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Provinsi						50.000.000,00		Dana Perimbangan					-	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
			terlaksananya Pemberdayaan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Provinsi (paket)				*1*		*(22 kab kota, NUSA TENGGARA TIMUR)*	*Dana Perimbangan*				*1*		
		Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembinaan Sejarah						50.000.000,00		Dana Perimbangan					-	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
			terlaksananya Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembinaan Sejarah (paket)				*1*		*(22 kab kota, NUSA TENGGARA TIMUR)*	*Dana Perimbangan*				*1*		
		Peningkatan Akses Masyarakat terhadap Data dan Informasi Sejarah						-							-	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
			terlaksananya Peningkatan Akses Masyarakat terhadap Data dan Informasi Sejarah (paket)				*1*		*(22 kab kota, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*1*		
		Fasilitasi Peningkatan Penulisan Sejarah Lokal						100.000.000,00		Dana Perimbangan					-	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
			terlaksana Fasilitasi Peningkatan Penulisan Sejarah Lokal (paket)				*1*		*(22 kab kota, NUSA TENGGARA TIMUR)*	*Dana Perimbangan*				*1*		
5.	**2.22.1-1.2-22.0-0.02.05**	**PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA**						**1.515.000.000,00**			**Ya**	**Ya**			**0,00**	**Dinas Pendidikan dan Kebudayaan**
			Cakupan Cagar Budaya setiap daerah yang dilestarikan (Cagar Budaya 2 buah, Desa Adat 25 buah) (%)				***26***			***Dana Perimbangan***						
	2.22.1-1.2-22.0-0.02.05.1.01	Penetapan Cagar Budaya Peringkat Provinsi						365.000.000,00			Tidak	Tidak			-	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
			Terlaksananya Penetapan Cagar Budaya Peringkat Provinsi (%)				*100*		*(22 kab/kota, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*100*		
		Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya						365.000.000,00							-	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
			terlaksananya Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya (paket)				*1*		*(22 kab kota, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*1*		

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode RPJMD	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2020	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RKPD TAHUN 2021	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2023		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2022	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.22.1-1.2-22.0-0.02.05.1.02	Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Provinsi						1.150.000.000,00		Dana Perimbangan	Tidak	Tidak			-	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
			Terlaksananya Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Provinsi (%)				*100*		*(22 kab/kota, NUSA TENGGARA TIMUR)*	*Dana Perimbangan*				*100*		
		Pelindungan Cagar Budaya						950.000.000,00		Dana Perimbangan					-	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
			Terlaksananya Pelindungan Cagar Budaya (paket)				*1*		*(22 kab kota, NUSA TENGGARA TIMUR)*	*Dana Perimbangan*				*1*		
		Pencegahan dan Penanggulangan dari Kerusakan, Kehancuran, atau Kemusnahan Cagar Budaya						50.000.000,00		Dana Perimbangan					-	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
			terlaksananya Pencegahan dan Penanggulangan dari Kerusakan, Kehancuran, atau Kemusnahan Cagar Budaya (paket)				*1*		*(22 kab kota, NUSA TENGGARA TIMUR)*	*Dana Perimbangan*				*1*		
		Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Tenaga Pelestari Cagar Budaya						150.000.000,00		Dana Perimbangan					-	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
			terlaksananya Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Tenaga Pelestari Cagar Budaya (paket)				*1*		*(22 kab/kota, NUSA TENGGARA TIMUR)*	*Dana Perimbangan*				*1*		
	2.22.1-1.2-22.0-0.02.05.1.03	Penerbitan Izin Membawa Cagar Budaya Ke Luar Daerah Provinsi						-			Tidak	Tidak			-	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
			Terlaksananya Penerbitan Izin Membawa Cagar Budaya Ke Luar Daerah Provinsi (%)				*100*		*(22 kab/kota, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*100*		
		Penerbitan Izin membawa Cagar Budaya Ke Luar Daerah Provinsi						-							-	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
			terlaksananya Penerbitan Izin membawa Cagar Budaya Ke Luar Daerah Provinsi (paket)				*1*		*(22 kab kota, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*1*		
6.	**2.22.1-1.2-22.0-0.02.06**	**PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN**						**2.325.000.000,00**			**Ya**	**Ya**			**0,00**	**Dinas Pendidikan dan Kebudayaan**
			Meningkatnya Akses masyarakat terhadap Museum (4 unit) (Total per tahun 20.000 orang) (%)				***80***									
	2.22.1-1.2-22.0-0.02.06.1.01	Pengelolaan Museum Provinsi						2.325.000.000,00			Tidak	Tidak			-	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
			Terlaksananya Pengelolaan Museum Provinsi (%)				*100*		*(22 kab/kota, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*100*		
		Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfataan Koleksi Secara Terpadu						1.775.000.000,00							-	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
			terlaksananya Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfataan Koleksi Secara Terpadu (paket)				*1*		*(22 kab kota, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*1*		
		Pembinaan dan Peningkatan Mutu dan Kapasitas Sumber Daya Manusia Permuseuman						100.000.000,00							-	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
			terlaksananya Pembinaan dan Peningkatan Mutu dan Kapasitas Sumber Daya Manusia Permuseuman (paket)				*1*		*(22 kab kota, NUSA TENGGARA TIMUR)*					*1*		
		Peningkatan Pelayanan dan Akses Masyarakat terhadap Museum						400.000.000,00							-	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan